BUMN
Hadir untuk negeri

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Laporan Tahunan | 2016 | *Annual Report*

Kerja Nyata Bersama UMKMK,
Memajukan Ekonomi Kerakyatan

Concrete Work Together With MSMEs & Cooperatives,
to Driving The People Based Economy Forward

PERUM JAMKRINDO

Tentang Tema
About Theme

Kerja Nyata Bersama UMKMK,

Memajukan Ekonomi Kerakyatan

Concrete Work Together With MSMEs & Cooperatives, to Driving The People Based Economy Forward

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (MSMEs & Cooperatives) activities, which play an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be given because many MSMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

With the guarantee, MSMEs & Cooperatives can still utilize banking credit, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with MSMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2015

Membangun UMKMK & Koperasi yang Kuat untuk Indonesia Sejahtera

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo ingin memberikan kontribusi nyata untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada segmen UMKMK dan Koperasi.

As a state-owned enterprise, Perum Jamkrindo has a desire to make a real contribution to the success of national economic development, especially in the segment of MSMEs and Cooperatives.

2014

UMKMK Untuk Indonesia Hebat

UMKMK merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Perum Jamkrindo berupaya untuk terus mendukung perkembangan segmen UMKMK untuk mewujudkan Indonesia yang hebat dari aspek ekonomi.

MSMEs and Cooperatives is the main pillar of national economic growth. Perum Jamkrindo strives to continue to support the development of MSMEs and Cooperatives segment to create a great Indonesia from the economic aspect.

Daftar Isi
Table of Contents

2 Tentang Tema
About Theme
3 Kesinambungan Tema
Theme Continuity
4 Daftar Isi
Table of Contents

IKHTISAR KEUANGAN DAN OPERASIONAL
FINANCIAL AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS
8 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
14 Jalinan Kerjasama
Cooperation
36 Ikhtisar Saham
Share Highlights
36 Ikhtisar Surat Berharga
Securities Highlights
37 Peristiwa Penting
2016 Event Highlights
40 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards And Certifications

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT
44 Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report
50 Laporan Direksi
Board of Directors Report
62 Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016
62 Perum Jamkrindo
Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2016 Annual Report of Perum Jamkrindo

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
67 Informasi Umum Tentang Jamkrindo
General Information About Jamkrindo
68 Riwayat Singkat Jamkrindo
Jamkrindo Brief History
70 Bidang Usaha
Line of Business
72 Produk Usaha Penjaminan
Guarantee Business Products
75 Kompetensi Inti
Core Competence
76 Struktur Organisasi
Organizational Structure
78 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture
80 Makna Branding Logo
Meaning of Branding Logo
81 Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile
87 Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Board of Supervisors Profile
90 Profil Direksi
Board of Directors Profile
96 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile
104 Demografi Karyawan
Employees Demographic
105 Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal
Shareholders/Share Owners Composition
107 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)
List of Subsidiaries and Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)
109 Struktur Grup
Group Structure
110 Kronologis Penerbitan Saham
Chronology of Share Listing
110 Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing
111 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institution and Profession
112 Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/ Representative Offices
118 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company Website
119 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTION
126 Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development
144 Teknologi Informasi
Information Technology

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
152 Tinjauan Industri
Industry Overview
155 Tinjauan Bisnis
Business Review
174 Tinjauan Keuangan
Financial Review

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
202 Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation
210 *Roadmap* Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Roadmap of Good Corporate Governance Implementation
214 Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation
270 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance
354 Manajemen Risiko
Risk Management
368 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
372 Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
373 Perkara Penting
Significant Cases
374 Praktik Bad Governance
Bad Governance Practice
376 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Corporate Data
380 Kode Etik
Code of Ethics
392 Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption Policies
393 Kebijakan Anti Korupsi
Kebijakan Anti Korupsi
394 Whistleblowing System
Whistleblowing System
400 Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi
Diversity of The Composition of the Board of Supervisors and Directors
402 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrators' Wealth Report
404 Perpajakan
Taxation
405 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
410 Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bases of The Implementation of Corporate Social Responsibility
414 Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Practitioner of Corporate Social Responsibility Programs
416 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Concerning The Environment
420 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety
425 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development
438 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT
542 Refrensi Penyusunan Laporan
Annual Report References

Ikhtisar Keuangan Dan Operasional

Financial and Operational Highlights

Jamkrindo
Peta Operasional
Operational Map
Jamkrindo
KANTOR CABANG
80%

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Neraca
dalam jutaan Rupiah

Balance Sheet
in million Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	*Description*
ASET				*ASSETS*
Kas dan Setara Kas	4.948.831	5.594.822	5.723.816	*Cash and Cash Equivalent*
Surat Berharga	2.700.063	2.925.022	3.209.124	*Securities*
Piutang IJP	1.075.355	1.442.622	2.347.025	*IJP Receivables*
Piutang Penjaminan Ulang	69.937	97.538	112.346	*Re-guarantee Receivables*
Piutang yang diberikan	973	955	955	*Loans*
Piutang lain-lain	132.732	58.861	81.728	*Other Receivables*
Pajak Bayar Dimuka	25.404	33.878	0	*Prepaid Taxes*
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	565.241	807.741	991.153	*Prepaid Premiums and Fee*
Beban dibayar di muka	7.220	13.903	25.020	*Prepaid Expenses*
Properti Investasi	14.590			*Investment Properties*
Aset Tetap	52.594	396.123	441.995	*Fixed Assets*
Aset Pajak Tangguhan	128.607	168.754	174.614	*Deferred Tax Assets*
Aset lain-lain	57.647	102.774	300.641	*Other Assets*
Jumlah Aset	10.029.153	11.642.993	13.408.418	*Total Assets*
LIABILITAS				*LIABILITIES*
Utang Klaim	10.197	13.067	11.650	*Claim Debts*
Utang Pajak	3.334	29.218	72.812	*Tax Debts*
Cadangan Klaim	396.377	321.871	404.959	*Claim Reserves*
Utang Penjaminan Ulang	35.999	63.443	66.604	*Co-Guarantee Debts*
Pendapatan Ditangguhkan	1.019.704	1.615.781	2.346.246	*Deferred Revenues*
Utang lain-lain	137.348	105.288	178.409	*Other Debts*
Liabilitas Imbalan Kerja	21.843	18.124	28.168	*Employment Allowance Liabilities*
Jumlah Liabilitas	1.624.802	2.166.792	3.108.849	*Total Liabilities*
EKUITAS				*EQUITY*
Penyertaan Modal Pemerintah	6.638.733	7.138.733	7.638.733	*Government Capital Investment*
Cadangan-cadangan	1.130.951	1.515.215	1.828.847	*Reserves*
Komponen Ekuitas Lainnya	(28.284)	196.885	139.930	*Other Equity Components*
Kepentingan Non Pengendali	13	13	13	*Non-Controlling Interest*
Saldo Laba	662.951	625.354	692.045	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas	8.404.351	9.476.201	10.299.569	*Total Equity*

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Kas
Cash
(dalam miliar Rp/in billion Rp)

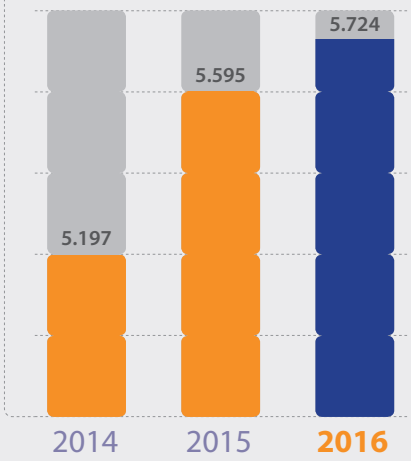

Piutang Imbal Jasa Penjaminan
Guarantee Fee Receivables
(dalam miliar Rp/in billion Rp)

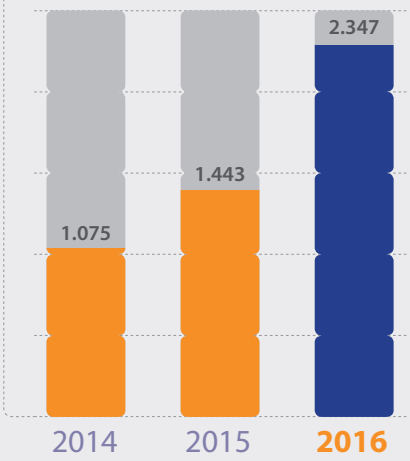

Surat Berharga
Securities
(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

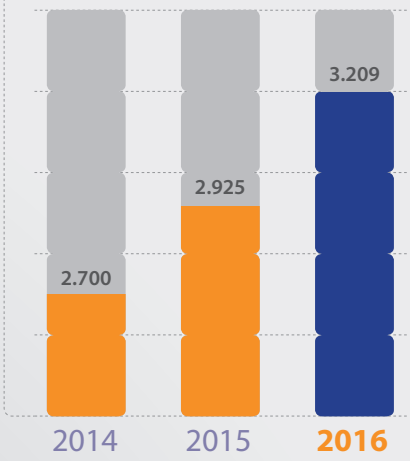

Total Aset Perusahaan tahun 2016 Rp13,4 triliun, Naik 15,16 % dari Total Aset tahun 2015 sebesar Rp11,6 triliun

Company's Total Assets in 2016 was Rp13.4 trillion, Increased by 15.16 % from, Total Assets in 2015 of Rp11.6 trillion

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Total Liabilitas
Total Liabilities

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

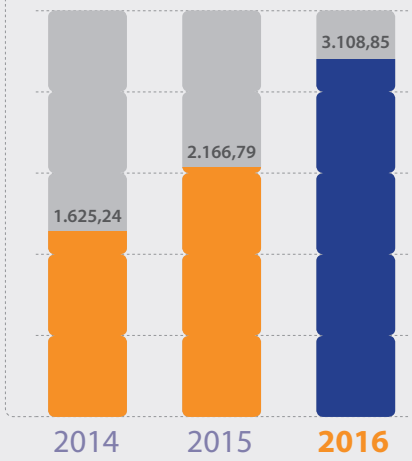

Liabilitas Imbalan Kerja
Employment Allowance Liabilities

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

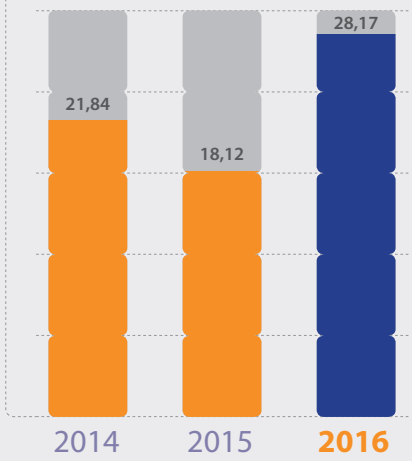

Pendapatan Ditangguhkan
Deferred Revenues

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

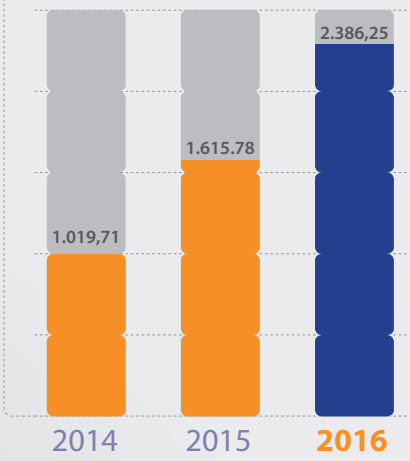

Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2016 Rp3,1 triliun, mengalami peningkatan 43,48% dari Jumlah Liabilitas tahun 2015 Rp2,1 triliun

Company's Total Liabilities in 2016 was Rp3.1 trillion, increased by 43.48% from Total Liabilities in 2015 of Rp2.1 trillion

Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp10,3 triliun, Naik 8,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,4 triliun Jumlah Ekuitas Perusahaan naik secara konsisten dalam 3 tahun terakhir.

Company's Total Equity in 2016 was Rp10.3 trillion, Increased by 8.69% from the previous year of Rp9.4 trillion, Company's Total Equity has increased consistently in the last 3 years.

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Laporan Laba Rugi
Profit (Loss) Statement

dalam jutaan Rupiah/ *in million Rupiah*

Uraian *Description*	2014	2015	2016
Pendapatan Usaha *Operating Income*	1.442.560	1.277.488	1.588.441
Beban Klaim *Claim Expenses*	(1.021.060)	(922.662)	(871.583)
Penjaminan Bersih *Net Guarantee*	421.500	354.825	716.857
Pendapatan Investasi Bersih *Net Investment Income*	526.599	599.525	587.678
Pendapatan Lain-lain Bersih *Net Other Income*	222.485	307.230	294.070
Beban Usaha *Operational Expenses*	(325.796)	(470.528)	(657.151)
Laba Sebelum Pajak *Profit Before Tax*	844.788	791.053	941.454
Laba Bersih *Net Profit*	662.947	625.354	692.045
Laba Komprehensif *Comprehensive Profit*	715.407	845.163	573.335

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Pendapatan Usaha
Operating Income

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

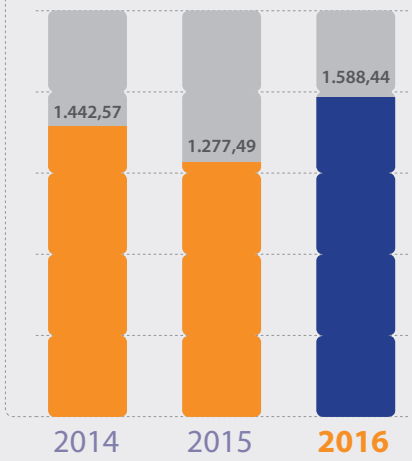

Penjaminan Bersih
Net Guarantee

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

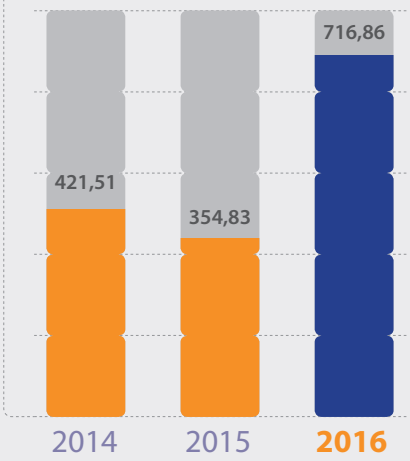

Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax

(dalam miliar Rp/*in billion Rp*)

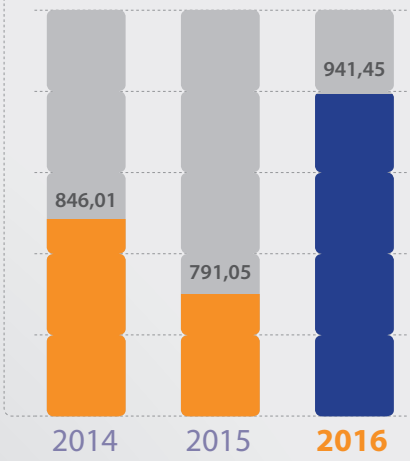

Laba Tahun Berjalan tahun 2016 sebesar Rp692 miliar, naik 10,66% dari Laba Tahun Berjalan tahun 2015 Rp625 miliar

Profit for the Year of 2016 was Rp692 billion, increased by 10.66% from Profit for the Year of 2015 of Rp625 billion

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Uraian *Description*	2014	2015	2016
Rasio Likuiditas *Liquidity Ratio*			
Current ratio	1351,10%	755,22%	713,27%
Rasio Solvabilitas *Solvability Ratio*			
Hutang terhadap Ekuitas *Debt to Equity*	19,34%	22,87%	30,18%
Rasio Rentabilitas *Profitability Ratio*			
Margin Laba Kotor *Gross Profit Margin*	31,59%	25,87%	29,75%
Margin Laba Penjualan *Profit Margin On Sales*	42,86%	42,14%	43,26%
Return on assets	9,23%	7,30%	7,52%
Return on Equity	7,89%	6,60%	6,72%
Rasio Aktivitas *Activity Ratio*			
Perputaran Aset *Assets Turnover*	21,54 kali	17,32 kali	17,37 kali
Jumlah Investasi pada entitas assosiasi *Total Investments in associates*	531.363.555.447	599.525.302.215	587.678.040.947

Jalinan Kerjasama
Cooperation

Perjanjian Penjaminan Kredit/ Pembiayaan/ Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Dengan Mitra Kerja 2016

Perum Jamkrindo Loan/Financing Agreement With Business Partners In 2016

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
1	01/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD BENGKULU	PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA *MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	15 Januari 2016 *January 15, 2016*	15 Januari 2018 *January 15, 2018*
2	02/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD BENGKULU	PENJAMINAN BANK GARANSI *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE*	15 Januari 2016 *January 15, 2016*	15 Januari 2018 *January 15, 2018*
3	03/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD JATIM	PENJAMINAN KREDIT KONSUMTIF *CONSUMPTIVE CREDIT GUARANTEE*	22 Januari 2016 *January 22, 2016*	22 Januari 2019 *January 22, 2019*
4	04/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD JATIM	PENJAMINAN KREDIT MIKRO DAN KECIL *MICRO AND SMALL CREDIT GUARANTEE*	22 Januari 2016 *January 22, 2016*	22 Januari 2019 *January 22, 2019*
5	05/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD JATIM	KONTRA BANK GARANSI *COUNTER OF BANK GUARANTEE*	22 Januari 2016 *January 22, 2016*	22 Januari 2019 *January 22, 2019*
6	06/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD JATIM	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI POLA KEPPRES *KEPPRES PATTERN CONSTRUCTION CREDIT GUARANTEE*	22 Januari 2016 *January 22, 2016*	22 Januari 2019 *January 22, 2019*
7	07/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BPD JATIM	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI STANBY LOAN *STANDBY LOAN CONSTRUCTION CREDIT GUARANTEE*	22 Januari 2016 *January 22, 2016*	22 Januari 2019 *January 22, 2019*
8	08/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH	ADDENDUM PENJAMINAN PEMBIAYAAN BERSAMA *ADDENDUM ON CO-FINANCING GUARANTEE*	23 Januari 2016 *January 23, 2016*	10 Agustus 2018 *August 10, 2018*
9	09/Jamkrindo/OP-01/I/2016	PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN	PENJAMINAN MULTIGUNA/ MULTIJASA *MULTIPURPOSE/MULTISERVICE GUARANTEE*	27 Januari 2016 *January 27, 2016*	27 Januari 2019 *January 27, 2019*
10	10/Jamkrindo/OP-01/II/2016	PT BRI	PENJAMINAN KUPEDES RAKYAT *KUPEDES RAKYAT GUARANTEE*	12 Februari 2016 *February 12, 2016*	02 Januari 2017 *January 02, 2017*
11	11/Jamkrindo/OP-01/II/2016	PT BUKOPIN	PENJAMINAN KREDIT SERBAGUNA PNS/CPNS *PNS/CPNS MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	17 Februari 2016 *February 17, 2016*	17 Februari 2019 *February 17, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
12	12/Jamkrindo/OP-01/II/2016	PT BUKOPIN	PENJAMINAN KREDIT UMUM PRODUKTIF DALAM RANGKA OPTIMALISASI ASET *PRODUCTIVE GENERAL CREDIT GUARANTEE FOR ASSETS OPTMIZATION*	29 Februari 2016 *February 29, 2016*	28 Februari 2017 *February 28, 2017*
13	13/Jamkrindo/OP-01/III/2016	PT BRI	ADDENDUM III KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *ADDENDUM III FOR MICRO CREDIT PROGRAM (KUR)*	10 Maret 2016 *March 10, 2016*	13 Agustus 2016 *August 13, 2016*
14	14/Jamkrindo/OP-01/III/2016	PT. BANK ARTHAGRAHA INTERNASIONAL TBK	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE COOPERATION AGREEMENT*	15 Maret 2016 *March 15, 2016*	15 Maret 2019 *March 15, 2019*
15	15/Jamkrindo/OP-01/III/2016	PT BANK MANDIRI	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN KREDIT TANPA AGUNAN *COOPERATION AGREEMENT ON CREDIT WITHOUT COLLATERAL GUARANTEE*	18 Maret 2016 *March 18, 2016*	19 Maret 2017 *March 19, 2017*
16	16/Jamkrindo/OP-01/III/2016	PT BRI	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT USAHA RAKYAT TKI *ADDENDUM ON KUR TKI COOPERATION AGREEMENT*	22 Maret 2016 *March 22, 2016*	13 Agustus 2016 *August 13, 2016*
17	18/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BRI	PENJAMINAN KUPEDES RAKYAT TKI *KUPEDES RAKYAT TKI GUARANTEE*	01 April 2016 *April 01, 2016*	02 Januari 2017 *January 02, 2017*
18	19/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BANK MANDIRI	CO GUARANTEE KTA MANDIRI DENGAN AXA MANDIRI *CO-GUARANTEE OF KTA MANDIRI WITH AXA MANDIRI*	01 April 2016 *April 01, 2016*	01 April 2017 *April 01, 2017*
19	21/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BPD RIAU KEPRI	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT KOMERSIAL *COMMERCIAL CREDIT COOPERATION AGREEMENT*	22 April 2016 *April 22, 2016*	22 April 2019 *April 22, 2019*
20	22/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BPD RIAU KEPRI	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE COOPERATION AGREEMENT*	22 April 2016 *April 22, 2016*	22 April 2019 *April 22, 2019*
21	23/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BPD RIAU KEPRI	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT USAHA RAKYAT *KUR COOPERATION AGREEMENT*	22 April 2016 *April 22, 2016*	22 April 2019 *April 22, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
22	24/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BANK JATENG	MOU PEMBERIAN KREDIT DAN PENJAMINAN UNTUK PELAKU USAHA *MOU ON CREDIT DISBURSEMENT AND GUARANTEE FOR BUSINESS PLAYER*	27 April 2016 *April 27, 2016*	27 April 2019 *April 27, 2019*
23	25/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BANK MANDIRI TASPEN POS	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT PENSIUNAN *PENSION CREDIT COOPERATION AGREEMENT*	29 April 2016 *April 29, 2016*	29 April 2019 *April 29, 2019*
24	26/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT BANK MANDIRI TASPEN POS	PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT UMUM *GENERAL CREDIT COOPERATION AGREEMENT*	29 April 2016 *April 29, 2016*	29 April 2019 *April 29, 2019*
25	27/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA & REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA	PERJANJIAN KERJASAMA PERTANGGUNGAN ULANG (RE ASURANSI) UNTUK PRODUK-PRODUK PENJAMINAN/KAFALAH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA *COOPERATION AGREEMENT ON RE-INSURANCE FOR GUARANTEE/ KAFALAH PRODUCTS OF PERUM JAMKRINDO*	29 April 2016 *April 29, 2016*	31 Desember 2016 *December 31, 2016*
26	30/Jamkrindo/OP-01/IV/2016	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN	PERJANJIAN KERJASAMA PENUTUPAN ASURANSI JIWA KREDIT BAGI DEBITUR BANK/ LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA PENERIMA KREDIT/PEMBIAYAAN MULTIGUNA *COOPERATION AGREEMENT ON CLOSURE OF LIFE INSURANCE CREDIT FOR BENEFICIARY OF MULTIPURPOSE CREDIT/ FINANCING*	29 April 2016 *April 29, 2016*	31 Desember 2016 *December 31, 2016*
27	31/Jamkrindo/OP-01/V/2016	PT BTPN	PERJANJIAN KERJASAMA KUR ONLINE *KUR ONLINE COOPERATION AGREEMENT*	09 Mei 2016 *May 09, 2016*	09 Mei 2019 *May 09, 2019*
28	32/Jamkrindo/OP-01/V/2016	PT BTPN	PERJANJIAN KERJASAMA KUR *KUR COOPERATION AGREEMENT*	09 Mei 2016 *May 09, 2016*	09 Mei 2019 *May 09, 2019*
29	33/Jamkrindo/OP-01/V/2016	PT BPD Bali	PERJANJIAN KERJASAMA KUR *KUR COOPERATION AGREEMENT*	09 Mei 2016 *May 09, 2016*	09 Mei 2019 *May 09, 2019*
30	37/Jamkrindo/OP-01/V/2016	PT Bank Artha Graha International	PERJANJIAN KERJASAMA KUR *KUR COOPERATION AGREEMENT*	16 Mei 2016 *May 16, 2016*	16 Mei 2019 *May 16, 2019*
31	38/Jamkrindo/OP-01/V/2016	PT Bank Jateng	PERJANJIAN KERJASAMA KUR *KUR COOPERATION AGREEMENT*	20 Mei 2016 *May 20, 2016*	20 Mei 2019 *May 20, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
32	39/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BRI	PERJANJIAN KERJASAMA BRIGUNA RESIKO PHK *BRIGUNA LAYOFFS RISK COOPERATION AGREEMENT*	01 Juni 2016 *June 01, 2016*	15 April 2017 *April 15, 2017*
33	40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT Bank Mandiri	PERJANJIAN KERJASAMA ADDENDUM KUR *ADDENDUM ON KUR COOPERATION AGREEMENT*	06 Juni 2016 *June 06, 2016*	26 Oktober 2018 *October 26, 2018*
34	41/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BANK BPD SULSELBAR	MOU DENGAN BPD SULSELBAR *MOU WITH BPD SULSELBAR*	08 Juni 2016 *June 08, 2016*	08 Juni 2017 *June 08, 2017*
35	42/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BANK BPD SULSELBAR	PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA *MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	08 Juni 2016 *June 08, 2016*	08 Juni 2017 *June 08, 2017*
36	43/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BANK BPD SULSELBAR	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA *CONSTRUCTION AND GOODS/ SERVICES PROCUREMENT CREDIT GUARANTEE*	08 Juni 2016 *June 08, 2016*	08 Juni 2017 *June 08, 2017*
37	44/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BANK BPD SULSELBAR	PENJAMINAN KREDIT PRODUKTIF *PRODUCTIVE CREDIT GUARANTEE*	08 Juni 2016 *June 08, 2016*	08 Juni 2017 *June 08, 2017*
38	45/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD NTB	PENJAMINAN KUR *KUR GUARANTEE*	09 Juni 2016 *June 09, 2016*	09 Juni 2019 *June 09, 2019*
39	47/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD KALSEL	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ONLINE *KUR ONLINE CREDIT GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	26 Juni 2019 *June 26, 2019*
40	48/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD NTB	PENJAMINAN KREDIT SERBA GUNA *MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	26 Juni 2019 *June 26, 2019*
41	49/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD NTB	PENJAMINAN KREDIT MIKRO *MICRO CREDIT GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	26 Juni 2019 *June 26, 2019*
42	50/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD NTB	PENJAMINAN KREDIT UMUM *GENERAL CREDIT GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	26 Juni 2019 *June 26, 2019*
43	51/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD NTB	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA *CONSTRUCTION AND GOODS/ SERVICES PROCUREMENT CREDIT GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	26 Juni 2019 *June 26, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
44	52/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BTN	ADDENDUM II PENJAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA *ADDENDUM II ON CREDIT GUARANTEE FOR HOUSING LOAN (KPR) SEJAHTERA*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	
45	53/Jamkrindo/OP-01/VI/2016	PT BPD KALTIM	PENJAMINAN ONLINE *ONLINE GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	27 Juni 2019 *June 27, 2019*
46	54/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	BANK SINARMAS	ADDENDUM PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PENENMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) *ADDENDUM ON KUR TKI CREDIT GUARANTEE*	14 Juli 2016 *July 14, 2016*	
47	55/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT BPD DIY	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *KUR CREDIT GUARANTEE*	15 Juli 2016 *July 15, 2016*	15 Juli 2019 *July 15, 2019*
48	56/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT MAYBANK Tbk	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *KUR CREDIT GUARANTEE*	18 Juli 2016 *July 18, 2016*	18 Juli 2019 *July 18, 2019*
49	57/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT BPD KALSEL	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *KUR CREDIT GUARANTEE*	20 Juli 2016 *July 20, 2016*	20 Juli 2019 *July 20, 2019*
50	58/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT BPD SULSELBAR	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ONLINE *KUR ONLINE CREDIT GUARANTEE*	26 Juli 2016 *July 26, 2016*	26 Juli 2019 *July 26, 2019*
51	59/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT BPD SULSELBAR	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *KUR CREDIT GUARANTEE*	26 Juli 2016 *July 26, 2016*	26 Juli 2019 *July 26, 2019*
52	61/Jamkrindo/OP-01/VIII/2016	PT BANK WOORI SAUDARA	MOU PENJAMINAN KREDIT *MOU ON CREDIT GUARANTEE*	11 Agustus 2016 *August 11, 2016*	11 Agustus 2019 *August 11, 2019*
53	63/Jamkrindo/OP-01/VIII/2016	PT BANK OOCBC NISP	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ONLINE *KUR ONLINE CREDIT GUARANTEE*	15 Agustus 2016 *August 15, 2016*	15 Agustus 2019 *August 15, 2019*
54	64/Jamkrindo/OP-01/VIII/2016	PT BANK OOCBC NISP	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) *KUR CREDIT GUARANTEE*	15 Agustus 2016 *August 15, 2016*	15 Agustus 2019 *August 15, 2019*
55	65/Jamkrindo/OP-01/VIII/2016	PT BPD SUMSELBABEL	PENJAMINAN KREDIT SERBA GUNA DAN KREDIT PENSIUN *MULTIPURPOSE AND PENSION CREDIT GUARANTEE*	18 Agustus 2016 *August 18, 2016*	18 Agustus 2019 *August 18, 2019*
56	66/Jamkrindo/OP-01/VIII/2016	PT BPD BENGKULU	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ONLINE *KUR ONLINE CREDIT GUARANTEE*	25 Agustus 2016 *August 25, 2016*	25 Agustus 2019 *August 25, 2019*
57	67/Jamkrindo/OP-01/VII/2016	PT BANK BANTEN	MOU KERJASAMA PENJAMINAN *MOU ON GUARANTEE COOPERATION*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	30 Agustus 2017 *August 30, 2017*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
58	68/Jamkrindo/OP-01/ VIII/2016	PT BANK BANTEN	PENJAMINAN KREDIT PEGAWAI *EMPLOYEE CREDIT GUARANTEE*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	29 Agustus 2019 *August 29, 2019*
59	69/Jamkrindo/OP-01/ VIII/2016	PT BANK BANTEN	PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA BERAGUNAN PROPERTI *PROPERTY-SECURED MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	29 Agustus 2019 *August 29, 2019*
60	70/Jamkrindo/OP-01/ VIII/2016	PT BANK BANTEN	PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI *CONSTRUCTION WORKING CAPITAL CREDIT GUARANTEE*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	29 Agustus 2019 *August 29, 2019*
61	71/Jamkrindo/OP-01/ VIII/2016	PT BANK BANTEN	NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA TENTANG JASA LAYANAN PERBANKAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON BANKING SERVICES*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	30 Agustus 2026 *August 30, 2026*
62	72/Jamkrindo/OP-01/ VIII/2016	PT BNI	ADDENDUM I PKS KUR BNI *ADDENDUM I ON KUR BNI COOPERATION AGREEMENT*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	12 Agustus 2018 *August 12, 2018*
63	73/Jamkrindo/OP-01/ IX/2016	PT BPD NTT	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN ONLINE *ONLINE GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	6 September 2016 *September 6, 2016*	5 September 2019 *September 5, 2019*
64	74/Jamkrindo/OP-01/ IX/2016	PT BPD NTT	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG/JASA *COOPERATION AGREEMENT OF CONSTRUCTION AND GOODS/ SERVICE PROCUREMENT GUARANTEE*	6 September 2016 *September 6, 2016*	5 September 2019 *September 5, 2019*
65	75/Jamkrindo/OP-01/ IX/2016	PT BPD NTT	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN KONSUMTIF *CONSUMPTIVE GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	6 September 2016 *September 6, 2016*	5 September 2019 *September 5, 2019*
66	76/Jamkrindo/OP-01/ IX/2016	PT BPD NTT	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN PRODUKTIF *PRODUCTIVE GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	6 September 2016 *September 6, 2016*	5 September 2019 *September 5, 2019*
67	77/Jamkrindo/OP-01/ IX/2016	PT BPD NTT	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN BANK GARANSI *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	09 Juni 2016 *June 09, 2016*	09 Juni 2019 *June 09, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
68	80/Jamkrindo/OP-01/IX/2016	PT AXA MANDIRI	PENUTUPAN ASURANSI JIWA KREDIT ATAS PENJAMINAN BERSAMA KREDIT TANPA AGUNAN BAGI DEBITUR PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk *CLOSURE OF LIFE INSURANCE CREDIT ON CO-GUARANTEE FOR NON-COLLATERAL CREDIT FOR DEBTOR OF PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk*	05 September 2016 *September 05, 2016*	17 Maret 2017 *March 17, 2017*
69	81/Jamkrindo/OP-01/IX/2016	PT BPD JAMBI	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN ONLINE *ONLINE GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	19 September 2016 *September 19, 2016*	19 September 2019 *September 19, 2019*
70	82/Jamkrindo/OP-01/IX/2016	PT BANK SINARMAS	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	20 September 2016 *September 20, 2016*	20 September 2019 *September 20, 2019*
71	85/Jamkrindo/OP-01/X/2016	PT BPD JAMBI	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	19 Oktober 2016 *October 19, 2016*	19 Oktober 2019 *October 19, 2019*
72	86/Jamkrindo/OP-01/X/2016	PT BPD LAMPUNG	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE GUARANTEE*	31 Oktober 2016 *October 31, 2016*	31 Oktober 2019 *October 31, 2019*
73	87/Jamkrindo/OP-01/X/2016	PT BPD LAMPUNG	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	31 Oktober 2016 *October 31, 2016*	31 Oktober 2019 *October 31, 2019*
74	89/Jamkrindo/OP-01/X/2016	PT SAFE INSURANCE BROKER	PROGRAM PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN KREDIT KONSUMER *CLOSURE OF INSURANCE AND CONSUMER CREDIT GUARANTEE*	31 Oktober 2016 *October 31, 2016*	31 Oktober 2019 *October 31, 2019*
75	90/Jamkrindo/OP-01/XI/2016	PT BPD LAMPUNG	PENJAMINAN ANEKA USAHA *MULTI BUSINESS GUARANTEE*	2 November 2016 *November 2, 2016*	2 November 2019 *November 2, 2019*
76	93/Jamkrindo/OP-01/XI/2016	PT BANK MANDIRI	KERAHASIAAN INFORMASI *INFORMATION CONFIDENTIALITY*	4 November 2016 *November 4, 2016*	-
77	94/Jamkrindo/OP-01/XI/2016	PT BPD BANTEN	PENJAMINAN ATMR *ATMR GUARANTEE*	17 November 2016 *November 17, 2016*	17 November 2019 *November 17, 2019*
78	95/Jamkrindo/OP-01/XI/2016	PT BANK BJB	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE GUARANTEE*	18 November 2016 *November 18, 2016*	1 November 2018 *November 1, 2018*
79	96/Jamkrindo/OP-01/XI/2016	PT BANK BJB	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	18 November 2016 *November 18, 2016*	1 November 2018 *November 1, 2018*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
80	97/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BPD BENGKULU	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	8 Desember 2016 *December 8, 2016*	8 Desember 2019 *December 8, 2019*
81	98/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BRI	PERPANJANGAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *EXTENSION OF KUR GUARANTEE*	14 Desember 2016 *December 14, 2016*	14 Desember 2019 *December 14, 2019*
82	99/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BANK SUMUT	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE GUARANTEE*	15 Desember 2016 *December 15, 2016*	15 Desember 2019 *December 15, 2019*
83	100/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BANK SUMUT	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	15 Desember 2016 *December 15, 2016*	15 Desember 2019 *December 15, 2019*
84	105/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BPD KALTENG	PENJAMINAN KREDIT UMUM (KOMERSIAL) *GENERAL (COMMERCIAL) CREDIT GUARANTEE*	21 Desember 2016 *December 21, 2016*	21 Desember 2018 *December 21, 2018*
85	106/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BPD KALTENG	PENJAMINAN KEREDIT PEGAWAI *EMPLOYEE CREDIT GUARANETT*	21 Desember 2016 *December 21, 2016*	21 Desember 2018 *December 21, 2018*
86	107/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BPD KALTENG	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA *CONSTRUCTION AND GOODS/SERVICES PROCUREMENT CREDIT GUARANTEE*	21 Desember 2016 *December 21, 2016*	21 Desember 2018 *December 21, 2018*
87	108/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BANK SAMPOERNA	PENJAMINAN KERAHASIAAN *GUARANTEE ON CONFIDENTIALITY*	21 Desember 2016 *December 21, 2016*	21 Desember 2018 *December 21, 2018*
88	109/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BPD KALSEL	PENJAMINAN KREDIT WIRA USAHA *ENTERPRENEUR CREDIT GUARANTEE*	23 Desember 2016 *December 23, 2016*	23 Desember 2019 *December 23, 2019*
89	112/Jamkrindo/OP-01/XII/2016	PT BANK MANDIRI	ADDENDUM I PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO *ADDENDUM I ON MICRO BUSINESS CREDIT GUARANTEE*	23 Desember 2016 *December 23, 2016*	23 Desember 2017 *December 23, 2017*
90	01/Jamkrindo/OP-02/I/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA UMRAH *UMRAH MULTIPURPOSE FINANCING GUARANTEE*	06 Januari 2016 *January 06, 2016*	06 Januari 2019 *January 06, 2019*
91	02/Jamkrindo/OP-02/I/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN MULTIGUNA UMRAH KSP NUSANTARA *UMRAH KSP NUSANTARA MULTIPURPOSE FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	06 Januari 2016 *January 06, 2016*	06 Januari 2019 *January 06, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
92	03/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO CAR INTERNASIONAL FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
93	04/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO MITRA FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
94	05/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO MITRA FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN INDUSTRI KREATIF DAN UMKMK *CREATIVE INDUSTRY AND MSMEs FINANCING GUARANTEE*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
95	06/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO CAR INTERNASIONAL FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN INDUSTRI KREATIF DAN UMKMK *CREATIVE INDUSTRY AND MSMEs FINANCING GUARANTEE*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
96	07/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO MITRA FINANCE	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN INDUSTRI KREATIF DAN UMKMK *CREATIVE INDUSTRY AND MSMEs FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
97	08/Jamkrindo/OP-02/I/2016	PT PRO MITRA FINANCE	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN KENDARAAN RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	28 Januari 2016 *January 28, 2016*	28 Januari 2019 *January 28, 2019*
98	09/Jamkrindo/OP-02/II/2016	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	PENJAMINAN PEMBIAYAAN PRODUK SUPER MIKRO MEKAAR *MEKAAR SUPER MIKRO PRODUCT FINANCING GUARANTEE*	11 Februari 2016 *February 11, 2016*	11 Februari 2019 *February 11, 2019*
99	10/Jamkrindo/OP-02/II/2016	PT MANDIRI TUNAS FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	16 Februari 2016 *February 16, 2016*	16 Februari 2019 *February 16, 2019*
100	11/Jamkrindo/OP-02/II/2016	PT UAF JAMINAN KREDIT	PENJAMINAN BERSAMA (CO-GUARANTEE) ATAS PRODUK SURETY BOND *CO-GUARANTEE FOR SURETY BOND PRODUCTS*	17 Februari 2016 *February 17, 2016*	17 Februari 2019

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
101	12/Jamkrindo/OP-02/II/2016	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	PENJAMINAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PEMBELIAN SPARE PART DAN SERVICE ALAT BERAT *FINANCING GUARANTEE FOR WORKING CAPITAL TO PURCHASE SPARE PART AND HEAVY QUIPMENT SERVICE*	17 Februari 2016 *February 17, 2016*	17 Februari 2019 *February 17, 2019*
102	13/Jamkrindo/OP-02/II/2016	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	PENJAMINAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG *FACTORING FINANCING GUARANTEE*	17 Februari 2016 *February 17, 2016*	17 Februari 2019 *February 17, 2019*
103	14/Jamkrindo/OP-02/III/2016	PT BANK RAKYAT INDONESIA	PENJAMINAN BANK GARANSI *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE*	11 Maret 2016 *March 11, 2016*	31 Mei 2016 *May 31, 2016*
104	15/Jamkrindo/OP-02/III/2016	PT ITC MULTIFINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	22 Maret 2016 *March 22, 2016*	22 Maret 2019 *March 22, 2019*
105	16/Jamkrindo/OP-02/IV/2016	PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN IJARAH UMRAH *IJARAH UMRAH FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	04 April 2016 *April 04, 2016*	04 April 2019 *April 04, 2019*
106	17/Jamkrindo/OP-02/IV/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN PENSIUNAN *PENSION FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	13 April 2016 *April 13, 2016*	13 April 2019 *April 13, 2019*
107	18/Jamkrindo/OP-02/IV/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN (KAFALAH) PEMBIAYAAN PERORANGAN *PERSONAL FINANCING GUARANTEE (KAFALAH)*	13 April 2016 *April 13, 2016*	13 April 2019 *April 13, 2019*
108	19/Jamkrindo/OP-02/IV/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN PINJAMAN PERORANGAN *PERSONAL LOAN GUARANTEE*	13 April 2016 *April 13, 2016*	13 April 2019 *April 13, 2019*
109	20/Jamkrindo/OP-02/IV/2016	KSP NUSANTARA	PENJAMINAN PINJAMAN PENSIUNAN *PENSION LOAN GUARANTEE*	13 April 2016 *April 13, 2016*	13 April 2019 *April 13, 2019*
110	21/Jamkrindo/OP-02/V/2016	GAPENSI	PENERBITAN SURETY BOND DAN KONTRA BANK GARANSI *ISSUANCE OF SURETY BOND AND COUNTER OF BANK GUARANTEE*	25 Mei 2016 *May 25, 2016*	25 Mei 2019 *May 25, 2019*
111	22/Jamkrindo/OP-02/VI/2016	PT MNC FINANCE	ADDENDUM PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *ADDENDUM OF FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	16 Juni 2016 *June 16, 2016*	24 Juni 2018 *June 24, 2018*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
112	26/Jamkrindo/OP-02/VI/2016	PT VERENA MULTI FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	27 Juni 2019 *June 27, 2019*
113	27/Jamkrindo/OP-02/VI/2016	PT JAMKRIDA BANTEN	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN BERSAMA (CO-GUARANTEE) ATAS PRODUK PENJAMINAN *COOPERATION AGREEMENT ON CO-GUARANTEE OF GUARANTEE PRODUCTS*	27 Juni 2016 *June 27, 2016*	27 Juni 2019 *June 27, 2019*
114	28/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK HIK YOGYAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	26 Agustus 2016 *August 26, 2016*	26 Agustus 2019 *August 26, 2019*
115	29/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK HIK SURAKATA	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	26 Agustus 2016 *August 26, 2016*	26 Agustus 2019 *August 26, 2019*
116	30/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK HIK TEGAL	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	26 Agustus 2016 *August 26, 2016*	26 Agustus 2019 *August 26, 2019*
117	31/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK HIK PARAHYANGAN	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	26 Agustus 2016 *August 26, 2016*	26 Agustus 2019 *August 26, 2019*
118	32/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK HIK CIBITUNG	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	26 Agustus 2016 *August 26, 2016*	26 Agustus 2019 *August 26, 2019*
119	33/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BANK BANTEN	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN BANK GARANSI *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
120	34/Jamkrindo/OP-02/VIII/2016	PT BHANDA GRAHA REKSA	MOU PROGRAM BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI SULSEL *MOU ON BUMN HADIR UNTUK NEGERI AT SULSEL*	30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
121	35/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	PT JAMKRIDA BANTEN	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN BERSAMA (CO-GUARANTEE) ATAS PRODUK PENJAMINAN *COOPERATION AGREEMENT ON CO-GUARANTEE FOR GUARANTEE PRODUCTS*	02 September 2016 *September 02, 2016*	09 Februari 2019 *February 09, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
122	36/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	PT MNC FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN/ ATAU PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AGUNAN RUMAH *FINANCING GUARANTEE ON HOUSING LOAN AND/OR MULTIPURPOSE FINANCING WITH HOUSE AS COLLATERAL*	13 September 2016 *September 13, 2016*	13 September 2019 *September 13, 2019*
123	37/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT ONLINE *KUR ONLINE CREDIT GUARANTEE*	14 September 2016 *September 14, 2016*	14 September 2019 *September 14, 2019*
124	38/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE	PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT *KUR GUARANTEE*	14 September 2016 *September 14, 2016*	14 September 2019 *September 14, 2019*
125	39/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	PT SUZUKI FINANCE INDONESIA	PERJANJIAN KERAHASIAAN *AGREEMENT ON CONFIDENTIALITY*	23 September 2016 *September 23, 2016*	23 September 2021 *September 23, 2021*
126	40/Jamkrindo/OP-02/IX/2016	BUMN SPONSOR/ DONATUR	SINERGI PEMANFAAAN ASET DESA DI KAWASAN CANDI BOROBUDUR (PROGRAM DESA WISATA) *SINERGY ON UTILIZING VILLAGE'S ASSETS AT BOROBUDUR TEMPLE AREA (TOURISM VILLAGE PROGRAM)*	28 September 2016 *September 28, 2016*	28 September 2017 *September 28, 2017*
127	42/Jamkrindo/OP-02/X/2016	PT Kliring Berjangka Indonesia & GAPOKTANI	PERJANJIAN KERJASAMA PKBL *PKBL COOPERATION AGREEMENT*	13 Oktober 2016 *October 13, 2016*	13 Oktober 2017 *October 13, 2017*
128	43/Jamkrindo/OP-02/X/2016	PT CSUL	PERJANJIAN KERJASAMA *COOPERATION AGREEMENT*	18 Oktober 2016 *October 18, 2016*	18 Oktober 2019 *October 18, 2019*
129	44/Jamkrindo/OP-02/X/2016	PT BANK HIK CILEDUG	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	25 Oktober 2016 *October 25, 2016*	25 Oktober 2019 *October 25, 2019*
130	45/Jamkrindo/OP-02/X/2016	PT BANK HIK BOGOR	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	25 Oktober 2016 *October 25, 2016*	25 Oktober 2019 *October 25, 2019*
131	46/Jamkrindo/OP-02/X/2016	PT BANK HIK BEKASI	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN *GUARANTEE COOPERATION AGREEMENT*	25 Oktober 2016 *October 25, 2016*	25 Oktober 2019 *October 25, 2019*
132	47/Jamkrindo/OP-02/XI/2016	PT BIMA FINANCE	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA *ADDENDUM ON COOPERATION AGREEMENT*	21 November 2016 *November 21, 2016*	23 November 2018 *November 23, 2018*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
133	48/Jamkrindo/OP-02/XI/2016	PT ITC FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA BERAGUNAN *MULTIPURPOSE FINANCING WITH COLLATERAL GUARANTEE*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
134	49/Jamkrindo/OP-02/XI/2016	PT ITC FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NON AGUNAN *MULTIPURPOSE FINANCING WITHOUT COLLATERAL GUARANTEE*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
135	50/Jamkrindo/OP-02/XI/2016	PT ITC FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN WISATA ROHANI *RELIGIOUS TRIP FINANCING GUARANTEE*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
136	51/Jamkrindo/OP-02/XI/2016	PT REKSA FINANCE	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT *FOUR-WHEELS VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	30 November 2016 *November 30, 2016*	30 November 2019 *November 30, 2019*
137	52/Jamkrindo/OP-02/XII/2016	PT SUZUKI FINANCE INDONESIA	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH *FOUR-WHEELS OR MORE VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	01 Desember 2016 *December 01, 2016*	01 Desember 2019 *December 01, 2019*
138	55/Jamkrindo/OP-02/XII/2016	CARGILL	PERJANJIAN KERAHASIAAN *AGREEMENT ON CONFIDENTIALITY*	5 Desember 2016 *December 5, 2016*	-
139	57/Jamkrindo/OP-02/XII/2016	ASTRA CREDIT COMPANY	PENJAMINAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH *FOUR-WHEELS OR MORE VEHICLE FINANCING GUARANTEE*	19 Desember 2016 *December 19, 2016*	19 Desember 2019 *December 19, 2019*
140	60/Jamkrindo/OP-02/XII/2016	PT BPD KALTENG	PENJAMINAN GARANSI BANK *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE*	30 Desember 2016 *December 30, 2016*	30 Desember 2018 *December 30, 2018*
141	01/Jamkrindo/Op-03/I/2016	PT BANK BUKOPIN	PENJAMINAN KREDIT UMUM *GENERAL CREDIT GUARANTEE*	11 Januari 2016 *January 11, 2016*	11 Januari 2019
142	02/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BPD SULUT	PENJAMINAN KREDIT MIKRO *MICRO CREDIT GUARANTEE*	11 Januari 2016 *January 11, 2016*	11 Januari 2019 *January 11, 2019*
143	03/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BPD SULUT	PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI *CONSTRUCTION CREDIT GUARANTEE*	11 Januari 2016 *January 11, 2016*	11 Januari 2019 *January 11, 2019*
144	04/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BPD SULUT	PENJAMINAN BANK GARANSI *GUARANTEE FOR BANK GUARANTEE*	11 Januari 2016 *January 11, 2016*	11 Januari 2019 *January 11, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
145	05/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BPD SULUT	PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA *MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE*	11 Januari 2016 *January 11, 2016*	11 Januari 2019 *January 11, 2019*
146	07/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BROCADE INSURANCE BROKER	KONSORSIUM PROGRAM PENUTUPAN ASURANSI DAN PENJAMINAN KREDIT KONSUMER PT BANK BPD JABAR DAN BANTEN *CONSORTIUM OF CLOSURE PROGRAM OF INSURANCE AND CONSUMER CREDIT GUARANTEE OF PT BANK BPD JABAR AND BANTEN*	20 Januari 2016 *January 20, 2016*	31 Juli 2016 *July 31, 2016*
147	08/Jamkrindo/OP-03/II/2016	KEJAKSAAN	PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	03 Februari 2016 *February 03, 2016*	03 Februari 2019 *February 03, 2019*
148	09/Jamkrindo/OP-03/II/2016	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	PERJANJIAN KERAHASIAAN *AGREEMENT ON CONFIDENTIALITY*	19 Februari 2016 *February 19, 2016*	-
149	10/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BUKOPIN & PT INSCO	PERJANJIAN KREDIT UMUM ATMR *ATMR GENERAL CREDIT AGREEMENT*	03 Maret 2016 *March 03, 2016*	03 Maret 2018 *March 03, 2018*
150	11/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BRI & Kemenkop	MoU ASOSIASI PUYUH *MOU ON PUYUH ASSOCIATION*	14 April 2016 *April 14, 2016*	14 April 2019 *April 14, 2019*
151	12/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT SINARMAS	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT TANPA AGUNAN *ADDENDUM FOR CREDIT WITHOUT COLLATERAL COOPERATION AGREEMENT*	25 April 2016 *April 25, 2016*	-
152	13/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT BANK PERMATA	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA KREDIT TANPA AGUNAN *ADDENDUM FOR CREDIT WITHOUT COLLATERAL COOPERATION AGREEMENT*	28 April 2016 *April 28, 2016*	-
153	14/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT MNC FINANCE	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA KPR *ADDENDUM FOR KPR COOPERATION AGREEMENT*	28 April 2016 *April 28, 2016*	28 April 2019 *April 28, 2019*
154	15/Jamkrindo/OP-03/I/2016	PT MNC FINANCE	PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN KPR DAN MTG *COOPERATION AGREEMENT ON KPR AND MTG GUARANTEE*	13 Mei 2016 *May 13, 2016*	13 Mei 2019 *May 13, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
155	01/Jamkrindo/NON-OP/I/2016	PERUM BULOG, PT SANG HYANG SERI, PT PUPUK INDONESIA, PT PERTANI, PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA, PT BERDIKARI, PERUM PERHUTANI, PT BANK RAKYAT INDONESIA, PT BANK MANDIRI, PT BANK NEGARA INDONESIA, PT ASURANSI JASA INDONESIA, PT ASKRINDO	MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN *SUPPORTING FOOD INDEPENDENCY*	27 Januari 2016 *January 27, 2016*	27 Januari 2017 *January 27, 2017*
156	02/Jamkrindo/Non-OP/III/2016	PT BALAI PUSTAKA, PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PERUM LKBN ANTARA, PERUM PRODUKSI FILM NEGARA	MoU KERJASAMA SINERGI BUMN *MOU ON SOEs SINERGY COOPERATION*	08 Maret 2016 *March 08, 2016*	08 Maret 2017 *March 08, 2017*
157	03/Jamkrindo/NON-OP/IV/2016	BANK INDONESIA	MoU PENGEMBANGAN UMKM & PERLUASAN AKSES KEUANGAN *MOU ON MSMEs DEVELOPMENT & FINANCIAL ACCESS EXPANSION*	21 April 2016 *April 21, 2016*	21 April 2019 *April 21, 2019*
158	04/Jamkrindo/NON-OP/IV/2016	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	MoU PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN INFORMASI UMKMK *MOU ON UTIZING MSMEs' RESORUCES AND INFORMATION*	21 April 2016 *April 21, 2016*	21 April 2019 *April 21, 2019*
159	05/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI SULSEL	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
160	06/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI GORONTALO	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
161	07/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI SULSEL	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
162	08/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KAJATI SULTENG	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
163	09/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI SULTRA	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
164	10/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI SULUT	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
165	11/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI MALUKU	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
166	12/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI MALUKU UTARA	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
167	13/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI PAPUA	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
168	14/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI PAPUA	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	04 Mei 2016 *May 04, 2016*	04 Mei 2019 *May 04, 2019*
169	15/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	PT HOTEL INDONESIA TOUR (PERSERO)	MoU SINERGI BUMN *MOU ON SOEs SINERGY*	27 Mei 2016 *May 27, 2016*	27 Mei 2019 *May 27, 2019*
170	17/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	PT BHANDA GHARA REKSA	PROGRAM BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH *BUMN HADIR UNTUK NEGERI PROGRAM AT CENTRAL SULAWESI PROVINCE*	28 Juli 2016 *July 28, 2016*	31 Desember 2016 *December 31, 2016*
171	18/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI JAWA TIMUR	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
172	19/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI NUSA TENGGARA BARAT	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
173	20/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI KALIMANTAN TIMUR	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
174	21/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI BALI	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
175	22/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI KALIMANTAN SELATAN	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
176	23/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI D.I. YOGYAKARTA	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
177	24/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI NUSA TENGGARA TIMUR	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
178	25/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	KEJATI KALIMANTAN TENGAH	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	31 Agustus 2016 *August 31, 2016*	30 Agustus 2019 *August 30, 2019*
179	26/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	PT POS INDONESIA	SINERGI BISNIS PEMANFAATAN POTENSI MASING-MASING PIHAK *BUSINESS SINERGY ON UTILIZING POTENTIALS OF EACH PARTY*	07 September 2016 *September 07, 2016*	07 September 2017 *September 07, 2017*
180	27/Jamkrindo/NON-OP/V/2016	PT BHANDA GHARA REKSA	SINERGI BISNIS PEMANFAATAN POTENSI MASING-MASING PIHAK *BUSINESS SINERGY ON UTILIZING POTENTIALS OF EACH PARTY*	19 September 2016 *September 19, 2016*	19 September 2017 *September 19, 2017*
181	29/Jamkrindo/Non-OP/IX/2016	Universitas Brawijaya	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	28 September 2016 *September 28, 2016*	28 September 2019 *September 28, 2019*
182	30/Jamkrindo/Non-OP/IX/2016	Politeknik Negeri Malang (PKS)	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	28 September 2016 *September 28, 2016*	28 September 2019 *September 28, 2019*
183		MOU in India (NATIONAL CREDIT GUARANTEE TRUSTEE COMPANY Ltd)	KERJASAMA UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI *COOPERATION OF CREDIT GUARANTEE SERVICE DEVELOPMENT AND GROWTH OF MICRO BUSINESS, SMALL BUSINESS, MEDIUM BUSINESS AND COOPERATIVE*	30 September 2016 *September 30, 2016*	-

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
184		MOU in India (CREDIT GUARANTEE FUND TRUST SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE)	KERJASAMA UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI *COOPERATION OF CREDIT GUARANTEE SERVICE DEVELOPMENT AND GROWTH OF MICRO BUSINESS, SMALL BUSINESS, MEDIUM BUSINESS AND COOPERATIVES*	30 September 2016 *September 30, 2016*	-
185	33/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI ACEH & KANWIL I	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
186	36/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI SUMATERA BARAT & KANWIL I	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
187	37/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI SUMATERA UTARA & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	10 Mei 2019 *May 10, 2019*
188	38/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI BANGKA BELITUNG & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
189	39/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI BENGKULU & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
190	40/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI JAMBI & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
191	41/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI LAMPUNG & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
192	42/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI SUMATERA SELATAN & KANWIL II	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
193	43/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI BANTEN & KANWIL III	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
194	44/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI DKI JAKARTA & KANWIL III	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
195	45/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI KALIMANTAN BARAT & KANWIL III	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
196	46/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI JAWA BARAT & KANWIL IV	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
197	47/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	KEJATI DKI JAKARTA & KCK	MoU PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA & TUN *MOU ON HANDLING CIVIL & STATE ADMINISTRATIVE LEGAL CASES*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
198	48/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	SEKARYA	KESEPAHAMAN BERSAMA *MUTUAL UNDERSTANDING*	05 Oktober 2016 *October 05, 2016*	05 Oktober 2019 *October 05, 2019*
199	49/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	PT Permodalan Nasional Madani	MOU PENGELOLAAN DANA PKBL *MOU ON PKBL FUNDS MANAGEMENT*	25 Oktober 2016 *October 25, 2016*	25 Oktober 2017 *October 25, 2017*
200	50/Jamkrindo/Non-OP/X/2016	Kliring Berjangka Indonesia & Wira Lodra	KESEPAHAMAN BERSAMA *MUTUAL UNDERSTANDING*	26 Oktober 2016 *October 26, 2016*	26 Oktober 2019 *October 26, 2019*
201		FOGAPE	MEMBANGUN HUBUNGAN KOOPERATIF UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA *ESTABLISH COOPERATIVE RELATIONSHIP FOR MUTUAL INTEREST*	21 Oktober 2016 *October 21, 2016*	-
202	51/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	PT PNM	PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA PKBL *PKBL BUSINESS CAPACITY DEVELOPMENT*	08 November 2016 *November 08, 2016*	08 November 2018 *November 08, 2018*
203	53/Jamkrindo/ Non-OP/XI/2016	PT KLIRING BERJANGKA	SINERGI BISNIS PEMANFAATAN INFORMASI TERKAIT PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG *BUSINESS SINERGY IN THE USE OF INFORMATION RELATED TO WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM GUARANTEE*	10 November 2016 *November 10, 2016*	10 November 2017 *November 10, 2017*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
204	65/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI Universitas Lambung Mangkurat	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
205	66/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI Universitas Lambung Mangkurat	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
206	67/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN Institut Pertanian Bogor	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
207	68/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN Institut Pertanian Bogor	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
208	69/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA Institut Teknologi Bandung	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
209	70/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA Institut Teknologi Bandung	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
210	71/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI Universitas Hasanuddin	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
211	72/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	FAKULTAS EKONOMI Universitas Hasanuddin	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*

Jalinan Kerjasama
Cooperation

NO	NO. PKS *AGREEMENT NO.*	MITRA *PARTNER*	PERIHAL *CONCERNING*	TANGGAL PERJANJIAN *DATE OF AGREEMENT*	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN *END OF AGREEMENT*
212	73/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	UKM CENTER FEB *Universitas Indonesia*	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
213	74/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	UKM CENTER FEB *Universitas Indonesia*	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
214	75/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	Universitas Negeri Jakarta	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
215	76/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	Universitas Negeri Jakarta	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*
216	77/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	UKM CENTER FAKULTAS EKONOMI Universitas Syiah Kuala	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	-
217	78/Jamkrindo/Non-OP/XI/2016	UKM CENTER FAKULTAS EKONOMI Universitas Syiah Kuala	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH *MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS DATA COLLECTION AND UPDATES*	29 November 2016 *November 29, 2016*	29 November 2019 *November 29, 2019*

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2016, Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2016, the Company did not trade shares so there are no information related to the number of shares outstanding, market capitalization, highest share price, lowest share price and closing stock price as well as volume of traded shares.

Ikhtisar Surat Berharga
Securities Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2016, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2016, the Company did not issue bonds, sukuk and convertible bonds so there are no information related to the number of bonds/sukuk/convertible bonds, interest rate/return, maturity date and bond/sukuk rating.

Peristiwa Penting
2016 Event Highlights

No.	Tanggal *Date*	Nama Acara *Event*	Tempat *Place*	Keterangan Explanation	Data
1.	3-Jun-16	5th Anugerah BUMN Award 2016	J.W Marriot Hotel, Jakarta	Acara ini merupakan acara penghargaan yang diberikan oleh BUMN Track, dan Perum Jamkrindo mendapatkan penghargaan dalam kategori sebagai BUMN Pemberdayaan UMKM Terbaik *This event was an award ceremony given by BUMN Track, and Perum Jamkrindo received an award as the Best UMKM Empowerment BUMN*	
2.	7-Jun-16	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan *The signing of a Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Pembangunan Daerah of South Kalimantan*	Jakarta	Acara ini merupakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan mengenai Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *This event was the signing of a cooperation agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Pembangunan Daerah of South Kalimantan regarding the Guarantee of Micro Community Business Credit (KUR)*	
3.	30-Aug-16	Rapat Kerja Nasional *National Working Meeting*	Jakarta	Rapat Kerja Nasional ini dilakukan dengan membahas "Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2016 & Permenkeu tentang Pengampunan Pajak" *This National Working Meeting was conducted by discussing the "Socialization of Law No. 1/2016 & Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on Tax Amnesty"*	
4.	30-Aug-16	Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. *The signing of an MoU and Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk*	Jakarta	Acara ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 di Perum Jamkrindo *The event was held on August 30, 2016 at Perum Jamkrindo*	

No.	Tanggal *Date*	Nama Acara *Event*	Tempat *Place*	Keterangan Explanation	Data
8.	6-Sep-16	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT *The signing of a Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Pembangunan Daerah of East Nusa Tenggara*	Jakarta	Acara ini merupakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengenai penjaminan kredit produktif, penjaminan kredit konsumtif,penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa *This event was the signing of a cooperation agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Pembangunan Daerah of East Nusa Tenggara regarding the guarantee of productive credit, the guarantee of consumer credit, the guarantee of construction credit and the procurement of goods and services*	
7.	7-Sep-16	Penandatanganan MoU Perum Jamkrindo dengan PT. POS Indonesia (Persero) *The signing of an MoU between Perum Jamkrindo and PT. POS Indonesia (Persero)*	Jakarta	Acara ini merupakan penandatanganan MoU antara Perum Jamkrindo dengan PT. POS Indonesia (Persero) mengenai sinergi bisnis pemanfaatan masing-masing pihak *This event was the signing of an MoU between Perum Jamkrindo and PT. POS Indonesia (Persero) regarding the utilization business synergy of each party*	
6.	19-Sep-16	Penandatanganan MoU Perum Jamkrindo dengan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) *The signing of an MoU between Perum Jamkrindo and PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)*	Jakarta, Gedung Perum Jamkrindo	Acara ini merupakan penandatanganan MoU antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) mengenai pemanfaatan potensi masing-masing *This event was the signing of an MoU between Perum Jamkrindo and PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) regarding the utilization of each potential*	

No.	Tanggal *Date*	Nama Acara *Event*	Tempat *Place*	Keterangan Explanation	Data
5.	30-Sep-16	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC)	Mumbai, India	Acara ini merupakan penandatanganan MoU antara Perum Jamkrindo dan CGTMSE dan NCGTC *This event was the signing of an MoU between Perum Jamkrindo and CGTMSE and NCGTC*	
9.	23-Nov-16	4th BUMN Branding & Marketing Award 2016	Hotel Pullman Jakarta	Acara ini merupakan acara penghargaan yang diberikan untuk Perum Jamkrindo dengan kategori The Best BUMN Marketing Award 2016 *This event was an award ceremony given for Perum Jamkrindo under the category of the Best BUMN Marketing Award of 2016*	
10.	23-Dec-16	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bank Kalsel dengan Perum Jamkrindo Produk Kredit Wira Usaha (KWU) *The signing of a Cooperation Agreement between Bank Kalsel and Perum Jamkrindo regarding the Product of Entrepreneurship Credit (KWU)*	Jakarta	Acara ini merupakan penandatanganan perjanjian kerjasama Bank Kalsel dengan perusahaan penjaminan dan asuransi produk kredit multiguna terusan, dan salah satunya dengan Perum Jamkrindo *This event was the signing of a cooperation agreement between Bank Kalsel and the companies of guarantee and insurance of the product of continued multipurpose credit, and one of them was Perum Jamkrindo*	

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards And Certifications

PENGHARGAAN:

1. 19 Februari 2016; BUMN Terbaik atas Berbagai Program Hibah Sosial dan Kemasyarakatan; Anugerah BUMN Hadir Untuk Negeri; oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2. 14 April 2016; Kerjasama dan Partisipasi dalam Mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Peternak Puyuh; oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
3. 3 Juni 2016; BUMN Pemberdayaan Terbaik; *5th* Anugerah BUMN 2016; oleh Majalah BUMN Track
4. 27 September 2016; Peserta Kegiatan Laporan Tahun 2015; *Annual Report Award* 2015; oleh Otoritas Jasa Keuangan
5. 20 Oktober 2016; Kinerja Keuangan "Sangat Bagus" 2011-2015; Infobank Golden Trophy 2016; oleh Infobank

AWARDS:

1. 19 February 2016; Best SOE on Various Social and Community Grant Programs; SOE Award Present to the State; by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
2. 14 April 2016; Cooperation and Participation in Developing Cooperatives, Micro and Small Enterprises of Quail Farmers; by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia
3. 3 June 2016; Best Empowerment SOE; 5th SOE Award 2016; By SOE Magazine, Track
4. 27 September 2016; Participant of 2015 Activity Report; Annual Report Award 2015; by the Financial Services Authority
5. 20 October 2016, "Excellent" Financial performance 2011-2015; Infobank Golden Trophy 2016; by Infobank

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards And Certifications

6. 15 November 2016; Direktur Utama, Diding S. Anwar untuk Nominasi TOP BUMN 2016; Majalah Investor Referensi Investasi Awards Tokoh Finansial Indonesia 2015; oleh Majalah Investor
7. 23 November 2016; *The Best BUMN Marketing Award* 2016; *4th* BUMN *Branding & Marketing Award* 2016; oleh Majalah BUMN Track, ARRBEY dan Rumah Perubahan
8. 23 November 2016; *The Best CEO in Marketing Leadership BUMN Award* 2016 untuk Direktur Utama, Diding S. Anwar; *4th* BUMN *Branding & Marketing Award* 2016; oleh Majalah BUMN Track, ARRBEY dan Rumah Perubahan
9. 24 November 2016; Sertifikat Apresiasi kepada Direktur Utama, Diding S. Anwar; 40 Tahun HIPPI Malam Apresiasi Bangga Memakai Produk Indonesia; oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)

6. 15 November 2016; President Director, Diding S. Anwar was Nominated for TOP 2016 SOE; Investor Magazine, Investment Reference Awards for Indonesian Financial Figure 2015; by Investor Magazine
7. 23 November 2016; The Best SOE Marketing Award 2016; 4th BUMN Branding & Marketing Award 2016; by SOE Magazine Track, ARRBEY, and House of Change
8. 23 November 2016; The Best CEO in Marketing Leadership SOE Award 2016 for President Director, Diding S. Anwar; 4th SOE Branding & Marketing Award 2016; by SOE Magazine Track, ARRBEY, and House of Change
9. 24 November 2016; Certificate of Appreciation to the President Director, Diding S. Anwar; 40 Years of HIPPI Appreciation Night of Proudly Wearing Indonesian Products; by the Indonesian Native Entrepreneurs Association (HIPPI)

Laporan Manajemen

Management Report

krindo
Indonesia

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report

Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga pada Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup baik. Selanjutnya, ijinkan kami untuk menyampaikan laporan Dewan Pengawas terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 terealisasi sebesar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2016 juga ditopang dengan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat disaat sebagian besar negara lainnya mengalami depresiasi nilai tukar terhadap Dolar Amerika Serikat.

Distinguished shareholders and stakeholders,

Thanks be to God Almighty, by His grace, Perum Jamkrindo could pass through the year and overcome challenges in 2016 with fairly good performances. Furthermore, please allow us to give an account of the Board of Supervisor's report on the oversight of Company's management conducted by the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2016.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The realized Indonesia's economic growth in 2016 was at 5.02%, higher than the previous year's economic growth of 4.88%. The performance of the Indonesian economy in 2016 is also supported by the strengthening of the Rupiah exchange rate against the US Dollar while most other countries experienced exchange rate depreciation.

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap kinerja Perusahaan tahun 2016. Kendati pencapaian kinerja Perusahaan masih berada di bawah target Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016, namun secara umum, Perusahaan dapat meraih pertumbuhan usaha yang cukup baik.

Dewan Pengawas menilai bahwa Direksi telah berupaya mengelola Perusahaan secara baik, terencana, dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan strategi pengembangan usaha tahun 2016, Dewan Pengawas menilai Direksi telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan pada tahun buku 2016.

Pada tahun 2016 Jamkrindo juga tetap menjalankan fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Penjaminan Kredit dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) & Koperasi dalam memperoleh layanan penjaminan kredit yang diperoleh dari lembaga perbankan dan non perbankan. Ini sejalan dengan program Pemerintah yang terus berupaya untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank-bank dan lembaga keuangan yang telah ditunjuk dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan nasional, khususnya di sektor UKMK.

Berlandaskan pada hal tersebut, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk meningkatkan *volume* penjaminan kredit dengan bekerjasama dan bersinergi dengan bank-bank milik Pemerintah (BUMN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank swasta nasional dan institusi pembiayaan non-bank lainnya. Peningkatan kerja sama dilakukan guna mengakomodasi layanan penjaminan kepada lembaga keuangan dan pembiayaan yang telah ditunjuk Pemerintah serta upaya dalam memasarkan produk penjaminan yang dimiliki Perusahaan yang bersifat non-program (komersil).

Melalui berbagai kebijakan strategis yang diambil Direksi sepanjang tahun 2016, Perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp692,05 miliar, meningkat 10,66% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp625,35 miliar. Perusahaan juga berhasil membukukan peningkatan aset sebesar 15,16% menjadi Rp13,41 triliun.

Merealisasikan pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dengan membangun sistem berbasis *online* yang terintegrasi merupakan salah satu upaya efisiensi kerja guna meningkatkan produktifitas dan pendapatan. Atas pencapain tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajarannya.

Indonesia's economic growth in 2016 had a good influence on the Company's performance. Although the achievement of the Company's performance was still below the target of the Work Plan and Budget of 2016, but in general, the Company could achieve a fairly good business growth.

The Board of Supervisors considers that the Board of Directors had sought to manage the Company properly, well planned, by always implementing the principles of prudence. In accordance with the business development strategy of 2016, the Board of Supervisors considers that the Board of Directors had taken strategic steps to improve the Company's performance in the fiscal year of 2016.

In 2016 Jamkrindo also continues its function as a State Owned Enterprise (BUMN) in Credit Guarantee in assisting communities and business actors, particularly in Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) sectors & Cooperatives in obtaining credit guarantee services from Banking and non-banking institutions. This is in line with the Government program which continuously strives to optimize the distribution of People Business Credit (KUR) through the Banks and financial institutions that had been appointed in order to increase the acceleration of national development, especially in the sector of SMEs.

Based on this matter, the Board of Supervisors encourages the Board of Directors to increase the volume of credit guarantee by cooperating and working in synergy with state-owned banks (BUMN), Regional Development Banks (BPD), national private banks and other non-bank financing institutions. Cooperation improvement is undertaken to accommodate guarantee services to financial and financing institutions that have been appointed by the government as well as efforts in marketing the underwriting products owned by the Company that are non-program (commercial).

Through the strategic policies adopted by the Board of Directors throughout 2016, the Company recorded a net profit of Rp692.05 billion, increased 10.66% compared to the previous year's net profit of Rp625.35 billion. The company also recorded an increase in the assets by 15.16% to Rp13.41 trillion.

Realizing innovations in information technology by building an integrated online-based system is one of the work efficiency efforts to increase productivity and income. For the achievement, the Board of Supervisors gives appreciation to the Board of Directors and its entire staffs.

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report

PENILAIAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Prospek kegiatan usaha di bidang penjaminan kedepan masih sangat terbuka peluang untuk berkembang, seiring dengan perkembangan perekonomian nasional. Semakin meningkatnya perkembangan UMKM Nasional maka akan semakin diperlukannya adanya lembaga penjaminan.

Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-undang Penjaminan maka posisi Perusahaan sebagai sebuah perusahaan penjaminan akan semakin kuat untuk mengembangkan bisnis penjaminan pada Perum Jamkrindo.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementasi GCG pada Perum Jamkrindo terus mengalami perbaikan yang antara lain ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai Skor *Assessment* GCG dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 mencapai skor 92,12 atau naik 0,6% dari tahun sebelumnya sebesar 91,56.

Pencapaian Implementasi GCG pada tahun 2016 yaitu:

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pedoman perilaku yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh segenap insan Perum Jamkrindo sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Perusahaan secara konsisten dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan GCG dilakukan pengukuran secara berkala (tahunan) baik secara internal maupun oleh asesor eksternal.
4. Pelaporan LHKPN oleh pejabat Perusahaan yang diwajibkan telah mengalami peningkatan.
5. Perusahaan telah menerapkan *whistle blowing system*.

Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi mendorong agar senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dari asesor untuk peningkatan implementasi GCG pada Perum Jamkrindo, dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan.

Dewan Pengawas juga mendukung langkah Direksi untuk terus meningkatkan peran sistem pelaporan pelanggaran di Perusahaan dengan membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*/WBS) berdasarkan Keputusan Direksi No. 33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Adapun WBS dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan oleh Direksi, sebagaimana skema berikut:

APPRAISAL OF BUSINESS PROSPECTS

The opportunity of business activities prospect in the future guarantee sector to develop is still widely open, along with the development of national economy. The more national SMEs grow, the more it will need the existence of the guarantee institution.

In addition, with the stipulation of the Guarantee Act, the Company's position as a guarantee company will be stronger to develop the underwriting business at Perum Jamkrindo.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Perum Jamkrindo continues to improve. It is indicated by the improvement of GCG Score Assessment from year to year. In 2016, it reached the score of 92.12 or increase 0.6% from the previous year which amounted to 91.56.

The Achievement of GCG Implementation in 2016 are as follows:

1. The Company has a good Guide of GCG and code of conduct that have been mutually agreed upon and implemented by all Perum Jamkrindo personnel in accordance with its duties and authorities.
2. The Company is consistently able to apply the principles of GCG in the management of the Company to achieve the targets set.
3. The implementation of GCG is measured periodically (every year) both by internal and external assessors.
4. The required State Official Property Report (LHKPN) done by the Company's officials has increased.
5. The Company has applied whistle blowing system.

The Board of Supervisors, along with the Board of Directors, always follows up the recommendations from assessors to improve GCG implementation at Perum Jamkrindo, and consistently applies GCG principles in the management of the Company.

The Board of Supervisors also supports the steps taken by the Board of Directors to continuously improve the role of the Company's violation reporting system by establishing a Whistle Blowing System (WBS) Team based on Directors Policy No.33/Kep-Dir/III/2015 dated on March 11, 2015. The WBS is implemented in accordance with the SOP stipulated by the Board of Directors, as the following scheme:

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report

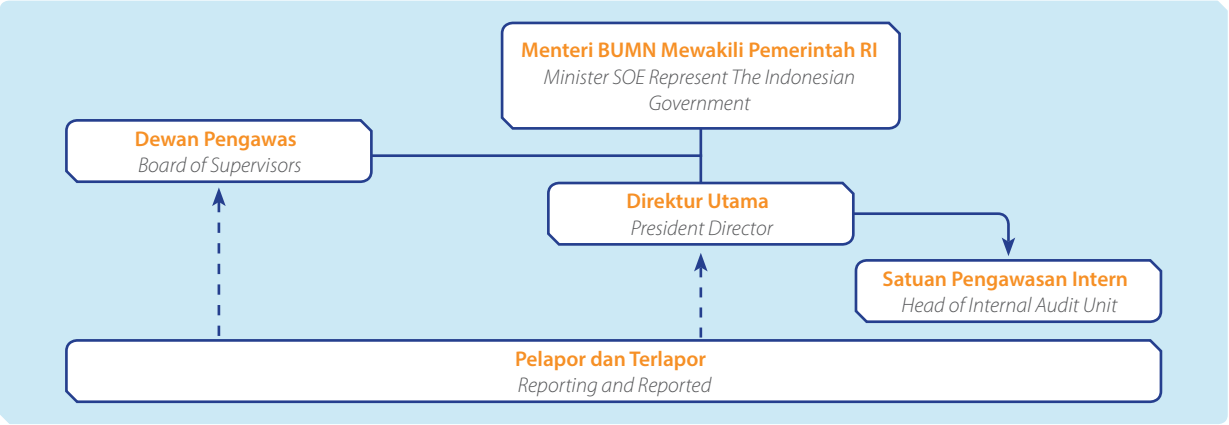

Sedangkan bentuk Pengawasan Dewan Pengawas yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaannya.
2. Memberikan pengarahan kepada Direksi atas efektifitas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
3. Meminta Komite Audit untuk menangani laporan pengaduan terlapor Direksi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor Direksi.
   b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran terlapor Direksi.
   c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Pengawas.
   d. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
   e. Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Dewan Pengawas.
4. Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor Direksi sudah ditindaklanjuti.
5. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut laporan pengaduan tersebut ditembuskan kepada Satuan Pengawasan Intern.
6. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Menteri Negara BUMN.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat kasus-kasus yang signifikan untuk dilaporkan sampai dengan Menteri BUMN.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite yang berada di bawah Dewan Pengawas yaitu Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Meanwhile, the form of oversight conducted by the Board of Supervisors are:

1. Supervising and advising the Reporting System of Violations and its implementation.
2. Providing direction to the Board of Directors on the effectiveness of the Reporting System of Violations implementation.
3. Exhorting the Audit Committee to handle reports of complaints filed towards the Board of Directors by performing the following steps:
   a. Reviewing complaints related to the Board of Directors.
   b. Conducting investigation towards reported violation done by the Board of Directors.
   c. Submitting reports on the results of inspection to the Supervisory Board.
   d. Carrying out administration and reports on activities related to the Reporting System of Violations.
   e. Making reports on the follow up position of the complaint to the Board of Supervisors.
4. Ensuring that reported violations by the Board of Directors have been followed up.
5. Forwarding reports on the follow-up results of the complaint to the Internal Audit Unit.
6. Providing follow-up suggestions/ recommendations towards the complaint of violation to the Minister of State Owned Enterprises (SOEs).

The results of evaluation show that up to the present there are no significant cases to be reported to the Minister of SOEs.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF SUPERVISORS' COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Supervisors is assisted by its subordinate Committees, the Audit Committee as well as the Investment and Risk Committee.

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Report

Komite Audit

Pada 2016, Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang telah disusun.

1. Komite Audit telah melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait sekurang-kurangnya dua belas kali dengan tingkat kehadiran anggota yang cukup baik.
2. Komite Audit telah melakukan *review* atas hasil audit yang dilakukan baik dari pihak Internal (Satuan Pengawas Internal) maupun ekternal (KAP, BPK, OJK, BPKP, dan auditor eksternal lainnya).
3. Komite Audit telah melakukan *review* dan memberikan rekomendasi untuk penunjukan Auditor Eksternal.

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite Investasi dan Risiko Usaha telah menjalankan program kerja yang telah disusun, antara lain:

1. Komite Investasi dan Risiko Usaha telah menyelenggarakan rapat dan pertemuan sekurang-kurangnya dua belas kali dengan tingkat kehadiran anggota yang cukup baik.
2. Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan *review* dan koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Investasi Perusahaan.
3. Komite Investasi dan Risko Usaha juga melakukan rapat dengan Komite Audit.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Di tahun 2016 komposisi Dewan Pengawas Perum Jamkrindo mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Pembahasan Bersama yang dilakukan pada 11 April 2016.

Komposisi Dewan Pengawas Periode 1 Januari - 12 April 2016

Ketua	Braman Setyo	*Chairperson*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Anggota	Ony Suprihartono	*Member*

Komposisi Dewan Pengawas Periode 12 April – 31 Desember 2016

Ketua	Braman Setyo	*Chairperson*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Anggota	Noor Ida Khomsiyati	*Member*

Audit Committee

In 2016, the Audit Committee had implemented the prepared work programs.

1. The Audit Committee had conducted meetings with related parties at least twelve times with adequate attendance of members.
2. The Audit Committee had reviewed the audit results conducted by both internal (Internal Control Unit) and external (Public Accountant Firm, Financial Audit Board, Financial Services Authority, Finance and Development Supervisory Agency, and other external auditors).
3. The Audit Committee had reviewed and made recommendations for the External Auditor appointment.

Investment and Risk Committee

The Investment and Risk Committee had implemented the prepared work programs, they are as follows:

1. The Investment and Risk Committee had held meetings at least twelve times with adequate attendance of members.
2. The Investment and Risk Committee had reviewed and coordinated with the Company's Risk Management and Investment Divisions.
3. The Investment and Risk Committee also conducted meetings with the Audit Committee.

COMPOSITION CHANGES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

In 2016, the Board of Supervisors composition of Perum Jamkrindo changed based to the decision made in the Joint Discussion Meeting held on 11 April 2016.

The composition of the Board of Supervisors for Period of 1 January - 12 April 2016

Ketua	Braman Setyo	*Chairperson*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Anggota	Ony Suprihartono	*Member*

The composition of the Board of Supervisors for Period of 12 April – 31 December 2016

Ketua	Braman Setyo	*Chairperson*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Anggota	Noor Ida Khomsiyati	*Member*

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Ony Suprihartono atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas. Semoga semua yang telah terjalin dengan baik selama bergabung dengan jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dapat tetap terjaga. Kemudian, kepada Sdri. Noor Ida Khomsiyati, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas semoga kehadiran beliau dapat memberikan warna tersendiri serta lebih banyak lagi dampak positif untuk kemajuan dan perkembangan Perusahaan.

APRESIASI

Perum Jamkrindo telah berhasil meraih kinerja yang cukup baik di tengah tantangan ekonomi dan bisnis yang cukup berat. Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen Perum Jamkrindo serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perusahaan.

Dewan Pengawas juga mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tak lupa, atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah dan mitra kerja Perusahaan. Semoga kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pengawas mengajak seluruh jajaran Perusahaan untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya, mengingat tantangan usaha ke depan akan semakin berat.

Jakarta, 10 Februari 2017

We appreciate Mr. Ony Suprihartono for his contribution and dedication given during his tenure as a member of the Board of Supervisors. Hopefully, all things that have been well established during joining the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo can be maintained. Afterward, we would like to welcome and congratulate Ms. Noor Ida Khomsiyati. We hope that her presence would give more positive impact for the Company's progress and development.

APPRECIATION

Perum Jamkrindo has managed to achieve good performance in the midst of challenging economic and business. The Board of Supervisors gives appreciation to the Board of Directors and management of Perum Jamkrindo as well as all employees for the dedication and hard work for the Company.

The Board of Supervisors would also like to thanks the shareholders and stakeholders for their trust and support so that the Board of Supervisors can perform its duties and responsibilities well.

Not to forget, on behalf of the Board of Supervisors, we would also like to express our deepest gratitude to all our customers and partners. Hopefully, the well established cooperation can continue to be improved in the future.

Concluding this report, by giving thanks to God Almighty, the Board of Supervisors invites all personnel of the Company to continue to provide the best ability, given the challenges ahead will be more severe.

Jakarta, 10 February 2017

Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
The Chairperson of The Board of Supervisors

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup baik. Selanjutnya ijinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

KONDISI EKONOMI YANG CUKUP MENANTANG

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 cukup mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Terlebih pada tahun 2016, khususnya pada semester pertama, harga barang komoditas di pasar dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut membuat ekspor produk komoditas Indonesia mengalami penurunan.

All shareholders and the respectable stakeholders,

Praise and gratitude we send to the almighty Lord for his grace and bless so that Jamkrindo could pass the full challenging 2016 with a magnificent performance. Allow us to deliver the director's accountability report for the company management that ended by the end of 31 December 2016

THE CHALLENGING ECONOMIC CONDITION

The slow growth of the 2016 global economic situation has reached to the given a massive impact for the Indonesian economy. Especially in 2016, at the first semester, where the world's product commodity has touched to its lowest decrease, significantly. This make the Indonesian product export commodity decreasing significantly.

Namun demikian, di tengah kondisi tersebut, perekonomian di Indonesia masih dapat tumbuh cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 terealisasi sebesar 5,02%. Kendati lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang ditetapkan sebesar 5,3%, namun pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga dibandingkan dengan negara-negara kelompok G-20 di bawah Tiongkok dan India.

However, on that condition, the Indonesian economy still able to grow well. The 2016 Indonesia's economic growth at the number of 5,02%. Thus it still lower compared to the economic growth target stated in the Indonesian State Budget *(APBN)* the change in 2016 which stated at 5,3% but that economic growth is actually higher that the number reached on the previous year, that has 4,88%. By that economic growth, Indonesia is stated as the third biggest compared to all the G-20 countries, below Tiongkok and India.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut juga ditopang dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 3,02%, yang merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2010. Demikian juga dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang pada tahun 2016 mengalami tren penguatan, dari Rp13.785 pada tahun 2015 menjadi Rp13.473 pada akhir 2016.

This great economic growth achievement is also supported with a good control of inflation at the number of 3,02%, which is the lowest ever reached since 2010. As well with the rupiah to American dollar currency which tend to be stronger in 2016, at Rp. 13.785 in 2015 to Rp. 13.473 in late of 2016

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan di sektor riil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sepanjang tahun 2016 pertumbuhan industri hanya mencapai 4,4%. Pencapaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan industri pada tahun 2015 sebesar 5,05%.

However, this great economic growth still not in a line with the country's real sector. Based on the data from the Ministry of Industry, the industrial growth in 2016 only reached by the number of 4,4%. This achievement is actually lower than the 2015 industrial growth which reached to 5,05%.

Sektor Usaha Menengeh, Kecil dan Mikro (UMKM) masih menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode lima tahun terakhir.

The Middle Business Sector, Small and Micro *(UMKM)* still become the main foundation for the Indonesian economic. The Ministry of Cooperatives and Middle Small Business Sector *(UKM)* noted that the *UMKM* sector itself reached from 57,84% to 60,34%. Not only that, this *UMKM* sector has also helped the absorption of workers in the country. They grew from 96,99% to 97,22% during the last five years.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.

By this good absorption of the workers, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry *(Kadin)* evaluate that the *UMKM* sector may increase the local people's income. Therefore, *UMKM* considered to have a very strategic role in solving the country's poverty and unemployment.

Namun demikian, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan akses sektor UMKM terhadap rantai nilai pasok produksi global masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki akses dan informasi ke pasar global.

Nevertheless, the *UMKM* contribution still considered to be weak if we compare to many countries in South East Asia. This occurred due to the chain of the *UMKM* sector to the global production is still at its least. It also shows that most of the *UMKM* executants do not have access and information to the global market.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Harus diakui, bisnis UMKM memang memiliki beberapa kelemahan dalam beroperasi. Misalnya saja, kesulitan pemasaran, akses ke sumber pembiayaan yang sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2016, penyaluran pinjaman sektor perbankan tercatat sebesar Rp4.413,4 triliun, sedangkan pembiayaan dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tercatat sebesar Rp571,62 triliun. Jumlah kredit perbankan yang disalurkan pada sektor UMKM hanya sebesar Rp802,1 triliun atau 18,2% dari total kredit yang disalurkan.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian di Indonesia maka industri penjaminan berpeluang semakin berkembang. Hal tersebut didorong juga oleh diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, di mana setelah berakhirnya masa transisi pemberlakuan Undang-Undang tersebut, bisnis penjaminan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan. Kondisi tersebut tentunya semakin mendorong terbentuknya perusahaan-perusahaan penjaminan baru, di mana pada tahun 2016 telah terdapat 23 perusahaan penjaminan dengan pertumbuhan *outstanding* penjaminan mengalami kenaikan sebesar 31,30% dari tahun 2015.

Kondisi ini merupakan peluang besar bagi Jamkrindo untuk mengembangkan bisnis penjaminannya sekaligus peluang untuk meningkatkan *market share* dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penjaminan lainnya. Berbekal pengalaman dan kapasitas yang ada, Perum Jamkrindo diproyeksikan akan tetap menjadi *market leader* dalam industri penjaminan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Menyikapi kondisi ekonomi dan persaingan di industri penjaminan tahun 2016, Direksi telah mengambil sejumlah kebijakan strategis yang menjadi bagian dari langkah untuk mencapai target pertumbuhan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016.

Inisiatif strategis Perum Jamkrindo pada tahun 2016 adalah berusaha menjaga *sustainability* (keberlangsungan) Perusahaan dengan fokus pada penguasaan pasar dan inovasi produk sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Direksi menetapkan 7 (tujuh) strategi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu :

We have to admit that this *UMKM* business is still lack in many sectors during its operational performance. Issues as; marketing difficulty, limited human resource development, the lack of raw material, and also the limitation of innovation and technology, still become one the unfinished homework to be solved.

Based on the data taken by Indonesian Financial Services Authority *(OJK)* in 2016, the country's distribution of banking allowance is at Rp. 4.413,4 trillion, while the non-banking financial for the industrial sector is at Rp.571,62 trillion rupiahs. The total banking credit for the *UMKM* sector is only Rp. 802,1 trillion, or exactly 18,2% from the total credit.

With the Indonesian Economy that is starting to perform well, so it means the guarantee industry will also have a good chance to be more developed. It also supported by the launch of the country's regulation No. 1 in 2016, whereas it is stated that after the transition of that regulation ends, a guarantee business can only be done by guarantee companies only. This condition of course will lead to the era where another regarding companies will be born, whereas there are already 23 well settled guarantee companies with an outstanding performance, these companies themselves are increased for 31,30% from 2015.

This condition is a very good opportunity for Jamkrindo to expand the business as well as in increasing its market share by having many cooperation to other guarantee companies. Based on our experience and capacity, Jamkrindo is projected to be still the market leader in this guarantee industry.

STRATEGIC POLICY

Having look at this economic and competitive condition in guarantee industry in 2016, the directors have already taken several strategic policies which later on will be part of aiming a bigger business growth that has already stated in the 2016 Company's Working and budgeting annual plan.

The Jamkrindo's initiative strategic plan in 2016 is to keep its sustainability by focusing on the market leader and product innovation which have already stated earlier in the company's long-term plan. The Directors have declared 7 strategies which will be done in 2016, they are:

1. Penguasaan pangsa pasar
2. Implementasi sistem IT terintegrasi untuk meningkatkan efektifiktas proses bisnis Perusahaan
3. Pengembangan organisasi dan SDM dengan budaya yang kompetitif dan berorientasi pasar
4. Inovasi produk baru
5. Optimalisasi jaringan kerja operasional
6. Implementasi pemeringkatan UMKMK dan konsultasi manajemen dalam rangka peningkatan pelayanan kepada UMKMK
7. optimalisasi investasi dalam rangka peningkatan pendapatan Investasi

KENDALA YANG DIHADAPI

Bisnis penjaminan Perum Jamkrindo mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam 5 tahun terakhir. *Volume* penjaminan pada tahun 2016 meningkat 135,27% dari tahun 2012. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan dukungan SDM yang siap pakai, mengingat sebelumnya Perusahaan tidak melakukan rekrutmen karyawan secara periodik guna mengantisipasi pertumbuhan bisnis, sehingga terdapat GAP antara kebutuhan bisnis dan ketersediaan SDM yang siap pakai. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan percepatan pengembangan kompetensi karyawan sesuai kebutuhan bisnis Perusahaan. Pelatihan dan *on the job training* secara intensif diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan bisnis selain melakukan perekrutan karyawan berpengalaman pada bidang yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Perencanaan strategi SDM akan diselaraskan dengan strategi bisnis Perusahaan agar SDM yang ada dapat melakukan eksekusi bisnis sesuai target Perusahaan

Permasalahan yang dihadapi Perusahaan dari sisi eksternal adalah adanya pemahaman mitra kerja bahwa produk penjaminan masih dapat disubstitusikan dengan produk asuransi. Hal tersebut menuntut Perusahaan harus bersaing dengan industri lain (asuransi) yang berdampak pada peningkatan *overhead cost* terutama biaya akuisisi pasar. Hal tersebut juga menyebabkan posisi tawar bank menjadi sangat tinggi dan sebaliknya posisi tawar perusahaan penjaminan terhadap bank cenderung menjadi rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut agar Perusahaan terus tumbuh berkelanjutan, maka Perusahaan perlu melakukan upaya manajemen (*higher level management efforts*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Sinergi dengan BUMN pada umumnya dan BUMN perbankan pada khususnya.
2. *Strategic positioning*

1. Dominating the market
2. Implementing the IT system which integrated to improve the company's effectiveness in the business
3. Organization's development and SDM with a competitive culture and of course market oriented
4. New product innovation
5. Operational work network optimization
6. Rank implementation of *UMKM* and management consultant in order to improve the services to *UMKM*K
7. Investment optimization in improving the investment income

EXISTING OBSTACLES

Jamkrindo guarantee business is significantly improving during the last 5 years. The guarantee volume in 2016 is increased at 135,27% since 2012. But apparently it hasn't balanced with the number of available SDM, pointing out that the company itself didn't have employees' recruitment periodically to anticipate the business growth, therefore there is gap between the business and SDM availability. However, the company has walked onto several steps to face these obstacles by making a rapid development in employees' competency that fits into the company's business needs. Trainings and the job trainings are intensively hoped to be the solution for the business needs, in addition of recruiting experienced employees which relevant to the company's business. The human resources business plan will be in line with the company's business strategy so the human resource can execute the business to fulfill the Company's business target.

Externally, Problems that face by the company is working partnership which the guarantee product may still substituted with the insurance product. This may lead to a tight competition between the company and another industries (insurance) which impacted to the overhead cost will be raised especially to the market's acquisition cost. This will also make the bank's bargaining position to be very high and in contrary the guarantee's company bargaining position to the bank tends to be low at the same time.

To solve that obstacle, so the company can carry on rolling, the company needs to do management effort (higher level management efforts) with these steps:

1. Execute synergy effort with the BUMN in general, and banking BUMN in specific
2. Strategic positioning

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Sosialisasi tentang fungsi penjaminan juga dilakukan, tujuannya adalah untuk mengedukasi calon Penerima Jaminan bahwa penjaminan kredit berfungsi sebagai pelengkap agunan dan *covering* kegagalan bayar oleh debitur KUR. Selain itu calon Penerima Jaminan dapat mengetahui bahwa tujuan utama kegiatan penjaminan kredit adalah menjembatani kepentingan Terjamin dari sisi pengganti agunan dan kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan kredit. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, calon Penerima Jaminan dapat mengetahui perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit.

Pada tahun 2017 Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pengaturan *cash flow* Perusahaan mengingat pada tahun 2017 Pemerintah tidak menganggarkan penambahan Penyertaan Modal Negara bagi Perusahaan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilakukan secara bertahap, namun di sisi lain target penjaminan KUR semakin meningkat dan *Service Level Agreement* pembayaran klaim harus tetap dipatuhi guna menjaga kepercayaan pasar.

KINERJA JAMKRINDO 2016

Tahun 2016, Jamkrindo masih dapat membukukan kinerja operasional dan keuangan yang cukup baik. Kendati secara umum capaian kinerja Perum Jamkrindo tahun 2016 masih berada di bawah target RKAP 2016, namun secara umum Jamkrindo masih membukukan kinerja yang positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Realisasi jumlah kredit yang dijamin tahun 2016 sebesar Rp125.968 triliun atau mencapai 102,83% dari jumlah yang ditargetkan tahun 2016 sebesar Rp122.500 triliun dan mencapai 181,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. *Volume* penjaminan pada tahun 2016 sebesar Rp101.958 triliun dari penjaminan kredit bank dan penjaminan kredit non bank Rp24.009 triliun.

Dari jumlah kredit bank yang dijamin yang bersumber dari kredit bank konvensional Rp96.022 triliun atau sebesar 108,87% dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar Rp88.200 triliun dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mencapai 171,06%. Pembiayaan bank syariah Rp5.936 triliun yaitu 81,19% dibandingkan dengan target 2016 sebesar Rp7.313 triliun dan 162,74% dibandingkan dengan realisasi 2015 realisasi Rp3.648 triliun.

Perform the guarantee function also must be done, the purpose is to educate the guarantee's receiver candidate that the credit functioning as a cover for the KUR debtor. Not just that, the receiver guarantee may know that the first main idea of the credit's activity is to bridge the credit between the guarantee acceptor and the guaranteed acceptor. It's literally hoped that by doing this socialization, the guarantee receiver knows the basic difference between credit guarantee and insurance credit.

In 2017, the company should optimize the company's cash flow regulation, considering that in the regarding year, the government will not budget the additional PMN for the company and the payment of IJP KUR will be done gradually, but then again on the other side the KUR guarantee target is increasing and the SLA payment to the claim must be obeyed in order to maintain the market trust.

JAMKRINDO WORK PERFORMANCE IN 2016

In the year of 2016, Jamkrindo is still able to record some good operational and financial performances. Although in general, the company's performance of is still below the target stated in the 2016 *RKAP*, but in general Jamkrindo still posted a very positive and better performance than the previous year.

The realization of the number of secured loans in 2016 was amounted to Rp125.968 trillion or exactly about 102.83% of the targeted amount in 2016 which was Rp122,500 trillion, and it reached to 181.08% compared to the annual realization in 2015. The volume of the guarantee itself is amounted to Rp101,958 trillion from bank guarantees and non-bank credit guarantee of Rp24.009 trillion in 2016.

From all the total credit guaranteed of bank loans sourced from conventional bank loans is at Rp96.022 trillion or 108.87% compared to the target in 2016 which was at Rp88, 200 trillion, and when compared to the 2015 realization, it reached to 171.06%. Sharia bank financing is at Rp5.936 trillion, or 81.19% compared to the target in 2016 of about Rp7.313 trillion and 162.74% compared to the realization in 2015 realization of Rp3.648 trillion.

Imbal Jasa Penjaminan bersih yang diperoleh tahun 2016 mencapai Rp1.588 triliun, meningkat 24,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.277 triliun. Namun demikian, pencapaian tersebut hanya mencapai 88,28% dari target RKAP 2016 yang sebesar Rp1.799 triliun.

The net guarantee benefits obtained in 2016 was reached at Rp1.588 trillion, an increase of about 24.34% over the previous year at Rp1.277 trillion. However, the achievement itself only reached 88.28% of the 2016 *RKAP* target of Rp1,799 trillion.

Laba bersih yang dibukukan Jamkrindo tahun 2016 mencapai Rp692,05 miliar meningkat 10,66% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp625,35 miliar. Namun demikian, pencapaian tersebut masih berada di bawah target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp728,97 miliar.

The company's 2016 net profit was reached Rp692.05 billion, an increase of 10.66% compared to the previous year's net profit of Rp625.35 billion. Nevertheless, the achievement is still below the target set of *RKAP* of Rp728, 97 billion.

Tahun 2016, Jamkrindo juga berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 15,16% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp13.408 triliun dan berada di atas target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp12.992 triliun.

In 2016, Jamkrindo also recorded an asset growth of 15.16% compared over the previous year, which was Rp13.408 trillion and was above the 2016 *RKAP* target set at Rp12.992 trillion.

Dari aspek operasional, Jamkrindo menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Dengan terbitnya PP tersebut, Perum Jamkrindo berpotensi untuk meraih ceruk pasar baru di bisnis penjaminan dari sistem resi gudang dan 10 komoditi yang bisa dijamin. Karena itu, Perum Jamkrindo telah melakukan persiapan, baik dari segi infrastruktur bisnis maupun SDM untuk menggarap pasar bisnis penjaminan sistem resi gudang.

From the operational aspect, Jamkrindo welcomes the birth of Government Regulation No. 1 of 2016 on the Implementing Institution of Warehouse Receipt System. With the issuance of the PP, Jamkrindo has the big potential to reach the new market in guarantee business from warehouse receipt system and 10 guaranteed commodities. Therefore, Jamkrindo has made some preparations in order, both in terms of business infrastructure and also human resources to work on the business market guarantee warehouse receipt system.

PROSPEK USAHA

Kendati tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diprediksi akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Sejalan dengan membaiknya ekonomi, roda bisnis pun akan berputar lebih baik. Ini merupakan peluang bagi Perum Jamkrindo.

Untuk mengantisipasi tahun 2017, Perum Jamkrindo telah menyiapkan serangkaian strategi, antara lain :

1. Produk eksisting
   Komitmen Pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM semakin kuat antara lain dengan secara bertahap mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit sektor UMKM sebesar minimal 20% dari total penyaluran kredit. Pemerintah juga mendorong perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM melalui kebijakan bunga kredit *single digit*. Selain hal tersebut Pemerintah terus mendorong terciptanya inklusi keuangan yang memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Hal tersebut merupakan peluang pengembangan bisnis penjaminan bagi Perum Jamkrindo.

BUSINESS PROSPECT

Although there will be no significant spike increasement, Indonesia's economic growth is predicted to be better than in 2016. As the economy improves, the business wheel will also spin better. This is surely a great opportunity for Jamkrindo.

To anticipate the year 2017, Jamkrindo has prepared a series of strategies, among others:

1. Existing product
   The government's commitment in developing MSME sector is actively stronger, by gradually requiring banks to distribute the credit for *UMKM* sector for at least 20% from the total loan disbursement. The government also encourages banks and other non-bank financial institutions to facilitate access to financing for *UMKM* through single digit interest rate policy. In addition, the government also continue to encourage people to have easier access on financial inclusion. This is an opportunity to develop a guarantee business runs well for Jamkrindo.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

2. *Surety Bond*
Salah satu fokus pembangunan pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok nusantara. Tahun 2017 anggaran belanja infrastruktur Pemerintah mencapai Rp346 triliun. Bujet tersebut naik dari tahun lalu yang sebesar Rp317 triliun. Peluang UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan insfrastruktur pun semakin luas ditambah adanya kebijakan Pemerintah tentang dorongan kepada pelaku jasa kontraktor besar untuk melakukan sinergi dengan UMKM dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan peluang besar bagi bisnis *suretyship* Perum Jamkrindo.

3. KUR
Komitmen Pemerintah untuk mendukung penyediaan permodalan bagi UMKM semakin kuat dengan menambah target penyaluran KUR pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp110 triliun, dengan pembagian yakni 81% KUR untuk usaha mikro, 18% untuk sektor ritel, dan 1% untuk kredit Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal tersebut menjadi peluang Perum Jamkrindo untuk dapat meningkatkan penjaminan KUR, dengan menargetkan sebesar Rp55 triliun pada tahun 2017.

4. Penjaminan Resi Gudang
Pada tahun 2016 Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjamin Sistem Resi Gudang melalui Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2016. Dalam hal Penjaminan Sistem Resi Gudang belum berjalan terkait belum adanya realisasi PMN untuk operasional, maka Perum Jamkrindo akan melakukan penjaminan produk *derivatif* dari Sistem Resi Gudang yaitu Penjaminan kredit beragunan resi gudang. Kredit Resi Gudang adalah fasilitas yang diberikan atas jaminan resi gudang. Target utama kredit resi gudang ini adalah para petani atau koperasi yang ingin memperluas usahanya dengan agunan barang-barang pertanian, seperti gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, cokelat dan lain-lain. Perum Jamkrindo akan menjamin Kredit yang beragun Resi Gudang yang diberikan oleh perbankan

5. Pemeringkatan UMKM
Salah satu bentuk dukungan Perum Jamkrindo untuk pengembangan UMKM di Indonesia adalah dengan membentuk unit kerja yang khusus membidangi pemeringkatan dan skoring serta konsultasi manajemen UMKM. Ruang lingkup kegiatan pemeringkatan UMKM tersebut adalah dengan melakukan *scoring* dan konsultasi manajemen kepada UMKM di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat mempermudah akses UMKM untuk

2. Surety Band
One of the government development focus is the development of the infrastructure itself throughout the archipelago. In 2017, the government infrastructure spending reaches Rp 346 trillion. This budget has increased from last year's Rp 317 trillion. Opportunities of *UMKM* to contribute in infrastructure development even more widespread not to mention the government's policy of encouragement to the perpetrators of the services of large contractors in doing lined synergy with *UMKM* in completing their work. This is a great opportunity for suretyship business of Jamkrindo.

3. KUR
The government's commitment to support the additional serve of capital for *UMKM* is strengthened by increasing the target of KUR distribution in 2017 up to Rp110 trillion, with the distribution alone of about 81% KUR directed to micro business, 18% for the retail sector, and 1% for Indonesian Migrant Workers (TKI). This has become an opportunity for Jamkrindo themselves to increase the KUR guarantee, by targeting Rp55 trillion by the year of 2017.

4. Warehouse Receipt Guarantee
In 2016, Jamkrindo is stated as the Implementing Agency for Guarantee of Warehouse Receipt System through the Government Regulation number 1 of 2016. In the case of Guarantee of Warehouse Receipt System has not been running related to the absence of PMN for operational, Jamkrindo will make the derivative product guarantee from Warehouse Receipt System Guaranteed credit of the receipt of warehouse receipt. Warehouse Receipt Credit is a facility that provided on guarantee of warehouse receipt. The main target of this warehouse receipt credit is for farmers or cooperatives who want to expand their business with collateral in agricultural goods, such as grain, rice, corn, coffee, cocoa, pepper, rubber, chocolate and others. Jamkrindo will guarantee the Credit of Warehouse Receipt provided by the banks

5. *UMKM* Rating
One form of support from Perum Jamkrindo regarding the development of *UMKM* in Indonesia is by forming a special unit in charge of rating and scoring and management consulting of *UMKM*. The scope of this *UMKM* rating activities is to conduct scoring and management consultation to *UMKM* throughout all Indonesia, so it is expected to be facilitated on access of *UMKM* to get credit / financing from banks and other non-bank financial institutions. On the other

mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangn non bank lainnya. Disisi lain dengan pemeringkatan tersebut akan meningkatkan kepercayaan kreditur dalam menyalurkan kredit/pembiayaan pada UMKM. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi Perum Jamkrindo untuk memperluas dan meningkatkan *volume* penjaminan.

side, with this rating, it will increase the creditor's trust in channeling credit / financing to the *UMKM*. This will be an opportunity for Jamkrindo to actually expand and increase the volume of underwriting.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN

Saat ini Perusahaan menuju pada pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan sasaran dapat menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya. Pengembangan SDM berbasis kompetensi diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2016 dan RJPP 2014-2018.

Untuk itu, telah dilakukan Penyusunan Direktori Kompetensi dan Kompetensi Jabatan Perum Jamkrindo, yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Pengelompokan jenis kompetensi.
2. Jenis kompetensi.
3. Nama kompetensi.
4. Definisi kompetensi.
5. *Profiency level* (tingkat keahlian)
6. Uraian tingkat keahlian.
7. Kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perum Jamkrindo.

Perum Jamkrindo juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan. Pada tahun 2016, Perusahaan telah melaksanakan program pendidikan pelatihan yang diikuti oleh 2.872 peserta termasuk di dalamnya memberikan beasiswa belajar ke luar negeri bagi seorang karyawan. Untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan, selama tahun 2016 Perum Jamkrindo mengeluarkan investasi sebesar Rp16.796.433.140.

SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

At the moment, the Company is leading to the development of human resources competency-based with the goal of positioning an employee in a place or position in accordance with the quality of his ability. Competence-based human resource development will begin with the compilation of competency directories and job requirements as stated in the Company's work plan in the *RKAP* 20156 and RJPP 2014-2018.

For that reason, Compilation of Competency and Competency Director of Jamkrindo has been prepared, which contains as follows:

1. Grouping of competence types.
2. Competency types.
3. The name of the competency.
4. Proficiency level.
5. Description of skill level.
6. Competency for all positions in Jamkrindo.
7. Competence of position for all positions in Perum Jamkrindo.

Jamkrindo also has a high commitment to always improve the quality of employees as one of the important key for the sustainability of the Company. One quality improvement is through employee training and education programs. By the year of 2016, the Company has implemented a training education program that was attended by 2,872 participants including all providing scholarships to study abroad for an employee in future time. To implement the education and training programs, during 2016, Jamkrindo themselves issued an investment as big as Rp16,796,433,140.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Aspek manajemen risiko menjadi salah satu fokus utama Perusahaan dalam proses pengembangan usaha Perusahaan. Jamkrindo meyakini, dengan pengelolaan risiko yang baik, maka pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Perusahaan akan dapat diwujudkan.

Tahun 2016, Perusahaan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, salah satunya dengan membangun mekanisme untuk mendukung implementasi manajemen risiko yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) strategi, yaitu dengan:

1. Tersedianya BCM (*Business Continuity Management*)
   Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan Divisi Manajemen Risiko untuk mencapai sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:
   a. Menyusun kebijakan BCM (*Business Continuity Management*)
   b. Menyusun BIA (*Business Impact Analysis)*
   c. Menyusun RA *(Risk Assessment)*
   d. Menyusun BCS *(Business Continuity Strategic)*
   e. Menyusun BC *Plan* dan DR *Plan*
   f. Melakukan *Testing*
   g. *Exercising*

   Divisi Manajemen Risiko telah selesai melakukan penyusunan kebijakan BCM (*Business Continuity Management*) dan laporan BIA (*Business Impact Analysis*).

2. Kebijakan BCM (*Business Continuity Management*) mulai diterapkan pada Unit Kerja yang menjalankan fungsi bisnis kritikal.

   Langkah-langkah Divisi Manajemen Risiko untuk melakukan strategi tersebut yaitu dengan melakukan implementasi kebijakan BCM (*Business Continuity Management*) pada Unit Bisnis kritikal di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Implementasi kebijakan ini akan diawali dengan melakukan sosialisasi, agar seluruh Unit Bisnis memiliki visi sama mengenai kebijakan tersebut

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Aspects of risk management has become one of the Company's main focuses in the Company's business development process. Jamkrindo believes, with good risk management, the growth and sustainability of the Company's business will be realized as time comes upfront.

In 2016, the Company made a number of efforts to improve the implementation of risk management, one of which is by developing mechanisms to support the implementation of risk management by using 2 (two) strategies, they are:

1. BCM availability (Business Continuity Management)
   The steps that the Risk Management Division undertakes to achieve these objectives are including the following:

   a. Develop BCM policies (Business Continuity Management)

   b. Develop BIA (Business Impact Analysis)
   c. Develop RA (Risk Assessment)
   d. Develop BCS (Business Continuity Strategic)
   e. Develop BC Plan and DR Plan
   f. Execute testing
   g. Exercising

The Risk Management Division has finished preparing the BCM (Business Continuity Management) policy and the BIA (Business Impact Analysis) report.

2. BCM policy (Business Continuity Management) will generally start to be applied to the Work Unit that performs some critical business functions.

   The steps of the Risk Management Division to undertake such a strategy are to implement BCM (Business Continuity Management) policies at critical Business Units at Head Office, Regional Offices, and Branch Offices. Implementation of this policy will be initiated by the doing public socialization, so that all Business Unit will have the same vision about the policy

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perum Jamkrindo meyakini bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance/GCG)* merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan ke depan. Prinsip GCG memberikan kepastian terpenuhinya dan melindungi hak dan kepentingan *stakeholders* maupun *shareholders*.

Perum Jamkrindo senantiasa memastikan bahwa sistem GCG yang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, di tahun 2016 Jamkrindo melakukan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG yang dilakukan oleh assessor independen yaitu KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (KAP DBSD&A) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 65/SPK/4.2/XI/2016 tanggal 1 November 2016 perihal Jasa Assessor Independen Penilaian GCG Tahun 2016.

Hasil *assessment* atas penerapan GCG Jamkrindo periode tahun 2016 memperoleh skor 92,12 dengan predikat Sangat Baik. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang menjadi *area of improvement* dalam penerapan prinsip GCG di Perusahaan.

Jamkrindo berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap struktur dan mekanisme penerapan GCG di Perusahaan. Jamkrindo berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Jamkrindo believes that the Good Corporate Governance (GCG) principle is genuinely a very important aspect in determining the success and sustainability of the company in the future time. The GCG Principle provides certainty of fulfillment and protects the rights and interests of stakeholders and shareholders.

Jamkrindo always ensures that the GCG system is running in accordance with the applicable laws and regulations. In order to improve the quality of GCG implementation, in 2016 Jamkrindo also has undertaken an evaluation / evaluation on the implementation of GCG that conducted by the independent assessors ie KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (KAP DBSD & A) based on Work Order Number 65 / SPK / 4.2 / XI / 2016 dated on November 1, 2016 regarding Independent Assessor Services of GCG Assessment in Year 2016.

The results of the assessment on the implementation of GCG Jamkrindo for the period of year 2016, they have obtained a marvelous score of 92.12 with surely an Excellent Pride. Based on the assessment results, there are numbers of recommendations that become areas of improvement in the application of GCG principles in the Company.

Jamkrindo strives to improve and refine the GCG implementation structure and mechanism in the company. Jamkrindo is fully committed to implement GCG at all levels and levels of the organization based on various provisions and requirements that related to the GCG implementation.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Memberi nilai dan makna pada kehidupan masyarakat adalah salah satu tujuan Perum Jamkrindo. Keberadaan Jamkrindo bukan semata untuk mencari keuntungan, namun juga untuk menimbulkan dampak positif bagi pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Perum Jamkrindo menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).

Perusahaan menyalurkan dana Bina Lingkungan untuk membantu kondisi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Perum Jamkrindo dan 56 Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

Bantuan tersebut meliputi bantuan kepada korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan antara lain elektrifikasi, penyediaan sarana air bersih, penyediaan sarana MCK dan perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.

SOCIAL RESPONSIBILITY

Giving value and meaning to people's life is one of the main goal of Jamkrindo. The existence of Jamkrindo is not merely for profit orientation, but also more to spread positive impact for the development of course for better economic and social life for the community.

As a result of this commitment, Jamkrindo also provides a reasonable and adequate budget to support Corporate Social Responsibility (CSR) programs.

The Company also distributes a Community Development fund to support the social condition, this implemented by the Jamkrindo Perum Head Office and all 56 Branch Offices throughout Indonesia.

That assistance includes the assistance to the victims of natural disasters, education and training, health promotion, infrastructure development and / or public facilities, religious facilities, nature conservation and social assistance in the framework of poverty eradication such as electrification, provision of clean water facilities, and home improvement for the poor.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, komposisi Direksi Perum Jamkrindo tidak mengalami perubahan.

APRESIASI

Perum Jamkrindo telah berhasil melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup baik. Keberhasilan tersebut akan jadi modal yang sangat berharga bagi Perusahaan untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai kondisi lingkungan usaha yang akan terjadi ke depan.

Atas raihan kinerja yang cukup baik tersebut, Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perusahaan atas kerja keras dan dedikasi selama ini sehingga perusahaan tetap mampu memberikan kinerja terbaiknya. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Pengawas atas dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada kami.

Direksi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan kepada seluruh mitra kerja dan nasabah yang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pencapaian kinerja Perusahaan. Semoga kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 10 Februari 2017

CHANGES IN THE COMPOSITION OF DIRECTORS

Throughout the year of 2016, the composition of the Board of Directors Perum Jamkrindo has not been changed at once.

APPRECIATION

Jamkrindo has been successful passing through a challenging 2016 year with a good performance. The succes xzcs will be a very valuable capital for the Company to continue to grow sustainably and ready to face the various business environment conditions that will occur in the coming future.

For its good performance, the Board of Directors give high appreciation to all management and employees of the Company for their hard work and dedication throughout the years, so that the company can still provide the best performance. The Board of Directors would also like to thank the Shareholders and the Supervisory Board for the support and direction that gratefully has been given to us.

The Board of Directors also expressed flourishing appreciation to all partners and customers who have become very important part in the process of achieving the Company's performance during the years. Hopefully this good cooperation will continue in the coming years ahead.

Jakarta, 10 February 2017

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 Perum Jamkrindo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2017

DEWAN PENGAWAS
Board of Supervisors

Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors

Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2016 Annual Report of Perum Jamkrindo

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for 2016 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the annual report and financial report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 10 February 2017

DIREKSI
Board of Directors

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

Bakti Prasetyo
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business

Nanang Waskito
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs and Compliance

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management

R. Sophia Alizsa
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network

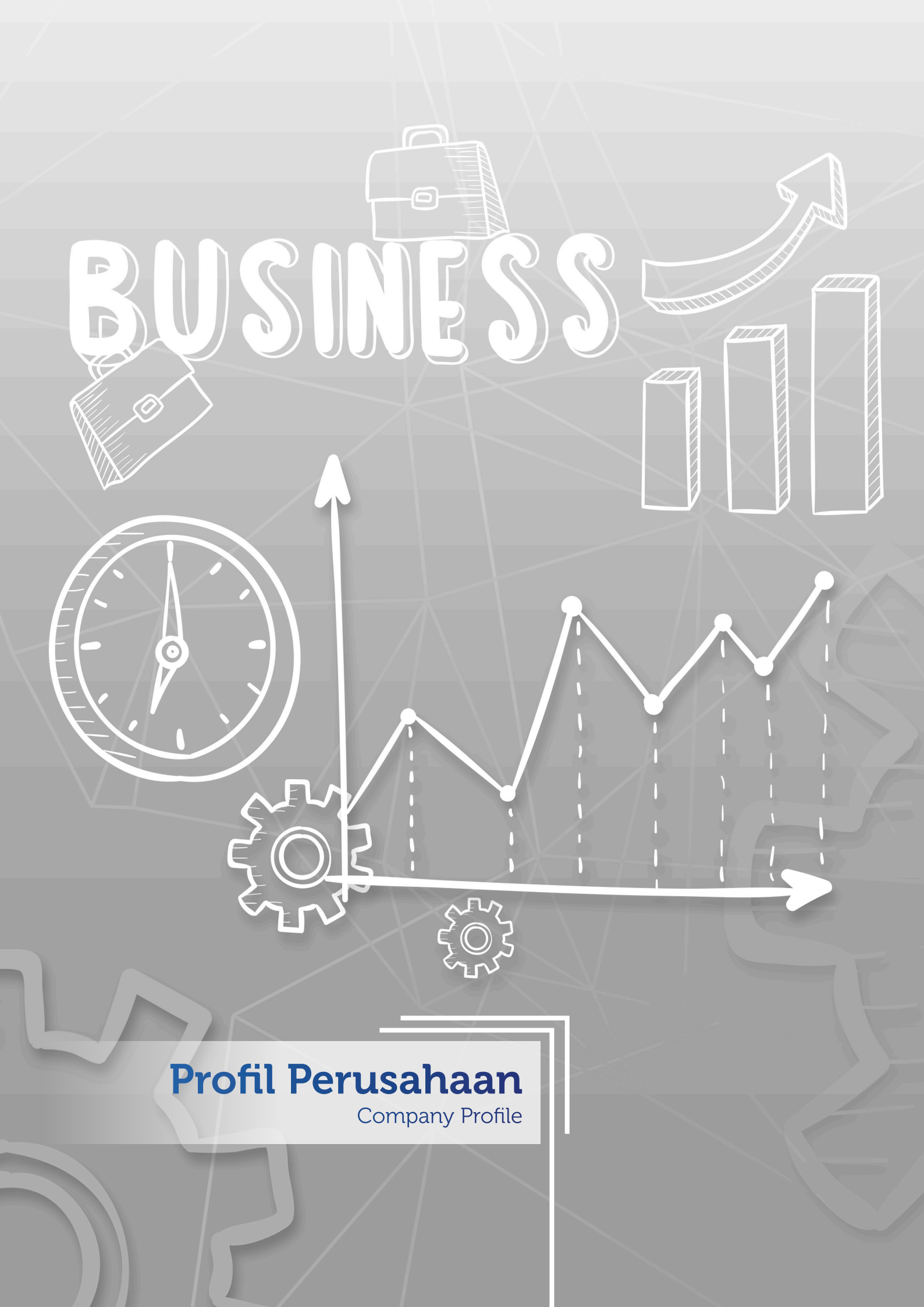

Profil Perusahaan

Company Profile

CREATIVE
IDEA

Jamkrindo

Informasi Umum Tentang Jamkrindo
General Information About Jamkrindo

Nama Perusahaan *Company Name*	:	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Bentuk dan Status Badan Usaha *Business Entity Type and Status*	:	Perusahaan Umum (Perum)
Tanggal Pendirian *Date of Establishment*	:	1 Julli 1970 *1 July 1970*
Dasar Hukum *Legal Basis*	:	• Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Government Regulation No. 41 of 2008 on Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia* • Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 *Decree of Minister of Finance No. KEP-77/KM.10/2009 dated 22 April 2009*
Dasar Hukum Pelaksanaan Usaha Penjaminan *Legal Basis on Implementing Guarantee Business:*		• Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan *Law No. 1 of 2016 on Guarantee* • Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang *Government Regulation No. 1 of 2016 on Guarantee Implementing Agency of Warehouse Receipt System* • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Penjaminan *Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2014 dated 17 April 2014 on Business License and Guarantee Agency* • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan *Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.05/2014 dated 17 April 2014 on Business Operation of Guarantee Agency* • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan *Financial Services Authority Regulation No. 7/POJK.05/2014 dated 17 April 2014 on Examination of Guarantee Agency*
Bidang Usaha *Line of Business*	:	Penjaminan kredit baik bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada bank atau Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) *Direct or indirect Credit guarantee given to Banks or Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs)*
Jaringan Usaha *Business Network*	:	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 14 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia *9 Regional Offices, 56 Branch Offices, and 14 Service Unit Office all over Indonesia*
Kepemilikan *Ownership*	:	100% Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara 100% the Country of Republic of Indonesia, through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of State Owned Enterprise
Penyertaan Modal Negara *State Capital Subscription*	:	Rp7.638.733.365.160,-
Jumlah Karyawan *Number of Employees*	:	901 orang *901 people*
Alamat *Address*	:	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon *Telephone*	:	+62 21 6540335
Faksimili *Facsimile*	:	+62 21 6540344, 6540348
Email	:	info@jamkrindo.co.id
Situs Web *Website*	:	www.jamkrindo.co.id
Media Sosial *Social Media*	:	Instagram: perum_jamkrindo Facebook: Perum Jamkrindo Twitter: perum_jamkrindo Youtube: Perum Jamkrindo

Riwayat Singkat Jamkrindo
Jamkrindo Brief History

SELAYANG PANDANG SEJARAH PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan "Perum Jamkrindo" atau "Perusahaan" merupakan perusahaan milik Badan usaha milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya mensejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai dan non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Sejarah pendirian Jamkrindo sendiri diawali dengan pendirian Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada pertengahan tahun 1970, yang dilandasi oleh kondisi riil perkembangan koperasi yang masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM

PERUM JAMKRINDO HISTORY AT A GLANCE

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, or also called as "Perum Jamkrindo" or "Company" is a State-Owned Enterprise (SOE) with business activities focusing in credit guarantee, both conventional and sharia. As an SOE, Perum Jamkrindo is fully committed in implementing and supporting Government policies and programs in national economic and development sectors in order to prosper the life of the nation. The committed implementation is carried out through activities of providing management consultancy support in the form of credit guarantee provision, either cash or non-cash, given by bank or business entity to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). In an effort to improve people's economy equally and facilitate accessibility, Perum Jamkrindo keeps developing network all over the country and improving and developing the service quality.

The history of Jamkrindo establishment itself started with the establishment of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) in the mid 1970s, based on the real condition of cooperatives development which was still behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated 23 December 1981, which was refined by Government Regulation No. 27 of 1985 dated 31 May 1985 on Public Enterprise Cooperative Financial Development.

The successful implementation of Perum PKK functions and tasks in developing cooperatives through credit guarantee activities makes the Government expand the services reach of Perum PKK to not only be limited to cooperatives, but also to include MSMEs. Due to this effort, the Government issued another policy aiming to strengthen the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No. 95 of 2000 dated 7 November 2000 which also changed the name of Perum PKK into Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 of 2008 dated 26 January 2008 on Guarantee Agency. Regarding changes in Company business that no longer provided direct loan to MSMEs and Cooperatives through profit sharing but focused

Riwayat Singkat Jamkrindo
Jamkrindo Brief History

dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985.
2. Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000.
3. Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

on credit guarantee business of MSMEs and Cooperatives, Perum SPU was renamed to be Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated 19 May 2008.

As a follow up to the Presidential Regulation implementation, the Government through the Department of Finance strengthened the legal basis of establishment of the Company and other companies with similar business sectors through Minister of Finance Regulation (PMK) No. 222/PMK.010/2008 dated 16 December 2008 as amended by Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company. Through the regulations, Perum Jamkrindo must have a business license as Credit Guarantee Company. Following up the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 dated 22 April 2009 establishing Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee Company.

In 2016, the Government issued Law No. 1 of 2016 dated 19 January 2016 on Guarantee, as a form of seriousness of the Government in protecting and instituting guarantee industry which continues to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

CHANGES IN COMPANY NAME

The chronology of changes of Perum Jamkrindo name from its establishment until now as described above is as follows:

1. The Company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) formed in 1970. The Government Regulation was subsequently refined through Government Regulation No. 27 of 1985.
2. The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000.
3. The Company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No. 41 of 2008.

Bidang Usaha
Line of Business

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi Anggaran dasar Perusahaan, dalam pasal 6, 7, dan 8 disebutkan bahwa Perusahaan memiliki sifat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang berlaku.
2. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Koperasi.

Based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee that became the Articles of Association of the Company, in Articles 6, 7, and 8, it is stated that the Company has the following characteristics, purposes, and objectives as follows:

1. Organizing services for public benefit and fostering profits based on the applicable principles of corporate governance.
2. The purposes and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government policies and programs in economic and national development sectors, by conducting credit guarantee activities for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha inti yang meliputi:

In an effort to achieve these objectives, the Company conducts core business activities which include:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penjaminan kredit baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung *Direct or indirect credit guarantee*	Diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi *Given by banks or business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives*
2	Penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil *Guarantee for lease financing, factoring, consumer financing, and sharing-income financing*	Diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi *Given by financing institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives*
3	Penjaminan pembelian barang secara angsuran *Guarantee for purchasing goods through installment*	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi *Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives*
4	Melakukan Penjaminan Syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai maupun non-tunai *Sharia Guarantee for financing both in the form of cash and non-cash*	Diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi *Given by banks or sharia business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives*
5	Penjaminan atas transaksi kontrak jasa *Guarantee for service contract transaction*	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi *Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives*
6	Kegiatan usaha lainnya *Other business activities*	Penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan *Guarantee for personal loans, consultation services, and management services to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives in accordance with the purposes and objectives of the Company*

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan

As stipulated in Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Changes of Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, the Company has

Bidang Usaha
Line of Business

Ulang Kredit, Perusahaan memiliki peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa penjaminan kredit, antara lain:

1. Penjaminan Pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya.
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).
3. Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia.
4. Penjaminan atas Surat Utang.
5. Penjaminan Transaksi Dagang.
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*).
7. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi).
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C).
10. Penjaminan Kepabeanan.
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan.
12. Penyediaan informasi/*database* terjamin terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan.
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

an opportunity to expand its business activities conducted and not limited to business activities of credit guarantee services provision, such as:

1. Guarantee for Loans distributed by Cooperatives to its members.
2. Credit Guarantee and/or Loans Partnership Program distributed by State-Owned Enterprises for Partnership and Community Development Program (PKBL).
3. Guarantee for Loans Disbursement with Lien and Fiduciary Guarantees.
4. Guarantee for Debt Securities.
5. Guarantee for Trade/Commerce Transactions.
6. Guarantee for Goods and/or Services Procurement (Surety Bond).
7. Guarantee for Bank Guarantee (Counter Bank Guarantee).
8. Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN).
9. Guarantee for Letter of Credit (L/C).
10. Guarantee for Customs.
11. Management Consulting Service related to Guarantee Business Activities.
12. Provision of guaranteed information/database related to Guarantee Business Activities.
13. Other Guarantee after obtaining approval from the Minister.

Produk Usaha Penjaminan
Guarantee Business Products

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee is a guarantee provision activity upon fulfilling financial obligations of the Credit Recipients (Guaranteed) to the Guarantee Recipients. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, which are the credit provider business entity called Guarantee Recipients, credit debtor called Guaranteed, and Credit Guarantee Company known as Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process

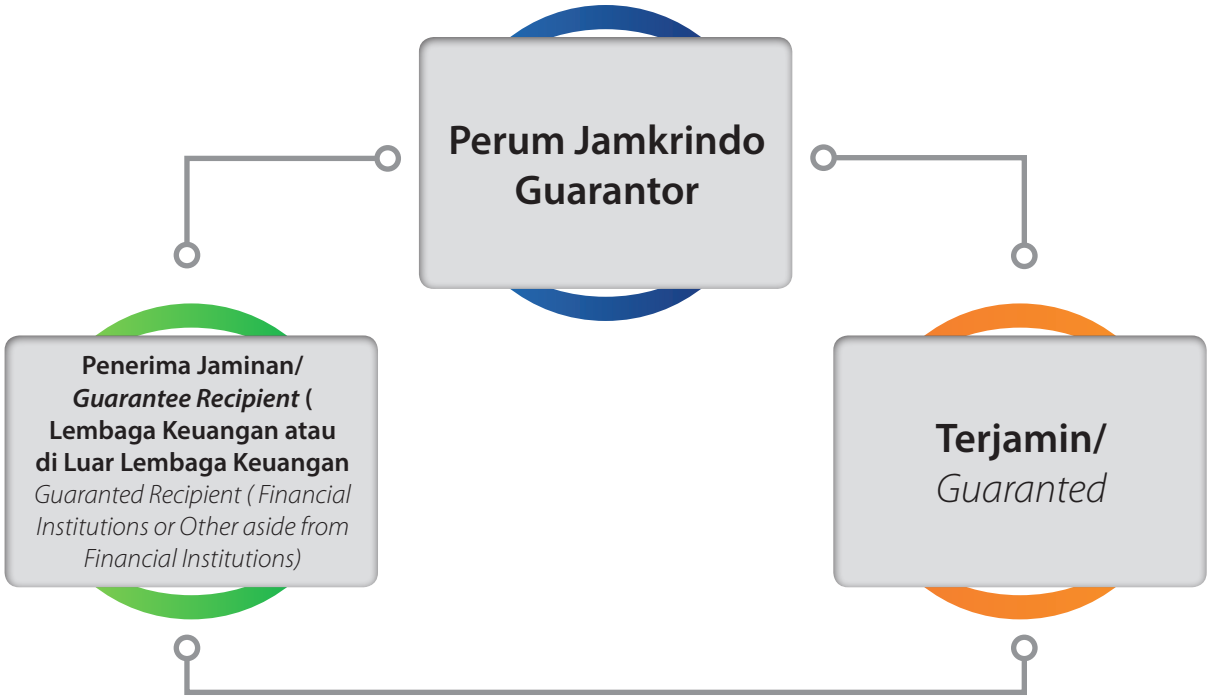

Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

The basic principle of Credit Guarantee is the acquisition of the failure risk of the Guaranteed in meeting its financial obligations to the Guarantee Recipient, but does not eliminate the financial obligations of the Guaranteed to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient declares that the loan is settled.

Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipients at the time the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient, but it has not met the banking credit administration requirements, especially regarding the fulfillment of collateral adequacy (unbankable).

Produk Usaha Penjaminan
Guarantee Business Products

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

Types of Guarantee Business Products, among others, are as follows:

Kegiatan Activity	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Umum *Commercial Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) *Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed (Guarantee process is done on a case-by-case basis).*
Penjaminan Kredit Mikro *Micro Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah *plafond* kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara otomatis bersyarat) *Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, Micro and Small Entrepreneurs, for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed, with total credit or financing platforms adjusted in accordance with the applicable micro credit provisions of the Guarantee Recipients (guarantee process is conducted in a Conditional Automatic manner).*
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi *Guarantee for Bank Guarantee (Counter Guarantee)*	Pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin (*Principle*). *Provision of guarantee in the form of counter guarantee over Bank Guarantee's facilities issued by the Guarantee Recipients to the Guaranteed (Principle).*
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa *Guarantee for Construction Credit and Procurement of Goods/Services*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan *Bowheer* (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. *Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital of construction services and procurement of goods/services in accordance with the work contract between the Guaranteed and Bowheer (project owner), in which the sources of repayment are from the State Budget/Regional Budget/SOE or private sectors.*
Penjaminan Distribusi Barang *Guarantee for Goods Distribution*	Penjaminan atas kredit penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. *Guarantee over goods distribution credit from the Guarantee Recipients (goods producers) to the Guaranteed which obliged the Guaranteed to settle the payment within a specific time period.*
Penjaminan Kredit Multiguna *Multipurpose Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (CPNS, PNS, pegawai tetap suatu Perusahaan Swasta/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga *channeling*, yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetap Terjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (proses penjaminan dilakukan secara otomatis bersyarat). *Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, individuals (candidate of Civil Servants, Civil Servants, permanent employees of Private Companies/Government Institutions), either the distribution is direct or through a channeling institution where the source of repayment comes from the fixed salary of the Guaranteed (Guarantee Process is done in a Conditional Automatic manner).*

Produk Usaha Penjaminan
Guarantee Business Products

Kegiatan Activity	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *Guarantee for Micro Credit Program (KUR)*	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada UMKM dan Koperasi untuk usaha produktif dan layak, namun belum *bankable*. Penjaminan Perum Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan *plafond* sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk *plafond* kredit lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel. *Credit/Financing for working capital and/or investment to MSMEs & Cooperatives of feasible and productive business but are not yet bankable. Perum Jamkrindo Guarantee for Micro Credit Program (KUR) with platform up to IDR20,000,000 (twenty million rupiah) is included in Micro KUR category, while for credit platform of more than IDR20,000,000 (twenty million rupiah) up to IDR500,000,000 (five hundred million rupiah) is included in Retail KUR category.*
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* (pihak ketiga) bahwa apabila *Principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut. *A three-party agreement among the Surety (First Party) on a trust basis to the Principal (Second Party) in which both parties promise to the Obligee (Third Party) that should the Principal by any reason neglect or fail to perform the duty as stipulated in the agreement with the Obligee, the Surety will be responsible to the Obligee for fulfilling the Principal's obligations.*
Penjaminan Kredit BPR/BPRS *BPR/BPRS Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR. Penjaminan Kredit BPR/BPRS. *Guarantee over credit distributed by banking and/or other business entities to BPR. BPR/BPRS Credit Guarantee.*
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP *KPR Sejahtera FLPP Guarantee*	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Guarantee activities on housing loan distribution, which is a coordination program between the Bank and Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia with low interest, fixed light installment, and long period of credit for low-income communities.*
Customs Bond	Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/*Customs Company*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/*Principal*) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/*Obligee*) *Guarantee engagement among three parties; the First Party (Guarantor/Customs Company) is engaged to fulfill obligations arising from the Second Party (Guaranteed/Principal) to the Third Party (Guarantee Recipient/Obligee).*
Penjaminan Keagenan Kargo *Cargo Agency Guarantee*	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/*Obligee* (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/*Principal* (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/*Obligee*. *Guarantee given to Guarantee Recipient/Obligee (Transportation Service Provider Company) on the obligation of the Guaranteed/Principal (Cargo Agency) to pay cargo transportation cost to the Guarantee Recipient/Obligee.*
Penjaminan *Invoice Financing* *Invoice Financing Guarantee*	Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada *Obligee* terkait dengan tagihan *Supplier* dari *Obligee*. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk *Payment Bond* atau Jaminan Pembayaran lainnya. *Guarantee facility over financing given by Financial Institutions to the Obligee in relation with Supplier bills from the Obligee. Cargo Agency Guarantee is a form of Payment Bond or other Financing Guarantee.*
Penjaminan Pembiayaan Kendaraan Bermotor *Vehicle Financing Guarantee*	Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk kredit kendaraan bermotor. *Guarantee over financing given by Financial Institutions for vehicle credit.*

Kompetensi Inti
Core Competence

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada *customer*.

Core competence has big potential in strengthening the competitive advantage. However, strong competitive advantage may still be obstructed by dynamic factors in the market competition, such as lack of customers' loyalty and lack of customer relationship. In the present and the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamic factors of market competition regarding the moral hazard potential on customers.

Kriteria Identifikasi *Identification Criteria*	*Accessibility*	Kemampuan mengakses berbagai pasar potensial *Ability to access various potential markets*
	Unik/Langka *Unique/Rare*	Peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan *Imitation by competitors is difficult to do*
	Value Creation	Memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan *Giving big contribution to the product benefits, particularly from the customers' perspective*
Risiko *Risk*	1. Peluang untuk pertumbuhan terabaikan *Opportunity for growth is neglected* 2. Re-organisasi Perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah *Company reorganization into smaller business units may result in divided and weak competence* 3. Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait *Lack of sensitivity towards the growth of other relevant opportunities* 4. Investasi dapat menjadi kurang optimal *Investment may be less optimum* 5. Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, *core competency* kurang mendapatkan perhatian *Too focus on on periodical work which is highly affected by selling price and market competition Consequently, a lack of attention of core competence*	
Kendala *Obstacle*	1. Kerugian akibat melemahnya *core competency* hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung dimuka *A loss due to the weakened core competence in which only small amount can be calculated in advance* 2. Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika *core competency* diperhatikan sepenuhnya *High market growth resulting in fairly good performance may obscure bigger potential should the core competency is fully considered*	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM dan Koperasi.
   a. Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
   b. Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
2. Sistem informasi yang reintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
3. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.

Based on the identification criteria above and the improvement result of the Company's business model, the Company's core competence is as follows:

1. Possessing good skills and reputation in credit guarantee sector for MSMEs & Cooperatives.
   a. Fast claim payment for credit guarantee.
   b. Providing products in accordance with business partner's needs (customized product).
2. An information system that is reintegrated internally and externally to the business partners.
3. Possessing big capital and big support from the Government.

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi.

The Company's Organizational Structure has been validated by the Directors' Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 dated 20 April 2016 on Organizational Structure.

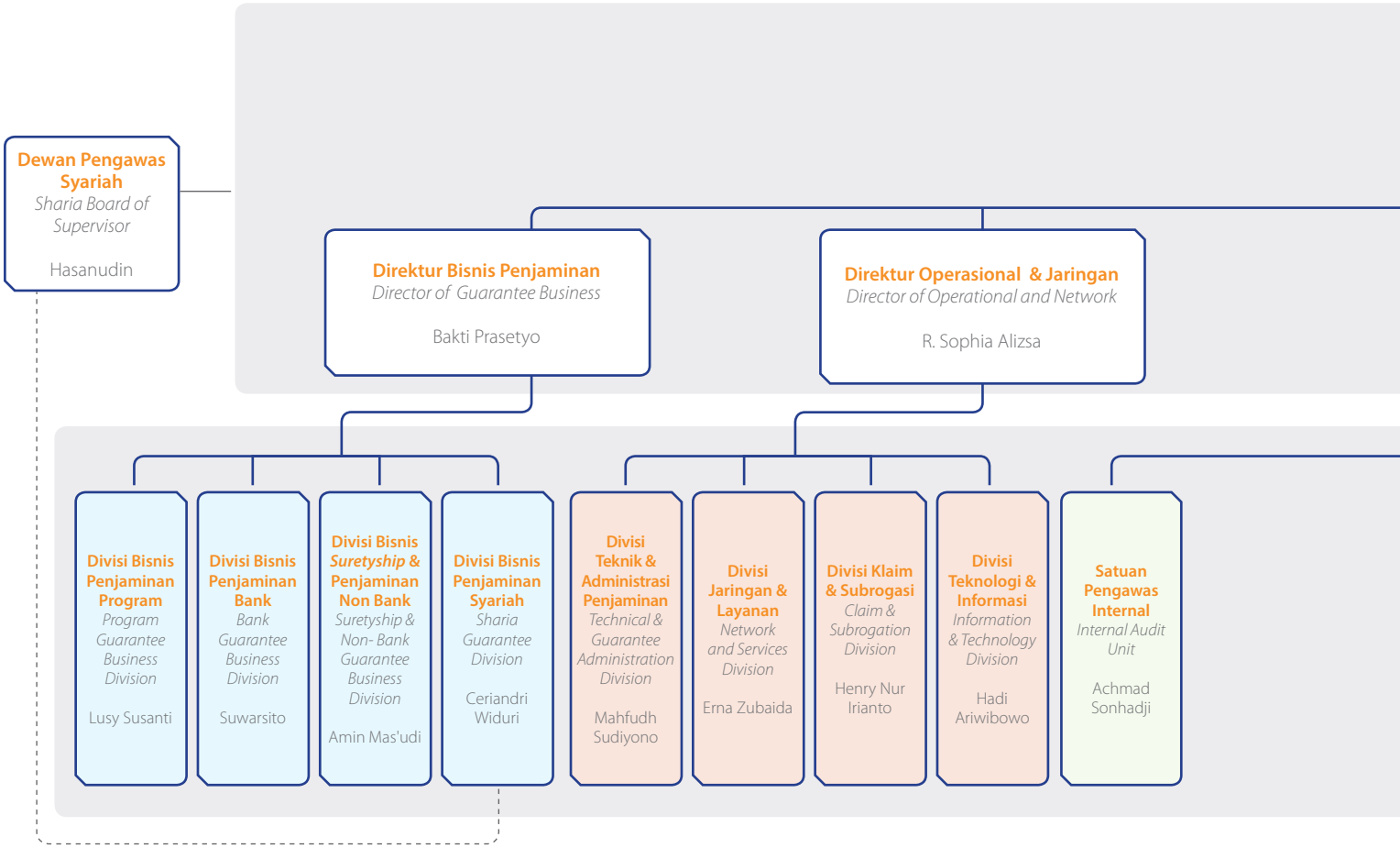

Struktur Organisasi
Organizational Structure

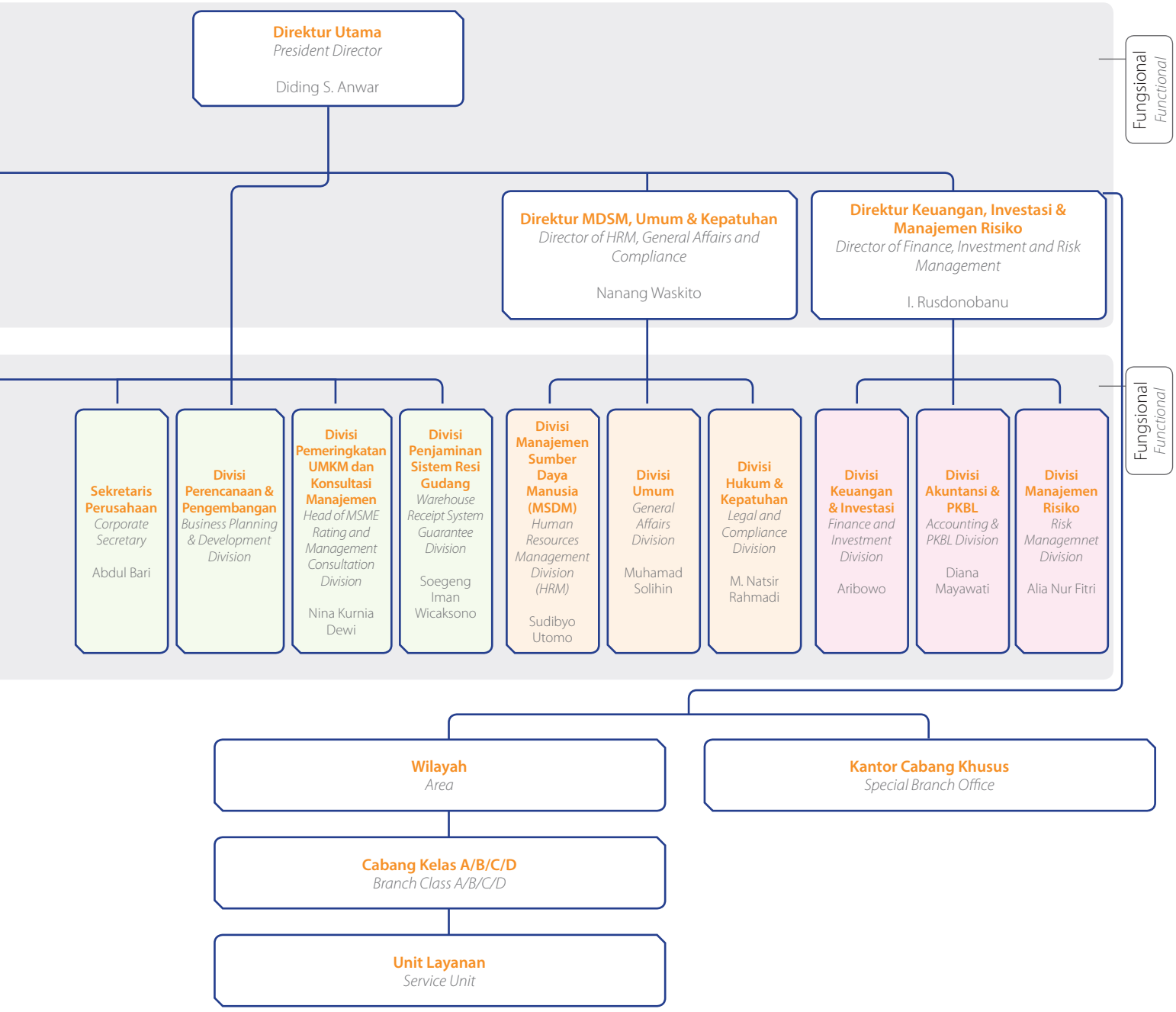

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to guarantee professional business conduct based on Validation Letter from the Ministry of SOE No. S-34/mBu/2014 on Company Long Term Plan (RJPP), the Board of Supervisors and Directors establish the Vision, Mission, and Corporate Culture as follows:

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.

To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.

Misi Mission

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:

1. Dharma Pertama
   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.
2. Dharma Kedua
   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.
3. Dharma Ketiga
   Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

The Company's vision is described into missions that are "Tridharma Jamkrindo" as follows:

1. First Dharma
   Conducting guarantee activities for business development of MSMEs and Cooperatives.
2. Second Dharma
   Providing wider and more qualified services.
3. Third Dharma
   Providing interests to the stakeholders in accordance with sound business principles.

KREDO PERUSAHAAN

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola Perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.

CORPORATE CREDO

Perum Jamkrindo's Corporate Credo consists of 5 (five) points as follows:

1. Trustworthy in conducting business guarantee.
2. Responsive to business environment changes.
3. Excellent and Professional service.
4. Healthy corporate governance
5. Reputable in providing customer satisfaction

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "*TRUST*".

CORPORATE CULTURE

Perum Jamkrindo's Corporate Culture comprises of 5 (five) points of cultural values held by the Company, called TRUST culture.

Substansi yang terkandung di dalam visi, misi, kredo dan budaya Perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan.

Substances contained in the vision, mission, credo, and Corporate culture have been acknowledged and approved by the Board of Supervisors and President Director of the Company.

Makna Branding Logo
Meaning of Branding Logo

Logo Perusahaan terdiri dari akronim nama Perusahaan dan ikon grafis berbentuk bujur sangkar.

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "*Brand Awareness*" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang.

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi. Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari motto Perusahaan yaitu "kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan bahwa Penjaminan selalu tediri dari 3 pihak, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin.

Logo Perusahaan dibangun dari 2 (dua) warna, yaitu Biru dan Putih. Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerjasama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas dan bersatu; hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan yaitu pelayanan dan kemitraan. Sementara warna Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

The Company logo consists of acronyms of the Company name and square-shaped graphic icons.

The Company's acronym, "JAMKRINDO", is an abbreviation of Jaminan Kredit Indonesia (Indonesia Credit Guarantee). The acronym is very familiar when pronounced, aiming to build "Brand Awareness" and identity through its pronunciation, which psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation.

The graphic icon on the logo forms a firm and angular "J" configuration, which represents the Company's firmness, goal-focused orientation, and consistency in vision. The letter "J" forms a white-colored key, meaning the basis of the Company's motto "the key of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) to success". The letter "J" in the logo is made up of 3 (three) firm white lines, symbolizing the unity of the core of the Company's service, which is Guarantee towards MSMEs.

The Company logo is built from 2 (two) colors, which are Blue and White. Blue color symbolizes concentration, calmness, cooperation, able to receive all inputs, sensitive, intelligent and united; this is in line with the Company's business sectors, which are service and partnership. While the White color is a symbol of purity, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of these two colors gives a sense of tranquility and maturity of services formed due to the firmness of holding the Company culture.

The selection of strong, clear, solid, yet simple and dynamic letters is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. The bold type aims to reinforce the symbolic meaning of the Company's name and the connotations relevant to the Company's core business.

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors

Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Malang, 23 Juni 1958
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 7 Oktober 2014 - 6 Oktober 2019
Indonesian citizen.
59 years old.
Born in Malang, 23 June 1958
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 7 October 2014 - 6 October 2019

Pendidikan
(S2) Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 (1998); (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Jember (1984).

Keahlian
Manajemen dan Administrasi.

Riwayat Profesi
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI (2013-sekarang); Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM RI (2012-2013); Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (2006-2011); Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur (2005-2006); Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur (2005); Pj. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Provinsi Jawa Timur (2001-2005); Kepala Bagian Penyusunan Program Provinsi Jawa Timur (1994-2001); Kasubag Penyusunan Rencana Provinsi Jawa Timur (1992-1994); Kasubag Perhubungan Provinsi Jawa Timur (1991-1992).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Jabatan Ketua Dewan Pengawas diemban sejak 7 Oktober 2014 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-199/mBu/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2014, Braman Setyo belum pernah menjabat pada jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI (2013-sekarang).

Education
(S2) Master in Administration Science of Universitas 17 Agustus 1945 (1998); (S1) Bachelor in Economics majoring Corporate Management of Universitas Jember (1984).

Expertise
Management and Administration

Professional History
Deputy for Business Development and Restructuring Division, Ministry of Cooperatives and SME RI (2013-present); Deputy for Production Division, Ministry of Cooperatives and SME RI (2012-2013); Head of Department of Cooperatives and MSME of East Java Province (2006-2011); Head of Public Bureau of East Java Regional Secretariat (2005-2006); Head of Public Welfare Bureau of East Java Regional Secretariat (2005); Acting Head of Program Planning Division of East Java Regional Secretariat (2001-2005); Head of Program Planning of East Java Province (1994-2001); Head of Sub-Department of East Java Provincial Planning (1992-1994); Head of Transportation Sub-Department of East Java Province (1991-1992).

Position History As Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Chairman of the Board of Supervisors has been carried out since 7 October 2014 through the Decree of the Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-199/mBu/10/2014 dated 7 October 2014 on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. The position of Chairman of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to his appointment in 2014, Braman Setyo had never served on the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Deputy of Business Development and Restructuring Division, Ministry of Cooperatives and SME RI (2013-present).

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Ujung Bone, 23 Juni 1959
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 19 November 2012 - 18 November 2017
Indonesian citizen.
58 years old.
Born in Ujung Bone, 23 June 1959
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 19 November 2012 - 18 November 2017

Pendidikan
Pengukuhan Profesor dan Guru Besar bidang Ilmu Tafsir dari Universitas Ushuluddin UIN IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002); (S3) Doktoral dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999); (S2) Magister dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992); (S1) Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984).

Keahlian
Al Qur'an dan Syariat Islam

Riwayat Profesi
Wakil Menteri Agama RI (2011-sekarang); Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI (2006-2011); Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta (2006-sekarang); Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran (PSQ) (2004-sekarang); Guru Besar dalam bidang Ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002-sekarang); Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (2015-2019).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 19 November 2012 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-409/mBu/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas. Jabatan Ketua Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1 Sebelum pengangkatannya di tahun 2012, Nasaruddin Umar belum pernah menjabat pada jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Wakil Menteri Agama RI (2011-sekarang).

Education
Inauguration of Professor of Tafsir Science from Universitas Ushuluddin UIN IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002); (S3) Doctoral in IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999); (S2) Master in IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992); (S1) Bachelor in Faculty of Sharia IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984).

Expertise
Quran and Shari'a

Professional History
Vice Minister of Religious Affair RI (2011-present); Director General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) Ministry of Religious Affairs RI (2006-2011); Rector of the Al-Quran Institute of Higher Education Jakarta (2006-present); Deputy Director of the Center for Quran Studies (PSQ) (2004-present); Professor in the field of Tafsir Science at Faculty of Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002-present); Vice Chairman of Consideration Board of Indonesian Ulama Council (2015-2019).

Position History As Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of the Board of Supervisors has been carried out since 19 November 2012 through the Decree of the Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-409/mBu/2012 dated 19 November 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo appointing Nasaruddin Umar as Member of the Board of Supervisors. The position of Chairman of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to his appointment in 2012, Nasaruddin Omar Has never served in Perum Jamkrindo Board of Trustees.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Deputy Minister of Religious Affairs RI (2011-present).

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun
Kelahiran Demak, 11 Juni 1955
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 31 Desember 2013 - 30 Desember 2018

Indonesian citizen.
61 years old.
Born in Demak, 11 June 1955
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 31 December 2013 - 30 December 2018

Pendidikan
Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981).

Keahlian
Manajemen dan Pertanian.

Riwayat Profesi
Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-Sekarang); Direktur Utama PT Kogas Diryap Konsultan (1991-1997); Marketing Manager PT Kampsax International, Denmark (1986-1990).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 31 Desember 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/mBu/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1 Sebelum pengangkatannya di tahun 2013, Subandriyo belum pernah menjabat pada jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-sekarang).

Pengalaman Organisasi
Sekretariat Jenderal Majelis Nasional KAHMI (2013-sekarang); Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (2011- sekarang); Wakil Sekretariat Jenderal PP Kagama (Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) (2010-sekarang); Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat Pengguna Pupuk Organik Indonesia (Maporina) (2002-sekarang); Bendahara Yayasan Yayasan Amal Insani (2006-sekarang).

Education
Bachelor of Agriculture, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981).

Expertise
Management and Agriculture

Professional History
President Director of PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-present); President Director of PT Kogas Diryap Konsultan (1991-1997); Marketing Manager of PT Kampsax International, Denmark (1986-1990).
Member of the Board of Supervisors

Position History As Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of the Board of Supervisors has been carried out since 31 December 2013 through the Decree of the Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-435/mBu/10/2013 dated 31 December 2013 on the Dismissal and Appointment of the Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. The position of Member of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to his appointment in 2013, Subandriyo Has never served in Perum Jamkrindo Board of Trustees.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
President Director of PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-present).

Organizational Experience
General Secretary, KAHMI National Assembly (2013-present); Vice Chairman of Central Governing Body of KAHMI Businessmen Association (2011-present); Deputy General Secretary of PP Kagama (Central Governing Alumni of Universitas Gadjah Mada) (2010-present); Head of Inter-Institutional Relationship of Indonesian Organic Fertilizer Users (Maporina) (2002-present); Treasurer of Amal Insani Foundation (2006-present).

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 63 tahun
Kelahiran Atapange, 21 April 1954
Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten
Periode Jabatan 28 Juni 2013 - 27 Juni 2018
Indonesian citizen.
63 years old.
Born in Atapange, 21 April 1954
Domiciled in South Tangerang, Banten
Period of Office 28 June 2013 - 27 June 2018

Pendidikan
Magister Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta (1999); *Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies*, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK (1986); Sarjana Muda Akuntansi di Universitas Jayabaya Jakarta (1978).

Keahlian
Manajemen Keuangan.

Riwayat Profesi
Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan (2013-sekarang); salah satu dari tujuh deklarator pendirian Himpunan Pengusaha KAHMI dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (2004-2006); Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (2001-2003); Pusat Manajemen Obligasi Negara Kementerian Keuangan (2001-2003); Unit Manajemen Penagihan Utang Kementerian Keuangan (2000-2001); Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (1979-2000).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 31 Desember 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK 297/mBu/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1 Sebelum pengangkatannya di tahun 2013, Dahlan Siamat belum pernah menjabat pada jajaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan (2013-sekarang).

Pengalaman Organisasi
Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI (2012); Wakil Ketua Bidang Pengembangan Moneter, Fiskal dan Publik Islami pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2012); Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2012); Anggota *Finance and Treasury Association* (FTA) Australia (2005).

Education
Master of Financial Management, STIE IPWI, Jakarta (1999); Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK (1986); Bachelor of Accounting at Universitas Jayabaya Jakarta (1978).

Expertise
Financial Management

Professional History
Director of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance (2013-present); one of the seven declarators of KAHMI Businessmen Association establishment and Vice Chairman of Central Governing Body of KAHMI Businessmen Association (2004-2006); Directorate General of Debt Management (DJPU) Ministry of Finance (2001-2003); State Bond Management Center, Ministry of Finance (2001-2003); Debt Collection Management Unit, Ministry of Finance (2000-2001); Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (1979-2000).

Position History As Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of the Board of Supervisors has been carried out since 31 December 2013 through the Decree of the Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK 297/mBu/2013 dated 28 June 2013 on the Appointment of Member of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointing Dahlan Siamat as a Member of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. The position of Member of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to his appointment in 2013, Dahlan Siamat Has never served in Perum Jamkrindo Board of Trustees.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Director of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance (2013-present).

Organizational Experience
Plenary Member of National Sharia Board, MUI (2012); Deputy Head of Islamic Monetary, Fiscal, and Public Development Division, Sharia Economic Society (MES) (2012); Member of Consultative Board of Islamic Economic Expert Association (IAEI) (2012); Member of Finance and Treasury Association (FTA) Australia (2005).

Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Pati, 8 Mei 1971
Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta
Periode Jabatan 12 April 2016 - 11 April 2021

Indonesian citizen.
46 years old.
Born in Pati, 8 May 1971
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 12 April 2016 - 11 April 2021

Pendidikan
Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006); Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Keahlian
Manajemen SDM.

Riwayat Profesi
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang); Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012-2014); Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010-2012); Kepala Subbagian Pelayanan Hukum (2006-2010).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2016, Noor Ida Khomsiyati belum pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang)

Education
Master in HR Management, Universitas Bhayangkara (2006); Bachelor of Law, Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Expertise
HR Management.

Professional History
Head of Legal Aid Division, Legal Bureau of the Secretariat of Ministry of SOE (2014-present); Head of Legal Aid and Service I Division Ministry of SOE (2012-2014); Head of Legal Aid and Service II C Sub-division Ministry of SOE (2010-2012); Head of Legal Services Sub-division (2006-2010). Member of the Board of Supervisors

Position History As Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of the Board of Supervisors has been carried out since 12 April 2016 through the Decree of the Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 dated 12 April 2016 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. The position of Member of the Board of Supervisors is the 1st period. Prior to her appointment in 2016, Noor Ida Khomsiyati had never been appointed as the Company's Board of Supervisors.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Head of Legal Aid Division, Legal Bureau of the Secretariat of Ministry of SOE (2014-present);

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Board of Supervisors Profile

Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 72 tahun
Kelahiran Majalengka, 18 Juli 1945
Berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan
Periode Jabatan 1 Juli 2016 - 30 Juni 2019
Indonesian citizen.
72 years old.
Born in Majalengka, 18 July 1945
Domiciled in Ciputat, South Tangerang
Period of Office 1 July 2016 - 30 June 2019

Pendidikan
Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Keahlian
Asuransi Syariah

Riwayat Profesi
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-sekarang); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota DPS Bank Niaga Syariah (1998-sekarang); Ketua DPS Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo
Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-sekarang); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota DPS Bank Niaga Syariah (1998-sekarang); Ketua DPS Bank Victoria Syariah (1998-sekarang).

Education
Doctoral of Syariah degree in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); Master of Syariah degree in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); Bachelor of Syariah degree in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Expertise
Sharia Insurance

Professional History
Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-present); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia (1998-present); Chairman of DPS Bank Victoria Sharia (1998-present); Full-time Professor at Sharia Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-present).

Position History As Sharia Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Chairman of Sharia Board of Supervisors has been carried out since 2006 and he was reappointed in 2016 through Directors' Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-present); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia (1998-present); Chairman of DPS Bank Victoria Sharia (1998-present).

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Board of Supervisors Profile

Muhammad Syakir Sula
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 1 Juli 2016 - 30 Juni 2019

Indonesian citizen.
52 years old.
Born in Palopo, South Sulawesi, 12 February 1964
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 1 July 2016 - 30 June 2019

Pendidikan
Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung (1989).

Keahlian
Asuransi Syariah

Riwayat Profesi
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-2015); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota DPS Bank niaga Syariah, Ketua DPS Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang); Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2003-sekarang); Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2004-sekarang); Ketua III Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (2008-2013); Ketua Umum *Internasional Islamic Insurance Society* (IIIS) (2007-2012); Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) (2005-sekarang); Deputi Ketua Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2008-2014); Komisaris Independen Jamkrindo Syariah (2015-sekarang).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2009, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2010-sekarang); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (2000-sekarang); Anggota DPS Bank niaga Syariah, Ketua DPS Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Komisaris Independen Jamkrindo Syariah (2015-sekarang).

Sertifikat Profesi
FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*); AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), QIP (*Qualified Insurance Practitioner*), CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*).

Education
Bachelor of Agriculture, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (1989).

Expertise
Sharia Insurance

Professional History
Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-2015); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia, Chairman of Bank Victoria Sharia (1998-present); Full-time Professor of Sharia Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-present); Secretary General of Sharia Economic Society (MES) (2003-present); Vice Chairman of Islamic Economic Expert Association (IAEI) (2004-present); Chairman III of Sharia Economic Communication Center (PKES) (2008-2013); Chairman of International Islamic Insurance Society (IIIS) (2007-2012); Plenary Member of National Sharia Board-MUI (DSN-MUI) (2005-present); Deputy Head of Public Relations Division of Indonesia Waqf Agency (BWI) (2008-2014); Independent commissioner jamkrindo syariah (2015-present).

Position History As Sharia Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of Sharia Board of Supervisors has been carried out since 2009 and he was reappointed in 2016 through Directors' Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Chairman of Fatwa Commission, Indonesia Ulama Council (MUI) (2010-present); Member of National Sharia Board MUI (2000-present); Member of DPS Bank Niaga Sharia, Chairman of DPS Bank Victoria Sharia (1998-present); Independent commissioner jamkrindo syariah (2015-present).

Professional Certification
FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society); AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), QIP (Qualified Insurance Practitioner), CRGP (Certified in Risk Governance Professional).

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Board of Supervisors Profile

Gunawan Yasni
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Board of Supervisors

(Menjabat hingga 30 November 2016)
Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Jakarta, 17 September 1969
Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten
(In position until 30 November 2016)
Indonesian citizen.
48 years old.
Born in Jakarta, 17 September 1969
Domiciled in South Tangerang, Banten

Pendidikan
Magister Manajemen di Prasetiya Mulya (1995); Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia (1993).

Keahlian
Keuangan Syariah

Riwayat Profesi
Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Ekspor Indonesia (2006-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Deutsche Bank Indonesia (2006-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Astra Buana (2006-sekarang); Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (2006-sekarang); Anggota Pokja Pasar Modal & Program Dewan Syariah Nasional (2006-sekarang); Wasekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (2007-2012).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo
Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak 24 Juli 2013 , dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 untuk masa jabatan hingga 30 November 2016.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Ekspor Indonesia (2006-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Deutsche Bank Indonesia (2006-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Astra Buana (2006-sekarang); Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (2006-sekarang); Anggota Pokja Pasar Modal & Program Dewan Syariah Nasional (2006-sekarang).

Sertifikat Profesi
Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) dari PSTTI UI/MI (2001); *Fellow of Islamic Insurance Society* (FIIS) dari IPKG/IIS (2009); *Certified Risk Professional* (CRP) dari BSMR/GARP *Advanced Level* Iv (2011); *Senior Chartered Accountant/Certified Public Accountant* (CA/CPA) (1996/2015); T*he 1st Sharia Expert on Capital Market* (ASPM 01) dari FSA/ojek (2016).

Education
Master of Management, Prasetiya Mulya (1995); Bachelor of Economics majoring in Accounting, Universitas Indonesia (1993).

Expertise
Sharia Finance

Professional History
Member of Sharia Supervisory Board of Bank Ekspor Indonesia (2006-present); Member of Sharia Supervisory Board of Deutsche Bank Indonesia (2006-present); Member of Sharia Supervisory Board of Astra Buana Insurance (2006-present); Member of Sharia Economic Society (2006-present); Member of Capital Market & Program Working Unit, National Sharia Board (2006-present); Deputy Secretary General of Sharia Economic Society (2007-2012).

Position History As Sharia Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
The position of Member of Sharia Board of Supervisors has been carried out since 24 July 2013 , and he was reappointed in 2016 through Directors' Decree No. 124/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016 for period of office until 30 November 2016.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Member of Sharia Supervisory Board of Bank Ekspor Indonesia (2006-present); Member of Sharia Supervisory Board of Deutsche Bank Indonesia (2006-present); Member of Sharia Supervisory Board of Astra Buana Insurance (2006-present); Member of Sharia Economic Society (2006-present); Member of Capital Market & Program Working Unit, National Sharia Board (2006-present).

Professional Certification
Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) from PSTTI UI/MI (2001); Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) from IPKG/IIS (2009); Certified Risk Professional (CRP) from BSMR/GARP Advanced Level IV (2011); Senior Chartered Accountant/Certified Public Accountant (CA/CPA) (1996/2015); The 1st Sharia Expert on Capital Market (ASPM 01) from FSA/OJK (2016).

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Bakti Prasetyo
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment, and Risk Management

R. Sophia Alizsa
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network

Nanang Waskito
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs, and Compliance

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

Warga negara Indonesia
Usia 62 tahun
Kelahiran Cirebon, 9 Agustus 1954
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 7 September 2012 - 6 September 2017
Indonesian citizen
62 years old
Born in Cirebon, 9 August 1954
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 7 September 2012 - 6 September 2017

Pendidikan
Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta (2002); Magister Manajemen Keuangan Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang (1996); Sarjana Ekonomi Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung (1989).

Keahlian
Manajemen dan Pendidikan.

Riwayat Profesi
Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) (2008-2012); Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja (Persero) (2000-2008); Kepala Divisi Litbang PT Jasa Raharja (Persero) (1996-2000); Kepala Cabang Palembang PT Jasa Raharja (Persero) (1994-1996); Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) (2012-sekarang); Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (2011-sekarang); Dewan Pembina Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (2011-sekarang).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo
Jabatan Direktur Utama diemban sejak 7 September 2012 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-316/mBu/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama j.o Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik modal Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur Utama ini merupakan periode ke-1 Sebelum pengangkatannya di tahun 2012, Diding S. Anwar belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) (2012-sekarang); Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (2011-sekarang); Dewan Pembina Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (2011-sekarang).

Education
Doctor in Education Management, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) (2002); Master of Financial Management, Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang (1996); Bachelor of Economics, Universitas Pasundan (Unpas) Bandung (1989).

Expertise
Management and Education

Professional History
President Director of PT Jasa Raharja (Persero) (2008-2012); Director of HR & General Affairs of PT Jasa Raharja (Persero) (2000-2008); Head of R&D Division of PT Jasa Raharja (Persero) (1996-2000); Head of Palembang Branch of PT Jasa Raharja (Persero) (1994-1996); Chairman of Association of Indonesia Credit Guarantee Corporation (Asippindo) (2012-present); Central Management Board of Chamber of Commerce and Industry (KADIN) (2011-present); Consultative Board of the Indonesian Insurance Management Institute (AAMAI) (2011-present).

Position History As Directors of Perum Jamkrindo
The position of President Director has been carried out since 7 September 2012 through the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-316/mBu/2012 dated 7 September 2012 on the Dismissal and Appointment of Member of Directors of Perum Jamkrindo, appointing Diding S. Anwar as the President Director in conjunction with the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 on Nomenclature Changes of Members of Public Corporate (Perum) Directors of Indonesia Credit Guarantee. The position of President Director is the 1st period. Prior to his appointment in 2012, Diding S. Anwar Has never served in Perum Jamkrindo Board of Director.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Chairman of Association of Indonesia Credit Guarantee Corporation (Asippindo) (2012-present); Central Management Board of Chamber of Commerce and Industry (KADIN) (2011-present); Consultative Board of the Indonesian Insurance Management Institute (AAMAI) (2011-present).

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Bakti Prasetyo
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Bandung, 10 November 1958
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 7 September 2012 - 6 September 2017
Indonesian citizen
59 years old
Born in Bandung, 10 November 1958
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 7 September 2012 - 6 September 2017

Pendidikan
Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000); Sarjana Perikanan Institut Pertanian Bogor (1982).

Keahlian
Manajemen

Riwayat Profesi
Komisaris Utama entitas anak, PT Penjaminan Jamrindo Syariah (2014-sekarang); Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Perum Jamkrindo (2013-2014); Direktur Pengembangan Perum Jamkrindo (2007-2013); Kepala Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2003-2007); Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Perum Jamkrindo (2001-2003); Kepala Divisi Pengembangan dan Perencanaan Usaha Perum Jamkrindo (1998-2001); Kepala Divisi Penjaminan Bank Perum Jamkrindo (1995-1998); Kepala Divisi Bisnis Kredit Umum Perum Jamkrindo (1994-1995); Kepala Biro Usaha I Perum Jamkrindo (1993-1994); Kepala Kantor Cabang Semarang Perum Jamkrindo (1990-1993); Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) (2012-sekarang); Anggota Komite Harian Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2012-sekarang); Wakil Sekretaris Jenderal Konferensi ACSIC di Bali (2000); Dewan Pusat Pengembangan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (2000).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo
Jabatan Direktur diemban sejak tahun 2007 sebagai Direktur Pengembangan, dimana pada tahun 2013 dipercaya sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi. Bakti Prasetyo diangkat menjadi Direktur Bisnis Penjaminan dengan masa jabatan meneruskan periode jabatan sebagai Direksi. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-2 untuk masa tugas 2012-2017, melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Komisaris Utama entitas anak, PT Penjaminan Jamrindo Syariah (2014-sekarang); Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) (2012-sekarang); Anggota Komite Harian Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2012-sekarang).

Sertifikasi
Ceritified Risk Government Professional (CRGP) (2013).

Education
Master of Management of Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000); Bachelor of Fisheries, Bogor Agricultural Institute (1982).

Expertise
Management

Professional History
Chief Commissioner Subsidiaries, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-present); Director of Risk Management and Information Technology of Perum Jamkrindo (2013-2014); Director of Development of Perum Jamkrindo (2007-2013); Head of Bandung Branch Office of Perum Jamkrindo (2003-2007); Head of Business Financing Division of Perum Jamkrindo (2001-2003); Head of Business Development and Planning Division of Perum Jamkrindo (1998-2001); Head of Bank Guarantee Division of Perum Jamkrindo (1995-1998); Head of Commercial Credit Business Division of Perum Jamkrindo (1994-1995); Head of Business Bureau I of Perum Jamkrindo (1993-1994); Head of Semarang Branch Office of Perum Jamkrindo (1990-1993); Vice Chairman of Association of Indonesia Guarantee Corporation (Asippindo) (2012-present); Member of Daily Committee of Micro Credit Program (KUR) Policies (2012-present); Deputy Secretary General of ACSIC Conference in Bali (2000); Board of Development and Partnership Center of Small and Medium Enterprises (2000).

Position History As Directors of Perum Jamkrindo
Pak Bakti held a Director position since 2007, as Director of Development, and in 2013 he was appointed as Director of Risk Management and Information Technology. Bakti Prasetyo was appointed as Director of Guarantee Business, and his term of office continues as in the term for the Board of Directors. The current Director position is the second period for the period of 2012-2017, based on the Decree of State Owned Enterprises Minister as Owner of Perum Jamkrindo. SK 316/MBU/2012 dated September 7, 2012.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Chief Commissioner Subsidiaries, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-present); Vice Chairman of Association of Indonesia Guarantee Corporation (Asippindo) (2012-present); Member of Daily Committee of Micro Credit Program (KUR) Policies (2012-present).

Certification
Certified Risk Government Professional (CRGP) (2013).

Profil Direksi
Board of Directors Profile

R. Sophia Alizsa
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operational and Network

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Pamekasan, 9 Februari 1959
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 27 Agustus 2015 - 26 Agustus 2020
Indonesian citizen
58 years old
Born in Pamekasan, 9 February 1959
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 27 August 2015 - 26 August 2020

Pendidikan
Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2004); Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jember (1983).

Keahlian
Manajemen

Riwayat Profesi
Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo (2015 - Sekarang); Kepala Kantor Cabang Khusus Bri (2014-2015); Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro KP BRI (2010-2011); Wakil Pimpinan Wilayah, Kantor Wilayah BRI Malang (2009-2010); Wakil Inspektur, Kantor Inspeksi BRI Semarang (2007-2009); Wakil Inspektur, Kantor Inspeksi BRI Surabaya (2005-2007); Kepala Bagian Pembelian & Administrasi Logistik, Divisi Logistik KP BRI (2001-2005); Kepala Bagian Kebijakan, Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia KP BRI (1997-2001); Wakil Kepala Bagian Kebijakan, Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia KP BRI (1996-1997); Staf Kebijakan, Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia KP BRI (1987-1996).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo
Jabatan Direktur diemban sejak 27 Agustus 2015 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-151/mBu/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat R. Sophia Alizsa sebagai Direktur Penjaminan Non Bank j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-49/mBu/04/2015 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2015, R. Sophia Alizsa belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Direktur R Sophia Alizsa tidak memiliki rangkap jabatan.

Education
Master in Agribusiness Management, Bogor Agricultural Institute (2004); Bachelor of Economics majoring in Management, Universitas Jember (1983).

Expertise
Management

Professional History
Director of Operational and Network of Perum Jamkrindo (2015-present); Division Head, Branch Office of BRI (2014-2015); Division Head of Micro Business Working Network of KP BRI (2010-2011); Vice of Regional Head, Regional Office of BRI Malang (2009-2010); Vice Inspector, Inspection Office of BRI Semarang (2007-2009); Vice Inspector, Inspection Office of BRI Surabaya (2005-2007); Head of Logistic Purchasing & Administration, Logistic Division of KP BRI (2001-2005); Head of Policy Section, Human Resources Management Division of KP BRI (1997-2001); Vice Head of Policy Section, Human Resources Management Division of KP BRI (1996-1997); Staff of Policy Section, Human Resources Management Division of KP BRI (1987-1996).

Position History As Directors of Perum Jamkrindo
The position of Director has been carried out since 27 August 2015 through the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-151/mBu/2015 dated 27 August 2015 on the Appointment of Member of Directors of Perum Jamkrindo, appointing R. Sophia Alizsa as the Director of Non-Bank Guarantee in conjunction with the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-49/mBu/2015 on Nomenclature Changes of Members of Public Corporate (Perum) Directors of Indonesia Credit Guarantee. The position of Director is the 1st period. Prior to her appointment in 2015, R. Sophia Alizsa had never served as Directors of Perum Jamkrindo.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Director R Sophia Alizsa does not have concurrent position.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Nanang Waskito
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs, and Compliance

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Sidoarjo, 22 Maret 1958
Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Periode Jabatan 15 Januari 2013 - 14 Januari 2018
Indonesian citizen
59 years old
Born in Sidoarjo, 22 March 1958
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 15 January 2013 - 14 January 2018

Pendidikan
Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000); Sarjana Peternakan Institut Pertanian Bogor (1981).

Keahlian
Manajemen dan Agribisnis.

Riwayat Profesi
Direktur Penjaminan Perum Jamkrindo (2007-2013); Kepala Divisi Hukum, Klaim dan Subrogasi Perum Jamkrindo (2006-2007); Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2005-2006); Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Jamkrindo (2003-2005); Kepala Divisi Operasional I Perum Jamkrindo (2002-2003); Kepala Divisi Penjaminan Bank Perum Jamkrindo (2001-2002); Kepala Satuan Pengawas Intern Bank Perum Jamkrindo (1998-2001); Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Jamkrindo (1998); Sekretaris Jenderal Asippindo (2012-sekarang); Anggota Komite Bidang Asuransi, Pasar Modal, Bursa Berjangka, Broker dan Penjaminan Syariah pada Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) (2012-sekarang).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo
Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/mBu/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr. I. Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-2. Sebelum pengangkatannya di tahun 2013, Nanang Waskito dipercaya untuk menjabat Direktur Penjaminan untuk masa jabatan 2007-2013.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Sekretaris Jenderal Asippindo (2012-sekarang); Anggota Komite Bidang Asuransi, Pasar Modal, Bursa Berjangka, Broker dan Penjaminan Syariah pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2012-sekarang).

Sertifikasi
Ceritified Risk Government Professional (CRGP) (2013); *Qualified Internal Auditor* (QIA) (2001-2006); Penjaminan Syariah (Kafalah); *Enterprise Risk Management*.

Education
Master of Management of Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000); Bachelor of Fisheries, Bogor Agricultural Institute (1981).

Expertise
Management and Agribisnis

Professional History
Director of Guarantee of Perum Jamkrindo (2007-2013); Head of Legal, Claim, and Subrogation Division of Perum Jamkrindo (2006-2007); Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2005-2006); Head of Business Planning and Development Division of Perum Jamkrindo (2003-2005); Head of Operational I Division of Perum Jamkrindo (2002-2003); Head of Bank Guarantee Division of Perum Jamkrindo (2001-2002); Head of Bank Internal Monitoring Unit of Perum Jamkrindo (1998-2001); Head of Business Planning and Development Division of Perum Jamkrindo (1998); Secretary General of Asippindo (2012-present); Committee Member of Insurance, Capital Market, Future Exchange, Brokerage, and Sharia Guarantee Division at Sharia Economic Society (MES) (2012-present).

Position History As Directors of Perum Jamkrindo
The position of Director has been carried out since 15 January 2013 through the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/mBu/2013 dated 15 January 2013 on the Dismissal, Nomenclature Changes, and Appointment of Member of Directors of Perum Jamkrindo, appointing Nanang Waskito as Director of HR and General Affairs, I. Rusdonobanu as the Director of Finance and Major Investment in conjunction with the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 on Nomenclature Changes of Members of Public Corporate (Perum) Directors of Indonesia Credit Guarantee. The position of Director is the 2nd period. Prior to his appointment in 2013, Nanang Waskito was appointed as the Director of Guarantee for the period of 2007-2013.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Secretary General of Asippindo (2012-present); Committee Member of Insurance, Capital Market, Future Exchange, Brokerage, and Sharia Guarantee Division at Sharia Economic Society (MES) (2012-present).

Certification
Certified Risk Government Professional (CRGP) (2013); Qualified Internal Auditor (QIA) (2001-2006); Sharia Guarantee (Kafalah); Enterprise Risk Management.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment, and Risk Management

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Balikpapan, 25 Februari 1959
Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta
Periode Jabatan 15 Januari 2013 - 14 Januari 2018
Indonesian citizen
58 years old
Born in Balikpapan, 25 February 1959
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta
Period of Office 15 January 2013 - 14 January 2018

Pendidikan
Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995); Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988); Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981).

Keahlian
Ekonomi dan Manajemen.

Riwayat Profesi
Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang); Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang); Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006-2010); Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006); Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002-2006).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi Perum Jamkrindo
Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/mBu/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur Sdm dan Umum, Sdr. I. Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi utama j.o Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum pengangkatannya di tahun 2013, I. Rusdonobanu belum pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang).

Education
Master of Science majoring in Economics, North Eastern University, Boston, USA (1995); Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, Universitas Pancasila (1988); Diploma of STAN Accountancy Jakarta (1981).

Expertise
Economics and Management

Professional History
Assistant Deputy Services Business II Ministry of SOE (2010-present); Member of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Member of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Member of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Member of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Assistant Deputy Plantation Business II Ministry of SOE (2006-2010); Head of Plantation Business Division IIA Ministry of SOE (2006); Acting Head of Business Section of Agricultural Production Facility of Ministry of SOE (2002-2006).

Position History As Directors of Perum Jamkrindo
The position of Director has been carried out since 15 January 2013 through the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/mBu/2013 dated 15 January 2013 on the Dismissal, Nomenclature Changes, and Appointment of Member of Directors of Perum Jamkrindo, appointing Nanang Waskito as Director of HR and General Affairs, I. Rusdonobanu as the Director of Finance and Major Investment in conjunction with the Decree of Minister of SOE as the Share Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/mBu/2014 on Nomenclature Changes of Members of Public Corporate (Perum) Directors of Indonesia Credit Guarantee. The position of Director is the 1st period. Prior to his appointment in 2013, I. Rusdonobanu had never served as Directors of Perum Jamkrindo.

Concurrent Position on Other Companies/Institutions
Assistant Deputy Services Business II Ministry of SOE (2010-present).

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Achmad Sonhadji
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Soegeng Iman Wicaksono
Kepala Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse Receipt System Guarantee Division

Nina Kurnia Dewi
Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen
Head of MSME Rating and Management Consultation Division

Lusy Susanti
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program
Head of Program Guarantee Business Division

Mahfudh Sudiyono
Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan
Head of Technical & Guarantee Administration Division

Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Penjaminan Syariah
Head of Sharia Guarantee Division

Amin Mas'udi
Kepala Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Non Bank
Head of Suretyship & Non-Bank Guarantee Business Division

Suwarsito
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank
Head of Bank Guarantee Business Division

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Henry Nur Irianto
Kepala Divisi Klaim & Subrogasi
Head of Claim & Subrogation Division

Erna Zubaida
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Services Division

Hadi Ariwibowo
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Sudibyo Utomo
Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Management Division

Muhamad Solihin
Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs Division

M. Natsir Rahmadi
Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
Head of Legal and Compliance Division

Aribowo
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Diana Mayawati
Kepala Divisi Akuntansi & PKBL
Head of Accounting & PKBL Division

Alia Nur Fitri
Plh. Kepala Divisi Manajemen Risiko
Acting Head of Risk Management Division

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak *In position Since*	:	1 Agustus 2016 *1 Agustus 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	29 September 1975
Usia *Age*	:	41 tahun *41 years*
Domisili *Domicile*	:	DKI Jakarta
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S3 Manajemen SDM Universitas Negeri, Jakarta (2014) *Doctoral degree in HR Management, Universitas Negeri Jakarta (2014)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016) • Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016) • Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015) • *First Class Official of Directorate of Operations and Network (2016)* • *Institution's Main Officer of Primary Directorate (2015-2016)* • Corporate Secretary-Pranata Madya (2015)

Achmad Sonhadji
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak *In position Since*	:	6 November 2014 *6 November 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	19 April 1965 *19 April 1965*
Usia *Age*	:	52 tahun *52 years*
Domisili *Domicile*	:	Bekasi, Jawa Barat *Bekasi, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Manajemen Keuangan STM Labora, Jakarta (1999) *Master degree in Financial Management, STM Labora, Jakarta (1999)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	30 November 1990 *30 November 1990*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Pranata Utama SDM (2014) • Kepala Divisi Pemasaran dan Penjaminan Bank (2014) • Kepala Divisi Klaim dan Subrograsi (2014) • Institution's Main Officer of HR (2014) • Head of Marketing and Bank Guarantee Division (2014) • Head of Claim & Subrogation Division (2014)

Soegeng Iman Wicaksono
Kepala Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse Receipt System Guarantee Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	1 Agustus 2016 *1 August 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	18 Agustus 1973 *18 August 1973*
Usia *Age*	:	43 tahun *43 years*
Domisili *Domicile*	:	Surabaya, Jawa Timur *Surabaya, East Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (1996) *Bachelor of Law, Universitas Airlangga, Surabaya (1996)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	28 April 1999 *28 April 1999*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan (2015-2016) • Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non Bank (2014-2015) • Sekretaris Perusahaan (2014) • *Head of Legal & Compliance Division (2015-2016)* • *Head of Non-Bank Guarantee Technical Division (2014-2015)* • *Corporate Secretary (2014)*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Nina Kurnia Dewi
Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen
Head of MSME Rating and Management Consultation Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	18 Mei 1971 *18 May 1971*
Usia *Age*	:	46 tahun *46 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Bisnis Administrasi Universitas Queensland, Australia (2002) *Master in Business Administration, Queensland University, Australia (2002)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 April 1996 *1 April 1996*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Wilayah 1 (2015) • Kepala Divisi SDM (2014-2015) • Kepala Divisi Penjaminan Program (2013-2014) • *Head of Regional Office 1 (2015)* • *Head of HR Division (2014-2015)* • *Head of Program Guarantee Division (2013-2014)*

Lusy Susanti
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program
Head of Program Guarantee Business Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	8 Januari 1977 *8 January 1977*
Usia *Age*	:	40 tahun *40 years*
Domisili *Domicile*	:	Pekanbaru, Riau *Pekanbaru, Riau*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Akuntansi Universitas Andalas, Padang (1999) *Bachelor of Accounting, Universitas Andalas, (1999)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	11 Januari 2000 *11 January 2000*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Plh. Kepala Kantor Cabang Jakarta (2015) • Kepala Bagian Penjaminan Kantor Cabang Jakarta (2014-2015) • Kepala Bagian Operasional 1 Kantor Cabang Jakarta (2014) • *Officer-in-Charge Head of Jakarta Branch Office (2015)* • *Head of Guarantee Division of Jakarta Branch Office (2014-2015)* • *Head of Operational Section 1 of Jakarta Branch Office (2014)*

Suwarsito
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank
Head of Bank Guarantee Business Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	30 Agustus 2016 *30 August 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	28 Februari 1972 *28 February 1972*
Usia *Age*	:	45 tahun *45 years*
Domisili *Domicile*	:	Bekasi, Jawa Barat *Bekasi, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Hasanuddin, Makassar (2007) *Master in Management, Universitas Hasanuddin, Makassar (2007)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	2 Januari 1997 *2 January 1997*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Wilayah III Jakarta (2016) • Kepala Kantor Cabang Jakarta (2013-2016) • Kepala Divisi Umum (2012-2013) • *Head of Regional Office III (2016)* • *Head of Jakarta Branch Office (2013-2016)* • *Head of General Affairs Division (2012-2013)*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Amin Mas'udi
Kepala Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Non Bank
Head of Suretyship & Non-Bank Guarantee Business Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	15 September 2015 *15 September 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	24 Juni 1973 *24 June 1973*
Usia *Age*	:	43 tahun *43 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Strategi Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2008) *Master in Agribusiness Strategy, Bogor Agricultural Institute (2008)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	2 Januari 1997 *2 January 1997*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Divisi Pemasaran dan Penjaminan Non Bank (2013-2014) • Kepala Divisi Penjaminan Komersial (2013) • Kepala Divisi Teknologi Informasi (2012-2013) • *Head of Non-Bank Guarantee and Marketing Division (2013-2014)* • *Head of Commercial Guarantee Division (2013)* • *Head of Information Technology Division (2012-2013)*

Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Penjaminan Syariah
Head of Sharia Guarantee Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	27 November 2012 *27 November 2012*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	13 Maret 1972 *13 March 1972*
Usia *Age*	:	45 tahun *45 years*
Domisili *Domicile*	:	Bekasi, Jawa Barat *Bekasi, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Strategic Management Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) *Master in Strategic Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	2 Januari 1997 *2 January 1997*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (2011-2012) • Kepala Bagian Penjaminan Syariah I (2010-2011) • *Head of Banjarmasin Branch Office (2011-2012)* • *Head of Sariah Guarantee Division I (2010-2011)*

Mahfudh Sudiyono
Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan
Head of Technical & Guarantee Administration Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	17 Maret 1973 *17 March 1973*
Usia *Age*	:	44 tahun *44 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Manajemen Universitas Brawijaya, Malang (1998) *Bachelor of Management, Universitas Brawijaya, Malang (1998)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	2 Januari 1997 *2 January 1997*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Divisi Teknik Penjaminan Bank (2014-2015) • Kepala Divisi Penjaminan Komersial (2013-2014) • Kepala Divisi Penjaminan 1 (2012-2013) • *Head of Bank Guarantee Technical Division (2014-2015)* • *Head of Commercial Guarantee Division (2013-2014)* • *Head of Guarantee 1 Division (2012-2013)*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Henry Nur Irianto
Kepala Divisi Klaim & Subrogasi
Head of Claim & Subrogation Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	9 Januari 1966 *9 January 1966*
Usia *Age*	:	51 tahun *51 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Manajemen Keuangan STM Labora, Jakarta (1999) *Master degree in Financial Management, STM Labora, Jakarta (1999)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 Februari 1991 *1 February 1991*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi (2014-2015) • Kepala Divisi Akuntansi (2013-2014) • Kepala Divisi Investasi (2012-2013) • *Head of Accounting and Information Technology Division (2014-2015)* • *Head of Accounting Division (2013-2014)* • *Head of Investment Division (2012-2013)*

Erna Zubaida
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Services Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	22 April 2016 *22 April 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	27 Februari 1971 *27 February 1971*
Usia *Age*	:	46 tahun *46 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Manajemen Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang (1995) *Bachelor of Economic Management, Universitas Diponegoro, Semarang (1995)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 April 1996 *1 April 1996*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Divisi Manajemen Risiko (2015-2016) • Wakil Kepala Kantor Wilayah 2 (2015) • Kepala Divisi Umum (2014-2015) • *Head of Risk Management Division (2015-2016)* • *Vice Head of Regional Office 2 (2015)* • *Head of General Division (2014-2015)*

Hadi Ariwibowo
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	2 Februari 1977 *2 February 1977*
Usia *Age*	:	40 tahun *40 years*
Domisili *Domicile*	:	DKI Jakarta *DKI Jakarta*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia, Jakarta (2002) *Bachelor of Civil Engineering, Universitas Indonesia, Jakarta (2002)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	6 Oktober 2008 *6 October 2008*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Pranata Utama Teknologi Informasi (2014-2015) • Plt. Kepala Divisi Teknologi Informasi (2013-2014) • Plt. Kepala Bagian Pengembangan Divisi Teknologi Informasi (2013) • *Institution's Main Officer of Information Technology (2014-2015)* • *Act. Head of Information Technology Division (2013-2014)* • *Act. Head of Development Section, of Information Technology Division (2013)*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Sudibyo Utomo
Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Management Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	15 September 2015 *15 September 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	5 Juli 1965 *5 July 1965*
Usia *Age*	:	51 tahun *51 years*
Domisili *Domicile*	:	Bogor, Jawa Barat *Bogor, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Ekonomi STM Labora, Jakarta (2000) *Master degree in Economic, STM Labora, Jakarta (2000)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 November 1990 *1 November 1990*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Wilayah 3 (2014-2015) • Kepala Satuan Pengawasan Intern (2012-2014) • Kepala Cabang Bandung (2011-2012) • *Head of Regional Office 3 (2014-2015)* • *Head of Internal Audit Unit (2012-2014)* • *Head of Bandung Branch (2011-2012)*

Muhamad Solihin
Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	22 April 2016 *22 April 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	18 April 1970 *18 April 1970*
Usia *Age*	:	47 tahun *47 years*
Domisili *Domicile*	:	Bandung, Jawa Barat *Bandung, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung (1995) *Bachelor of Management, Universitas Padjajaran, Bandung (1995)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 April 1996 *1 April 1996*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Cabang Denpasar (2014-2016) • Kepala Kantor Cabang Surabaya (2014) • Kepala Kantor Cabang Kupang (2013-2014) • *Head of Denpasar Branch Office (2014-2016)* • *Head of Surabaya Branch Office (2014)* • *Head of Kupang Branch Office (2013-2014)*

M. Natsir Rahmadi
Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
Head of Legal and Compliance Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	1 Agustus 2016 *1 August 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	25 Mei 1972 *25 May 1972*
Usia *Age*	:	45 tahun *45 years*
Domisili *Domicile*	:	Pasuruan, Jawa Timur *Pasuruan, East Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Hukum Universitas Brawijaya, Malang (1999) *Bachelor of Law, Universitas Brawijaya, Malang (1999)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 Juli 2003 *1 July 2003*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Sekretaris Perusahaan (2014-2016) • Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2014) • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2012-2014) • *Corporate Secretary (2014-2016)* • *Head of Legal and Compliance Division (2014)* • *Head of Legal and Compliance Division (2012-2014)*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Aribowo
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	1 Agustus 2016 *1 August 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	6 Juni 1966 *6 June 1966*
Usia *Age*	:	50 tahun *50 years*
Domisili *Domicile*	:	Sidoarjo, Jawa Timur *Sidoarjo, East Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2, Magister Manajemen Universitas Andalas, Padang (2002) *Master in Management, Universitas Andalas, Padang (2002)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	1 Desember 1990 *1 December 1990*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Kepala Kantor Wilayah II Palembang (2016) • Kepala Kantor Wilayah 1 (2015-2016) • Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (2014-2015) • *Head of Regional Office II Palembang (2016)* • *Head of Regional Office 1 (2015-2016)* • *Head of Jakarta Special Branch Office (2014-2015)*

Diana Mayawati
Kepala Divisi Akuntansi & PKBL
Head of Accounting & PKBL Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	10 Desember 2015 *10 December 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	19 Oktober 1975 *19 October 1975*
Usia *Age*	:	41 tahun *41 years*
Domisili *Domicile*	:	Bekasi, Jawa Barat *Bekasi, West Java*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S1 Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta (1998) *Bachelor of Accounting, Universitas Trisakti, Jakarta (1998)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	30 April 2015 *30 April 2015*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	Pejabat Fungsional Madya Divisi Akuntansi dan TI *Accounting Division and IT - Functional Officer Madya*

Alia Nur Fitri
Plh. Kepala Divisi Manajemen Risiko
Acting Head of Risk Management Division

Menjabat Sejak *In position Since*	:	30 Agustus 2016 *30 August 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place/Date of Birth*	:	29 November 1971 *29 November 1971*
Usia *Age*	:	45 tahun *45 years*
Domisili *Domicile*	:	DKI Jakarta *DKI Jakarta*
Pendidikan Terakhir *Last Education*	:	S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) *Master in Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)*
Bergabung di Perum Jamkrindo *Joined Perum Jamkrindo*	:	3 September 2014 *3 September 2014*
Sekilas Jabatan di Perum Jamkrindo *Position at Perum Jamkrindo*	:	• Pranata Utama Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko (2016) • Kepala Bagian Investasi (2016) • Kepala Bagian Pengelolaan Investasi (2014-2016) • *Institution's Main Officer at Directorate of Finance, Investment, and Risk Management (2016)* • *Head of Investment Division (2016)* • *Head of Investment Management Section (2014-2016)*

Demografi Karyawan
Employees Demographic

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2012-2016
(orang)

Development of Number of Employees Year 2012-2016
(people)

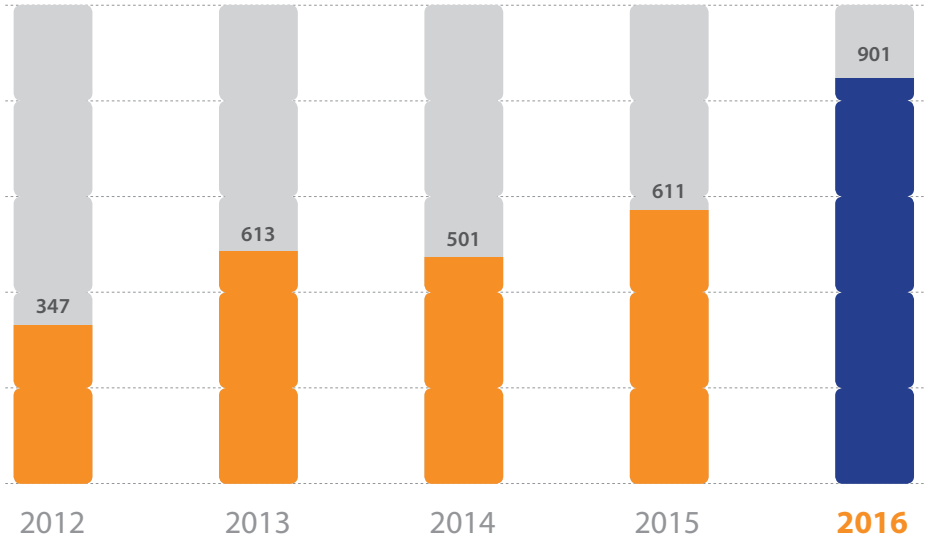

"901 karyawan yang berkarya di Perusahaan mendedikasikan dirinya kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 14 Kantor Unit Pelayanan (KUP) Perum Jamkrindo yang tersebar di seluruh Indonesia."

"901 employees working in the Company dedicate themselves to the world of MSMEs and Cooperatives through 9 Regional Offices, 56 Branch Offices, and 14 Services Unit Offices (KUP) of Perum Jamkrindo spread all over Indonesia."

Uraian tentang pengembangan kekaryawanan Perusahaan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

Description of the Company's employee development can be seen in the Business Support Functions section in the Human Resources discussion section.

Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal
Shareholders/Share Owners Composition

RINCIAN PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tidak mengenal saham dalam sistem kepemilikannya. Namun demikian, kepemilikan dalam bentuk penyertaan modal dapat disampaikan sebagai berikut,

DETAILS OF SHAREHOLDERS/SHARE OWNERS

The Company has a form of Public Corporation (Perum) that does not recognize shares in its ownership system. However, ownership in the form of equity is presented as follows,

Penyertaan Modal pada Perum Jamkrindo
per 31 Desember 2016

Equity Participation in Perum Jamkrindo
As of 31 December 2016

Pemilik Modal *Equity Owner*	**Nominal** *(Rp)*	**Persentase Kepemilikan** *Percentage of Ownership (%)*
Negara Republik Indonesia (Penyertaan Modal Negara) *The Republic of Indonesia (State Equity Participation)*	7.638.733.365.160	100,00%

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo

Composition of Perum Jamkrindo Owners

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Perusahaan dalam hal ini adalah Pemilik Modal seluruhnya sebesar 100,00% adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Melalui kepemilikan tunggal tersebut, Perusahaan memiliki status hukum Perusahaan Umum dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bawah ini disajikan informasi grafis tentang Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemilik Modal Perusahaan.

INFORMATION ON MAIN SHAREHOLDERS

The main shareholders of the Company in this case is Equity Owners of entirely 100.00% is the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises. Through sole ownership, the Company has a legal status of Public Corporate and becomes a State-Owned Enterprise (SOE). Below is the graphic information about the Government of the Republic of Indonesia as the Company's Equity Owner.

Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal
Shareholders/Share Owners Composition

Struktur Kepemilikan Perum Jamkrindo

Ownership Structure of Perum Jamkrindo

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan di atas.

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND SHAREHOLDERS GROUPS EACH BELOW 5 (FIVE) PERCENT

As of 31 December 2016, the Company has no policies on Employee Share Ownership Program and Management Share Ownership Program. The Company does not conduct an Initial Public Offering either which may allow the Company's ownership of shares by public. All equity ownership is in accordance with the above explanation.

Jabatan	*Position*	Nama *Name*	Jumlah Kepemilikan Perum Jamkrindo *Amount of Ownership of Perum Jamkrindo*
Ketua Dewan Pengawas	*Chairman of the Board of Supervisors*	Braman Setyo	- Nihil - *-None-*
Anggota Dewan Pengawas	*Member of the Board of Supervisors*	Nasaruddin Umar	
Anggota Dewan Pengawas	*Member of the Board of Supervisors*	Dahlan Siamat	
Anggota Dewan Pengawas	*Member of the Board of Supervisors*	Subandriyo	
Anggota Dewan Pengawas	*Member of the Board of Supervisors*	Noor Ida Khomsiyati	
Ketua Dewan Pengawas Syariah	*Chairman of Sharia Board of Supervisors*	Hasanudin	
Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Member of Sharia Board of Supervisors*	Muhammad Syakir Sula	
Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Member of Sharia Board of Supervisors*	Gunawan Yasni	
Direktur Utama	*President Director*	Diding S. Anwar	
Direktur Bisnis Penjaminan	*Director of Guarantee Business*	Bakti Prasetyo	
Direktur Operasional dan Jaringan	*Director of Operations and Network*	R. Sophia Alizsa	
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	*Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	Nanang Waskito	
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	*Director of Finance, Investment, and Risk Management*	I. Rusdonobanu	

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)

List of Subsidiaries and Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

Entitas Anak *Subsidiaries*	Bidang Usaha *Line of Business*	Domisili *Domicile*	Tahun Pendirian *Year of Establishment*	Tahun Beroperasi *Year of Operations*	Kepemilikan Saham *Share Ownership (%)*		Jumlah Aset *Total Asset (Rp-juta)*		Status Operasi *Operations Status*
					2016	2015	2016	2015	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah	Jakarta	2014	2014	99,95%	99,95%	354.759	288.525	Beroperasi *Operations*

Entitas Asosiasi/ Associated Entities, Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)	Bidang Usaha *Line of Business*	Domisili *Domicile*	Tahun Pendirian *Year of Establishment*	Tahun Beroperasi *Year of Operations*	Kepemilikan Saham *Share Ownership (%)*		Status Operasi *Operations Status*
					2016	2015	
- Nihil - *-None-*							

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (JAMSYAR)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

Perusahaan memiliki 99,95% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,05% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (JAMSYAR)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on 16 September 2014 and acquired its operational license on 7 November 2014. Jamsyar was incorporated through Notarial Deed No. 68 by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. on 19 September 2014 and was registered to the Ministry of Law and Human Rights OF REPUBLIC OF INDONESIA through Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 on Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated 24 September 2014; then, obtained its operational license from the Financial Services Authorities (FSA) through letter No. KEP-134/d.05/2014 dated 7 November 2014 on Granting Business License of Sharia Guarantee Company To PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No. S-34/nB.223/2015 dated 15 January 2015 on Listing of New Product of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar operates in Sharia Guarantee Services business sector, by using the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

The Company owns 99.95% of Jamsyar shares, while the remaining 0.05% is owned by Warga Jamkrindo Sejahtera Cooperative.

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)
List of Subsidiaries and Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

Ikhtisar Keuangan Jamsyar
Rp-juta

Financial Highlights of Jamsyar
Rp-Million

Uraian *Description*	2016 (Rp)	2015 (Rp)
Pendapatan *Income*	48.076.164.586	20.124.262.516
Beban Usaha *Operating Expense*	29.654.284.147	22.930.619.586
Laba Bersih *Net Profit*	6.810.472.938	6.739.394.632
Laba Komprehensif *Comprehensive Profit*	5.225.377.938	6.739.394.632
Aset *Assets*	354.758.611.638	288.525.107.321
Liabilitas *Liabilities*	93.889.588.369	31.533.583.064
Ekuitas *Equities*	260.869.023.269	256.991.524.257

Struktur Grup
Group Structure

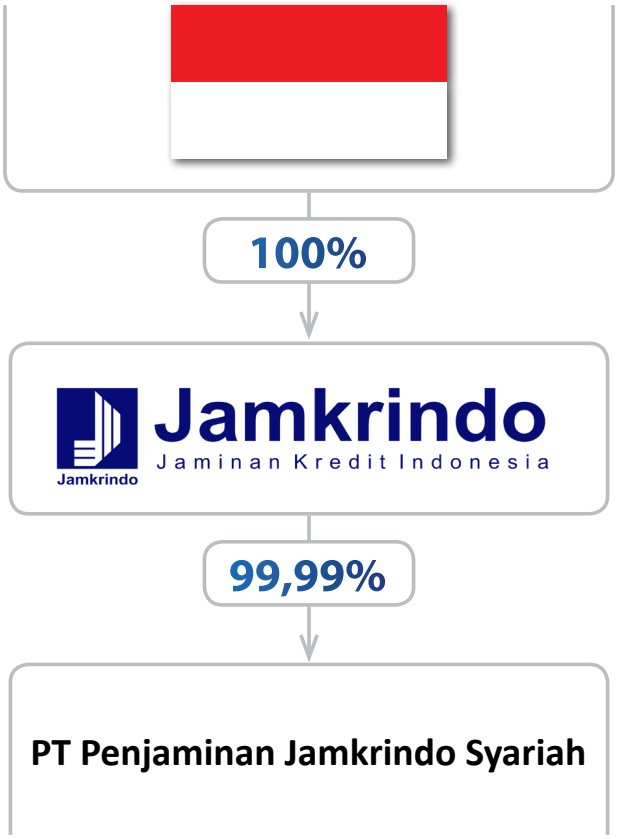

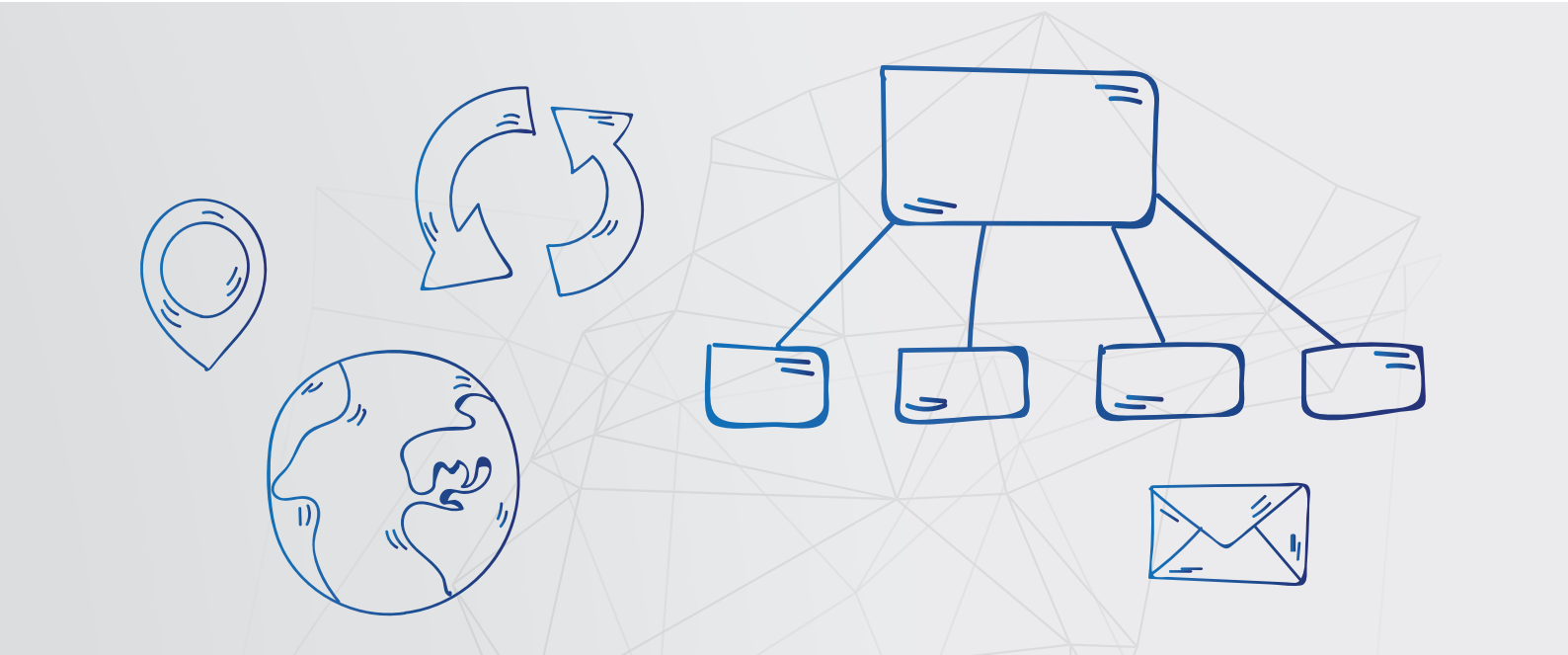

Kronologis Penerbitan Saham
Chronology of Share Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2016 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan bukan merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.

As of 31 December 2016 and the date of submission of this data / information, the Company is not a Limited Liability Company (PT) and is a Public Company (Perum). The Company also does not conduct an Initial Public Offering and does not trade its shares in any stock exchange. Therefore, there is no information related to the year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, shares' offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange where the Company is listed.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Hingga tanggal 31 Desember 2016 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of 31 December 2016 and the date of submission of this data/information, the Company does not issue any securities. Accordingly, there is no information relating to other securities name, issuance year of other securities, interest rate/return of other securities, and maturity date of other securities; offering value of other securities; name of stock exchange where other securities are listed; and securities ratings.

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institution and Profession

Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Hertanto, Grace, Karunawan Palma Tower, 18th Floor Lot F&G Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang Jakarta Selatan, 12310, Indonesia Telp: +6221 75930431, 75930433 Fax: +6221 75930434 Email: info@hgkfirm.com Website: www.hgkfirm.com; www.TIAGnet.com
Konsultan Hukum *Legal Consultant*	:	Rahayu and Partners Plaza ASIA, Lantai 18, Suite D Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +62 5152477 Email: contact@rahayuandpartners.com
Penilai *Assessor*	:	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) Gedung Kindo Lantai 2 Suite D 203 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan 12760, Indonesia Telp: +62 79184336 Fax: +62 79184287 Email: pusat@mbpru.com Website: www.kjpp-mbpru.com
Notaris *Notary*	:	Yualita Widyhadhari, SH., MKn. TCC Batavia Tower One Lantai 9 Suite 9 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220, Indonesia Telp: +62 29529440, 29529441

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

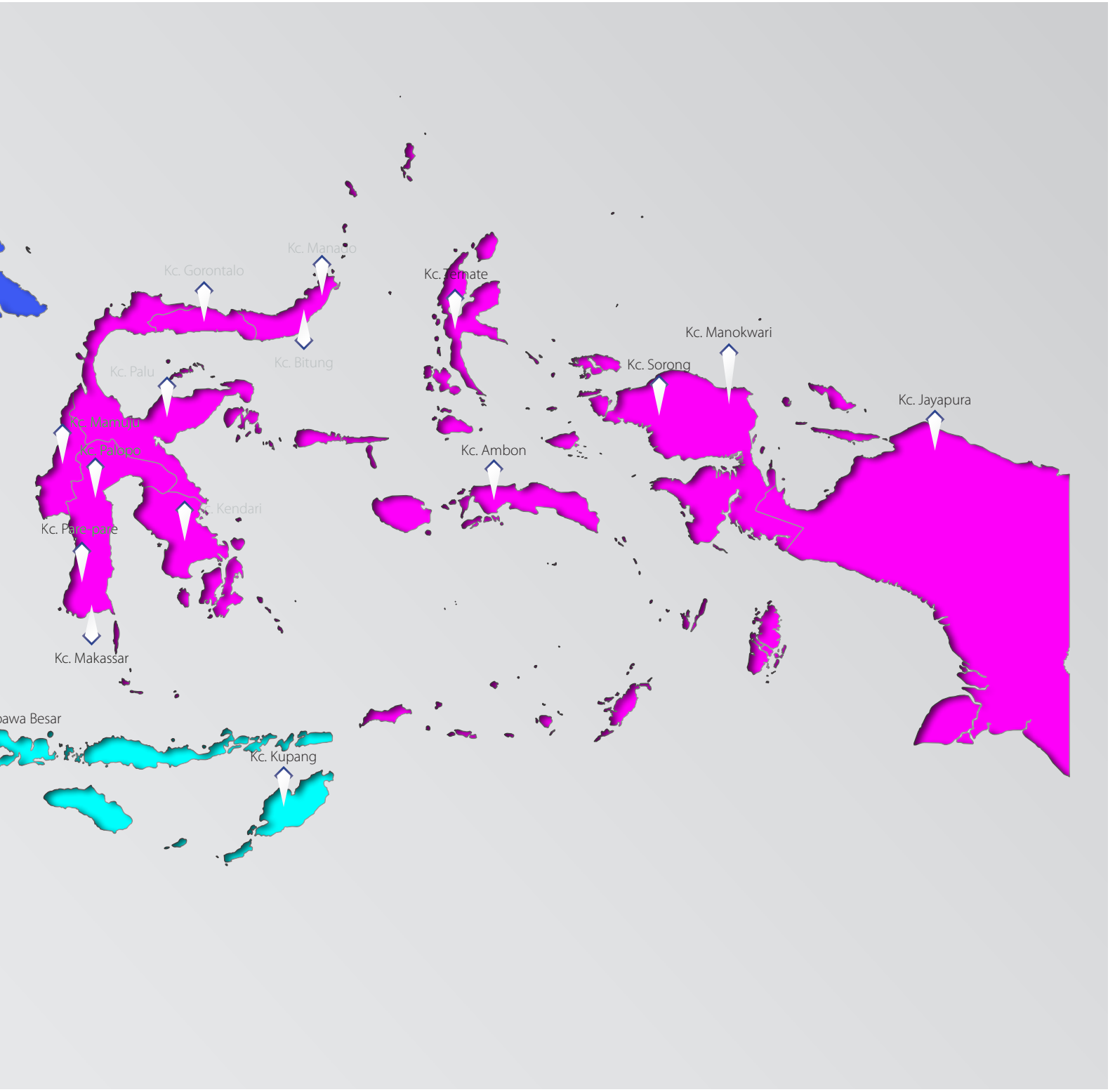

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	:	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: info@jamkrindo.co.id
Entitas Anak *Subsidiaries*		
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	:	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lantai 7 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www. jamkrindosyariah.co.id Email: info@jamkrindosyariah.co.id

Kantor Wilayah — Regional Office

Kanwil *Regional Office*		Alamat *Address*
I	Medan	Jl. Sei Serayu No. 40, Telp 061-80512479, Fax 061-80512058
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127
III	Dki Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung. Telp : (022) 7801890
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang
VI	Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya. Telp: 031-8685567
VII	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp: (0361) 286854
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836

Kantor Cabang — Branch Offices

Kanwil *Regional Office*	Kantor Cabang *Branch Offices*		Alamat *Address*
I	1	Medan	Jl. Sei Serayu No. 40
	2	Pekan Baru	JL. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp : 0761-854311, 854870 Fax : 0761-848801
	3	Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126
	4	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Telp : (0751) 7050598
	5	Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji NO. 6 Telp : (0771) 316919
	6	Batam	Jl.Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9, Batam Center Telp : (0778) 7495993
	7	Balige	Jl. Siliwangi No.08 Balige Tobasa, Sumatera Utara Telp : (0632) 21722

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

Kanwil *Regional Office*	**Kantor Cabang** *Branch Offices*		**Alamat** *Address*
II	8	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127
	9	Jambi	Jl. Prof. Dr. M. Yamin No. 30 Kelurahan Payo Lebar - Kecamatan Jelutung Jambi - 36136 Telp : (0741) 668707
	10	Bengkulu	Komp. Ruko Gading Residence City No. 6 Jl. Fatmawati - Kelurahan Penurunan Bengkulu - 38228 Telp : (0736) 344541
	11	Bandar Lampung	Jl. Teuku Umar No. 10 E - F, Kedaton Bandar Lampung - 35141 Telp : (0721) 778511
	12	Pangkal Pinang	Jl. R. E. Martadinata No. 150 B Pangkal Pinang - 33127 Telp : (0717) 432837
III	13	DKI Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp : (021) 6540409
	14	Khusus Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran. Jakarta Pusat. Telp : (021) 65868278
	15	Pontianak	Jl. Teuku Umar Komp. Perkantoran Pontianak Mall Blok B/24 Telp: (0561) 749095
	16	Serang	Jl. Jendral A. Yani No. A1 , Serang Banten 42117 Telp : 0254 228999
	17	Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322
IV	18	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung Telp : (022) 7801890
	19	Cirebon	Jl. Sudarsono No. 10 B, Kota Cirebon , Jawa Barat
	20	Purwakarta	Jl. Veteran No. 81 Kelurahan Nagrikaler – Purwakarta Telp : (0264) 8623826
	21	Sukabumi	Ruko Cisuda Riverside 2 Jl. R.A Kosasih No. 80 Kel. Sukaraja Sukaraja - Sukabumi. Telp : (0266) 6254873
	22	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp : (0265) 314169
V	23	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang
	24	Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km. 1 No. 96, Kelurahan Brontokusuman - Kecamatan Mergansan, Yogyakarta Telp : (0274) 375989
	25	Solo	Jl. Agus Salim No. 27 A Surakarta Telp : (0271) 719807
	26	Purwokerto	Jl. Prof Suharso No. 1186 A Telp : (0281) 6572555
	27	Kudus	Jl. A. Yani Komplek KAI A-4 Kudus Telp : (0291) 430757
	28	Pekalongan	Jl. Dr. Sutomo 107 Komplek Dupan Square B1 – 22 Pekalongan (0285) 4420770
VI	29	Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3
	30	Kediri	Jl. Let Jend. S. Parman No. 47 Kediri Telp : (0354) 7418826
	31	Banyuwangi	Jl. Adisucipto No. 104 B Banyuwangi Telp : (0333) 418140
	32	Malang	Jl. Kaliurang No. 37 C, Kel. Rampalclaket Kec. Klojen Telp : (0341) 363962
	33	Madiun	Jl. S. Parman Ruko Suncity Festival B - 8 Madiun Telp : (0351) 4472250

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

Kanwil *Regional Office*	Kantor Cabang *Branch Offices*		Alamat *Address*
VII	34	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp : (0361) 286854
	35	Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 Nomor 179, Mataram
	36	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp : 0371-2629239
	37	Kupang	Jl. Bundaran PU, Ruko TDM II No. 4 Oebufu, Kupang Telp : (0380) 8553899
VIII	38	Samarinda	Komp. Mall Lembuswana Blok C-6 Telp : (0541) 747608
	39	Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 4,6 No. 56 B Banjarmasin
	40	Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31 Palangkaraya Telp : (0536) 3226895
	41	Tarakan	Jl. Cendrawasih Rt. 004 Karanganyar Pantai Telp : (0551) 30448
	42	Balikpapan	Jl. Mayjen Sutoyo No. 26 C Balikpapan Telp: (0542) 791908
IX	43	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp : (0411)873031
	44	Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No.222 Gorontalo Telp 0435-828003
	45	Mamuju	Jl. Marthadinata No.11 Telp : (0426)2324878
	46	Ambon	Dr. J.B Sitanala No. 12 Telp : 0911-351770
	47	Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp : (0921)3122739
	48	Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17 Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara Telp : (0967)524424
	49	Manokwari	Jl. Trikora, Wosi,Manokwari Papua Barat Telp : (0986)214184
	50	Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp :(0451) 4131812
	51	Kendari	Jl. Jalan La Ode Hadi No 56 B Kendari - 93118 Telp : (0401)3196780
	52	Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado (62-431) 865194/865198
	53	Bitung	Jl. Sam ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp : (0438) 35939
	54	Pare-pare	Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, sulawesi selatan Telp : 0421-2914592
	55	Palopo	Jl. Batara lattu no. 74 palopo kode pos 91913 Telp : (0471)23006
	56	Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong - Papua Barat Telp: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP) Services Unit Office (KUP)

Kanwil *Regional Office*	KUP *Services Unit Office*		Alamat *Address*
I	1	Dumai	Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2	Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat
II	3	Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatera Selatan Telp : 0733 3281182

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

Kanwil *Regional Office*	**KUP** *Services Unit Office*		**Alamat** *Address*
III	4	Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp : (0251) 7564211
	5	Cibinong	Ruko CIbinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A Nomor 29 Cibinong Kab Bogor Telp : (021) 29335250
IV	6	Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi
V	7	Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta
	8	Cilacap	Jl Raya Sudirman, Cilacap
VI	9	Surabaya Kota	Jl. Kusuma Bangsa No. 86 B Kec. Genteng Surabaya
	10	Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp : 0324 - 3510118
	11	Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember Telp : 0331 - 4431044
	12	Bojonegoro	Jl. Diponegoro No.18, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
VIII	13	Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	14	Watampone	Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kaba Watampone Provinsi Sulsel Telp :0481 2921479

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company Website

Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat *www.jamkrindo.co.id*. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perusahaan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The Company has an official website at www.jamkrindo.co.id. This website contains information about the Company's corporation. This website becomes an openly accessible portal, with the purpose of providing comprehensive information about the Company to a wide audience

Uraian *Description*	**Ketersediaan** *Availability*	**Keterangan** *Description*
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu *Shareholders information up to the individual end owner*	v	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu telah tersedia di situs web Perusahaan. *Shareholder information to the most-updated individual owner is available on Company website.*
Isi Kode Etik *Contents of Code of Ethics*	v	Informasi terkait isi Kode Etik telah tersedia di situs web Perusahaan. *Information regarding the Code of Ethics is available on Company website.*
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) *Separate annual financial statements (the last 5 years)*	v	Informasi laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) telah tersedia di situs web Perusahaan. *Information regarding Annual Financial Report from the 5 years is available on Company website.*
Profil Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Directors Profile*	v	Profil Dewan Pengawas dan Direksi telah tersedia di situs web Perusahaan. *Profiles of the Board of Trustee and Directors are available on Company website.*

v: tersedia pada situs web Perusahaan
x: belum tersedia pada situs web Perusahaan

v: available on the Company website
x: not available on the Company website

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Kegiatan *Activity*	Tempat/Tanggal *Place/Date*	Penyelenggara *Organizer*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*			
Subandriyo	Seminar *Association Of Guarantee Institution* (AECM) *Seminar Association Of Guarantee Institution (AECM)*	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	Association Of Guarantee Institution (AECM)
	Seminar *Workshop* Interpretasi Kebijakan & Strategi RKAP dan KPI BUMN *Seminar Workshop on Interpretation of RKAP and SOE KPI Policy and Strategy*	Yogyakarta, 1-2 September 2016 *Yogyakarta, 1-2 September 2016*	Kementerian BUMN *Ministry of SOE*
Dahlan Siamat	Seminar Workshop Interpretasi Kebijakan & Strategi RKAP dan KPI BUMN *Seminar Workshop on Interpretation of RKAP and SOE KPI Policy and Strategy*	Yogyakarta, 1-2 September 2016 *Yogyakarta, 1-2 September 2016*	Kementerian BUMN *Ministry of SOE*
Direksi *Directors*			
Nanang Waskito	Seminar AECM *AECM Seminar*	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	AECM
	Indonesia Human Capital Summit *Indonesia Human Capital Summit*	Jakarta, 27-28 Oktober 2016 *Jakarta, 27-28 October 2016*	FHCI
Komite Audit *Audit Committee*			
Di tahun 2016, anggota Komite Audit tidak mengikuti program pengembangan kompetensi. *In 2016, members of the Audit Committee did not participate in any competency development program.*			
Komite Investasi dan Risiko Usaha *Committee of Investment and Business Risk*			
Slamet Wiyono (Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha) *(Committee Member)*	Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan BUMN *Workshop on Monitoring and Evaluation of SOE and Subsidiaries RKAP and KPI*	Bandung, 12 Juni 2015 *Bandung, June 12, 2015*	Human Capital BUMN, dan Kabar
	Manajemen Risiko *Risk management*	Yogyakarta, 29 Agustus 2015 *Yogyakarta, August 29, 2015*	Pusat Studi Investasi dan Keuangan (PSIK) Group *Center for Investment and Financial Studies (PSIK) Group*

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Kegiatan** *Activity*	**Tempat/Tanggal** *Place/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*			
Abdul Bari (Sekretaris Perusahaan) *(Corporate Secretary)*	*Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Vietnam* *Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Vietnam*	Vietnam	LM FE UI
	Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Myanmar *Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Myanmar*	Myanmar	LM FE UI
	The 2nd Working Level Council *The 2nd Working Level Council*	Bali	KODIT
	Neo Strategic Planning *Neo Strategic Planning*	Jakarta	ARRBEY
	Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup Dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura *Supporting the Growth of Start-Up Company With Credit Guarantee and Venture Capital*	Jakarta	Infobank Institute
	Dampak Penurunan Suku Bunga ***Net Interest Margin*** (NIM) Terhadap Pertumbuhan Perbankan Sektor Kredit UMKM *Impact of Net Interest Margin (NIM) Interest Rate of Banking Growth in MSME Credit Sector*	Jakarta	Infobank Institute
Dwi Putra Raneldo (Kepala Seksi Kesekretariatan) *(Head of Secretarial)*	Workshop Manajemen Sekretaris Serta Asisten Pribadi Pimpinan Perusahaan *Workshop of Secretary Management and Personal Assistant to Head of the Company*	Yogyakarta, 20-23 Juni 2016 *Yogyakarta, 20-23 June 2016*	Gama Exist
Cakra Warta Dawali (Kepala Seksi Humas) *(Head of Public Relations)*	Workshop Manajemen Sekretaris Serta Asisten Pribadi Pimpinan Perusahaan *Workshop of Secretary Management and Personal Assistant to Head of the Company*	Yogyakarta, 20-23 Juni 2016 *Yogyakarta, 20-23 June 2016*	Gama Exist
Andini S (Staf) *(Staff)*	Workshop Manajemen Sekretaris Serta Asisten Pribadi Pimpinan Perusahaan *Workshop of Secretary Management and Personal Assistant to Head of the Company*	Yogyakarta, 20-23 Juni 2016 *Yogyakarta, 20-23 June 2016*	Gama Exist
Anggrenei (Staf) *(Staff)*	Workshop Manajemen Sekretaris Serta Asisten Pribadi Pimpinan Perusahaan *Workshop of Secretary Management and Personal Assistant to Head of the Company*	Yogyakarta, 20-23 Juni 2016 *Yogyakarta, 20-23 June 2016*	Gama Exist
M. Natsir Rahmadi (Sekretaris Perusahaan, 2014-2016) *(Corporate Secretary, 2014-2016)*	Seminar Association Of Guarantee Institution (AECM) *Seminar Association Of Guarantee Institution (AECM)*	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	AECM

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of Board of Supervisors, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Kegiatan** *Activity*	**Tempat/Tanggal** *Place/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Unit Audit Internal *Internal Audit Unit*			
Achmad Sonhadji (Kepala SPI) *(Head of IAU)*	Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis GCG. *Building Professionalism of GCG-Based Corporate Management.*	23-25 Maret 2016 *23-25 March 2016*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*
	Seminar Nasional Internal Audit 2016 *"Internal Audit: The Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value"*. *National Seminar of 2016 Internal Audit "Internal Audit: The Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value".*	27-28 April 2016 *27-28 April 2016*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*
	Seminar & Munas FKSPI 2016 "*Strategi Partnership*: Mengoptimalkan *Partnership* Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Seminar & National Conference of FKSPI 2016 "Partnership Strategy: Optimizing Partnership of Internal Audit Function in Supporting Directors and Commissioners to Increase Corporate Advantage in ASEAN Economic Community (MEA) Era".*	10-13 Mei 2016 *10-13 May 2016*	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) *Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)*
	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik: Implementasi dan Permasalahannya" yang diikuti oleh Kepala SPI dan Kasie Pengembangan dan Standar Kualitas Audit. *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Monitoring Synergy in SOE/ROE Environment and Public Sector: The Implementation and Problem" attended by Head of SPIs and Section Head of Development and Audit Quality Standard.*	1-3 Juni 2016 *1-3 June 2016*	AAI
Arry Andru Palapi (Kabag Audit Wilayah III) *(Head of Audit Division Regional III)*	Diklat Audit Intern Tingkat Lanjutan II *Internal Audit Education & Training, Advanced II Level*	23 Mei s.d 3 Juni 2016 *23 May – 3 June 2016*	YPIA
	Diklat Audit Intern Tingkat Manajerial *Internal Audit Education & Training, Managerial Level*	28 November-9 Desember 2016 *28 November-9 December 2016*	
	Talk Show & Silaturahmi Nasional FKSPI *Talk Show & National Greetings of FKSPI*	29 Juli 2016 *29 July 2016*	FKSPI
Dimas Setio Ardhi (Plt. Kasie Pengembangan Standar & Kualitas Audit) *(Acting Section Head of Standard Development & Audit Quality)*	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik: Implementasi dan Permasalahannya" yang diikuti oleh Kepala SPI dan Kasie Pengembangan dan Standar Kualitas Audit. *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Monitoring Synergy in SOE/ROE Environment and Public Sector: The Implementation and Problem" attended by Head of SPIs and Section Head of Development and Audit Quality Standard.*	1-3 Juni 2016 *1-3 June 2016*	AAI
Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Plt. Kasie Pelaporan & Penganggaran Audit) *(Acting Section Head of Reporting & Audit Budgeting)*	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*	YPIA
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Kegiatan *Activity*	Tempat/Tanggal *Place/Date*	Penyelenggara *Organizer*
Faoziah Ulfah Fatmawati	Seminar & Munas FKSPI 2016 "*Strategi Partnership*: Mengoptimalkan *Partnership* Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Seminar & National Conference of FKSPI 2016 "Partnership Strategy: Optimizing Partnership of Internal Audit Function in Supporting Directors and Commissioners to Increase Corporate Advantage in ASEAN Economic Community (MEA) Era".*	10-13 Mei 2016 *10-13 May 2016*	FKSPI
	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*" *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Auditor's Responsibility in Detecting Fraud"*	3 November 2016 *3 November 2016*	AAI
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	YPIA
Rinjani Yusni Maharjanti	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*" *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Auditor's Responsibility in Detecting Fraud"*	3 November 2016 *3 November 2016*	AAI
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	YPIA
Andik Sugiarto	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*	YPIA
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	
Arif Syachroni	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*	YPIA
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	
Andreas Theodorus Mokodaser	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*	YPIA
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Kegiatan *Activity*	Tempat/Tanggal *Place/Date*	Penyelenggara *Organizer*
Aditya Putra Darmawan Andi Aldino Chandra Aldhy Haryono Fachrial Bernie Soebekti Dimas S Ardhi Emmerisa br Sembiring Faisal Arief Sentosa Laila Wijayanti Laurdes Sinurat Michael Ranap Simanjuntak Muhammad Ilham Muhammad Leonard Gustav Q	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*	YPIA
Seluruh Personil SPI *All SPI Personnel*	*In house Training* "Proses Bisnis dan *Internal Control*"	14-16 Juni 2016 *14-16 June 2016*	Divisi MSDM bekerjasama dengan Infobank *HRM Division in cooperation with Infobank*

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sebuah faktor penentu dari kemajuan Perum Jamkrindo. Pemahaman terhadap kebutuhan pasar hingga pengetahuan akan peraturan dan perundang-undangan yang melingkupi industri penjaminan mewajibkan setiap karyawan untuk dapat terus meningkatkan level kompetensinya. Melalui pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi, Perum Jamkrindo berupaya menciptakan kinerja organisasi yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat menemukan potensi terbaik dirinya dan mengembangkan talenta tersebut secara berkesinambungan.

As a company working in the service industry, human resource is a key factor in the success of Perum Jamkrindo. Employees are enforced to continuously develop their level of competency, as it is necessary to understand the market needs, regulations, as well as the statute circling assurance industry. Perum Jamkrindo strives for excellence in organization performance that will support their employees in discovering their potential and develop their skills through human resource management and competency development.

DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2016, Perum Jamkrindo mengkaryakan 901 orang. Jumlah ini meningkat 47,46% dibanding tahun 2015 sebanyak 611 orang yang disebabkan adanya penambahan unit bisnis baru yaitu penjaminan sistem resi gudang dan penambahan jumlah kantor wilayah, dan kantor cabang. Jumlah tersebut merupakan karyawan tetap, tidak termasuk karyawan kontrak dan *outsource*.

Demografi karyawan selengkapnya disajikan sebagai berikut ini.

DEMOGRAPHY OF EMPLOYEES

As of 31st December 2016, Perum Jamkrindio has 901 employees, an increase of 47% in comparison with 611 employees in 2015. This is due to the new business unit, which is the assurance system of the warehouse receipt, and new regional offices as well as our branch offices. The 901 employees are permanent employees excluding contract and outsource employees.

Below is the complete employees' demography.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level/Kelompok Jabatan

Distribution of Employees Based on Level / Position Group

Level/Kelompok Jabatan *Level / Position Group*	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
Kepala Divisi *Head of Division*	12	6	18	12	6	18
Pejabat Pranata Utama *Institution's Main Officer*	4	3	7	4	1	5
Kepala Kantor Wilayah *Head Regional Office*	8	1	9	3	-	3
Wakil Kepala Kantor Wilayah *Deputy Regional Office*	-	-	-	0	1	1
Kepala Kantor Cabang *Head Branch Office*	50	6	56	49	7	56
Kepala Bagian *Department Head*	53	26	79	37	22	59
Pejabat Pranata Madya *Institution's Middle Officer*	5	6	11	3	3	6
Pejabat Pranata Pratama *Institution's Junior Officer*	0	0	0	1	0	1
Kepala Unit *Unit Head*	54	18	72	33	6	39
Kepala Kantor Unit Pelayanan *Head of Service Unit Office*	11	1	12	8	2	10

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Level/Kelompok Jabatan *Level / Position Group*	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
Kepala Seksi *Section Head*	43	62	105	27	26	53
Kepala Sub Seksi *Sub Section Head*	3	2	5	0	0	0
Staf *Staff*	82	51	133	72	90	162
Pelaksana *Executor*	60	26	86	58	24	82
Calon Karyawan *Prospective Employees*	181	127	308	82	35	117
Jumlah *Total*	566	335	901	389	222	611

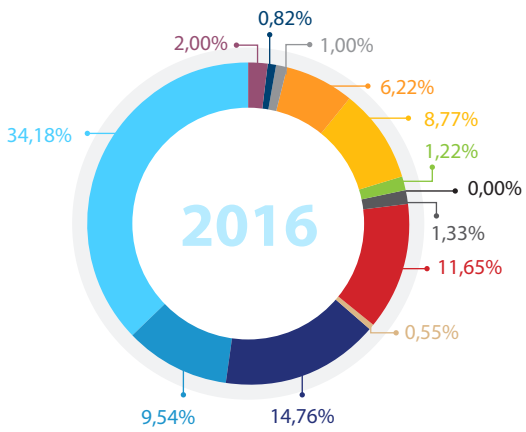

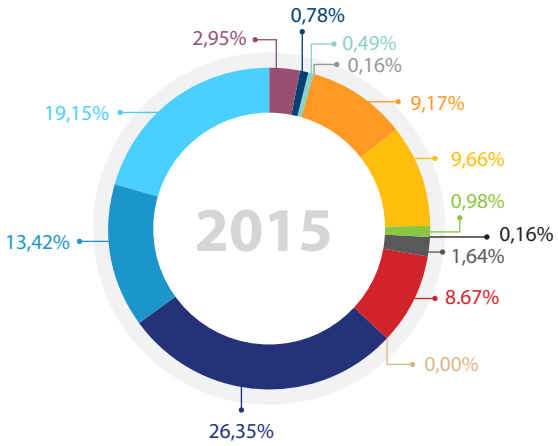

- Kepala Divisi — Head of Division
- Kepala Kantor Cabang — Head Branch Office
- Kepala Kantor Unit Pelayanan — Head of Service Unit Office
- Pelaksana — Executor
- Pejabat Pranata Utama — Institution's Main Officer
- Kepala Bagian — Department Head
- Kepala Seksi — Section Head
- Calon Karyawan — Prospective Employees
- Wakil Kepala Kantor Wilayah — Head Regional Office
- Pejabat Pranata Madya — Institution's Middle Officer
- Kepala Sub Seksi — Sub Section Head
- Kepala Kantor Wilayah — Deputy Regional Office
- Pejabat Pranata Pratama — Institution's Junior Officer
- Staf — Staff

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan — Distribution of Employees Based on Education Level

Tingkat Pendidikan *Education*	2016			2015		
	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
S3 *PhD*	1	0	1	1	0	1
S2 *Master's Degree*	45	17	62	33	12	45
S1/D4 *Bachelor's Degree / Diploma 4*	434	264	698	286	175	461
D1/D2/D3 *Diploma 1/2/3*	49	38	87	38	23	61
SMA Sederajat *High School Equivalent*	29	16	45	21	12	33
SMP Sederajat *Junior High School Equivalent*	8	0	8	9	0	9
SD *Elementary School*	0	0	0	1	0	1
Jumlah *Total*	566	335	901	389	222	611

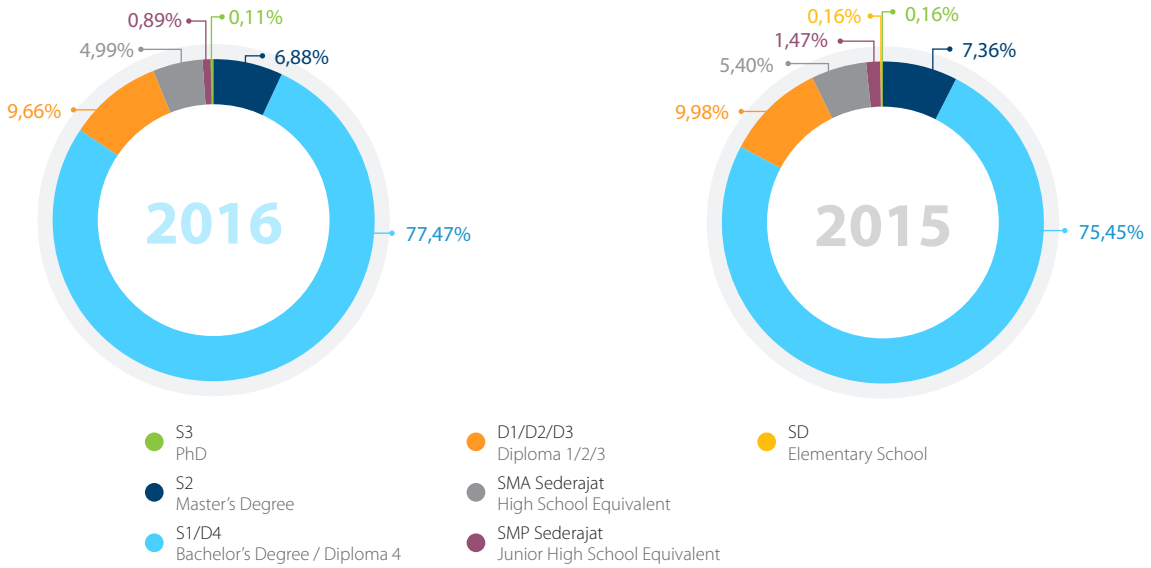

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian — Distribution of Employees Based on Employment Status

Status Kepegawaian *Employment Status*	2016			2015		
	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
Permanen *Permanent*	561	330	891	384	217	601
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah *Assigned to PT Jamkrindo Syariah entity*	5	5	10	5	5	10
Sub Jumlah *Sub Total*	566	335	901	389	222	611
Kontrak *Contract*			615			610
Outsource *Outsource*						
Jumlah *Total*			1.516			1.230

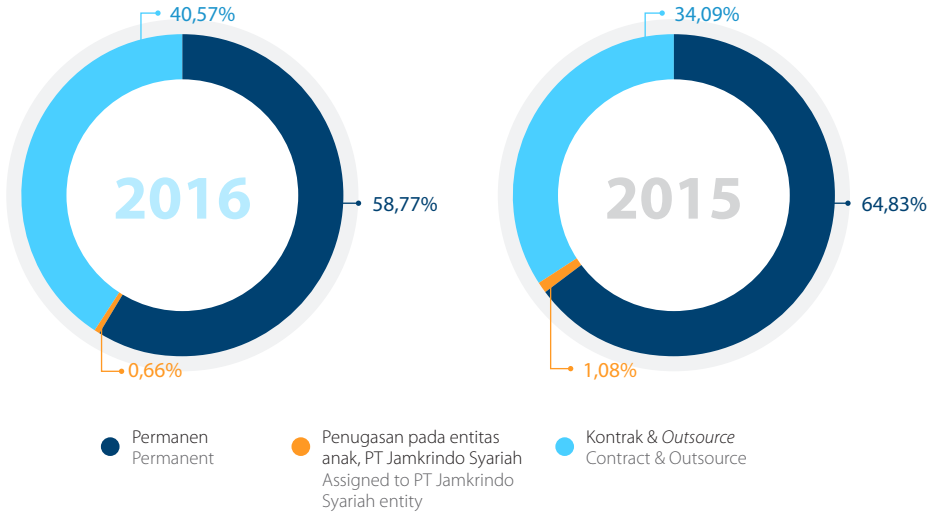

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja — Distribution of Employees Based on Work Area

Level/Kelompok Jabatan *Level / Position Group*	2016			2015		
	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
Kantor Pusat *Head Office*	167	121	288	112	86	198
Kantor Wilayah/Cabang *Regional / Branch Office*	399	214	613	277	136	413
Jumlah *Total*	566	335	901	389	222	611

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

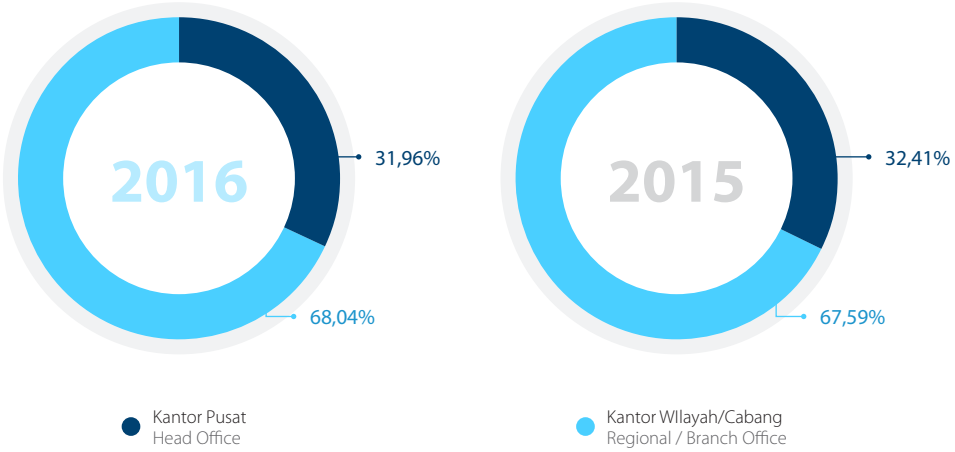

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin — Distribution of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin *Gender*	2016	2015
Laki-laki *Male*	566	389
Perempuan *Female*	335	222
Jumlah *Total*	901	611

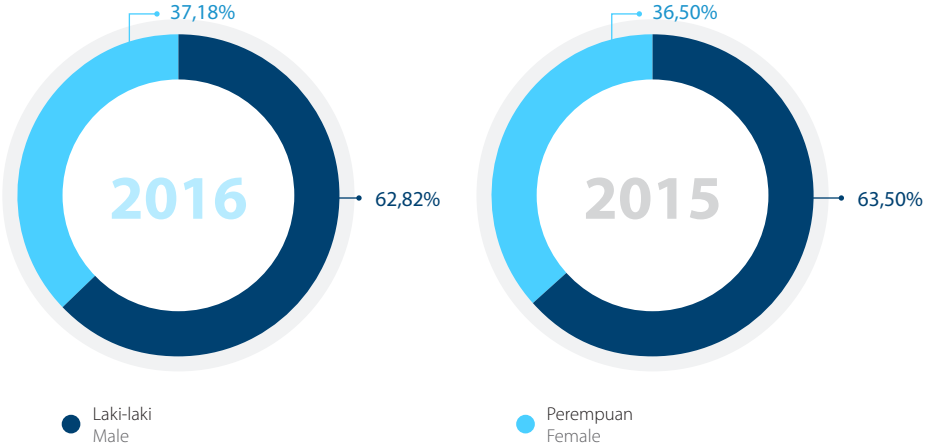

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan dan pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Perum Jamkrindo untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan SDM adalah:
1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan dan pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horisontal) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Saat ini Perusahaan menuju pada pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan sasaran dapat menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya. Pengembangan SDM berbasis kompetensi diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2015 dan RJPP 2014-2018.

Untuk itu, telah dilakukan Penyusunan Direktori Kompetensi dan Kompetensi Jabatan Perum Jamkrindo, yang memuat antara lain sebagai berikut:
1. Pengelompokan jenis kompetensi.
2. Jenis kompetensi.
3. Nama kompetensi.
4. Definisi kompetensi.
5. *Profiency level* (tingkat keahlian)
6. Uraian tingkat keahlian.
7. Kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perum Jamkrindo.

PLANNING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESEOURCE

The success and continuity of business is heavily determined by the availability of HR, whether it is from the internal management side or to meet the market needs. Planning and development of HR is the main function which Perum Jamkrindo does to secure the availability of human resource that is suitable for every position, function and the right work at the right time.

The purpose of Human Resource planning:
1. To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the company.
2. To ensure the availability of employees, presently as well as in the future, to accomplish every tasks.
3. To avoid miss manegement and overlap in completing tasks.
4. To support coordination, integration and synchronization that leads to an increase in productivity.
5. To avoid shortage or excess of employees.
6. As a foundation in determining recruitment program, selection, development, compensation, integrationg, preservation, discipline and dismissal of employees.
7. As a foundation in executing mutation (vertically or horizontally) and pension for the employees.
8. As a groundwork in reviewing employees.

Currently the company is on a journey in developing HR based on competence, with a the objective of assigning an employee to a suitable position or function accordingly with the skill and quality. The development of competence-based HR started with the completion of competency directory and occupation requirement as written on our work plan in RKAP 2015 and RJPP 2014-2018.

Therefore, the Competency Directory Arrangement and Position's Competency of Perum Jamkrindo have been made; that entails:
1. Grouping of competency types
2. Types of competency.
3. Name of competency.
4. Definition of competency.
5. Profiency level.
6. Analysis of level of skill.
7. Position's competency for all positions in Perum Jamkrindo.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

REKRUTMEN SDM

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang handal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik.

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas yang terbaik, berkualitas dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Perum Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karir bersama Perum Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan independen yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Perum Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi.

HR RECRUITMENT

Perum Jamkrindo understands the importance of quality in Human Resource for operational performance, marketing and company's financial. Skilled employees can only be developed if they possess integrity, dedication as well as loyalty.

Therefore, Perum Jamkrindo starts from the early stage of recruitment by finding and placing the right candidate with good qualifications, integrity and able to meet the company's need in servicing the people. Perum Jamkrindo does not limit its offer to specialization which its employees and prospective employees possess, but also an assurance to a career path in Perum Jamkrindo.

Based on competency and to protect the independency, thus, employees' selection is made through experienced and independent consultant.

In the recruitment process, Perum Jamkrindo prioritizes several principles, namely: transparency, fairness and equality based on the needs and competency of the prospective employees. Furthermore, Perum Jamkrindo also gives opportunity for university graduates.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Ruang lingkup pengadaan karyawan meliputi:

1. Perencanaan : untuk memperoleh tenaga yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan termasuk merencanakan kebutuhan profesional dengan kompetensi khusus.
2. Pengumuman : untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk melamar pada Perusahaan.
3. Pelamaran : untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan karyawan.
4. Seleksi : untuk memilih dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
5. Pengangkatan : untuk memberikan status karyawan dan atau jabatan tertentu dalam Perusahaan.

Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam Perusahaan dan atau dari luar Perusahaan apabila dibutuhkan untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/keterampilan tertentu. Perusahaan dapat melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian/keterampilan tertentu berupa:

1. Karyawan/staf berpengalaman
   Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

2. Pejabat struktural/ fungsional
   Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/fungsional.

3. Tenaga kerja profesional (*Prohire*)
   Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2016 telah dilakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 308 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

The scope of recruitment:

1. Planning : to get the suitable candidate that is compatible with the company's need, including planning for professional staff with special competency.
2. Announcing : to give the workforce an opportunity to apply to the company.
3. Applying : to initiate disciplinary in accepting employees.
4. Selecting : to choose and elect employees that are fitting to the company's need.
5. Assignation : to give employees status and or certain position in the Company.

Should the Company require certain format and or certain skill, thus, human resource will search employees both internally and or externally. The Company can recruit professional or experienced staff to fill in certain position and or certain function, namely:

1. Staff / experienced staff
   The Company will consider work experience, duration of work, skills and competence that candidates have prior to electing them.

2. Structural officials / functional
   The Company will consider work experience, duration of work, skills and competence that candidates have, accordingly to the qualification and the needs of the Company, prior to electing them to fill in a structural / functional position.

3. Professional staff (Prohire)
   Contractual staff is recruited based on work experience, duration of work, skills and competence that candidates have, accordingly to the qualifications and the needs of the Company to assist certain related work unit or to perform certain task and or certain target on an agreed period of time.

In 2016, the Company recruited 308 people. Below are the details.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Rekrutmen *Recruitment*	**Jumlah** *Total*
Calon Karyawan S1 *Candidate with Bachelor's Degree*	265
Calon Karyawan D3/SMA/SMP *Candidate with Diploma 3/High School/Junior High Degree*	43
Jumlah *Total*	308

Tabel di bawah menunjukkan rekrutmen karyawan profesional Perusahaan pada tahun 2016 untuk ditetapkan sebagai pejabat struktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan sebanyak 10 orang.

In 2016 the Company recruited 10 professional staff to be positioned as officials with experience accordingly with the company's need. Below are the details.

Rekrutmen *Recruitment*	**Jumlah** *Total*
Pranata Utama *Main Institution*	1
Kepala Bagian *Department Head*	1
Pranata Madya *Middle Institution*	4
Kepala Seksi *Section Head*	4
Jumlah *Total*	10

Selain hal tersebut, pada tahun 2016 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu profesional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 3 (tiga) orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

Additionally, in 2016 the Company also recruited 3 part time professionals employees to assist with tasks accross several work unit. Below are the details. The objectives of recruiting part time employees are to expedite the process in completing the programs which the Company made, as well as to expedite the transfer knowledge from the part time professionals to the permanent employees in the corresponding work unit.

Rekrutmen *Recruitment*	**Jumlah** *Total*
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendudukung bidang Bisnis Penjaminan Bank *Specified Time Professional Staff (STPS) to support Bank Assurance Business Deparment*	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendudukung bidang Bisnis Suretyship & Penjaminan Non Bank *Specified Time Professional Staff (STPS) to support Non-Bank Assurance & Suretyship Business Department.*	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendudukung bidang Sekretaris Perusahaan *Specified Time Professional Staff (STPS) tp support Corporate Secretary Department.*	1
Jumlah *Total*	3

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

PENGEMBANGAN KARIR

Pengembangan karir bagi karyawan Perusahaan secara optimal dapat memotivasi karyawan agar bekerja secara maksimal. Pengembangan karir melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke level yang lebih tinggi melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan yang levelnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang dinilai berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural apabila memenuhi syarat jabatan yang dimaksud. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji dan tingkat gaji serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada Perusahaan.

Tahapan kegiatan pengembangan karir melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jenjang karir karyawan berdasarkan:
   a. Kebijakan Perusahaan tentang pengelolaan SDM.
   b. Peraturan-peraturan Perusahaan yang terkait pengelolaan SDM.
   c. RKAP dan RJPP.
2. Memetakan seluruh formasi karyawan dan evaluasi karyawan berdasarkan:
   a. Formasi karyawan baru.
   b. Hasil penilaian kinerja pegawai.
3. Mengidentifikasikan formasi yang akan kosong berdasarkan:
   a. Hasil pemetaan formasi karyawan dan evaluasi karir karyawan.
   b. Identifikasi formasi yang akan kosong.
4. Melakukan rencana pengisian formasi melalui promosi dan menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.
5. Mencari kandidat untuk dipromosikan berdasarkan:
   a. Data kualifikasi karyawan yang kompeten untuk menempatkan posisi yang kosong.
   b. Seleksi kualifikasi dan kompetensi awal untuk mendapatkan calon kandidat terbatas/*sort list candidate*.
   c. Rekomendasi atasan karyawan jika memiliki kandidat yang memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat untuk posisi yang kosong.
6. Menetapkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong melalui komite promosi.
7. Melakukan proses penggantian posisi karyawan sesuai mekanisme.

CAREER DEVELOPMENT

Optimum career development for employees can be a motivation for employees to perform well. Career development of an employee advancing to a higher level is through promotion. Furthermore, career development through promotion is preferred in order to find the right candidate for a position that is accordingly with the requirements and in the timely manner.

Employees that are evaluated based on the performance evalutaion system and have proved to have performed well and are honest, dependable and prudent, could be promoted to the structural position with the condition that they are qualified for the position. Performance evaluation for the employees is enforced to ensure objectivity when evaluating and determining salary group and level, as well as promoting to a specific structural position in the company.

Below is the phases of career development through promotion:

1. The career path plan for the employees based on:
   a. Company policy on Human Resource management.
   b. Company's rules and regulation on Human Resource management.
   c. RKAP and RJPP.
2. The mapping of all employees formation and evaluation based on:
   a. Formation of new employees.
   b. Result of employees performance review.
3. The identification of soon-to-be absent formation based on:
   a. Result of employees formation mapping and career evaluation.
   b. Identifikasi formasi yang akan kosong. Identification of soon-to-be empty formation.
4. Plan the formation filling through promotion and arrange the needed requirements for the specific position.
5. Searching candidates for promotion based on:
   a. Qualification data on competent employees to fill in a vacant position.
   b. Early selection based on qualification and comptency to find limited / sort list candidate.
   c. Employees' recommendation when there is a candidate with sufficient qualification for the vacant position.
6. Select the right candidate for the vacant position through the promotion committee.
7. Perform employees mutation process according to the mechanism.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Pada tahun 2016 terdapat karyawan yang mendapatkan promosi sebanyak 215 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini,

There was 215 staff promoted in 2016. Below are the details,

Promosi Karyawan Tahun 2016 / Employees Promotion in 2016

Jabatan *Title*	Jumlah *Total*
KaDiv/ Setingkat *Division Head/ Equivalent*	5
KaKanwil *Regional Head*	6
KaKanca Tipe A/ B/ C/ D *Branch Head Type A/ B/ C/ D*	14
KaBag Kanpus/ Cab Tipe A/ B *Department Head – Head / Branch Office Type A/ B*	49
KaUnit Kanca Tipe C/ D *Unit Head – Branch Office Type C/ D*	58
Kepala KUP *KUP Head*	4
Kasie Pusat/ Wil/ Cab A/ B *Section Head - Main/ Regional/ Branch A/ B*	66
Kasubsie Kanca Tipe C *Sub Section Head – Branch Office Type C*	2
Kasubsie KUP *Sub Section Head KUP*	3
Pranata Utama *Main Institution*	4
Pranata Madya *Middle Institution*	4
Jumlah *Total*	215

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan.

EDUCATION AND TRAINING

Perum Jamkrindo is highly commited to continuously increase its employees' quality, as it is the main aspect of the Company's sustainability. One of the ways to increase quality is through employees' training and education program.

Indikator *Indicator*	2016	2015	Pertumbuhan *Growth*
Jumlah karyawan yang disertakan mengikuti diklat *Total of employees participated in trainings*	2.872	1.354	112,11 %
Realisasi Biaya pengembangan *Realization cost of development*	Rp16.796.433.140	Rp11.483.786.203	46,23%
Penugasan belajar (S2) Dalam Negeri atau Luar Negeri *Selected for a master's degree in the country or outside the country*	1	-	100%

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Program pelatihan dan pendidikan Perum Jamkrindo dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis Kompetensi
   Program pelatihan mengacu pada kebutuhan kompetensi sesuai *job description* masing-masing karyawan.

2. Berjenjang
   Program pelatihan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kebutuhan/tuntutan tugas, tanggung jawab dan jabatan karyawan.

3. Berkelanjutan
   Program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan baik dari segi materi (materi *level* terendah sampai *level* tertinggi) maupun dari segi kontinuitasnya.

Sedangkan jenis pelatihan yang diperuntukan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Reguler
   Program pelatihan yang dirancang khusus untuk dilaksanakan secara rutin (tahunan) oleh Perusahaan. Dalam rangka program pelatihan reguler maka dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis pelatihan sebagai berikut:
   a. Pelatihan Prajabatan
      Pelatihan yang harus diikuti karyawan yang akan diangkat menjadi Calon Karyawan dan Karyawan Tetap atau yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan tertentu.
      Materi pelatihan prajabatan terdiri dari:
      i. Pelatihan pengetahuan Perusahaan
         Pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan Perusahaan yang diikuti oleh seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.
      ii. Pelatihan perilaku
         Pelatihan-pelatihan yang bertujuan pembentukan untuk dan peningkatan kualitas kepribadian, perilaku dan etika karyawan yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.
      iii. Pelatihan manajerial
         Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan karyawan, serta ditujukan bagi karyawan yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan struktural.
   b. Pelatihan Kompetensi Teknis
      Pelatihan yang harus diikuti karyawan agar mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai *job description* masing-masing.

The training and education program is performed with consideration to the company's financial capability. Furthermore, the training and education program is thoughtfully designed with the basis of these pricinpals:

1. Competence Based
   The training program is based on the competencies needed corresponding to the job description of each employees.

2. Tiered
   The training program is done by levels according to the needs and demands of the job, responsibility and position of the employees.

3. Continuity
   The training program is done continuousy and cohesively from the material perspective (bottom – top level).

The type of trainings for employees are categorized into 2 (two) programs as follows:

1. Regular Training Program
   Training program that is specifically designed to be performed yearly by the Company. There are 2 (two) types of regular training program as follows:
   a. Pre-position training
      Training that is designed for staff who will be promoted to prospective employees and permanent employees, or going to or are currently holding certain position.
      Training materials for pre-position:
      i. Company's information training
         The trainings regarding company's information are for employees according to their level and position.
      ii. Soft skill training
         Trainings for the purpose of character building, improving the quality of soft skills and ethics. It is mandatory for employees according to their level and position.
      iii. Managerial training
         Training with the purpose of improving the managerial and leadership skills. Designed for employees who will or have been holding a certain structurial position.
   b. Technical Competency Training
      Mandatory trainings for employees in order to gain technical skills that are necessary to perform their job according to the each job dscription.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

2. Program Pelatihan Non Reguler
   Program pelatihan di luar program yang tema dan pelaksanaannya bersifat insidentil sesuai kebutuhan Perusahaan. Materi pelatihan diberikan secara komprehensif meliputi semua aspek peningkatan kualitas, baik kualitas perilaku maupun keilmuannya.

Seluruh pelatihan dilakukan melalui lembaga pendidikan yang mempunyai kompetensi di bidang yang diperlukan maupun secara mandiri oleh para pejabat senior perusahaan untuk materi *"Corporate and Product Knowledge"* dan sebagai saran transfer pengetahuan ilmu penjaminan kredit dari pejabat yang telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut kepada para staf sebagai generasi penerus perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan perusahaan juga telah menjalankan program pemberian beasiswa pendidikan ke jenjang S2 dengan program studi sesuai kebutuhan Perusahaan. Seleksi pemberian beasiswa tersebut dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi karyawan.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, maka Perum Jamkrindo membuat evaluasi indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan perum jamkrindo yang dinilai pada tahun 2015 dan tahun 2016. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (*performance improvement*) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

Survei kepuasan karyawan ini dilakukan di seluruh wilayah kerja perum jamkrindo dengan cara memberikan jawaban melalui kuesioner yang berjumlah 523 responden meliputi KKWT, Calon Karyawan, Karyawan Tetap dan *Pro Hire*.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

2. Non-Regular Training Program
   Training program which theme and schedule are out of the regular program depending on the need of the Company. The material given is comprehensive that covers quality improvement in both soft skill as well as hard skill.

All trainings are done through educational institution which has competencies in the field that is needed independently or needed by the senior officials. The material is "Corporate and Product Knowledge" and it serves as a tool for transfer knowledge of credit assurance from experienced officials in that field to the new generation of staff that will later lead the company.

The company offers scholarship to employees to continue their education for a masters degree, in support to its commitment towards continuous quality improvement of their employees. Selecation is based on employees' contribution and performance.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

In evaluating the human resource improvement program, Perum Jamkrindo created the evaluation index for employee satisfaction and employeesengagement which were evaluated in 2015 and 2016. Employee satisfaction program is portrayed as performance improvement program effectively, that is according to needs of the employees.

The employee satisfaction survey is given through out all regions of Perum Jamkrindo. The company hands out 523 questionnaires including KKWT, prospective employees, permanent employees and Pro Hire.

The result of the employee satisfaction survey and employee engagement survey are expected to motivate the Company to improve its performance.

Uraian *Analysis*	**Kepuasan Karyawan** *Employees Satisfaction*		**Loyalitas** *Loyalty*	
	2016	**2015**	**2016**	**2015**
Kantor Pusat *Head Office*	75,81		80,63	72,78
Wilayah I *Region I*	77,43		83,23	81,65

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Uraian *Analysis*	Kepuasan Karyawan *Employees Satisfaction*		Loyalitas *Loyalty*	
	2016	2015	2016	2015
Wilayah II *Region II*	75,49		81,53	79,34
Wilayah III *Region III*	74,98	73,15	80,08	84,30
Wilayah IV *Region IV*	76,28		80,69	
Wilayah V *Region V*	77,37		83,08	
Wilayah VI *Region VI*	78,28		81,64	
Wilayah VII *Region VII*	76,12		82,53	
Wilayah VIII *Region VIII*	77,40		82,31	
Wilayah IX *Region IX*	77,56		85,46	
Nasional *National*	76,67	71,18	81,37	79,52

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka indeks kepuasan dan loyalitas karyawan Perum Jamkrindo dilihat dari tingkat Nasional indeks kepuasan Karyawan mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yakni sebesar 71,18 menjadi 76,67 yang termasuk dalam kategori "BAIK". Sedangkan indeks loyalitas karyawan secara Nasional dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan, yakni sebesar 79,52 menjadi 81,37 yang termasuk dalam kategori "BAIK".

Based on the analysis given in the table, the index level of satisfaction and loyalty of employees showed under the "National", in 2015 the index showed 71.18 and incresed to 76.67 in 2016, therefore it is in the "GOOD" category. Moreover, the loyalty index nationwide also increased from 79.52 in 2015 to 81.37 in 2016, making it into the "GOOD" category.

Apabila dilihat berdasarkan 10 kategori, yakni Kantor Pusat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, Wilayah VIII dan Wilayah IX . Indeks kepuasan dan loyalitas Karyawan Perum Jamkrindo tertinggi terdapat di Wilayah VI Surabaya dan Wilayah IX Makassar sedangkan Indeks Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Perum Jamkrindo terendah terdapat di Wilayah III Jakarta.

There are 10 categories, namely: Head Office, Region I, Region II, Region III, Region IV, Region V, Region, VI, Region VII, Region VIII and Region XI. Based on the analysis, the employees loyalty index is highest in Region VI – Surabaya and Region IX, Makassar. Moreover, the analysis also showed that Region III –Jakarta has the lowest employees satisfaction and loyalty index.

TINGKAT KESEJAHTERAAN

Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan *volume* bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan.

LEVEL OF WELFARE

Perum Jamkrindo understands that the duty and responsibility of the Company will increase parallely with the increase of volume and scale of the Company. Therefore, all employees are enforced to work intensively and optimally according to the needs of the company.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Selain menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, baik dan kondusif, Perum Jamkrindo juga berupaya untuk menyempurnakan sistem penggajian karyawan. Sistem penggajian karyawan Perum Jamkrindo disusun dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan.

Perum Jamkrindo telah menerapkan sistem pemberian insentif baik kepada karyawan maupun unit kerja sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain hal tersebut, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas konerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Perum Jamkrindo:

1. Pendapatan karyawan Perum Jamkrindo terdiri dari :
   a. Gaji Pokok.
   b. Tunjangan kesejahteraan.
   c. Tunjangan Jabatan.
   d. Tunjangan Wilayah.
   e. Tunjangan Uang Makan.
   f. Tunjangan Komunikasi.
   g. Tunjangan Cuti Tahunan.
   h. Tunjangan Hari Raya.
2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah
   Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah sebagai berikut:
   a. Rasio Gaji Karyawan Terendah dan Tertinggi = 1 : 7,76
   b. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,11
   c. Rasio Honorarium Dewan Pengawas Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,11
   d. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Karyawan Tertinggi = 1 : 2,86

Perum Jamkrindo strives to create a work space that is comfortable and conducive for the employees. Furthermore, Perum Jamkrindo also tries to perfect its payroll system. The current payroll system considers several factors, namely: years of service, responsibility, workload, risk and position of each of the employees.

Perum Jamkrindo has started to give incentive to employees as well as work unit as a gesture of appreciation for the employees performance. Additionally, Perum Jamkrindo also gives benefit to employees in the form of Production Service as an appreciation to its employees' yearly performance.

Below is the breakdown of employees income and highest salary ratio from bottom to top:

1. Perum Jamkrindo's employees income consists of:
   a. Main Salary.
   b. Welfare Allowance.
   c. Position Allowance.
   d. Regional Allowance.
   e. Food Allowance.
   f. Communication Allowance.
   g. Annual Leave Allowance
   h. Holiday Allowance.
2. Salary ratio highest and lowest Below are the explanation of low salary ratio and high salary ratio:

   a. Employees salary ratio lowest : highest = 1:7,76
   b. Directors salary ration lowest : highest = 1:1,11
   c. Honorarium Ratio of Supervisory Board lowest and highest = 1:1,11
   d. Directors salary ratio lowest : highest for emloyees = 1 :2,86

Rasio Gaji 2016 / Salary Ration 2016

Gaji *Salary*	GG/TG	Gaji + Tunjangan Tetap *Salary + Fixed allowance*	Jabatan *Position*
Gaji Tertinggi 2016 *Highest salary 2016*	XI/21	32.435.401	Kepala Divisi *Division Head*
Gaji Terendah 2016 *Lowest salary 2016*	III/3	5.551.858	Pelaksana *Executor*

JUMLAH KARYAWAN KELUAR (*TURNOVER*)

Data jumlah karyawan keluar (*turnover*) pada tahun 2016 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri dan meninggal dunia.

TOTAL OF EMPLOYEES TURNOVER

Data of employees turnover in 2016. Consist of regular pension, early pension, resign and deceased.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Karyawan Keluar *Turnover Employees*	Jumlah *Total*
Pensiun normal *Regular pension*	5
Pensiun dini *Early pension*	0
Mengundurkan diri *Resign*	20
Meninggal dunia *Deceased*	0
Jumlah *Total*	25

ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karir. Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Kantor Pusat
   a. Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.
   b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.

2. Kantor Cabang
   a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
   b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi Perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Selama tahun 2016 tingkat rotasi dan mutasi karyawan sebesar 24,13% dibandingkan jumlah keseluruhan karyawan. Tingginya presentase tersebut dikarenakan pada tahun 2016 terdapat perubahan struktur organisasi dan tuntutan perkembangan perusahaan yang harus diimbangi dengan peningkatan SDM yang kompeten sesuai jabatannya.

ROTATION AND MUTATION OF EMPLOYEES

Mutation of position and or mutation of work unit can be done for the purpose of completion of tasks and employees training, including career planning. The authority to mutate and placement for employees is categorized into 2 (two):

1. Head Office
   a. Placement and mutation of internal directorate of employees can be done by Division Head or equivalent. Division Head will suggest the name to Division Head of HR.
   b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.

2. Branch Office
   a. Placement and mutation of employees in the branch office can be done by Head of Branch Office by considering the competencies of each employee and the needs of the Branch Office.
   b. Specifically for cashier, Assignment Letter has to be signed by the corresponding Head of Branch.

Mutation and rotation are generally for employees with a higher position, more responsibilities and tasks. The condition of employees rotation and mutation for promotion are based on the Company's regulation on promotion and accordingly with the promotion committee.

In 2016 the rotation and mutation of employees is 24.13% in comparison to the total of employees. This peak in 2016 is due to the organization restructure and high demand of company's growth, which have to be balanced with the increase of human resource with the appropriate qualifications depending on the position.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Karyawan Mutasi dan Promosi *Employees Mutation and Promote*	Jumlah *Total*
Januari *January*	84
Februari *February*	1
Maret *March*	0
April *April*	26
Mei *May*	87
Juni *June*	0
Juli *July*	0
Agustus *August*	3
September *September*	12
Oktober *October*	2
November *November*	0
Desember *December*	0
Jumlah *Total*	215

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Penilaian kinerja karyawan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pekerjaan dan potensi karyawan serta sarana untuk penetapan kebijaksanaan imbalan jasa dan pembinaan karyawan.

Periode penilaian terdiri dari:
1. Periode penilaian semesteran.
2. Periode penilaian tahunan.

Periode pemberlakukan penilaian kinerja karyawan adalah:
1. Periode penilaian semesteran berakhir tanggal 31 Juni untuk periode penilaian semeseter I dan berakhir tanggal 31 Desember untuk periode penilaian semester II.
2. Periode penilaian tahunan dilakukan setiap bulan pertama tahun berikutnya untuk periode penilaian kinerja karyawan tahun sebelumnya.

EMPLOYEES PERFORMANCE EVALUATION

Employees performance evaluation is needed to analyze the level of performance and to see the potential in the employees. Furthermore, employees' performance evaluation is also used as the basis in determining employees' reward and training.
Evaluation period:
1. Mid-year evaluation period.
2. Yearly evaluation period.

Starting period of employees' performance evaluation:
1. There are 2 (two) terms in the mid-year evaluation. The first semester ends on 31st June and the second semester end on 31st December.
2. The yearly evaluation period is done on the first month of the New Year, and evaluating the performance of the prior year.

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi
Human Resources and Competency Development

Unsur-unsur penilaian kinerja karyawan bagi Pejabat adalah:
1. Prestasi kerja yang meliputi:
   a. Produktivitas
   b. Kualitas hasil kerja
   c. Inisiatif
   d. Penguasaan pekerjaan
   e. Penyesuaian diri terhadap tuntutan tugas
   f. disiplin

2. Kepribadian yang meliputi :
   a. Tanggung jawab
   b. Kemauan belajar
   c. Kreativitas
   d. Komitmen
   e. Loyalitas
   f. Kerjasama

3. Kepemimpinan yang meliputi:
   a. Merencana
   b. Mengorganisir
   c. Mendelegasikan tugas
   d. Mengendalikan
   e. Mengambil keputusan
   f. Memotivasi
   g. Mengembangkan bawahan
   h. Membina kelompok kerja

The factors evaluated by the Officials:
1. Work performance, including:
   a. Productivity
   b. Quality of work
   c. Initiative
   d. Knowledge of work
   e. Adjustment in conducting work
   f. Discipline

2. Personality, including:
   a. Responsibility
   b. Willingness to learn
   c. Creativity
   d. Commitment
   e. Loyalty
   f. Team work

3. Leadership, including:
   a. Planning
   b. Organization
   c. Delegating work
   d. Control
   e. Decision making
   f. Motivation
   g. Educating subordinate
   h. Creating work team

Unsur-unsur penilaian kinerja karyawan bagi Pejabat adalah:
1. Prestasi kerja yang meliputi:
   a. Produktivitas
   b. Kualitas hasil kerja
   c. Inisiatif
   d. Penguasaan pekerjaan
   e. Penyesuaian diri terhadap tuntutan tugas
   f. Disiplin

2. Kepribadian yang meliputi:
   a. Tanggung jawab
   b. Kemauan belajar
   c. Kreativitas
   d. Komitmen
   e. Loyalitas
   f. Kerjasama

The factors determining employees' performance, including:
1. Employees accomplishments:
   a. Productivity
   b. Quality of work
   c. Initiative
   d. Knowledge of work
   e. Adjustment in conducting work
   f. Discipline

2. Personality, including:
   a. Responsibility
   b. Willingness to work
   c. Creativity
   d. Commitment
   e. Loyalty
   f. Team work

Teknologi Informasi
Information Technology

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan bisnis khususnya jasa keuangan telah menjadi perhatian besar dari regulator. TI berperan mendorong terciptanya proses bisnis yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek dokumentasi yang dapat memberikan fondasi keberhati-hatian. Di samping itu, penerapan TI membantu manajemen dalam memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat dan berlandaskan aspek dokumentasi seperti yang telah dijelaskan di atas.

The use of Information Technology (IT) in business management, especially in the financial sector, has received much attention from the regulator. IT supports business process to be transparent, accountable, maintain sufficient level of documentation that can serve as a base of compliance. Moreover, IT supports management in giving proper recommendations in a timely manner accordingly to the documentation perspective as previously explained.

VISI DAN MISI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PERUM JAMKRINDO

VISION AND MISSION STATEMENT OF PERUM JAMKRINDO INFORMATION TECHNOLOGY

Visi

Menjadi *Key Success Factor* bagi transformasi Perusahaan menuju Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Vision

As the Key Success Factor in the company's transformation to be the Leading Assurance Company which supports the National Economic Growth.

Misi

- Menyediakan Solusi Bisnis yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung transformasi Perusahaan.
- Meyediakan infrastruktur TI yang aman dan handal sesuai dengan perkembangan bisnis.
- Meningkatkan kematangan atau kapabilitas *IT Governance* sesuai dengan kebutuhan kepatuhan regulasi dan pemenangan persaingan.

Mission

- *Offers Business Solutions that are integrated, efficient and effective that supports the transformation of the Company.*
- *Provides IT infrastructure that is secure and reliable that conforms to the business growth.*
- *To increase the capability of IT Governance that conforms to the regulations and market competition..*

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perum Jamkrindo, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit, maka Perusahaan telah melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi Operasional Tersentralisasi
   Hingga bulan September 2016, Aplikasi operasional Perum Jamkrindo memiliki infrastruktur yang desentralisasi, dimana server, aplikasi, dan database terdapat pada masing-

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PERUM JAMKRINDO

In order to support business activity of Perum Jamkrindo, particularly in the insurance credit software application, the company has organized several activities as follows:

1. Centralized Operational Application Development
   Until September 2016, the operational Application of Perum Jamkrindo had a decentralized infrastructure, where its server, application and database are stored in each of the branches.

masing cabang. Kelemahan dalam menggunakan bentuk infrastruktur seperti ini adalah

a. Menyulitkan dalam pemeliharaan dan kontrol aplikasi
b. Perbedaan data antara data pusat dan cabang
c. Menyulitkan dalam melakukan integrasi dengan aplikasi akutansi
d. Menyulitkan apabila terdapat penambahan kewenangan dalam aplikasi

Dengan melakukan pengembangan aplikasi menjadi sentralisasi, maka kelemahan diatas dapat dihilangkan. Seluruh produk penjaminan baik eksisting, kur, kupedes, briguna dan produk online telah dilakukan sentralisasi. Sehingga terdapat keseragaman pola penjaminan antar cabang. Selain itu memudahkan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat

2. Pengembangan Aplikasi Akutansi Tersentralisasi
Hingga bulan September 2016, Aplikasi operasional Perum Jamkrindo memiliki infrastruktur yang desentralisasi, dimana server, aplikasi, dan database terdapat pada masing-masing cabang. Kelemahan dalam menggunakan bentuk infrastruktur seperti ini adalah

a. Menyulitkan dalam pemeliharaan dan kontrol aplikasi
b. Menyulitkan dalam melakukan integrasi dengan aplikasi operasional
c. Menyulitkan apabila terdapat penambahan kewenangan dalam aplikasi
d. Proses Konsolidasi yang sering gagal dari kantor cabang
e. Perbedaan data antara data pusat dan cabang (duplikasi data)

Dengan melakukan pengembangan aplikasi menjadi sentralisasi, maka kelemahan diatas dapat dihilangkan. Selain itu dalam pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa fitur aplikasi yang ditambahkan

a. *Join cost*
b. Fungsi *lock input* data, (menutup proses input setelah laporan keuangan selesai disusun)
c. Penyederhanaan COA
d. Jurnal antar kantor
e. Penambahan kewenangan kanwil dalam melakukan proses akutansi

Seluruh produk penjaminan baik eksisting, kur, kupedes, briguna dan produk *online* telah dilakukan sentralisasi. Sehingga terdapat keseragaman pola penjaminan antar cabang. Selain itu memudahkan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat

The weaknesses of this approach are:

a. Difficulties in maintenance and application control.
b. Discrepancy between data in head office and branches.
c. Difficulties in integrating with the accounting application.
d. Difficulties when adding new authority to the application.

By centralizing the operational application, the difficulties explained previously can be eliminated. All existing assurance products, e.g. kur, kupedes, briguna and online product have been centralized. Hence, there is a unifrom pattern of assurance among the branches. Moreover, it is easier to coordinate and control from the head office.

2. Development of Centralized Accounting Application
Until September 2016, the operational Application of Perum Jamkrindo had a decentralized infrastructure, where its server, application and database are stored in each of the branches. The weaknesses of this approach are:

a. Difficulties in maintenance and application control.
b. Difficulties in integrating with the operational application.
c. Difficulties when adding new authority to the application
d. The process of consolidation in the branches often fails.
e. Discrepancy between data in head office and branches (data duplication).

By centralizing the application, the difficulties explained previously can be eliminated. Additionally, several features were added during the centralization development.

a. Join Cost
b. Lock input data functiong (locking the input process once the financial statement is completed)
c. Simplification of COA
d. Interoffice journals
e. Additional authority to branch office in processing accounting.

All existing assurance products, e.g. kur, kupedes, briguna and online product have been centralized. Hence, there is a unifrom pattern of assurance among the branches. Moreover, it is easier to coordinate and control from the head office.

Teknologi Informasi
Information Technology

3. Pengembangan Integrasi Operasional dan Akutansi
   Perum Jamkrindo telah mengembangkan integrasi antara aplikasi operasional dan akutansi. Dengan adanya integrasi ini, maka secara otomatis atas penjaminan yang dilakukan antar terbentuk COA akutansi di sistem Akutansi. Untuk fase awal, integrasi yang dilakukan baru terbatas dari IJP, Komisi Agen, *Handling Fee, Feebase, Premi Coguarantee*, RIC, dan Santunan Kebakaran.

   Integrasi Operasional dan Akutansi direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2017, untuk modul klaim dan subrogasi, dengan terlebih dahulu merapikan proses bisnis dari tiap modul.

   Dengan dilakukan intergasi ini, maka Perum Jamkrindo dapat lebih efiesien dalam melakukan proses bisnis didalamnya, mengurangi waktu untuk rekonsialisasi data antar bagian operasional dan akutansi, serta merapikan dan mengontrol COA yang dimiliki.

4. Penyesuaian Aplikasi KUR *Online* sesuai regulasi yang berlaku
   Untuk mendukung Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan dilakukan perubahan pada Nomor 13 Tahun 2015 maka perusahaan telah menyusun Aplikasi Penjaminan KUR *Online* yang pelaksanaannya mewajibkan seluruh proses melalui sistem *online* dengan perusahaan penjamin. Kemudian di tahun 2016, terdapat perubahan kedua atas permenko nomor 8 tahun 2015 yaitu menjadi permenko 9 tahun 2016.

   Perum Jamkrindo telah berkerjasama dengan seluruh mitra yang ditunjuk sebagai pelaksana program KUR *Online*.

5. Penyempurnaan Aplikasi *Suretyship online*
   Untuk dapat lebih mendukung bisnis dalam melakukan pemasaran produk *Suretyship* berupa (Keagenan Argo, *Payment Bond*, *Customs Bond*, *Surety Bond* dan Kredit Kontra Garansi) dan perluasan jaringan pelayanan, Perusahaan telah melakukan peningkatan terhadap Aplikasi Suretyship online, yaitu :
   a. Berbasis *cloud,* untuk jaminan SLA yang tinggi
   b. Notifikasi email, untuk kecepatan respon persetujuan penjaminan
   c. VPN *tunneling*, untuk jalur transaksi pembuatan *surety bond* yang lebih aman bagi agen Perusahaan

3. Development of Operational and Accounting Integration
   Perum Jamkrindo has developed an integration between operational and accounting application. With the integrated applications, it is now possible for an automatic assurance made by accounting COA in the accounting system. In the early phase, integration was limited to IJP, Agent Commission, Handling Fee, Feebase, Coguarantee Premium, RIC and Fire Compensation.

   Integration for Operational and Accounting is planned to continue in 2017 with claim module dan subrogation. This will start by firstly cleaing the business process in each module.

   This integration allows Perum Jamkrindo to be more efficient in its business process and fasten the time to reconciliate the data between operational and accounting, as well as arranging and control COA that it has.

4. Adjustment of Online KUR Application in accordance with applicable regulations to support the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs (Permenko) No. 8 of 2015 regarding Guidelines for the Implementation of People's Business Credit and amended on regulation No. 13 year 2015, the Company then set up the Online KUR Application which the implementation requires the whole process done through Online system with the guarantor company. Moreover in the year 2016, there is a second amendment on regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs number 8 year 2015 to regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs number 9 years 2016.

   Perum Jamkrindo has worked with all partners appointed as implementer of Online KUR program.

5. Suretyship online Application Improvement
   In order to further support sales of Suretyship product (namely: Keagenan Argo, Payment Bond, Customs Bond, Surety Bond and Kredit Kontra Garansi) and expanding the service network, the company has completed an upgrade for the Suretyship online Application:
   a. Cloud basis, to ensure a good level of SLA
   b. Email notification, to expedite respond in assurance agreement.
   c. VPN tunneling, for a safer transaction in issuing surety bond for company's agent.

Teknologi Informasi
Information Technology

d. Menu validasi keaslian sertifikat *Surety Bond*
e. Menu pendaftaran *principal* secara *online*
f. *Dashboard* produksi *real-time*

6. Pengembangan Aplikasi DWHBI
Sesuai Program Kerja Divisi Teknologi Informasi PERUM JAMKRINDO, pada tahun 2016 Perum Jamkrindo membangun sistem Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* yang tebentuk dari sistem-sistem OLTP (*On-Line Transaction Processing*) dan sumber-sumber lainnya. Sumber data OLTP PERUM JAMKRINDO berasal dari Aplikasi *Core* Bisnis (Operasional), Akuntansi, dan Aplikasi lainnya. Sistem ini mendukung proses pencarian dan penyajian data menjadi lebih efisien, efektif, dan komprehensif serta informasi disajikan secara tepat dan akurat tanpa mengganggu proses transaksi yang sedang berjalan.

Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* PERUM JAMKRINDO merupakan salah satu alat bantu yang mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan proses integrasi dan konsolidasi data dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi pondasi yang terstuktur dalam bentuk dimensi data yang terukur. Data tersebut dapat disajikan ke dalam format yang lebih komunikatif dan interaktif baik dalam bentuk tabulasi, *pivot table*, atau grafik-grafik yang intuitif untuk mendukung analisa.

Kekuatan *analytics* dan modelling *tools* menjadi pembeda utama keluaran yang dihasilkan *system* Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* PERUM JAMKRINDO dibandingkan dengan laporan-laporan statis dari sistem operasional yang ada. Keluaran dari Sistem Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* PERUM JAMKRINDO dapat digunakan untuk melihat *trend* terkait operasional layanan termasuk memberikan prediksi mendatang berdasarkan analisis tren. Manfaat lain dari sistem Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* sesuai dengan IT *Strategic Plan* PERUM JAMKRINDO dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

a. Informasi yang dihasilkan oleh Data *Warehouse* dan *Business Intelligence* dapat digunakan oleh pihak management PERUM JAMKRINDO sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
b. Perencanaan bisnis operasi pelayanan PERUM JAMKRINDO yang lebih akurat.
c. Keakuratan informasi mengenai kinerja operasi pelayanan PERUM JAMKRINDO di setiap kantor cabang.
d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
e. Pemutahiran informasi yang terpusat tersebut.

d. Validation menu for authentication of Surety Bond certificate.
e. Registration menu for principal via online.
f. Real time production dashboard.

6. Development of DWHBI Application
According with the Information Technology Work Program of PERUM JAMKRINDO, in 2016 Perum Jamkrindo created a system for Data Warehouse and Business Intelligence which was formed by OLTP (On-Line Transaction Processing) systems and other sources. Source of data for OLTP PERUM JAMKRINDO are from Core Business Application (Operational), Accounting, and other Applications. This system supports research process and data presentation to be more efficient, effective, comprehensive, precise and accurately without affecting an ongoing transaction process.

Information that is generated from Data Warehouse System and Business Intelligence PERUM JAMKRINDO is one of the tools the helps the decision making process. Therefore, it is necessary to have an integrated and consolidated process of data from all sources. Consequentially, this can be used as a structured foundation with a measurable dimension of data. These data can be presented with different formats that are more communicative and interactive such as: tabulation, pivot table, intuitive graphics that are more analysis friendly.

The key difference of the results that are generated by the current reports which are static with the Data Warehouse and Business Intelligence PERUM JAMKRINDO, is the analytics and modelling tools. The outcome of Data Warehouse System and Business Intelligence PERUM JAMKRINDO can be used to see the trend related to service operation including giving prediction of analysis trend. According to IT's Strategic Plan PERUM JAMKRINDO, other benefits from Data Warehouse System and Business Intelligence are as follows:

a. The information that is generated by Data Warehouse and Business Intelligence can be used by management of PERUM JAMKRINDO correspondingly with each tasks and functions.
b. The planning of service business operational of PERUM JAMKRINDO can be more precise.
c. Information on service operation performance of PERUM JAMKRINDO is each branch office is more accurate.
d. A more accurate and faster decision in decision making.
e. Information update that is more centralized.

Teknologi Informasi
Information Technology

7. Pengembangan Sistem Penjaminan *online* dengan mitra
Saat ini Perum Jamkrindo sudah dan masih berkerjasama dalam penjaminan *online* dengan beberapa mitra bank dan non bank, yaitu:
   - Bank Mandiri
   - Bank Negara Indonesia (BNI)
   - Bank Tabungan Negara (BTN)
   - Bank Rakyat Indonesia (BRI)
   - Bank Artha Graha
   - Bank CTBC
   - Bank OCBC NISP
   - BRI Agro
   - Bank Sinarmas
   - Bank Tabungan Pesiunan Nasional
   - Maybank
   - Bank Aceh
   - Bank Jambi
   - Bank Riau
   - Bank Bengkulu
   - Bank BJB
   - BPD Bali
   - BPD DIY (YOGYA)
   - BPD Lampung
   - BPD NTB
   - BPD NTT
   - BPD Jateng
   - BPD Kalimantan Barat
   - BPD Kalimantan Selatan
   - Bank Nagari
   - BPD Sulsel Barat
   - Adira Finance
   - Kospin Jasa
   - PT Bima Multi Finance
   - PT Bina Artha Ventura
   - PT Chandra Sakti Utama Leasing
   - PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance
   - PT Mandiri Tunas Finance
   - PT MNC Finance
   - PT Pegadaian
   - PT Pegadaian Syariah
   - PT Permodalan Nasional Madani
   - PT Pro Car Internasional Finance
   - PT Pro Car Internasional Finance Syariah
   - Reksa Finance
   - Suzuki Finance
   - Astra Credit Company
   - Toyota Astra Finance (TAF)

7. Development Assurance Online System with partners
Currently Perum Jamkrindo has and will continue to work together on online assurance application with bank and non-banks, as follows:
   - Bank Mandiri
   - Bank Negara Indonesia (BNI)
   - Bank Tabungan Negara (BTN)
   - Bank Rakyat Indonesia (BRI)
   - Bank Artha Graha
   - Bank CTBC
   - Bank OCBC NISP
   - BRI Agro
   - Bank Sinarmas
   - Bank Tabungan Pesiunan Nasional
   - Maybank
   - Bank Aceh
   - Bank Jambi
   - Bank Riau
   - Bank Bengkulu
   - Bank BJB
   - BPD Bali
   - BPD DIY (YOGYA)
   - BPD Lampung
   - BPD NTB
   - BPD NTT
   - BPD Jateng
   - BPD Kalimantan Barat
   - BPD Kalimantan Selatan
   - Bank Nagari
   - BPD Sulsel Barat
   - Adira Finance
   - Kospin Jasa
   - PT Bima Multi Finance
   - PT Bina Artha Ventura
   - PT Chandra Sakti Utama Leasing
   - PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance
   - PT Mandiri Tunas Finance
   - PT MNC Finance
   - PT Pegadaian
   - PT Pegadaian Syariah
   - PT Permodalan Nasional Madani
   - PT Pro Car Internasional Finance
   - PT Pro Car Internasional Finance Syariah
   - Reksa Finance
   - Suzuki Finance
   - Astra Credit Company
   - Toyota Astra Finance (TAF)

Teknologi Informasi
Information Technology

Selain itu sudah dilakukan pembahasan dan pengembangan sistem penjaminan *online* dengan beberapa mitra bank dan non bank lainnya, diantaranya:

- Bank BUKOPIN
- BPD Sumsel Babel
- BCA Finance
- CIMB Niaga Finance
- PT Pegadaian Syariah
- PT Verena Multi Finance

BESARAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Di tahun 2016, Perum Jamkrindo mengalokasikan investasi sebesar Rp28,68 miliar, meningkat 82,26% dibandingkan investasi Rp15,73 miliar di tahun 2015.

Perbandingan Biaya Investasi TI 2015-2016

Additionally, there has been a discussion and system development on online assurance application with several other banks and non-banks, as follows:

- Bank BUKOPIN
- BPD Sumsel Babel
- BCA Finance
- CIMB Niaga Finance
- PT Pegadaian Syariah
- PT Verena Multi Finance

INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY.

In 2016, Perum Jamkrindo allocated IDR 28.68 billion worth of investment, which is an increase of 82.26% when compared with IDR 15.73 billion in 2015.

Total Data comparison of investment in IT 2015-2016

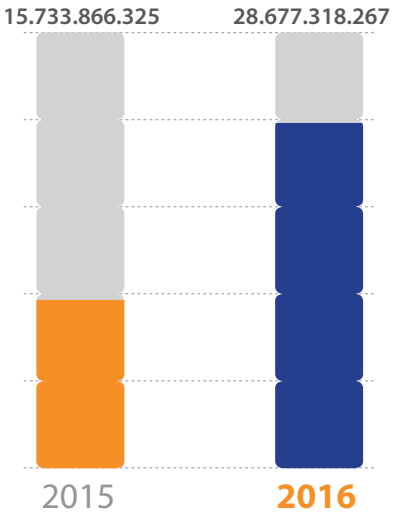

Analisis Dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Industri
Industry Overview

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Proses pemulihan ekonomi global tahun 2016 masih mengalami kendala. Terus turunnya harga komoditas dunia serta berbagai kejadian yang sebelumnya tidak diperkirakan, seperti kemenangan pendukung Brexit, kemenangan Doland Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat serta hasil referendum di Italia berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh melambat pada tahun 2016.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat misalnya, tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 1,6%, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,6%. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terealisasi sebesar 6,7% atau menjadi pertumbuhan ekonomi terendah dalam 25 tahun terakhir.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Indonesia tumbuh relatif lebih baik dibandingkan Negara-negara berkembang lainnya. Tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi ketiga di dunia di bawah India dan Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat seiring dengan kemampuan Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi pada *level* yang rendah, yaitu 3,02%. Tingkat inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01%.

Inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan sepanjang tahun ini. BI *rate* telah mengalami penurunan dari posisi bulan Januari sebesar 7,25% menjadi 6,50% pada bulan Juli, penurunan sebesar 75bps selama 7 bulan.

INDONESIA ECONOMIC GROWTH

The global economic recovery process in 2016 was still experiencing difficulties. The continued decline in world commodity prices and unforeseen events, such as the Brexit supporter's victory, Donald Trump won the President of the United States election and the results of Italy referendum have significant impact on global economic growth that slowed down in 2016.

The slowdown in global economic growth was also influenced by the slowdon in the economic growth of developed countries. United States' economic growth for example, in 2016 only grew by 1.6%, which slower than the same period at the previous year by 2.6%. Likewise, China's economic growth was realized at 6.7% and became their lowest economic growth in the last 25 years.

Amid the slowdown in global economic growth, Indonesia's economy grew relatively better than other developing countries. In 2016, Indonesia's economy grew by 5.02% higher than the previous year's economic growth of 4.88%. With this achievement, Indonesia's economic growth was recorded as the third highest in the world under India and China.

Indonesia's economic growth was underpinned by strong household consumption in line with the Government's ability to keep inflation at a low level of 3.02%. This inflation rate was the lowest in the last 10 years. Based on data from the Central Bureau of Statistics, 2016 household consumption expenditure grew by 5.01%.

This controlled inflation was inseparable from Bank Indonesia's role in maintaining exchange rate stability and guiding inflation expectations, as well as better coordination of inflation control policies between Bank Indonesia and the Government, both at the central and regional levels.

Along with the controlled inflation rate, Bank Indonesia (BI) has made adjustments to interest rates throughout the year. BI rate has decreased from its position in January from 7.25% to 6.50% in July, a decrease of 75 bps for 7 months.

Tinjauan Industri
Industry Overview

UMKM SEBAGAI MOTOR PERTUMBUHAN EKONOMI

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia semakin penting dan strategis. Berbagai data menunjukkan bahwa UMKM berperan sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%.

Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam Negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode lima tahun terakhir.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.

Namun demikian, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan akses sektor UMUM terhadap rantai nilai pasok produksi global masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki akses dan informasi ke pasar global.

Harus diakui, bisnis UMKM memang memiliki beberapa kelemahan dalam beroperasi. Misalnya saja, kesulitan pemasaran, akses ke sumber pembiayaan yang sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2016, penyaluran pinjaman sektor perbankan tercatat sebesar Rp4.413,4 triliun, sedangkan pembiayaan dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tercatat sebesar Rp571,62 triliun. Jumlah kredit perbankan yang disalurkan pada sektor UMKM hanya sebesar Rp802,1 triliun atau 18,2% dari total kredit yang disalurkan.

Dalam rangka meningkatkan perkembangan sektor UMKM, OJK telah menerbitkan beberapa regulasi di bidang IKNB, antara lain terkait revitalisasi Perusahaan Modal Ventura, perluasan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan, pergadaian swasta, serta peningkatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

MSMES AS THE DRIVING FORCE OF ECONOMIC GROWTH

The role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to the Indonesian economy is increasingly important and strategic. Various data shows that MSMEs play a very dominant role in encouraging national economic growth. The contribution of MSMEs sector to gross domestic product (GDP) has been increasingly rising in the last five years. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) noted that MSMEs sector contribution increased from 57.84% to 60.34%.

Not only that, MSMEs sector has also supported the labor absorption in the country. Labor absorption in the MSMEs sector grew from 96.99% to 97.22% in the last five years.

With so many workers absorbed, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) assessed that MSMEs sector can increase people's income. Thus, MSMEs are considered to have a strategic role in fighting poverty and unemployment.

However, MSMEs sector contribution to Indonesia's exports is still relatively low compared to other countries in Southeast Asia. This is due to the access of GENERAL sector to the global production supply chain is still minimum. This indicates that most MSMEs do not have access and information to the global market.

Admittedly, MSMEs business does have some weaknesses in the operation. For example, difficulties in marketing, finite access to financing sources, limited human resources (HR), raw material difficulties, limited innovation and technology.

Based on data from the Financial Services Authority (OJK), in 2016, banking sector loan disbursement was recorded at Rp4,413.4 trillion, while financing from Non-Bank Financial Industry sector (IKNB) was Rp571.62 trillion. The bank credit disbursed in MSMEs sector was only Rp802.1 trillion or 18.2% of total credit disbursed.

In order to improve the MSMEs sector development, OJK has issued several regulations in IKNB field, among others related to revitalization of Venture Capital Company, expansion of Financing Company business activities, private pawnshop, and increasing role of Indonesia Export Financing Institution.

Peningkatan peran IKNB melalui pembiayaan pada sektor-sektor tersebut harus didukung oleh tata kelola dan manajemen risiko yang baik, antara lain melalui pengelolaan kualitas piutang pembiayaan untuk menjaga rasio *non performing financing*, pengalihan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit agar tidak mengganggu *financial soundness* perusahaan.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PENJAMINAN

Tahun 2016 merupakan *milestone* penting dalam sejaran industri penjaminan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, berarti perusahaan penjaminan telah mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Industri penjaminan merespon sangat baik atas disahkannya payung hukum tersebut. Respon tersebut diantaranya adalah dengan menelurkan beberapa perusahaan penjaminan baru di beberapa daerah (Jamkrida), yakni Jamkrida Kalbar dan Jamkrida Sulawesi Selatan. Dengan bertambahnya dua Jamkrida ini, maka jumlah perusahaan penjaminan di Indonesia menjadi 22 perusahaan.

Menyongsong tahun 2017, sekaligus memasuki tahun kedua masa transisi perusahaan asuransi yang masih bermain pada bisnis penjaminan, industri penjaminan dipercaya akan semakin tumbuh. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) telah mendorong agar setiap provinsi yang belum memiliki perusahaan penjaminan daerah dapat segera membentuk Jamkrida-nya masing-masing. Dorongan ini mendapat sambutan yang baik. Terbukti pada akhir tahun 2016, terdapat dua pemerintah daerah yang mengajukan izin pendirian Jamkrida untuk provinsinya, kedua provinsi itu adalah DIY dan Bengkulu.

Untuk mendorong akselarasi industri penjaminan di Indonesia, saat ini terdapat sebuah asosiasi sebagai wadah bagi perusahaan penjaminan guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, yang bertujuan agar terjalin hubungan baik antara pelaku industri penjaminan dan pemerintah. Asosiasi tersebut ialah Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) yang lahir pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2016, anggotanya terdiri dari 20 perusahaan penjaminan dan Perum Jamkrindo sebagai perusahaan BUMN penjaminan pertama dan terbesar menjadi penggerak bagi perusahaan penjaminan daerah dan swasta.

Increasing the IKNB role through financing in these sectors should be supported by good governance and good risk management, among others through the receivables financing quality management to maintain non-performing financing ratio, diversion risk financing through credit insurance mechanism or loan guarantee so as not to interfere the company's financial soundness.

GUARANTEE INDUSTRY DEVELOPMENT

Year of 2016 was an important milestone in guarantee industry history in Indonesia. This was marked by the enactment of Law No 1 of 2016 on Guarantee. With the enactment of the Law, the guarantee company has legal certainty in running its business.

The guarantee industry responded very well to that legal protection. These responses include the emergence of several new guarantee companies in several regions (Jamkrida), namely Jamkrida Kalbar and Jamkrida South Sulawesi. With the addition of these two Jamkrida, the number of guarantee companies in Indonesia become 22 companies.

Welcoming the year of 2017, as well as entering the second year of insurance companies transition period that are still playing on the guarantee business, guarantee industry will continue to grow. The Association of Indonesian Guarantee Companies (Asippindo) has encouraged every province that has not owned a regional guarantee company to immediately establish its own Jamkrida. This encouragement obtained a good respond. Proven by the end of 2016, there were two local governments applying for the establishment of Jamkrida for their province, namely DIY and Bengkulu.

To encourage the guarantee industry acceleration in Indonesia, there is now an association as a platform for guarantee companies to meet the demands of national development, which aims to establish good relations between the industry and the government. The association is Asippindo (Association of Indonesian Guarantee Companies), which was born in 2012. Until 2016, its members consist of 20 guarantee companies and Perum Jamkrindo as the first and largest state-owned guarantee company that act as the driving force for local and private guarantee companies.

Tinjauan Bisnis
Business Review

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2016

Latar Belakang

Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada 1 Juli tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.

Dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perusahan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan

Delapan tahun sejak transformasi, Perum Jamkrindo terus membesar seiring dengan tumbuhnya industri penjaminan. Pada tahun 2016, Pemerintah memberikan dukungan penuh pada industri penjaminan pada umumnya dan Perum Jamkrindo khususnya, sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak pada bisnis penjaminan. Di tahun ini diterbitkanlah Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Wujud pengakuan dari Pemerintah atas keberadaan dan berkembang pesatnya industri ini.

Dalam pasal (3) poin (b) UU Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa: usaha penjaminan bertujuan untuk meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Sesuai hal tersebut, maka peran industri penjaminan tidak hanya menjamin Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK) tapi lebih dari itu mencakup pula segmen usaha lain.

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY IN 2016

Background

The government established Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) in July 1, 1970, which then developed and transformed into Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) pursuant to the Government Regulation No. 51 dated December 23, 1981, amended by the Government Regulation No. 27 dated May 31, 1985 concerning Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.

With the success of Perum PKK in performing its functions and duties to develop cooperatives through credit guarantee activity, the Government expanded the outreach of Perum PKK's service to, not only limited to cooperative, but also encompassed Micro, Small and Medium Enterprises through the Government Regulation No. 95 dated November 7, 2000, and also transformed the name of Perum PKK into Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Through the Government Regulation no. 41 dated May 19, 2008 concerning Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indoensia (Perum Jamkrindo), Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha was renamed as Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

The Government issued Law No. 1 of 2016 on Guarantee

Eight years since the transformation, Perum Jamkrindo continues to grow along with the growth of guarantee industry. In 2016, the government provides full support to the guarantee industry in general and Perum Jamkrindo in particular, as the only state-owned enterprise that engaged in the guarantee business. In this year, Law No. 1 of 2016 on Guarantee was issued,as a form of government recognition to the existence and rapid development of this industry.

Article (3) point (b) of Law No 1 of 2016 explained that: guarantee business is aiming to increase access for business world, especially micro, small and medium enterprises and cooperatives and other prospective businesses to financing sources. Accordingly, the role of the guarantee industry ensures not only Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) but also cover other business segments.

Tinjauan Bisnis
Business Review

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Dengan diterbitkannya PP Nomor 1 tahun 2016, maka Perum Jamkrindo semakin berkembang dari menjamin UMKMK yang *feasible* dan tidak *bankable*, juga penugasan lain sebagai lembaga pelaksana penjamin di Sistem Resi Gudang. Hal ini menjadi segmen pasar baru yang harus dilayani oleh Perum Jamkrindo, yang membuka peluang melayani sektor non UMKMK.

Tujuan

1. Memperoleh market baru
   Dengan diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Jamkrindo berpotensi melebarkan sayap untuk menjamin pembiayaan ataupun *surety bond* diluar UMKM

2. Dapat menjangkau ke seluruh pelosok nusantara
   Dengan didirikannya KUP baru dan adanya mobil keliling diharapkan jamkrindo dapat menjangkau potensi penjaminan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi

1. Membuka 4 Kantor Unit Pelayanan baru yaitu di Pangkalan Bun, Cibinong, Bojonegoro dan Lubuk Linggau
   KUP merupakan kepanjangan tangan dari kantor cabang Jamkrindo, dengan dibukanya KUP, *volume* dan IJP pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

2. Menyediakan Mobil Keliling di seluruh kantor wilayah Perum Jamkrindo
   Untuk memudahkan warga masyarakat menjangkau Jamkrindo dan sebagai sarana sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengenal Jamkrindo.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Perum Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit membagi segmen usaha ke dalam dua segmen yaitu Bisnis Penjaminan Kredit Program dan Bisnis Penjaminan Kredit Non Program. Bisnis Penjaminan Kredit Program diartikan sebagai segmen usaha Perum Jamkrindo dalam menjamin skema kredit yang ditetapkan/diatur oleh Pemerintah sebagai kredit program, diantaranya adalah Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Penjaminan KPR Sejahatera FLPP dan Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Bisnis Penjaminan Kredit Non Program merupakan segmen usaha Perum Jamkrindo dalam menjamin kredit diluar kredit program, dimana skema penjaminan diciptakan dan dikembangkan

Government Regulation No 1 of 2016 on Guarantee Institution of Warehouse Receipt System

With the issuance of Government Regulation No. 1 of 2016, Perum Jamkrindo has grown from guarantee the feasible and non-bankable MSMEs, as well as other assignments as the guarantee institution in Warehouse Receipt System. This is a new market segment that must be served by Perum Jamkrindo, which opens opportunities to serve non-MSMEs sector.

Purpose

1. To attain new market
   With the issuance of Law No. 1 of 2016 on Guarantee, Jamkrindo has the potential to expand in financing guarantee or surety bond outside MSMEs

2. To reach the whole country
   The new KUP establishment and Jamkrindo Services Car existence were expected to reach the potential guarantee in all regions of Indonesia

Strategy

1. Open 4 new Service Unit Offices in Pangkalan Bun, Cibinong, Bojonegoro and Lubuk Linggau
   KUP is the extension of Jamkrindo branch office. With the opening of KUP, volume and IJP in 2016 has increased significantly

2. Provide Services Car at all Perum Jamkrindo regional offices
   To facilitate people to reach Jamkrindo and as a socialization means so that all levels of society can get to know Jamkrindo more.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Perum Jamkrindo as a credit guarantee company divides its business into two segments, namely Program Credit Guarantee Business and Non-Program Credit Guarantee Business. Program Credit Guarantee Business is defined as Perum Jamkrindo business segment in ensuring credit schemes set/regulated by the Government as credit program, such as Credit Guarantee for Micro Credit Loan, KPR Sejahtera FLPP Guarantee and Warehouse Receipt System Guarantee.

The Non-Program Credit Guarantee Business is a Perum Jamkrindo business segment in terms of credit guarantee outside the program credit, where the guarantee schemes were created

oleh perusahaan dengan mengikuti pasar/tren. Penjaminan Kredit Non Program diantaranya adalah penjaminan kepada UMKMK untuk kredit mikro, kredit umum, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, Penjaminan *Suretyship*, dan produk-produk eksisting lainnya.

SEGMEN BISNIS PENJAMINAN PROGRAM

Kredit Program di Indonesia sudah mulai dikenal sejak 1960 dan bertujuan untuk membiayai ekonomi produktif dan berorientasi untuk pengembangan usaha. Awal mula munculnya kredit ini difokuskan untuk pembiayaan sektor pertanian, terkait dengan kebijakan intensifikasi pertanian.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM definisi Kredit Program adalah pembiayaan sistem Kredit Bank yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional.

Penjaminan Kredit Program merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin dalam mendukung kebijakan Kredit Program Pemerintah dalam meningkatkan *volume* Kredit kepada UMKM.

Sejak akhir tahun 2015, bisnis penjaminan program di Perum Jamkrindo dikelola oleh satu divisi tersendiri, yaitu Divisi Bisnis Penjaminan Program yang mengelola produk Penjaminan KUR dan Penjaminan KPR Sejahtera FLPP. Pada tahun 2016, menyambut diterbitkannya PP No. 1 tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem resi Gudang, Perum Jamkrindo membuat divisi baru yaitu Divisi Penjaminan Sistem resi gudang.

Adapun Penjaminan Kredit Program yang saat ini dilakukan oleh Perum Jamkrindo adalah:

1. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
   Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM maka pada tahun 2007 lahirlah Kredit Usaha Rayat dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007, tgl 12 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM serta Perkuatan Perusahaan Perusahaan Penjaminan bagi UMKM dengan memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan dan Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Teknis, Bank Penyalur, Perusahaan Penjaminan tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi beserta perubahannya,terkait hal tesebut maka Pemerintah membuat program kredit Usaha rakyat. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) antara

and developed by the Company by following the market/trend. Non-Program Credit Guarantee is a guarantee to MSMEs for micro credit, general credit, Construction and Procurement Credit, Suretyship Guarantee, and other existing products.

GUARANTEE PROGRAM BUSINESS SEGMENT

In Indonesia, the Program Credit has been recognized since 1960 and aims to finance the productive economy sector as well as being oriented to business development. Initially, the emergence of this credit is focused on financing the agricultural sector, in association with the intensification of agriculture policy.

According to the Ministry of Cooperatives and SMEs, the definition of Program Credit is a financing system for Bank's Loan that is geared towards the interests of National Economic Development.

Program Credit Guarantee is one of the activities conducted by Perum Jamkrindo in carrying out its function as a guarantee institution to support the Government's Program Credit policy to increase the volume of Loan to MSMEs.

Since the end of 2015, the program guarantee business in Perum Jamkrindo is managed by a separate division, which is Program Guarantee Business Division that manages KUR Guarantee and KPR Sejahtera FLPP Guarantee. In 2016, with the issuance of PP no. 1 of 2016 on the Guarantee Institution of Warehouse Receipt System, Perum Jamkrindo created a new division, namely Warehouse Receipt System Guarantee Division.

The Program Credit Guarantee that are currently undertaken by Perum Jamkrindo are:

1. Micro Credit Loan Guarantee
   In order to accelerate the development of real sector and MSMEs empowerment, in 2007 Micro Credit Loan was created in accordance with Presidential Instruction (Inpres) No. 6 of 2007, dated June 12, 2007 on Policy on the Acceleration of Real Sector Development and Empowerment of MSMEs and strengthening the Guarantee Company for MSMEs by increasing capital and expanding service reach and MOU between the Technical Ministry, Distribution Bank, and Guarantee Company dated October 9, 2007 on Credit/Financing Guarantee to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives, as well as the amendment, and related to that, the government created micro credit loan program. Based on the Guarantee Cooperation Agreement between the Government of Republic of Indonesia and

Tinjauan Bisnis
Business Review

Pemerintah Republik Indonesia dengan Perum Jamkrindo Dalam Rangka Kredit Usaha Rakyat No.PKP-02/KUR/DSMI/2008-95/Jamkrindo/XII/2008, tanggal 10 Desember 2008 beserta perubahannya maka Perum Jamkrindo menjadi Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR 2007 sering disebut dengan KUR GEN 1 dengan sasaran adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor yang diperbolehkan adalah Sektor Khusus (Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Indistri Kecil, TKI dan tanam Keras) dan Sektor jasa dan perdagangan dengan *Plafond* Kredit untuk KUR Mikro Maksimal Rp20Juta dan KUR retail >Rp 20 juta s.d 500 Juta, dalam hal subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) BPKP melakukan verifikasi terlebih dahulu kemudian memberikan hasil verifikasi ke kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini adalah kementrian Koperasi dan UKM untuk menentukan nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan.

Pada tahun 2014 terdapat moratorium KUR untuk tidak lagi memberikan kredit kepada debitur baru mulai 1 Januari 2015, moratorium tersebut berdampak pada pertumbuhan ekspansi penjaminan dan perkembangan UMM maka pada pertengahan tahun 2015 Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi program pemerintah.

KUR 2015 mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil berikut perubahannya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, berikut perubahan terakhirnya melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Terdapat beberapa perubahan KUR Gen I dan KUR Gen 2 diantaranya:
a. *Plafond*
b. Suku Bunga
c. Tarif IJP
d. Sektor
e. Sistem pembayaran IJP KUR gen 1 adalah Subsidi

Perum Jamkrindo In the Micro Credit Loan No. PKP-02/KUR/DSMI/2008 - 95/Jamkrindo/XII/2008 dated December 10, 2008 and its amendment, Perum Jamkrindo became the Micro Credit Loan (KUR) Guarantee Institution.

KUR 2007 is often referred to as KUR GEN 1 with the target of MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives). The sectors allowed are Special Sector (Agriculture, Animal Husbandry, Forestry, Small Industry, TKI and hard planting) as well as Service and Trade Sector with Credit Limit for KUR Micro are maximum Rp 20 million and KUR retail are more than Rp 30 million to 500 million. In the case of subsidy for Guarantee Fee (IJP), BPKP will verifies in advance then gives the verification result to the Proxy of Budget User (KPA), which in this case is the Ministry of Cooperatives and SMEs to determine the value of bills for Guarantee Fee.

In 2014 there was a KUR moratorium to no longer provide credit to new debtors starting January 1, 2015. The moratorium has an impact on the guarantee expansion growth and UMM development, therefore by mid-2015 the Micro Credit Loan (KUR) has become government program again.

KUR 2015 refers to the President of Republic of Indonesia Decree No. 14 of 2015 dated May 7, 2015 on Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises as the basis for the establishment of Financing Policy Committee for Micro, Small Business and its amendments, the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation as the Chairman of Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises No. 8 Year 2015 dated October 19, 2015 on Micro Credit Loan Guidelines, and the latest amendment through the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation as the Chairmain of Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises No. 9 of 2016 on the Second Amendment over the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation as the Chairman of Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises No. 8 Year 2015 on Micro Credit Loan Guidelines.

There are several changes on KUR Gen I and KUR Gen 2, among others:
a. Credit Limit
b. Interest Rate
c. IJP Fee
d. Sectors
e. IJP KUR gen 1 payment system is IJP Subsidy paid

IJP yamg dibayarkan oleh Pemerintah ke Jamkrindo sedangkan KUR Gen 2 Imbal Jasa Penjaminan masuk dalam komponen Subsidi bunga

f. Pada KUR 2015 wajib menggunakan sistem *online* dengan SIKP dan lembaga penjamin.

2. Penjaminan KPR Sejahtera FLPP
Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG)
Sistem resi gudang adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak tertekannya harga komoditas pertanian saat panen raya, terutama untuk komoditas tertentu (misalnya gabah/beras) pelaksanaannya diatur dalam UU No.9 Tahun 2006 dan telah diubah menjadi UU No.9 Tahun 2011.

Dalam Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penata usahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI.

Strategi Pemasaran Penjaminan Kredit Program

Penjaminan Program yang dilakukan Perum Jamkrindo diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Adapun beberapa stategi yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan kerjasama Penjaminan dengan penerima jaminan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyalur baru KUR dan KPR Sejahtera FLPP
2. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintah dalam hal ini kementerian UKM dan Koperasi, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mitra kerja Penerima Jaminan.
3. Melakukan penetrasi pasar ke wilayah-wilayah yang memiliki proyeksi penyaluran kredit program terbesar.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas teknologi informasi guna percepatan layanan penjaminan dikarenakan semua layanan kredit KUR berbasis elektronik.

by the government to Jamkrindo, while KUR Gen 2 Guarantee Fee Payment is included in the interest Subsidy component

f. KUR 2015 is required to use the online system with SIKP and guarantee institution.

2. KPR Sejahtera FLPP Guarantee
Guarantee activities on housing loan disbursement, which is a coordination program between the Bank with the Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia with low interest, light installments, and long period of credit for low-income communities.

3. Warehouse Receipt System Guarantee (SRG)
The warehouse receipt system is one of government's efforts to reduce the impact of distressed agricultural commodity prices during the harvest, especially for certain commodities (e.g. grain/rice). The implementation is regulated in Law No. 9 of 2006 and has been amended into Law No. 9 of 2011.

In the Warehouse Receipt System, there is a security guarantee for the bank because all Warehouse Receipt data administration is centralized in the Registration Center and supervised by the Supervisory Board (BAPPEBTI). And there is a quality certainty, both for the owner and the prospective owner of the goods because the goods are kept well managed by the Warehouse Manager and the quality was previously tested by an independent Suitability Assessment Agency that has been certified from KAN and approved by BAPPEBTI

Marketing Strategy of Program Credit Guarantee

Perum Jamkrindo's Program Guarantee is projected to increase from year to year. Some strategies that are carried out, among others:

1. Conducting Guarantee cooperation with the guarantee recipients that have been appointed by the Government as the KUR and KPR Sejahtera FLPP new distributors
2. Maintaining good relations with the Government, in this case the ministry of SMEs and Cooperatives, Ministry of Public Works and Public Housing as well as Guarantee recipients partners.
3. Market penetration to regions that have the largest projected program credit.
4. Increasing the capacity and quality of information technology to accelerate guarantee services due to all electronic-based credit KUR services.

Tinjauan Bisnis
Business Review

5. Percepatan pembuatan regulasi dan *Standard Opertional Procedure* (SOP) internal mengenai penjaminan Sistem Resi Gudang untuk akselarasi produksi Penjaminan Sistem Resi Gudang.
6. Melakukan percepatan pemahaman mengenai lingkup penjaminan kredit melalui pelatihan dan pendidikan internal.
7. Melakukan rekonsiliasi penjaminan secara rutin dan berkala.

5. Acceleration of regulation making and Internal Standard Operational Procedure (SOP) on Warehouse Receipt System Guarantee to accelerate the production of Warehouse Receipt System Guarantee.
6. Accelerating the understanding on the scope of credit guarantee through training and internal education.
7. Performing guarantee reconciliation regularly and periodically.

Kinerja Segmen Bisnis Program

Program Business Segment Performance

Volume Pembiayaan Bisnis Penjaminan Program
dalam jutaan Rupiah

The Financing Volume of Program Guarantee Business
in million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat *Micro Credit Loan Guarantee*	10.273.000	50.000.000	47.013.728	94%	487%
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP *KPR Sejahtera FLPP Guarantee*	8.199.648	9.100.000	16.267.862	179%	198%
Total *Total*	18.472.648	59.100.000	63.281.590	107%	343%

Volume penjaminan kredit pada segmen bisnis penjaminan program di tahun 2016 yang meliputi produk penjaminan KUR dan Penjaminan KPR Sejahtera FLPP mencapai Rp63,281 triliun. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan *volume* penjaminan pada tahun 2015, dimana *volume* bertumbuh signifikan 343%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 terdapat moratorium program KUR oleh Pemerintah sampai dengan triwulan ke III tahun 2015. Sementara itu jika dibandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di tahun 2016, pencapaiannya secara total adalah 107%. Nilai pencapaian tersebut disumbangkan terbesar oleh penjaminan KPR Sejahtera FLPP dimana pencapaiannya mencapai 179%. Jika dibandingkan dengan penjaminan KUR, pencapaiannya berbanding dengan RKAP adalah 94%. Hal tersebut dikarenakan pula oleh melesetnya target penyaluran KUR oleh Pemerintah dari 100 triliun menjadi Rp94,4 triliun.

Credit Guarantee volume in Program Guarantee business segment in 2016 covering KUR guarantee and KPR Sejahtera FLPP guarantee products reached Rp.63.281 Trillion. The amount increased drastically when compared to the guarantee volume in 2015, in which the volume grew significantly at 343%. This was due to the moratorium on KUR program by the government until the third quarter of 2015. Meanwhile, when compared to the Company's 2016 Work Plan and Budget (RKAP), the total achievement was 107%. The greatest contribution to this achievement value by the KPR Sejahtera FLPP guarantee, where the achievement reached 179%. If compared with the KUR guarantee, its achievement in comparison to RKAP was 94%. This was also due to the mishit of KUR distribution target by the government from 100 trillion to Rp94.4 trillion.

Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Program

Guarantee Fee of Program Guarantee Business

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat *Micro Credit Loan Guarantee*	368.637	750.000	1.116.598	149%	303%
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP *KPR Sejahtera FLPP Guarantee*	19.679	21.840	39.043	179%	198%
Total *Total*	388.316	771.840	1.155.641	150%	298%

Tinjauan Bisnis
Business Review

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk segmen bisnis penjaminan program pada tahun 2016 mencapai Rp1,155 triliun, Nilai IJP tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 298%. Sedangkan Jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2016, maka pencapaiannya adalah 150%. Nilai tersebut disumbangkan oleh kedua produk pada segmen bisnis penjaminan program yang nilai-nilainya sama meningkat.

Prospek Penjaminan Kredit Program

Pada tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian UKM dan Koperasi menargetkan *Volume* Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp106 triliun. Dengan target penyaluran tersebut, Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan yang ditunjuk resmi untuk melakukan penjaminan KUR memproyeksikan target yang dapat dijamin oleh Perum Jamkrindo sebesar Rp53 triliun. Dengan jaringan kerja yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, Perum Jamkrindo yakin dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya melalui pengadaan rumah KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang wajib dijaminkan kepada perusahaan penjamin, menegaskan bahwa prospek bisnis penjaminan program pada sektor perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo semakin cerah. Hal ini telah terbukti dari meningkatnya jumlah Imbal Jasa Penjaminan yang meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2017 dengan target Imbal Jasa Penjaminan sebesar 39,6 miliar atau meningkat hampir dua kali lipat dari target Imbal Jasa Penjaminan tahun 2015 sebesar Rp21,84 miliar baik dari konvensional maupun syariah.

BISNIS PENJAMINAN NON PROGRAM

Selain menjamin kredit program, Perum Jamkrindo juga melakukan bisnis penjaminan non program, atau biasa disebut penjaminan eksisting. Bisnis penjaminan kredit non program merupakan bisnis penjaminan yang selama ini diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh Perusahaan mengikuti kebutuhan pihak penyalur kredit, baik itu bank maupun non bank.

Perum Jamkrindo melakukan penjaminan kredit non program, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Penjaminan kredit secara langsung merupakan penjaminan yang permohonannya diajukan langsung oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, sementara itu Penjaminan Kredit tidak langsung merupakan penjaminan yang permohonannya harus melalui penerima jaminan baik itu bank ataupun non bank.

Guarantee Fee (IJP) for the program guarantee business segment in 2016 reached Rp.1.155 Trillion. This IJP value increased significantly compared to the previous year at 298%. Whereas if compared to RKAP 2016, then its achievement was 150%. This figure was contributed by both products in the program guarantee business segment whose values are similarly increased.

Program Credit Guarantee Outlook

In 2017, the Government through the Ministry of SME and Cooperatives targeted the Micro Loan Credit volume amounting to Rp.106 Trillion. With the distribution target, Perum Jamkrindo as one of officially appointed companies for KUR guarantee is projected a target of Rp.53 Trillion. With office network that has spread throughout Indonesia, Perum Jamkrindo is confident to be able to achieve the target that has been determined.

On the other hand, the one million housing program that proclaimed by President Joko Widodo through the Ministry of Public Works and Public Housing, among others through KPR Sejahtera housing procurement by means of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) scheme that must be guaranteed to the guarantee company, asserted that guarantee business outlook in the Public housing sector implemented by Perum Jamkrindo will be increasingly bright. This evidenced from the Guarantee Fee increasing number in 2015 to 2016 and projected to continually increase in 2017 with a 39.6 billion Guarantee Fee target or an almost twice increase of the 2015 target amounted to Rp21.84 billion, both from conventional and sharia.

NON-PROGRAM GUARANTEE BUSINESS

In addition to program credit guarantee, Perum Jamkrindo also conducts non-program guarantee business, or commonly called the existing guarantee. Non-program credit guarantee business is a guarantee business that has been created and developed by the Company itself following the needs of credit distributor, both banks and non-banks.

Perum Jamkrindo undertaken non-program credit guarantee, either directly or indirectly. Direct Credit Guarantee is a guarantee that the application is submitted directly by Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives, while Indirect Credit Guarantee is a guarantee that the request must be through a guarantee recipient, whether bank or non-bank.

Tinjauan Bisnis
Business Review

Saat ini Bisnis penjaminan Kredit Non program dikelola oleh Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Divisi Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank serta Divisi Bisnis Penjaminan Syariah untuk skema penjaminan yang dilakukan dengan akad syariah.

Produk-produk penjaminan kredit non program yang selama ini dijalankan oleh Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum
   Adalah penjaminan atas kredit/pembiayan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus.

2. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro
   Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah *plafond* kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di Penerima Jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

3. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa
   Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

4. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Multiguna
   Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

5. Penjaminan Distribusi Barang
   Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Currently, Non-Program Credit Guarantee is managed by Bank Guarantee Business Division, Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division, and Sharia Guarantee Business Division for guarantee scheme with sharia contract.

Non-program credit guarantee products that have been executed by Perum Jamkrindo are as follows:

1. General Credit/Financing Guarantee
   Is credit/financing guarantee provided by the Guarantee Recipient to Guaranteed for additional Working Capital and/or Investment in order to improve and develop the Guaranteed's business, which the guarantee process is done on a case by case basis.

2. Micro Credit/Micro Guarantee
   Is credit/financing guarantee provided by Guarantee Recipient to Guaranteed, Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital and/or Investment in order to improve and develop the guaranteed's business, which the amount of credit/financing plafond is in accordance with the provisions of micro credit/financing in Guarantee Recipient, and the guarantee submission process is done collectively.

3. Credit/Financing of Construction & Goods/Services Procurement Guarantee
   Is guarantee over credit/financing given by Guarantee Recipient to Guaranteed for additional Working Capital of construction business and goods/services procurement in accordance with the work contract, whose source of return is derived from APBN/APBD/BUMN or national private funds, and guarantee submission process is done collectively.

4. Multipurpose Credit/Financing Guarantee
   Is guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipient to Individual Guaranteed (permanent employee of a Company/Government institution). The disbursement of loans is conducted either directly or through a channeling institution with source of repayment comes from the salary of the Guaranteed and guarantee submission process is done collectively.

5. Distribution of Goods Guarantee
   Is guarantee over credit/distribution of goods from Guarantee Recipient (goods producer) to Guaranteed, which obliged the Guaranteed to settle the payment within a specific period.

6. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi
   Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.

7. *Surety Bond*
   Surety Bond Adalah suatu perjanjian 3 pihak anatara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *oblige* (pihak ketiga) bahwa apabila *principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksankan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *oblige*, maka *surety* akan bertanggung jawab terhadap *oblige* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *principal* tersebut

8. Penjaminan Kredit BPR/BPRS
   Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR

9. *Custom Bond*
   Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/*Customs Company*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/*Principal*) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/*Oblige*)

10. Penjaminan Keagenan Kargo
    Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/*Obligee* (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/*Principal* (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/*Obligee*.

11. Penjaminan *Invoice Financing*
    Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada *Obligee* terkait dengan tagihan *Supplier* dari *Obligee*. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk *Payment Bond* atau Jaminan Pembayaran lainnya.

Strategi Pemasaran Penjaminan Kredit Non Program

Perum Jamkrindo mulai melakukan *shifting* produk pada tahun 2012 dengan melihat *trend* penjaminan kredit program yang mulai menurun sedangkan laba dituntut naik. Pada tahun 2013 Perum Jamkrindo mulai fokus terhadap penjaminan *non cash* dan non bank yang kemudian didukung dengan perubahan struktur organisasi guna meningkatkan produksi penjaminan *non cash* dan non bank. Penjaminan *non cash* dan non bank pada Perum

6. Bank Guarantee/Counter Guarantee
   Is provision of guarantee in the form of counter guarantee over facilities of Bank Guarantee issued by Guarantee Recipients to Guaranteed

7. Surety Bond
   Surety Bond is a three-party agreement among the Surety (first party) on the basis of their trust to the Principal (second party), in which both parties accordingly make agreement with the Obligee (third party) that stated should the Principal neglect or fail to perform their duty as stipulated in the agreement due to any reason, the Surety is responsible to the Obligee for fulfilling the Principal's obligations.

8. BPR/BPRS Credit Guarantee
   Is guarantee over credit distributed by banking and/or other enterprises to BPR

9. Custom Bond
   Is guarantee engagement between three parties, first party (Guarantor/Customs Company) is bound to fulfill the obligations arising from the second party (Guaranteed/Principal) against the third party (Guarantee Recipient/Obligee)

10. Cargo Agency Guarantee
    Is guarantee provided to Guarantee Recipient/obligee (Transportation Services Provider Company) on Guaranteed/Principal's obligation to pay transportation cost to Guarantee Recipient/Obligee.

11. Invoice Financing Guarantee
    Is guarantee facility on financing provided by Financial Institutions to Obligee related to supplier bills from Obligee. Cargo Agency Guarantee is a form of payment bond or other financing guarantees.

Marketing Strategy of Non-Program Credit Guarantee

Perum Jamkrindo started to carry out product shifting in 2012 based on the observation of decreasing program credit guarantee trend while profit was demanded to increase. In 2013, Perum Jamkrindo started to focus on non-cash and non-bank guarantee, which was later supported by changes in organizational structure to increase non-cash and non-bank guarantee production. Non-cash and non-bank guarantee on

Tinjauan Bisnis
Business Review

Jamkrindo diwakili oleh Divisi Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank. Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank memiliki sasaran mitra Penerima Jaminan dan Terjamin yang lebih luas.

Perum Jamkrindo is represented by the Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division. Suretyship and Non-Bank Guarantee Business have a wider target of partners of Guarantee Recipients and Guaranteed.

Sejalan dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dimana disebutkan bahwa penjaminan kredit oleh Perum Jamkrindo dapat menurunkan ATMR Bank, yang berarti bahwa bank hanya dikenakan bobot risiko 20% pada perhitungan ATMR. Yang secara tidak langsung akan berdampak pada perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Atas dasar tersebut Divisi Bisnis Penjaminan Bank kemudian mengincar beberapa perbankan yang masih memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Penjaminan kredit yang dapat menurunkan bobot nilai ATMR.

In line with OJK Circular Letter no. 42/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 about Guidelines on Weighted Assets Calculation According to Credit Risk by Using the Standard Approach, where stated that credit guarantee by Perum Jamkrindo may reduce the Bank's ATMR, which means that banks are only subject to 20% risk weight in the calculation of ATMR, which will indirectly affect the Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation. On that basis, the Bank Guarantee Business Division then targeted several banks that still have Capital Adequacy Ratio (CAR) value under what has been stipulated by the Financial Services Authority through Credit Guarantee that can reduce the ATMR value.

Strategi pemasaran Penjaminan Non Program antara lain :

1. Mengembangkan produk berkualitas sesuai kebutuhan pasar dan melakukan penawaran kerjasama baru dengan bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta dan Perusahaan Pembiayaan (*Multifinance*) baik secara konvensional ataupun syariah.
2. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra-mitra Perum Jamkrindo (Terjamin, Penerima Jaminan, dan Asosiasi-asosiasi terkait).
3. Akselerasi kompetensi SDM yang mampu melakukan analisa secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan risiko penjaminan.
4. Meningkatkan kualitas layanan prima dengan upaya peningkatan *Service Level Agreement* penjaminan.
5. Penguasaaan pasar penjaminan untuk Bank Swasta yang mengalami penurunan CAR.
6. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan aplikasi penjaminan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan efisiensi perusahaan.
7. Penguasaan pasar *Suretyship* dengan cara melakukan penawaran kerjasama produk *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi kepada perusahaan atau instansi lainnya, menjalin kerjasama bisnis dengan asosiasi-asosiasi dalam hal penerbitan *Surety Bond*.
8. Meningkatkan jangkauan pelayanan penjaminan dengan menerapkan strategi pemasaran satu kabupaten satu kaki (agen penjaminan) untuk produk *Suretyship*.

Marketing Strategy of Non-Program Guarantee among others are:

1. Developing quality products based on market demand and conducting new cooperation offers with State-Owned Banks, Regional Development Banks, Private Banks and Multifinance Companies, either conventionally or sharia.
2. Maintaining good cooperation with partners of Perum Jamkrindo (Guaranteed, Guarantee Recipients, and related Associations).
3. Acceleration of HR competencies, who are capable of performing case-by-case analysis with guarantee risk consideration.
4. Improving the quality of service excellence by increasing guarantee Service Level Agreement.
5. Controlling the guarantee market for Private Banks that encounter a decrease in CAR.
6. Utilizing the information technology development in developing guarantee applications so as to improve employee's productivity and company's efficiency.
7. Controlling Suretyship market by offering Surety Bond and Counter Bank Guarantee product cooperation to other companies or institutions, establishing business cooperation with associations in Surety Bond issuance.
8. Increasing the outreach of guarantee services by applying the one-district one-leg (guarantee agency) marketing strategy for Suretyship products.

Kinerja Segmen Bisnis Penjaminan Non Program

Non-Program Guarantee Business Segment Performance

Kinerja Bisnis Penjaminan Bank

Bank Guarantee Business Performance

Volume Pembiayaan Divisi Bisnis Penjaminan Bank
dalam jutaan Rupiah

Financing Volume of Bank Guarantee Business Division
in million rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Penjaminan Kredit Umum *Commercial Credit Guarantee*	996.422	3.330.000	11.968.940	359,43%	1101%
Penjaminan Kredit Mikro *Micro Credit Guarantee*	15.280.886	4.080.000	1.730.789	42,42%	-89%
Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa *Credit Guarantee for Construction and Goods/Services Procurement*	2.203.278	2.950.000	3.192.270	108,21%	45%
Penjaminan Kredit Multiguna *Multipurpose Credit Guarantee*	16.334.082	18.220.000	17.018.719	93,41%	4%
Penjaminan Kredit *Supply Chain* *Supply Chain Credit Guarantee*	167.913	750.000	142.863	19,05%	-15%
Penjaminan KPR *KPR Guarantee*	0	600.000	34.892	5,82%	0%
Total *Total*	34.982.581	29.930.000	34.088.474	113,89%	-3%

Tahun 2016, *volume* pembiayaan Divisi Bisnis Penjaminan Bank mencapai Rp34.088 miliar. Dengan pencapaian tersebut, Divisi Bisnis Penjaminan Bank berhasil melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 yang ditetapkan sebesar Rp29.930 miliar atau dengan pencapai sebesar 113,89%. Namun demikian, dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 3%. Penurunan tersebut utamanya disebabkan penurunan pencapaian *volume* pembiayaan pada segmen penjaminan kredit mikro yang pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 89% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan merupakan akibat dari beralihnya kredit mikro ke KUR Generasi 2 (KUR Baru) yang mencapai Rp102,92 triliun (Seratus dua koma sembilan dua triliun Rupiah)

In 2016, Bank Guarantee Business Division financing volume reached Rp34,088 billion. With this achievement, the Bank Guarantee Business Division has successfully exceeded the target of 2016 Company's Work Plan and Budget (RKAP) that was set at Rp29.930 billion or with achievement of 113.89%. However, if compared with the previous year's achievement there was a decrease of 3%. The decline was mainly due to the decrease in the achievement of financing volume of micro credit guarantee segment, which down 89% in 2016 when compared to the previous year. This was impacted by the switching of micro credit to KUR Generation 2 (New KUR), that reached Rp.102.92 Trillion (One hundred two point nine two trillion Rupiah).

Imbal Jasa Penjaminan Divisi Bisnis Penjaminan Bank
dalam jutaan Rupiah

Guarantee Fee of Bank Guarantee Business Division
In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Penjaminan Kredit Umum *Commercial Credit Guarantee*	13.594	90.600	53.767	59,35%	296%

Tinjauan Bisnis
Business Review

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Penjaminan Kredit Mikro *Micro Credit Guarantee*	448.136	122.140	42.814	35,05%	-90%
Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa *Credit Guarantee for Construction and Goods/Services Procurement*	20.670	32.450	32.177	99,16%	56%
Penjaminan Kredit Multiguna *Multipurpose Credit Guarantee*	422.981	504.785	435.872	86,35%	3%
Penjaminan Kredit *Supply Chain* *Supply Chain Credit Guarantee*	925	7.400	1.007	13,61%	9%
Penjaminan KPR *KPR Guarantee*	0	19.200	792	4,13%	0%
Total *Total*	906.306	776.575	566.430	72,94%	-38%

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dari Divisi Bisnis Penjaminan Bank pada tahun 2016 mencapai Rp566 miliar, mengalami penurunan sebesar 38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp906 miliar. Pencapaian tahun 2016 juga hanya mencapai 72,94% dari target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp777 miliar.

Guarantee Fee Revenue from the Bank Guarantee Business Division in 2016 reached Rp566 billion, a decrease of 38% compared to the previous year of Rp906 billion. The achievement in 2016 was also 72.94% of the target of 2016 RKAP, which was set at Rp777 billion.

Kinerja Bisnis Penjaminan Syariah

Volume Kafalah Pembiayaan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah
dalam jutaan Rupiah

Sharia Guarantee Business Performance

Kafalah Financing Volume of Sharia Guarantee Business Division
In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Pembiayaan Mikro *Micro Financing*	159.016	225.000	204.543	91%	29%
Pembiayaan Umum *General Financing*	47.011	50.000	15.384	31%	-67%
Pembiayaan Konstruksi dan pengadaan Barang/Jasa *Construction and Goods/Services Procurement Financing*	60.712	50.000	35.150	70%	-42%
Pembiayaan Multiguna *Multipurpose Financing*	976.107	1.125.000	1.086.507	97%	11%
Pembiayaan Mikro Multiguna *Micro Multipurpose Financing*	-	-	3.696	100%	100%
Kontra Bank Garansi *Counter Bank Guarantee*	200.527	150.000	359.010	239%	79%
Pembiayaan FLPP *FLPP Financing*	217.852	400.000	1.348.374	337%	519%
Volume Penjaminan Syariah *Sharia Guarantee Volume*	1.661.225	2.000.000	3.052.664	153%	84%

Volume khafalah pembiayaan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah tahun 2016 mencapai Rp3.053 miliar, tumbuh 84% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.661 miliar. Pencapaian tersebut juga berada di atas target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp2.000 miliar. Pertumbuhan *volume* pembiayaan Divisi Bisnis Penjaminan Syariah utamanya disebabkan peningkatan pendapatan *t* Pembiayaan FLPP yang pada tahun 2016 mengalami lonjakan signifikan, yaitu dari Rp218 miliar tahun 2015 menjadi Rp1.348 miliar pada tahun 2016.

Khafalah financing volume of Sharia Guarantee Business Division in 2016 reached Rp3,053 billion, grew 84% compared to the previous year's achievement of Rp1,661 billion. The achievement was also above the target of 2016 RKAP that was set at Rp2,000 billion. The financing volume growth of Sharia Guarantee Business Division was mainly due to an increase in FLPP Financing volume revenues, which in 2016 experienced a significant increase from Rp218 billion in 2015 to Rp1,348 billion in 2016.

Imbal Jasa Pembiayaan Divisi Bisnis Pembiayaan Syariah
dalam jutaan Rupiah

Financing Fee of Sharia Financing Business Division
In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Pembiayaan Mikro *Micro Financing*	2.886	4.453	3.849	86%	33%
Pembiayaan Umum *General Financing*	1.074	1.638	324	20%	-70%
Pembiayaan Konstruksi dan pengadaan Barang/Jasa *Construction and Goods/Services Procurement Financing*	571	400	308	77%	-46%
Pembiayaan Multiguna *Multipurpose Financing*	22.315	22.540	25.109	111%	13%
Pembiayaan Mikro Multiguna *Micro Multipurpose Financing*	-	-	69	100%	100%
Kontra Bank Garansi *Counter Bank Guarantee*	1.600	732	3.041	415%	90%
Pembiayaan FLPP *FLPP Financing*	523	960	3.236	337%	519%
Volume Penjaminan Syariah *Sharia Guarantee Volume*	28.969	30.723	35.936	117%	24%

Jumlah pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dari Divisi Bisnis Pembiayaan Syariah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp29 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp36 miliar pada tahun 2016. Pencapaian tersebut juga berada di atas target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp31 miliar atau dengan pencapaian sebesar 117% dari RKAP 2016.

The total Guarantee Fee revenues from Sharia Financing Business Division in 2016 has increased by 24% compared to the previous year, from Rp29 billion in 2015 to Rp36 billion in 2016. This achievement was also above the target of 2016 RKAP that was set at Rp31 billion or with achievement of 117% of 2016 RKAP.

Tinjauan Bisnis
Business Review

Kinerja Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank

Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Performance

Volume Pembiayaan Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank

Financing Volume of Suretyship and Non-Bank Guarantee Business

dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Customs Bond *Customs Bond*	191,146	281,998	84,651	30,0%	(55,7%)
Distribusi Barang *Goods Distribution*	74,729	73,803	-	0%	(100,0%)
Keagenan Kargo *Cargo Agency*	64,074	140,707	71,431	50,7%	11,5%
Kredit KPR MNC *KPR MNC Credit*	42,958	75,782	117,310	154,8%	173,1%
Kredit Mikro *Micro Credit*	1.516,257	3.332,998	2.080,310	62,4%	37,2%
Kredit Mikro Bav *BAV Micro Credit*	317,804	603,018	455,258	75,5%	43,3%
Kredit Multiguna *Multipurpose Credit*	315,281	588,905	365,773	62,1%	16,0%
Kredit Oto *Auto Credit*	186,352	7.146,619	2.063,553	28,9%	1007,3%
Kredit Umum *General Credit*	19,855	24,784	48,470	195,6%	144,1%
Payment Bond *Payment Bond*	29,283	21,885	133,540	610,2%	356,0%
Pembiayaan *Invoice* *Invoice Financing*	22,219	41,916	19,368	46,2%	(12,8%)
Surety Bond *Surety Bond*	4.748,385	7.098,818	9.035,335	127,3%	90,6%
Kredit Kontra Bank Garansi *Bank Guarantee Contra Loan*	3.073,075	4.538,767	6.009,814	132,4%	95,2%
Total *Total*	10.601,42	23.970,00	20.484,81	85,4%	93,2%

Volume pembiayaan dari Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank pada tahun 2016 mencapai Rp20.485 miliar, tumbuh 93,23% dibandingkan *volume* pembiayaan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10.601 miliar. Namun demikian, pencapaian tersebut masih berada di bawah target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp23.970 miliar. Tidak tercapainya target RKAP 2016 disebabkan terutama karena dua hal. Yang pertama adalah melesetnya perkiraan produksi dari beberapa mitra penjaminan *multifinance* yang diproyeksikan sebelumnya

The Suretyship and Non-Bank Guarantee Business financing volume in 2016 reached Rp20,485 billion, growing by 93.23% compared to the previous year's financing volume of Rp10,601 billion. Nevertheless, the achievement was still below the target of 2016 RKAP that was set at Rp23,970 billion. The 2016 RKAP target was not achieved mainly due to two things. The first is the missed production estimation from several multi finance guarantee partners that were previously projected to produce in large volumes. There were three multi finances whose

akan berproduksi dengan *volume* yang besar, tercatat ada tiga *multifinance* yang realisasi produksi penjaminannya dibawah ekspektasi sebelumnya. Alasan kedua adalah terlambatnya proses inisiasi kerjasama penjaminan kontra bank garansi dengan mitra Bank Mandiri. Sampai dengan akhir tahun 2016, tahapan inisiasi baru pada tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanpa sempat berealiasi produksi.

realization of guarantee production was below expectations. The second reason is delay in cooperation initiation process of bank guarantee contra with Bank Mandiri as partner. Until the end of 2016, the stage of initiation barely at the signing stage of Cooperation Agreement without realization of production.

Imbal Jasa Penjaminan Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank
dalam jutaan Rupiah

Guarantee Fee of Suretyship and Non Bank Guarantee Business
In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2015 *Realization 2015*	2016		Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*
		RKAP *RKAP*	Realisasi *Realization*		
Customs Bond *Customs Bond*	1,376	2,512	0,799	31,79%	(41,95%)
Distribusi Barang *Goods Distribution*	0,256	0,886	-	0,00%	(100,00%)
Keagenan Kargo *Cargo Agency*	1,266	2,788	1,429	51,24%	12,85%
Kredit KPR MNC *KPR MNC Credit*	0,129	0,227	0,352	154,80%	173,08%
Kredit Mikro *Micro Credit*	26,211	66,457	34,744	52,28%	32,55%
Kredit Mikro Bav *BAV Micro Credit*	4,269	7,860	6,911	87,93%	61,90%
Kredit Multiguna *Multipurpose Credit*	4,907	9,192	5,096	55,44%	3,85%
Kredit Oto *Auto Credit*	1,993	75,754	22,541	29,75%	1031,09%
Kredit Umum *General Credit*	0,449	0,550	1,226	223,11%	173,19%
Payment Bond *Payment Bond*	0,197	0,245	1,054	429,45%	433,84%
Pembiayaan *Invoice* *Invoice Financing*	0,158	0,293	0,117	39,76%	(26,13%)
Surety Bond *Surety Bond*	23,345	34,074	42,145	123,68%	80,53%
Kredit Kontra Bank Garansi *Bank Guarantee Contra Loan*	27,789	40,376	61,438	152,17%	121,09%
Total *Total*	92,35	241,21	177,85	73,73%	92,59%

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dari Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank tahun 2016 adalah sebesar Rp178 miliar, meningkat 92,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pencapaian tersebut hanya setara dengan 73,73% dari target RKAP 2016 yang ditetapkan sebesar Rp241 miliar.

The Guarantee Fee from Suretyship and Non-Bank Guarantee Business in 2016 was Rp178 billion, an increase of 92.59% over the previous year. However, the achievement was only equivalent to 73.73% of the target of 2016 RKAP that was set at Rp241 billion.

Tinjauan Bisnis
Business Review

Prospek Bisnis Penjaminan Non Program

Prospek Bisnis Penjaminan Syariah

Divisi Bisnis Penjaminan Syariah akan mengembangkan perluasan pangsa pasar kafalah pembiayaan ke semua institusi keuangan berbasis syariah, selain ke perbankan syariah yang sudah berjalan selama ini (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah), juga akan melakukan ekspansi ke Koperasi Syariah, *Multifinance* Syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, *Islamic Financial Technology* dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Target *volume* kafalah pembiayaan di tahun 2017 sebesar 4,3 triliun naik sebesar ±40% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016, sedangkan target Imbal Jasa Kafalah sebesar 50,5 miliar naik sebesar ±40% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016.

Prospek Bisnis *Suretyship* dan Penjaminan Non Bank

Menyongsong tahun buku 2017, sektor penjaminan *suretyship* dan non bank dituntut untuk semakin memperbesar porsi kontribusinya pada keseluruhan portfolio bisnis Perusahaan. Untuk itu, kinerja cemerlang pada laju pertumbuhan porfolio penjaminan non bank yang tercatat pada tahun 2016 harus dapat dipertahankan. Berikut adalah poin strategi utama yang akan dilakukan:

1. Mempertahankan *Level* Agresivitas Ekspansi Pasar Baru
   Dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan jumlah mitra penjaminan baru. maka mempertahankan *level* agresivitas adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Pada tahun 2017 ini. tidak kurang ditargetkan sebanyak 15 mitra penjaminan baru dapat diperoleh. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah mulai menaruh fokus pada calon mitra potensial seperti Perushaan *multifinance* yang berada di luar Jakarta. Sebab selama ini daftar mitra penjaminan non bank secara umum masih terpusat di Jakarta.

2. Melakukan *Maintenance* / Intensifikasi Produk-Produk Eksisting
   Catatan produksi penjaminan gemilang pada tahun 2016 dimungkinkan terjadi karena produk-produk yang telah aktif berproduksi secara baik. Untuk itu, perlu dilakukan *maintenancce* secara aktif atas produk-produk ini. Beberapa produk yang menjadi fokus utama agar terpelihara kinerja baiknya adalah penjaminan otomotif dan penjaminan pembiayaan supermikro, tidak lupa juga *surety bond* serta kontra bank garansi.

3. Pembuatan Produk Baru
   Industri penjaminan pada sektor non bank masih sangat dinamis. Dalam rangka mengakomodir hal itu, Divisi Bisnis

Non-Program Guarantee Business Outlook

Sharia Guarantee Business Outlook

The Sharia Guarantee Business Division will expand the kafalah financing market share to all sharia-based financial institutions. In addition to the existing sharia banking (Sharia Commercial Bank, Sharia Business Unit, Sharia Micro Credit Bank), expansion will be made to Sharia Cooperatives, Sharia Multifinance, Non-Bank Sharia Financial Institution, Islamic Financial Technology and Sharia Micro Finance Institution.

Kafalah financing volume's target in 2017 is 4.3T, increased by ±40% compared with the realization in 2016, while the Kafalah Fee's target is 50,5M, up by ±40% compared to the realization in 2016.

Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Outlook

Towards the 2017 fiscal year. suretyship and non-bank guarantee sectors is required to further enlarge its contribution to the overall portfolio of the Company's business. Therefore, the brilliant performance of non-bank guarantee portfolio growth rate as recorded in 2016 must be maintained. The following are the main strategies that will be undertaken:

1. Maintaining the Level of Expansion Aggressiveness on New Market
   Maintaining the aggressiveness level is something that must be done in order to maintain the number of new guarantee partner's growth rate. In 2017, not less than 15 new guarantee partners are targeted to obtain. One of the things that need to be done to achieve that goal is to start focusing on potential partners such as multi-finance companies located outside Jakarta, since so far the list of non-bank guarantee partners in general is still concentrated in Jakarta.

2. Conducting Maintenance/Intensification of Existing Products
   The brilliant guarantee production record in 2016 was possible because products that have been active, were producing well. Therefore, it is necessary to actively maintain these products. Products whose good performance are the main focus to be maintained are automotive guarantee and super micro financing guarantee, as well as surety bond and counter bank guarantee.

3. New Product Creation
   The guarantee industry in the non-bank sector is still very dynamic. In order to accommodate that, the Suretyhip

Suretyship dan Penjaminan Non Bank mencanangkan pembuatan produk-produk baru. Produk dimaksud adalah penjaminan pembiayaan berbasis *fintech* dan *excise bond*.

4. Intensifikasi Prosedur Mitigasi Risiko pada Produk Penjaminan *Suretyship*
   Menyadari bahwa laju pertumbuhan produksi penjaminan perlu dibarengi dengan penjagaan kualitas *portfolio* yang dijamin, maka penguatan prosedur mitigasi risiko adalah perlu. Hal ini dilakukan untuk mencegah fenomena *trash in trash out* yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada kinerja korporasi secara keseluruhan. Beberapa parameter mitigasi risiko akan ditekankan dan dipastikan telah dilaksanakan segenap jajaran. terutama yang terkait dengan proses analisis penjaminan *suretyship*.

5. Menghidupkan Kembali Penjaminan Distribusi Barang
   Setelah sempat vakum dan tidak mencatatkan produksi sepanjang 2016, pada tahun 2017 penjaminan distribusi barang adalah salah satu produk yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan membentuk *portfolio*. PT Semen Padang dan PT Pupuk Kujang adalah dua perusahaan pabrikan yang menjadi target utama. Disamping kedua perusahaan tersebut, telah didaftar beberapa perusahaan pabrikan lain yang potensial untuk mengisi pos penjaminan ini.

Proses Penjaminan

Proses Penjaminan Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Perum Jamkrindo (Penjamin) dan Penerima Jaminan, yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan Kredit dan/atau Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3).

and Non-Bank Guarantee Business Division proclaimed the creation of new products. The products are financing guarantee base on fintech and excise bond.

4. Risk Mitigation Procedures Intensification on Suretyship Guarantee Product
   Recognizing that the guarantee production growth rate needs to be accompanied by guarded quality portfolio that have been guaranteed, then strengthening risk mitigation procedures is necessary. This is done to prevent trash in trash out phenomenon which will ultimately have an adverse effect on the overall performance of the corporation. Some risk mitigation parameters will be emphasized and assured to have been implemented throughout all levels, especially those related to the suretyship guarantee analysis process.

5. Reviving the Guarantee of Goods Distribution
   After had a vacuum and did not record production throughout 2016, in 2017 guarantee of goods distribution is one of the products that are expected to contribute significantly to form a portfolio. PT Semen Padang and PT Pupuk Kujang are two fabrication companies that are the main target. Besides the two companies, some other potential fabrication companies has been listed to fill this guarantor post.

Guarantee Process

Credit Guarantee Process is implemented in accordance with the terms and condition agreed upon between Perum Jamkrindo (Guarantor) and the Guarantee Recipients, and is documented in the Credit Guarantee Agreement and/or Letter of Credit Guarantee Approval (SP3).

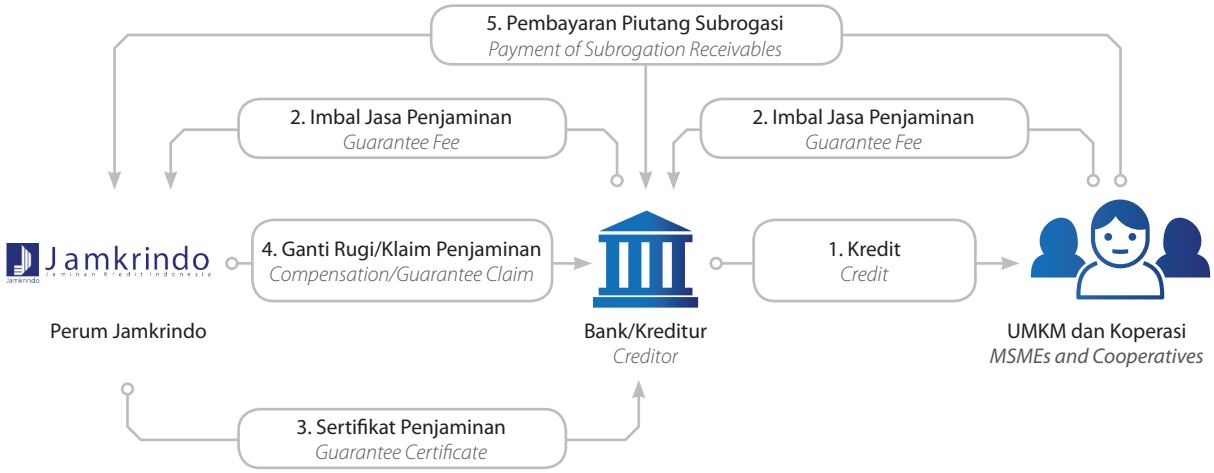

Tinjauan Bisnis
Business Review

Secara umum mekanisme proses penjaminan yang berlaku di Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan Kasus Per Kasus (*Case By Case*/CBC)
   Penjaminan Kasus Per Kasus (*Case By Case*/CBC) adalah penjaminan yang proses persetujuannya dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, di mana Perum Jamkrindo melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. dalam hal ini, Perum Jamkrindo dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.

   Penjaminan kasus per kasus diberikan untuk produk penjaminan Kredit umum, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa, Kontra Bank Garansi, distribusi Barang dan penjaminan kredit lainnya yang pada umumnya *plafond* kredit di atas Rp250 juta.

   Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penjaminan kredit kasus per kasus adalah sebagai berikut:
   a. Terjamin dan Penerima Jaminan atau mitra kerja bank atau non bank mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada penjamin dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain proposal usaha, identitas dan legalitas usaha pemohon sebagaimana permohonan kredit dari Terjamin UMKM dan Koperasi kepada Penerima Jaminan.
   b. Setelah melakukan analisis kelayakan penjaminan, Penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada Penerima Jaminan yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan penjaminan, serta menyampaikan surat penolakan apabila Penjamin tidak menyetujui permohonan penjaminan tersebut.
   c. Penerima Jaminan menyampaikan surat persetujuan atas seluruh ketentuan dalam SP3 Penjamin, apabila menyetujui ketentuan dalam SP3 tersebut.
   d. Penerima Jaminan atau mitra kerja bank atau non bank dapat melakukan perjanjian (akad) kredit dan merealisasikan kreditnya kepada nasabah (Terjamin) UMKM dan Koperasi.
   e. Penerima Jaminan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penjaminan dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain *copy* Perjanjian Kredit beserta *Addendum*-nya dan bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

In general, the mechanism of guarantee process that applies in Perum Jamkrindo is as follows:

1. Case by Case (CBC) Guarantee
   Case by Case (CBC) Guarantee is a guarantee of which the approval process conducted in a case by case basis on the credits granted by the Guarantee Recipients, in which Perum Jamkrindo will evaluate in advance the feasibility of the Guaranteed candidate's business over each guarantee application prior to the issuance of SP3. In this case, Perum Jamkrindo can approve or not approve the application of credit guarantee proposal.

   The guarantee of case by case basis applies for Commercial Credit, Construction and Goods/Services Procurement Credit, Counter Bank Guarantee, Distribution of Goods and other credit guarantee that generally has credit limit over Rp250 million.

   The steps taken in the case by case credit guarantee process are as follows:
   a. The Guaranteed and the guarantee recipient or partners of bank and non-bank applies for a credit guarantee to the guarantor by attaching several documents, among others, business proposal, the applicant's identity and the legality of the applicant's business as the credit proposal from the Guaranteed of MSMEs and Cooperatives to the Guarantee Recipients.
   b. After analyzing the feasibility of the guarantee application, the Guarantor issues SP3 to the Guarantee Recipient that contains the guarantee terms and conditions, and issues a disapproval letter if the Guarantor does not approve the application of credit guarantee.
   c. The Guarantee Recipient submits a letter of consent agreeing to all provisions in the Guarantor's SP3, if they agree to the terms of the SP3.
   d. Guarantee Recipient or partners of bank or non-bank may sign the credit agreement and realize the credit to the customers (Guaranteed) of MSMEs and Cooperatives.
   e. Guarantee Recipient submits the proposal for the issuance of Guarantee Certificate (SP) to the Guarantee Company by attaching several documents, including a copy of the Credit Agreement and its Addendum, and the receipt of Guarantee Fee payment (IJP).

f. Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penerima Jaminan.

2. Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover*/ CAC)
Penjaminan otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover*/ CAC) adalah penjaminan yang diberikan secara otomatis oleh Perum Jamkrindo atas kredit yang direalisasikan oleh Penerima Jaminan kepada UMKM dan Koperasi dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Perjanjian kerjasama Penjaminan, antara Perum Jamkrindo dengan Penerima Jaminan.

3. Penjaminan otomatis bersyarat diberikan untuk produk penjaminan KUR, Kredit mikro, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa dalam batasan jumlah tertentu, Kontra Bank Garansi dan Kredit multiguna.

f. Guarantor issues the Guarantee Certificate (SP) to the Guarantee Recipient.

2. Conditional Automatic Cover (CAC) Guarantee

Conditional Automatic Cover (CAC) Guarantee is a guarantee provided automatically by Perum Jamkrindo for the credit realized by Guarantee Recipient to the MSMEs and Cooperatives by taking into account the terms agreed upon in the Guarantee Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and the Guarantee Recipient.

3. Conditional Automatic Cover Guarantee is given to all credit guarantee products including Guarantee for KUR, Micro Credit, Credit Construction and Goods and Services Procurement within a certain limit, Counter Bank Guarantee and Multipurpose Credit.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This financial performance description is prepared based on the Company's Financial Statements presented in accordance with Financial Accounting Statement Standards (PSAK) that generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2016. The financial statements have been audited by Hertanto Grace Karunawan Public Accountant Office with unqualified opinion (WTP).

The Company's financial performance discussion shall be submitted with attention to the explanatory notes on the Consolidated Financial Statements of external auditors as an integral part of this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

Aset Perum JAMKRINDO
Assets of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Uraian *Description*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/Penurunan *Increase/Decrease*	
	2016	2015	Rp	%
Kas dan Setara Kas *Cash and Cash Equivalent*	5.723.816	5.594.822	128.994	2,31
Surat Berharga *Securities*	3.209.124	2.925.022	284.102	9,71
Piutang IJP *IJP Receivables*	2.347.025	1.442.622	904.403	62,69
Piutang Penjaminan Ulang *Re-guarantee Receivables*	112.346	97.538	14.808	15,18
Piutang yang diberikan *Loans*	955	955	(0)	(0,02)
Piutang lain-lain *Other Receivables*	81.728	58.861	22.867	38,85
Pajak Bayar dimuka *Prepaid Taxes*	0,081	33.878	(33.878)	(100,00)
Premi dan *Fee* dibayar dimuka *Prepaid Premiums and Fee*	991.153	807.741	183.412	22,71
Beban dibayar di muka *Prepaid Expenses*	25.020	13.903	11.117	79,96
Aset Tetap *Fixed Assets*	441.995	396.123	45.873	11,58
Aset Pajak Tangguhan *Deferred Tax Assets*	174.614	168.754	5.860	3,47
Aset lain-lain *Other Assets*	300.641	102.774	197.867	192,53
Jumlah Aset *Total Assets*	13.408.418	11.642.994	1.765.424	15,16

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Total aset Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.408 miliar, naik 15,16% dari total aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.642 miliar. Dengan pencapaian tersebut. total aset Perusahaan konsisten mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir.

Total assets of Perum Jamkrindo as of December 31, 2016 amounted to Rp13,408 billion, increased 15.16% of total assets as of December 31, 2015 amounted to Rp11,642 billion. With this achievement, the Company's total assets have consistently increased over the last 3 years.

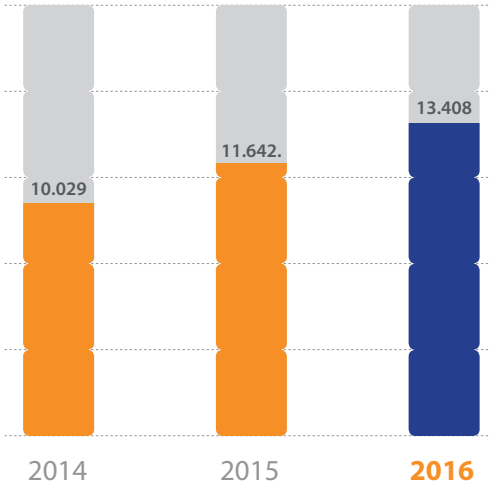

Komposisi Aset Perum Jamkrindo tahun 2016 didominasi oleh Aset Lancar. yaitu sebesar 81,95% dari Total Aset. Komposisi Aset Lancar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 komposisi Aset Lancar sebesar 80,33% dari Jumlah Aset.

The composition of Perum Jamkrindo's assets in 2016 was dominated by Current Assets, amounting to 81.95% of Total Assaets. Current Asset composition has increased compared to the previous year of 80.33% of Total Assets.

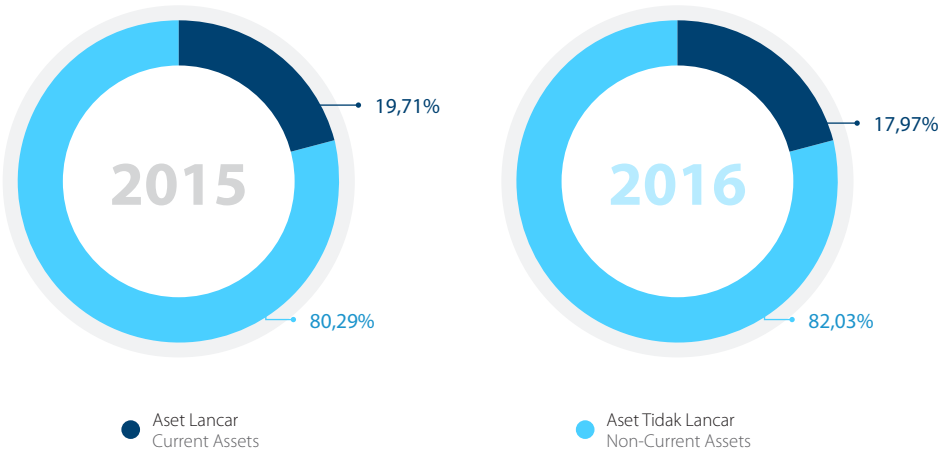

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Aset Lancar

Aset lancar Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.999 miliar, naik 17,66% dari aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.349 miliar. Kenaikan Aset Lancar ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya penambahan aset keuangan.

Current Assets

Perum Jamkrindo's current assets as of December 31, 2016 amounted to Rp10,999 billion, increased 17.66% compared to current assets as of December 31, 2015 amounting to Rp9, 349 billion. The increase in Current Assets was caused by financial assets addition.

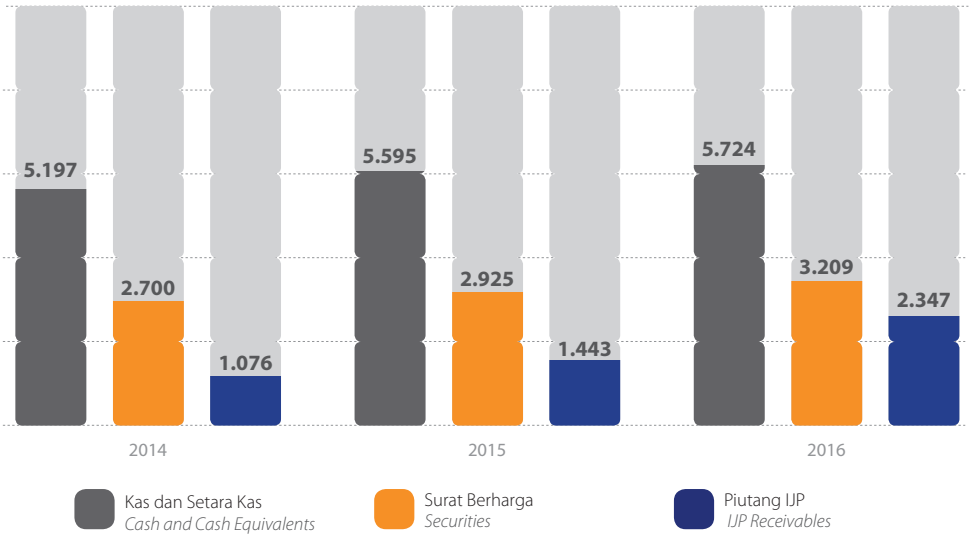

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,31% atau sebesar Rp128 miliar dari Rp5.594 miliar menjadi Rp5.723 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya bisnis penjaminan sehingga berpengaruh pada meningkatnya kas dan setara kas.

Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents at the end of 2016 increased by 2.31% or Rp128 billion from Rp5,594 billion to Rp5,723 billion. This increase was attributed to guarantee business growth, which contributes to the increase in cash and cash equivalents.

Surat Berharga

Jumlah Surat Berharga yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp3.209 miliar, meningkat 9,71% dibandingkan jumlah Surat Berharga pada akhir periode tahun buku 2015 yang sebesar Rp2.925 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya POJK 1/2016 yang mewajibkan perusahaan IKNB Penjaminan per 31 Desember 2016 minimum memiliki 10% penempatan pada obligasi negara, sehingga alokasi investasi di fokuskan pada obligasi negara

Securities

As per December 31, 2016 the Company owned Securities amounted to Rp3,209 billion, an increase of 9.71% compared to Rp2,925 billion at the end of 2015 fiscal year. The increase was mainly due to POJK 1/2016 that obligated IKNB Guarantee company as of December 31, 2016 to has a minimum 10% placement on the government bonds, so that investment allocation is focused on the government bonds.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih

Piutang IJP Perusahaan tahun 2016 meningkat 62,69 % atau sebesar Rp904,4 miliar menjadi Rp2.347 miliar dari Piutang IJP

Net Guarantee Fee (IJP) Receivables

The Company's IJP receivables in 2016 increased 62.69% or Rp904.4 billion to Rp2,347 billion from the previous year of

tahun sebelumnya yaitu Rp1.442 miliar. Peningkatan Piutang IJP tersebut disebabkan oleh meningkatnya bisnis penjaminan KUR 2015.

Rp1,442 billion. The increase in IJP's Receivables was due to the increase in KUR 2015 guarantee business.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.409 miliar, naik 4.99% dari Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.295 miliar. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya penambahan aset keuangan dan aset tetap.

Non-Current Assets

Perum Jamkrindo's Non-Current Assets as December 31, 2016 amounted to Rp2,409 billion, increased by 4.99% from Non-Current Assets as of December 31, 2015 amounting to Rp2,295 billion. The increase was due to financial assets and fixed assets addition.

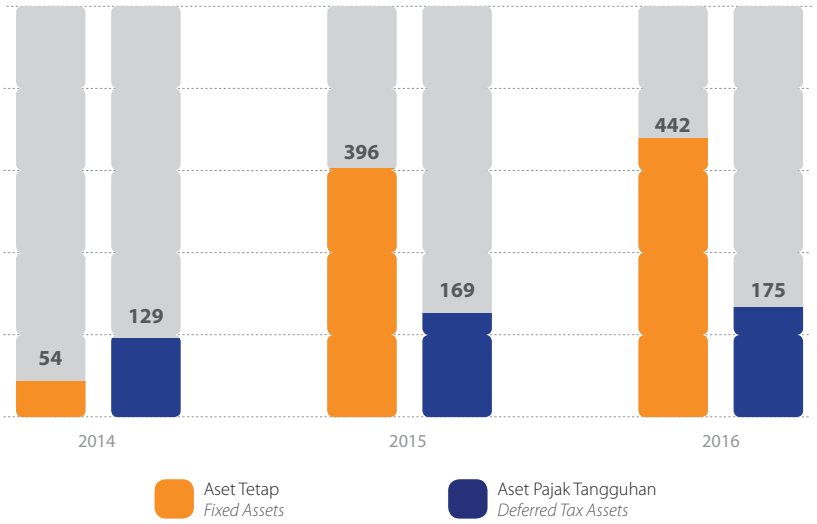

Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan tahun 2016 meningkat 11,58 % menjadi Rp441,99 miliar dari Rp396,12 miliar pada akhir tahun 2015. Peningkatan Aset Tetap tersebut disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal berupa tanah, gedung, inventaris dan kendaraan pada tahun 2016.

Fixed Assets

The Company's fixed assets in 2016 increased 11.58% to Rp441,99 billion from Rp396,12 billion at the end of 2015. The increase in fixed assets was due to additional capital expenditures in the form of land, buildings, inventories and vehicles in 2016.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2016 sebesar Rp174,61 miliar. meningkat 5,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp168,75 miliar. Peningkatan nilai Aset Pajak Tangguhan disebabkan karena kenaikan perbedaan temporer pada perhitungan pajak badan Tahun 2016 yang berasal dari kenaikan cadangan-cadangan.

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets in 2016 was Rp174.61 billion, an increase of 5.8% compared to the previous year of Rp168.75 billion. The increase in Deferred Tax Assets value was due to an increase in temporary differences in the corporate taxes 2016 calculation that derived from the increased reserves.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Liabilitas / Liability

Liabi l i tas Perum JAMKRINDO *Liability of Perum JAMKRINDO* dalam jutaan Rupiah *in million Rupiah*				
Uraian *Description*	**Tahun** *Year*		**Pertumbuhan/Penurunan** *Increase/Decrease*	
	2016	**2015**	**Rp**	**%**
Utang Klaim *Claim Debts*	11.650	13.067	(1.417)	(10,85)
Utang Pajak *Tax Debts*	72.812	29.218	43.594	149,20
Utang Penjaminan Ulang *Co-Guarantee Debts*	66.604	63.443	3.161	4,98
Pendapatan Di tangguhkan *Deferred Revenues*	2.346.246	1.615.781	730.465	45,21
Cadangan Klaim *Claim Reserves*	404.959	321.871	83.088	25,81
Utang lain-lain *Other Debts*	178.409	105.288	73.121	69,45
Liabilitas Imbalan Kerja *Employment Allowance Liabilities*	28.168	18.124	10.044	55,42
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	3.108.848	2.166.792	942.056	43,48

Jumlah liabilitas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.109 miliar, naik 43,48% dari jumlah liabilitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.166 miliar. Jumlah Liabilitas Perusahaan 3 tahun terakhir konsisten mengalami kenaikan.

Total liabilities of Perum Jamkrindo as of December 31, 2016 amounted to Rp3,109 billion, increase 43.48% of total liabilities as of December 31, 2015 amounting to Rp2,166 billion. The Company's Total Liabilities for the last 3 years have consistently increased.

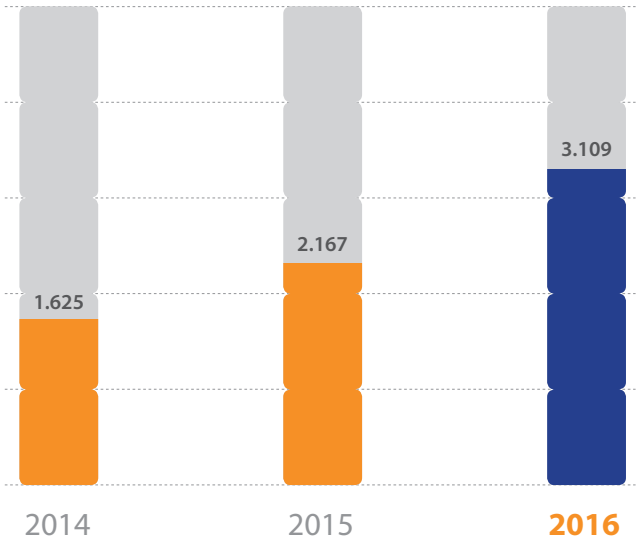

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pada tahun 2016, komposisi Liabilitas Perusahaan relatif berimbang antara Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang.

In 2016, the composition of the Company's Liabilities was relatively balanced between Short-Term Liabilities and Long-Term Liabilities.

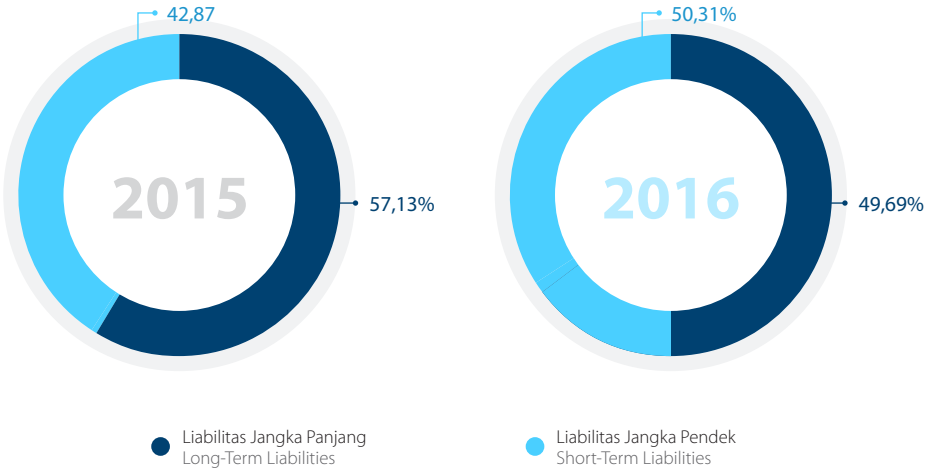

Liabilitas jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.545 miliar, naik 24,79% dari posisi liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.238 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya *volume* penjaminan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga berpengaruh pada pendapatan IJP ditangguhkan jangka pendek.

Hutang Klaim

Hutang klaim per 31 Desember 2016 sebesar Rp11,65 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,85% dari sebesar Rp13,07 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan ini dikarenakan pengajuan klaim yang menjadi kewajiban perusahaan sebagian besar telah dibayar sesuai *Service Level Agreement*.

Liabilitas jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.564 miliar, naik 68,38% dari posisi Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp929 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya *volume* penjaminan dengan waktu lebih dari satu tahun, sehingga berpengaruh pada pendapatan IJP ditangguhkan jangka panjang.

Short-Term Liabilities

Perum Jamkrindo's Total Short Term Liabilities as of December 31, 2016 was Rp1,545 billion, up 24.79% from the position as of December 31, 2015 amounting to Rp1,238 billion. The increase was attributed to an increase in the guarantee volume for a period of less than one year, thus affecting the short-term deferred income of IJP.

Claim Debts

Claim debts as of December 31, 2016 amounted to Rp11.65 billion, decreased by 10.85% from Rp13.07 billion on December 31, 2015. This decrease was due to company's obligation of claim submission has mostly been paid accordingly to the Service Level Agreement.

Long-Term Liabilities

Perum Jamkrindo's Total Long-Term Liabilities as of December 31, 2016 was Rp1,564 billion, up 68.38% from the position as of December 31, 2015 amounting to Rp929 billion. The increase was due to an increase in guarantee volume with period over one year, thus affecting long-term IJP revenues.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Ekuitas / Equity

Ekuitas Perum JAMKRINDO *Equity of Perum JAMKRINDO* dalam jutaan Rupiah *in million Rupiah*				
Uraian *Description*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/Penurunan *Increase/Decrease*	
	2016	2015	Rp	%
Penyertaan Modal Pemerintah *Government Capital Investment*	7.638.733	7.138.733	500.000	7,00
Cadangan-cadangan *Reserves*	1.828.847	1.515.215	313.632	20,70
Saldo Laba *Retained Earnings*	692.045	625.354	66.691	10,66
Komponen Ekuitas Lainnya *Other Equity Components*	139.930	196.885	(56.955)	(28,93)
Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*	13,12	12,85	0,27	2,12
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	10.299.568	9.476.201	823.367	8,69

Posisi Ekuitas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.300 miliar, naik 8,69% dari posisi Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.476 miliar. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya penerimaan penyertaan modal Pemerintah. Jumlah Ekuitas Perusahaan 3 tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan.

Equity position of Perum Jamkrindo as of December 31, 2016 was Rp10,300 billion, up 8.69% from the position as of December 31, 2015 amounted to Rp9.476 billion. This increase was caused by the Government's capital investment. The Company's Total Equity has consistently increased for the last 3 years.

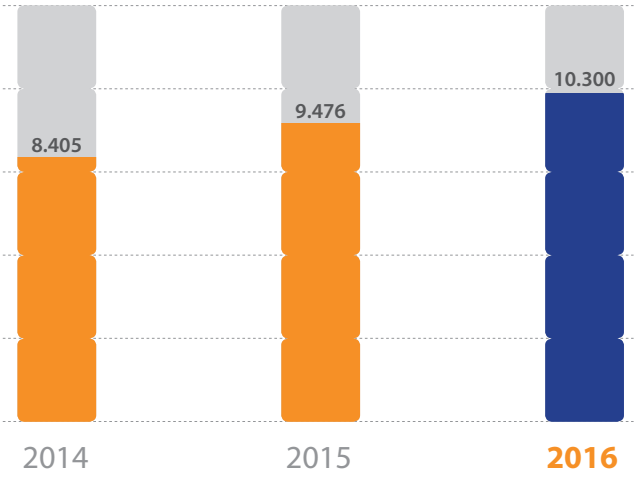

LAPORAN LABA (RUGI) PROFIT (LOSS) STATEMENTS

Laporan Laba Rugi Perum JAMKRINDO *Profit (Loss) Statement of Perum JAMKRINDO* dalam jutaan Rupiah *in million Rupiah*				
Uraian *Description*	**Tahun** *Year*		**Pertumbuhan/Penurunan** *Increase/Decrease*	
	2016	**2015**	**Rp**	**%**
Imbal Jasa Penjaminan Bersih *Net Guarantee Fee*	1.588.441	1.277.488	310.953	24,34
Jumlah Beban Klaim *Total Claim Expenses*	(871.583)	(922.662)	51.079	(5,54)
Penjaminan bersih *Net Guarantee*	716.857	354.825	362.032	102,03
Pendapatan Investasi Bersih *Net Investment Income*	587.678	599.525	(11.847)	(1,98)
Pendapatan Lain-lain *Other Revenues*	294.070	307.230	(13.160)	(4,28)
Beban Usaha *Operational Expenses*	657.151	470.528	186.624	39,66
Laba Sebelum Pajak *Profit Before Tax*	941.455	791.053	150.401	19,01
Beban Pajak Penghasilan Bersih *Net Income Tax Expenses*	249.409	165.699	83.710	50,52
Laba Tahun Berjalan *Profit For The Year*	692.045	625.354	66.691	10,66
Total Laba Komprehensif *Total Comprehensive Profit*	573.334	845.163	(271.829)	(32,16)

Laba tahun berjalan Perum Jamkrindo 2016 tercatat sebesar Rp692,05 miliar, meningkat 10,66% dibandingkan Laba Tahun Berjalan periode sebelumnya yang sebesar Rp625,35 miliar. Dengan pencapaian tersebut, Laba Tahun Berjalan Perum Jamkrindo kembali mengalami pertumbuhan positif.

Profit for the year of 2016 of Perum Jamkrindo were recorded at Rp692.05 billion, increased by 10.66% compared to the previous year's profit of Rp625.35 billion. With this achievement, Perum Jamkrindo's profit for the year returned to have positive growth.

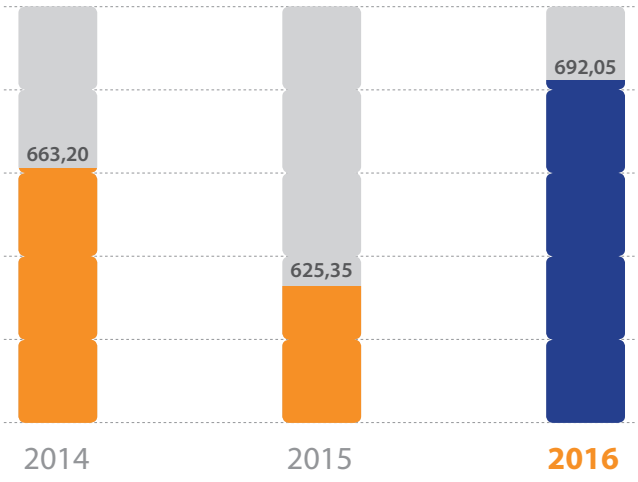

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Imbal Jasa Penjaminan Bersih

Imbal Jasa Penjaminan Bersih Perusahaan tahun 2016 meningkat sebesar 24,34% atau Rp310,9 miliar menjadi Rp1.588 miliar. dimana Imbal Jasa Penjaminan Bersih tahun 2015 adalah Rp1.277 miliar.

Net Guarantee Fee

Net Guarantee Fee of the Company in 2016 increased by 24.34% or Rp310.9 billion to Rp1,588 billion, in which the Net Guarantee Fee in 2015 was Rp1,277 billion.

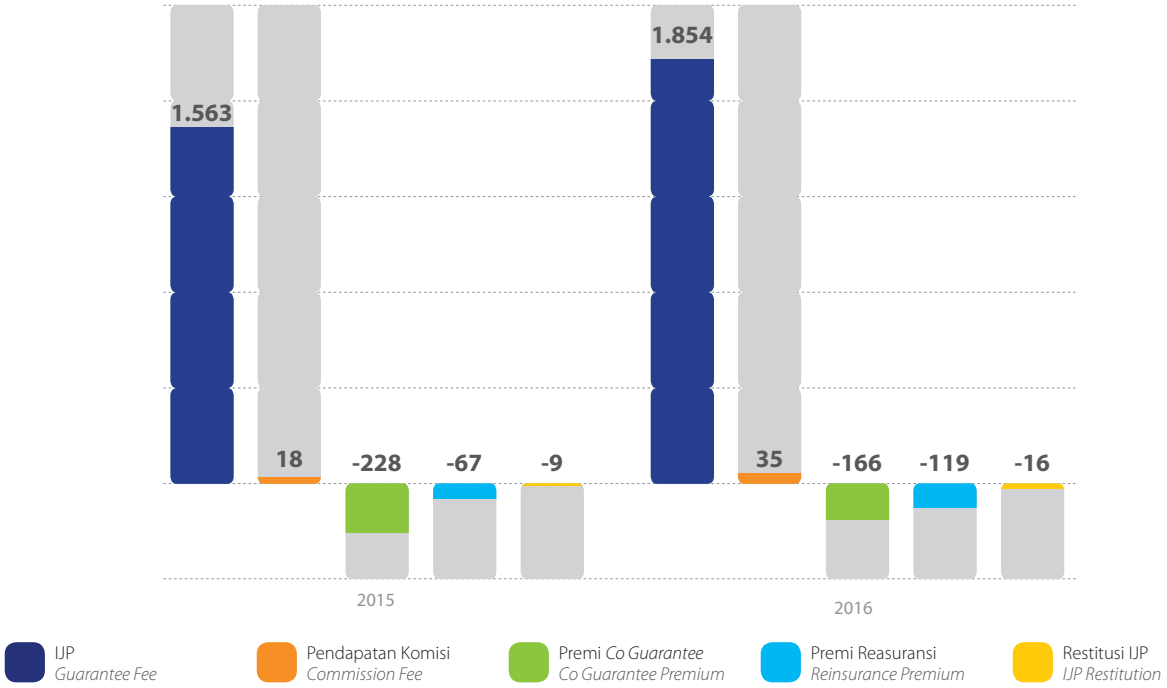

Imbal Jasa Penjaminan

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan sepanjang tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.854 miliar, mengalami peningkatan sebesar 18,62% dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.563 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya *volume* penjaminan baik eksisting maupun KUR sehingga berpengaruh pada peningkatan Imbal Jasa Penjaminan.

Guarantee Fee

Guarantee Fee Income during 2016 was recorded at Rp1,854 billion, an increase of 18.62% from the previous of Rp1,563 billion. The increase was mainly caused by the increase in both existing and KUR guarantee volume, which has an effect on the increase of Guarantee Fee.

Pendapatan Komisi

Jumlah Pendapatan Komisi tahun 2016 tercatat sebesar Rp35,02 miliar, meningkat 92,95% dibandingkan Pendapatan Komisi tahun 2015 yang sebesar Rp18,15 miliar. Peningkatan Pendapatan Komisi ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran premi reasuransi.

Commission Fee

Total Commission Fee in 2016 was recorded at Rp35.02 billion, an increase of 92.95% compared to 2015 of Rp18.15 billion. The increased Commission fee was due to an increase in reinsurance premium payments.

Premi *Co Guarantee*

Premi *Co Guarantee* tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 27,07% menjadi Rp166,24 miliar. Penurunan tersebut adalah

Co Guarantee Premium

Co Guarantee Premium in 2016 decreased by 27.07% to Rp166.24 billion. The decrease was due to a decrease of Kupedes Rakyat BRI

akibat penurunan produksi Kupedes Rakyat BRI sebesar 94,85% dari IJP sebesar Rp433,79 miliar tahun 2015 menjadi Rp22,33 miliar tahun 2016.

Premi Reasuransi

Jumlah Premi Reasuransi yang dibayarkan Perusahaan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 77,53% menjadi Rp118,61 miliar dari tahun sebelumnya Rp66,81 miliar. Peningkatan Premi Reasuransi ini disebabkan seiring meningkatnya pendapatan IJP dan semakin banyaknya produk yang direasuransikan.

Restitusi IJP

Total Restitusi IJP tahun 2016 adalah sebesar Rp15,97 miliar. meningkat 84,62% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,65 miliar. Peningkatan ini utamanya disebabkan meningkatnya penjaminan kredit yang mengalami percepatan pelunasan (multiguna dan briguna).

Jumlah Beban Klaim

Jumlah Beban Klaim Perusahaan tahun 2016 menurun sebesar 5,54% atau sebesar Rp51,08 miliar menjadi Rp871,58 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp922.66 miliar. Dengan pencapaian tersebut, Jumlah Beban Klaim Perusahaan selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

production by 94.85% from IJP amounted to Rp. 433.79 billion in 2015 to Rp. 22.33 billion in 2016.

Reinsurance Premium

The amount of reinsurance premiums paid by the Company in 2016 increased by 77.53% to Rp118.61 billion from Rp66.81 billion in the previous year. The increase of Reinsurance Premium was due to IJP income increase and more products being reinsured.

Guarantee Restitution

Total Guarantee Restitution in 2016 amounted to Rp15.97 billion, an increase of 84.62% over the previous year of Rp8.65 billion. This increase was mainly due to the increasing number of credit guarantee that has accelerated repayment (multiguna and briguna).

Total Claim Expenses

Total Claim Expense of the Company in 2016 decreased by 5.54% or Rp51.08 billion, from Rp922.66 billion in the previous year to Rp871.58 billion. With this achievement, total Claims Expenses for the last 3 years was continued to decline.

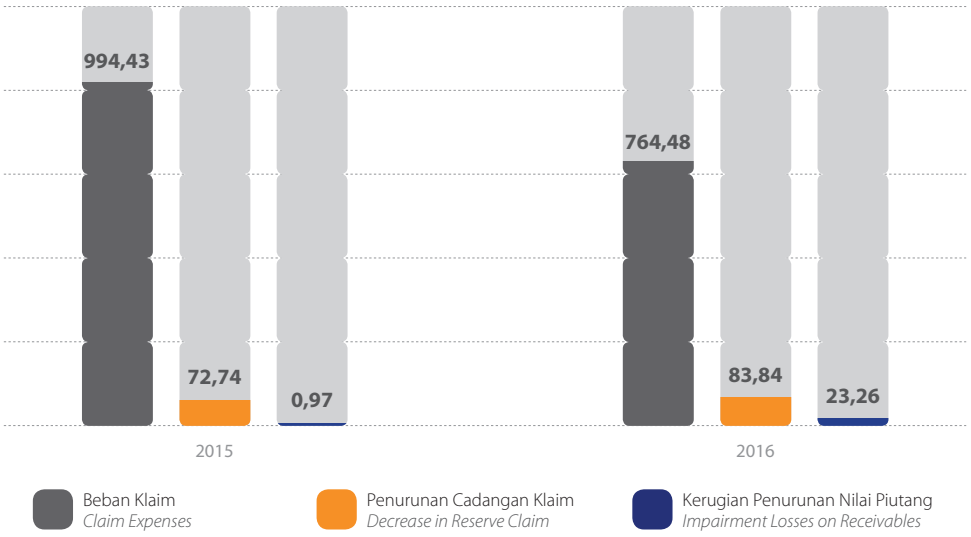

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Beban Klaim

Beban Klaim tahun 2016 tercatat sebesar Rp764,48 miliar, turun 23,12% dibandingkan Beban Klaim tahun sebelumnya yang sebesar Rp994,43 miliar. Penurunan beban klaim dikarenakan perusahaan melakukan kerja sama dengan mitra *Re-guarantee* untuk mitigasi risiko dan adanya perbaikan kualitas kredit yang dijamin.

Penurunan Cadangan Klaim

Jumlah Penurunan Cadangan Klaim tahun 2016 adalah Rp83,84 miliar, meningkat 15,26% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp72,74 miliar. Hal ini dikarenakan kenaikan *outstanding* kredit yang dijamin perusahaan.

Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Jumlah Kerugian Penurunan Nilai Piutang tahun 2016 melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp0,97 miliar menjadi Rp23,26 miliar. Hal ini disebabkan adanya pembentukan kerugian nilai piutang atas piutang IJP KUR yang belum dibayarkan karena masih proses verifikasi. Selain itu adanya peningkatan piutang dengan pihak ketiga terkait klaim atas risiko kematian yang masih dalam proses oleh pihak ketiga.

Pendapatan Investasi Bersih

Pendapatan Investasi Bersih tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. yaitu dari Rp599,53 miliar tahun 2015 menjadi Rp587,68 miliar di tahun 2016. Hal ini dikarenakan suku bunga acuan deposito mengalami penurunan dari rata-rata 7,5% menjadi rata-rata 6,75%..

Pendapatan Lain-lain

Perusahaan memperoleh Pendapatan Lain-lain dari pendapatan subrogasi, pendapatan jasa giro, pendapatan jasa penjaminan dan pendapatan lainnya Tahun 2016, jumlah Pendapatan Lain-lain yang diperoleh Perusahaan mengalami penurunan sebesar 4,28% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp307,23 miliar tahun 2015 menjadi Rp294,07 miliar tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan dari pendapatan lainnya.

Claim Expenses

Claim Expenses in 2016 was recorded at Rp764.48 billion, down 23.12% compared to previous year of Rp994.43 billion. The decrease in claim expenses was due to the Company's engagement with Re-guarantee partners for risk mitigation and the improvement of ensured credit quality.

Decrease in Reserve Claim

The decrease in reserve claim of 2016 was Rp83.84 billion, an increase of 15.26% compared to 2015 amounting to Rp72.74 billion. This was due to an increase in credit outstanding that guaranteed by the Company.

Impairment Losses on Receivables

Total Impairment Losses on Receivables in 2016 was soaring compared to the previous year, from Rp0.97 billion to Rp23.26 billion. This was due to formation of losses on the value of receivables from IJP KUR receivables that have not been paid because there was still in verification process. In addition, there was an increase in receivables with third parties regarding claims for death risks that were still processed by the third party.

Net Investment Income

Net Investment Income in 2016 was slightly decreased from the previous year, from Rp599.53 billion in 2015 to Rp587.68 billion in 2016. This was caused by a decrease in deposit interest rate from the average of 7.5% to 6.75%.

Other Income

The Company generates Other Income from subrogation income, clearing services income, guarantee income and other income in 2016. Total of other income earned by the Company decreased by 4.28% compared to the previous year, from Rp307.23 billion in 2015 to Rp294.07 billion in 2016. This was due to a decrease in other income.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Beban Usaha

Besarnya Beban Usaha yang ditanggung Perusahaan tahun 2016 adalah sebesar Rp657,15 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 39,66 %.

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2016 amounted to Rp657.15 billion, increased by 39.66% compared to the previous year.

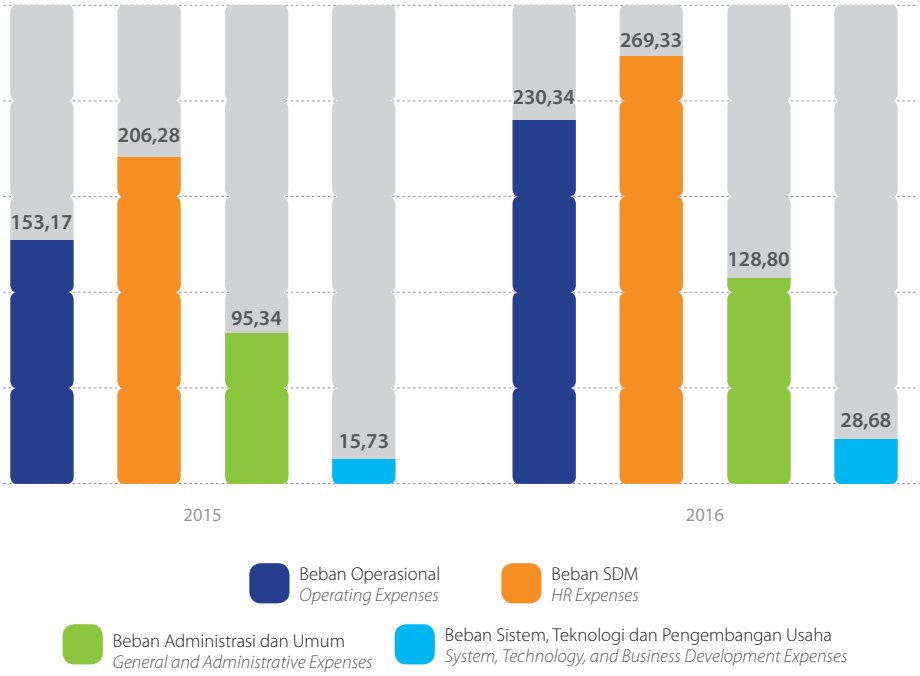

Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Perusahaan tahun 2016 adalah sebesar Rp230,34 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,38% dibandingkan Beban Operasional tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp153.17 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban *fee* agen dan *fee based income* seiring peningkatan penjaminan. Selain itu, beban penagihan subrogasi meningkat karena peningkatan pendapatan subrogasi di tahun 2016.

Operating Expenses

Total Operating Expenses of the Company in 2016 amounted to Rp230.34 billion. This amount has increased by 50.38% compared to 2015 of Rp153.17 billion. The increase was mainly due to an increase in agent fee and fee based income expenses as the guarantee increased. In addition, subrogation billing expenses was higher due to an increase in subrogated income during 2016.

Beban SDM

Sejalan dengan pertambahan jumlah pegawai dan upaya Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, jumlah Beban SDM tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 30,57% menjadi Rp269,33 miliar dari tahun sebelumnya Rp206,28 miliar.

HR Expenses

In line with the increasing number of employees and Company's efforts to improve employees welfare, HR Expenses in 2016 increased by 30.57% to Rp269.33 billion, from the previous year of Rp206.28 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Beban Administrasi dan Umum

Jumlah Beban Administrasi dan Umum tahun 2016 tercatat sebesar Rp128,80 miliar. meningkat 35,10% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp95,34 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan penyaluran PKBL dan meningkatnya penyusutan aset tetap seiring bertambahnya aset tetap.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak pada 2016 mengalami peningkatan 19,01% atau Rp150,40 miliar menjadi Rp941,45 miliar dari Rp791,05 miliar di tahun 2015. Peningkatan Laba Sebelum Pajak terutama disebabkan oleh Peningkatan Laba Sebelum Pajak terutama disebabkan oleh peningkatan IJP dan penurunan beban klaim akibat perbaikan mitigasi risiko dan perbaikan kualitas kredit yang dijamin.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2016, beban pajak penghasilan Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 50,52% atau Rp83,71 miliar lebih besar dari tahun sebelumnya. Jumlah Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2015 yaitu Rp165,70 miliar menjadi Rp249,41 miliar di tahun 2016.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perusahaan tahun 2016 naik sebesar 62,69% atau Rp66,69 miliar menjadi Rp692,05 miliar dibandingkan laba tahun 2015 sebesar Rp625,35 miliar. Kenaikan Laba Bersih tersebut dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak sebelum pajak akibat peningkatan IJP dan penurunan beban klaim akibat perbaikan mitigasi risiko dan perbaikan kualitas kredit yang dijamin.

Penghasilan Komprehensif

Penghasilan komprehensif Perusahaan tahun 2016 mengalamai penurunan sebesar 32,16% atau sejumlah Rp271,83 miliar, dari Rp845,16 miliar tahun 2015 menjadi Rp573,33 miliar di tahun 2016. Penurunan penghasilan komprehensif ini disebabkan penurunan nilai instrumen investasi karena nilai market instrumen AFS sedang mengalami penurunan per 31 Desember 2016. Selain itu adanya pengalihan fokus alokasi investasi sesuai POJK 1/2016 ke surat berharga dan reksadana.

General and Administrative Expenses

Total Administrative and General Expenses for 2016 was Rp128.80 billion, an increase of 35.10% over the previous year which amounted to Rp95.34 billion. The increase was attributable to the increased PKBL disbursement and increased depreciation of fixed assets as number of fixed assets increased.

Income Before Tax

Income Before Tax in 2016 increased by 19.01% or Rp150.40 billion, from Rp791.05 billion in 2015 to Rp941.45 billion. The increase in Income Before Tax was primarily due to higher IJP and a decrease in claims expense due to improvement in Risk mitigation and improvement of quality of credit guaranteed.

Income Tax Expenses

In 2016, the Company's income tax expenses increased by 50.52% or Rp83.71 billion from the previous year. The total Income Tax Expense in 2015 was Rp165.70 billion to Rp249.41 billion in 2016.

Profit for The Year

Profit for the year of the Company increased by 62.69% or Rp66.69 billion, from 2015's profit of Rp625.35 billion to Rp692.05 billion. The increase in net income was due to an increase in income before tax because of the increase in IJP and decrease in claims expense due to improved risk mitigation and improvement of quality of credit guaranteed.

Comprehensive Income

Comprehensive income of the Company for 2016 decreased by 32.16% or Rp271.83 billion, from Rp845.16 billion in 2015 to Rp573.33 billion in 2016. The decrease in the comprehensive income was due to a decline in investment instruments value as the AFS instruments market value was decreasing as of December 31, 2016. In addition, there was investment allocation focus diversion according to POJK 1/2016 to securities and mutual funds

Tinjauan Keuangan
Financial Review

ARUS KAS / CASH FLOW

Laporan Arus Kas PERUM JAMKRINDO *Cash Flow Report of PERUM JAMKRINDO*				
dalam jutaan Rupiah *in million Rupiah*				
Uraian *Description*	**Tahun** *Year*		**Pertumbuhan/Penurunan** *Increase/Decrease*	
	2016	**2015**	**Rp**	**%**
Arus Kas dari Aktivitas operasi *Cash Flow from Operational Activity*	(212.440)	(91.630)	(120.810)	131,85
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flow from Investment Activity*	154.112	255.515	(101.404)	(39,69)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow from Financing Activity*	187.323	234.344	(47.022)	(20,07)
(Penurunan) Kenaikan Kas dan Setara Kas *(Decrease) Increase of Cash and Cash Equivalent*	128.994	398.229	(269.235)	(67,61)
Kas dan setara kas awal tahun *Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year*	5.594.822	5.196.593	398.229	7,66
Kas dan setara kas akhir tahun *Cash and Cash Equivalent at the end of the year*	5.723.816	5.594.822	128.994	2,31

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp212,44 miliar. Perusahaan memperoleh Arus Kas masuk dari penerimaan imbal jasa penjaminan sebesar Rp1.547,45 miliar dan dari aktivitas operasi lainnya Rp334,12 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran klaim dari kitra *co guarantee*. pembayaran imbalan jasa *co guarantee*. pembayaran klaim dan pos biaya lainnya.

Cash Flow from Operational Activity

Net Cash Flows used for Operating Activities in 2016 was recorded at Rp212.44 billion. The Company obtained Cash Flows from guarantee fees receipt amounting to Rp1,547.45 billion and from other operating activities amounting to Rp334.12 billion. While cash outflow used for claims payment of co guarantee partners, co guarantee fee payment, claims payment and other expenses items.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp154,11 miliar. Tahun 2016. Perusahaan memperoleh hasil investasi sebesar Rp568,07 miliar dan penerimaan investasi lainnya sebesar Rp9,24 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp346,51 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp59,25 miliar dan pembayaran aktivitas investasi lainnya sebesar Rp17,44 miliar.

Cash Flow from Investment Activity

Net cash flows that was obtained from Investment Activity in 2016 were recorded at Rp154.11 billion. In 2016, the Company gained investment returns of Rp568.07 billion and other investment income of Rp9.24 billion. Meanwhile, cash outflow used for investment placement amounting to Rp346.51 billion, purchase of property and equipment amounting to Rp59.25 billion and other investments amounting to Rp17.44 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2016 sebesar Rp187,32 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari tambahan modal Pemerintah sebesar Rp500 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk membayar dividen sebesar Rp312,68 miliar.

Cash Flow from Financing Activity

Net cash flows generated from Financing Activities in 2016 was Rp187.32 billion. Cash inflows derived from additional Government capital amounted to Rp500 billion and cash outflow used to pay dividends amounted to Rp312.68 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor KEP-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN No. S-314/MBU.4/2011, dan Surat Menteri Negara BUMN terbaru No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, maka dengan total skor 78,50 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berada pada kategori "SEHAT A", sementara pada 2015 dengan skor 77,50 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT A".

COMPANY HEALTH INDEX

Evaluation of the Company's Health Index is based on the Decree of State Minister of SOE number: KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of Health Index, and Regulation of State Minister of SOE of the Republic of Indonesia number: PER- 10/MBU/2011 dated August 19, 2011 on the Evaluation Indicators for Health Index of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Insurance and Guarantee Services Business. From the calculation of the Company's health index, in accordance with the evaluation of health index of SOEs as based on the Decree of Minister of SOE of the Republic of Indonesia number KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 and the Regulation of Minister of SOE of the Republic of Indonesia number PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2015, then by a total score of 78.50, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia fell into "HEALTHY A" category, while in 2015 the Company also fell into the same category with the score of 77.50.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Perusahaan menggunakan rasio solvabilitas yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.'

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

To measure the Company's capacity to pay its short-term liabilities, the Company uses liquidity ratio consisting of cash ratio and current ratio. While for measuring the Company's capacity in fulfilling its total liabilities, the Company uses solvency ratio measured by dividing total liabilities to total assets and total liabilities to total equity.

Uraian *Description*	2016	2015
Rasio Likuiditas *Liquidity Ratio*		
Rasio Kas *Cash Ratio*	370,42%	452,00%
Rasio Lancar *Current Ratio*	711,91%	755,22%
Rasio Solvabilitas *Solvability Ratio*		
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset *Liability Ratio to Total Assets*	23,19%	18,61%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas *Liability Ratio to Equity*	30,18%	22,87%

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pada 2016, tingkat kemampuan Perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek berdasarkan aset lancar yang ditunjukkan melalui rasio lancar sebesar 711,91%. Berdasarkan nilai tersebut, kemampuan aset lancar Perusahaan dalam menjamin utang lancarnya masih relatif baik.

In 2016, the Company's capacity to pay its short-term liabilities based on current assets was shown through current ratio of 711.91%. Based on the ratio, the capacity of the Company's current assets in guaranteeing its current liabilities was relatively good.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal Perum Jamkrindo terdiri dari Liabilitas dan Ekuitas. adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The capital structure of Perum Jamkrindo consists of Liabilities and Equity are as follows:

dalam Rupiah penuh, kecuali persentase
in full Rupiah, except the percentage

Uraian *Description*	2016	% Total Modal *% Total Capital*	2015	% Total Modal *% Total Capital*
Liabilitas *Liabilities*	3.108.848.887.056	23,76%	2.166.792.003.236	18,61%
Ekuitas *Equity*	10.299.568.987.996	76,24%	9.476.200.973.701	81,39%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas *Total Liabilities and Equity*	13.408.417.875.052	100,00%	11.642.992.976.937	100,00%

Kebijakan Struktur Modal

Pengelolaan terhadap struktur modal Perum Jamkrindo dilakukan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi Pemangku Kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

Kondisi struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan modal rata-rata tertimbang atau *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang minimal, dengan pertambahan penggunaan utang, akan meminimalkan WACC karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*), di samping itu, penggunaan hutang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak, meski demikian, peningkatan hutang yang dilakukan Perum Jamkrindo akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perum Jamkrindo secara keseluruhan, untuk itu, perlu kompromi perpaduan antara penggunaan hutang dan modal sendiri sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

Capital Structure Policy

Management on capital structure of Perum Jamkrindo is done to protect the Company's capacity in maintaining business continuity, thus the Company can provide return to the Shareholders and benefits to other Stakeholders as well as maintain optimum capital structure to reduce capital cost.a

Optimum capital structure condition can be achieved by minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). With the addition of debt use, WACC will be minimized because cost of debt will be lower compared to cost of equity. In addition, debt use will also decrease taxable cost, thus there will be tax savings. Nevertheless, the increase of debt conducted by Perum Jamkrindo will increase interest expense cost that will further decrease the value of Perum Jamkrindo in overall. Therefore, combination between the use of debt and equity needs to be compromised to achieve optimum condition.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan tidak melakukan pengikatan yang bersifat material untuk investasi barang modal dengan pihak mana pun.

MATERIAL TIES FOR THE INVESTMENT OF CAPITAL GOODS IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2016, the Company did not engage in material ties for capital good investment with any party.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang 2016, Perusahaan melakukan belanja modal yang bertujuan untuk memperluas jaringan usaha Perusahaan serta melakukan revitalisasi atas aset-aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun investasi yang dilakukan pada 2016 yang ditujukan guna mengoptimalkan kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZED IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2016, the Company undertook capital expenditures that were aimed at expanding the Company's business network and revitalizing its assets in order to improve the services quality. The investments made in 2016 to optimizing the Company's performance are as follows:

dalam Rupiah penuh
in full Rupiah

Jenis Barang Modal *Type of Capital Goods*	Nilai *Value*
Bangunan Kantor *Offices Building*	3.141.535.531
Perumahan Dinas (*Houses*) *Services Houses*	117.228.200
Kendaraan Bermotor *Motor Vehicles*	2.853.096.475
Inventaris Kantor *Office Inventories*	6.388.041.636
Inventaris Rumah Dinas *Service House Inventories*	226.134.375
Total Akumulasi Penyusutan *Total Accumulated Depreciation*	12.726.036.216

Tujuan Investasi

Tujuan Perusahaan melakukan investasi barang modal adalah untuk menunjang operasional Perusahaan, karena itu strategi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaaan.

Investment Purposes

The Company's purpose to invest capital goods is to support the Company's operations, therefore the capital goods investment strategy undertaken by the Company is adjusted to the needs and plans for the Company's development.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Pada tahun 2016, secara umum kinerja Perusahaan berada di bawah target RKAP 2016. Pencapaian tersebut disebabkan beberapa asumsi yang digunakan Perusahaan dalam menyusun target tidak terealisasi pada tahun 2016. Secara singkat, pencapain target dan realisasi kinerja Perusahaan pada tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

In 2016, in general, the Company's performance was below the target of 2016 RKAP, due to several assumptions used by the Company in setting unrealized targets in 2016. Briefly, the target achievement and Company's performance realization in the fiscal year 2016 are as follows:

Uraian *Description*	RKAP 2016 *2016 RKAP*	Realisasi 2016 *2016 Realization*	Pencapaian RKAP *RKAP Achievement*
Imbal Jasa Penjaminan - Bersih *Net Guarantee Fee*	1.799.413	1.588.441	88,28%
Beban Klaim *Claim Expenses*	1.244.957	871.583	70,01%
Pendapatan Investasi *Investment Income*	690.896	587.678	85,06%
Laba Tahun Berjalan *Profit for the Year*	728.970	692.045	94,93%
Aset *Assets*	12.991.691	13.408.418	103,21%

Proyeksi 2017

Memasuki tahun 2017, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang ingin dicapai pada tahun 2017. Secara umum, target pertumbuhan yang dicanangkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Projection in 2017

Entering 2017, the Company has set a number of targets to be achieved by 2017. In general, the Company's growth targets are as follows:

Uraian *Description*	RKAP 2017 *2017 RKAP*	Realisasi 2016 *Realization 2016*	Target Pertumbuhan *Growth Target*
Imbal Jasa Penjaminan - Bersih *Net Guarantee Fee*	1.931.116	1.588.441	21,57%
Beban Klaim *Claim Expenses*	1.160.952	871.583	33,20%
Pendapatan Investasi *Investment Income*	621.456	587.678	5,75%
Laba Tahun Berjalan *Profit for the Year*	894.813	692.045	29,30%
Aset *Assets*	15.200.504	13.408.418	13,37%

Tinjauan Keuangan
Financial Review

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan laporan ini diterbitkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Perum Jamkrindo.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Perum jamkrindo yang merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat oleh pemerintah memiliki prospek yang cerah mengingat bahwa target penyaluran kredit KUR pada tahun 2017 sebesar 106,4 triliun, target ini meningkat dari tahun 2016 dengan target 100 triliun. Dengan jaringan kerja dan layanan yang berkualitas Perum Jamkrindo optimis untuk dapat meraih pasar penjaminan kredit program.

Perkembangan jumlah UMKM Di Indonesia yang semakin berkembang dimana data Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan ada 56,5 Juta UMKM, dan baru sekitar 30% yang mampu mengakses perbankan. Dari persentase tersebut sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari perbankan dan 23,9% mengakses dari non bank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain sekitar 60% – 70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Hal tersebut menunjukan bahwa pangsa pasar penjaminan kepada UMKM masih terbuka luas.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12/PBI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, yang mana dalam PBI dimaksud diwajibkan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM, secara bertahap mulai dari 5% pada tahun 2015 hingga mencapai 20% akhir tahun 2018.

Bila melihat dari segi kapasitas Perum Jamkrindo dalam melakukan penjaminan yang diukur melalui *gearing ratio*, hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2 Tahun 2016 membawa angin segar bagi industri penjaminan. Dalam hal kapasitas penjaminan Otoritas Jasa Keuangan mengubah besaran *gearing ratio* yang harus dijaga oleh perusahaan penjaminan untuk kredit produktif yang semula maksimal sebanyak 10 kali diubah menjadi 20 kali. Hal tersebut bisa berdampak menambahnya kapasitas (*oustanding*) *volume* kredit yang dapat dijamin.

MATERIAL FACTS INFORMATION SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

There were no significant events subsequent to balance sheet date until this report was issued, which significantly affected the presentation of Perum Jamkrindo's Financial Statements.

COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

Perum jamkrindo which is a company appointed as the guarantor of Micro Business Credit by the government has a bright prospect considering that KUR credit distribution target in 2017 is 106.4 trillion, increased from 2016 with a target of 100 trillion. With its office network and quality services, Perum Jamkrindo is feeling optimist to reach the program credit guarantee market.

The number of MSMEs in Indonesia is growing, amounted to 56.5 million MSMEs according to data of Central Bureau of Statistics (2015), and only about 30% who are able to access banking services. From this percentage, 76.1% obtained credit from banks and 23.9% accessed from non-banks including savings and loans such as cooperatives. In other words, about 60% - 70% of all sectors of MSMEs do not have access to financing through banks. It shows that the guarantee market share for MSMEs is still wide open.

In Bank Indonesia Regulation (PBI) No.17/12/PBI/2015 dated June 25, 2015 regarding amendment to Bank Indonesia Regulation No.14/22/PBI/ 2012 concerning Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the context of Micro, Small and medium enterprises Business Development with supporting provisions, which in the PBI is required to allocate credit/financing to MSMEs, gradually starting from 5% in 2015 up to 20% by the end of 2018.

Looking at Perum Jamkrindo's capacity in conducting the guarantee as measured through the gearing ratio, the presence of Financial Services Authority Regulation No.2 of 2016 brought a fresh air to the guarantee industry. Financial Services Authority's guarantee capacity changed the amount of gearing ratio that must be guarded by the guarantee company for earning credit which was originally maximum of 10 times into 20 times. This could have an impact on the increase of secured credit volume capacity (outstanding).

KEBIJAKAN DIVIDEN

Jumlah Dividen

Berdasarkan keputusan RPB pada 2016, memutuskan usulan pembagian laba tahun buku 2015 sebagai berikut

DIVIDEND POLICY

The Amount of Dividend

RPB in 2016 decided the proposal of profit distribution for 2015 fiscal year as follows:

Uraian *Description*	Tahun Buku 2015 *Fiscal Year 2015*	Tahun Buku 2014 *Fiscal Year 2014*
Laba Bersih *Net Income*	625.354.338.229	663.202.861.042
Jumlah Dividen *Amount of Dividend*	312.677.169.113	265.655.582.000
Payout Ratio *Payout Ratio*	50%	40%
Tanggal Pembayaran Dividen *Date of Dividend Payment*	22 Juni 2016	4 Juni 2015

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Pada tahun 2016 Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

CONTRIBUTION TO THE NATION

In 2016, the Company had conducted taxation obligation in the form of collection and payment of various types of taxes with the following details:

Uraian *Description*	Saldo Awal (Rp) *Beginning Balance (Rp)*	Mutasi Tahun 2016 *Transfer in 2016*		Saldo Akhir (Rp) *Ending Balance (Rp)*
		Kewajiban (Rp) *Obligation (Rp)*	Penyetoran (Rp) *Payment (Rp)*	
Uang Muka Pajak *Prepaid Taxes*				
Pajak Pertambahan Nilai *Value Added Taxes*	-	81.540	81.540	-
Hutang Pajak *Tax Payable*				
Pajak Penghasilan *Income Tax*				
Pajak Penghasilan pasal 21 *Income tax article 21*	4.159.792.587	33.393.329.286	32.362.710.317	5.190.411.556
Pajak Penghasilan pasal 22 *Income tax article 22*	70.537.660	244.677.675	252.273.931	62.941.404
Pajak Penghasilan pasal 23 *Income tax article 23*	384.160.941	2.851.367.193	2.805.262.670	430.265.464
Pajak Penghasilan pasal 25 *Income tax article 25*	5.377.077.000	79.651.176.408	78.390.655.374	6.637.598.034
Pajak Penghasilan pasal 4 (2) *Income tax article 4 (2)*	212.315.957	79.651.176.408	78.390.655.374	6.637.598.034
Pajak Penghasilan pasal 29 *Income tax article 29*	10.772.587.750	57.349.155.592	10.772.587.750	57.349.155.592

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian *Description*	Saldo Awal (Rp) *Beginning Balance (Rp)*	Mutasi Tahun 2016 *Transfer in 2016*		Saldo Akhir (Rp) *Ending Balance (Rp)*
		Kewajiban (Rp) *Obligation (Rp)*	Penyetoran (Rp) *Payment (Rp)*	
Pajak Final Revaluasi Aset Tetap *Final Tax of Fixed Assets Revaluation*	6.695.915.106	-	6.695.915.106	-
Total Pajak Penghasilan *Total Income Tax*	27.672.387.001	174.614.140.685	132.245.245.154	70.041.282.532
Pajak Pertambahan Nilai *Value Added Tax*	1.546.089.155	11.472.032.466	10.274.372.440	2.770.794.181
Pajak Bumi dan Bangunan *Land and Building Tax*	-	401.702.820	401.702.820	-
Total Hutang Pajak *Total Tax Payable*	29.218.476.156	186.487.875.971	142.894.275.414	72.812.076.713

Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah saldo awal Kewajiban Pajak Penghasilan pada tahun 2016 adalah Rp27.672.387.001 dan Kewajiban Pajak Penghasilan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp174.614.140.685. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp132.245.245.154, sehingga hutang PPh per 31 Desember 2016 sebesar Rp70.041.282.532.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia memiliki saldo awal PPN pada tahun 2016 sebesar Rp1.546.089.155, dan kewajiban PPN selama tahun 2016 sebesar Rp11.472.032.466, Jumlah PPN yang disetorkan pada tahun 2016 sebesar Rp10.247.327.440, sehingga saldo akhir PPN tahun 2016 Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp2.770.794.181.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai wajib pajak, Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp401.702.820.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Perum Jamkrindo adalah perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga 31

Income Tax (PPh)

The total beginning balance of Income Tax Obligation in 2016 was Rp27,672,387,001 and the Income Tax obligation for 2016 was Rp174,614,140,685. The Company has fulfilled its tax obligations that has been deposited to the State treasury amounting to Rp132,245,245,154. Thus, taxation obligation as of December 31, 2016 was Rp70,041,282,532.

Value Added Tax (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia had a beginning balance of VAT in 2016 amounting to Rp1,546,089,155 and VAT obligation for 2016 at Rp11,472,032,466. TOTAL VAT paid in 2016 amounted to Rp10,247,327,440, thus ending balance of VAT in 2016 of the Company amounted to Rp2,770,794,181.

Land and Building Tax

As a taxpayer, Perum Jaminan Kredit Indonesia had fulfilled its PBB tax obligation according to Letter of Payable Tax Notification (SPPT) received in 2016 amounted to Rp401,702,820.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP) CARRIED OUT BY THE COMPANY

100% of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Up to December 31, 2016. Perum

Desember 2016, Perum Jamkrindo tidak pernah melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen.

Jamkrindo has never implemented a stock ownership program by employees or management.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga 31 Desember 2016, Perusahaan tidak pernah melakukan penawaran umum, baik berupa penawaran saham atau surat hutang. sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disampaikan pada laporan ini.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2016. The Company has never made a public offering, either in the form of stock offer or debt notes. Therefore, there are no information on the realization of use of proceeds from public offering that can be submitted in this report.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan tidak memiliki informasi material yang terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION OR CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

Throughout 2016, the Company has no material information that related to investment, expansion, divestment, merger/ consolidation, acquisition or debt restructuring.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In its business activities, the Company conduct certain transactions with related parties and the management believes that transactions with related parties are conducted under the same terms and conditions as those with third parties.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2016, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Perusahaan, antara lain:

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Throughout 2016, there have been changes in laws and regulations that have considerable effect on the Company, among others:

Nama Peraturan *Name of Regulation*	Dampak Bagi Perusahaan *Effect on the Company*
Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan *Law No. 1 of 2016 on Guarantee*	Undang-Undang No.1 Tentang Penjaminan menjadi payung hukum dan pondasi bagi industri penjaminan di Indonesia, khususnya bagi Perum Jamkrindo. Regulasi-regulasi yang mengatur secara lebih teknis bagi perusahaan penjaminan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang terbit di tahun 2017. *Law No.1 on Guarantee has become the legal protection and foundation for guarantee industry in Indonesia, especially for Perum Jamkrindo. More technical regulatory arrangements for insurance companies are set forth in the Financial Services Authority Regulations published in 2017.*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Nama Peraturan *Name of Regulation*	Dampak Bagi Perusahaan *Effect on the Company*
PP No 1 Tahun 2016 Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang *Government's Regulation No 1 of 2016 on Guarantee for Warehouse Receipt System Implementation Institution*	Penunjukan Perum Jamkrindo sebagai pelaksana penjaminan Sistem Resi Gudang berdampak pada perubahan struktur organisasi perusahaan, dimana terdapat tambahan Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang yang berada langsung di bawah kewenangan Direktorat Utama. Penambahan struktur tersebut berdampak pada adanya pos anggaran tambahan guna berjalannya bisnis penjaminan sistem resi gudang meliputi: Anggaran sosialisasi, anggaran sdm dan pembuatan regulasi teknis. *The appointment of Perum Jamkrindo as the guarantee institution of Warehouse Receipt System has an impact on changes of company's organizational structure, in which additional Warehouse Receipt Division was established directly under the authority of Main Directorate.* *The structure addition has an impact on additional budget items for warehouse receipt system guarantee business, including: socialization budget, budget for human resources and preparation of technical regulation*

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Pada tanggal 1 Januari 2016, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut.

Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang klasifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.
   Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 dan PSAK 19 Aset Tak Berwujud bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

2. Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Pasca Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.
   PSAK 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa. harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

On January 1, 2016, Perum Jamkrindo and Subsidiaries applied the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the new and revised interpretation of financial accounting standards ("ISAK"), effective since that date.

Changes in Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies have been made as required, in accordance with transitional provisions in each standard and interpretation.

The application of new or revised standards and interpretations that are relevant to Perum Jamkrindo operations and Subsidiaries and have an impact on the consolidated financial statements are as follows:

1. Amendment of PSAK 16: Fixed Asset on Accepted Methods classification for Depreciation and Amortization.
   This Amendment clarifies the principles that contained in PSAK 16 and PSAK 19 of Intangible Assets that revenues reflect an economic benefit pattern that resulting from business operation (of which the asset is a subdivision) rather than the economic benefits of usage through the use of assets, as a conclusion that the use of Fixed assets depreciation method based on revenue are not appropriate.

2. Amendment of PSAK No. 24: Post-Employment Allowance on a Defined Benefit Program: Employee Contributions.
   PSAK 24 requires the entity to give attention on contributions from workers or third parties when considering a defined benefit program. When the contribution is in connection with the services, it should be attributed to the service period as a negative benefit. This amendment clarifies that if the

iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

contribution amount does not depend on years of service, then an entity is permitted to recognize such contribution as a deduction from service fees in the period in which the services are attributed rather than the contributions allocation in the service period.

3. Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi.
Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria terlalu terpenuhi.

3. Amendment of PSAK No. 65: Consolidated Financial Statements of Investment Entities: the Consolidated Exceptions Application.
This amendment clarifies the consolidated exceptions for investment entities when the criteria are over-fulfilled.

4. PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

4. PSAK 7 (2015 Adjustment): Related Party Disclosure.
This adjustment clarifies that entity management (entity that provides the services of key management personnel) is a related party which is subject to related parties disclosure. And the entity that uses the management entity discloses the costs incurred for its management services.

5. PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.

5. PSAK 68 (2015 Adjustment): Fair Value Measurement.
This adjustment clarifies that portfolio exceptions in PSAK 68 can be applied not only to financial assets groups and financial liabilities, but also applied to other contracts within the PSAK 55 scope.

6. PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut.

Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

6. PSAK 16 (2015 Adjustment): Fixed Assets.
This adjustment clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19, assets may be revalued with reference to observable market data of gross or net carrying amount. In addition, accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross carrying amount and asset carrying amount.

The asset carrying amount is restated at the amount of its revaluation.

7. PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak berwujud.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut.

Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

7. PSAK 19 (2015 Adjustment): Intangible Assets.
This adjustment clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19, assets may be revalued with reference to observable market data of gross or net carrying amount. In addition, accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset.

The asset carrying amount is restated at the amount of its revaluation.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

The Group is still evaluating the impact of the above PSAK and ISAK implementation and the impact on the consolidated financial statements has not been determined.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir

Pada tahun 2016, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Lingkungan internal dan eksternal Perusahaan masih berada dalam kondisi normal tanpa adanya perubahan yang signifikan.

Assessment Manajemen

Manajemen Jamkrindo belum melakukan *assessment* secara khusus terkait kelangsungan usaha Perusahaan mengingat kondisi lingkungan usaha, baik internal maupun eksternal masih berjalan sebagaimana biasanya. Namun demikian, Perusahaan menjalankan program manajemen risiko berdasarkan arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang secara umum terdiri dari 6 (enam) komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian.

Asumsi Yang Digunakan

Pada tahun 2016, asumsi yang digunakan oleh manajemen Jamkrindo adalah:

1. Penyaluran KUR tahun 2016 mencapai Rp47,13 triliun mengalami peningkatan sebesar 487% dibandingkan tahun 2015 dengan angka Rp10,27 triliun.
2. Penyaluran kredit perbankan untuk sektor UKMK tahun 2016 mencapai Rp900,39 triliun , meningkat 108% dibandingikan tahun 2015 yang mencapai Rp830,656 triliun.
3. Sektor UKMK tahun 2016 mencapai 57 Juta dan bertumbuh 2% jika dibandingkan tahun 2015.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, manajemen Jamkrindo berkeyakinan bahwa Jamkrindo masih memiliki potensi untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Bahkan, Jamkrindo memiliki peluang yang lebih luas dengan adanya rencana berikut:

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Things that potentially have significant affect on company's business continuity in the last fiscal year

In 2016, there were things that potentially have significant effect on the Company's business continuity. The Company's internal and external environments are still in normal condition without significant changes.

Management Assessment

Jamkrindo Management has not conducted any assessment specifically related to the Company's business continuity considering that the business environment, both internal and external, are still running as usual. However, the Company operates a risk management program based on the Enterprise Risk Management (ERM) development architecture, which generally consists of 6 (six) major components, namely commitment, structure and function, mechanism, risk management process, support system, and achievement.

Used Assumptions

In 2016, assumptions used by Jamkrindo management are:

1. KUR distribution in 2016 reached Rp47.13 trillion, increased by 487% compared to 2015 of Rp10.27 trillion.
2. Credit banking distribution for MSMEs sector in 2016 reached Rp900.39 trillion, an increase of 108% compared to 2015 of Rp830.656 Trillion.
3. The MSMEs sector in 2016 reached 57 Million and grew 2% when compared to 2015.

With these assumptions, Jamkrindo's management believes that Jamkrindo still has the potential to continue to grow in the future. In fact, Jamkrindo has a wider opportunity with the following plans:

Tinjauan Keuangan
Financial Review

1. Rencana Perubahan PP No.41 Tahun 2008.
   Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum jaminan Kredit Indonesia yang mengatur pembentukan Perum Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan, dimana dalam PP dimaksud disebutkan bahwa Perum Jamkrindo didirikan dan diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Sejalan dengan makin besarnya dan berkembangnya Perum Jamkrindo yang menjadi pemimpin di Industri Penjaminan, maka Perum Jamkrindo sedang mengusulkan agar dilakukan perubahan PP tersebut yang salah satu poinnya adalah memperluas terjamin bagi Perum Jamkrindo yakni hanya tidak terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

2. Masa Transisi UU Penjaminan selama 3 Tahun.
   Dalam pasal 61 ayat (1) UU No.1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan disebutkan bahwa setiap orang diluar lembaga penjamin yang telah melakukankan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Dengan kata lain, bahwa di tahun 2019 hanya perusahaan penjaminan yang berhak melakukan kegiatan penjaminan kredit di Indonesia. Hal tersebut akan berdamapak besar mengingat bahwa saat ini, masih ada beberapa perusahaan asuransi yang melaksanakan kegiatan penjaminan.

1. Plan of Amendment of PP No.41 of 2008.
   Government Regulation no. 41 of 2008 concerning Indonesia's General Company of Credit Guarantee that regulates the formation of Perum Jamkrindo as a guarantee company, where the PP mentioned that Perum Jamkrindo was established and given the task to organize credit guarantee activities for micro, small and medium enterprises and cooperatives. In line with the growth of Perum Jamkrindo who became the leader in Guarantee Industry, thus Perum Jamkrindo is proposing that the PP should be amended, with one of the points is to extend the guaranteed for Perum Jamkrindo which is not limited to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives.

2. Guarantee Law Transition Period for 3 Years.
   Article 61 paragraph (1) of Law No. 1 of 2016 concerning Guarantee stipulated that any person outside the guarantor institution that has undertaken the guarantee activities prior to validity of this law shall adapt to this Law within a period of no longer than 3 years from the coming into effect of the Law. In other words, in 2019 only guarantee companies are entitled to conduct credit guarantee activities in Indonesia. It will give a huge effect considering that at this time, there are still some insurance companies conducting the guarantee activities.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

Kebijakan dan Dasar Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha. Oleh regulator, GCG didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang sehat.

Sebagai salah satu entitas usaha, Perum Jamkrindo memiliki semangat dan komitmen dalam menerapkan GCG di lingkup Perusahaan yang dilandaskan pada kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Perum Jamkrindo dapat berkembang secara maksimal serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika usaha khususnya pada industri penjaminan secara konsisten. Untuk itu, implementasi GCG menjadi aspek penting bagi Perusahaan dalam mencapai cita-cita yang digariskan serta mewujudkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perum Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai entitas BUMN, penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corperate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Policies and Basis of Implementation

Good Corporate Governance is a mechanism established as an effort to arrange relationships between organs in business entities; either internal or external relationships based on laws and regulations and business ethics. By the Regulators, GCG is based on principle of decision making method and accountable activity management of business entities, which then directly related to sustainable organizational management and sound investment climate.

As one business entity, Perum Jamkrindo has the spirit and commitment in implementing GCG in the Company scope based on compliance to the applicable laws and regulations. The purpose is so that Perum Jamkrindo can develop optimally and has high competitiveness in dealing with the business dynamics, especially in the guarantee industry consistently. Therefore, GCG implementation becomes an important aspect for the Company in achieving the goals outlined and realizing sound corporate principles.

In implementing GCG, Perum Jamkrindo refers to several laws and regulations, particularly Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE). This Law gives overall foundation to the organizational management aspect; from shareholders rights and obligations, duties and authorities of Directors and Board of Commissioners/Board of Supervisors, to relationship between the Company and internal and external stakeholders.

As an SOE entity, GCG implementation in the Company scope also refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, stating that GCG are principles underlying a process and mechanism of managing a company based on laws and regulations and business ethics. Implementation of GCG principles covers transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which are strong basis to the sustainability of the Company's business activity. Furthermore, GCG implementation that refers to best practices will increase trust from the equity owners and stakeholders, which will bring the Company to sustainable and significant advancement.

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Based on the Minister of SOE Regulation, the objectives of GCG principles implementation on SOE business entities are:

1. To optimize SOE value so that the company has strong competitiveness, nationally and internationally.
2. To support SOE management professionally, efficiently, and effectively, as well as to empower functions and increase the independence of the Company's organ.
3. To support the Company's organ in making decisions and taking actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOE social responsibility towards the stakeholders and the environmental preservation surrounding the SOE.
4. To increase SOE's contributions to the national economy.
5. To improve conducive climate for national investment development.

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikir positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo ini telah diimplementasikan diseluruh jajaran Perum Jamkrindo yang juga merupakan kode etik Perum Jamkrindo sehingga manajemen dan karyawan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam berfikir dan bertindak sehingga membawa Perum Jamkrindo mencapai tujuan.

Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation

The commitment to implement GCG principles is based on the Corporate culture that is oriented to customer satisfaction, proactive to changes in the business environment, being honest, positive thinking, and highly dedicated, work diligently and discipline prioritizing the Company interests, always improve professionalism to achieve added value for the Company. Cultural values of Perum Jamkrindo have been implemented throughout all levels of Perum Jamkrindo which are also a code of ethics of Perum Jamkrindo so that the management and employees have clear and measurable references in thinking and acting so that Perum Jamkrindo can achieve goals.

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

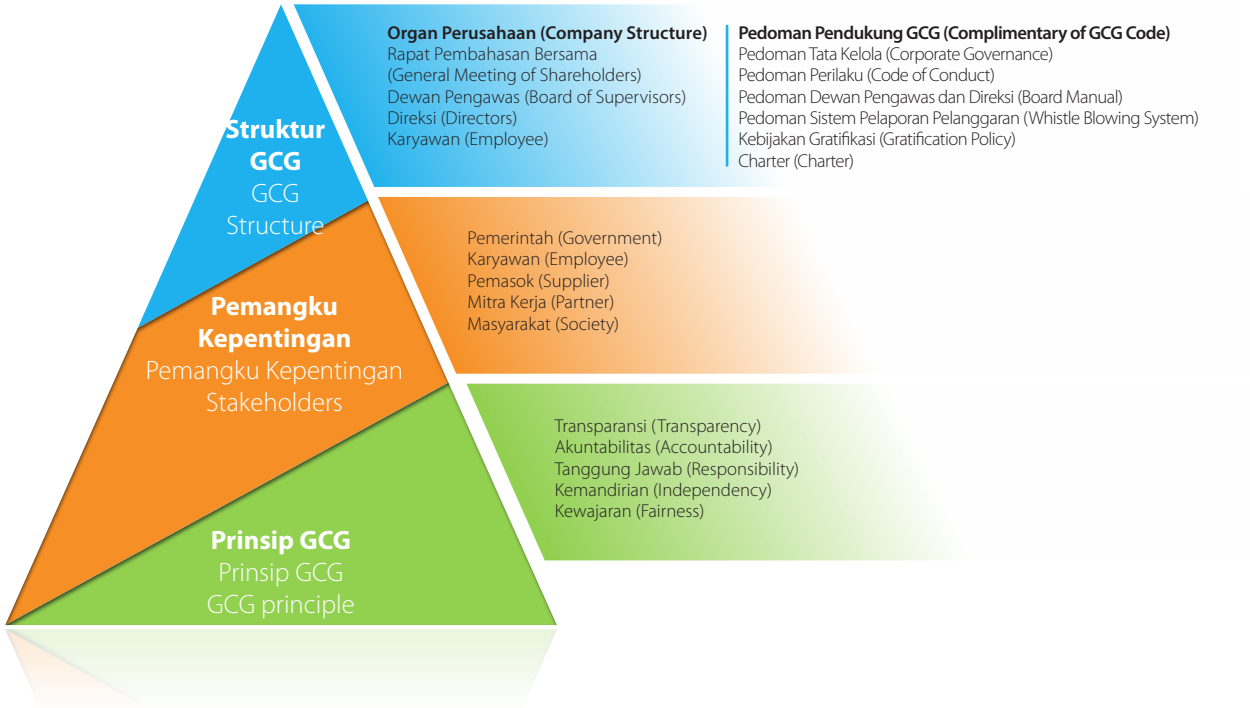

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

GCG implementation principle used by the Company refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 and GCG General Guidelines from the National Committee of Governance Policies (KNKG) through GCG principles generally known as TARIF, which are transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness on all Corporate Organs either Equity Owners, Board of Supervisors or Directors stipulated in the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/Kep-Dir/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated 3 December 2012 on Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of Public Corporation (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia (Credit Guarantee Indonesia), with details as follows:

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

Organ GCG *GCG Organs*	**Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik** *Good Corporate Governance principles*				
	Transparasi *Transparency*	**Akuntabilitas** *Accountability*	**Pertanggungjawaban** *Responsibility*	**Kemandirian** *Independency*	**Kewajaran** *Fairness*
Pemilik Modal *Equity Owner*	a. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain *merger*, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jurnlah yang substansional *Clear disclosure of extraordinary transaction plans includes mergers, acquisitions, and sale of Company assets in substantial quantities* b. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas *Openness in determining the remuneration of the directors and board of supervisors*	Pemilik modal mempunyai tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan rnematuhi peraturan perundang-undangan *Equity owner has the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the Company's management process and ensure that all of the Company's management comply with the laws and regulations*	Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku *Equity owner is not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the directors in accordance with the prevailing laws and regulations*	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Pengawas sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan *Perform a common procedure in determining the members of the directors and board of supervisors in order to objectively hire the right people according to the qualifications required by the Company*	Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas *Equity owner is entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Directors and or Board of Supervisors*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	a. Dibuat risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan *Minutes of the Board of Supervisors meeting indicate the dynamics of the meeting in decision-making process* b. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahan *Attendance of each member of the Board of Supervisors and the implementation of the Board of Supervisors meeting are reported in the Company's Annual Report* c. Remunerasi Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan *Remuneration of the Board of Supervisors is reported in the Company's Annual Report*	a. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif *The Board of Supervisors is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requiring the implementation of accountability and providing advice to the Directors in the framework of effective management of the Company* b. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas *Empowerment of Board of Supervisors functions*	a. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya *Board of Supervisors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to its official duties* b. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik modal *Board of Supervisors is responsible for the performance of its duties to the Equity Owner* c. Dewan Pengawas turut bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemilik modal *Board of Supervisors is also responsible for the truth of the financial statements submitted by the directors to the equity owners*	a. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan *Provide objective consideration in solving problems faced by the Company that may contain potential conflict of interest* b. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak- kontrak yang bersifat rutin *Board of Supervisors is not authorized to make day-to-day management decisions of the Company such as decisions on employee appointments and dismissals or the signing of cooperation or contracts of a routine nature*	Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholders* *The Board of Supervisors in carrying out its positions will always apply the Company's business ethics in order to meet the interests of stakeholders*

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

Organ GCG *GCG Organs*	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance principles*				
	Transparasi *Transparency*	**Akuntabilitas** *Accountability*	**Pertanggungjawaban** *Responsibility*	**Kemandirian** *Independency*	**Kewajaran** *Fairness*
Direksi *Directors*	a. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada *stakeholder* secara transparan *Provide Company Activity and Financial Report as a helping tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to the stakeholders* b. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui *website* Perusahaan *Disclose information and Company Financial Statements are presented on the Company's website* c. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain Direksi pada Laporan Tahunan *Discloses salaries and other remuneration of the directors in the Annual Report*	a. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan *stakeholder* *Directors should be able to place priority order in the effort of fulfilling the stakeholder's interest* b. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan *The Directors establish and determine an effective Internal Control System to safeguard the Company's assets* c. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. *The Directors empower the role and function of SPI as management's strategic partner* d. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya *The Directors shall ensure that SPI has access to information about the Company which is required to perform its duties*	a. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan *The Directors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to the Company's operations* b. Direksi bertanggungjawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan *The Directors are responsible for the material presented in the Financial Statements* c. Direksi bertanggungjawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh *stakeholder* *The Directors are responsible for information disclosure of the Financial Statement on national publication media in order to be accessed by stakeholders*	Komposisi Direksi harus memungkinkan Direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya *The Directors composition shall enable the Directors to act independently in the sense that there is no interest which may interfere with the ability to perform the duties independently and critically in relation to each other*	a. Penerapan sistem *reward* dan punishment yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja *Applying adequate reward and punishment system so that every employee gains a sense of justice associated with the success in achieving performance* b. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholder* *Applying the Company's business ethics in order to fulfill the stakeholders' interests*

Pemantauan Penerapan GCG di Lingkup Perum Jamkrindo

Praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan fraud di lingkungan Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2016, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Perum Jamkrindo diantaranya:

Monitoring of GCG Implementation in Perum Jamkrindo Scope

GCG practices are continuously upgraded at Perum Jamkrindo through monitoring by SPI and HRM Divisions on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If any conflict of interest or misuse of power resulting in fraud in the Company's environment is found, it will be resolved and acted upon in accordance with the applicable regulations. During 2016, monitoring on the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo includes:

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

1. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2015 kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo melalui Surat No. 1163/P/1/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
2. Menyampaikan Tindak Lanjut atas Hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2015 kepada Divisi terkait melalui Memorandum No. 144/M/1.2/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Memorandum Nomor: 231/M/1.2/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Menyampaikan Tindak Lanjut atas Hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas melalui Surat No. 3351/P/1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016.
4. Meminta persetujuan kepada Dewan Pengawas terkait Pengadaan Jasa *Assessor Asssessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perum Jamkrindo Tahun 2016 melalui Surat No. 4225/P/1/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
5. Mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas terkait Pengadaan Jasa *Assessor* Independen Penerapan GCG Tahun 2016 Perum Jamkrindo melalui Surat No. S-19/DP/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.
6. Menyampaikan Pelaksanaan *Whistle Blowing System* Tahun 2016 kepada Direktur Utama melalui Memorandum No. 437/M/1.2/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Penerapan GCG Tahun 2016 kepada Direktur Utama melalui Memorandum No. 438/M/1.2/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

1. Submission of a Self Assessment Implementation Result Report on the Implementation of Good Corporate Governance in 2015 to the Minister of SOE as the Equity Owner, Board of Supervisors, and Directors of Perum Jamkrindo through Letter No. 1163/P/1/III/2016 dated 15 March 2016.
2. Submission of the Follow-Up on the Self Assessment Result of Good Corporate Governance Implementation in 2015 to the relevant Divisions through Memorandum No. 144/M/1.2/V/2016 dated 25 May 2016 and Memorandum Number: 231/M/1.2/VII/2016 dated 28 July 2016.
3. Submission of the Follow-Up on the Self Assessment Result of Good Corporate Governance Implementation in 2015 to the Board of Supervisors through Letter No. 3351/P/1/VIII/2016 dated 01 August 2016.
4. Requesting approval to the Board of Supervisors related to Procurement of Assessor Service of of Good Corporate Governance Assessment of Perum Jamkrindo of 2016 through Letter No. 4225/P/1/IX/2016 dated 19 September 2016.
5. Obtained approval from the Board of Supervisors related to the Procurement of Independent Assessor Services of GCG Implementation of 2016 of Perum Jamkrindo through Letter No. S-19/DP/X/2016 dated 7 October 2016.
6. Delivering the Implementation of Whistle Blowing System of 2016 to the President Director through Memorandum No. 437/M/1.2/XII/2016 dated 30 December 2016.
7. Submitting Report of GCG Implementation Monitoring Result of 2016 to the President Director through Memorandum No. 438/M/1.2/XII/2016 dated 30 December 2016.

Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.

Legal Basis

GCG implementation in the Company's environment refers to several laws and regulations applicable in Indonesia, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Guarantee.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Changes of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Administering Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
5. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on Money Laundering Criminal Action as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
14. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
15. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.
16. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Di samping peraturan/perundangan yang berlaku, Perusahaan memiliki beberapa dasar peraturan internal sebagai *softstructure* yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pedoman *Good Corporate Governance*, dengan pengesahan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 88/Kep-Dir/XII/2012-KER-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

6. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
7. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.
8. Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporate (Perum/) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia)
9. Government Regulation No. 38 of 2008 on Changes of Government Regulation No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional-Owned Property
10. Government Regulation No. 45 of 2005 on Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOE.
11. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its changes No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.
12. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Remuneration of the Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprise.
13. Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 on Guidelines to Prepare SOE Information Technology Management.
14. Regulation of Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.
15. Decree of Secretary of SOE State Minister No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE.
16. General Guidelines of GCG Indonesia by the National Committee of Governance Policies (KNKG).

In addition to the prevailing laws and regulations, the Company has several underlying internal regulations as the softstructure governing the Corporate Governance within the Company's scope, among others:

1. Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) as the Company's Articles of Association.
2. Good Corporate Governance Guidelines, with validation through Joint Decree of Directors and Board of Supervisors of Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) No. 88/Kep-Dir/XII/2012—KER-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated 3 December 2012 on General Guidelines of (Perum) Indonesian Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia).

Dasar Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Basis of Good Corporate Governance Implementation

3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
4. Pedoman/*Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi, yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012-KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
5. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS), yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Direksi Perum jamkrindo No. 121/Kep-Dir/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014.
6. Pedoman Kebijakan Gratifikasi, yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.
7. Piagam Komite Audit, yang telah disahkan pada tanggal 26 April 2011.
8. Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, yang telah disahkan pada Desember 2012.
9. Piagam Satuan Pengawasan Intern yang telah disahkan pada tahun 2011.

3. Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012—KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated 13 December 2012 on Code of Conduct.
4. Board Manual of Board of Supervisors and Directors, which has been ratified by Joint Decree of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated 3 December 2012.
5. Guidelines of Violation Reporting System or Whistleblowing System (WBS) which has been updated and validated through Directors Decree of Perum Jamkrindo No. 121/Kep-Dir/VI/2014 dated 5 June 2014.
6. Guidelines of Gratification Polices which has been updated and validated through Directors Circular Letter No. 9/SE/4/IX/2014 dated 24 September 2014 on Policies of Gratification Control of Perum Jamkrindo.
7. Audit Committee Charter, which was ratified on 26 April 2011.
8. Investment and Business Risk Committee Charter, which was ratified in December 2012.
9. Internal Audit Unit Charter which was ratified in 2011.

Roadmap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Roadmap of Good Corporate Governance Implementation

Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh Perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

GCG process is a way or mechanism done by the company and management in implementing GCG principles in order to perform its functions and duties in accordance with the applicable laws and regulations. The manifestation of commitment, GCG structure, system and procedures which have been developed by the Company aims to create added value for the stakeholders through professional management of the company, effectively and efficiently.

Perum Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles in order to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanisms:

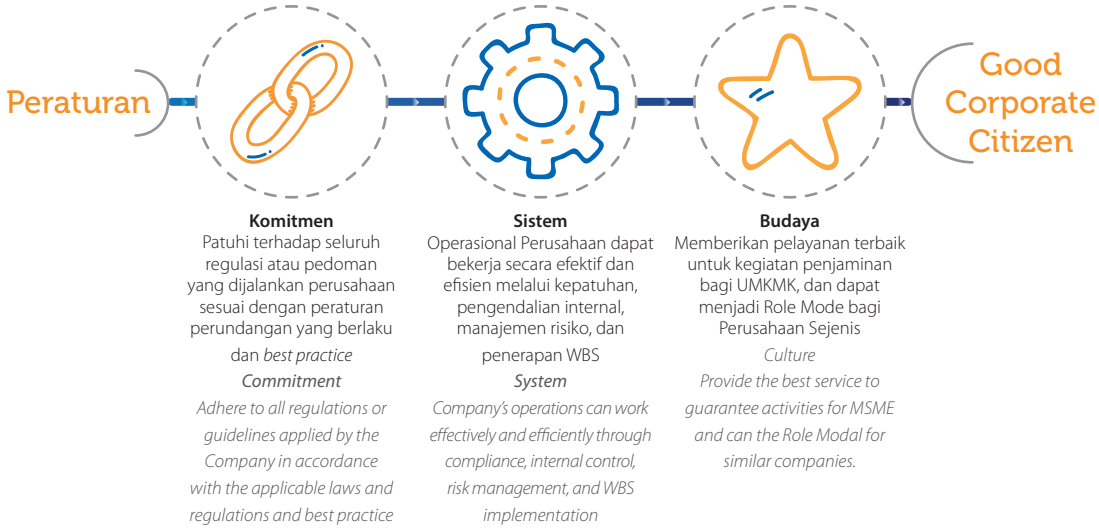

1. Komitmen
   Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

2. Sistem
   Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional Perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien

1. Commitment
   In implementing GCG principles, all of the Company's Persons are committed to adhere and comply with all applicable laws and regulations, as well as the generally accepted ones. Support from the management provides a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation in Perum Jamkrindo. In practice, Perum Jamkrindo Management serves as an example for the employees to keep committing to the ongoing GCG implementation. Perum Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and make improvements of the GCG support tools.

2. System
   In supporting sustainable GCG commitment at Perum Jamkrindo, it is necessary to have an operational system that can work effectively and efficiently through compliance with

Roadmap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Roadmap of Good Corporate Governance Implementation

melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

3. Budaya
   Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya Perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image)* dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

the applicable laws and regulations, an adequate internal control system and good risk management, and effective implementation of violation reporting system.

3. Culture
   The cultural values of Perum Jamkrindo are the foundation for the Company's employees in working to be clearer and more structured. In order to implement GCG at Perum Jamkrindo, all of the Company's employees are committed to implement corporate culture values that are in line with the GCG principles.

The objective of GCG implementation performed by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company that provides value to the stakeholders through effective and efficient Company management by creating cultural values so as to increase the level of trust, build a good Corporate image and reputation, as well as benchmarks for other similar companies as described below:

Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penciptaan Nilai-nilai Budaya
Toward governance good corporate and the creation of cultural values

Komitmen Tata Kelola
Governance Commitment

Visi dan Misi / *Vision and Mission*
Nilai-Nilai Budaya Perusahaan / *Corporate Cultural Values*
Pedoman Tata Kelola / *Governance guidelines*
Pedoman Perilaku / *Code of Conduct*
Charter / *Charter*
- Internal Audit Charter/ *Internal audit charter*
- Komite Audit Charter / *Internal audit committee*
- Kiru *Charter* / *KIRU charter*

Pedoman Dewan Pengawas dan Direksi / *Guidelines of the Board of Supervisors and Directors*
Kebijakan Gratifikasi / *Gratification Policies*
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Guidelines of Violation Reporting System*
Sistem dan Prosedur / *System and Procedure*

Struktur Tata Kelola
Governance structure

Organ Utama
- Rapat Pembahasan Bersama Dewan Pengawas / *Board of Supervisors*
- Direksi / *Directors*

Organ Pendukung / *Supporting Organs*
- Komite Audit / *Audit Committee*
- Komite Investasi dan Risiko Usaha / *Investment and Business Risk Committee*
- Sekretaris Dewan Pengawas / *Secretary to the Board of Supervisors*
- Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*
- Satuan Pengawaan Internal Perusahaan / *Internal Control Unit Company*

Mekanisme Tata Kelola
Governance mechanism

Implementasi / *Implementation*
- Penerapan Prinsip Gcg / *GCG Principles Implementation* Pada Kegiatan Usaha Perusahaan / *On Company's business activities*

Evaluasi / *Evaluation*
- *Monitoring* Implementasi / *Monitoring of Implementation* Tata Kelola Perusahaan / *Corporate Governance*
- Evaluasi Kinerja Perusahaan / *Company Performance Evaluation*
- Evaluasi Rencana / *Plan Evaluation* Bisnis Perusahaan / *Company Business*

Pemutakhiran / *Updates*
- Penyempurnaan Perangkat / *Device enhancement* Pendukung Tata Kelola Perusahaan / *Corporate governance support*

Tujuan Tata Kelola
Governance objectives

Pengelolaan Perusahaan yang Efektif dan Efisien / *Effective and efficient company management*
Kepercayaan, *Image*, dan Reputasi Perusahaan yang Lebih Baik / *Better trust, image, and reputation of the Company*
Menjadi Benchmark / *Become benchmark*

Roadmap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Roadmap of Good Corporate Governance Implementation

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good corporate governance implementation

2005

Penyusunan
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
  - Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
  - Pedoman Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*)
  - Kebijakan Gratifikasi
  - Pedoman Tata Tertib Rapat
  - Pengendalian Internal Perusahaan
- Sistem dan Prosedur Berbasis Risiko

Drafting
- *Guidelines of corporate governance*
  - *Code of conduct*
  - *Guidelines of the Board of Supervisors and Directors (Board Manual)*
  - *Gratification Policies*
  - *Guidelines of meeting conduct*
  - *Company's internal control*
- *Risk-based system and procedure*

2010

Penyusunan
- *Blueprint* Manajemen Risiko

Drafting
- *Risk management blueprint*

2011

Penyempurnaan
- Sistem dan Prosedur Berbasis Risiko

Pembentukan
- Manajemen Risiko
- Charter (Komite Audit dan Komite Dewan Pengawas)

Refinement
- *Risk-based system and procedure*

Establishment
- *Risk Management*
- *Charter (audit committee and board of supervisors committee)*

2012

Penyempurnaan
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
  - Kebijakan Gratifikasi
  - Pedoman Tata Tertib Rapat
  - Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
  - Pengendalian Internal Perusahaan
- Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
- Pedoman Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*)

Pembuatan
- Rencana Strategis Pengembangan Teknonologi Informasi (ITSP)

Refinement
- *Guidelines of corporate governance*
  - *Gratification Policies*
  - *Guidelines of meeting conduct*
  - *Violation Reporting System (Whistle Blowing System);*
  - *Company's internal control*
- *Code of conduct*
- *Guidelines of the Board of Supervisors and Directors (Board Manual)*

Creating
- *Strategic plan of information technology development (ITSP)*

Roadmap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik
Roadmap of Good Corporate Governance Implementation

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik

Assessment of Good Corporate Governance Implementation

KOMITMEN PELAKSANAAN PRINSIP GCG MELALUI ASPEK PENILAIAN

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Perum Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian *(assessment)* atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG Perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate govermance* di lingkungan Perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

COMMITMENT TO IMPLEMENT GCG PRINCIPLES THROUGH ASSESSMENT ASPECT

As a form of commitment to the implementation of GCG principles, Perum Jamkrindo conducts assessment or appraisal of GCG implementation in the Company's environment. Assessment is done in 2 (two) models, which are through self assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and assessment conducted by an independent party. The purposes of conducting assessment on GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, which are as follows:

1. Measuring the quality of the company's GCG implementation through evaluation of GCG criteria fulfillment level with the real condition applied by Perum Jamkrindo, through scoring/ valuing GCG implementation and its application quality category.
2. Identifying the strengths and weaknesses of the company's GCG implementation, and proposing improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and the application in Perum Jamkrindo.
3. Monitoring the consistency of GCG implementation at Perum Jamkrindo and obtaining inputs for improvement and development of corporate governance policies within the company's environment.

The assessment results are expected to be the basis for improvement and refinement of the implementation of GCG practices in Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practice is also expected to provide benefits to encourage the Company's management in a transparent, professional, and efficient manner so as to increase the Company's value in the form of the company's high performance trends, good Corporate image, and trust from the stakeholders (services users, employees, and society as a whole) towards Perum Jamkrindo.

The basis for the assessment/evaluation of GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 and Letter of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises.

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Overview of the history of assessment process of the Company's GCG implementation is as follows:

Pengukuran GCG *GCG Measurement*	**Tahun Buku** *Fiscal Year*	***Asssessor***	**Skor** *Score (%)*	**Kategori** *Category*
Assessment	2012	BPKP	75,880	Baik *Good*
Self Assessment	2013	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo *Self Assessment Team of Perum Jamkrindo*	90,080	Sangat Baik *Very good*
Assessment	2014	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali *Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali*	91,510	Sangat Baik *Very good*
Self Assessment	2015	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo *Self Assessment Team of Perum Jamkrindo*	91,563	Sangat Baik *Very good*
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali *Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali*	92,120	Sangat Baik *Very good*

Hasil *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo periode tahun 2012-2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The assessment result of GCG implementation at Perum Jamkrindo for the period of 2012-2016 can be summarized below:

No	**Aspek Pengujian/ Indikator/ Parameter** *Aspect of Testing/ Indicator/ Parameter*	**Bobot** *Weight*	**Capaian Tahun 2012** *Achievement 2012*		**Capaian Tahun 2013** *Achievement 2013*		**Capaian Tahun 2014** *Achievement 2014*		**Capaian Tahun 2015** *Achievement 2015*		**Capaian Tahun 2016** *Achievement 2016*	
			Skor *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan *Commitment on Sustainable Governance Implementation*	7,00	5,19	74,10	6,36	90,86	6,96	99,35	6,95	99,35	6,96	99,46
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Equity Owners*	9,00	7,43	82,52	8,46	94,04	8,12	90,19	8,11	90,07	8,21	91,18
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/ Board of Supervisors*	35,00	27,98	79,95	31,31	89,45	31,59	90,26	31,61	90,32	32,25	92,14

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Aspek Pengujian/ Indikator/ Parameter *Aspect of Testing/ Indicator/ Parameter*	Bobot *Weight*	Capaian Tahun 2012 *Achievement 2012*		Capaian Tahun 2013 *Achievement 2013*		Capaian Tahun 2014 *Achievement 2014*		Capaian Tahun 2015 *Achievement 2015*		Capaian Tahun 2016 *Achievement 2016*	
			Skor *Score*	% Capaian *Achievement*	Skor *Score*	% Capaian *Achievement*	Skor *Score*	% Capaian *Achievement*	Skor *Score*	% Capaian *Achievement*	Skor *Score*	% Capaian *Achievement*
4	Direksi *Directors*	35,00	28,87	82,49	32,31	92,32	32,93	94,09	32,94	94,12	32,94	94,12
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,00	6,42	71,28	7,89	87,66	7,91	87,9	7,95	88,32	7,76	86,23
6	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,00	-	-	3,75	75,00	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00
Skor Keseluruhan *Overall Score*		100,00	75,88	75,88	90,08	90,08	91,51	91,51	91,56	91,56	92,12	92,12
Klasifikasi *Classification*				"Baik" *"Good"*		"Sangat Baik" *"Very good"*		"Sangat Baik" *"Very good"*		"Sangat Baik" *"Very good"*		"Sangat Baik" *"Very good"*

Selama 5 (lima) tahun terakhir, skor GCG Perum Jamkrindo selalu mengalami peningkatan. Peningkatan skor yang paling signifikan terjadi di tahun 2013, yaitu sebesar 14,22%, dari skor GCG 75,88% (Baik) menjadi 90,08% (Sangat Baik).

During the last 5 (five) years, GCG score of Perum Jamkrindo has always increased. The most significant increase in scores occurred in 2013, which was 14.22%, from GCG score of 75.88% (Good) to 90.08% (Very Good).

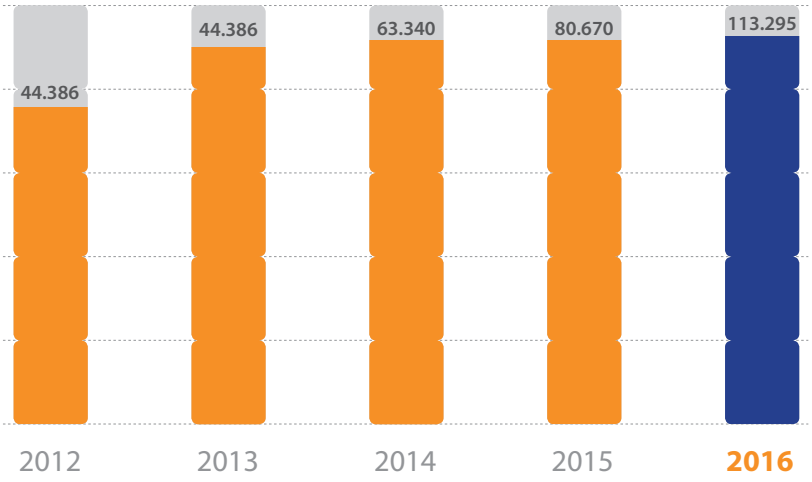

ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN BUKU 2015

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di tahun buku 2015 dilakukan melalui metode *Self Assessment* oleh Tim Internal Perum Jamkrindo, yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 55/SP/1/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Tim

ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR YEAR 2015

Assessment of GCG implementation in year 2015 was done through Self Assessment method by the Internal Team of Perum Jamkrindo, which was formed based on Assignment Letter No. 55/SP/1/XI/2015 dated 10 November 2015 on Self Assessment

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Pelaksana *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perum Jamkrindo Tahun 2015, yang beranggotakan antara lain:

Implementation Team of Good Corporate Governance (GCG) Implementation of Perum Jamkrindo Year 2015, with members such as:

Jabatan Tim *Position in Team*	**Nama** *Name*	**Jabatan** *Position*
Ketua *Head*	Achmad Sonhadji	Kepala Satuan Pengawasan Intern *Head of Internal Audit Unit*
Wakil Ketua *Vice Head*	Sudibyo Utomo	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia *Head of Human Resources Department*
Sekretaris *Secretary*	Zachri	Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan *Head of Risk Management and Compliance Department*
Anggota *Member*	1. Doni Nugroho	Kabag. Pendidikan dan Pelatihan *Head of Education and Training Department*
	2. Dodi Rinto Wibowo	Kabag. Anggaran *Head of Budgeting Department*
	3. Dwi Putra Renaldo	Kepala Seksi Kesekretariatan *Head of Secretarial Section*
	4. Faoziah Ulfah F.	Staf Satuan Pengawasan Intern *Head of Intern Audit Unit*
	5. Teguh Surya Putra	Staf Satuan Pengawasan Intern *Internal Audit Unit Staff*
	6. Suryo Tomo	Staf Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary Staff*

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	*Self Assessment*/Evaluasi *Self Assessment/Evaluation*
Penilai *Assessor*	:	Tim Pelaksana *Self Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2015 *Self Assessment Implementation Team of GCG Implementation of Perum Jamkrindo for 2015*
Metode Penilaian *Assessment Method*	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 *Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012*
Tahun Buku Penerapan *Implementation Year*	:	1 Januari - 31 Desember 2015 *1 January - 31 December 2015*
Periode Pengukuran *Measurement Period*	:	10 November - 31 Desember 2015 *10 November - 31 December 2015*

Tahapan penilaian GCG di Perusahaan telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pertemuan Pendahuluan (*kick-off meeting*)
   Pertemuan pendahuluan dan diskusi dengan manajemen untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan penilaian.

2. Kajian Dokumen
   Penilai melakukan kajian berbagai dokumen perusahaan yang diperlukan seperti manual Akuntansi, Kontrak Manajemen Tahun 2014, *Annual Report*, RKAP, Pedoman GCG (*Board Manual*, GCG, CoC), struktur organisasi, uraian

The Company's GCG assessment stages have been implemented as follows:

1. Introductory meeting (kick-off meeting)
   Preliminary meetings and discussions with the management to prepare technical matters relating to the assessment implementation.

2. Document Review
   Assessors review the necessary corporate documents such as Accounting manual, Contract Management of 2014, Annual Report, RKAP, GCG Guidelines (Board Manual, GcG, CoC), organizational structure, job description, manual

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

pekerjaan jabatan, manual prosedur sistem informasi, laporan hasil *Self Assessment* GCG Tahun 2013, laporan manajemen, risalah RPB, laporan manajemen Perusahaan Tahun 2014, risalah RPB RKAP 2014, laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014, laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Tahun 2013, laporan Keuangan Tahun 2014, laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2014, laporan evaluasi Kinerja Tahun 2014, Keputusan Dewan Pengawas RKAP Tahun 2014, Anggaran Dasar Perusahaan Tahun 2008, *Audit Charter*, *Audit Committee Charter*, RJPP 2014-2018, risalah Rapat Direksi, dan risalah Rapat Dewan Pengawas.

3. Penyebaran Kuisioner
   Kuisioner disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada parameter-parameter dalam kerangka acuan pelaksanaan penilaian penerapan GCG. Kuisioner disampaikan kepada responden untuk dilengkapi/diisi dan ditandatangani, selanjutnya disampaikan kepada penilai responden meliputi Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi, serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

4. Wawancara
   Berdasarkan hasil kuisioner dan kajian dokumen, penilai melakukan wawancara untuk melengkapi dan mengonfirmasikan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

5. Analisis dan Penyusunan *Draft* Laporan
   Berdasarkan informasi yang diperoleh, penilai melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian dan memberikan penilaian. Kertas Kerja tersebut menjadi dasar penyusunan *draft* laporan untuk disampaikan kepada pihak Perusahaan. Format laporan disusun sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan Penilaian dari Kementerian BUMN.

6. Pembahasan *Draft* Laporan
   Setelah penilai menyerahkan *draft* laporan hasil penilaian, maka selanjutnya dilakukan pembahasan dengan tim *counterpart* dari Perusahaan. Hasil pembahasan ini menjadi pertimbangan penilai untuk melakukan revisi yang dianggap perlu sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir.

7. Penyampaian Laporan Akhir
   Berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak Perusahaan,

of information system procedure, GCG Self Assessment result report of 2013, management reports, RPB minutes, Company's management reports of 2014, 2014 RPB RKAP minutes, Independent Auditor's report on the Compliance to Regulation of 2014, Independent Auditor's Report on Compliance to Internal Control of 2013, Financial Statements of 2014, Financial Report of Partnership and Community Development Program of 2014, Performance Evaluation Report of 2014, Board of Supervisors Decision RKAP of 2014, Company's Articles of Association of 2008, Audit Charter, Audit Committee Charter, RJPP 2014-2018, minutes of Directors Meeting, and minutes of Board of Supervisors Meeting.

3. Distribution of Questionnaires
   The questionnaire is prepared with questions that refer to the parameters in the terms of reference for the assessment of GCG implementation. The questionnaires are submitted to the respondents to be completed/filled in and signed, then submitted to the respondent appraisers including the Ministry of SOE, Board of Supervisors, Directors, and officials one level below the Directors.

4. Interview
   Based on the results of the questionnaire and document review, the assessor conducts an interview to complete and confirm the information previously obtained. Interviews are conducted with the Ministry of SOE, Board of Supervisors, Directors, and officials one level below the Directors.

5. Analysis and Drafting of Reports
   Based on the information obtained, the assessor completes the Work Assessment Papers and provides an assessment. The Work Paper becomes the basis to prepare the draft report to be submitted to the Company. The report format is prepared in accordance with the Terms of Reference of Assessment of the Ministry of SOE.

6. Discussion of Draft Report
   After the assessor submits the draft report of the assessment results, then the next discussion is done with the counterpart team of the Company. The result of this discussion becomes the assessor's consideration to make necessary revisions as the material to prepare the Final Report.

7. Submission of Final Report
   Based on the discussion result with the Company, the

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Penilai melakukan revisi untuk selanjutnya disusun Laporan Akhir. Laporan Akhir disampaikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal.

assessor revises for subsequent preparation of the Final Report. The Final Report is submitted to the Board of Supervisors, Directors, and Equity Owners.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perum Jamkrindo memperoleh skor capaian sebesar 91,563 dari skor maksimal 100 atau 91,56% dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", dengan rincian sebagai berikut:

Based on the assessment results, Perum Jamkrindo obtained an achievement score of 91.563 from a maximum score of 100 or 91.56% with "EXCELLENT" qualification, with details as follows:

	Aspek *Aspect*	**Bobot** *Weight*	**Nilai** *Amount*	**Pencapaian** *Achievement (%)*
	1	2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation*	7.000	6.954	99.349
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal *Shareholders and RPB/Equity Owners*	9.000	8.106	90.066
III	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	35.000	31.613	90.322
IV	Direksi *Directors*	35.000	32.941	94.119
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9.000	7.949	88.319
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5.000	4.000	80.000
	Skor Keseluruhan *Overall Score*	100.000	91.563	91.563
	Peringkat Kualitas Penerapan GCG *Rank of the GCG Implementation Quality*		"Sangat Baik" *"Very good"*	

Klasifikasi Kualitas Penerapan *Assessment*

Nilai di atas 85	:	Sangat Baik
75 < Nilai ≤ 85	:	Baik
60 < Nilai ≤ 75	:	Cukup Baik
50 < Nilai ≤ 60	:	Kurang Baik
Nilai ≤ 50	:	Tidak Baik

Classification of Assessment Implementation Quality

Amount above 85	:	*Very good*
75 < Amount ≤ 85	:	*Good*
60 < Amount ≤ 75	:	*Fair*
50 < Amount ≤ 60	:	*Not Good*
Amount ≤ 50	:	*Bad*

Rekomendasi/*Area of Improvement* dan Tindak Lanjut oleh Manajemen

Hasil penilaian atau *assessment* GCG memberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang menjadi perhatian Perusahaan untuk menindaklanjutinya. Hasil *Area of Improvement* atas *assessment* penerapan GCG di tahun buku 2015, dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Recommendations/Areas of Improvement and Follow-Up by the Management

The GCG assessment results provide some improvement recommendations which become a concern to the Company to follow up the result of Areas of Improvement on GCG implementation assessment for 2015 fiscal year and follow-up carried out by the Management in 2016 are as follows:

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi *Assessment* Tahun Buku 2015 *Assessment Recommendations for 2015 Fiscal Year*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up In 2016*
I	Pemilik Modal *Equity Owner*	
	Seluruh jajaran Direksi agar memutuskan dan menugaskan salah satu Direktur sebagai penanggungjawab penerapan dan pemantauan GCG, agar terdapat dukungan seluruh Direksi dalam pelaksanaan penugasan tersebut. *All Board of Directors to decide and assign one of the directors to be responsible for GCG implementation and monitoring, so that there is a support from all directors in implementing the assignment.*	Dalam Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 47/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama Direktur Utama melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh Direktorat. *In the Directors' Decree of Perum Jamkrindo No. 47/Kep-Dir/IV/2016 dated 29 April 2016 on Description of Job Position explains that one of the main responsibilities of the President Director in to apply and monitor the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at all Directorates.*
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal *Shareholders and RPB/Equity Owners*	
1	Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal agar mengangkat Dewan Pengawas Independen, dan menyebutkan secara eksplisit dalam surat pengangkatannya. Hal ini agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif, karena terdapat unsur pengawas yang independen dan bebas kepentingan. *Ministry of SOE as the Equity Owner to appoint Independent Board of Supervisors, and to explicitly mention it in the appointment letter. This is so that the supervisory function can run more effectively, because there are elements of independent and free of interest supervisors.*	Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal telah mengangkat Dewan Pengawas Independen seperti tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. *Ministry of SOE as the Equity Owner has appointed Independent Board of Supervisors as stipulated in Ministry of SOE Decree as the Representative of Government as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 on the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.*
2	Pemilik Modal agar memberikan persetujuan atas rencana penyertaan modal Perum Jamkrindo pada PT Pefindo Biro Kredit. *Equity owner to give approval on the plan of equity participation of Perum Jamkrindo at PT Pefindo Biro Kredit.*	Rencana penyertaan modal Perum Jamkrindo pada PT Pefindo Biro Kredit tidak disetujui oleh Pemilik Modal sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. S-76/MBU/D5/02/2016. *Perum Jamkrindo's capital participation plan at PT Pefindo Credit Bureau is not approved by the Equity Owner in accordance with the Minister of SOE Letter No. S-76/MBU/D5/02/2016.*
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Board of Supervisors*	
1	Dewan Pengawas sebaiknya melengkapi laporan tugas pengawasan yang disampaikan kepada Pemilik Modal terkait respon/tindaklanjut Dewan Pengawas atas saran/permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan arahan dewan Pengawas atas pengembangan SDM termasuk rencana suksesi pejabat satu *level* di bawah Direksi. *Board of Supervisors should complete the monitoring tasks report to be submitted to the Equity Owners related to the response/follow up of the Board of Supervisors on suggestions/concerns or complaints from the stakeholders and directives from the board of supervisors on the HR development including a succession plan for one level officials under the Directors.*	Dewan Pengawas selalu menyampaikan laporan tugas pengawasan setiap triwulanan yang disampaikan kepada Pemilik Modal dan ditembuskan kepada Direksi Perum Jamkrindo. *The Board of Supervisors always submits its monitoring duty report every quarter that is delivered to the Equity Owner and copied to the Directors of Perum Jamkrindo*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi *Assessment* Tahun Buku 2015 *Assessment Recommendations for 2015 Fiscal Year*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up In 2016*
2	Dewan Pengawas agar menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap kinerja masing-masing Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. *Board of Supervisors to set individual performance targets and conduct self assessment on the performance of each Board of Supervisors in accordance with the stipulated provisions.*	Dewan Pengawas telah menyusun target kinerja kolegial setiap tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan melakukan penilaian secara triwulanan yang dituangkan dalam bentuk laporan tugas pengawasan yang disampaikan kepada Pemilik Modal. *The Board of Supervisors has drafted collegial performance targets each year that are an integral part of the Company's Work Plan and Budget and performs quarterly assessments that are outlined in the monitoring duty report submitted to the Equity Owner.*
IV	Direksi *Directors*	
1	Memperbarui kebijakan sistem penilaian kinerja karyawan yang masih menggunakan kebijakan Perum Sarana Pengembangan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi saat ini. *Update the employee performance appraisal system policy that still uses the policy of Perum Sarana Pengembangan Usaha in accordance with the applicable provisions and current conditions.*	Masih dilakukan investarisasi peraturan-peraturan yang menggunakan Perum Sarana Pengembangan Usaha. *Inventory of regulations that are using Perum Sarana Pengembangan Usaha is still underway.*
2	Menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi, yang disepakati antara pemegang jabatan dengan atasan langsung. *Establish performance contract for each position within the organizational structure, which is agreed between the position holder and the immediate superior.*	Perusahaan telah menetapkan kontrak kinerja korporat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKAP dan disahkan oleh Pemilik Modal. Namun sampai saat ini Perusahaan belum menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan. *The Company has established a corporate performance contract that is an integral part of the RKAP and authorized by the Equity Owner. However, until now the Company has not set performance contract for each position.*
3	Direksi agar melakukan audit TI dan menyampaikan laporan pelaksanaan IT *Master Plan* dan ITDP serta hasil audit TI kepada Dewan Pengawas secara berkala. *Directors to conduct IT audits and submit implementation reports of IT Master Plan and ITDP as well as IT audit results to the Board of Supervisors periodically.*	Perusahaan telah melakukan audit TI yang dilakukan oleh SPI bersama mitra dari Konsultan IT. Perusahaan juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan Information Technology Strategic Plan (ITSP) secara triwulanan. *The Company has conducted IT audits conducted by SPI with partners from IT Consultants. The Company has also submitted a report on the implementation of Information Technology Strategic Plan (ITSP) on a quarterly basis.*
4	Perusahaan sebaiknya melakukan survei tingkat kepuasan pemasok terhadap Perusahaan secara berkala untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pengadaan Perusahaan. *The Company should periodically conduct a supplier satisfaction survey of the Company to obtain feedback on the Company's procurement operations.*	Perusahaan telah melakukan survei tingkat kepuasan pemasok terhadap Perusahaan secara berkala untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pengadaan Perusahaan. *The Company has conducted a periodic supplier satisfaction survey towards the Company to obtain feedback on the Company's procurement implementation.*
5	Melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal pada tingkat entitas, baik dilakukan oleh SPI atau meminta bantuan pihak independen dan menerbitkan *internal control* report sebagai hasil dari evaluasi tersebut. *Evaluate the effectiveness of the internal control system at the entity level, whether by SPI or request assistance from an independent party and issue an internal control report as a result of the evaluation.*	1. Perusahaan telah melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal pada tingkat entitas, baik oleh SPI maupun auditor eksternal yang dilakukan setiap tahun. 2. Perusahaan juga bekerja sama dengan pihak independen (KAP PwC) dalam melakukan *review* atas *internal control* Perusahaan. *1. The Company has evaluated the effectiveness of the internal control system at the entity level, both by SPI and external auditors conducted annually.* *2. The Company also cooperates with independent parties (KAP PwC) in reviewing the Company's internal control.*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi *Assessment* Tahun Buku 2015 *Assessment Recommendations for 2015 Fiscal Year*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up In 2016*
6	Menyusun pedoman terkait pelaksanaan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan. *Develop guidelines regarding the implementation and reporting of the Company's Internal Control System.*	Seluruh aturan Perusahaan yang tertuang dalam Kebijakan (Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, SOP, Surat Edaran, dll) merupakan pedoman yang digunakan Perusahaan dalam menjalankan bisnis. *All company regulations contained in the Policy (Directors Regulation, Directors Decree, SOP, Circular Letter, etc.) are guidelines used by the Company in conducting business.*
7	Melakukan ***review/assessment*** atas pelaksanaan fungsi *audit intern*, minimal setiap lima tahun sekali dengan bantuan konsultan independen. *Conducting review/assessment of the implementation of the internal audit function, at least every five years with the help of an independent consultant.*	Perusahaan belum melakukan review/assessment atas pelaksanaan fungsi *audit intern*, minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dengan bantuan konsultan independen. *The Company has not conducted review/assessment of the implementation of the internal audit function, at least once every 5 (five) years with the help of an independent consultant.*
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	
1	Membuat kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran *website*. *Establish policy on website management and updating.*	Perusahaan telah membuat kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran *website*. *Website* selalu dimutakhirkan setiap ada kegiatan dan informasi Perusahaan. *The company has made a policy on managing and updating the website. The website is always updated every time there is a Company activity and information.*
2	Melengkapi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyajikan ikhtisar data keuangan penting, rasio-rasio keuangan secara umum selama 5 (lima) tahun buku. *Complete the Annual Report and Financial Statements in accordance with the laws and regulations, which presents an overview of important financial data, financial ratios in general for 5 (five) fiscal years.*	Perusahaan telah melengkapi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyajikan ikhtisar data keuangan penting, rasio-rasio keuangan secara umum. *The Company has completed the Annual Report and Financial Statements in accordance with the laws and regulations, which presents highlights of important financial data, financial ratios in general.*

v = sudah ditindaklanjuti
x = belum ditindaklanjuti

v = sudah ditindaklanjuti
x = belum ditindaklanjuti

ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN BUKU 2016

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2016 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 65/SPK/4.2/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR YEAR 2016

Assessment was also done for year 2016, aiming to provide recommendation for sustainable improvement on the Company's GCG implementation. The assessment process was done based on Work Assignment Letter No. 65/SPK/4.2/XI/2016 dated 1 November 2016

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	*Assessment*/Penilaian
Assessor/Penilai	:	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali *Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali*
Metode Penilaian *Assessment Method*	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 *Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Tahun Buku Penerapan *Implementation Year*	:	1 Januari - 31 Desember 2016 *Period of 1 January - 31 December 2016*
Periode Pengukuran *Measurement Period*	:	7 November 2016 - 3 Januari 2017 *7 November 2016 - 3 January 2017*

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamrkindo tahun 2016 mencapai total skor sebesar 92,120 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The assessment result of Perum Jamkrindo GCG assessment in 2016 achieved a total score of 92.120 with "EXCELLENT" qualification, which can be seen in the following table.

	Aspek *Aspect*	**Bobot** *Weight*	**Nilai** *Amount*	**Pencapaian** *(%)* *Achievement*
	1	2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation*	7.000	6.962	99.456
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal *Shareholders and RPB/Equity Owners*	9.000	8.206	91.180
III	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	35.000	32.249	92.139
IV	Direksi *Directors*	35.000	32.943	94.124
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9.000	7.760	86.225
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5.000	4.000	80.000
Skor Keseluruhan *Overall Score*		100.000	92.120	92.120
Peringkat Kualitas Penerapan GCG *Rank of the GCG Implementation Quality*		"Sangat Baik" *"Very Good"*		

Klasifikasi Kualitas Penerapan *Assessment*
Classification of Assessment Implementation Quality

Nilai di atas 85 *Score above 85*	:	Sangat Baik *Very good*
75 < Nilai ≤ 85 *75 < Score ≤ 85*	:	Baik *Good*
60 < Nilai ≤ 75 *60 < Score ≤ 75*	:	Cukup Baik *Fair*
50 < Nilai ≤ 60 *50 < Score ≤ 60*	:	Kurang Baik *Not Good*
Nilai ≤ 50 *Score ≤ 50*	:	Tidak Baik *Bad*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Area of Improvement

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perum Jamkrindo dinilai telah memiliki sistem dan infrastruktur yang sangat baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki guna mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa parameter yang perlu diperbaiki diuraikan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar Perum Jamkrindo dan Pemerintah, sebagai Pengawas Independen.

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
   a. Jangka Waktu Persetujuan Dewan Pengawas atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi.
      Board Manual Dewan Pengawas belum mengatur jangka waktu pemberian tanggapan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi.
   b. Target Kinerja dan Penilaian Kinerja untuk Masing-masing Dewan Pengawas.
      Dewan Pengawas tidak menetapkan target kinerja dan penilaian kinerja untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas (individu), penilaian kinerja Dewan Pengawas masih dilakukan secara kolegial.

3. Direksi
   a. Pemenuhan target kinerja Perusahaan.
      Tingkat pencapaian kinerja Direksi (KPI) yang telah dilaporkan oleh Direksi kepada Pemilik Modal masih berbentuk kolegial, belum terdapat pencapaian kinerja Direksi per individu.
   b. Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk).
      Perusahaan belum memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).

4. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
   a. Terdapat perbedaan informasi antara *Annual Report* Tahun 2015 dengan Laporan *Assessment* GCG Tahun 2015 mengenai susunan anggota Komite Audit.
   b. Ketersediaan informasi dalam *website* Perusahaan.
      Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran *website*.

Area of Improvement

Based on the assessment result, Perum Jamkrindo is considered to have a very good system and infrastructure, but there are some areas that still need to be improved in order to support the implementation of Good Corporate Governance principles. Some parameters that need to be improved are described as follows:

1. Shareholders and GMS/Equity Owners
   Shareholders and GMS/Equity Owners have not set the members of the Board of Supervisors who come from outside Perum Jamkrindo and the Government, as an Independent Supervisor.

2. Board of Commissioners/Board of Supervisors
   a. The Approval Period of the Board of Supervisors on the draft of Work Plan and Corporate Budget (RKAP) by the Directors.
      Board Manual of the Board of Supervisors has not regulated the period of response to the Company's Long Term Plan (RJPP) draft and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) proposed by the Directors.
   b. Performance Target and Performance Assessment for Each of Board of Supervisors.
      Board of Supervisors does not set performance targets and performance assessment for each member of the Board of Supervisors (individual), performance assessment of the Board of Supervisors is still conducted collectively.

3. Directors
   a. Meeting the Company's performance target
      The performance achievement level of the Directors (KPI) that has been reported by the Directors to the Equity Owners is still in the form of collective, not yet performance of individual director.
   b. Quality improvement (product quality control system).
      The company has not had quality policy (product quality control system).

4. Disclosure of Information and Transparency.
   a. There is a difference of information on the 2015 Annual Report and 2015 GCG Assessment Report on the composition of the Audit Committee members.
   b. Availability of information on the Company's website.
      The company has not had a policy on managing and updating the website.

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Perum Jamkrindo, rekomendasi yang diusulkan kepada organ Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal agar mengangkat Dewan Pengawas Independen, dan menyebutkan secara eksplisit dalam surat pengangkatannya. Hal ini agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif, karena terdapat unsur pengawas yang independen dan bebas kepentingan.

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
   a. Dalam *board manual* Dewan Pengawas agar ditetapkan jangka waktu pemberian tanggapan atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi supaya terdapat kepastian waktu dalam pengajuan RKAP ke *stakeholders*.
   b. Hendaknya Dewan Pengawas menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assesment*) terhadap kinerja masing-masing Dewan Pengawas dan melaporkannya dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal.

3. Direksi
   a. Hendaknya Direksi menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assesment*) terhadap kinerja masing-masing Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.
   b. Direksi agar melakukan sertifikasi standar mutu dengan menunjuk lembaga yang kompeten untuk pelaksanaan sertifikasi atas mutu tersebut.
4. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
   a. Hendaknya manajemen meningkatkan fungsi koordinasi agar tidak terdapat ketidaksesuaian informasi terhadap data yang akan disajikan dalam laporan tahunan (*Annual Report*).
   b. Membuat panduan pengelolaan *website* termasuk panduan pembaharuan isi *website*.

Sesuai dengan rekomendasi di atas, Satuan Pengawasan Intern telah berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka menindaklanjuti Area of Improvement tersebut di tahun 2017.

Recommendation

Based on the assessment result on Perum Jamkrindo GCG assessment, the recommendations proposed to the company organs are as follows:

1. Shareholders and GMS/Equity Owners
   Ministry of SOE as the Equity Owner shall appoint Independent Board of Supervisors, and to explicitly mention it explicitly in the appointment letter. This is so that the supervisory function can run more effectively, because there are elements of independent and free of interest supervisors.

2. Board of Commissioners/Board of Supervisors
   a. The Board Manual of the Board of Supervisors should determine the period of responding time to RKAP draft proposed by the Directors so that there is a certainty of time in submitting RKAP to stakeholders.
   b. The Board of Supervisors should set up individual performance targets and conduct self-assessment of the performance of each member of Board of Supervisors and report them in the Board of Supervisors Monitoring Report to the Equity Owner.

3. Directors
   a. The Directors should set up individual performance targets and conduct self-assessment of the performance of each member of Directors and report them to the Board of Supervisors and the Equity Owner.

   b. The Directors should certify the quality standard by appointing competent institution to certify the quality.

4. Disclosure of Information and Transparency.
   a. The management should increase the coordination function so that there are no inconsistency of information against the data to be presented in the Annual Report.
   b. Prepare website management guideline including guideline to update the website content.

In accordance with the above recommendations, the Internal Audit Unit has coordinated with the relevant Working Units in order to follow up the Areas of Improvement in 2017.

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang telah diperbaharui melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016.

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*". Penyelenggaraan *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan *role model* bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

1. Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil.
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.
3. Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Evaluasi kinerja KPKU tersebut didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu "Proses", dan "Hasil". Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian diatas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung melalui Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan "*Site Visit*" ke Perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh Perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

ASSESSMENT CRITERIA OF SUPERIOR PERFORMANCE (KPKU)

In order to improve the capability and competitiveness of SOEs, Ministry of SOE decided to implement SOEs performance management and control system based on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). This is outlined in the State Ministry of SOE Letter No. S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012 on Performance Reporting Based on Approach of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE, which has been updated with Secretary of the Ministry of SOE Letter No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016 on the Implementation of Assessment of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE of 2016.

Assessment System for SOE Performance Evaluation is based on the methods outlined in Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) documents as established by the Ministry of SOE that adopt and adapt the "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence". The organization of Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. In addition, the Company also applies the Malcolm Baldrige criteria to strengthen competitiveness through efforts of:

1. Improving organizational performance practice, capability, and results.
2. Facilitate communication and share information on best practices among companies of all types of industries.
3. Provide a tool to understand and manage company performance, as well as a tool to guide planning and improving learning.

KPKU performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions, which are "Process", and "Result". The process of applying KPKU is done through 2 (two) major stages, which are "On-desk Review" stage, which is on-paper assessment based on KPKU response in previous year and supporting information through Method/System (Approach), Deployment, Learning, and Integration (Integration) or abbreviated ADLI; as well as the "Site Visit" stage to the company for interviews and clarification of KPKU response to the Directors and other Senior Leaders appointed by the company as well as verification of various data and information. While the factors used to evaluate the Company's results are Level, Trend, Comparison, and Integration (LeTCI).

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Kedua dimensi evaluasi, yaitu dimensi "Proses" dan dimensi "Hasil" sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

The two dimensions of evaluation, the "Process" dimension and the "Results" dimension are very important for evaluation and feedback. Based on the above two stages, a report is prepared containing Score and Feedback containing Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths which can be used as a basis for improvement, both on process and business outcomes.

Hasil skor dan kategorisasi atas penilaian penerapan KPKU adalah sebagai berikut:

The results of the scores and categorization of KPKU implementation assessment are as follows:

Skala Skor *Scale of Score*	**Kategori** *Categories*
876 - 1.000	*World Class Leader*
776 - 875	*Benchmark Leader*
676 - 775	*Industry Leader*
576 - 675	*Emerging Industry Leader*
476 - 575	*Good Performance*
376 - 475	*Early Improvement*
276 - 375	*Early Result*
0 - 275	*Early Development*

Penilaian KPKU Tahun Buku 2015 dan Tindak Lanjut di Tahun 2016

Assessment of KPKU Fiscal Year 2015 and the follow-up in 2016

Hasil penilaian KPKU tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Results of KPKU assessment in 2015 are as follows:

Kategori *Category*	**Maksimal Skor** *Maximum Score*	**Persentase** *Percentage (%)*	**Skor** *Score (nominal)*
	(1)	**(2)**	**(3 = 1x2)**
Kategori 1: Kepemimpinan *Category 1: Leadership*			
1.1. Kepemimpinan Senior *Senior Leadership*	70	50%	35,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *Good Corporate Governance and Responsibility*	50	50%	22,50
Kategori 2: Perencanaan Strategis *Category 2: Strategic Planning*			
2.1. Pengembangan Strategi *Strategic Development*	40	50%	20,00
2.2. Implementasi Strategi *Implementation Strategy*	45	50%	22,50
Kategori 3: Fokus Pelanggan *Category 3: Customer Focus*			
3.1. Suara Pelanggan *Customer's Feedback*	45	50%	22,50

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Kategori *Category*	**Maksimal Skor** *Maximum Score*	**Persentase** *Percentage (%)*	**Skor** *Score (nominal)*
	(1)	**(2)**	**(3 = 1x2)**
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan *Customer Engagement*	40	45%	18,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan *Category 4: Measurement, Analysis and Knowledge Management*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *Measurement, Analysis and Improvement of Company Performance*	45	45%	20,25
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi *Knowledge Management, Information Management and Information Technology*	45	45%	20,25
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja *Category 5: Focus on Human Resource*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja *Human Resource Environment*	40	50%	20,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja *Employee Engagement*	45	45%	20,25
Kategori 6: Fokus Operasi *Category 6: Focus on Operation*			
6.1. Proses Kerja *Work process*	45	50%	22,50
6.2. Efektivitas Operasional *Operational Effectiveness*	40	50%	20,00
Kategori 7: Dimensi Hasil *Category 7: Results Dimension*			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses *Product and Processes Result/Performance*	110	45%	49,50
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *Customer Focus Result/Performance*	85	40%	36,00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *Human Resource Focus Results/Performance*	85	40%	32,00
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola *Leadership and Governance Result/Performance*	80	45%	36,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar *Financial and Market Result/Performance*	90	45%	40,50
Jumlah *Total*	1.000		460,25
Kategori *Category*	"Good Performance"		

Berikut disampaikan *Opportunity of Improvement* sebagai hasil penilaian KPKU tahun 2015 yang menjadi rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut manajemen yang dilakukan di tahun 2016.

The following is presented based on Opportunity of Improvement as the outcomes of KPKU assessment in 2015 which serves as a recommendation for improvement and management follow-up conducted in 2016..

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
A	Dimensi "Proses" *Process" Dimension*	
1	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempunyai metode dalam berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan perekonomian dengan cara: a. Menetapkan dan mendistibusikan anggaran untuk kegiatan Bina Lingkungan sesuai dengan kelasnya: Kelas A (6 Kanca) diberi dana 180 Juta per Kancab; Kelas B (7 Kanca) diberi dana 100 Juta per Kancab; Kelas C (22 Kanca) diberi dana 80 Juta per Kanca b. Menetapkan klasifikasi dan jenis bantuan yaitu (Perbaikan sarana prasarana umum ruang sekolah, rumah ibadah, pembagian sembako, penghijauan, korban bencana alam c. Mengevaluasi & menetapkan proposal pendanaan Bina Lingkungan yang dapat direalisasikan **Namun** pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat ini belum efektif dan belum berjalan konsisten, seperti tertera pada Profil Organisasi pada evaluasi tantangan strategis di aspek tanggung jawab sosial adalah tingkat pengembalian yang belum optimal dan pengembangan UMKM binaan belum *continue* dan terintegrasi masih bersifat *temporary* dan *sporadis*. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas kebermanfaatan bantuan dana bagi kegiatan Bina lingkungan dan berdampak kepada Efisiensi penyaluran dana pinjaman Program Kemitraan bagi kemandirian usaha dari UMKM binaan yang tersebar diseluruh provinsi Indonesia di tempat kantor cabang Perusahaan berada. *Although Perum Jamkrindo has a method in place that contributes to improve the welfare of community, the environment and the economy by way of:* *a. Establishing and distributing a budget for Community Development activities, in accordance the division of class: Class A (6 Kanca) received Rp180 million per Kancab; Class B (7 Kanca) received Rp100 million per Kancab; Class C (22 Kanca) received Rp80 Million per Kancab* *b. Determining classification and type of assistance i.e. (Improvement of public facilities, school classrooms, religious facilities, distribution of basic needs, reforestation, helpings victims of natural disasters* *c. Evaluating & establishing a realizable Environmental Development funding proposal* ***However**, implementation of community social activities has not been effective and has not been run consistently, as shown on the Organization Profile on evaluation of strategic challenges, within aspects of social responsibility, the return rate has not been optimal and the development of the targeted MSME is yet sustainable and integrated, but temporary and sporadic. This may affect the effectiveness of funding usefulness for Community Development activities, and affect the Efficiency of the Partnership Program's loan disbursement for business independence of MSME assisted in all Indonesian provinces where the Company's branch office is located.*	a. Rencana Program Kerja penyaluran dan realisasi PKBL b. Mekanisme monitoring dan evaluasi penyaluran PKBL c. Mekanisme penagihan (*collecting*) dana Program Kemitraan d. Program pengembangan & Pembinaan mitra Bina Lingkungan secara nasional *a. Plan of distribution and realization of PKBL Work Program* *b. Monitoring and evaluation mechanism of PKBL distribution* *c. Collection mechanism of Partnership Program funding* *d. Development & Building Program with Community Development Partners nationally*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
2	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai rencana strategis dalam mengantisipasi dampak potensial terhadap tenaga kerja jika terjadi perubahan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas, dengan cara: a. Menetapkan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program. b. Menganalisa *gap* antara kebutuhan serta menyusun program pemenuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja. **Namun** program pengelolaan SDM (HRMS) baru diimplementasikan belum bisa dilihat efektivitas penggunaannya serta perlu di *review* atas sistem yang berjalan agar lebih efektif. Hal ini dapat mempengaruhi strategi Perusahaan dalam meningkatkan pasar dan mendekatkan diri kepada pelanggan dengan membuka kantor cabang sampai tingkat kotamadya di seluruh Indonesia, yang mana strategi ini membutuhkan jumlah orang (kapasitas) yang cukup dan keahlian/pengetahuan (kapasitas) yang memadai. *Although Perum Jamkrindo has a strategic plan in anticipating potential impacts on workforce, if there is a change of capacity requirement and capability:* *a. Define the capacity and capability requirements needed to implement the program.* *b. Analyze the gap between the needs as well as develop a program of capacity fulfillment and labor capability.* ***However**, the newly implemented HR management program (HRMS) has not been able to see its effectiveness and needs to be reviewed on the running system to be more effective. This may affect Company's strategy to improve the market and to be closer to the customers by opening branch offices down to municipal levels across Indonesia; this strategy requires a sufficient number of people (capacity) and adequate knowledge/skills (capacity).*	Perusahaan masih dalam tahap mengembangkan HRMS. *The Company is still in the process of developing HRMS.*
3	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempertimbangkan pelanggan pesaing, calon pelanggan dan pangsa pasar dalam proses segmentasi, dengan cara melakukan kajian produk dan pangsa pasar produk yang dimiliki serta mengusulkan perubahan untuk dapat meningkatkan pemasaran. **Namun** belum melakukan *review* terhadap sistem kepuasan pelanggan yang dilakukan masing-masing segmen pelanggan. hal ini dapat berdampak bagi ketepatan dan kecepatan upaya Perusahaan dalam memenuhi harapan dan persyaratan pelangggan guna mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan beberapa strategi membuka kantor cabang diseluruh kota di Indonesia. *Although Perum Jamkrindo has considered its competitors, customers, potential customers and market share in the segmentation process, by way of conducting product reviews and market share of owned products and proposing changes to improve marketing, **however**, it has not conducted a review of customer satisfaction system on every customer segment. This can affect Company's accuracy and speed in meeting expectations and requirements of the customers to maintain and expand the market share with several strategies, e.g. Opening branch offices throughout the city in Indonesia.*	a. Implementasi survey kepuasan pelanggan b. *Review* terhadap hasil *survey* c. Langkah perbaikan dalam meningkatkan kepuasan dan harapan pelanggan *a. Implementation of customer satisfaction survey* *b. Reviewing survey results* *c. Steps of improvement in increasing customer satisfaction and expectations*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
4	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempunyai metode dalam memanfaatkan hasil *review* kinerja untuk dikomunikasikan sebagai pembelajaran dan acuan praktik terbaik keseluruh unit kerja dan lintas proses kerja yaitu dengan cara: a. Rekapitulasi capaian kinerja dari setiap unit kerja yang ada dalam aplikasi ICPR (*Intregited Corporated Performance Report*) dievaluasi penyebab tercapainya dan tidak tercapainya KPI dalam rapat evaluasi kinerja. b. Memperbaharui dan menetapkan Peraturan Direksi tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Kinerja Perusahaan dan Kantor Cabang dalam rangka pemberian insentif berdasarkan surat keputusan Direksi (Perdir No 25/Perdir/IV/2014) c. Memberikan *reward* dan kesempatan *sharing* kepada unit kerja dan *improvement* yang berprestasi dan berkarya. **Namun** pelaksanaan *sharing knowledge*/berbagi pengetahuan dan juga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum dapat terjadual rutin dan tersentralisir seperti tersirat pada perencanaan strategis yang dirasakan perlu adanya Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) yang dapat dipergunakan bagi karyawan Jamkrindo dan masyarakat umum. Hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran biaya yang cukup besar dalam mengadakan pelatihan bagi karyawan baru yang akan ditempatkan di kantor cabang dan biaya pembinaan/*sharing knowledge* pada saat pergantian posisi karyawan mutasi dan pensiun. *Although Perum Jamkrindo has methods in place in utilizing results of performance review to be communicated as a learning and best practice reference throughout work units and work processes, by way of:* *a. Summarizing performance achievement of each work unit in ICPR application (Integrated Corporate Performance Report) which evaluates the cause of the achievement or non-achievement of KPI during performance evaluation meeting.* *b. Renewing and enacting the Board of Directors Regulations on Conditions and Procedures for performance appraisal and Branch Offices in the framework of granting incentives, based on the Board of Directors' decree (Persdir No. 25/Perdir/IV/2014)* *c. Providing rewards and sharing opportunities to work units and improvements that excel and work.* ***However**, implementation of knowledge sharing, education and training have not been conducted routinely and centralized, as implied in the strategic planning which is thought as essential for Pusdiklat (Education and Training Center) in which, it can be used by Jamkrindo employees and general public/society. This may affect a substantial expense in training for the new employees to be placed in the branch office and the cost of sharing knowledge at the time of changing employee position due to mutation and retirement.*	a. Rencana Program Diklat dan pengembangan SDM b. Rencana Program Hari Mutu c. Program *in house training* d. Program diklat untuk karyawan baru dan persiapan pensiun *a. Training Program Plan and human resource development* *b. Quality Day Program Plan* *c. In-house training program* *d. Training program for new employees and preparation for retirement*
5	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempunyai sistem pengembangan dan pembelajaran yang diterapkan Perusahaan untuk mendukung kebutuhan SDM dalam organisasi, dengan cara membuat *Training Plan* berdasarkan analisa & identifikasi kebutuhan *training* bagi Tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang yang diusulkan pada saat penyusunan RKAP & RJPP. **Namun** mekanisme/cara yang dilakukan belum sistematis karena Perum Jamkrindo belum sepenuhnya menerapkan indikator/ukuran keberhasilan (efektivitas) *outputnya* sistem pembelajarannya dan belum dilakukan *review* atas sistem yang berjalan, hal ini dkhawatirkan program-program yang telah dilaksanakanakan kurang efektif. *Although Perum Jamkrindo has already a system of development and learning applied by the Company to support the needs of its human resource in the organization, by creating a Training Plan based on the analysis and identification of training needs for the short and long term workforce, proposed during RKAP & RJPP preparation, **however**, the mechanism/way that has been executed is not systematic because Perum Jamkrindo has not fully implemented the indicator/measurement of success (effectiveness) of the learning system output and has not conducted a review on the running system, it is feared that the programs that have been implemented will be less effective.*	a. Penerapan indikator ukuran keberhasilan diklat - *Post Test, Pre Test* - Hari Mutu - Hasil Asesmen b. Review atau evaluasi terhadap efektivitas sistem pengembangan SDM & Diklat *a. Implementation of indicators of training success measure* - *Post Test, Pre Test* - *Quality Day* - *Assessment Result* *b. Review or evaluation on the effectiveness of HR & Training development system*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
6	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasok dengan cara : a. Analisa kinerja *vendor* (Ketepatan waktu, *delivery*, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas) yang sedang atau telah menyelesaikan kontrak kerjanya. b. Menetapkan dan membuat daftar *vendor* yang berkinerja baik dan berkinerja buruk. **Namun** metode ini baru diterapkan 1 tahun belakangan dan belum dievaluasi efektivitas dari metode pengukuran kinerja pemasok, hal ini terbukti dengan tidak adanya data kinerja pemasok. Hal ini akan mempengaruhi ketepatan (waktu, harga, jumlah & spesifikasi) dalam memenuhi kebutuhan dari semua unit Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has measured and evaluated its supplier's performance by way of:* *a. Analyzing vendor performance (Timeliness, delivery, appropriate price, exact quantity, and exact quality) that are completing or has completed their contract work.* *b. Defining and creating a list of suppliers that perform well and poorly.* ***However**, this method has only been implemented for the past year and has not evaluated the effectiveness of supplier's performance measurement method, as evidenced by the absence of supplier performance data. This will affect the accuracy (time, price, quantity & specification) in meeting the needs of all of Company's units.*	a. Metode pengukuran kinerja *vendor* b. Evaluasi efektivitas kinerja *vendor* *a. Suppliers' performance measurement method* *b. Evaluate suppliers' performance effectiveness*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
7	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran dan menyampaikan 89% Data (110 data dari 124 data yang dipersyaratkan) dari kinerja Produk dan Proses sampai dengan kinerja Finansial dan Pasar, **Namun** beberapa data menurun: *LEVEL*: - 4 Data *No Level* karena dilakukan pengukuran pada saat ini yaitu (Jumlah *bank on line*, indeks kepuasan Kanwil, Indeks Kepuasan Dimensi *Responsivenes, Index Customer Engagement*) - 36 Data berkinerja sama dengan tahun sebelumnya - 31 Data *Poor* yaitu menurun dibanding dengan kinerja tahun sebelumnya *TREND*: - 5 Data *No Trend* yaitu kinerja hanya mempunyai 1 periode pengukuran - 19 Data *Adverses* yaitu menurun selama 3 tahun terakhir - 17 Data *Unfavorable* yaitu cenderung menurun selama 3 tahun terakhir *COMPARISON*: - 13 Data *No Comparison* yatu tidak ada data pembanding *INTEGRATION*: - 14 Data belum dilakukan pengukuran dan belum tersajikan, yaitu (Harga yang ditawarkan, Produktivitas *Sales*, Skor SMK3, Waktu tanggap darurat, indeks kepuasan pelanggan pesaing, Loyalitas pelanggan, Retensi pelanggan, *Indeks Customer Engagement*, Pencapaian Kinerja Tenaga Kerja, Realisasi Mitigasi Risiko, Realisasi *Core Competence* terkini dan mendatang, *Asset Utilization*, *Lost & Win Tender*) Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengukuran kinerja operasional bisnis Perusahaan yang berkaitan dengan upaya Perum Jamkrindo mencapai Visi-Misi Perusahaan dengan menjaga *sustainability* Perusahaan dan memenuhi harapan dan persyaratan *stakeholder*. *Although Perum Jamkrindo has measured and delivered 89% of Data (110 data from 124 required data) from Product and Process Performance up to Financial Performance and Market,* ***however*** *some data show declining:* *LEVEL:* - *4 Data No Level because the measurement is conducted at this time (Number of banks on line, Satisfaction index of Regional Office, Satisfaction Index Dimension Responsiveness, Index of Customer Engagement)* - *36 Data show the same performance as the previous year* - *31 Poor data show a decrease compared to previous year performance* *TREND:* - *5 No Trend data i.e. performance has only 1 period of measurement* - *19 Data Adverse, i.e. a decrease in the last 3 years* - *17 Unfavorable data that show a trend of declining in the last 3 years* *COMPARISON:* - *13 Data No Comparison, i.e. no comparison data* *INTEGRATION:* - *14 Data has not been measured nor presented, i.e. (Price offered, Sales Productivity, SMK3 Score, Emergency Response Time, Competitor, Customer Satisfaction Index, Customer Loyalty, Customer Retention, Customer Engagement Index, Work Performance Achievement, Risk Mitigation Realization, Latest and upcoming Core Competence realizations, Asset Utilization, Lost & Win Tender)* *This can affect the effectiveness of business performance measurement of Company's performance related to Perum Jamkrindo's efforts to achieve its Vision by maintaining the sustainability and meeting the expectations and requirements of its Stakeholders.*	a. Data Tarif IJP/IJK per Produk b. Data Produktivitas bisnis (target & Realisasi) c. Data Skor SMK3 d. Data Penetapan Standar Waktu Tanggap Darurat dan realisasinya e. Data indeks Kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, *Customer Engagement* f. Data kinerja SDM g. Realisasi mitigasi risikoà realisasi klaim, data *profile risk unit* kerja h. Realisasi *core competence* i. *Asset utilization* j. *Lost & win tender* *a. IJP/IJK Tariff Data per Product* *b. Business productivity data (target & Realization)* *c. SMK3 Score Data* *d. Emergency Response Standard Time Data and its realization* *e. Data index Customer satisfaction, customer loyalty, customer retention, Customer Engagement* *f. HR performance data* *g. Realization of risk mitigation - claims realization, data profile risk working unit* *h. Actual core competence* *i. Asset utilization* *j. Lost & win tender*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
8	Walaupun Perum Jamkrindo membangun iklim organisasi yang fokus untuk mencapai misi Perusahaan, peningkatan kinerja, peningkatan kualitas kepemimpinan dan pembelajaran individu dan organisasi dengan cara menyusun proram kerja tahunan yang dituangkan dalam RKAP & RJPP berdasarkan pendekatan *balance score card* serta dilakukan *review* kinerja secara regular setiap hari selasa dengan mengacu kepada kriteia GCG dan fokus pada kontrak manajemen Direksi yang dilaporkan kinerja per Triwulan. **Namun** dalam pelaksanaannya belum dapat diukur efektivitasnya karena belum dilakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja karyawan (Terbukti grafik 7.3a.3.-4). Hal ini dapat mempengaruhi evaluasi kinerja untuk proses pembelajaran organisasi & individu. *Although Perum Jamkrindo builds an organizational climate that focuses on achieving corporate mission, performance improvement, leadership quality improvement, individual and organizational learning, by way of preparing an annual work plan as outlined in the RKAP & RJPP which is based on the balance score card approach and regular performance review every Tuesday with reference to GCG criteria and focus on the Board of Directors' management contracts which performance is reported quarterly, **however**, the Company cannot measure the effectiveness of this implementation because it has not been measured against achievement of employee performance (see graph 7.3a.3.-4). This may affect the performance evaluations for organizational and individual learning processes.*	a. Metode pengukuran efektivitas kinerja karyawan/SDM b. Evaluasi kinerja karyawan *a. Method of measuring the effectiveness of employee/HR performance* *b. Evaluation of employee performance*
9	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai metode untuk membangun organisasi yang inovatif dan cerdas mengelola risiko, fokus untuk mencapai sasaran strategis dan Perusahaan dan terwujudnya organisasi yang lincah/adaftif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, yaitu dengan cara: Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk mengikuti seminar, lokakarya, pameran dan *benchmark* dan menyediakan *Website* Digital Library. **Namun** dalam pelaksanaannya belum ada unit kerja yang mengelola (TUPOKSI = Tugas Pokok & Fungsi) atas Inovasi & *Improvement* dari karyawan serta belum ada unit yang mengelola Manajemen Risiko. Hal ini akan berdampak kepada konsistensi pengelolaan dan pertumbuhan Inovasi & *Improvement* dari karyawan yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko dalam proses bisnis dan proses penciptaan produk & nilai tambah baru bagi Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has a method to build an innovative and intelligent organization to manage risks, which focuses on achieving strategic and corporate objectives, and the realization of an agile/adaptive organization to adapt to change, by: Providing opportunities for its employees to attend seminars, workshops, exhibitions and benchmarks, and providing a Digital Library Website. **However**, the implementation has no working unit that manages (TUPOKSI = Main Duty & Function) on Innovation & Improvement of employees and there is no unit that manages Risk Management. This will impact the consistency of management and the growth of employees' Innovation & Improvement related to risk management in business process, and new product creation process & added value for the Company.*	a. Penetapan unit kerja perencanaan & pengembangan b. Penetapan Unit kerja Manajemen Risiko *a. Establishment of planning & development work unit* *b. Determination of Risk Management Work Unit*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
10	Walaupun pimpinan senior Perum Jamkrindo fokus pada tindakan nyata untuk mencapai sasaran bisnis, meningkatkan kinerja lahirnya inovasi, cerdas mengelola risiko dan mencapai visi Perusahaan dengan cara: - RUPS Pemegang Saham menetapkan target kinerja Perusahaan /Direksi yang dituangkan dalam RKAP dan kontrak manajemen. - Pimpinan Perum Jamkrindo menjabarkan RKAP tersebut ketingkat Direktorat - Melakukan evaluasi kinerja dengan periode (Rapat Direksi, Rapat Gabungan, Rapat Koordinasi Bulanan-Triwulanan-Semesteran **Namun** dalam pelaksanaannya belum ada unit kerja yang mengelola Inovasi *Improvement* dan Manajemen Risiko jika pun ada baru sebatas Tim *Adhoc* yang berbatas waktu dan wewenang, sehingga pengelolaan dan pertumbuhan Tim *Improvement* dan inovasi belum konsisten dan belum efektif dalam meningkatkan kecerdasan mengelola risiko dalam menjalankan operasional bisnis Perusahaan untuk mencapai target RKAP dalam jangka pendek dan pencapaian Visi dalam masa mendatang / jangka waktu panjang. *Although Senior Leaders of Perum Jamkrindo focus on concrete actions to achieve Company's business goals, improve innovation performance, intelligently manage all risk and achieve Company's vision by way of:* - *The General Meeting of Shareholders determines Company's /Directors' performance target as outlined in the RKAP and management contracts.* - *Head of Perum Jamkrindo outlines the RKAP onto Directorate level* - *Perform the performance evaluation periodically (Board of Directors, Joint Meeting, Monthly-Quarterly Coordination Meeting-Quarterly)* ***However**, its implementation has not been equipped with work unit that manages the Innovation Improvement and Risk Management, if there is, only a small Adhoc Team with limited time and authority, so that the management and growth of Improvement Team and innovation have not been consistent or effective in improving the risk management intelligence in running Company's business operational, to achieve RKAP targets within a short term and achievement of Vision in the future/long term.*	Penetapan unit kerja Manajemen risiko *Determination of Risk Management work unit*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
11	Walaupun pimpinan Perum Jamkrindo mempunyai metode dalam menetapkan target kinerja Perusahaan dan fokus pada penciptaan dan penyeimbangan nilai pelanggan dan bagi pemangku kepentingan lainnya kedalam sasaran kerja Perusahaan, yaitu dengan cara: - Pimpinan senior merumuskan *performance expectation* Perusahaan berdasarkan hasil identifikasi dan analisa kebutuhan dan harapan dari para *stakeholders*-nya melalui pendekatan *balance scorecard* pada saat penetapan KPI (*Key Performance Indicator*) - Draf RKAP dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*. **Namun** dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini terlihat pada penyusunan bobot KPI-Perusahaan tahun 2014 untuk Perspektif Perencanaan Strategis hanya diberi bobot 4% dibanding perspektif lainnya berkisar antara 14 s/d 22%. Hal ini akan berdampak kepada keseimbangan pola kerja dan prioritas tindakan antar bagian dalam upaya pemenuhan pencapaian KPI yang tertuang dalam RKAP dalam upaya penyeimbangan kepentingan dan pemenuhan harapan dan persyaratan *stakeholder*. *Although the leadership of Perum Jamkrindo has a method of setting company performance targets and focusing on creating and balancing customer values and other Stakeholders into Company's work objectives by:* - *The Senior leaders formulate Company's performance expectation based on identification and analysis of needs and expectations of its Stakeholders through a balanced scorecard approach, at the time of determination of KPI (Key Performance Indicator)* - *RKAP draft is created by considering the interests of all Stakeholders.* ***However**, its implementation has not been effective, this is evidenced in the preparation of KPI-Company scoring in 2014, in which Strategic Planning Perspective only received 4% score compared to other perspectives which range from 14% to 22%. This will have an impact on the balance of work patterns and the priority of action between sections in the effort to fulfill KPI achievement as stipulated in RKAP, in an effort to balance the interests and fulfillment of Stakeholders' expectations and requirements.*	Ketentuan penetapan bobot KPI → sesuai SAL Kementerian BUMN *The determination of the weighting of KPI → according to the SAL of the Ministry of SOE*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi KPKU 2015
KPKU Recommendation in 2015</th><th>Tindak Lanjut di Tahun 2016
Follow Up in 2016</th></tr>
<tr><td>12</td><td>Walaupun Perum Jamkrindo telah mempunyai cara untuk mengevaluasi aspek-aspek utama system tatakelola yang berkaitan dengan indepedensi audit internal & eksternal dengan cara:
- Menetapkan SPI (Satuan Pengawasan Internal) sebagai bagian pengendalian internal perusahaan yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektivitas system pengendalian perusahaan secara keseluruhan.
- Audit Internal: bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama Perum Jamkrindo
- Audit Eksternal : dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk dalam RUPS.
Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan pengukuran efektivitas penyelesaian temuan audit internal dan eksternal, hal ini terlihat pada Laporan Annual Report 2014 bahwa pada tindaklanjut temuan BPK sebanyak 35 temuan (7 Temuan & 28 Rekomendasi) yang terselesaikan baru 18, pada tindaklanjut temuan OJK sebanyak 6 rekomendasi baru diselesaikan 2 dan pada tindaklanjut temuan KAP 26 temuan (7 temuan & 19 Rekomendasi) baru terselesaikan 6.
Although Perum Jamkrindo has a method to evaluate the main aspects of governance systems related to the independency of internal and external audit by:
- Establishing SPI (Internal Control Unit) as part of Company's internal control that functions to assess and evaluate the reliability and effectiveness of Company's control system as a whole.
- Internal Audit is directly responsible to the President Director of Perum Jamkrindo
- External Audit is conducted by an independent Auditor appointed in the GMS.
However, its implementation has no measurement on the effectiveness of internal and external audit finding completion, this evidenced in the 2014 Annual Report that, based on the follow-findings by BPK, out of 35 findings (7 Findings & 28 Recommendations) there are only 18 completed, based on the follow-up of OJK findings, out of 6 new recommendations, only 2 were completed and based on the follow up findings from KAP, out of 26 findings (7 findings & 19 recommendations), there were only 6 completed.</td><td>SPI secara terus-menerus melakukan monitoring tindak lanjut temuan dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal. Sampai dengan 31 Desember 2016, progres tindak lanjut rekomendasi, yaitu:
SPI continuously conducts a follow-up monitoring on findings and coordinates with the pertaining Work Unit regarding the completion of follow-up on internal and external audit findings. As of December 31, 2016, progress follow-up recommendations is:
<table>
<tr><th>No</th><th>Auditor Ekternal
External Auditor</th><th>Selesai
Completed</th><th>Belum Selesai
Ongoing</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>BPK – PDTT</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>OJK</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KAP</td><td>80.00%</td><td>20.00%</td></tr>
</table>
Sampai dengan 31 Desember 2016, progres tindak lanjut atas rekomendasi SPI, yaitu:
As of December 31, 2016, follow-up progress on SPI recommendations, i.e.:
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun
Year</th><th>Selesai
Completed</th><th>Belum Selesai
Ongoing</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2016</td><td>27.92%</td><td>72.08</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2015</td><td>72.08</td><td>25.37</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13</td><td>- Perum Jamkrindo belum mempunyai metode/sistem untuk mengevaluasi aspek-aspek utama yang berkaitan dengan Kaderisasi kepemimpinan hal ini terbukti pada 1.2a.1.16 tidak terespon oleh pemilik proses.
- Perum Jamkrindo belum mempunyai metode/sistem untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran etika yang terjadi di Perusahaan, hal ini terbukti pada item 1.2b.2.3 tidak terespon oleh pemilik proses
- Perum Jamkrindo belum dapat melakukan aktivitas yang mendukung dan mengelola komunitas utama Perusahaan yang berkaitan dengan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) karena unit kerja tersebut belum dapat mengidentifikasi komunitas utama yang berkaitan dengan kegiatan PKBL dan belum dapat menentukan akivitas sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan penguatan core competency Perusahaan.
- Perum Jamkrindo does not have a method/system to evaluate the main aspects related to leadership cadre; this is evident on item 1.2a.1.16 not responded by the process owner.
- Perum Jamkrindo does not have a method/system to monitor and follow up the ethical violations occurred in the Company, this is evident in item 1.2b.2.3 not responded by the process owner
- Perum Jamkrindo has not been able to undertake activities that support and manage Company's main community relating to the Partnership and Community Development (PKBL) since the work unit has not been able to identify the main community that is closely related to PKBL activities and has not been able to determine the social community activities that is related to strengthening the core Competency Company.</td><td>a. Sistem kaderisasi kepemimpinan → Program SODP, Career Plan, Asesment berjenjang, Agent of Change
b. Mekanisme evaluasi & monitoring tindak lanjut atas pelanggaran etika
c. Program kerja PKBL yang berkaitan dengan komunitas utama Perum Jamkrindo→ UMKMK
a. Leadership cadre system →SODP Program, Career Plan, Tiered Assessment, Agent of Change
b. Mechanism of evaluation & follow-up monitoring of ethical violations
c. PKBL work program related to the main community of Perum Jamkrindo → UMKMK</td></tr>
</table>

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
14	Walaupun Perum Jamkrindo menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung inovasi dengan cara: - Pimpinan Senior menanamkan *spirit* inovasi melalui *statement* TRUST (Terdepan, Responsif, Unggul, Sehat & Terkemuka) - Membentuk struktur organisasi yang mendorong budaya inovasi & membentuk unit Kerja yang mengelola *Knowledge Management* serta mengelola *Project*-2 & inovasi - Menciptakan agen perubahan dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan - Mendorong komunikasi yang terbuka serta meningkatkan partisipasi karyawan berinovasi - Mengembangkan sistem IT dan membudayakan fokus pelanggan & inovasi kreativitas. **Namun** belum efektif terbukti dengan hanya ada 2 inovasi produk dalam periode 3 tahun terakhir yaitu produk (PKS) & penambahan jumlah Mitra *online*, hal ini dapat mempengaruhi daya saing Perusahaan dalam menawarkan produk-produk penjaminan yang baru sesuai dengan kebutuhan pasar. *Although Perum Jamkrindo creates an organizational environment that supports the innovation by way:* - *The Senior leaders inculcate the spirit of innovation through the TRUST statement (Leading, Responsive, Excellence, Healthy & Leading)* - *Establishing an organizational structure that fosters a culture of innovation & sets up a Working Unit that manages Knowledge Management and manages Project-2 & innovation* - *Creating change agents and providing ongoing training* - *Encouraging open communication and enhancing employee innovation participation* - *Developing an IT system and cultivate customer focus & creativity innovation.* ***However**, it has not been proven effectively with only 2 product innovations in the last 3 years i.e. product (PKS) & the addition of the number of online Partners, this can affect the Company competitiveness in offering new guaranteed products that fit the market requirement.*	a. Pengembangan produk baru di tahun 2016 b. Data jumlah mitra baru dan produk baru c. Inovasi IT *a. New product development in 2016* *b. Data on the number of new partners and new products* *c. IT Innovation*
15	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengidentifikasi peluang strategis dengan cara melakukan proses SWOT analisis berdasarkan data input di atas dan dibahas dalam rapat kerja dan *workshop* untuk menentukan potensi peluang strategis yang dilakukan Perusahaan . **Namun** sistem ini belum efektif terbukti masih sedikit pasar baru yang dimasuki. Hal ini terbukti pada KPI Perusahaan yaitu pertumbuhan pasar yang dalam periode 3 tahun terakhir menurun dan jauh dibawah target RKAP. *Although Perum Jamkrindo has identified strategic opportunities by conducting a SWOT analysis based on the above input data and discussed in meetings and workshops to determine the potential strategic opportunities undertaken by the Company. **However**, this system has yet been effective, as there are still few new markets entered. This is evident in Company's KPI that the market growth in the last 3 years has declined and far below the target RKAP.*	a. Data mitra baru Perusahaan b. Data produk baru *a. Company's new partner data* *b. New product data*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
16	Walaupun Perum Jamkrindo mengumpulkan dan menganalisa data informasi yang relevan bagi perencanaan strategis dalam elemen potensial *blindspot* terhadap proses perencanaan strategis dengan cara memperdalam analisa SWOT melalui FGD dalam *workshop* yang diikuti seluruh unit kerja dan kantor cabang untuk mendapatkan masukan tambahan di luar draf RJPP sebelum perumusan dan penetapan keunggulan dan tantangan strategis, **Namun** sistem ini belum efektif terbukti baru dilakukan hanya oleh Tim (*Adhoc*) yang berbatas waktu jadi belum ada unit kerja yang mengelola proses ini secara konsisten misalnya dalam bentuk bisnis *inteligensi* Perusahaan. Terlihat pada pengukuran kinerja di Cat-7 sangat minim data pembanding dan data pesaing, sehingga hal ini akan mempengaruhi efektifitas keputusan dan kebijakan manajemen dalam menentukan strategi dan operasional bisnis di masa mendatang. *Although Perum Jamkrindo collects and analyzes the relevant information data for strategic planning in the blindspot potential element of the strategic planning process by deepening the SWOT analysis through FGDs in workshops, followed by all work units and branch offices to obtain additional input beyond the RJPP draft, prior to a formulation and determination of excellence and strategic challenges, **however**, this system has not been effectively proven conducted only by the Team (Adhoc) with such time limit, so there is no work unit that manages this process consistently e.g. in the form of business intelligence company. This is evident based on the performance measurement in Cat-7, there is very limited comparison and competitor data, so this will affect the effectiveness of decision and management policy in determining business strategy and operational in the future.*	Penetapan unit kerja perencanaan & pengembangan *Determination of planning and development unit*
17	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai sistem kerja yang mempertimbangkan kompetensi inti Perusahaan dan kompetensi inti dari calon pemasuk dan mitra potensial, dengan cara: - Program kerja jangka pendek pada RKAP didistribusikan ke masing-masing Divisi dan Kanca dan dijabarkan ke setiap bagian di bawahnya. - Bila ada program yang berkaitan dengan pemasok mitra utama, maka program tersebut di proses melalui unit kerja pengadaan barang dan jasa. **Namun** sistem tersebut belum efektif terbukti belum adanya metode evaluasi dan pengukuran kinerja pemasok dan mitra yang berkaitan dengan kinerja dan kontribusi mereka pada penguatan kompetensi Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has a working system that considers Company's core competencies and the core competencies of potential entrants and potential partners, by way of:* - *Short-term work programs in RKAP are distributed to each Division and Kanca, and described in each section below.* - *If there is a program related to a major partner of supplier, then the program is processed through a procurement work unit.* ***However**, the system has not been effective; there is no method of evaluation and measurement of supplier's and partner's related to their performance and contribution to strengthening Company's competence.*	a. Metode pengukuran kinerja *vendor* b. Evaluasi efektivitas kinerja *vendor* *a. Vendor performance measurement method* *b. Evaluate vendor performance effectiveness*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
18	Walaupun Perum Jamkrindo telah membuat sasaran strategis untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan/tantangan/tujuan jangka panjang dan jangka pendek dengan cara: - Melakukan analisa SWOT dan penetapan posisi Perusahaan atas hasil *survey* internal dan eksternal yang dilakukan rutin setiap tahun. - Menyusun program kerja 5 tahunan Perusahaan dalam RJPP untuk menjawab tantangan jangka panjang yang dijabarkan kedalam program tahunan dalam RKAP untuk menjawab tantangan jangka pendek. **Namun** sistem tersebut belum terbukti efektif terlihat dengan belum adanya skala prioritas program kerja Perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kerja Perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan manajemen dalam mengambil keputusan strategis dalam memastikan ketercapaian target RKAP dan penyelesaian program kerja RJPP. *Even though Perum Jamkrindo has set a strategic goal to ensure a balance between long term and short term needs/challenges/goals by way of:* - *Conducting annual SWOT analysis and determination of corporate position in internal and external survey results.* - *Develop a 5-year corporate work program in RJPP to address the long-term challenges outlined in the annual program of RKAP to address a short-term challenge.* ***However**, the system has not proven to be effectively seen, with the lack of priority measure of Company's work program. This can affect the work of the Company. This can affect the speed and accuracy of management in making strategic decisions in ensuring the achievement of RKAP targets and completion of RJPP work programs.*	Skala prioritas program kerja berdasarkan *timeline Action Plan* *The priority scale of the work program is based on an Action Plan timeline*
19	Walaupun Perum Jamkrindo telah menilai dan mengelola risiko finansial dan risiko lainnya yang terkait program kerja, untuk memastikan keberlangsungan usaha secara finasial, dengan cara: - Setiap rencana Investasi harus berupa dana yang terkumpul dari premi asuransi terlebih dahulu dilakukan kajian oleh unit Risk Management. - *Risk Management* menyampaikan hasil kajian atas rencana investasi tersebut ke Direksi - Direksi memutuskan penempatan dana tersebut setelah mempertimbangkan hasil analisis unit *Risk Mangement*. **Namun** pelaksanaan dari *system* tersebut belum dilakukan secara efektif dan menyeluruh, hal ini terlihat dari beberapa investasi/produk baru belum dapat menghasilkan *revenue*/ manfaat yang optimal sesuai target Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has assessed and managed financial and other risks associated with the work program, in order to ensure its financial sustainability by way of:* - *Every Investment plan must be in the form of funds collected from insurance premiums which was initially conducted by Risk Management unit review.* - *Risk Management submits the review of investment plan to the Board of Directors* - *The Board of Directors decides the placement of funds after studying outcomes of the unit risk management analysis.* ***However**, the system implementation has not been done effectively and thoroughly; it is evident from some new investments/products that have not been able to generate revenue/ optimal benefits according to the Company's target.*	Mekanisme manajemen risiko dalam investasi *Risk management mechanism in investment*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
20	Walaupun Perum Jamkrindo telah memiliki cara dalam mengantisipasi dampak potensial terhadap keberadaan tenaga kerja di Perusahaan dan kemungkinan terjadi perubahan terkait dengan kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja yaitu dengan cara : - Menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program - Menentukan kompetensi yang diperlukan oleh setiap tenaga kerja - Menganalisa *Gap* antara kebutuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja - Menyusun progran terkait dengan pemenuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja. **Namun** pelaksanaan program tersebut belum dilaksanakan secara sistematis dan perlu dilakukan pengukuran dan *review* terkait perubahan struktur organisasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan. Hal ini akan berdampak kepada kecepatan dan ketepatan penempatan tenaga kerja pada struktur organisasi dan kantor cabang baru sesuai kebutuhan dengan jumlah dan kapabilitasnya. *Although Perum Jamkrindo has a method of anticipating the potential impact of manpower in the Company and the possibility of changes related to the capability need and manpower capacity by way of:* - *Establishing the manpower required to implement programs* - *Determining the competencies required by each workforce* - *Analyzing the Gap between capacity requirements and workforce capability* - *Developing programs related to the fulfillment of capacity and employment capability.* *However, program implementation has not been systematic; it needs a measurement and a review related to organizational structure changes to achieve a target performance. This will have an impact on the acceleration and appropriateness of employee placement in the organizational structure and new branch offices as needed with a certain number and capabilities.*	Sistem/mekanisme penetapan kebutuhan karyawan/SDM sesuai pengembangan struktur organissai *System/mechanism of determining the needs of employees/HR according to the development of organizational structure*
21	Walaupun Jamkrindo telah memastikan keseluruhan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja dapat memperkuat keselarasan seluruh elemen Perusahaan, dengan cara : - Evaluasi kinerja Perusahaan melibatkan semua unit kerja dikantor pusat dan cabang. - Jasa produksi yang diterima oleh tenaga kerja tergantung kepada pencapaian kinerja Perusahaan secara keseluruhan. **Namun** sistem tersebut belum di *review* secara berkala terkait perubahan struktur organiasasi. Hal ini akan berdampak kepada efektivitas dan keselarasan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja dengan struktur organisasi pada saat ini. *Although Jamkrindo has ensured that the overall measurement and evaluation system of the work program can strengthen the alignment of all elements of the Company, by way of:* - *Company's performance evaluation involves all work units at headquarters and branches.* - *Production services received by the workforce depend on the overall performance of the Company.* *However, the system has not been periodically reviewed regarding changes in organizational structure. This will have an impact on the effectiveness and alignment of the measurement and evaluation system of the work program with the current organizational structure.*	a. Mekanisme penilaian kinerja unit kerja b. Penetapan Jasa produksi & evaluasi *a. Work unit performance appraisal mechanism* *b. Determination of Production & Evaluation Services*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
22	Walaupun Perum Jamkrindo telah membuat program dalam rangka membandingkan pencapaian kinerja dan proyeksi kinerja perusahaan pesaing, dan jika masih dibawah pesaing maka disikapi Perusahaan dengan cara: - Memilah data pembanding yang relevan dengan kinerja Perusahaan. - Membandingkan setiap elemen KPI Perusahaan dengan KPI perusahaan pembanding. - Menampilkan dalam bentuk grafik. **Namun** sistem tersebut belum mampu membuat perusahaan menjadi lebih unggul dari pesaing, terlihat dari tingkat realisasi program diklat yang masih kecil dibanding pesaing. Hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dari proses yang dilakukan agar kinerja Perusahaan dapat sejajar bahkan unggul dari kinerja saat ini dan proyeksi kinerja perusahaan pesaing. *Although Perum Jamkrindo has made a program in order to compare the achievement and performance projection of a competitor's company, and if it is still below that of the competitors, then the Company responded by:* - *Sorting out comparison data relevant to Company performance.* - *Comparing each of the KPI elements of the Company with the KPI of the comparison company.* - *Displaying them in graphical form.* ***However**, the system has not been able to make the Company become superior to its competitors, as seen from the realization of the training program which is still minor compared to that of the competitors. It is therefore necessary to evaluate the effectiveness of the process performed, so that the Company's performance can be aligned, even superior, to the current performance and projected performance of the competitor company.*	a. Data pembanding realisasi program diklat Perum Jamkrindo dengan pesaing b. Data kinerja bisnis Perum Jamkrindo dibanding pesaing *a. Comparison data of realization of Perum Jamkrindo training program with its competitors'* *b. Performance data of Perum Jamkrindo compared to competitors' data*
23	Walaupun Perum Jamkrindo telah mendengarkan pelanggan untuk mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan cara menyediakan berbagai kontak pelanggan, baik petugas di cabang dan kantor pusat, aplikasi *website* maupun *email* serta dilaksanakan *survey* kepuasan pelanggan. **Namun** mekanisme yang dilakukan dalam menggunakan berbagai kontak yang ada belum sistematis dan belum sepenuhnya menerapkan registrasi keluhan secara sistem dan belum menetapkan ukuran keberhasilan atas proses dalam menindaklanjuti suara pelanggan. Terbukti belum ada pengukuran atas indeks ketidakpuasan dan belum ada kinerja frekuensi komunikasi dengan pelanggan. Hal ini dikhawatirkan *feature* produk dan layanan yang ditawarkan belum dapat memenuhi harapan dan persyaratan pelanggan. *Although Perum Jamkrindo has listened to its customers to get actionable information by providing various customer contacts, both Branch Officers and Head Office, its website or email application and customer satisfaction survey.* ***However**, the mechanisms employed in using various existing contacts have not been systematic and have not ully implemented a systematic complaint registration and have yet to establish a measure of success over the process of following up on its customer feedback. This is evident, that there is no measurement about dissatisfaction index and no performance frequency of communication with the customer. It is feared that the product features and services offered can not meet customer's expectations and requirements.*	Sistem penanganan komplain pelanggan *Customer complaint handling system*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
24	Walaupun Jamkrindo telah menggunakan media sosial dan teknologi berbasis *web* untuk mendengarkan pelanggan dengan cara membangun aplikasi berbasis *web* untuk mendengarkan pelanggan dengan cara membangun aplikasi *web* dengan menyediakan alamat email : info@jamkrindo.co.id dan informasi dari pelanggan akan ditampung di unit Sekretaris Perusahaan untuk ditinjak lanjuti. **Namun** mekanisme yang dilakukan dalam menggunakan media sosial dan teknolgi berbasis web belum sistematis, dan belum sepenuhnya menerapkan indikator/ukuran keberhasilan (Efektifitas) *output*-nya sistem pembelajarannya dan belum dilakukan *review* atas sistem yang berjalan, terbukti belum ada pengukuran atas indek ketidakpuasan dan belum adanya kinerja frekuensi komunikasi dengan pelanggan dan belum dilakukan pengukuran atas retensi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Hal ini dikhawatirkan fitur produk yang ditawarkan belum dapat memenuhi keinginan pelanggan. *Although Jamkrindo has used social media and web-based technologies to listen to its customers by building a web-based application, to listen to its customers by building web applications by providing an email address: info@jamkrindo.co.id, and information from customers will be accommodated in the Corporate Secretary unit for followed up. **However**, the mechanisms used in the use of social media and web-based technologies have not been systematic, and have yet fully implemented the indicators/measures of output success (Effectiveness) of their learning systems, and the current system have not been reviewed, as this is evident by no measurement of dissatisfaction indices and absence of Communication frequency performance with the customers, and no measurements of customer retention and customer loyalty. It is therefore feared that the product features offered can not meet customer desires.*	Mekanisme penggunakan media sosial & teknologi *web* basis dalam pelayanan kepada pelanggan dan evaluasinya *Mechanism of using social media & web technology base in service to the customers and evaluation of the said mechanism.*
25	Walaupun Perum Jamkrindo telah mendengarkan pelanggan untuk mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan cara menyediakan berbagai kontak pelanggan, baik petugas di cabang dan dikantor pusat, aplikasi *website* maupun *email* serta dilaksanakan survei kepuasan pelanggan. **Namun** Perum Jamkrindo belum membedakan metode yang di khawatirkan *feature* produk dan layanan yang ditawarkan tidak memenuhi harapan pelanggan sesuai dengan siklus hidupnya. *Although Perum Jamkrindo has listened to its customers for information that can be acted upon, by providing various customer contacts, both branch officer and head office, website or email application and customer satisfaction survey. However, Perum Jamkrindo has not distinguished the method, and therefore it is feared that the feature of the products and services offered do not meet customer expectations in accordance with its life cycle.*	a. Penyediaan kontak pelanggan b. Metode layanan pelanggan berdasarkan produk *a. Provision of customer contacts* *b. Customer service method based on product*
26	Walaupun Perum Jamkrindo telah mendapatkan umpan balik yang segera dapat ditindaklanjuti mengenai mutu produk, dukungan pelanggan dan transaksi melalui kunjungan kepada nasabah, klaim, maupun survei kepuasan pelanggan. **Namun** mekanisme atau cara yang dilakukan dalam menggunakan berbagai kontak yang ada belum sistematis dan belum sepenuhnya menetapkan ukuran keberhasilan atas proses untuk menindaklanjuti suara pelanggan terhadap mutu produk, dukungan pelanggan dan transaksi. Hal ini dikhawatirkan feature produk dan layanan yang ditawarkan tidak memenuhi harapan pelanggan. *Although Perum Jamkrindo has received immediate follow-up feedback on its product quality, customer support and transactions through customer visits, claims, and customer satisfaction surveys. However, the mechanisms or methods used in using the various contacts are not yet systematic and not yet completed establish a measurement of success on the process to follow up feedback from the customers on Company's product quality, customer support and transactions. This is therefore feared that the feature of products and services offered do not meet customer expectations.*	a. Mekanisme kontak pelanggan & pelayanan komplain pelanggan yang sistematis b. Evaluasi terhadap keberhasilan dalam penanganan pelayanan terhadap pelanggan dengan standar ukuran keberhasilan *a. The customer contact mechanism & systematic customer complaint service* *b. Evaluation of success in handling customer service with standard measures of success*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
27	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengindentifikasi dan menyesuaikan produk yang ditawarkan untuk memasuki pasar baru, untuk menarik pelanggan baru untuk menyediakan peluang bagi pengembangan hubungan Perusahaan dengan pelanggan saat ini dengan cara: - Menganalisa persyaratan pelanggan - Menetapkan tambahan manfaat yang akan ditawarkan kepelanggan, pasar atau calon pelanggan. **Namun** Perusahaan belum melakukan *review* terhadap sistem kepuasan pelanggan yang dilakukan untuk masing-masing segmen pelanggan terhadap produk, pelayanan dan manfaat baru yang di tawarkan, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dalam pengembangan pangsa baru yang di tawarkan, terbukti pada KPI Perusahaan untuk pertumbuhan pasar terjadi penurunan selama 3 tahun berturut-turut dan dibawah target RKAP. *Although Perum Jamkrindo has identified and tailored the products offered to enter new markets, to attract new customers, to provide opportunities for the development of corporate relationships with customers today by:* - *Analyzing customer requirements* - *Setting the additional benefits to be offered to customers, markets or prospects.* *However, the Company has not yet reviewed the customer satisfaction system for each customer segment of the new products, services and benefits offered, thus this can affect the effectiveness in the development of new market shares which can be offered, as evidenced in the KPI for the market growth which declines for the last 3 consecutive years and under the target of RKAP.*	Metode *review* terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan segmen dan produk *Review method of customer satisfaction based on segment and product*
28	Walaupun Perum Jamkrindo memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dapat diterapkan kepada semua orang dan proses-proses yang terlibat dalam dukungan pelanggan dengan adanya komitmen tertulis memenuhi harapan pelanggan dengan adanya komitmen tertulis untuk memenuhi harapan pelanggan dalam hal kecepatan dan ketepatan layanan dan telah dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis Perusahaan. **Namun** Perusahaan belum melakukan *review* terhadap mekanisme persyaratan yang ditetapkan secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini mempengaruhi kepastian dan kesinambungan dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan untuk memenuhi harapan dan persyaratan pelanggan. *Although Perum Jamkrindo ensures that the requirements are applicable to all persons and processes involved in customer support in the support of a written commitment to meet its customer expectations, and in terms of speed and accuracy of service, and these have been used as a guide in conducting Company business.* *However, the Company has yet to review the requirements mechanisms that are established thoroughly and well documented. This affects the certainty and sustainability in the speed and accuracy of service to meet customer's expectations and requirements*	*Review* terhadap komitmen terhadap pelanggan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama *Review of the commitment to customers as stipulated in the cooperation agreement*
29	Walaupun Perum Jamkrindo mempertimbangkan pelanggan pesaing, calon pelanggan dan calon pasar dalam proses segmentasi pelanggan dengan adanya kajian produk dan potensi pangsa pasar serta strategi pengembangan produk dan bisnis. **Namun** mekanisme atau cara yang dilakukan belum pernah dilakukan *review*. Perum Jamkrindo belum konsisten menerapkan indikator/ukuran keberhasilan/efektivitas *output* sistem pembelajarannya. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan produk yang ditawarkan serta strategi pemasaran yang dilakukan tidak efektif. *Although Perum Jamkrindo considers its competitor, prospect and prospective customers in the customer segmentation process, by way of conducting product review and potential market share and product, and business development strategy. However, the applied mechanism or method has never been reviewed. Perum Jamkrindo has not consistently applied any indicators/ measures of success/effectiveness of an Output Learning system. This is feared that the result in the offered products and marketing strategies will not be effective.*	a. *Review* terhadap segmentasi pelanggan dan produk b. Indikator efektivitas ukuran keberhasilannya *a. Review of customer and product segmentation* *b. Indicator of effectiveness measures of success*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
30	Walaupun Perum Jamkrindo memiliki proses dalam mengelola manajemen komplain pelanggan untuk memastikan bahwa setiap komplen atau permohonan terselesaikan secara tepat dan efektif dengan adanya keputusan penerbitan SP dan penyelesaian Klaim. **Namun** Perusahaan belum memiliki sistem *registrasi* untuk setiap komplain secara spesifik yang dapat membantu monitoring penyelesaian komplain secara efektif dan efisien serta memastikan adanya proses pembelajaran untuk kedepannya. Hal ini mempengaruhi efektivitas metode dan pengukuran dan evealuasi klaim dan komplain pelanggan atas tidak terpenuhi persyaratan dan harapan pelanggan dapat mengurangi kecepatan dan ketepatan tindak lanjut penanganannya. *Although Perum Jamkrindo has a process in managing its customer complaint to ensure that any complaints or applications will be resolved appropriately and effectively with the issuance of SP and Claims settlement. However, the Company has yet to have a registation system for any specific complaints which can help in monitoring the completion of complaints effectively and efficiently, and ensuring the learning process for the future. This affects the effectiveness of method and measurement, evaluation of claims and customer complaints against unfulfilled requirements, and customer expectations can reduce the speed and timeliness of follow-up handling.*	a. Manajemen keluhan pelanggan secara spesifik dan teregistrasi b. Indikator efektivitas keberhasilan dari sistem tersebut *a. Customer complaint management should be specific and registered* *b. The effectiveness indicator of a success system*
31	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai sistem dalam memilih dan memastikan efektifitas pemanfaatan data dan informasi pembanding yang penting untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan strategis dan melakukan inovasi dengan cara : - Kompilasi data pembanding yang sama dengan data kinerja Perusahaan - Bandingkan analisa terhadap data pesaing - Buat *action plan* untuk melampaui pencapaian kinerja pesaing, baik dari pencapaian maupun pertumbuhannya. - Menetapkan *action plan* yang akan ditindaklanjuti dan berinovasi. **Namun** proses tersebut belum efektif karena belum dilakukan secara konsisten di seluruh bidang proses bisnis yang ada, hal ini terbukti pada kinerja *result* sangat minim data pembanding dan data pesaing. Hal ini akan mempengaruhi efektivitas manajemen dalam memastikan proses bisnis dan operasional yang sudah dilaksanakan itu sudah efektif dan bekinerja unggul. *Although Perum Jamkrindo has a system in selecting and ensuring the effective use of comparative data and information essential to support the operational, strategic decision making and innovation by way of:* - *Collecting comparable data which are similar to enterprise performance data* - *Comparing analysis of competitor data* - *Creating an action plan to outperform competitors' achievements, both from achievement and growth.* - *Establishing action plan to be followed up and innovate.* *However, the process has not been effective because it has not been done consistently throughout all areas of existing business processes. This is evident that the result performance includes a very minimum data comparison and competitor data. This will affect the effectiveness of management in ensuring the business processes and operations that have been implemented that have been effective and superior performance.*	Manajemen *database* Perusahaan dan data pesaing *Company's database management and competitor data*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
32	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai sistem dalam memilih dan memastikan efektivitas pemanfaatan data dan informasi suara pelanggan (termasuk data informasi keluhan pelanggan) yang mendukung keputusan yang diambil ditingkat operasional, pengambilan keputusan strategis serta melakukan inovasi dengan cara: - Mendata dan mengevaluasi informasi dari keluhan maupun hasil *survey* pelanggan yang sesuai dan dapat memperbaiki layanan kepada pelanggan. - Membuat rencana tindaklanjut atas keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya dalam rupa *improvement* produk dan proses serta menuangkannya dalam program kerja RKAP dan KPI unit kerja. **Namun** proses tersebut belum efektif karena belum dilakukan secara konsisten di seluruh proses bidang bisnis yang berkaitan dengan Marketing/Fokus pada pelanggan, hal ini terbukti pada data kinerja *result* yang berkaitan dengan pemasaran terbukti belum dilakukan pengukuran indeks dan evaluasi atas kepuasan pelanggan pesaing, dan baru tahun 2014 dilakukan pengukuran atas kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dan belum ada penataan dan pendataan frekuensi komunikasi dengan pelanggan. Hal ini akan mempengaruhi efektifitas manajemen dalam memastikan proses bisnis dan operasional yang berkaitan dengan pemenuhan harapan dan persyaratan pelanggan dilaksanakan itu apakah sudah efektif dan bekinerja unggul. *Although Perum Jamkrindo has a system in selecting and ensuring the usage effectiveness of voice data and customer information (including customer complaint information data) that support the decisions taken at the operational level, strategic decision making and innovation by:* - *Collecting and evaluating information from customer complaints and survey results as appropriate and improve service to customers.* - *Taking a follow-up action on customer complaints and follow up in the form of improvement of products and processes and put it into working program of RKAP and KPI of work unit.* *However, such process has not been effective, as it has not been applied consistently in all areas of business process related to Marketing/ Focus on the customer, this is evident in the result of performance data related to marketing that has not had an index measurement and an evaluation of customer satisfaction competitors, and only in 2014, the Company measured the customer satisfaction and dissatisfaction, and there was no structure and data collection frequency of communication with the customers. This will affect the effectiveness of management in ensuring business and operational processes relating to fulfillment of customer expectations and requirements implemented, whether it is effective and superior performance*	a. Sistem Pengolah Data Keluhan Pelanggan b. Indikator efektivitas ukuran keberhasilan dalam peningkatan kepuasan pelanggan *a. Processing System* *b. Indicator of the effectiveness of success in increasing customer satisfaction measurement*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
33	Walaupun Perum Jamkrindo memanfaatkan ukuran-ukuran kinerja utama Perusahaan dalam melakukan *review* kinerja dengan cara : - Kompulir realisasi kinerja utama dari unit-unit *incharge* untuk diukur dan dilaporkan *ratio* pencapaian kinerja (Target vs Realisasi) per unit kerja dan kinerja perusahaan. - Pencapaian kinerja Perusahaan dan unit kerja disampaikan dan dibahas rencana tindaklanjut perbaikan proses dan strategi/upaya mencapai target. Tetapkan pencapaian kinerja Perusahaan dan informasi terkait periode mendatang. **Namun** metode tersebut belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, hal ini terlihat dalam laporan KPI Perusahaan dalam periode 3 tahun berturut-turut (2012-2014) pada perspektif Pelanggan yaitu pertumbuhan pasar menurun bahkan jauh dibawah target. Hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar yang tergerus yang akan berdampak kepada *sustainability* operasional bisnis Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo utilizes the key performance measures in conducting performance reviews by:* - *The use of main performance performance scales of incharge units for the measured and reported performance achievement ratios (Target vs. Realization) per work unit and firm performance.* - *Achievement of Company performance and work unit is submitted and follow up plan of process improvement and strategy/effort to achieve target is discussed.* - *Setting the company's performance achievements and related information for future periods.* *However, the method has not been carried out systematically and continuously; it is included in the Company KPI report for the period of 3 consecutive years (2012-2014) from the perspective of Customer that the market growth declined even far below the target. This can have an effect on the eroding market share that will impact on Sustainability of the Company's business operations.*	Metode *review* kinerja utama Perusahaan secara sistematis dan kontinyu (target vs realisasi) *The main performance review method of the Company should be systematic and continuous (target vs realization)*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
34	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai metode dalam memanfaatkan hasil *review* kinerja dan data pembanding serta data persaingan utama untuk memproyeksikan kinerja yang akan datang yaitu dengan cara: - Mengkompulasi dan meneliti data hasil analisa pencapaian dan analisa komparasi dengan data pesaing - Proyeksikan kinerja Perusahaan berdasarkan capaian kinerja & analisa data pesaing - Susun dan usulkan data-data yang berkaitan proyeksi kinerja pada saat penyusunan Rancangan RKAP dan RJPP. **Namun** proses tersebut belum sistematis dan belum konsisten dilakukan pada seluruh bidang proses bisnis yang berkaitan dengan Perspektif KPI berbasis KPKU belum disandingkan dengan data pembanding/pesaing dan data proyeksi kinerja pesaing. Hal ini akan mempengaruhi efektivitas manajemen dalam memastikan Keputusan & Strategi dalam proses bisnis dan operasional yang berkaitan dengan pemenuhan harapan dan persyaratan *stakeholder* dan kegesitan bisnis (*Agility*) dalam menjaga perkembangan dan pertumbuhan Perusahaan (*Sustainability*) mencapai Visi & Misi. *Although Perum Jamkrindo has a method in utilizing performance review and comparison data as well as data of its major competition to project its future performance by:* - *Compiling and examining data from analysis of achievement and comparative analysis with competitor data* - *Projecting the Company performance based on performance & competitor data analysis* - *Arranging and suggesting data that Related projections Performance at the time of drafting the RKAP and RJPP.* *However , the process has not been systematic and has not been consistently applied in all areas of business processes related to KPKU KPI-based, the perspective has not been paired with comparative data/competitors, and the projected performance data of competitors. This will affect the effectiveness of management in ensuring the Decisions & Strategies in business and operational processes related to the fulfillment of expectations and requirements of Stakeholders and business agility (Agility) in maintaining the growth and development of the Company (Sustainability) to achieve its Vision & Mission.*	Kinerja utama perusahaan secara sistematis dan kontinyu dengan data pembanding (pesaing) *Company's main performance is systematically and continuously compared with its competitors' performance data*
35	Walaupun Perum Jamkrindo telah menerapkan manajemen pengetahuan untuk mentransfer pengetahuan yang relevan dari dan ke pelanggan, pemasok, mitra dan kolaborator sesuai keperluannya melalui *website* Jamkrindo, media cetak dan elektronik lainnya serta melakukan updating data dan informasi secara teratur serta telah diatur dengan ketentuan tersendiri. **Namun** Perum Jamkrindo belum menerapkan indikator/ukuran keberhasilan (efektivitas) atas mekanisme yang dimiliki saat ini serta kemudahan yang ditimbulkan bagi pelanggan, pemasok, mitra dan kolaborator. Hal ini dikhawatirkan akses data dan informasi yang telah dilaksanakan belum optimal. *Although Perum Jamkrindo has applied the knowledge management to transfer relevant knowledge to and from its customers, suppliers, partners and collaborators as needed through the Jamkrindo website, print forms and other electronic media, such as updating data and information on a regular basis, and has been regulated on its own terms.* *However, Perum Jamkrindo has not implemented the indicators/measurement of success (effectiveness) on current mechanisms and ease for customers, suppliers, partners and collaborators. It is therefore feared that the access data and information implemented are not optimal.*	a. Penerapan *Knowledge* Manajemen dalam transfer pengetahuan kepada pelanggan, pemasok, mitra, dan kolaborator (mitra Penerima Jaminan, Terjamin, Agen, *vendor*, mitra *Co*, regulator & *stakeholder* lainnya). b. Indikator efektivitas keberhasilannya *a. Application of Knowledge Management in the transfer of knowledge to the customers, suppliers, partners, and collaborators (the Guaranteed Partners, Guaranteed, Agent, vendor, Co-partners, regulators & other stakeholders) partners.* *b. Indicator of its effectiveness*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
36	Walaupun Perum Jamkrindo telah merangkai & mentransfer pengetahuan yang relevan digunakan untuk inovasi dan proses perencanaan strategis dengan menjamin kemudahan akses dan proses sosialisasi informasi melalui aplikasi *Digital Library* atas update informasi yang ada di Perusahaan, termasuk materi seminar, kebijakan baru, dan penggunaan notulensi analisa evaluasi kinerja dalam rangka proses perencanaan strategis. **Namun** Perum Jamkrindo belum memiliki mekanisme pengukuran atas optimalisasi penggunaan *Digital Library* oleh para karyawan serta belum memiliki mekanisme untuk mendorong terjadinya optimalisasi tersebut. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan transfer *knowledge* yang ada belum merata pada seluruh level karyawan. *Although Perum Jamkrindo has built & transferred the relevant knowledge, used for innovation and strategic planning process by ensuring an easy access and information dissemination through an application of Digital Library for updated information in the Company, including seminar materials, new policy, and the use of performance evaluation report In the context of the strategic planning process.* *However Perum Jamkrindo has yet to have a measurement mechanism on optimizing the use of Digital Library By employees and not yet have mechanisms to support the optimization. This is feared to cause the transfer of knowledge that is not evenly distributed at all levels of employees*	Optimalisasi *Digital Library* dan mekanisme ukuran keberhasilannya *Optimization of Digital Library and mechanism of success measurement*
37	Walaupun Perum Jamkrindo telah memastikan akurasi/ketepatan & kesesuaian waktu dalam pengelolaan data informasi dan pengetahuan organisasi dengan adanya sistem kodifikasi setiap penerbitan SP untuk setiap produk di setiap cabang dan dilengkapi ketentuan yang mengaturnya, serta adanya data yang tersimpan disetiap cabang untuk meminimalisir dampak dari gangguan jaringan. **Namun** Perum Jamkrindo belum memiliki dan melakukan pengukuran secara sistem atas kesalahan yang terjadi sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti tingkat kesalahan dari sisi ketepatan dan kesesuaian waktu di lapangan. Hal ini menyebabkan Jamkrindo tidak mampu menghitung secara tepat kerugian yang diakibatkan atas kesalahan yang terjadi. *Although Perum Jamkrindo has ensured the accuracy and timeliness of information management and organizational knowledge with the coding system of each SP issuance for each product in every branch, and provided them with the regulatory provisions, as well as the existence of data stored in every branch to minimize the impact of network disruption. However Perum Jamkrindo has yet to have and to make a system measurement of the occurring errors so as not to know for sure the level of error in terms of accuracy and suitability of time on the field. This resulted in Jamkrindo not being able to calculate precisely the losses caused by the mistakes that occurred.*	a. Akurasi pengelolaan Data informasi dan pengetahuan organisasi dg sistem kodifikasi pada penerbitan SP/SK b. Antisipasi terhadap gangguan sistem atau jaringan c. Sistem pengukuran terhadap tingkat kesalahan atau deviasi data. *a. Accuracy of management Data information and knowledge organization dg codification system on the issuance of SP / SK* *b. Anticipation of system or network interruption* *c. Measurement system against error rate or data deviation.*
38	Walaupun Perum Jamkrindo telah membuat data dan informasi yang tersedia dalam format yang mudah digunakan oleh tenaga kerja, mitra, kolaborator dan pelanggan sesuai keperluannya melalui *Digital Library* bagi karyawan dan juga *website* Jamkrindo bagi mitra dan pelanggan serta penggunaaanya telah diatur dengan ketentuan tersendiri. **Namun** Perum Jamkrindo belum konsisten menerapkan indikator/ukuran keberhasilan (efektivitas) *output*nya sistem pembelajarannya. Hal ini dikhawatirkan akses data dan informasi yang telah dilaksanakan belum optimal. *Although Perum Jamkrindo has made the data and information available in a format that is easy to use by its employees, Partners, Collaborators and Customers as required through a Digital Library for employees and Jamkrindo website for its partners and customers, and their usage has been regulated on its own terms.* *However Perum Jamkrindo has not consistently applied the indicator/measurement of success (effectiveness) of its output learning system. It is feared access data and information that has been implemented not optimal.*	Indikator efektivitas *Digital Library* *The effectiveness indicators of Digital Library*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
39	Walaupun Perum Jamkrindo telah memastikan bahwa tenaga kerja merepresentasikan keberagaman gagasan, budaya, serta pemikiran masyarakat dan pelanggan, dengan cara : - Melaksanakan rekrutmen sesuai Sistem Prosedur pengelolaan SDM dengan memasang informasi lowongan kerja pada *web*site internal, perguruan tinggi, mass media - Penerimaan karyawan diupayakan keterwakilan dari keberagaman suku, budaya, agama. **Namun** dalam penempatan karyawan belum memperhatian keberagaman tersebut sehingga penempatan tenaga kerja dibeberapa cabang di propinsi Indonesia bukan di isi oleh karyawan asli (putra daerah) yang berasal dari tempat tersebut yang telah mengenal keberagaman budaya setempat. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan proses pembelajaran, pengenalan dan penyesuaian bagi karyawan baru yang ditempatkan didaerah baru, dan berpengaruh kepada *Turnover* karyawan yang keluar karena alasan menikah dan keluarga ataupun ketidak sesuaian suasana & pola hidup. *Although Perum Jamkrindo has ensured that the workforce represents the diversity of ideas, culture, and thoughts of the community and customers, by:* - *Implementing recruitment in accordance with HR Management Procedure System by posting job vacancy information on internal website, college, mass media* - *Accepting employees that represent the various ethnics, cultural, and religious diversity.* *However In the placement of employees have not paid attention to the diversity so that the placement of manpower in some branches in the Indonesian provinces is not filled by the original employees (local son) who came from the place that has known the diversity of local culture. This can affect the speed and accuracy of the learning process, introduction and adjustment for new employees placed in new areas, and affecting Turnover of employees who resigned for reasons of marriage and family or mismatches with their work environment & lifestyle.*	Mekanisme *Placement* SDM *HR Placement Mechanism*
40	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempersiapkan tenaga kerjanya untuk menghadapi perubahan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja dengan cara: - Melakukan analisa dan identifikasi kebutuhan *training* (*Training Need Analysis*) - Menetapkan jenis pelatihan yang akan dilakukan *inhouse* atau eksternal - Mengadakan pelatihan & mendokumentasikan serta mengevaluasi efektivitas pelatihan **Namun** belum terbukti efektif pelaksanaannya karena system pengukurannya masih baru dilakukan tahun ini sehingga belum bisa diketahui efektivitasnya, hal ini akan dapat mempengaruhi rencana besar Perusahaan untuk menambah kantor cabang diseluruh kota di Indonesia karena ketidak tersediaan informasi dan kekurangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang memadai. *Although Perum Jamkrindo has prepared its workforce to face the changing needs of capacity and capability of workforce by:* - *Conducting analysis and identification of training needs (Training Need Analysis)* - *Setting the type of training to be conducted inhouse or externally* - *Conducting training & documenting and evaluating the effectiveness of the training* *However, it has not been proven to be effective because its measurement system is still done this year so it can not be known its effectiveness, this will affect the company's big plan to add branch offices throughout the city in Indonesia due to lack of information and lack of adequate capacity and capability of resources.*	Perencanaan rekruitmen SDM berdasarkan kapasitas & kapabitas serta *review* efektivitas pelaksanaannya. *Planning the HR recruitment based on capacity & capacity as well as review the effectiveness of its implementation.*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
42	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengelola kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan Perusahaan untuk memastikan keberlangsungan hidup Perusahaan dan mencegah/ mengurangi dampak dari pengurangan tenaga kerja, dengan cara mengevaluasi kebutuhan kapasitas dan kapabilitas karyawan serta mempertahankannya dengan memberikan remunerasi (Gaji, Penghargaan, Insentif Triwulanan, Bonus tahunan) memberi kesempatan promosi, memberi tambahan kompetensi *soft skill* dan *hard skill* secara berjenjang dan berkelanjutan kepada karyawan. **Namun** prosedur dan kebijakan pengelolaan tenaga kerja, Penilaian kinerja karyawan dan *system* Remunerasi belum di evaluasi dan belum diperbaharui dalam kurun 6 tahun ini sehingga penambahan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja pada 3 tahun terakhir ini belum dapat meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar. *Although Perum Jamkrindo has been managing the needs of the workforce and the needs of the Company to ensure the survival of the Company and prevent/mitigate the impact of a decreased manpower, by evaluating the capacity and employee capabilities and maintaining them by providing remuneration (salaries, Awards, Quarterly Incentives, Annual Bonuses) providing promotional opportunities, additional skill and hard skill competence based on catagories and continuous manner to its employees.* *However, the labor management procedures and policies, employee performance appraisal and remuneration system have not been evaluated and updated in the past 6 years, so that the addition of capacity and employment capability in the last 3 years has not been able to increase the growth of market share.*	Prosedur dan Kebijakan SDM, Penilaian Kinerja, Sistem Remunerasi dan mekanisme evaluasi/*review*-nya. *HR Procedures and Policies, Performance Assessment, Remuneration System and evaluation mechanism/review .*
43	Walaupun Perum Jamkrindo telah memberi dukungan kepada tenaga kerja melalui layanan SDM, pemberian manfaat dan kebijakan SDM, yaitu dengan cara: - Melakukan rekruitmen sesuai dengan peraturan Direksi No. 04/Per-Dir/X/2011Tentang Pengelolaan SDM Perum Jamkrindo Berbasis Risiko - Penetapan Daftar besaran gaji sesuai Kep-Dir No. 146/Kep-Dir/VII/2014 Tentang Penetapan *komponen Take Home Pay* karyawan Perum Jamkrindo. **Namun** dalam pelaksanaanya belum terlihat konsitensinya, terbukti jumlah pemberian manfaat yang berkaitan dengan ke SDM-an itu pada grafik 7.3a.1 menurun dalam 3 tahun terakhir (Tahun 2013-2015) yaitu antara lain (Tunjangan kesehatan, Tunjangan hari tua, Penghargaan pegawai). Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan keterikatan tenaga kerja dalam bekerja sehingga akan mengurangi kualitas dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap pelanggan. *Although Perum Jamkrindo has provided the support to its workforce through HR services, the provision of benefits and HR policies, that is by:* - *Conducting recruitment in accordance with Regulation of Directors No. 04 / Per-Dir / X / 2011About the risk-based Perum Jamkrindo HR management* - *Stipulation of salary list according to Kep-Dir. 146/Kep-Dir/VII/2014 regarding the Determination of Take Home Pay component of Perum Jamkrindo employees.* *However, the implementation of the above has not been consistent, as it is proven by the number of benefits related to the human resources in the graph 7.3a.1 decreased in the last 3 years (2013-2015 years), among others (Health benefits, Annuity allowance, Employee rewards). This can affect the level of employee satisfaction and the loyalty of workforce so that it will reduce the quality of speed and accuracy in customer service.*	Konsistensi pemberian manfaat utk SDM berupa Tunjangan kesehatan, Tunjangan hari tua, Penghargaan pegawai *Consistency of benefits for human resources in the form of Health Benefits, Annuity Benefits, Employee Awards*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
44	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai cara dalam memastikan bahwa budaya Perusahaan mendapatkan manfaat dari beragam gagasan, budaya, pemikiran tenaga kerja, dengan cara : - Mengidentifikasi inovasi yang telah dibuat tenaga kerja dan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja unit kerja atau Perusahaan. - Melakukan evaluasi pengaruh inovasi terhadap kinerja Perusahaan - Menetapkan inovasi terbaik dan memberikan reward kepada Tim & karyawan tersebut. **Namun** cara ini belum cukup sistematis dalam penerapannya karena belum dilakukan evaluasi dan pengukuran atas efektivitas *system* tersebut dan belum ada indikator yang memastikan penerapan Budaya Perusahaan T-R-U-S-T itu berjalan efektif. Hal ini akan berpengaruh terhadap tindaklanjut & pemastian bahwa internalisasi budaya Perusahaan tersebut telah membudaya dan terimplementasi dalam proses bisnis dan operasional pekerjaan sehari-hari karyawan. *Although Perum Jamkrindo has a way of ensuring that its corporate culture benefits from a variety of ideas, cultures, employment thinking, by:* - *Identifying innovations that its employee have made and implemented to improve the performance of work units or companies.* - *Evaluating the effect of innovation on company performance* - *Establishing the best innovation and reward the Team & its employees.* *However, this method is not sufficiently systematic in its application because effectiveness of the system has not been evaluated and measured, and there is no indicator that ensures the implementation of TRUST Company Culture is effective. This will affect the follow-up & assurance that the internalization of the corporate culture has been entrenched and implemented in the business processes and operational work of the employees.*	Sistem evaluasi dalam pelaksanaan budaya TRUST dan indikator efektivitasnya. *The evaluation system in the implementation of TRUST culture and its effectiveness indicators.*
45	Walaupun Perum Jamkrindo memiliki sistem manajemen kinerja yang memperkuat kecerdasan mengambil risiko dan kecerdasan dalam berinovasi untuk memperkuat fokus pada pelanggan, yaitu dengan cara melakukan penilaian kinerja karyawan dan unit kerja dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan memberikan bimbingan/ *training* bagi yang belum berprestasi. **Namun** cara ini belum cukup sistematis dalam penerapannya karena belum dilakukan evauasi dan pengukuran atas efektivitas *system* tersebut, hal ini terlihat dengan tidak disajikannya data kinerja dari tenaga kerja dan unti kerja. Hal ini akan berpengaruh kepada kecepatan dan ketepatan manajemen pada saat kepastian dan pengambilan keputusan tindaklanjut memperkuat perilaku dan budaya karyawan kepedulian atas risiko dan kepedulian berinovasi & *improvement* bagi kemajuan dan keberlangsungan Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has a performance management system that strengthens the risk-taking and innovating intelligence in order to strengthen customer focus, by way of assessing the performance of its employees and work units and rewarding the achievers and providing guidance for those who have not performed.* *However, this method is not systematic enough in its application because the evaluation and measurement of the system effectiveness have not been performed, it can be seen from the absence of the presented performance data from the labor and working unit. This will affect the speed and accuracy of management at the time of decision confirmation and decision-making follow-up in order to reinforce the behavior and culture of the employees who have concern for risks and concern for innovation & improvement of Company's progress and sustainability .*	Sistem Manajemen kinerja dan evaluasinya *Performance management system and its evaluation*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
46	Walaupun Perum Jamkrindo telah melalukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan dan mengkaitkannya dengan indikator keterikatan (tingkat kemangkiran, tingkat mengundurkan diri) **Namun** belum dibedakan untuk kelompok dan segmen tenaga kerja hal ini terlihat pada item survei kepuasan dan keterikatan tahun 2013-2014. Hal ini akan berpengaruh bagi manajemen dalam kepastian mengambil keputusan dan rencana tindaklanjut untuk pemenuhan harapan dan persyaratan karyawan agar karyawan puas dan loyal/terikat (*Engagement*). *Although Perum Jamkrindo has conducted employee satisfaction and engagement surveys and linked them with indicators of attachment (absenteeism, resigned level)* *However, it has not distinguished between groups and labor segments, this can be seen in the satisfaction and engagement survey item from 2013-2014. This will affect the Management in ensuring the decision-making and follow-up plans to meet employee's expectations and requirements so they can be satisfied and loyal/engaged (Engagement).*	Survei kepuasan karyawan berdasarkan segmen SDM dan indikator efektivitas keterikatannya. *Employee satisfaction survey based on HR segment and indicator of the effectiveness of its attachment.*
47	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai *system* pengembangan dan pembelajaran untuk meningkatkan fokus kepada pelanggan, yaitu dengan cara melakukan analisa masukan dan persyaratan pelanggan untuk di susun dalam program pengembangan tenaga kerja, serta mengirim tenaga pemasaran untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan fokus pelanggan. **Namun** sistem pengembangan dan pembelajaran terpadu ini belum cukup efektif untuk meningkatkan fokus dan kepedulian karyawan terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan untuk pemenuhan harapan dan persyaratan pelanggan hal ini terbukti pada KPI Perusahaan terlihat untuk kinerja pertumbuhan pangsa pasar selama 3 tahun berurut-turut menurun bahkan jauh di bawah target KPI-RKAP. Hal ini akan berdampak kepada efektivitas Perusahaan dalam menambah pasar baru dengan menambah kantor cabang dan unit di seluruh kota di Indonesia. *Although Perum Jamkrindo has a system of development and learning to improve customer focus, by way of analyzing input and customer requirements to be developed in the labor development program, and sending marketing personnel to attend trainings related to customer focus.* *However this integrated system of development and learning has not been quite effective to increase the focus and concern of the eemployees against the speed and accuracy of service in order to fulfill customer expectations and requirements. This is evident on Company KPI regarding the performance of market share growth for 3 consecutive years that shows a decreasing trend even far below the KPI-RKAP target. This will bring an impact on Company effectiveness in adding new markets by way of adding more branch offices and units across cities in Indonesia.*	Sistem pengembangan dan pembelajaran terpadu terhadap SDM dalam meningkatkan fokus dan kepedulian karyawan terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pelanggan. *Integrated learning and development system for human resources in improving the focus and care of employees on the speed and accuracy of service to customers.*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
48	Walaupun Perum Jamkrindo telah memiliki proses kerja yang sehari-hari dilaksanakan telah memenuhi persyaratan utama proses, dengan cara : - Monitoring & evaluasi rutin pemenuhan persyaratan utama dari "proses-proses utama" harian dilakukan oleh pemilik proses. [Bila terjadi *Gap* & tidak dapat diselesaikan oleh pemilik proses, *gap* tersebut akan ditindaklanjuti oleh atasan yang bersangkutan - Evaluasi Pencapaian ukuran atau indikator masing-masing proses kerja utama secara keseluruhan dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja setiap hari selasa [semua masalah diselesaikan secara terpadu] keseluruhan dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja setiap hari selasa [semua masalah diselesaikan secara terpadu]. **Namun** Perusahaan belum melakukan evaluasi atas cara-cara yang digunakan tersebut untuk mengetahui proses kerja telah memenuhi persyaratan utama proses. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan manajemen dalam menemukenali permasalahan yang ada dan dalam mengambil keputusan pada saat menetapkan persyaratan proses utama. *Although Perum Jamkrindo already has a daily work process to be implemented, it still has to fulfill the main process requirements by:* - *Performing a routine monitoring & evaluation to fulfill the key requirements of daily "Major processes" performed by the process owner. In the event of a Gap & it cannot be completed by the process owner, the gap will be acted upon by the Supervisor in question* - *Evaluating the achievement of the size or indicator of each major work process as a whole which is conducted through the Performance Evaluation Meetings every Tuesday [all issues are solved in an integrated manner] throughout the Performance evaluation meetings held every Tuesday [all issues are solved in an integrated manner].* *However, the company has not yet performed an evaluation on the means used to identify whether or not such work process has met the main requirements of the process. This will affect the speed and accuracy of management in identifying existing problems and in making decisions while defining key process requirements.*	a. Evaluasi Pencapaian ukuran atau indikator masing-2 proses kerja utama secara keseluruhan → terhadap SOP, Peraturan Direks, & ketentuan lain b. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan penyusunan Profil Risiko yang dikeluarkan setiap Triwulan *a. Evaluation on the Achievement of the size or indicator of every main work process as a whole →against SOPs, Providence, & other provisions* *b. The Risk Management Division has prepared the Risk Profile issued every Quarter*
49	Walaupun Perum Jamkrindo telah mempunyai metode dalam menetapkan proses pendukung yang utama di Perusahaan, melalui cara : 1. Unit bisnis terkait mengajukan usulan alur kerja pendukung 2. Unit terkait yang menangani alur kerja melakukan analisa dampak dari penetapan proses serta alur kerja pendukung yang di usulkan. **Namun** belum efektif hal ini terlihat pada KPI Perusahaan selama 3 tahun berturut-turut Indikator pertumbuhan pasar menurun dan di bawah target RKAP. *Although Perum Jamkrindo already has a method of establishing the main support process in the Company, by:* *1. The associated business unit submits the proposed supporting workflow* *2. The corresponding unit handling the workflow performs an impact analysis of the process setting as well as the proposed supporting work flow.* *However, it has not yet been effective, this can be seen in the Company KPI for 3 consecutive years that the Indicator of market growth was declining and below the RKAP target.*	Divisi Mananjemen Risiko akan menggunakan metode BIA (*Business Impact Analysis*) dalam mengidentifikasi proses bisnis utama yang kritikal *The Risk Mortgage Division will use the BIA (Business Impact Analysis) method to identify critical key business processes*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
50	Walaupun Perum Jamkrindo telah memiliki metode operasi sehari-hari untuk memastikan proses pendukung telah memenuhi persyaratan utama pendukung bisnis, dengan cara : - Monitoring & evaluasi rutin pemenuhan persyaratan utama dari "proses pendukung " harian dilakukan oleh pemilik proses. [Bila terjadi *Gap* & tidak dapat diselesaikan oleh pemilik proses, *gap* tersebut akan ditindaklanjuti oleh atasan yang bersangkutan - Evaluasi Pencapaian ukuran / indikator masing-masing proses kerja utama secara keseluruhan dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja setiap hari selasa & diselesaikan secara terpadu. **Namun** Perusahaan belum melakukan evaluasi atas cara-cara yang digunakan tersebut untuk mengetahui proses pendukung telah memenuhi persyaratan utama pendukung bisnis. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan manajemen dalam menemukenali permasalahan yang ada dan dalam mengambil keputusan pada saat menetapkan persyaratan proses pendukung operasional bisnis Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has already had a daily operation method to ensure that the supporting process meets the key business support requirements, by way of:* - *Regular monitoring and evaluation on the fulfillment of key requirements of the daily "support process" which are carried out by the process owner. [In the event of a Gap & it cannot be completed by the process owner, the gap will be acted upon by the supervisor* - *Evaluation Achievement of the size/indicator of each main work process which as a whole is conducted through Performance Evaluation Meetings on a daily basis & they are settled in an integrated manner.* *However, the Company has not yet evaluated the means used to identify whether or not the supporting process has met the main requirements of business supporters. This will affect the speed and accuracy of Management in identifying existing problems and in making decisions while establishing the requirements of the business operations support process.*	Divisi Manajemen Risiko telah menambahkan batasan SLA 7 Hari dalam pemberian opini untuk penyusunan PKS Program Kerja atas proses pendukung bisnis *The Risk Management Division has added a 7 day SLA limit in giving opinion for the preparation of the MCC Work program on the business support process*
51	Walaupun Perum Jamkrindo telah meningkatkan proses kerjanya untuk kualitas /kinerja produk dan kinerja bisnis serta untuk mengurangi *varialibilitas*, dengan cara: - Penyusunan dokumen dan implementasi SOP seluruh proses kegiatan Perusahaan. - Pelaksanaan Evaluasi untuk masing-masing proses (pemastian kesesuaian prosedur dengan pelaksanaan untuk mengurangi *variabelitas*) dilakukan berbarengan dengan rapat evaluasi kinerja - Pembuatan *Action Plan* perbaikan masing-masing (*Improvment Process*/KPI) **Namun** hal ini belum efektif, terbukti dengan beberapa indikator belum terukur, seperti indikator *viabilitas* dan kualitas produk . Hal ini berdampak kepada efektifitas pengukuran hasil produk dan proses. *Although Perum Jamkrindo has improved its work processes for the product quality and performance and business performance and reduced the inconsistency , by:* - *Preparation of SOP documents and implementation throughout Company's activities.* - *Evaluation implementation for every process (assurance of conformity of procedures with implementation to reduce the variability) which is conducted simultaneously with the performance evaluation meeting* - *Making Improvement Action Plan (Improvement Process/KPI)* *However, this has not been effective, as evidenced by some unmeasured indicators, such as indicators of viability and product quality. This has an impact on the effectiveness of product and process measurement results.*	Dalam rangka meningkatkan kualitas proses kerja dan kinerja produk, Perusahaan telah melakukan *review* beberapa pengendalian *internal control* yang terdapat dalam SOP Perusahaan dengan menggunakan konsultan PBC *In order to improve the quality of work process and product performance, the Company has reviewed several internal controls listed in the Company's SOP by employing a PBC consultant*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
51	Walaupun Perum Jamkrindo mempunyai metode dalam meminimalkan biaya inspeksi pengujian dan audit proses maupun audit kinerja, dengan cara: - Stratifikasi masing-masing kegiatan inspeksi, pengujian, audit proses atau kinerja. - Analisa biaya tertinggi dari masing-masing kegiatan buatkan formula untuk meminimalkan biaya (pengurangan frequensi kegiatan, pengalihan pelaksanaan kegiatan tersebut dari eksternal ke internal. - Tetapkan jadwal baru kegiatan inspeksi, pengujian, dan audit. **Namun** Perusahaan belum melakukan evaluasi atas cara-cara yang digunakan tersebut untuk mengetahui besaran yang diperoleh dalam meminimalkan biaya inspeksi, terbukti belum terukurnya beberapa kinerja biaya inspeksi, biaya pengujian, biaya audit proses dan kinerja, efiesiensi biaya proses. Hal ini dapat mempengaruhi efektifitas dari upaya manajemen meminimalkan biaya agar kompetitif di dalam persaingan pasar. *Although Perum Jamkrindo already had methods to minimize the cost of inspection testing and audit processes, as well as performance audits, by:* - *Stratification of each activity of inspection, testing, process audit or performance.* - *Highest cost analysis of each activity makes a formula for minimizing costs (reducing the frequency of activities, transferring the execution of such activities from external to internal.* - *Setting a new schedule of inspection, testing and audit activities.* *However, the Company has not evaluated the methods used to determine the quantities obtained in minimizing inspection costs, as evidenced by the unfathomable performance of inspection costs, testing costs, process and performance audits, and the cost effectiveness of the process. This can affect the effectiveness of management efforts to minimize costs in order to be competitive in market competition.*	a. Metode Inspeksi & Audit berdasarkan stratifikasi dan indikator efektivitasnya. b. Analisa dan evaluasi biaya inspeksi & Audit *a. A working period is less than 1 (one) year, 1 (one) month salary; Inspection & Audit Methods are based on stratification and indicator of its effectiveness.* *b. Analyze and evaluate inspection & audit costs*
52	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasok, dengan cara Analisa kinerja *vendor* (ketepatan waktu delivery, tepat harga, tepat jumlah dan tepat kualitas) yang sedang atau telah menyelesaikan kontrak kerjanya menetapkan dan membuat daftar *vendor* yang berkinerja baik dan berkinerja buruk **Namun** Perusahaan belum mengevaluasi cara/mekanisme dalam mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan tersebut efektif, hal ini terbukti belum adanya hasil tertulis dari pelaksanaan evaluasi tersebut. Hal terbukti belum adanya hasil tertulis dari pelaksanaan evaluasi tersebut. Hal ini akan berdampak pada risiko terpilihnya kembali *vendor* yang tidak layak atau berkinerja buruk. *Although Perum Jamkrindo has measured and evaluated the performance of suppliers, by means of vendor performance analysis (delivery timeliness, exact price, exact quantity and quality) that are or have completed their contracts, established and created a list of suppliers that perform well and perform poorly* *However, the Company has not evaluated the method/ mechanism in evaluating the extent to which such efforts are effective, it is proven that there is no written result from the evaluation. This will have an impact on the risk of re-electing a supplier that is not feasible or underperforming.*	a. Mekanisme penetapan Pemasok/ *vendor* b. Evaluasi kinerja pemasok, dengan cara Analisa kinerja *vendor* (ketepatan waktu *delivery*, tepat harga, tepat Jumlah dan tepat kualitas) *a. Supplier / vendor establishment mechanism* *b. Evaluation of supplier performance, by means of vendor performance analysis (delivery timeliness, exact price, exact quantity and quality)*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
53	Walaupun Perum Jamkrindo telah mengelola pemasok yang berkinerja buruk, dengan cara : - Memberlakukan denda sebesar 5/10.000 s/d 1/100 dari nilai kontrak bagi *vendor* yang terlambat menyelesaikan pekerjaan atau tidak sesuai dengan kontraknya. - Beberapa kali melakukan keterlambatan diberhentikan sebagai *vendor* dimaksukkan kedalam *black list*/daftar hitam *vendor*. **Namun** Perusahaan belum mengevaluasi cara/mekanisme dalam mengelola pemasok yang berkinerja buruk untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan tersebut efektif, hal ini terbukti belum adanya prosedur tertulis dalam pengelolaan pemasok yang buruk. Hal ini akan berdampak pada lamanya waktu memutuskan pemasok yang akan bekerjasama dalam pengadaan barang dan jasa bagi Perusahaan. *Although Perum Jamkrindo has managed the poorly performing suppliers, by:* - *Imposing a fine of 5/10.000 to 1/100 of the contract value for suppliers who are late to complete the work or not in accordance with the contract.* - *Several times delays will be terminated as suppliers and pushed into the black list/suppliers blacklist.* *However, the Company has not evaluated the method/mechanism in managing poorly performing suppliers to find out how effective these efforts are, as evidenced by the lack of written procedures in poor supplier management. This will have an impact on the length of time deciding which suppliers will be singled out to cooperate in the procurement of goods and services for the company.*	Mekanisme evaluasi dan sanksi atas *vendor* yang berkinerja buruk *Evaluation mechanisms and sanctions against poorly performing suppliers*
B	Dimensi "Hasil" *"Results" Dimension*	
1	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran hasil-hasil produk dan proses sebesar 89% yaitu sebanyak 8 data dari 9 yang di persyaratkan **Namun** beberapa kinerja sebagai berikut: *LEVEL*: - 5 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnnya. - 3 Data *poor*/menurun kinerja dibanding sebelumnya yaitu (rasio klaim, penjaminan kredit KBG, rasio klaim penjaminan *surety bond*, rasio penjaminan kredit distribusi barang) *TREND*: - 1 Data *Adverse* / kinerja menurun selama 3 tahun yaitu risiko klaim - 2 Data *unfaroble*/cenderung menurun 3 tahun terakhir *INTEGRATION*: Data belum di ukur yaitu harga yang di tawarkan di pasar. *Although Perum Jamkrindo has conducted the measurement of products and process results with the result shows 89% i.e. as many as 8 data from 9 which is required* *However some performance are as follows:* *LEVEL :* - *5 Data is equal to the performance of the previous year.* - *3 Poor data/decreased in performance compared to that of previously (claims ratio, credit guarantee of KBG, Surety bond guarantee claim rate , credit distribution. credit distribution ratio)* *TREND :* - *1 Adverse Data/Performance decreased in the last 3 years i.e. the claim risk* - *2 Data unfavorable/tend to decrease in the last 3 years* *INTEGRATION :* *The data has not been measured i.e. the price offered in the market.*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
2	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran efektifitas operasional sebesar 96% yaitu sebanyak 24 data dari 25 data yang di persyaratkan. **Namun** beberapa kinerja: *LEVEL*: - 1 Data *no Level* dilakukan 1 periode yaitu pada tahun 2014 - 4 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya - 13 Data *Poor*/menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu penyempurnaan SOP, perkembangan kejadian darurat, rasio klaim, beban klaim pertumbuhan premi KUR, jumlah debitur *COMPARISON*: - 1 Data *No Comparison*/tidak ada pembanding penyempurnan SOP *INTEGRATION*: - 1 Data belum diukur yaitu produktivitas *sales* *Although Perum Jamkrindo has conducted an operational effectiveness measurement, which resulted in 96% score, i.e. 24 data from 25 data in requirement.* *However, some performances:* *LEVEL :* - *1 Data shows no Level was conducted in 1 period i.e. in 2014* - *4 The data is equal to the previous year's performance* - *13 Poor data/decrease compared to data of the previous year i.e. SOP Improvement, emergency event development, claim ratio, KUR claim premium growth expense, the number of Debtor* *COMPARISON :* - *1 Data with no Comparison/no comparison with SOP refinement* - *INTEGRATION :* - *1 Data has not been measured i.e. sales productivity*	
3	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran kesiapan menghadapi keadaan darurat sebesar 50% sebanyak 2 data dari 4 data yang dipersyaratkan, **Namun** data *LEVEL*: - 2 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu (Kesiapan APAR, Kecepatan pemulihan aliran listrik) *INTEGRATION*: - 2 Data belum diukur (Skor SMK3, Capaian simulasi tanggap darurat) *Although Perum Jamkrindo has made a measurement of Readiness to face any emergency by 50% with as many as 2 data from 4 data required, However the data* *LEVEL :* - *2 Data is equal to the previous year's performance (APAR Readiness, Electricity recovery speed)* *INTEGRATION :* - *2 Data is not yet measured (SMK3 Score, Achievement of emergency response simulation)*	
4	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran Hasil *Supply Chain Management* sebesar 100% yaitu sebanyak 7 data dari yang dipersyaratkan**, Namun** beberapa data: *LEVEL*: - 7 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu (Pembelian langsung, Penunjukkan langsung, Pemilihan langsung, Lelang), Ketepatan & kesesuaian barang dan jasa yang diterima, kinerja pemasok yang sesuai. *TREND*: - 5 Data *Unfavorable* yaitu cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir yaitu Kecepatan proses pengadaan (Pembelian langsung, Penunjukkan langsung, Pemilihan langsung, Lelang), Ketepatan barang dan jasa yang diterima. *Although Perum Jamkrindo has measured 100% Supply Chain Management results as many as 7 data from the required ones, However some data:* *LEVEL :* - *7 Data is equal to the previous year's performance (Direct purchase, Direct appointment, Direct selection, Auction), Accuracy & suitability of goods and services received, suitable supplier work.* *TREND :* - *5 Unfavorable data that tend to decline in the last 3 years i.e. Speed Procurement process (Direct purchase, Direct appointment, Direct selection, Auction), Accuracy of goods and services received.*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
5	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran Kepuasan Pelanggan sebesar 86% yaitu 6 data dari 7 data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja berikut: *LEVEL*: - 2 Data *No Level* karena baru diukur 1 periode pada tahun 2014 - 2 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu (Indeks ketidak Puasan pelanggan, keluhan pelanggan syariah) - 1 Data *Poor*/kinerja menurun tahun sebelumnya yaitu Keluhan Pelanggan *TREND*: - 2 Data *No Trend* karena hanya ada 1 periode pengukuran yaitu Indeks kepuasan pelanggan Kanwil, Indeks kepuasan dimensi *Responsivenes* - 1 Data *Adverse*/menurun 3 tahun terakhir yaitu Keluhan pelanggan - 2 Data *Unfavorable*/cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir INTEGRATION: - 1 Data belum terukur yaitu Indeks kepuasan terhadap pelanggan pesaing *Although Perum Jamkrindo has measured its Customer Satisfaction of 86% i.e. 6 data from 7 data required, However, some of the following performance data:* *LEVEL :* - *2 Data of No Level because the new ones were measured 1 period in 2014* - *2 Data is equal to the performance of previous year i.e. (Index of customer dissatisfaction, customer complaint sharia)* - *1 Poor's data/performance shows a decline from the previous year Customer Complaints* *TREND :* - *2 Data with No Trend because there is only 1 period of measurement i.e. the Regional Customer Satisfaction Index, Satisfaction Index dimension responsiveness* - *1 Data Adverse/decreased in the last 3 years with Customer complaints* - *2 Data Unfavorable/tend to decrease in last 3 years* *INTEGRATION:* - *1 The data has not been measured, i.e. Satisfaction index to competitor customers*	
6	Walaupun Perum Jamkrindo melakukan pengukuran Keterikatan Pelanggan 57% yaitu 4 data dari data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja : *LEVEL*: - 1 Data *No Level* yaitu Indeks *Customer Engagement* pelanggan KUR *TREND*: - 1 Data *No Trend* yaitu Indeks *Customer Engagement* pelanggan KUR *INTEGRATION*: - 3 Data belum terukur yaitu: Retensi Pelanggan, Loyalitas Pelanggan,Frekuensi komunikasi dengan pelanggan *Although Perum Jamkrindo has measured its Customer Attachment which shows 57% i.e. 4 data from the required data, however some performance data:* *LEVEL :* - *1 Data shows No Level is KUR Customer Engagement Index* *TREND :* - *1 Data shows No Trend is KUR Customer Engagement Index* *INTEGRATION :* - *3 Data are yet measurable: Customer Retention, Customer Loyalty, Frequency of communication with customer*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
7	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan Pengukuran Kapasitas dan Kapabilitas pegawai sebesar 100% yaitu sebanyak 6 data, **Namun** beberapa kinerja: *LEVEL*: - 1 Data sama dengan kinerja sebelumnya yaitu Pemenuhan Standar Sertifikasi - 3 Data *Poor*/menurun dibanding sebelumnya yaitu Evaluasi Diklat Produktivitas karyawan terhadap premi, S-1 terhadap total pegawai *TREND*: - 2 Data *Unfavorable*/cenderung menurun 3 tahun terakhir yaitu Produktivitas karyawan terhadap premi, Produktivitas karyawan terhadap EBT *COMPARISON*: - 1 Data *No Comparison* yaitu Pemenuhan Standar Sertifikasi *Although Perum Jamkrindo has measured 100% of capacity and employee capability with as many as from 6 data, However, some performance:* *LEVEL :* - *1 Data is equal to the previous performance of Compliance Standard Certification* - *3 Data Poor/decreased compared to previous Evaluation Training Employee productivity to premium, S-1 to total employees* *TREND :* - *2 Data Unfavorable/tends to decline in the last 3 years i.e. employee productivity to premiums, Employee productivity of EBT* *COMPARISON :* - *1 Data shows No Comparison is Compliance Certification Standard*	
8	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran Iklim pegawai sebesar 100% yaitu sebanyak 5 data, **Namun** beberapa kinerja: *LEVEL*: - 1 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu Kecelakaan Kerja - 1 Data Poor / kinerja menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu keamanan & kehilangan barang di area kerja *TREND*: - 1 Data *Unfavorable*/kinerja cenderung menurun pada 3 tahun terakhir yaitu keamanan & kehilangan barang di area kerja *Although Perum Jamkrindo has made Working Environment Claim with its 100% employees as many as 5 data, however Some performance:* *LEVEL :* - *1 Data shows equal to the previous year's performance of Work Accident* - *1 Data shows Poor /Performance, a decrease compared to the previous year i.e. the security & loss of goods in the working area* *TREND :* - *1 Data shows Unfavorable/performance which tends to decline in the last 3 years within security & loss of goods in the work area*	
9	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan Pengukuran Keterikatan Pegawai sebesar 83% yaitu sebanyak 5 data dari 6 data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa kinerja: *LEVEL*: - 1 Data *Poor* kinerja menurun dibanding sebelumnya Tunjangan Kesehatan *TREND*: - 1 Data *No Trend* yaitu Indeks kepuasan tenaga kerja. - 1 Data *Unfavorabel*/cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir yaitu Tunjangan Kesehatan - 1 Data *Adverse*, kinerja menurun selama 3 tahun terakhir, yaitu Tunjangan Hari Tua *INTEGRATION*: - 1 Data belum dilakukan pegukuran yaitu Pencapaian kinerja tenaga kerja *Although Perum Jamkrindo has taken measurement of Employee Attachment of 83% i.e. 5 data from 6 data required, however some performance:* *LEVEL :* - *1 shows Poor performance data decreased compared to previous Health benefits* *TREND :* - *1 Data shows No Trend i.e. Labor satisfaction index.* - *1 Data shows Unfavorabel/tend to decrease in last 3 years i.e. Health Benefit* - *1 Data shows Adverse , Performance decreased during last 3 years, i.e. Old Age Benefit* *INTEGRATION :* - *1 Data have not been conducted i.e. Achievement of labor performance*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
10	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran pengembangan pegawai sebesar 100% yaitu sebanyak 3 data sesuai dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja: *LEVEL*: - 1 Data *Poor*, kinerjanya menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu Pelatihan Manajerial (Pengembangan Tenaga Kerja) *Although Perum Jamkrindo has measured its employee development of 100% as many as 3 data as required, however some performance data:* *LEVEL :* - *1 shows Poor Data , Its performance decreased compared to previous year i.e. Managerial Training (Labor Development)*	
11	Walaupun Perum Jamkrindo melakukan pengukuran terhadap Kepemimpinan sebesar 100% yaitu 5 data, **Namun** beberapa data kinerja menunjukkan: *LEVEL*: - 5 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu Sosialisasi Visi-*Value* kepada *stakeholder*, Pencapaian KPI, Komunikasi 2 arah yg dihadiri manajemen senior, jumlah rapat manajemen, *Morning Call/Briefing*. *COMPARISON*: - 3 Data *No Comparison*, tidak ada pembanding yaitu Sosialisasi Visi Value *stakeholder*, komunikasi 2 arah yang dihadiri pimpinan, *Morning Call/briefing*. *Although Perum Jamkrindo measured 100% of its leadership on 5% of the data, some performance data showed:* *LEVEL :* - *5 Data shows equal to the previous year's performance of Vision- Value Socialization to Stakeholder, Achievement of KPI, 2-way Communication attended by Senior Management, several management meetings, Morning Call/Briefing.* *COMPARISON :* - *3 Data shows No Comparison, there is no comparison i.e. Socialization Vision Value Stakeholder, 2-way communication attended by leaders, Morning Call/briefing.*	
12	Walaupun Perum Jamkrindo melakukan pengukuran terhadap Tata Kelola sebesar 100% yaitu 6 data **Namun** beberapa data kinerja menunjukkan: *LEVEL*: - 2 Data sama dengan sebelumnya "KPI kontrak manajemen, kesehatan Audit *COMPARISON*: - 2 Data *No Comparison*, belum dibandingkan dengan kinerja pesaing yaitu % Penyelesaian Temuan (Audit Internal & Audit External) *Although Perum Jamkrindo has measured 100% of GCG which is 6 data. However some performance data show:* *LEVEL :* - *2 Data shows the same as before "KPI contract management, health Audit* *COMPARISON :* - *2 Data shows No Comparison , not yet compared with competitor's performance i.e. % Finding Completion (Internal Audit & External Audit)*	
13	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap Hukum dan Regulasi sebesar 100% yaitu 2 data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja menunjukkan *LEVEL*: - 2 Data sama dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu jumlah klaim sampai keputusan pengadilan, jumlah kasus yang sampai kepengadilan *COMPARISON*: - 2 Data *No Comparison*, belum dibandingkan dengan pesaing *Although Perum Jamkrindo has measured a 100% compliance towards the Law and Regulation, i.e. 2 data required, however, some performance data show* *LEVEL :* - *2 Data shows equal to the previous year's performance ie Number of claims to court decision, number of cases up to court* *COMPARISON :* - *2 Data shows No Comparison, not yet compared with that of competitors*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
14	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap Etika sebesar 50% yaitu 1 data dari 2 yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja menunjukkan: *LEVEL*: - 1 Data Sama dengan kinerja sebelumnya yaitu jumlah surat peringatan. *COMPARISON*: - 1 Data *No Comparison*, yaitu Jumlah surat peringatan kepada pegawai. *INTEGRATION*: - 1 Data belum dilakukan pengukuran yaitu Indeks persepsi *stakeholder* *Although Perum Jamkrindo has measured Ethics 50% compliance i.e. 1data of 2 required, however some performance data show:* *LEVEL :* *- 1 Data is equal to previous performance i.e. Number of warning letters.* *COMPARISON :* *- 1 Data shows No Comparison, i.e. Number of warning letters to employees.* *INTEGRATION :* *- 1 Data has not been measured i.e. perception index Stakeholder*	
15	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap kemasyarakatan sebesar 100% yaitu 3 data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja menunjukkan: *LEVEL*: - 2 Data *Poor*, kinerja menurun dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu Sumbangan kepada masyarakat dan dana PKBL yang tersalurkan *TREND*: - 1 Data *Unfavorable*, 3 tahun terakhir cenderung menurun yaitu Dana PKBL *COMPARISON*: - 1 Data *No Comparison*, tidak ada data pembanding yaitu *Sponsorship* *Although Perum Jamkrindo has made a measurement to the society of 100% i.e. 3 data required, however some performance data show:* *LEVEL :* *- 2 show Poor data , performance decreased compared to the previous year, ie Contribution to community and PKBL funds channeled* *TREND :* *- 1 shows Data Unfavorable , the last 3 years tend to decrease the PKBL Fund* *COMPARISON :* *- 1 Data shows with No Comparison, i.e. the Sponsorship*	
16	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap Hasil Implementasi Strategi sebesar 75% yaitu 6 data dari 8 data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data sebagai berikut: *LEVEL*: - 3 Data sama dengan sebelumnya yaitu Realisasi program & Anggaran RJP, Realisasi Program & RKAP, Realisasi Pencapaian Kontrak Manajemen. - 1 Data Poor, kinerjanya menurun yaitu Efektivitas RKAP premi bruto. *TREND*: - 1 Data Adverse, menurun selama 3 tahun terakhir, yaitu Efektivitas RKAP *INTEGRATION*: - 2 Data belum dilakukan pengukuran yaitu % Realisasi Penguatan *Core Competence* untuk saat ini dan untuk saat mendatang *Although Perum Jamkrindo has made measurements on the Implementation Results Strategy shows a result of 75% i.e. 6 data from 8 data required, however some data are as follows:* *LEVEL :* *- 3 Data is equal to the previous program realization & Budget CPR, Realization Program & RKAP, Realization of management contract achievement.* *- 1 Poor data, shows that its performance has decreased i.e. effectiveness of RKAP of gross premium.* *TREND :* *- 1 Data shows the Adverse, i.e. decreased in the last 3 years, i.e. Effectiveness RKAP* *INTEGRATION :* *- 2 Data has not been measured i.e.% Realization of core Competence strengthening for the present and in the future*	

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No	Rekomendasi KPKU 2015 *KPKU Recommendation in 2015*	Tindak Lanjut di Tahun 2016 *Follow Up in 2016*
17	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap Kinerja Keuangan sebesar 93% yaitu 14 Data dari 15 Data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja: *LEVEL*: - 4 Data *Poor* yaitu *Collection Periode, Day Cash on Hand*, BOPO, ROE *TREND*: - 2 Data *Unfavorable*, cenderung menurun 3 tahun yaitu ROA & ROE - 3 Data *Adverse*, memburuk terus dalam periode 3 tahun terakhir yaitu *Collection Periode*, *Day Cash on Hand*, BOPO *INTEGRATION*: - 1 Data belum dilakukan pengukuran yaitu *Asset Utilization* *Although Perum Jamkrindo has made measurements on the Financial Performance of 93% ie 14 Data from 15 Data Required, however some performance data:* *LEVEL :* *- 4 Data show Poor i.e. Collection Period, Day Cash on Hand , BOPO, ROE* *TREND :* *- 2 show Unfavorable data , tends to decline 3 years ie ROA & ROE* *- 3 show Adverse data , deteriorated steadily over the last 3 years of Collection Period , Day Cash on Hand , BOPO* *INTEGRATION :* *- 1 Data has not been supported with measurement of Asset Utilization*	
18	Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran terhadap Kinerja Pasar sebesar 75% yaitu 3 Data dari 4 Data yang dipersyaratkan, **Namun** beberapa data kinerja; *LEVEL*: - 1 Data sama dengan kinerja sebelumnya yaitu Pasar baru yang dimasuki 1 Data *Poor*/menurun yaitu Pertumbuhan pangsa pasar (*Volume* KUR) *TREND*: - 1 Data *Adverse*, yaitu menurun terus dalam 3 tahun terakhir yaitu Pertumbuhan pangsa pasar (*Volume* KUR) COMPARISON: - 2 Data *No Comparison*, tidak ada data pembanding/pesaing yaitu Pertumbuhan pangsa pasar, Pasar baru yang dimasuki INTEGRATION: - 1 Data belum dilakukan pengukuran yaitu tingkat pemenangan *tender* *Although Perum Jamkrindo has taken the measurements on its Market Performance of 75% i.e. 3 Data from 4 Data Required, however some performance data;* *LEVEL :* *- 1 Data is equal to the previous performance of the new market entered 1 Data Poor/decline is the growth of market share (KUR Volume)* *TREND :* *- 1 Adverse data , which shows a decrease steadily in the last 3 years i.e. the growth of market share (KUR Volume)* *COMPARISON:* *- 2 Data with No Comparison, no comparison/competitor data i.e. the growth of market share, new market entered* *INTEGRATION:* *- 1 Data has not been measured, namely the level of tender won*	

v = sudah ditindaklanjuti
x = belum ditindaklanjuti

V = already acted upon
X = not yet acted upon

Penilaian KPKU Tahun 2016

Seperti halnya penilaian KPKU tahun 2015, penilaian KPKU untuk tahun 2016 didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di bawah ini disampaikan hasil penilaian KPKU Perusahaan tahun 2016.

KPKU Assessment in 2016

Similar to KPKU assessment of 2015, KPKU assessment of 2016 is based on the method described in KPKU documents as established by the Ministry of SOE. Below is the result of KPKU assessment of the Company in 2016.

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Kategori *Category*	Maksimal Skor *Maximum Score*	Persentase *Percentage* (%)	Skor *Score* (nominal)
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan *Category 1: Leadership*			
Kepemimpinan Senior *Senior Leadership*	70	60%	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *Governance and Community Responsibility*	50	55%	27,50
Kategori 2: Perencanaan Strategis *Category 2: Strategic Planning*			
2.1. Pengembangan Strategi *Strategy Development*	40	55%	22,00
2.2. Implementasi Strategi *Strategy Implementation*	45	60%	27,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan *Category 3: Focus on Customers*			
3.1. Suara Pelanggan *Customer Voice*	45	60%	27,00
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan *Customer Engagement*	40	55%	22,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan *Category 4: Measurement, Analysis, and Management of Knowledge*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *Measurement, Analysis, and Improvement of Company's Performance*	45	60%	27,00
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi *Knowledge Management, Information Management, and Information Technology*	45	60%	27,00
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja *Category 5: Focus on Manpower*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja *Manpower Environment*	40	60%	24,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja *Manpower Engagement*	45	55%	24,75
Kategori 6: Fokus Operasi *Category 6: Focus on Operation*			
6.1. Proses Kerja *Work Process*	45	60%	27,00
6.2. Efektivitas Operasional *Operations Effectiveness*	40	55%	22,00
Kategori 7: Dimensi Hasil *Category 7: Dimension of Results*			
Hasil/Kinerja Produk dan Proses *Result/Performance of Product and Process*	110	50%	55,00
Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *Result/Performance of Customer Focus*	85	50%	42,50

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Kategori *Category*	Maksimal Skor *Maximum Score*	Persentase *Percentage* (%)	Skor *Score* (nominal)
Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *Result/Performance of Manpower Focus*	85	45%	38,25
Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola *Result/Performance of Leadership and Governance*	80	45%	36,00
Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar *Result/Performance of Finance and Market*	90	50%	45,00
Jumlah *Total*	1.000		536,00
Kategori *Category*	"Good Performance"		

Opportunity of improvement dari hasil penilaian KPKU tahun 2016 yang menjadi rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi "Proses"
   a. Walaupun Perum Jamkrindo aktif mendukung dan mengelola komunitas utama Perusahaan, khususnya yang terkait dengan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL), dengan cara:
      i. Penetapan kriteria yang menjadi target Program Kemitraan.
      ii. Penetapan anggaran untuk kegiatan Program Kemitraan.
      iii. Evaluasi terhadap proposal yang masuk ke unit pengelola PKBL.
      iv. Penetapan proposal yang dapat disetujui.

      Namun metode mendukung dan mengelola komunitas utama Perusahaan, khususnya yang terkait dengan PKBL terbukti belum efektif. Hal ini terlihat dari Laporan Tahunan Kinerja PKBL yang mana selama 3 (tiga) tahun terakhir kinerjanya menunjukkan:
      i. Program Kemitraan (Efektivitas penyaluran & Kolektibilitas pengembalian pinjaman) mengalami penurunan (*Adverse*) yaitu:
         - Efektivitas penyaluran tahun 2013 sebanyak 90% dan di tahun 2014 sebesar 60,75%, pada tahun 2015 hanya 39,69%
         - Kolektibilitas pengembalian pinjaman pada tahun 2013 sebesar 90,10%, tahun 2014 sebesar 86,40% dan menurun menjadi 66,95% di tahun 2015.
      ii. Progam Bina Lingkungan hanya 35% Dati-1 yang dilayani (12 dari 34 Dati) dan hanya 88% dana yang tersalurkan dan tidak terdisribusi merata karena di

Opportunity of improvement from KPKU assessment results in 2016 which became recommendation for improvement are as follows:

1. "Process" Dimension
   a. Although Perum Jamkrindo actively supports and manages the Company's main community, especially those related to the Partnership & Community Development Program (PKBL), by:
      i. Establishing criteria that become the target of the Partnership Program.
      ii. Determining Budget for Partnership Program activities.
      iii. Evaluating proposals submitted to PKBL management units.
      iv. Approving proposals.

      However the methods of supporting and managing the Company's main community, particularly those related to PKBL have proven to be ineffective. This can be seen from the annual report of PKBL's performance which during the last 3 (three) years the performance showed that:
      i. Partnership Program (effectiveness of disbursement & Collectibility of loan repayment) has decreased (Adverse) that is:
         - The effectiveness of distribution in 2013 is 90% and in 2014 is 60.75%, in 2015 is only 39.69%.
         - The loan repayment collectibility in 2013 is 90.10%, in 2014 is 86.40%, and decreases to 66.95% in 2015.
      ii. The Community Development Program is only 35% of the Dati-1 (Level 1 Region) served (12 out of 34 Dati) and only 88% of the funds are distributed and

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

DKI Jakarta sampai 283% dari anggaran dan 11 Dati lainnya hanya rata-rata 28% dana tersalurkan.

Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya Perusahaan dalam meningkatkan citra Perusahaan (*brand image*) dilokasi mana kantor wilayah / kantor cabang berada.

b. Walaupun Perum Jamkrindo telah mengumpulkan dan menganalisa data yang relevan & mengembangkan informasi dalam elemen tantangan & keunggulan strategis dengan cara:
   i. Melakukan Analisa SWOT menghasilkan *positioning* & Rumusan Strategi Perusahaan.
   ii. Merumuskan strategi untuk mencapai sasaran strategis.
   iii. Menyusun program untuk menjawab tantangan dan keunggulan strategis.

   Proses telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun, unit kerja terkait telah melakukan proses sesuai dengn desain sistem yang dipersyaratkan, sistem/metode secara berkala di-*review* dan ditingkatkan berdasarkan analisa dan fakta.

   Namun metode tersebut belum sistematis, karena indikator kinerja antara lain pertumbuhan *ratio* ekuitas dan *outstanding* kredit pertumbuhan inovasi proses, tingkat pengendalian dana kemitraan, dan lain-lain yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasinya, tanpa indikator tersebut, Perum Jamkrindo akan mengalami kesulitan untuk menyusun program peningkatan bisnis penjaminan.

c. Walaupun Perum Jamkrindo telah menentukan cara mendapatkan umpan balik yang segera dan dapat ditindaklanjuti dari Pelanggan mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi sebagai berikut:
   i. Menentukan pelanggan yang akan dimintakan umpan balik pada saat dikunjungi.
   ii. Melakukan pertemuan dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan.
   iii. Memilih umpan balik yang bisa ditindak lanjuti.

   Namun metode untuk mendapatkan umpan balik dan dukungan pelanggan belum dilakukan *review* karena sampai saat ini belum ada *approach* yang terdokumentasi proses telah diselaraskan dengan program-program kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang dan

not distributed equally since in Jakarta it is up to 283% of the budget and 11 other Dati is only an average of 28% of funds are channeled.

This will affect the Company's efforts in improving Company image (brand image) where the regional office/branch office is located.

b. Although Perum Jamkrindo has collected and analyzed the relevant data & developed the information in the element of challenge & strategic advantages by:

   i. Doing SWOT Analysis resulted in the positioning & Formulation of the Company's Strategy.
   ii. Formulating strategies to achieve strategic goals.
   iii. Developing programs to address strategic challenges and advantages.

   The process has been implemented for more than 1 year, the relevant work unit has performed the process according to the required system design, the system/ method is periodically reviewed and improved based on analysis and facts.

   However the method is not yet systematic, because the performance indicators among others equity ratio growth and outstanding credit growth process innovation, level of partnership fund control, etc. used to assess the effectiveness of its implementation, without such indicators, Perum Jamkrindo will have difficulties to prepare a guarantee business improved program.

c. Although Perum Jamkrindo has determined how to obtain Customer's prompt and actionable feedback on product quality, customer support, and transactions as follows:
   i. Specifying which customer will be asked for feedback during a visit.
   ii. Conducting meetings and gathering feedback from customers.
   iii. Choosing feedback that can be followed-up.

   However methods to obtain feedback and customer support have not been reviewed since no approach has been documented yet. The process has been aligned with head office, regional office, and branch offices programs, and has become an input for program implementation

menjadi masukan untuk pelaksanaan program di seluruh unit kerja, serta belum ada dokumen yang menunjukan tindak lanjut dan belum ada *evidence* menunjukan metode telah selaras dengan unit kerja.

d. Walaupun Perum Jamkrindo telah memilih dan memastikan efektifitas pemanfaatan DATA dan INFORMASI PEMBANDING yang penting untuk mendukung operasional, pengembilan keputusan strategis dan melakukan inovasi, dengan cara:
   i. Kompulasi data pembanding yang sama dengan data kinerja Perusahaan.
   ii. Bandingkan dan analisa terhadap data pesaing.
   iii. Buat *action plan* untuk dapat melampaui pencapaian kinerja pesaing, baik dari pencapaian maupun pertumbuhannya.
   iv. Tetapkan *action plan* yang akan ditindak lanjuti dan berinovasi.

   namun Perusahaan belum memiliki mekanisme yang sistematis dalam memanfaatkan data pembanding. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan operasional bisnis Perusahaan.

e. Walaupun Perum Jamkrindo telah mengorganisasikan dan mengelola tenaga kerja untuk memperkuat fokus pada pelanggan & bisnis dengan cara melakukan *training need analysis* untuk melihat *gap* kapabilitas tenaga kerja dan tuntutan pekerjaan, memberikan pelatihan tenaga kerja khususnya untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan (*service excellence*) dan meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk Perusahaan, mengadakan *coffe morning* atau hari mutu (setiap Jumat pagi) dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang budaya Perusahaan. Sistem telah dilaksanakan terus menerus dan hasilnya digunakan oleh semua unit menutupi *gap* tenaga kerja untuk mencapai kinerja Perusahaan, **namun** sistem tersebut belum efektif. Terbukti pencapaian kinerja unit kerja dan tenaga kerja cenderung menurun. Hal ini mempengaruhi daya saing Perusahaan dalam meningkatkan kinerja.

f. Walaupun Perum Jamkrindo telah mengendalikan seluruh biaya operasi atas keseluruhan sistem kerjanya dengan 2 (dua) cara:
   i. Melakukan evaluasi antara target dan realisasi.
   ii. Laporan Realisasi Anggaran disampaikan ke seluruh Kanca.

across all work units, as well as no documents showing follow-up and no evidence indicating the method has been aligned with the work unit.

d. Although Perum Jamkrindo has chosen and ensured the effective use of DATA and COMPARATIVE INFORMATION that are essential to support operational, strategic decision making, and innovation, by:

   i. Computing comparative data that is similar to the Company's performance data.
   ii. Comparing and analyzing competitor data.
   iii. Creating an action plan in order to exceed the achievement of competitors' performance, both from its achievement and growth.
   iv. Setting action plan to be followed-up and innovate.

However the Company does not yet have a systematic mechanism in utilizing the comparative data. This can affect the speed and accuracy of making important decisions related to the Company's business operations.

e. Although Perum Jamkrindo has organized and managed the manpower to strengthen customer & business focus by conducting need analysis training to see the gap of manpower capability and job demands, providing manpower training in particular to improve service excellence and improve knowledge about Company products, organizing coffee morning or quality day (every Friday morning), and providing training to employees about the Company's culture. The system has been implemented continuously and the results are used by all units to cover the manpower gap to achieve the Company's performance, **however** the system has not been effective yet. It is proven that the performance achievement of work unit and manpower tends to decrease. This affects the Company's competitiveness in improving performance.

f. Although Perum Jamkrindo has controlled all operating costs over its entire work system in 2 (two) ways:

   i. Conducting evaluation between target and realization.
   ii. Budget Realization Report is submitted to all Kanca.

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

iii. Dimintakan penjelasan atas pelampauan anggaran dengan 25%.
iv. Kompilasi realisasi anggaran secara korporat.

namun Perusahaan belum mengukur efektifitas metode tersebut karena baru diterapkan kurang dari setahun dan hanya oleh Kantor Pusat belum di seluruh unit kerja.

2. Dimensi "Hasil"
   a. Walaupun Perum Jamkrindo telah melakukan pengukuran dan menyampaikan 90,27% Data (167 grafik dari 185 data yang dipersyaratkan) dari kinerja Produk dan Proses sampai dengan Kinerja Finansial dan Pasar, **namun** beberapa data menurun:

iii. Explanation is requested of budget excess of 25%.

iv. Compilation of budget realization as a corporation.

However the Company has not measured the effectiveness of the method since it has been implemented for less than a year and only by the Head Office, not yet in all work units.

2. "Result" Dimension
   a. Although Perum Jamkrindo has measured and delivered 90.27% Data (167 charts of 185 required data) from Product and Process performance to Financial and Market Performance, **however** some data decreases:

LEVEL	:	1 % (1 data) *No Level* hanya terdiri dari 1 tahun periode data. 13 % (24 data) kinerja tahun 2015 sama dengan tahun sebelum. 29 % (53 data) kinerja tahun 2015 menurun dibanding kinerja sbelumnya. *1% (1 data) No Level, only consists of 1 year data period.* *13% (24 data) performance in 2015 is the same as that of the previous year.* *29 % (53 data) performance in 2015 decreases compared to the previous year's performance.*
TREND	:	5 % (9 data) *No Trend* karena data kinerja yang disajikan hanya 2 periode. 11 % (21 data) *Adverse* yaitu kinerja 3 tahun terakhir menurun. 14% (25 data) *Un Favorable* yaitu kinerja 3 tahun terakhir cenderung turun. *5% (9 data) No Trend, because the performance data presented is only 2 periods.* *11% (21 data) Adverse, meaning performance in the last 3 years is decreasing.* *14% (25 data) Unfavorable, meaning performance in the last 3 years tends to decrease.*
COMPARISON	:	66% (123 data) *No Comparison* yaitu grafik belum disandingkan dengan pesaing *66% (123 data) No Comparison, meaning graph has not been juxtaposed with the competitors.'*
INTEGRATION	:	5 % (9 data) belum tersajikan pada laporan kinerja 7.1 s/d 7.5 yaitu: • Nilai Efisiensi sebelum dan sesudah inovasi. • Kecepatan penerbitan *invoice*. • Capaian waktu simulasi tanggap darurat. • Penghargaan atas prestasi tenaga kerja. • Sosialisasi Visi-*Value* kepada Tenaga Kerja & *Stakeholder*. • Indeks pencapaian nilai-nilai organisasi. • Komunikasi 2 arah yang dihadiri manajemen senior. • % Temuan audit internal yang ditindaklanjuti. • % Temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti. *5% (9 data) has not been presented in the performance report 7.1 to 7.5, which are:* • *Efficiency Value before and after innovation.* • *Speed of issuing Invoice.* • *Achievements of emergency response simulation.* • *Award for the achievement of the workforce.* • *Socialization of Vision-Value to Manpower & Stakeholders.* • *Index of achievement of organizational values.* • *Two-way communication attended by senior management.* • *% internal audit findings that are followed-up.* • *% external audit findings that are followed-up.*

Penilaian atas Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengukuran kinerja operasional bisnis Perusahaan yang berkaitan dengan upaya Perusahaan mencapai Visi-Misi Perusahaan dengan menjaga *sustainability* Perusahaan dan memenuhi harapan dan persyaratan *stakeholder*.

This may affect the effectiveness of the Company's business operational performance measurements relating to the Company's efforts to achieve the Company's Vision-Mission by maintaining the Company's sustainability and meeting stakeholders' expectations and requirements.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ GCG Perum Jamkrindo

RELATIONSHIP MECHANISM AMONG THE CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

Organ Structure of GCG Perum Jamkrindo

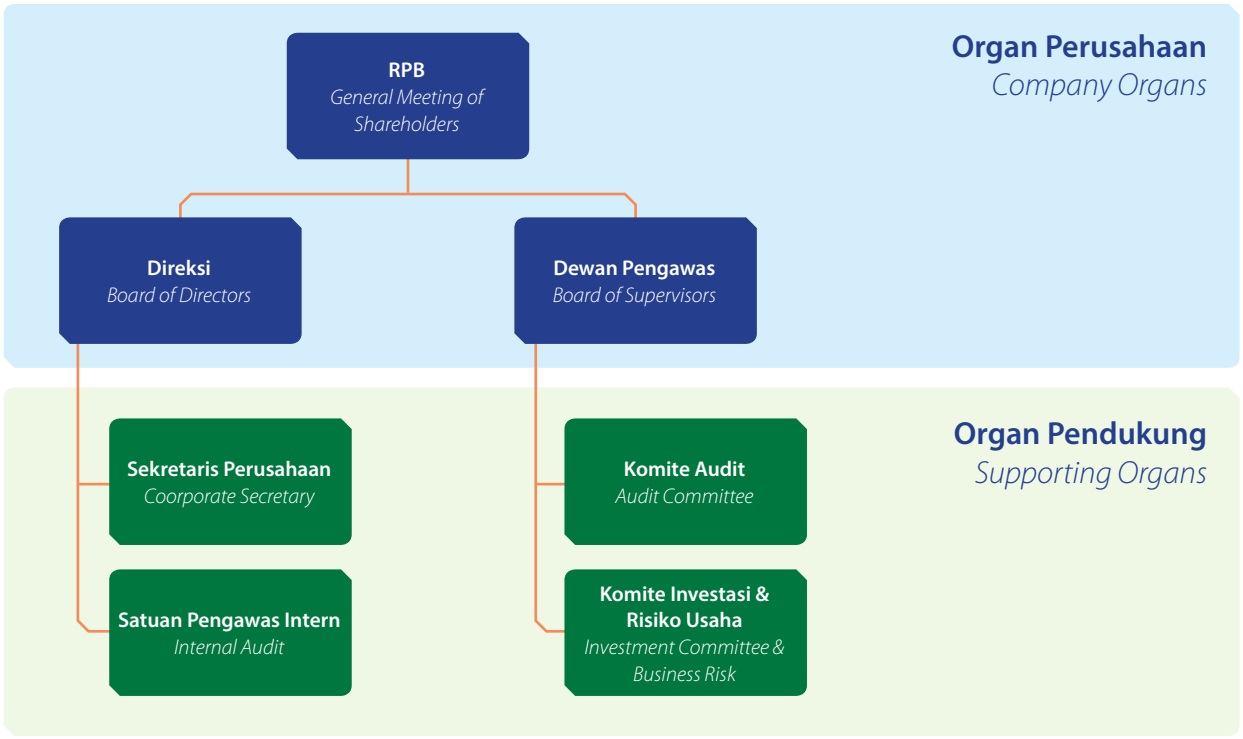

Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian

In the Joint Discussion Meeting (RPB) forum, the Equity Owner can make important decisions related to the investments invested in the Company. The decisions made in RPB are based on the Company's interests. RPB or Equity Owner can not intervene the duties, functions, and authorities of the Board of Supervisors and Directors yet not reducing RPB authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and Laws and Regulations. With equal standing, the Equity Owner shall carefully consider its decisions for the sake of the Company's long-term interests. After a decision is taken, RPB shall then submit all authorities of the supervision and execution to implement the decision to the Board of Supervisors and Directors. This is in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The Company's management and implementation of any RPB decisions will be done by the Directors. The Board of

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

Supervisors then exercises supervision and advises to ensure that the Company's objectives and RPB decisions are optimally implemented and achieved to the fullest. With such huge duties and responsibilities in maintaining the continuity of the Company, the Board of Supervisors is assisted by Supporting Committees while the Directors are assisted by work units associated with the governance mechanism.

PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

Pemilik Modal dan Informasi Terkait Entitas Induk Akhir

Perum Jamkrindo merupakan entitas usaha dengan status hukum Perusahaan Umum (Perum), dimana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemilik modalnya. Kebijakan kepemilikan modal dalam Perusahaan dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN menjadi pemilik tunggal sekaligus entitas induk akhir dari Perum Jamkrindo.

EQUITY OWNER AND JOINT DISCUSSION MEETING

Equity Owner and Information Related to Ultimate Parent Entity

Perum Jamkrindo is a business entity with the legal status of Public Corporation (Perum), where the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia becomes the equity owner. The Company's equity ownership policy is carried out through the mechanism of State Capital Participation (PMN). Thus, the State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOE becomes the sole owner as well as the ultimate parent entity of Perum Jamkrindo

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo

Composition of Perum Jamkrindo Owners

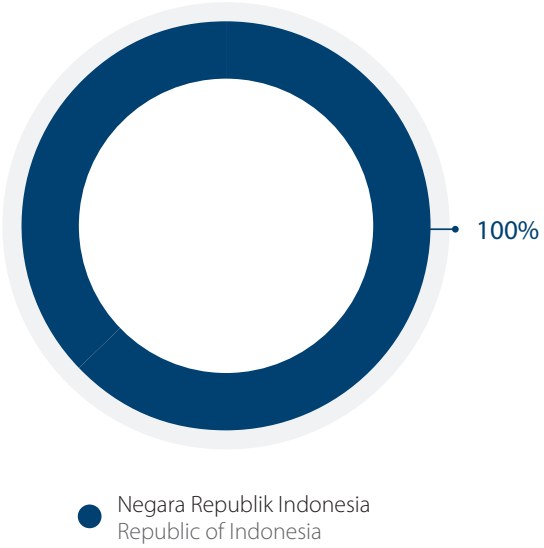

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan mekanisme pengambilan keputusan strategis oleh Pemilik Modal. Melalui RPB, Pemilik Modal memiliki wewenang dan hak untuk melakukan berbagai keputusan atas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Joint Discussion Meeting (RPB) is a strategic decision-making mechanism by the equity owners. Through RPB, the equity owner has the authority and right to make various decisions on the Company as described below.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Wewenang Rapat Pembahasan Bersama

Kewenangan RPB dalam hal ini adalah Menteri Negara BUMN atau Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundangundangan, antara lain:

1. Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
4. Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan dan jumlah anggota Dewan Pengawas;
5. Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
6. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan RKAP yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan;
8. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan;
9. Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud;
10. Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;
11. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;
12. Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.

Hasil Keputusan RPB Tahun 2015 dan Realisasinya oleh Manajemen

Pada tahun 2015, Perum Jamkrindo menyelenggarakan RPB sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, yang dilaksanakan pada 15 Januari 2015 dengan agenda pengesahan RKAP Tahun Buku 2015, dan pada 7 Mei 2015 dengan agenda persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014. Hasil keputusan masing-masing RPB dan realisasinya oleh manajemen di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Authorities of General Meeting of Shareholders

RPB authorities in this case is the State Minister of SOE or a Minister appointed and/or authorized to represent the Government as the equity owner of the Company by taking into account the provisions of the Laws and Regulations, are among others:

1. To add State Capital Participation derived from reserve capitalization and other sources;
2. To approve the amendment of the Company's Articles of Association;
3. To appoint and dismiss members of the Directors, Board of Supervisors, and Sharia Supervisory Board;
4. To determine the number of members of the Company's Directors and the number of members of the Board of Supervisors;
5. To ratify the Company's Long Term Plan (RJPP);
6. To approve Work Plan and Corporate Budget (RKAP) draft;
7. To approve draft of amendment plan of RKAP that has been validated, if there is any change;
8. To ratify the Company's Annual Report;
9. To approve the external auditor appointed to conduct the examination, and to approve the report of the examination result of the said external auditor;
10. To determine the allocation of the Company's net profit, including the amount of allowance for reserves;
11. To determine the remuneration of the Directors and Board of Supervisors;
12. To assess the performance (evaluation) of the Directors and Board of Supervisors.

RPB Resolution of 2015 and the Implementation by the Management

In 2015, Perum Jamkrindo organized RPB 2 (two) times at SOE Ministry Office, Jakarta on January 15, 2015 with agenda of ratifying 2015 Fiscal Year RKAP, and on May 7, 2015 with agenda of approving 2014 Fiscal Year Annual Report. The resolution result of each RPB and its realization by the Management in 2016 is as follows,

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Rapat Pembahasan Bersama 15 Januari 2015
Pengesahan RKAP Tahun Buku 2015

Joint Discussions Meeting January 15, 2015
Ratifying 2015Fiscal Year RKAP

No	Hasil Keputusan RPB 15 Januari 2015 *RPB Resolution of 2015*
1	Menyetujui RKAP Perum Jamkrindo Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan posisi keuangan Perum Jamkrindo per 31 Desember 2015 ditutup dengan jumlah aset serta liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp10.572.426 juta b. Laba tahun berjalan konsolidasi kegiatan penjaminan eksisting (non KUR) dan KUR tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp710.728 juta c. Anggaran investasi/belanja modal tahun 2015 sebesar Rp206.965 juta d. Gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta fasilitas yang diberikan tahun 2015 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2014. Gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta fasilitas yang diberikan secara final akan ditetapkan pada RUPS pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 *Approving RKAP of Perum Jamkrindo Year 2015 with the following subjects:* *a. Perum Jamkrindo's financial position report as of December 31, 2015 was closed with total assets and liabilities and equity each amounting to IDR10,572,426 million* *b. The consolidated profit for current year of the existing guarantee activities (non-KUR) and 2015 KUR are projected at IDR 710,728 million* *c. Investment budget/capital expenditure of 2015 is IDR 206,965 million* *d. Directors' salary and honorarium of the Board of Commissioners as well as facilities granted in 2015 are temporarily set equal to those of 2014. Directors' salary and honorarium of the Board of Commissioners as well as the facilities provided in final will be stipulated in the GMS of ratifying the financial statements of 2014 fiscal year.*
2.	Mengesahkan Rencana dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2015. *Approving the Plan and Budget of Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo in 2015*
3	Kuasa pemilik modal , Dewan Pengawas dan Direksi Perum jamkrindo menandatangani dan menyepakati indikator-indikator KPI yang tertuang dalam kontrak amanjemen tahun 2015 yang telah mengacu pada kriteria penilaian kinerja unggul sesuai Surat Wakil Menteri BUMN No. S-441/MBU/Wk/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang diperbarui dengan S-459/MBU/Wk/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang shareholder aspiration. *The power of attorney of the equity owner, Board of Supervisors, and Directors of Perum Jamkrindo signed and agreed on KPI indicators as stipulated in the management contract of 2015 which has referred to the superior performance assessment criteria in accordance with the Letter of Vice Minister of SOE No. S-441/MBU/Wk/08/2014 dated 25 August 2014 which was amended with S-459/MBU/Wk/08/2014 dated 28 August 2014 on shareholder aspiration.*
4	Kuasa pemilik modal dan Ewan Pengawas Perum Jamkrindo menandatangani dan menyepakati indikator-indikator KPI Dewan Pengawas tahun 2015 yang telah mengacu pada peraturan menteri BUMN No. PER-01/MBU2011jo PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. *The power of attorney of the equity owner and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo signed and agreed on KPI indicators of the Board of Supervisors in 2015 which has referred to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 on good corporate governance implementation on SOEs.*
5	Pemilik modal pada prinsipnya menyetujui rencana Perum Jamkrindo untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan reasuransi yang sedang dibentuk Pemerintah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut akan ditetapkan secara tersendiri setelah direksi mengajukan permohonan persetujuan secara lengkap kepada Pemilik modal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. *The equity owner in principle approved the plan of Perum Jamkrindo to invest in capital participation to a reinsurance company being established by the Government. The implementation of such capital participation shall be stipulated separately after the Directors submits a complete approval application to the Equity Owner in accordance with the prevailing rules and regulations.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Rapat Pembahasan Bersama 7 Mei 2015
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014

General Meeting of Shareholders May 7, 2015
Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2014 Fiscal Year.

No	Hasil Keputusan RPB 7 Mei 2015 *RPB Resolution of 7 May 2015*
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Pengawas serta mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasi Perusahaan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Muchram & rasidi sebagaimana dimuat dalam laporan No. LAI/GA/BTW/15006 tanggal 3 Februari. *Approved of the Annual Report and ratified the Company's Financial Statements for fiscal year 2015, including restatement of Fiscal Year 2014 and 2013, approved the Monitoring Duties Report of the Board of Supervisors in 2015 and ratified the Annual Report on the Implementation of Partnership Program and Community Development for 2015 fiscal year including granting release and discharge the full responsibility (volledig acquit et decharge) to the Directors for the actions of the company's management and the Board of Supervisors on the company's monitoring actions during 2015 fiscal year.* *Approved the Company's Annual Report including Monitoring Duties Report which had been conducted by the Board of Supervisors for the Fiscal Year ended 31 December 2015, and ratified the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2015 included the restatement of Fiscal Year 2013 and 2014, which were audited by KAP Hertanto, Grace & Karunawan with Fair opinion in all material respects. As per Independent Auditor's Report Number: 004/LAI/JMK/HGK.HT-2016 dated 2 February 2016.*
2	Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2014 sebesar Rp664.138.955.480 sebagai berikut: a. Dividen sebesar 40% atau Rp265.655.582.000,00. b. Cadangan Tujuan sebesar 16,71 % atau Rp111.000.000.000,00. c. Cadangan Umum sebesar 43,29% atau Rp287.483.373.480,00 *Approving the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2014.* *Establishing the use of consolidated net profit attributable to owner of parent entity of 2014 Fiscal Year amounting to IDR664,138,955,480 as follows:* *a. Dividend of 40% or IDR265,655,582,000* *b. Destination Reserve of 16.71 % or IDR111,000,000,000* *c. General Reserve of 43.29% or IDR287,483,373,480*
3	Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan. Penetapan besarnya gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan kemudian secara tersendiri. *Determining the amount of salary/honorarium including the facilities and other allowances for 2015 Fiscal Year and Tantiem for 2014 Fiscal Year for members of Directors and Board of Commissioners of the Company.* *Determining the amount of salary or honorarium including the facilities and other allowances of 2015 and Tantiem for 2014 Fiscal Year for members of Directors and Board of Commissioners of the Company shall later be determined separately.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

No	Hasil Keputusan RPB 7 Mei 2015 *RPB Resolution of 7 May 2015*
4	Menetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015: Menetapkan KAP Hertanto, Grace & Karunawan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta biayanya dalam hal KAP Hertanto, Grace & Karuniawan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2015 *Determining the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ended on 31 December 2015.* *Determining KAP Hertanto, Grace, Karunawan as the external auditors to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ended on 31 December 2016.* *Granting power to the Board of Supervisors to determine the substitute Public Accounting Firm and its charges in the case of KAP Hertanto, Grace and Karunawan for any reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements and Financial Report of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year ended on 31 December 2015.*

Hasil Keputusan RPB Tahun 2016

Pada tahun 2016, Perum Jamkrindo menyelenggarakan RPB sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, yang dilaksanakan pada 8 Januari dengan agenda pengesahan RKAP Tahun Buku 2016, dan pada 26 Mei 2016 dengan agenda persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015. Hasil keputusan masing-masing RPB adalah sebagai berikut:

Rapat Pembahasan Bersama 8 Januari 2016

Pengesahan RKAP Tahun Buku 2016

RPB Resolution of 2016

In 2016, Perum Jamkrindo organized RPB for 2 (two) times at SOE Ministry Office, Jakarta, which were held on 8 January with agenda of ratifying 2016 Fiscal Year RKAP, and on 26 May 2016 with agenda of approving Annual Report and ratifying 2015 Fiscal Year Financial Statements. The resolution of each RPB in 2016 is as follows:

General Meeting of Shareholders January 8, 2016.

Ratifying 2016 Fiscal Year RKAP

No	Hasil Keputusan RPB 8 Januari 2016 *RPB Resolution on 8 January 2016*
1	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Laporan posisi keuangan konsolidasi Perum Jamkrindo per 31 Desember 2016 diproyeksikan ditutup dengan jumlah aset dan lialibilitas beserta ekuitas masing-masing sebesar Rp12.625.064 2. Laporan laba/rugi komprehensif konsolidasi dengan laba setelah pajak konsolidasi kegiatan penjaminan eksisting (non KUR) dan KUR Perum Jamkrindo Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp762.965 juta. 3. Rencana belanja modal tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp188.634 juta 4. Jumlah SDM 1.450 orang dengan rincian 830 pegarai tetap dan 620 pegawai kontrak. 5. Target tingkat kesehatan tahun 2016 sesuai perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 6. Gaji direksi dan honorarium Dewan Pengawas serta fasilitas yang diberikan tahun 2016 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2015 *Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2016 with principles as follows:* *1. Perum Jamkrindo's consolidated financial position report as of 31 December 2016 was projected to close with total assets and liabilities and equity each amounting to IDR12,625,064* *2. Consolidated comprehensive profit/loss report with consolidated profit after tax of the existing guarantee activity (non-KUR) and KUR of Perum Jamkrindo of 2016 was targeted at IDR762,965 million.* *3. Plan for capital expenditure of 2016 was budgeted at IDR188,634 million* *4. Total HR is 1,450 people with details of 830 permanent employees and 620 contract employees.* *5. Sound level target of 2016 according to calculation based on Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/2014* *6. Directors' salary and honorarium of the Board of Supervisors as well as facilities granted in 2016 are temporarily set equal to those of 2015.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

No	Hasil Keputusan RPB 8 Januari 2016 *RPB Resolution on 8 January 2016*
2	Mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2016 *Ratifying RKA of Partnership and Community Development Program of 2016*
3	Menyetujui dan mengesahkan KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada surat Menteri BUMN No. S-485/MBU/08/2015 tanggal 27 agustus 2015 tentang penyampaian aspirasi pemegang saham/pemilik modal untuk penyusunan RKAP Tahun 2016 *Approving and ratifying KPI as stipulated in management contract in 2016 between the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo and Equity Owner of Perum Jamkrindo, which has referred to SOE Minister's Letter No. S-485/MBU/08/2015 dated 27 August 2015 on Submission of Aspiration of Shareholders/Equity Owner to prepare RKAP of 2016*
4	Menyetujui dan mengesahkan KPI Tahun 2016 antara Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada Peraturan menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN *Approving and ratifying KPI Year 2016 between Perum Jamkrindo Board of Supervisors with Perum Jamkrindo Equity Owner which has referred to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance on SOE.*
5	Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Direksi dan Dewan Pengawas dimintamemperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Pengawasdan KP1 (Key Performance Indicators) tahun 2016 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Pembahasan Bersama (RAB) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2016 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Pengawas. 2. Meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari bisnis Non-KUR dengan memperkuat sinergi bisnis internal, customerengagementdan layanan berbasisTI. 3. Membuat kajian terkait rencana perusahaan untuk melakukan penambahan modal pada perusahaan asset manajemen dan penyertaan langsung pada Perusahaan Penjaminan Kredit (Jamkrida) dan Perusahaan Pembiayaan, serta menyampaikan hasil kajiannya kepada Pemilik Modal untukmendapatkan persetujuan. 4. Menyelesaikan permasalahan tagihan klaim KPR pada Bank BTN yang terkait dengan program pemerintah untuk penyediaan sejuta rumah. 5. Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku, merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasi pelaksanaannya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2016 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan 6. Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Direksi diminta untuk mengikuti arahan dalam risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL tahun 2016 Perum Jamkrindo No. RIS-12/D7.MBU.4/12/2015 tanggal 30 November 2015 *In implementing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2016, the Directors and Board of Supervisors are requested to consider the following matters:* *1. Books of RKAP, RKA-PKBL, RKA Board of Supervisors, and KPI (Key Performance Indicators) of 2016, which have been approved and ratified by the Joint Discussion Meeting (RPB), serve as guidelines for the Directors in implementing work program and performance targets in 2016 as well as monitoring and supervision channel for the Board of Supervisors.* *2. Increasing the company's income contribution from Non-KUR business by strengthening internal business synergy, customer engagement, and IT-based service.* *3. Making a study of the company's plan to add capital to the company's asset management and direct participation to Credit Guarantee Company (Jamkrida) and Financing Company, and submit the study results to Equity Owner to obtain approval.* *4. Resolving mortgage claim issue to Bank BTN related to the government program of the provision of a million homes.* *5. Tantiem budgeted in 2016 RKAP is in accordance with the applicable Minister of SOE Regulation and shall be the maximum amount to be charged and the realization of its implementation is based on the performance target achievement of 2016 determined in Annual GMS.* *6. In order to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Directors are required to follow the guidance in the minutes of Work Plan Discussion Meeting and Budget of PKBL of 2016 of Perum Jamkrindo No. RIS-12/D7.MBU.4/12/2015 dated 30 November 2015.*
6	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Pengawas dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2016 sebagaimana disampaikan melalui surat No. S-26/DP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 *The Directors shall observe and follow-up the suggestions and recommendations of the Board of Supervisors in the implementation of the 2016 RKAP as delivered by letter No. S-26/DP/XII/2015 dated 15 December 2015*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Rapat Pembahasan Bersama 26 Mei 2016
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015

General Meeting of Shareholders May 26, 2016.
Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2015 Fiscal Year

No	Hasil Keputusan RPB 26 Mei 2016 *RPB Resolution of 26 May 2016*
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2015 termasuk penyajian kembali (*restatement*) Tahun Buku 2014 dan 2013, persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2015 serta pengesahan Laporan Tahuanan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perusahaan dan Dewan Pengawas atas tindakan pengawasan perusahaan selama tahun buku 2015. Menyetujui Laporan tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk penyajian kembali (*restatement*) Tahun Buku 2013 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material. Sebagaimana Laporan Auditor Independen No. 004/LAI/JMK/HGK.HT-2016 tanggal 2 Februari 2016. *Approved of the Annual Report and ratified the Company's Financial Statements for fiscal year 2015, including restatement of Fiscal Year 2014 and 2013, approved the Monitoring Duties Report of the Board of Supervisors in 2015 and ratified the Annual Report on the Implementation of Partnership Program and Community Development for 2015 fiscal year including granting release and discharge the full responsibility (volledig acquit et decharge) to the Directors for the actions of the company's management and the Board of Supervisors on the company's monitoring actions during 2015 fiscal year.* *Approved the Company's Annual Report including Monitoring Duties Report which had been conducted by the Board of Supervisors for the Fiscal Year ended 31 December 2015, and ratified the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2015 included the restatement of Fiscal Year 2013 and 2014, which were audited by KAP Hertanto, Grace & Karunawan with Fair opinion in all material respects. As per Independent Auditor's Report Number: 004/LAI/JMK/HGK.HT-2016 dated 2 February 2016.*
2	Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat daitribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2015 sebesar Rp625.354.338.229,00 sebagai berikut: 1. Dividen sebesar 50,00% atau Rp312.677.169.114,50 2. Cadangan sebesar 50,00% atau Rp312.677.169.114,50 *Established the use of consolidated net profit attributable to equity owner of the parent entity of 2015 Fiscal Year amounting to IDR625,354,338,229.00 as follows:* *1. Dividend of 50.00% or IDR312,677,169,114.50* *2. Reserve of 50.00% or IDR312,677,169,114.50*
3	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2016 serta Tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan kemudian secara tersendiri. *Determined the Remuneration of the Directors and Board of Supervisors. The determination of the salary/honorarium including the facilities and other allowances in 2016 and Tantiem of 2015 Fiscal Year for members of Directors and Board of Supervisors of the Company shall be determined separately.*
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016. 1. Menetapkan kembali KAP Hertanto, Grace, Karunawan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Memberikan kuasa pada kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta biayanya dalam hal KAP Hertanto, Grace dan Karunawan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. *Determined the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for 2016 Fiscal Year.* *1. Reappointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan as the external auditors to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ending on 31 December 2016.* *2. Granted power to the Board of Supervisors to determine the substitute Public Accounting Firm and its charges in the case of KAP Hertanto, Grace and Karunawan for any reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements and the Financial Report of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year ending on 31 December 2016.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dibentuk oleh pemilik modal untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/ XII/2012/KEP-07/ DP-JAMKRINDO/XII/2012 yang secara garis besar mengatur tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perum Jamkrindo. Serta melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No.89/Kep-Dir/XII/2012/KEP-06/ DP-JAMKRINDO/XII/2012 yang secara garis besar menjelaskan tentang Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/Kep-Dir/XII/2012/KER-05/DP-JAMKRINDO/ XII/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo.

Kriteria Dewan Pengawas

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 persyaratan formal dan materil anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

BOARD OF SUPERVISORS

The Board of Supervisors is formed by the equity owner to monitor the management of the company run by the Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Supervisors is regulated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) No. PER-02/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

Guideline and Code of Conduct of the Board of Supervisors

Guidelines and code of conduct of the Board of Supervisors are stipulated through Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/ XII/2012/KEP-07/ DP-JAMKRINDO/XII/2012 which outlines the Code of Conduct of Perum Jamkrindo and through the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/ XII/2012/KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 which outlines the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/Kep-Dir/XII/2012/KER-05/DP-JAMKRINDO/ XII/2012 n Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo.

Criteria of the Board of Supervisors

As stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-02/ MBU/02/2015, the formal requirements and material members of the Board of Supervisors consist of:

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*
Formal	1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum 2. Tidak pernah dinyatakan pailit 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara *1. Able to perform legal acts* *2. Never declared bankrupt* *3. Never become a member of the Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors who is found guilty of causing a Company/Public Corporation (Perum) to be declared bankrupt; and* *4. Never been punished for committing criminal acts that harm the state finances*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*
Materil *Material*	1. Integritas 2. Dedikasi 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan 5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya *1. Integrity* *2. Dedication* *3. Understand the company's management issues related to one of the management functions* *4. Have sufficient knowledge in the field of business of Persero/Perum where the concerned is nominated; and* *5. Can provide enough time to carry out their duties*
Persyaratan lainnya *Other requirements*	Persyaratan lain anggota Dewan Pengawas, yaitu: 1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II 2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah 3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut 4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter 5. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan *Other requirements of members of Board of Supervisors are:* *1. Not an administrator of a Political Party and/or a candidate of legislative member and/or a member of the legislature. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/members of DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representatives), DPRD (Regional House of Representatives) Level I and Level II* *2. Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/or Head/Deputy Head of Region* *3. Not serving as member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods* *4. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors), as evidenced by a health certificate from a doctor* *5. Prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies must be based on a proposal letter of the relevant agency.*

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit indonesia, Pasal 56 bahwa:

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
3. Apabila masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.

Terms of Office

Based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Article 56 that:

1. Members of Board of Supervisors are appointed for a term of 5 (five) years, and may be re-appointed for 1 (one) term of office.
2. The appointment of members of Board of Supervisors does not coincide with the appointment of members of Directors, except for the first appointment at the time of establishment.
3. If the term of member of Board of Supervisors ends, then within 30 (thirty) days the most, the Minister must have determined the definitive members of Board of Supervisors.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Susunan dan Komposisi Dewan Pengawas Tahun 2016

Di tahun 2016 terjadi pergantian keanggotaan Dewan Pengawas, dengan kronologi sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Periode 1 Januari - 11 April 2016

Structure and Composition of the Board of Supervisors in 2016

In 2016, there was a change in the composition of the Board of Supervisors, with the chronology as follows:

Structure of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo Period of 1 January - 11 April 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*	**Periode Jabatan** *Period of Office*
Ketua *Head*	Braman Setyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-199/ MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-199/ MBU/10/2014 dated 7 October 2014 on the Appointment and Dismissal of the Head of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo*	7 Oktober 2014 *7 October 2014*	6 Oktober 2019 *6 October 2019*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Nasarudin Umar	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-409/MBU/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-409/ MBU/2012 dated 19 November 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo appointing Nasaruddin Umar as Member of the Board of Supervisors.*	19 November 2012 *19 November 2012*	18 November 2017 *18 November 2017*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Dahlan Siamat	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-297/MBU/2013 dated 28 June 2013 on the Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointing Dahlan Siamat as Member of the Board of Supervisors.*	28 Juni 2013 *28 June 2013*	27 Juni 2018 *27 June 2018*	Ke-1 *1st*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*	**Periode Jabatan** *Period of Office*
Anggota *Member*	Subandriyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-435/MBU/2013 dated 31 December 2013 on the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo*	31 Desember 2013 *31 December 2013*	30 Desember 2018 *30 December 2018*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Ony Suprihartono	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-435/MBU/2013 dated 31 December 2013 on the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo*	31 Desember 2013 *31 December 2013*	30 Desember 2018 *30 Desember 2018*	Ke-1 *1st*

Dalam rangka penataan organisasi Perusahaan, pada tanggal 12 April 2016, Pemilik Modal memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Ony Suprihartono dan mengangkat Noor Ida Khomsiyati sebagai anggota Dewan Pengawas yang baru.

In regard of structuring the Company's organization, on April 12, 2016, the Equity Owner decided to honorably terminate Ony Suprihartono and appoint Noor Ida Khomsiyati as the new member of Board of Supervisors.

Susunan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
Periode 12 April - 31 Desember 2016

Structure of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo
Period of 12 April - 31 December 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*	**Periode Jabatan** *Period of Office*
Ketua *Head*	Braman Setyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/ MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-199/MBU/10/2014 dated 7 October 2014 on the Appointment and Dismissal of the Head of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo*	7 Oktober 2014 *7 October 2014*	6 Oktober 2019 *6 October 2019*	Ke-1 *1st*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Start of Services*	Masa Akhir Jabatan *End of Services*	Periode Jabatan *Period of Office*
Anggota *Member*	Nasarudin Umar	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-409/MBU/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-409/MBU/2012 dated 19 November 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo appointing Nasaruddin Umar as Member of the Board of Supervisors*	19 November 2012 *19 November 2012*	18 November 2017 *18 November 2017*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Dahlan Siamat	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-297/MBU/2013 dated 28 June 2013 on the Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointing Dahlan Siamat as Member of the Board of Supervisors*	28 Juni 2013 *28 June 2013*	27 Juni 2018 *27 June 2018*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Subandriyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo *Decree of State Minister of SOE as the Equity Owner of Perum Jamkrindo Number SK-435/MBU/2013 dated 31 December 2013 on the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo*	31 Desember 2013 *31 December 2013*	30 Desember 2018 *30 December 2018*	Ke-1 *1st*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Start of Services*	Masa Akhir Jabatan *End of Services*	Periode Jabatan *Period of Office*
Anggota *Member*	Noor Ida Khomsiyati	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. *Decree of State Minister of SOE as Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 dated 12 April 2016 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.*	12 April 2016 *12 April 2016*	11 April 2021 *11 April 2021*	Ke-1 *1st*

**Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.*

* Brief profiles of each member of the Board of Supervisors can be seen in the Board of Supervisors Profile, in the Company Profile chapter.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
3. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
6. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors is the Company's organ with duties to:
1. Carry out supervision on the Company's management conducted by the Directors.
2. Advise the Directors in carrying out the Company's management activities.

The supervision conducted by the Board of Supervisors in order to assess the Company is by comparing the actual situation with the circumstances that should be done, both in the field of finance and/or operational technical areas. To perform the duties as referred to above, the Board of Supervisors is obliged to do the following matters:

1. Provide opinions and suggestions to the Minister on RJPP and RKAP proposed by the Directors.
2. Follow the Company's activity development, providing opinions and suggestions to the Minister on any matter deemed necessary for the management of the Company.
3. Report immediately to the Minister in case there is any symptom of declining performance of the Company.
4. Examine and review the Periodic Report and Annual Report prepared by the Directors, including signing the Annual Report.
5. Monitor and ensure that GCG principles are implemented effectively and sustainably.
6. Hold meetings regularly, at least once every month.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. KEP-02/DP-JAMKRINDO/VI/2016 tentang Pembagian Tugas Dewas Pengawas Perum Jamkrindo, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum Jaminan Kredit Indonesia, dilakukan pembagian tugas di antara keanggotaan Dewan Pengawas sebagai berikut:

Division of Scope of Duties Among the Board of Supervisors

Based on the Decree of Board of Supervisors of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. KEP-02/DP-JAMKRINDO/VI/2016 on Division of Duties of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, that in the framework of conducting supervisory duties and giving advice to the Directors in conducting Perum Jaminan Kredit Indonesia's management activities, the division of duties among members of the Board of Supervisors is as follows:

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**BIdang Tugas** *Field of Duty*
Braman Setyo (Ketua / *Head*)	Bidang Jaringan dan Teknologi Informasi *Network and Information Technology Field*
Nasarudin Umar (Anggota / *Member*)	Bidang Umum dan Penjaminan Syariah *General and Sharia Guarantee Field*
Dahlan Siamat (Anggota / *Member*)	Bidang Keuangan dan Bisnis Penjaminan *Finance and Guarantee Business Field*
Subandriyo (Anggota / *Member*)	Bidang Investasi dan Manajemen Risiko *Investment and Risk Management Field*
Noor Ida Khomsiyati (Anggota / *Member*)	Bidang SDM, Hukum dan Kepatuhan *HR, Legal, and Compliance Field*

Pembagian bidang tugas ini tidak mengurangi hak setiap anggota Dewan Pengawas untuk mendalami permasalahan lainnya di luar bidang pembagian tugas yang ditetapkan dalam keputusan ini.

This division of duties does not diminish the right of each member of the Board of Supervisors to explore other issues beyond the division of duties set forth in this decree..

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Dewan Pengawas dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Dewan Pengawas mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Dewan Pengawas. Kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Competence Development Program

In order that the Board of Supervisors can always follow the development of matters related to guarantee industry, the Board of Supervisors attends competence development program such as seminar, workshop, or other activities that can improve knowledge and competence of the Board of Supervisors. The competence development activities attended by the Board of Supervisors throughout 2016 are as follows:

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Kegiatan** *Activity*	**Tempat/Tanggal** *Place/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Subandriyo	Seminar AECM	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	Association Of Guarantee Institution (AECM)
	Seminar "Interpretasi Kebijakan & Strategi RKAP dan KPI BUMN" *Seminar of "Interpretation of Policy & Strategy of RKAP and KPI of SOE"*	Yogyakarta, 1 September 2016 *Yogyakarta, 1 September 2016*	*Human Capital* BUMN
Dahlan Siamat	Seminar "Interpretasi Kebijakan & Strategi RKAP dan KPI BUMN" *Seminar of "Interpretation of Policy & Strategy of RKAP and KPI of SOE"*	Yogyakarta, 1 September 2016 *Yogyakarta, 1 September 2016*	*Human Capital* BUMN

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite komite maupun dengan Direksi.

Di sepanjang tahun 2016, Dewan Pengawas menggelar 12 kali Rapat Internal Dewan Pengawas dan 12 kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat.

Board of Supervisors Meeting

The Board of Supervisors holds regular meetings every month, which is the Internal Meeting of the Board of Supervisors attended by the Audit Committee and the Investment and Risk Business Committee as well as Meeting of the Board of Supervisors with the Directors. However, if deemed necessary, the Board of Supervisors also conducts incidental meetings, both with the committees and the Directors.

Throughout 2016, the Board of Supervisors held 12 times of the Internal Meetings of the Board of Supervisors and 12 times of Meetings with the Directors. Below are the minutes of meetings and attendance level of the Board of Supervisors in the meetings.

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas / *Minutes of the Internal Meetings of the Board of Supervisors*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*
29 Januari 2016 *29 January 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha tahun 2015 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation in 2015*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
26 Februari 2016 *26 February 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Januari 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of January 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
30 Maret 2016 *30 March 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Februari 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of February 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
29 April 2016 *29 April 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Maret 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of March 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
31 Mei 2016 *31 May 2016*	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan April 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of April 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas — Minutes of the Internal Meetings of the Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
30 Juni 2016 *30 June 2016.*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Mei 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of May 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
27 Juli 2016 *27 July 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Juni 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of June 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Juli 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of July 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
23 September 2016 *23 September 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Agustus 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of August 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi i atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan September 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of September 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
10 November 2016 *10 November 2016*	Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan Oktober 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of October 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*
23 Desember 2016 *23 December 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pembahasan hasil evaluasi atas Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha • Evaluasi kinerja usaha bulan November 2016 • *Discussion on the evaluation result on Audit Committee and Investment & Business Risk Committee* • *Business performance evaluation of November 2016*	• Dewan Pengawas • Komite Audit • Komite Investasi dan Risiko Usaha • *Board of Supervisors* • *Audit Committee* • *Committee of Investment and Business Risk*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat Internal Dewan Pengawas

Attendance Level of Board of Supervisors in the Internal Meetings of the Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*					
	Braman Setyo	Nasarudin Umar	Subandriyo	Dahlan Siamat	Ony Suprihartono	Noor Ida Khomsiyati
29 Januari 2016 *29 January 2016*	v	v	v	v	x	
26 Februari 2016 *26 February 2016*	v	x	v	v	v	*
30 Maret 2016 *30 March 2016*	v	v	v	v	x	
29 April 2016 *29 April 2016*	v	v	v	v		v
31 Mei 2016 *31 Mei 2016*	v	x	v	v		v
30 Juni 2016 *30 Juni 2016*	v	x	x	v		v
27 Juli 2016 *27 July 2016*	v	x	x	v		v
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	x	x	v	v		v
23 September 2016 *23 September 2016*	x	v	v	v	*	v
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	v	x	v	v		v
10 November 2016 *10 November 2016*	v	v	v	x		x
23 Desember 2016 *10 December 2016*	v	x	v	v		v

v = hadir / x = berhalangan hadir

v = present / x = not present

*) Per tanggal 12 April 2016, Ony Suprihartono digantikan oleh Noor Ida Khomsiyati.

Ketidakhadiran rapat dari masing-masing Dewan Pengawas seperti yang terlihat pada tabel di atas disebabkan adanya tugas kedinasan lain yang tidak dapat diwakilkan.

*) per on 12 april 2016 , Ony Suprihartono replaced by Noor Ida Khomsiyati.

The absence of meetings from each Supervisory Board as seen in the table above is due to the existence of other official duties which cannot be represented.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Minutes of Meetings of the Board of Supervisors with the Directors

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
29 Januari 2016 *29 January 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat sebelumnya, yakni Desember 2015 • Evaluasi kinerja usaha tahun 2015 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, December 2015* • *Business performance evaluation of 2015*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
26 Februari 2016 *26 February 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Januari 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Januari 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, January 2016* • *Business performance evaluation of January 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
30 Maret 2016 *30 March 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Februari 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Februari 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, February 2016* • *Business performance evaluation of February 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
29 April 2016 *29 April 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Maret 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Maret 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, March 2016* • *Business performance evaluation of March 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
31 Mei 2016 *31 May 2016*	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan April 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan April 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, April 2016* • *Business performance evaluation of April 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
19 Juli 2016 *19 July 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Mei 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Mei 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, May 2016* • *Business performance evaluation of May 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
1 Agustus 2016 *1 August 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Juni 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Juni 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, June 2016* • *Business performance evaluation of June 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Juli 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Juli 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, July 2016* • *Business performance evaluation of July 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Minutes of Meetings of the Board of Supervisors with the Directors

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
23 September 2016 *23 September 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Agustus 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Agustus 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, August 2016* • *Business performance evaluation of August 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
7 November 2016 *7 November 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan September 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan September 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, September 2016* • *Business performance evaluation of September 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
10 November 2016 *10 November 2016*	Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan Oktober 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan Oktober 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, October 2016* • *Business performance evaluation of October 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*
23 Desember 2016 *23 December 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Pemenuhan kebijakan • Pembahasan hasil tindak lanjut Rapat pada bulan November 2016 • Evaluasi kinerja usaha bulan November 2016 • *Fulfillment of policies* • *Discussion on follow-up result of the previous Meeting, November 2016* • *Business performance evaluation of November 2016*	• Dewan Pengawas • Direksi • *Board of Supervisors* • *Board of Directors*

Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat dengan Direksi

Attendance Level of Board of Supervisors in Meetings with Directors

Tanggal *Date*	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*					
	Braman Setyo	Nasarudin Umar	Subandriyo	Dahlan Siamat	Ony Suprihartono	Noor Ida Khomsiyati
29 Januari 2016	v	v	v	v	v	
26 Februari 2016	v	x	v	v	v	*
30 Maret 2016	v	v	v	v	x	

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat dengan Direksi

Attendance Level of Board of Supervisors in Meetings with Directors

Tanggal *Date*	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*					
	Braman Setyo	Nasarudin Umar	Subandriyo	Dahlan Siamat	Ony Suprihartono	Noor Ida Khomsiyati
29 April 2016	v	v	v	v		v
31 Mei 2016	v	x	v	v		v
19 Juli 2016	v	x	v	v		x
1 Agustus 2016	x	v	v	v		x
29 Agustus 2016	v	x	v	v		v
23 September 2016	x	v	v	v	*	v
7 November 2016	v	x	v	v		v
10 November 2016	v	v	v	x		x
23 Desember 2016	v	x	v	v		v

v = hadir / x = berhalangan hadir

*) Per tanggal 12 April 2016, Ony Suprihartono digantikan oleh Noor Ida Khomsiyati.

**) Per tanggal 12 April 2016, Ony Suprihartono digantikan oleh Noor Ida Khomsiyati.*

Ketidakhadiran rapat dari masing-masing Dewan Pengawas seperti yang terlihat pada tabel di atas disebabkan adanya tugas kedinasan lain yang tidak dapat diwakilkan.

The absence of meetings from each Supervisory Board as seen in the table above is due to the existence of other official duties which cannot be represented.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of the Board of Supervisors in Meetings

Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	Jumlah Wajib Rapat Internal Dewan Pengawas *Number of Mandatory Meetings Board of Supervisors Intern*	Jumlah Wajib Rapat Gabungan dengan Direksi *Number of Attendance Joint Meeting with the Board of Directors*	Jumlah Keseluruhan Wajib Rapat *Number of Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	% Kehadiran *Attendance*
Braman Setyo	12	12	24	20	83,33%
Nasarudin Umar				11	45,83%
Subandriyo				22	91,67%
Dahlan Siamat				22	91,67%
Noor Ida Khomsiyati	9	9	18	14	77,78%
Ony Suprihartono	3	3	6	3	50,00%
Rata-rata					73,38%

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun 2016

Dalam memenuhi tugas pengawasan, selama tahun 2016 Dewan Pengawas telah melakukan kunjungan kerja, baik ke kantor cabang maupun kantor unit pelayanan. Beberapa kunjungan diantaranya dilakukan ke Tarakan, Makassar, Denpasar, Mataram, Bengkulu, dan Pontianak.

Dewan Pengawas juga senantiasa memperbaharui informasi dan ilmu pengetahuan dengan mengikuti kegiatan seperti *workshop*/ seminar, studi banding atau benchmark, maupun pelatihan. Keikutsertaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri, seperti Portugal, India, Bulgaria, Chile dan Bangkok.

DIREKSI

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

Kriteria Direksi

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Mentri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketetapan mengenai persyaratan formal, materiil dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi Perum yang mencakup:

Brief Report of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors in 2016

In fulfilling the supervisory duties, in 2016 the Supervisory Board has paid a working visit to both the branch office and the service unit office. Several visits were conducted to Tarakan, Makassar, Denpasar, Mataram, Bengkulu, and Pontianak.

The Supervisory Board also constantly updates the information and knowledge by participating in activities such as workshops/ seminars, comparative studies or benchmarks, as well as trainings. The participation of these activities is not only done domestically but also abroad, such as Portugal, India, Bulgaria, Chile and Bangkok.

DIRECTORS

Based on Article 1 paragraph 4 of Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Directors are Company organs responsible for the Company's management for the Company interests and objectives as well as representing the Company both inside and outside court.

Guideline and Code of Conduct of the Directors

The guidelines and code of conduct of the Directors are stipulated through Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) which outlines the days, hours of work, leave, and permission of the Directors and the provisions of organizing and decision making in meetings, code of ethics, and improvement of Directors' competence.

Criteria of the Directors

The determination of guidelines on the Company's Directors qualifications refers to the prevailing laws and regulations. In this matter, the Company refers to Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of the Directors Minister of State-Owned Enterprises.

Based on the regulation, there are stipulations on formal and material requirements, as well as other requirements that must be fulfilled by a Director of Perum covering:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*
Formal	• Mampu melaksanakan perbuatan hukum • Tidak pernah dinyatakan pailit • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara • *Able to perform legal acts* • *Never declared bankrupt* • *Never become a member of the Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors who is found guilty of causing a Company/Public Corporation (Perum) to be declared bankrupt; and* • *Never been punished for committing criminal acts that harm the state finances*
Materil *Material*	• Integritas • D edikasi • Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya • *Integrity* • *Dedication* • *Understand the company's management issues related to one of the management functions* • *Have sufficient knowledge in the field of business of Persero/Perum where the concerned is nominated; and* • *Can provide enough time to carry out their duties*
Persyaratan lainnya *Other requirements*	• Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu: • Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II • Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah • Tidak menjabat sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut • Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter • Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan • *Other requirements of members of Directors are:* • *Not an administrator of a Political Party and/or a candidate of legislative member and/or a member of the legislature. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/members of DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representatives), DPRD (Regional House of Representatives) Level I and Level II* • *Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/or Head/Deputy Head of Region* • *Not serving as member of the Directors/Board of Commissioners/Board of Supervisors of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods* • *Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors), as evidenced by a health certificate from a doctor* • *Prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies must be based on a proposal letter of the relevant agency.*

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 16, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Terms of Office

In accordance the with Government Regulation No. 41 of 2008 concerning Public Corporation (Perum) of Credit Guarantee of Indonesia Article 16, it is stated that members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years, and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2016

Di tahun 2016 tidak terjadi pergantian keanggotaan Direksi. Susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of the Directors in 2016

In 2016, there was no change in the structure of the Directors. Structure and Composition of the Directors throughout 2016 are as follows:

Susunan Direksi Perum Jamkrindo Tahun 2016

Structure of the Directors of Perum Jamkrindo Year 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*	**Periode Jabatan** *Period of Office*
Direktur Utama *President Director*	Diding S. Anwar	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 *Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 in conjunction with Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014*	7 September 2012 *7 September 2012*	6 September 2017 *6 September 2017*	Ke-1 *1st*
Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Guarantee Business*	Bakti Prasetyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 *Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 in conjuction with Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014*	7 September 2012 *7 September 2012*	6 September 2012 *6 September 2012*	Ke-2 *2nd*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, GA, and Compliance*	Nanang Waskito	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 *Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 in conjunction with Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014*	15 Januari 2013 *15 January 2013*	14 Januari 2018 *14 January 2018*	Ke-2 *2nd*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Start of Services*	Masa Akhir Jabatan *End of Services*	Periode Jabatan *Period of Office*
Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operational and Network*	R. Sophia Alizsa	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-151/MBU/08/2015 *Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-151/MBU/08/2015*	27 Agustus 2015 *27 August 2015*	26 Agustus 2020 *26 August 2020*	Ke-1 *1st*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment, and Risk Management*	I. Rusdonobanu	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 *Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 in conjunction with Decree of State Minister of State Owned Enterprise as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014*	15 Januari 2013 *15 January 2013*	14 Januari 2018 *14 January 2018*	Ke-1 *1st*

**Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.*

** Brief profiles of each member of the Directors can be seen in the Directors Profile, in the Company Profile chapter.*

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

Company Management Policies

The Company's Management Policy is established by the Directors. In executing the Management of the Company, the President Director shall have the right and authority to act on behalf of the Directors and to represent the Company, provided that all actions of the said President Director have been approved by the Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then it is established that one of the Directors is authorized to act for and on behalf of the Directors in the following order:

1. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Directors.
2. In the event that the President Director does not make an appointment, one of the Directors appointed by and among the members of the Directors is authorized to act for and on behalf of the Directors.
3. In the event as referred to in point (b) is not done, one of the Director who is serving the longest as a member of the Director shall be authorized to act for and on behalf of the Directors.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
3. Memelihara dan mengurus kekayaaan Perusahaan

Tanggung Jawab

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Perum Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan
2. Secara bersama-sama atau individual, bertanggungjawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap
4. Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Direktur Utama No. 3713/P/I/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas melalui surat No. S-23/DP/X/2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan wewenang sebagai berikut:

4. In the event that the Director who is serving the longest as a member of the Directors is more than 1 (one) person, the Director, as referred to in point (c), of the oldest in age shall be authorized to act for and on behalf of the Directors.

Duties and Responsibilities

Referring to Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), the duties and responsibilities of the Directors are as follows:

Main Duties

1. Carry out the management of the Company for the Company's interests and objectives and act as the Chairman in the management
2. Represent the Company inside and outside court
3. Maintain and manage the Company's wealth

Responsibility

1. The Directors are responsible for implementing the Company's regulations and management, taking legal action for and on behalf of the Company, and representing Perum Jamkrindo inside and outside court
2. Collectively or individually, shall be liable for any loss arising on the Company's assets due to the actions taken by the Directors that violate or neglect of the duties and/or obligations as stipulated in the Company Regulations and Laws and Regulations
3. Ensure that information about the Company is given to the Board of Supervisors in a timely manner and complete
4. Other responsibilities are in accordance with the Company Regulations and the applicable Laws and Regulations

Division of Scope of Duties Among the Directors

The duties and authorities of each of Director are regulated in the Decree of the Board of Supervisors of Public Corporation (PERUM) of Indonesian Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) No. 41 of 2008 on Division of Duties and Authorities of the Directors of Public Corporate (PERUM) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia). In carrying out its activities, the Company's Directors have the following duties and authorities:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Direktur Utama, Diding S. Anwar	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan seluruh direktorat, kantor wilayah dan seluruh unit kerja untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Perusahaan. Tanggung Jawab: • Mengordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain merumuskan dan menetapkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain merumuskan dan menetapkan peraturan/keputusan/Kebijakan *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Divisi Pemeringkatan UMKM & Manajemen Konsultasi serta Kantor Wilayah. • Mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan, Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Divisi Pemeringkatan UMKM & Manajemen Konsultasi serta Kantor Wilayah. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat berkala. • Mengoordinasikan dan menetapkan Program kerja Tahunan Pemeriksaan Internal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di seluruh Direktorat. • Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi. • Tugas-tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
President Director, Diding S. Anwar	*Main tasks:* *To coordinate, integrate and control all directorates, regional offices and all work units for the purposes and objectives of the Company and act as the Leader in the management of the Company.* *Responsibilities:* • *To coordinate, formulate, develop and implement the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as guidelines for the implementation of the tasks and achievement of the Company's objectives.* • *Together with other members of the Board of Directors to formulate and set guidelines for Good Corporate Governance (GCG).* • *Together with other members of the Board of Directors to formulate and enact regulations/decisions/policies of Standard Operating Procedures (SOP) of operational and non-operational activities of the Company.* • *To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of the duties of the Internal Supervisory Unit (SPI), Corporate Secretary, Planning & Development Division and MSME Ratings Division & Management Consulting and Regional Offices.* • *To coordinate, formulate and define the main tasks and functions and coordinate implementation of the duties of Functional Officers under the Board of Directors.* • *To foster and evaluate the performance of SPI Head, Corporate Secretary, Planning & Development Division and MSME Ratings Division & Management Consulting and Regional Offices.* • *Together with other Directors to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Activity and Financial Reports (Quarterly).* • *To coordinate and hold regular meetings.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Direktur Bisnis Penjaminan, Bakti Prasetyo	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan Direktorat Bisnis Penjaminan dan Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat Bisnis Penjaminan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat Bisnis Penjaminan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat Binis Penjaminan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program, Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Kepala Divisi Suretyship Penjaminan Non Bank serta Kepala Divisi Penjaminan Syariah. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program, Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Kepala Divisi Suretyship & Penjaminan Non Bank serta Kepala Divisi Penjaminan Syariah. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan) • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: - Rapat Direksi. - Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. - Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. - Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Bisnis Penjaminan serta rapat Direktorat Bisnis Penjaminan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Bisnis Penjaminan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Bisnis Penjaminan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Director of Guarantee Business, Bakti Prasetyo	*Main Tasks:* *To coordinate, integrate and control the Directorate of Assurance Business and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the managing director of the Business Directorate of Guarantee.* *Responsibilities:* • *To coordinate, formulate, develop and implement RJPP and RKAP in the Directorate of Business Guarantee, as a guideline for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate and establish GCG guidelines.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate and enact Rules/Decisions/Policies, SOP of activities of the Directorate of Binis Guarantee.* • *To determine the key tasks and functions and to coordinate the implementation of the tasks of the Head of Business Guarantee Division, Head of Bank Guarantee Business Division, Head of Suretyship Division of Non Bank Guarantee and Head of Division of Sharia Insurance.* • *To propose the core tasks and functions and to coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors.* • *To foster and evaluate the performance of the Head of Business Guarantee Division, Head of Bank Guarantee Business Division, Head of Suretyship & Underwriting Division and Head of Sharia Insurance Division.* • *Together with other Directors, to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate and Financial Reports (Quarterly)* • *To coordinate and attend regular meetings as follows:* - *Board of Directors Meeting.* - *Board of Directors' Meeting with Supervisory Board.* - *Meetings of the Board of Directors and/or Supervisory Board with owners of capital or with external parties of the Company.* - *Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the current year..* • *To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Business of Guarantee and meeting of the Directorate of Business of Guarantee with the Company's external parties.* • *To implement and supervise the implementation of GCG in the Directorate of Business Guarantee.* • *To sign legal documents for the areas assigned and authorized for the Director of Business Guarantee either alone or together with the President Director.* • *Other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Direktur Operasional dan Jaringan, R. Sophia Alizsa	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan Direktorat Operasional & Jaringan serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam peagelolaan Direktorat Operasional & Jaringan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat Operasional & Jaringan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dau menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat Operasional & Jaringan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Teknik & • Administrasi Penjaminan, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi, Kepala Divisi Jaringan & Layanan serta Kepala Divisi Teknologi Informasi. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi, Kepala Divisi Jaringan & Layanan serta Kepala Divisi Teknologi Informasi. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Operasional & Jaringan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: - Rapat Direksi. - Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. - Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. - Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Operasional & Jaringan serta rapat Direktorat Operasional & Jaringan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Operasional & Jaringan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Operasional & Jaringan baik sendiri maupnn bersama-sama dengan Direktur lainnya. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Director of Operations and Network, R. Sophia Alizsa	*Main Tasks:* *To xoordinate, integrate and control the Directorate of Operations & Networks and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as a leader in the management of the Directorate of Operations & Networks.* *Responsibilities:* • *To coordinate, formulate, develop and implement RJPP and RKAP in the Directorate of Operations & Networks, as guidelines for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate or establish GCG guidelines.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate and enact Rules/Decisions/Policies, Operational & Network Operational SOP activities.* • *To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of duties Head of Technical Division &* • *To guarantee Administration, Head of Claim & Subrogation Division, Head of Network & Service Division and Head of Information Technology Division.* • *To propose core tasks and functions and coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors.* • *To foster and evaluate the performance of Head of Engineering & Administration Division of Guarantee, Head of Claim & Subrogation Division, Head of Network & Service Division and Head of Information Technology Division.* • *Together with other Directors, to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Operations & Network Operations (Quarterly) Reports.* • *To coordinate and attend regular meetings as follows:* - *Board of Directors Meeting.* - *Board of Directors' Meeting with Supervisory Board.* - *Meetings of the Board of Directors and/or Supervisory Board with owners of capital or with external parties of the Company.* - *Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the current year.* • *To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Operations & Networks and meetings of the Directorate of Operations & Networks with external parties.* • *To implement and supervise the implementation of GCG in the Operational & Network Directorate.* • *To sign legal documents for the areas in charge and authority as Director of Operations & Network both alone and together with other Directors.* • *Other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan, Nanang Waskito	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. Tanggung Jawab: • Mengoordinasikan, menumuskan, menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP dalam Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran Perusahaan. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan pedoman GCG. • Bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, SOP kegiatan Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi MSDM, Kepala Divisi Umum serta Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi MSDM, Kepala Divisi Umum serta Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: - Rapat Direksi. - Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. - Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. - Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan serta rapat Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan baik sendiri maupun bersama- sama dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan perarturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Director of HRM, General Affairs, and Compliance, Nanang Waskito	*Main Tasks:* *To coordinate, integrate and control the Directorate of MSDM, General & Compliance and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the lead in managing the Directorate of MSDM, General & Compliance.* *Responsibilities:* • *To coordinate, formulate, develop and implement RJPP and RKAP in the Directorate of MSDM, General & Compliance, as guidance for the implementation of tasks and achievement of the Company's objectives.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate and establish GCG guidelines.* • *Together with other members of the Board of Directors, to formulate and enact Rules/Decisions/Policies, SOP of activities of Directorate of MSDM, General & Compliance.* • *To define the main tasks and functions and coordinate the duties of Head of Division of MSDM, Head of General Division and Head of Legal and Compliance Division.* • *To propose the core tasks and functions and coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors.* • *To foster and evaluate the performance of MSDM Division Head, Head of General Division and Head of Legal and Compliance Division.* • *Together with other Directors, to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate and Financial Reports (Quarterly).* • *To coordinate and attend regular meetings as follows:* - *Board of Directors Meeting.* - *Board of Directors' Meeting with Supervisory Board.* - *Meetings of the Board of Directors and/or Supervisory Board with owners of capital or with external parties of the Company.* - *Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the current year.* • *To conduct and lead regular meetings at the Directorate of MSDM, General & Compliance and meetings of the Directorate of MSDM, General & Compliance with external parties.•* • *To implement and supervise the implementation of GCG at the Directorate of HRM, General & Compliance.* • *To sign legal documents for the areas of duty and authority as HRM, General & Compliance Director either alone or together with the President Director.* • *Other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulation.*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko, I. Rusdonobanu	Tugas Pokok: Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko serta Kantor Wilayah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. Tanggung Jawab: • Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Divisi Keuangan & Investasi, Kepala Divisi Akuntansi & PKBL serta Kepala Divisi Manajemen Risiko. • Mengusulkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di bawah Direksi. • Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi Keuangan & Investasi, Kepala Divisi Akuntansi & PKBL serta Kepala Divisi Manajemen Risiko. • Bersama Direktur lainnya menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan). • Mengoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut: - Rapat Direksi. - Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas. - Rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan. - Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target Perusahaan dalam tahun berjalan. • Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat berkala di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko serta rapat Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko dengan pihak eksternal Perusahaan. • Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan GCG di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. • Menandatangani dokumen hukum untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenang selaku Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko baik sendiri maupun bersama-sarna dengan Direktur Utama. • Tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab** *Duties and Authorities*
Director of Finance, Investation, Management Risk, I. Rusdonobanu	*Main Tasks:* *To coordinate, integrate and control the Directorate of Finance, Investment and Risk Management and Regional Offices for the purposes and objectives of the Company and act as the lead in the management of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.* *Responsibilities:* • *To define the main tasks and functions and coordinate the implementation of the tasks of Head of Finance & Investment Division, Head of Accounting Division & PKBL and Head of Risk Management Division.* • *To propose core tasks and functions and coordinate the execution of duties of Functional Officers under the Board of Directors.* • *To foster and evaluate the performance of Head of Finance & Investment Division, Head of Accounting Division & PKBL and Head of Risk Management Division.* • *Together with other Directors, to prepare Management Reports, Company Annual Reports, and Corporate and Financial Reports (Quarterly).* • *To coordinate and attend regular meetings as follows:* - *Board of Directors Meeting.* - *Board of Directors' Meeting with Supervisory Board.* - *Meetings of the Board of Directors and/or Supervisory Board with owners of capital or with external parties of the Company.* - *Monthly evaluation meetings and national work meetings in order to achieve the Company's target in the current year.* • *To conduct and lead periodic meetings at the Directorate of Finance, Investment and Risk Management and meetings of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management with external parties.* • *To implement and supervise the implementation of GCG in the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.* • *To sign legal documents for the areas in which the Director of Finance, Risk and Investment Director of the Finance, Investment and Risk Management is in charge and authority.* • *Other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Direksi selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha dan industri penjaminan, Direksi mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Direksi. Kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Competence Development Program

In order for the Board of Directors to keep up with the issues related to the business world and the guarantee industry, the Board of Directors shall join Competency Development Programs in the form of seminars, workshops, or other activities that enhance the knowledge and competence of the Board of Directors. Competence development activities which are attended by the Board of Directors throughout 2016 are as follows:

Direksi *Directors*	**Kegiatan** *Activity*	**Tempat/Tanggal** *Place/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Nanang Waskito	Seminar AECM *AECM Workshop*	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	Association Of Guarantee Institution (AECM)
	Indonesia *Human Capital Summit*	Jakarta, 27-28 Oktober 2016 *Jakarta, 27-28 October 2016*	FHCI

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No. 56/PerDir/XII/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi Perum Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Directors' Meeting

As stipulated in the Directors' Regulation No. 56/PerDir/XII/2013 on Guidelines to Organize Directors' Meeting of Perum Jamkrindo, the provisions on Directors' Meeting of Perum Jamkrindo are as follows:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

1. Rapat wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2016, Direksi melaksanakan 17 kali Rapat Internal Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 kali Rapat dengan Dewan Pengawas. Tentang risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

1. Meetings must be held at least once a month, or at the suggestion of fellow members of the Directors by mentioning the agenda or matters to be discussed.
2. Directors Meeting shall be chaired by the President Director. If the President Director is unable to attend, the meeting shall be chaired by one of the members of the Directors appointed by other members of the Directors present or represented.

Directors hold regular meetings once every month, as the provisions have been set out in the above explanation. Throughout 2016, the Directors conducted 17 times of Directors' Meetings. In addition, the Directors attended 12 times of Meetings with the Board of Supervisors. The minutes of Meeting of the Board of Supervisors and the Directors can be seen in the discussion section of Meeting of the Board of Supervisors.

Below are the minutes of meetings and attendance level of the Directors in the meetings.

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*
11 Januari 2016 *11 January 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Pembahasan hal-hal strategis *Discussion of strategic matters*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of Divisions*
2 Februari 2016 *2 February 2016*	Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta *Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta*	• Rapat Kerja Nasional • Evaluasi kinerja keuangan tahun 2015 • Evaluasi strategi bisnis tahun 2015 • Strategi dan program kerja Direktorat Operasional dan Jaringan • Percepatan pemfungsian dan optimalisasi Kantor Cabang kelas D • Pembahasan tentang Undang-Undang Penjaminan • Strategi Pengembangan Bisnis Kanwil I	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala Kanwil 1, 2, 3 • Seluru Kepala Kantor Cabang • Kepala Bagian Kantor Pusat • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Company secretary* • *Head of Regional Offices 1, 2, 3* • *All Heads of Branch Office* • *Head of Divisions in the Head Office* • *Primary Institution Officials*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
3 Februari 2016 *3 February 2016*	Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta *Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta*	• Rapat Kerja Nasional • Breakdown RKAP tahun 2016 • Sosialisasi PP Resi Gudang • Sosialisasi dan persiapan menghadapi struktur organisasi baru • Strategi penyerapan KUR • Strategi pengembangan bisnis Kanwil 2 dan 3 • *National Working Meeting* • *Evaluate the financial performance of 2015* • *Evaluate the 2015 business strategy* • *Strategy and work program of Directorate of Operations and Network* • *Accelerated functioning and optimization of Class B branches* • *Discussion on the Guarantee Act* • *Business Development Strategy of Regional Office I*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala Kanwil 1, 2, 3 • Seluru Kepala Kantor Cabang • Kepala Bagian Kantor Pusat • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Company secretary* • *Head of Regional Offices 1, 2, 3* • *All Heads of Branch Office* • *Head of Divisions in the Head Office* • *Primary Institution Officials*
10 Februari 2016 *10 February 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Pembahasan penyelesaian piutang klaim asuransi jiwa kredit multiguna Perum Jamkrindo bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT AJS Al-Amin *Discussion of settlement on multipurpose loan life insurance claim receivable by Perum Jamkrindo together with the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT AJS Al-Amin*	• Direksi. • Dewan Komisaris & Direksi PT AJS Al-Amin • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi Keuangan • Kepala Divisi Teknik Administrasi • Kepala Divisi Klaim & Subrogasi • Kepala Divisi Manajemen Risiko • Pejabat Pranata Utama MSDM, Umum & Kepatuhan • *The Board of Directors.* • *The Board of Commissioners & the Board of Directors of PT AJS Al-Amin* • *Company secretary* • *Head of SPI* • *Head of Finance Division* • *Head of Technical Division of Administration* • *Head of Claim & Subrogation Division* • *Head of Risk Management Division* • *Main MSDM, General & Compliance Officials*
12 Februari 2016	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	*Clossing Meeting* pemeriksaan Perum Jamkrindo tahun buku 2016 *Closing Meeting examination of Perum Jamkrindo for 2016 budget year*	• Direksi • Dewan Pengawas • Komite Audit • Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi • *The Board of Directors* • *Supervisory Board* • *Audit Committee* • *Corporate secretary* • *Head of Division*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*
12 Februari 2016 *Head Office of Perum Jamkrindo*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo	• Struktur organisasi berkenaan dengan penugasan penjaminan sistem resi gudang • Job desk • Pendelegasian kewenangan • Evaluasi keberadaan kantor wilayah dan kantor cabang • Pembahasan hal-hal strategis • *Organizational structure with respect to the assignment of the warehouse receipt guarantee system* • *Job desk* • *Delegation of authority* • *Evaluate the existence of regional offices and branch offices* • *Discussion of strategic matters*	• Direksi • Dewan Pengawas • Komite Audit • Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi • *The Board of Directors* • *Supervisory Board* • *Audit Committee* • *Corporate secretary* • *Head of Division*
25 Februari 2016 *25 February 2016* *Head Office of Perum Jamkrindo*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo	• Kemajuan Tim Sistem Resi Gudang • Percepatan penuntasan hal-hal strategis melalui pembentukan Tim Lintas Divisi • Strategi investasi sehubungan dengan kebijakan Suku Bunga Rendah • Business Plan PMN KUR & Business Plan penjaminan Sistem Resi Gudang • Percepatan pengisian formasi Pejabat Strategis (Ka. Bagian/Ka.Seksi) pada Divisi-divisi dan Cabang-cabang • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • *Progress of Warehouse Receipt Team* • *Accelerate the completion of strategic matters through the formation of a Cross Team Division* • *Investment strategy with respect to Low Interest Rate policy* • *Business Plan for PMN KUR & Business Plan to guarantee of Warehouse Receipt System* • *Acceleration of Formation Filling of Strategic Officers (Head of Division/Head of Section) in Divisions and Branches* • *Discussion of other strategic matters*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Primary Institution Officials*
1 Maret 2016 *1 March 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Rapat pembahasan usulan struktur organisasi dan *job description* *Meeting on the discussion of proposed organizational structure and job description*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary*
7 April 2016 *7 April 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Pembahasan sinergi penjaminan dengan entitas anak, PT Jamkrindo Syariah, dan PT PKPI *Discussion of guarantee synergy with subsidiaries, PT Jamkrindo Syariah, and PT PKPI*	• Direksi • Direksi PT PKPI • Direksi entitas anak, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah • Kepala Divisi • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Director of PT PKPI* • *Director of subsidiary, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah* • *Head of division* • *Primary Institution Officials*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
22 April 2016 *22 April 2016*	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta *Swiss Bellin Hotel Kemayoran, Jakarta*	• Arahan Direksi terkait hal-hal strategis • Paparan materi Sistem Resi Gudang • Evaluasi kinerja • *Directors' Direction on strategic matters* • *Exposure of Warehouse Receipt Material* • *Performance evaluation*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Kepala Bagian Kantor Pusat • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Head of Division in the Head Office* • *Primary Institution Officials*
29 April 2016 *29 April 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Program pengenalan anggota Dewan Pengawas baru *Introduction program of new members of the Board of Trustees*	• Dewan Pengawas • Direksi • Sekretaris perusahaan • Kepala Divisi • Pejabat Pranata Utama • *Supervisory Board* • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of Division* • *Primary Institution Officials*
31 Mei 2016 *31 May 2016*	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta *Swiss Bellin Hotel Kemayoran, Jakarta*	• Arahan Direksi terkait hal-hal strategis • Pemaparan Tim POKJA Direktorat Keuangan Investasi dan MR • Pemaparan Tim POKJA Direktorat MSDM, Umum & Kepatuhan • *Directors' Direction on strategic matters* • *Exposure of Working Group (POKJA) Team of Directorate of Investment, Finance and MR* • *Exposure of Working Group (POKJA) Team of Directorate of MSDM, General & Compliance*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Kepala Bagian Kantor Pusat • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Head of Divison in the Head Office* • *Primary Institution Officials*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
1 Juni 2016 *1 June 2016*	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta *Swiss Bellin Hotel Kemayoran, Jakarta*	Rapat Kerja Khusus: • Pemaparan Tim POKJA Direktorat Bisnis Penjaminan • Pembentukan Tim POKJA Direktorat Operasional & Jaringan • Penyusunan Materi Tim Pokja Direktorat Utama *Special Working Meetings:* • *Exposure of POKJA Team of Directorate of Business of Guarantee* • *Establishment of POKJA Team of Directorate of Operations & Networks* • *Preparation of Participatory Materials for the Main Directorate*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Kepala Bagian Kantor Pusat • Pejabat Pranata Utama • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Head of Divison in the Head Office* • *Primary Institution Officials*
12 Juli 2016 *12 July 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Rapat pembahasan persiapan pemeriksaan audit OJK *Meeting on the discussion for the preparation of FSA audit*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division*
30 Agustus 2016 *30 August 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Evaluasi kinerja Kantor Wilayah dan penyusunan RKAP 2017 *Evaluate the performance of Regional Offices and the preparation of the 2017 RKAP*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Kepala Bagian Knator Pusat • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Head of Division in the Head Office*
20 September 2016 *20 September 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Rapat Koordinasi Terbatas: • Akselerasi pencapaian target RKAP2016 • Penyusunan RKAP2017 • Sharing Session mengenai Pengadilan Niaga/ Kepailitan PT ASM; LHKPN; SPT; dan Tax Amnesty. *Extraordinary Coordination Meeting:* • *Acceleration of target achievement of 2016 RKAP* • *Preparation of 2017 RKAP* • *Sharing Session on Commercial Court/Bankruptcy of PT ASM; LHKPN; SPT; and Tax Amnesty.*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Pranata Utama • Kepala Bagian Knator Pusat • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Primary Institution Officials* • *Head of Division in the Head Office*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi — Minutes of Directors Meeting

Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
12 Oktober 2016 *12 October 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	Rapat Kerja Nasional: evaluasi kinerja Tw-III dan pembahasan *draft* RKAP2017 *National Working Meeting: Tw-III performance evaluation and draft discussion of 2017 RKAP*	• Direksi • Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi • Kepala Kanwil 1-9 • Kepala Kantor Cabang khusus Jakarta • Pranata Utama • Kepala Bagian Kantor Pusat • *The Board of Directors* • *Corporate Secretary* • *Head of SPI* • *Head of Division* • *Head of Regional Office 1-9* • *Head of Jakarta Special Branch Office* • *Primary Institution Officials* • *Head of Division in the Head Office*

Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi — Directors' Attendance in Directors Meeting

Tanggal *Date*	Direksi *Directors*				
	Diding S. Anwar	Bakti Prasetyo	R. Sophia Alizsa	Nanang Waskito	I. Rusdonobanu
11 Januari 2016 *11 January 2016*	v	v	v	v	v
2 Februari 2016 *2 February 2016*	v	v	v	v	v
3 Februari 2016 *3 February 2016*	v	v	v	v	v
10 Februari 2016 *10 February 2016*	v	v	v	x	v
12 Februari 2016 *12 February 2016*	v	v	v	v	v
12 Februari 2016 *12 February 2016*	v	v	v	v	v
25 Februari 2016 *25 February 2016*	v	v	v	v	v

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi — Directors' Attendance in Directors Meeting

Tanggal *Date*	Direksi *Directors*				
	Diding S. Anwar	Bakti Prasetyo	R. Sophia Alizsa	Nanang Waskito	I. Rusdonobanu
1 Maret 2016 *1 March 2016*	v	v	v	v	v
7 April 2016 *7 April 2016*	v	v	v	v	v
22 April 2016 *22 April 2016*	v	v	v	v	v
29 April 2016 *29 April 2016*	v	v	v	v	v
31 Mei 2016 *31 May 2016*	v	v	v	v	v
1 Juni 2016 *1 June 2016*	v	v	v	v	v
12 Juli 2016 *12 July 2016*	x	v	x	x	v
30 Agustus 2016 *30 August 2016*	v	v	v	v	v
20 September 2016 *20 September 2016*	v	v	v	v	v
12 Oktober 2016 *12 October 2016*	v	v	v	v	v

v = hadir / x = berhalangan hadir

v = present / x = not present

Kehadiran Direksi pada Rapat dengan Dewan Pengawas — Directors' Attendance in Meetings with the Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Direksi *Directors*				
	Diding S. Anwar	Bakti Prasetyo	R. Sophia Alizsa	Nanang Waskito	I. Rusdonobanu
29 Januari 2016 *29 January 2016*	v	v	v	v	v
26 Februari 2016 *26 February 2016*	v	v	v	v	v

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kehadiran Direksi pada Rapat dengan Dewan Pengawas

Directors' Attendance in Meetings with the Board of Supervisors

Tanggal *Date*	Direksi *Directors*				
	Diding S. Anwar	Bakti Prasetyo	R. Sophia Alizsa	Nanang Waskito	I. Rusdonobanu
30 Maret 2016 *30 March 2016*	v	v	v	v	x
29 April 2016 *29 April 2016*	v	v	v	v	v
31 Mei 2016 *31 May 2016*	v	x	v	v	v
19 Juli 2016 *19 July 2016*	v	v	x	v	v
1 Agustus 2016 *1 August 2016*	x	v	v	v	v
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	v	v	v	v	v
23 September 2016 *23 September 2016*	v	v	v	v	v
7 November 2016 *7 November 2016*	v	v	x	v	v
10 November 2016 *10 November 2016*	v	x	v	v	v
23 Desember 2016 *23 December 2016*	v	x	v	v	v

v = hadir / x = berhalangan hadir

v = present / x = not present

Ketidakhadiran anggota Direksi seperti yang terlihat pada tabel di atas disebabkan adanya tugas kedinasan di luar kantor yang tidak dapat diwakilkan.

Absence of members of Directors as seen in the table above was due to official duty out of town which could not be represented.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of the Directors in Meetings

Direksi *Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat Internal Direksi** *Number of Mandatory Meetings Board of Directors Intern*	**Jumlah Wajib Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas** *Number of Attendance Joint Meeting with the Board of Directors*	**Jumlah Keseluruhan Wajib Rapat** *Number of Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**% Kehadiran** *Attendance*
Diding S. Anwar	17	12	29	27	93,10%
Bakti Prasetyo				26	89,66%
R. Sophia Alizsa				26	89,66%
Nanang Waskito				27	93,10%
I. Rusdonobanu				28	96,55%
Rata-rata					92,41%

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Assessment Dewan Pengawas dan Direksi

Secara keseluruhan, Pemilik Modal melalui RPB merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun buku 2016 dilakukan dalam RPB Perum Jamkrindo akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Salah satu metode penilaian atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi adalah *assessment* penerapan GCG yang mengacu kepada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Dari 6 (enam) aspek *Governance* yang dinilai, terdapat aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan aspek Direksi.

Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian berdasarkan penilaian penerapan GCG.

1. Kriteria dan Penilaian terhadap Dewan Pengawas
   Indikator penerapan GCG untuk Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
   a. Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO THE BOARD OF SUPERVISORS AND DIRECTORS

Assessment of the Board of Supervisors and Directors

Overall, the Equity Owner through RPB shall be the party to assess the performance of the Board of Supervisors and Directors of the Company in relation to the implementation of duties and responsibilities in the relevant year. Accountability for the implementation of duties and responsibilities of the Board of Supervisors and Directors for 2016 fiscal year shall be conducted in RPB Perum Jamkrindo that will be held in 2017.

One of the assessment methods for the performance of the Board of Trustee and the Board of Directors is the assessment of GCG implementation which refers to the Decree of the Secretary SOE Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. From those 6 (six) aspects of governance assessed, there are aspects of the Board of Commissioners/Trustees and aspects of the Board of Directors.

The following criteria and results of the assessment are based on the assessment of GCG implementation.

1. Criteria and Assessment of the Board of Supervisors
   GCG implementation indicators for the Board of Supervisors are as follows:
   a. Board of Supervisors carries out continuous training/ learning program.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

b. Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
c. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
d. Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
e. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
f. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan patungan.
g. Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
h. Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
i. Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
j. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
k. Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kesekretariatan Dewan Pengawas.
l. Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 12 indikator di atas melalui pengujian 43 paramater dengan skor yang dicapai 32,249 dari bobot 35,00 atau setara persentase pencapaian sebesar 92,139%.

2. Kriteria Penilaian terhadap Direksi
Indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 indikator, yaitu:
a. Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
c. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.

b. Board of Supervisors shall clearly divide the duties, authorities, and responsibilities as well as establish the factors needed to support the duty implementation of the Board of Supervisors.
c. Board of Supervisors gives approval for RJPP and RKAP draft submitted by the Directors.
d. Board of Supervisors provides direction to the Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
e. Board of Supervisors monitors the Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
f. Board of Supervisors monitors the implementation of the subsidiary/joint venture company management policies.
g. Board of Supervisors plays a role in nominating members of Directors, assessing the Directors' performance (individually and collectively), and proposing tantiem/performance incentives in accordance with the applicable regulations and by considering the Directors' performance.
h. Board of Supervisors takes action against potential conflicts of interest concerning the board themselves.
i. Board of Supervisors monitors and ensures that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably.
j. Board of Supervisors organizes effective Board of Supervisors meetings and attends the Board of Supervisors meeting in accordance with the provisions of the legislation.
k. Board of Supervisors has a Secretary to the Board of Supervisors to support the secretariat of the Board of Supervisors.
l. Board of Supervisors has effective Board of Supervisors Committees.

Based on the assessment result on the implementation of the above 12 indicators through the testing of 43 parameters, score achieved was 32,249 of weight 35.00 or equivalent to achievement percentage of 92,139%.

2. Assessment Criteria for Directors
GCG implementation indicators for Directors are 13 indicators, which are:
a. Directors carry out continuous training/learning program.
b. Directors perform a clear division of duties/ functions, authorities, and responsibilities.
c. Directors prepare the Company's planning.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.
e. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
f. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakehoders*.
h. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajamen di bawah Direksi.
i. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu.
j. Direksi menyelenggarakan rapat dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
k. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
l. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
m. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil assessment terhadap penerapan 13 indikator diatas melalui pengujian 52 parameter dengan skor yang dicapai 32,943 dari bobot 35,00 atau setara persentase pencapaian sebesar 94,124%.

d. Directors play a role in meeting the Company's performance targets.
e. Directors carry out operational and financial control over the implementation of the Company's plans and policies.
f. Directors perform the management of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the articles of association.
g. Directors establish value-added relationships for the Company and stakeholders.
h. Directors monitor and manage potential conflicts of interest of members of Directors and management under the Directors.
i. Directors ensure that the Company applies disclosure of information and communication in accordance with the prevailing laws and regulations and the delivery of information to the Board of Supervisors and Equity Owners in a timely manner.
j. Directors organize meetings and attend Meetings of Board of Supervisors in accordance with the provisions of the regulations.
k. Directors must conduct qualified and effective internal control.
l. Directors must conduct qualified and effective Corporate Secretary function.
m. Directors organize Annual RPB and other RPB in accordance with laws and regulations.

Based on the assessment result on the implementation of the above 13 indicators through the testing of 52 parameters, score achieved was 32,943of weight 35.00 or equivalent to achievement percentage of 94,124%.

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Keputusan Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. 04/MBU/2014, tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Pengawas dan Direksi mengusulkan kepada Pemilik Modal melalui RPB, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RPB.

Remuneration of the Board of Supervisors and Directors

The determination of remuneration for the Company's Board of Supervisors and Directors refers to the Decree of Ministry of SOE as the Equity Owners of Perum Jamkrindo No. 04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guidelines to Determine Remuneration of the Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprise. The Remuneration of the Company's Board of Supervisors and Directors is proposed in Meetings of Board of Supervisors, discussing the proposed considerations, survey results with similar industries and other sectors. Board of Supervisors and Directors propose to the Equity Owners through RPB, keeping in mind the above Ministerial Regulations and the Company's capabilities, to further be determined in RPB.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

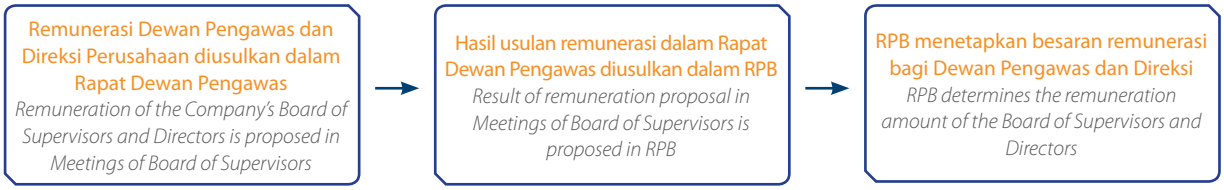

Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:
- Pertimbangan usulan yang ada
- Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
- Kemampuan Perusahaan

Calculation factors regarding the proposed remuneration amount:
- Considerations on the existing proposal
- Survey result with similar industries and other sectors
- The Company's capability

Berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014, struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo terdiri dari:

Based on Decree of Ministry of SOE No. 04/MBU/2014, the remuneration structure of the Board of Supervisors and Directors of Perum Jamkrindo consists of:

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas *Remuneration Structure of Board of Supervisors*	
Honorarium *Honorarium*	Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: • Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama • Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Ketua Dewan Pengawas *The Supervisory Board is given an honorarium with the following conditions:* • *Honorarium of the Chairman of the Board of Trustee shall be determined by the composition of the position factor of 45% of the salary of the President Director* • *Honorarium of members of the Board of Trustee is determined by the composition of the position factor of 90% of the President and the Board of Trustee*
Tunjangan *Allowances*	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Tunjangan Komunikasi • Tunjangan Santunan Purna Jabatan • Tunjangan Pakaian • Tunjangan Transportasi • *Allowance for Religious Holiday* • *Allowance for Communication* • *Allowance for Post-Employment* • *Allowance for Clothing* • *Allowance for Transportation*
Fasilitas *Facilities*	• Pemeliharaan Kesehatan • Kepersertaan dan Perkumpulan Profesi • Bantuan Hukum • *Health Maintenance* • *Membership and Profession Association* • *Legal Aid*
Tantiem *Tantiem*	Pemberian tantiem bagi Dewan Pengawas juga mengacu pada ketentuan di atas antara lain: • Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan • Tantiem diberikan apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% *Providing tantiem for the Board of Supervisors also refers to the above provisions, among others:* • *Tantiem is given in the event that the SOE obtains profit in the relevant fiscal year* • *Tantiem is given if the achievement of Key Performance Indicators (KPI) is more than 70% and health level is with value of more than 70%*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas *Remuneration Structure of Board of Supervisors*	
Struktur Remunerasi Direksi *Remuneration Structure of Directors*	
Gaji *Salary*	Anggota Direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut • Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri • Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama *Members of SOE Directors are paid a salary under the following conditions:* • *The salary of the President Director is determined by using the internal guideline stipulated by the Minister* • *The salary of other members of Directors is determined by the composition of position factor of 90% of the salary of the President Director*
Tunjangan *Allowances*	Tunjangan yang terdiri atas: • Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji • Tunjangan perumahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; » Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000,00 untuk wilayah Ibu Kota » Perusahaan tidak memberikan fasilitas rumah jabatan bagi Direksi • Tunjangan komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (at cost) • Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; » Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) » Premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun » Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN » Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian • Tunjangan pakaian sesuai dengan yang dianggarkan di RKAP • Tunjangan cuti tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium, setelah Direksi bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut • Tunjangan cuti besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorarium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama tahun buku 2014 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar • Pajak tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan *Allowances consist of:* • *Holiday allowance is given for 1 (one) time Salary* • *Housing allowance is provided under the following conditions;* » *Housing allowance including utility fee is provided on a monthly basis of 40% of the Salary with a maximum amount of IDR27,500,000.00 for the Capital Region* » *The Company does not provide official housing facilities for the Directors* • *Communication allowance for the Directors is at cost* • *Post-employment insurance is provided under the following conditions;* » *Post-employment insurance is provided during the term of office (beginning of appointment to termination)* » *Premium borne by the company at most is 25% of the Salary in one year* » *The selection of programs for post-employment insurance is determined by each member of the Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOE* » *Provision of premiums, fees, or other terms relevant to post-employment insurance should include a premium for accident and death insurance* • *Allowance for clothing shall be in accordance with the budget in RKAP* • *Annual leave allowance is given annually for 1 (one) time Salary/Honorarium, after the Directors have worked for a minimum of 6 (six) consecutive months* • *A major leave allowance is given at most 2 (two) times Salary/Honorarium per month if the Directors work for 3 (three) consecutive years in one period of office. During 2014 fiscal year the Company did not issue any major leave allowances* • *The allowance tax is borne by the Company*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas
Remuneration Structure of Board of Supervisors

Fasilitas *Facility*	• Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat • Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi • Fasilitas kesehatan; » Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan » Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan » Fasilitas kesehatan diberikan berupa: - Rawat jalan dan obat - Rawat inap dan obat - Medical check up. • Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi • Fasilitas biaya respresentasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar *at cost* yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RUPS • Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan • Pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan • *Vehicle facility for the Directors is 1 (one) unit of official vehicle and its maintenance and operations. Specifications and standards of vehicles are determined by GMS. The vehicle facility must be returned to the Company within 30 (thirty) days after the Directors end the term of office* • *The Company has provided facility of 1 (one) unit of official vehicle to all Directors including the maintenance and operational costs so that transportation allowance is no longer provided* • *Health facilities;* » *Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses* » *Health facilities are given to members of Directors and a wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 with the provisions that if the child is not yet 25 years but was married or previously worked, the said child is not entitled to receive the health facilities* » *Health facilities are provided in the forms of:* - *Outpatient and medicines* - *Inpatient and medicines* - *Medical check up* • *Facilities of initial fee and annual fee of at most 2 (two) associations of professions* • *Directors' representation cost representing the Company is at cost adjusted to the Company's capability and the maximum limit is determined by GMS* • *Legal aid facility in the event of any action/deeds for and on behalf of a position related to the purpose and objective and business activities of the company* • *Taxes incurred as a result of the facility are borne by and become the expense of the company*
Tantiem *Tantiem*	• Jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan • Besarnya tantiem bagi anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama • Pajak yang timbul atas tantiem direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi • *The amount is determined following GMS, which is adjusted to the KPI achievement and the Company's sound level.* • *Tantiem amount for members of Directors is 90% of that of the President Director.* • *Taxes incurred as a result of directors' tantiem are borne by and become the expense of the company*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The remuneration amount received by the Directors throughout 2016 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2016 — Remuneration amount of the Board of Supervisors of 2016

No	Uraian *Description*	Ketua Dewan Pengawas *President of the Board of Trustee (Rp)*	Anggota Dewan Pengawas *Member of the Board of Trustee (Rp)*
1	Honorarium *Honorarium/Salary*	46.350.000	41.715.000
2	THR per Tahun *Religious Holiday Allowance (THR) per Year*	46.350. 000	41.715.000
3	Komunikasi per bulan *Communication allowance per month*	500.000	500.000
4	Transportasi per bulan *Transportation allowance per month*	9.270.000	8.343.000
5	Pakaian per tahun *Attire allowance per year*	50.000.000	50.000.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) bulan per Dewan Pengawas *Total Remuneration within 1 (one) month per member of Board of Trustee*	106.120.000	142.273.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Dewan Pengawas *Total Remuneration within 1 (one) year per member of Board of Trustee*	1.273.440.000	1.707.276.000
	Jumlah Dewan Pengawas *Number of Board of Trustee*	1 orang	4 orang
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Dewan Pengawas *Total Remuneration within 1 (one) year for all members Board of Trustee*	1.273.440.000	6.829.104.000
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2016 *Total Remuneration of the Board of Trustee of 2016*			8.102.544.000

Untuk besaran remunerasi yang diterima Direksi di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Total remuneration given by The Company to the Board of Supervisors and Directors in 2016 is as follows:

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2016 — Total Directors' Remuneration of 2016

No	Uraian *Description*	Direktur Utama *President Director (Rp)*	Anggota Direksi *Mermber of Board of Directors (Rp)*
1	Gaji *Salary*	103.000.000	92.700.000
2	THR per Tahun *Religious Holiday Allowance (THR) per Year*	103.000.000	92.700.000
3	Komunikasi per bulan *Communication allowance per month*	500.000	500.000
4	Transportasi per bulan *Transportation allowance per month*	25.000.000	25.000.000
5	Pakaian per tahun *Attire allowance per year*	103.000.000	92.700.000

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2016 — Total Directors' Remuneration of 2016

No	Uraian *Description*	Direktur Utama *President Director (Rp)*	Anggota Direksi *Mermber of Board of Directors (Rp)*
6	Tunjangan perumahan per bulan *) *Housing allowance per month *)*	27.500.000	27.500.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) bulan *Total Salaries and Allowances in 1 (one) month*	362.000.000	331.100.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) tahun *Total Salaries and Allowances in 1 (one) year*	4.344.000.000	3.973.200.000
7	Tantiem / Bonus TB 2015 sebelum PPh 21 **) *Tantiem/Bonus TB 2015 before Income Tax Article 21 **)*	2.345.992.894	**2.111.393.604**
Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Direksi *Tantiem/Bonus TB 2015 before Income Tax Article 21 **)*		6.689.992.894	6.084.593.604
Jumlah Direksi *Number of Directors*		1 orang	4 orang
Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Direksi *Total Remuneration within 1 (one) year for all Directors*		6.689.992.894	24.338.374.416
Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2016 *Total Remuneration of Directors of 2016*			31.028.367.310

*) Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
**) Sesuai Peraturan Menteri BUMN pajak tantiem / bonus yang ditanggung oleh Ybs./penerima.

*) In accordance with SOE Minister Regulation no. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Stipulation of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
**) In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of tantiem/bonus paid by the party concerned/recipient.

Jumlah remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Total remuneration given by The Company to the Board of Supervisors and Directors in 2016 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2016 — *Remuneration amount of the Board of Supervisors and Directors of 2016*

Uraian *Description*	Jumlah *(Rp) Total (IDR)*
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas *Total Remuneration of Board of Supervisors*	8.102.544.000
Jumlah Remunerasi Direksi *Total Remuneration of Directors*	31.028.367.310
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2016 *Total Remuneration of the Board of Supervisors and Directors in 2016*	39.130.911.310

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal

Transparency of Business Relationship and Affiliation Relationship Among the Board of Supervisors, Directors, and Equity Owner

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal. Bentuk hubungan

Presented below is the business relationship and affiliation relationship among the Board of Supervisors, Directors, and Equity Owner. Forms of

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

business relationship including debt-receivable, business cooperation, etc.; while the form of affiliation relationship includes special relationships primarily due to blood-related relationships such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, etc.

	Hubungan Afiliasi Dengan *Affiliation Relationship With*			**Hubungan Usaha Dengan** *Business Relationship With*		
	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Direksi** *Directors*	**Pemilik Modal** *Equity Owner*	**Dewan Pengawas** *Board of Supervisors*	**Direksi** *Directors*	**Pemilik Modal** *Equity Owner*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*						
Braman Setyo	x	x	x	x	x	x
Nasarudin Umar	x	x	x	x	x	x
Subandriyo	x	x	x	x	x	x
Dahlan Siamat	x	x	x	x	x	x
Noor Ida Khomsiyati	x	x	x	x	x	x
Ony Suprihartono	x	x	x	x	x	x
Direksi *Directors*						
Diding S. Anwar	x	x	x	x	x	x
Bakti Prasetyo	x	x	x	x	x	x
R. Sophia Alizsa	x	x	x	x	x	x
Nanang Waskito	x	x	x	x	x	x
I. Rusdonobanu	x	x	x	x	x	x

v = ada / x = tidak ada
v = have relationship / x = no relationship

Untuk susunan dan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi tahun 2016 tidak terdapat hubungan afiliasi dan hubungan usaha, baik diantara Dewan Pengawas, Direksi, maupun dengan Pemilik Modal.

For the composition and structure of 2016 Supervisory Board and Board of Directors, there is no affiliation and business relationship between the Supervisory Board, the Board of Directors or the Capital Owners.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perum Jamkrindo periode tahun 2016 sebagai berikut,

Transparency of Concurrent Position of the Board of Supervisors and Directors

The relationship of the Board of Supervisors and Directors to other companies outside Perum Jamkrindo for the period of 2016 is as follows,

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Management of Other Company*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *As Member of Board of Commissioners*	**Sebagai Anggota Direksi** *As Member of Directors*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*		
Braman Setyo	x	x
Nasarudin Umar	x	x
Subandriyo	x	x
Dahlan Siamat	x	x
Noor Ida Khomsiyati	x	x
Ony Suprihartono	x	x
Direksi *Directors*		
Diding S. Anwar	x	x
Bakti Prasetyo	v	x
R. Sophia Alizsa	x	x
Nanang Waskito	x	x
I. Rusdonobanu	x	x

v = ada / x = tidak ada]
v = have relationship / x = no relationship

Rangkap jabatan Dewan Pengawas dan Direksi di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

Concurrent position of the Board of Supervisors and Directors outside the Company is as follows:

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Jabatan pada Perusahaan Lain *Position at Other Company*
Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan) *Director of Guarantee Business*	Komisaris Utama entitas anak, PT Penjaminan Jamrindo Syariah *Chief Commissioner Subsidiaries, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah*

Rangkap jabatan Direktur Bisnis Penjaminan, Bakti Prasetyo sebagai Komisaris Utama dari entitas anak, PT Penjaminan Jamrindo Syariah, merupakan bagian dari representasi manajerial Perum Jamkrindo pada entitas anak.

The position of Director of Assurance Business, Bakti Prasetyo as President Commissioner of the subsidiary, PT Penjaminan Jamrindo Syariah, is part of Perum Jamkrindo's managerial representation in subsidiaries.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Sekretaris Dewan Pengawas

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

Secretary to The Board of Supervisors

In order to assist in the smooth implementation of its duties, the Board of Supervisors is assisted by a Secretary to the Board of Supervisors who functions to carry out the Company's protocol and secretariat activities.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan meliputi komunikasi Perusahaan, protokoler, kesekretariatan, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Dewan Pengawas.
2. Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.
3. Melaksanakan kegiatan adminsitratif dan memfasilitasi Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal.
4. Melaksanakan kegiatan agenda rapat Dewan Pengawas dan RPB.
5. Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun ekternal terkait kepentingan Perusahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen/ kearsipan Perusahaan.
7. Menyusun materi dan Berita Acara Komite Audit Dan Komite Risiko Usaha sesuai bidang tugasnya.
8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.
9. Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
10. Melaksanakan, memelihara dan mengolah *data base* sesuai bidang tugasnya.
11. Melakukan penatausahaan berkas/dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
12. Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
13. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
14. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staf dan pelaksana pada bagian Sekretariatan & Humas.
15. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas dipercayakan kepada Wawan

Duties of Secretary to the Board of Supervisors

Implementation of activities includes Company communications, protocols, secretariats, correspondence administration, public relations in the framework of the management of the Company, among others:

1. Carry out corporate communication activities, including the preparation of strategies and planning of communication activities of the Board of Supervisors.
2. Implement the Company's protocol and secretarial activities.
3. Carry out administrative activities and facilitate the Board of Supervisors with External Parties.
4. Carry out the agenda activities of the Board of Supervisors and RPB meetings.
5. Conduct public relations activities in meetings with internal and external parties related to the interests of the Company.
6. Carry out Company document management/ archives activities.
7. Prepare materials and Minutes of Audit Committee and Business Risk Committee according to their field of duty.
8. Implement and supervise the implementation of Good Corporate Governance in its field of duty.
9. Conduct Risk Management activities according to their field of duty.
10. Implement, maintain, and process data base according to the field of duty.
11. Administer files/documentation related to the field of duty.
12. Prepare an activity report periodically in the field of duty.
13. Provide data and information for internal/external examination purpose as well as follow up on the Auditor's recommendations according to their field of duty.
14. Foster, direct, and assess the performance of all staffs and implementers in the Secretariat & Public Relations division.
15. Supervise the implementation of the duties of the Directors and the implementers of the Secretariat and Public Relations Division.

Secretary Officer to the Board of Supervisors

Secretary to the Board of Supervisors is appointed and dismissed by the Board of Supervisors. Based on Board of Supervisors' Decree No. KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2013 on the Appointment of Secretary to the Board of Supervisors of Public Corporation of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Secretary Officer to the Board of Supervisors is assigned to

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Chaerul Anwar.

Wawan Chaerul Anwar.

Wawan Chaerul Anwar
Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary to the Board of Supervisors

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Jakarta, 17 Maret 1969
Berdomisili di DKI Jakarta
Indonesia Citizen
48 Years old
Born in Jakarta, March 17, 1969
Domiciled in DKI Jakarta

Mulai menjabat
30 April 2013

Pendidikan
Education
Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya (1994).
Bachelor of Economics from Universitas Jayabaya (1994).

Riwayat Jabatan
History of Positions
Kepala Sub Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I Kementerian BUMN (2010-2012).
Head of Sub-Division of Infrastructure and Logistic Business (2010-2012).

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2016 memutuskan:

1. Honorariun per bulan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama.
2. Tunjangan transportasl yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. Fasilitas pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
4. Tantiem sebesar 15% dari tantiem Direktur Utama.
5. Santunan Purna Jabatan pada akhir masa jabatan dalam bentuk keikutsertaan dalam progran asuransi atau tabungan pensiun dengan beban premi/iuran tahunan ditanggung Perusahaan. Beban premi/iuran tahunan tersebut sebesar 25% honorarium setahun.
6. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Tunjangan Pakaian serta fasilitas lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Remuneration Policy for the Secretary to Board of Supervisors

Based on Board of Trustee Decree No. KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2016 it is stipulated that:

1. Honorarium per month of 15% of the salary of the President Director.
2. Transportation allowance is determined in accordance with applicable provisions in the Company.
3. Medical facilities shall be in accordance with applicable provisions in the Company.
4. Bonus shall be of 15% of the tantiem of the President Director.
5. Fixed Assets Benefit at the end of the term of office in the form of participation in insurance or retirement savings programs with annual premium/liability expenses will be borne by the Company. The premium/annual fee is 25% of honorarium per year.
6. The amount of Religious Holiday Allowance (THR) and Attire Allowance as well as other facilities shall be stipulated by the Board of Directors.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas — Remuneration of the Secretary of the Board of Trustee

No	Uraian *Descriptions*	Jumlah (Rp) *Total (Rp)*
1	Honorarium *Honorarium/Salary*	15.450.000
2	THR per Tahun *Religious Holiday Allowance (THR) per Year*	15.450.000
3	Komunikasi per bulan *Communication allowance per month*	-
4	Transportasi per bulan *Transportation allowance per month*	1.300.000
Jumlah dalam 1 (satu) bulan *Amount in 1 (one) month*		32.200.000
Jumlah dalam 1 (satu) tahun *Total amount in 1 (one) year*		386.400.000

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Pengawas memantau kinerja unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas dalam hal pengambilan keputusan.

Struktur, Keanggotan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Perum Jamkrindo di atur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Audit Committee

The establishment of the Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia), Government Regulation No. 45 of 2005 on Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOE; and State Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.

The Audit Committee continues to perform its duties independently in assisting the Board of Supervisors to monitor the performance of the Internal Audit Unit as well as the designated External Auditor. Therefore, the Audit Committee is authorized to establish relationships with both institutions and submit reports to the Board of Supervisors. The monitoring result in the form of findings and recommendations can be taken into consideration by the Board of Supervisors in case of decision making.

Structure, Membership, Integrity and Expertise, and Independence of Audit Committee

Structure, Membership, Integrity, Expertise, and Independence of Audit Committee of Perum Jamkrindo have fulfilled the provisions stipulated in State Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE and State Minister of SOE Letter No. S-375/MBU.Wk/2011 dated 5 December 2011 on Policies of State Minister of SOE in the Management and Monitoring of SOE.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan yang memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memahami industri bisnis Perum Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

The Audit Committee is chaired by a chairman who is a member of the Board of Supervisors, and the number of members of the Audit Committee from outside the Board of Supervisors is 2 (two) persons. Members of the Audit Committee have good integrity and sufficient work experience in the field of supervision/examination. Furthermore, members of the Audit Committee of Perum Jamkrindo have background in accounting and finance education and understand the business industry of Perum Jamkrindo. Members of the Audit Committee also have no potential conflicts of interest with Perum Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Period of Services

The period of services of Audit Committee member who is not member of the Company's Board of Supervisors are the most 3 (three) years and can be extended for 1 (one) time for 2 (two) years of period of services by not reducing the rights of the Board of Supervisors to terminate at any time

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Susunan dan komposisi anggota Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Composition and Profiles of Members of Audit Committee

Structure and Composition of Members of the Audit Committee throughout 2016 are as follows:

Susunan Komite Audit Perum Jamkrindo Tahun 2016

Structure of the Audit Committee of Perum Jamkrindo Year 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*
Ketua/Anggota Dewan Pengawas *Head/Member of the Board of Supervisors*	Dahlan Siamat	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013 *Board of Supervisors' Decree No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Pengawas *Following the period of services as the Board of Supervisors*	
Anggota *Member*	Fajar Karyanto	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DP-JAMKRINDO/VII/2016 *Board of Supervisors' Decree No. KEP-03/DP-JAMKRINDO/VII/2016*	26 Juli 2016	25 Juli 2018

Profil Ketua Komite Audit, Dahlan Siamat, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Di bawah ini disajikan profil dari anggota Komite Audit.

Profile of the Audit Committee Head, Dahlan Siamat, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report. Presented below is the profile of the Audit Committee members.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Fajar Karyanto
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia
Usia 33 tahun
Kelahiran Kebumen, 7 Oktober 1982
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat
Indonesia Citizen
33 Years old
Born in Kebumen, 7 October 1982
Domiciled in Bekasi, West Java

Periode Jabatan
26 Juli 2016 - 25 Juli 2018

Pendidikan
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta (2010); D3 Akuntansi STAN Jakarta (2000)

Riwayat Profesi
Kedeputian bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain (2014-sekarang); Keasdepan Usaha Pembiayaan dan Jasa Lain (2014-sekarang); Ketua bidang Usaha Pembiayaan dan Jasa Lain (2014-sekarang); Plt. Kepala Sub bidang Usaha Pembiayaan dan Jasa Lain (2014-sekarang).

Period of Office
26 July 2016 - 25 July 2018

Education
Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Indonesia, Jakarta (2010); Diploma 3 of Accounting, STAN, Jakarta (2000)

Professional History
Deputy of Financial Service, Construction Services, and Other Services Business Unit, (2014-present); Keasdepan Financing Business and Other Services (2014-present); Head of Financing and Other Services Business Unit (2014-present); Act. Head of Financing and Other Services Business Sub-Division (2014-present).

Uraian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.

Description of Functions, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee

The Company's Audit Committee works collectively and serves to assist the Board of Supervisors in performing its duties. In performing its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assist the Board of Supervisors in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the duties of Internal Auditor and External Auditor.
2. Assess the implementation of the activities and the results of audits conducted by either the Internal Audit Division or External Auditor.
3. Provide recommendations regarding the improvement of management control system and its implementation.

4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.

4. Ensure that there has been a satisfactory review procedures for all information issued by Perum Jamkrindo.
5. Give recommendations regarding the appointment of the Public Accountants and Public Accountant Office to the Board of Supervisors to be delivered to the Equity Owner.
6. Identify matters requiring the attention of the Board of Supervisors as well as other duties of the Board of Supervisors.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Audit selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Komite Audit mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit.

Di tahun 2016, Komite Audit tidak melakukan program pengembangan kompetensi.

Competence Development Program

In order that the Audit Committee can always follow the development of matters related to guarantee industry, the Audit Committee attends competence development program such as seminar, workshop, or other activities that can improve knowledge and competence of the Audit Committee..

In 2016, the Audit Committee did not hold competence development program.

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Audit di tahun 2016 digelar bersamaan dengan Rapat Internal Dewan Pengawas yang diselenggarakan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2016. Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas. Kehadiran Komite Audit pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has organized meetings aimed to support the duties of the Board of Supervisors in monitoring the Company's management. Throughout 2016, the Audit Committee held 12 meetings, in which the minutes of meetings and attendance of the Audit Committee members are as seen below.

Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat / Audit Committee Minutes of Meeting

Tanggal *Date*	Komite Audit *Meeting Agenda*	
	Dahlan Siamat	Fajar Karyanto
29 Januari 2016 *29 January 2016*	v	v
26 Februari 2016 *26 February 2016*	v	v
30 Maret 2016 *30 March 2016*	v	v
29 April 2016 *29 April 2016*	v	v
31 Mei 2016 *31 May 2016*	v	v
30 Juni 2016 *30 June 2016*	v	v

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat

Audit Committee Minutes of Meeting

Tanggal *Date*	Komite Audit *Meeting Agenda*	
	Dahlan Siamat	Fajar Karyanto
27 Juli 2016 *27 July 2016*	v	v
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	v	v
23 September 2016 *23 September 2016*	v	v
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	v	v
10 November 2016 *10 November 2016*	x	x
23 Desember 2016 *23 December 2016*	v	v

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = present / x = not present

Ketidakhadiran anggota Komite Audit pada rapat di atas disebabkan adanya tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan.

Absence of members of Audit Committee in the meeting was due to official duty which could not be represented.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of the Audit Committee in Meetings

Komite Audit *Audit Committee*	Jumlah Wajib Rapat *Number of Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	% Kehadiran *Attendance*
Dahlan Siamat	12	11	91,67%
Fajar Karyanto	12	11	91,67%
Rata-rata			91,67%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2016

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada dewan Pengawas. Program Kerja Komite Audit di tahun 2016 disampaikan pada Desember 2015 kepada Dewan Pengawas dan pelaporannya disampaikan melalui laporan triwulan.

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Work Plan in 2016

The Audit Committee works collectively and serves to assist the Board of Supervisors in performing its duties. The Audit Committee is independent either in the implementation of its duties or in reporting, and is directly responsible to the Board of Supervisors. Audit Committee's Work Program in 2016 was submitted in December 2015 to the Board of Supervisors and the submission is delivered through quarterly report.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota

Remuneration Policy for Audit Committee

Remuneration of members of Audit Committee is determined by the Board of Supervisors by taking into account the Company's capability, with maximum amount of 20% of the President Director's salary.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:
1. Honorarium per bulannya Rp20.600.000
2. Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perum Jamkrindo tidak memiliki komite tersendiri terkait fungsi nominasi dan remunasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Mekanisme nominasi dan pengangkatan sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian BUMN sebagai Pemilik Modal. Sementara mekanisme penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dijelaskan pada bagian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di atas.

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

1. Pengangkatan
   Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 yaitu dengan terlebih dahulu menominasikan beberapa calon yang berasal dari berbagai sumber seperti mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Pejabat Struktual maupun Fungsional serta dari sumber lain.

   Mekanisme pengangkatan selanjutnya adalah melakukan penjaringan dengan Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah didapatkan kandidat calon Dewan Pengawas, selanjutnya Deputi melakukan pengadministrasian terhadap masing-masing kandidat. Setelah pengadministrasian dirampungkan, Deputi melakukan penilaian serta evaluasi terhadap seluruh kandidat calon anggota Dewan Pengawas dengan mengacu kepada kualifikasi yang sudah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan setelah hasil penilaian dan evaluasi berupa pernyataan kualitatif yaitu, "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

Member of Board of Supervisors who becomes the Head/member of Audit Committee is not give any additional income from the position aside from the income as member of Board of Supervisors.

Member of Audit Committee who is not Board of Supervisors is given a remuneration policy by the Company as follows:
:
1. Honorarium per month IDR20,6000,000
2. Holiday Allowances per year of 1x Honorarium.

Nomination and Remuneration Function

Perum Jamkrindo does not have a separate committee related to the nomination and remuneration function for the Board of Supervisors and Directors. The nomination and appointment mechanisms are entirely the authority of the Ministry of SOE as the Equity Owner. The remuneration determination mechanism for Board of Commissioners and Directors have been described in the Remuneration of the Board of Commissioners and Directors above.

Procedures of Appointment and Dismissal of Members of Board of Supervisors

1. Appointment
   Mechanism of appointment of Board of Supervisors is based on Minister of SOE Decree No. PER-02/MBU/02/2015, which is by first nominating several candidates from various sources such as former SOE Directors, Board of Commissioners or Board of Supervisors of SOE, Structural or Functional Official and from other sources.

   The next appointment mechanism is to conduct a screening with the Minister of SOE, the Secretary, the Technical Deputy, and/or the Deputy acting as the person in charge. After obtaining the candidate for the Board of Supervisors, the Deputy shall then administer each candidate. After the administration is finalized, the Deputy shall assess and evaluate all candidate of members of the Board of Supervisors with reference to the qualifications already stipulated. Recommendations given after assessment and evaluation results are qualitative statements, which are "Recommended" or "Not Recommended".

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Bagi kandidat calon yang mendapatkan kriteria "Disarankan" dapat diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Dalam aturan ini, anggota Dewan Pengawas dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Untuk itu, terdapat ketentuan bahwa kandidat terpilih diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya semenjak ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan anggota Dewan Pengawas tidak melaksanakan ketentuan tersebut, secara otomatis masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada saat itu.

2. Pemberhentian
Dalam ketentuan ini, Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan berbagai alasan baik atas permintaan pribadi maupun alasan-alasan lain terkait seperti pelanggaran ketentuan kebijakan internal dan hukum, serta tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Dewan Pengawas Perusahaan juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN dalam rangka restrukturisasi atau memasuki masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara.

Mekanisme pemberhentian diawali dengan pelaksanaan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris. Setelah melakukan evaluasi, Deputi Teknis mengajukan usulan kepada Mentri BUMN guna mendapatkan penetapan. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan penjelasan alasan pemberhentian dan konsep surat Menteri tentang pemberhentian.

Selain mendapatkan usulan dari Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas juga dapat dilakukan langsung oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil evaluasinya sendiri. Menteri BUMN juga dapat menerima masukan dari Deputi Teknis dan Sekretaris terkait kebijakan pemberhentian yang dilakukan.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan *role model* bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan

For candidates who get the "Suggested" criteria can be proposed to be determined to become a member of the Board of Supervisors of the Company. In this rule, members of the Board of Supervisors are prohibited from taking concurrent positions. Therefore, there is a requirement that the elected candidate is required to sign a letter resigning from his previous position since being appointed as a member of the Board of Supervisors of the Company. If within the stipulated period the member of the Board of Supervisors does not implement the provisions, automatically the term of office of the relevant member will expire at that time.

2. Dismissal
In this provision, the Board of Supervisors may be dismissed from time to time for various reasons either on personal request or other related reasons such as violations of internal policies and law provisions, and non-fulfillment of mandated duties and responsibilities. The Company's Board of Supervisors may also be dismissed by the Minister of SOE in the context of restructuring or entering the retirement age of the State Civil Apparatus.

The dismissal mechanism begins with the evaluation of members of the Board of Supervisors who are dismissed by the Technical Deputy in coordination with the Secretary. After conducting the evaluation, the Technical Deputy submits a proposal to the Minister of SOE in order to obtain the validation. Submission of proposed dismissal is accompanied by explanation of reason for dismissal and concept of Minister's letter about the dismissal.

In addition to obtaining a proposal from the Technical Deputy and Secretary as described earlier, the process of dismissing members of the Board of Supervisors can also be done directly by the Minister of SOE based on the results of his own evaluation. Minister of SOE may also receive input from the Technical Deputy and the Secretary regarding the termination policy.

Policy on the Directors Succession Plan

The Directors succession becomes a momentum to build the tradition of transferring generation and role model for Perum Jamkrindo, in addition to being a challenge for the elected Directors and all employees to respond with the best performance and achievement. To ensure that the Company is managed by a management with the appropriate expertise and competence, the Company conducts a succession process of the

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

melakukan proses suksesi Direksi dimana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

Directors in which the determination of the candidate for the Directors of Perum Jamkrindo is determined based on the fulfillment of State Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015. The selection process of the Directors shall be conducted by the Evaluation Team determined by the Minister based on the proposal from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

The selection process by the Evaluation Team is as follows:

Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.
Call the Candidates of Members of the Directors who are included in the List of Candidates approved by the Minister, to follow UKK.

↓

Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional.
Test the Candidates of Members of the Directors if the tests do not use a Professional Institute.

↓

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional.
Evaluate the Professional Institute testing results if the tests are administered by a Professional Institution.

↓

Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.
Make decisions and give recommendations on the assessment made.

↓

Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan
Determine the final result of evaluation signed by the Head and Vice Head of the Evaluation Team, to be submitted to the Minister in order to obtain the validation

↓

Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan
Deliver all UKK documents to the Secretary of the Ministry for administration

↓

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK
Perform other duties granted by the Minister in order to facilitate the UKK process

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
   b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;

2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%.
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%.
   c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%.
   d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%.
   e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.

3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindaklanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal

The Evaluation Team gives recommendations to the Minister to determine the best candidate. While weighting in the assessment of the material requirements of the candidate of Directors is as follows:

1. Integrity and morality are given the weight of the assessment of 35% with the following details:
   a. Never engage in engineering actions and misconduct practices in the candidate's work premises before nomination (dishonesty) shall be given a weight of 10%;
   b. Never engage in an act of breach of pledge that can be categorized as not fulfilling the agreed commitments in the candidate's work premises before nomination (bad behavior) shall be given a weight of 10%;
   c. Never engage in acts categorized as having unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (bad behavior) shall be given a weight of 10%;
   d. Never engage in acts that can be categorized as violations of the provisions relating to the principles of healthy corporate governance (bad behavior) shall be given a weight of 5%;

2. Technical competence/expertise is given the weight of the assessment of 55% with the following details:
   a. Knowledge in SOE business shall be given a weight of 5%.
   b. Understanding of management and corporate governance shall be given a weight of 10%.
   c. Experience in managing SOE/Company/Institution shall be given a weight of 10%.
   d. The ability to lead and cooperate shall be given a weight of 10%.
   e. Ability to formulate and implement strategic policies in the framework of SOE development shall be given a weight of 20%.

3. Psychology aspect is awarded a weight of assessment by 10%.

Committee of Investment and Business Risk

The establishment of the Investment and Business Risk Committee in December 2011 is based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia) as a follow-up of State Minister of SOE Letter

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.

2. Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai *instrument* investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

No. S-328/MBU.4/2011 dated 25 October 2011 on Assessment Result Report of GCG Implementation of Perum Jamkrindo in 2010, by considering the conditions that:

1. Perum Jamkrindo has the main duty of conducting credit guarantee activities for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives, which face high risk, especially the risk of claim payment (claim of indemnity from the bank as lender) due to bad credit.

2. Perum Jamkrindo manages a relatively large amount of funds in which the management needs to be properly organized through placement on various financial investment instruments with due regard to the security and revenue optimization.

Susunan dan Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Susunan dan komposisi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Structure and Profile of Members of Investment and Business Risk Committee

Structure and Composition of Members of the Investment and Business Risk Committee throughout 2016 are as follows:

Susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo Tahun 2016

Structure of Investment and Business Risk Committee of Perum Jamkrindo Year 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*
Ketua/Anggota Dewan Pengawas *Head/Member of the Board of Supervisors*	Subandriyo	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2014 *Board of Supervisors' Decree No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2014*	21 Maret 2014 *21 March 2014*	20 Maret 2017 *20 March 2017*
Anggota *Member*	Slamet Wiyono	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DPJAMKRINDO/V/2014 *Board of Supervisors' Decree No. KEP-05/DPJAMKRINDO/V/2014*	1 Mei 2014 *1 May 2014*	30 April 2017 *30 April 2017*

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha, Subandriyo, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Di bawah ini disajikan profil dari anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Profile of the Investment and Business Risk Committee Head, Subandriyo, can be seen in the Board of Supervisors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report. Presented below is the profile of the Investment and Business Risk Committee members.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Slamet Wiyono
Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

Warga negara Indonesia **Usia 59 tahun** **Kelahiran Boyolali, 12 Januari 1958** **Berdomisili di Tangerang, Banten**	*Indonesia Citizen* *59 years old* *Born in Boyolali, Januari 12, 1958* *Domiciled in Tangerang, Banten*
Periode Jabatan 1 Mei 2014 - 30 April 2017	*Period of Office* *1 May 2014 - 30 April 2017*
Pendidikan S3 Doktor Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti (2014); S2 bidang *Accounting and Finance* di RVB Belanda, Maastricht (1993); S1 bidang Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984).	*Education* *Master in Accounting and Finance, rvB Netherlands, Maastricht (1993); Bachelor of Accounting, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984).*
Riwayat Profesi Wakil Ketua Kopkar, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (2013-2018); Sekretaris Pendirian Diploma 4 Komunikasi, Universitas Trisakti Jakarta (2010); Aggota Tim Evaluasi PKM, Universitas Trisakti Jakarta (2008-2009); Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (1996); Direktur Lembaga Administrasi Perusahaan (LAP), Fakultas ekonomi universitas Trisakti Jakarta (1996-1999); Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (1992-1993; 1994-1996)	*Professional History* *Kopkar Vice Head, Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (2013-2018); Secretary of Establishment of Diploma 4 Communication, Universitas Trisakti, Jakarta (2010); Member of Evaluation Team PKm, Universitas Trisakti, Jakarta (2008-2009); Senate Member of Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (1996); Director of Company Administration Institution (Lembaga Administrasi Perusahaan/ LAP), Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (1996-1999); Secretary of Accounting Faculty, Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (1992-1993; 1994-1996)*
Sertifikasi Sertifikasi Akuntansi Syariah dari Ikatan Akuntan Indonesia (2010).	*Certification* *Certification of Sharia Accounting from the Indonesian Accountant Association (2010).*

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi;
2. melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan;
3. memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Pengawas dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha;
4. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi;
6. melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Pengawas.

Duties of Investment and Business Risk Committee

In performing its functions, the Investment and Business Risk Committee has the following duties and responsibilities:

1. monitor transactions, management, policies, and guidelines of finance and investment;
2. review investment performance, risk management implementation, and capital structure;
3. give input on matters that need attention to the Board of Supervisors in order to advise the Directors on the management of investment and business risks;
4. prepare annual work plans and budgets that are aligned with the annual work plan of the risk and investment management conducted by the Directors;
5. perform other duties given by the Board of Supervisors associated with monitoring business risk and investment;
6. report the results of the Committee's work to the Board of Supervisors.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Investasi dan Risiko Usaha dapat terus mengikuti perkembangan dunia usaha dan industri penjaminan, Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha. Berikut disampaikan program yang diikuti di sepanjang tahun 2016.

Competence Development Program

In order that the Investment and Business Risk Committee can keep following the business world development and guarantee industry, the Company facilitates competence development program for members of Investment and Business Risk Committee. Below are the programs attended throughout 2016.

Nama *Name*	Kegiatan *Activity*	Tempat/Tanggal *Place/Date*	Penyelenggara *Organizer*
Slamet Wiyono	Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan BUMN *Workshop of Monitoring and Evaluation of Drafting RKAP and KPI of SOE and SOE's Subsidiary*	Bandung, 12 Juni 2015 *Bandung, 12 June 2015*	Human Capital BUMN, dan Kabar BUMN.com *Human Capital of SOE and News of BUMN.com*
	Manajemen Risiko *Risk Management*	Yogyakarta, 29 Agustus 2015 *Yogyakarta, 29 August 2015*	Pusat Studi Investasi dan Keuangan (PSIK) Group *Center of Investment and Finance Study (PSIK) Group*

Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2016 digelar bersamaan dengan Rapat Internal Dewan Pengawas yang diselenggarakan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2016. Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas. Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Meetings of Investment and Business Risk Committee

The Investment and Business Risk Committee has organized meetings aimed to support the duties of the Board of Supervisors in monitoring the Company's management. Throughout 2016, the Investment and Business Risk Committee held ... meetings, in which the minutes of meetings and attendance of the Investment and Business Risk Committee members are as seen below.

Kehadiran Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Rapat

Attendance of Member of Investment and Business Risk Committee in Meetings

Tanggal *Date*	Komite Investasi dan Risiko Usaha *Committee of Investment and Business Risk*	
	Subandriyo	Slamet Wiyono
29 Januari 2016 *29 January 2016*	v	v
26 Februari 2016 *26 February 2016*	v	v
30 Maret 2016 *30 March 2016*	v	v
29 April 2016 *29 April 2016*	v	v
31 Mei 2016 *31 Mei 2016*	v	v

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Tanggal *Date*	Komite Investasi dan Risiko Usaha *Committee of Investment and Business Risk*	
	Subandriyo	Slamet Wiyono
30 Juni 2016 *30 June 2016*	x	v
27 Juli 2016 *27 July 2016*	x	v
29 Agustus 2016 *29 August 2016*	v	v
23 September 2016 *23 September 2016*	v	v
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	v	v
10 November 2016 *10 November 2016*	v	x
23 Desember 2016 *23 December 2016*	v	v

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = present / x = not present

Ketidakhadiran anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha pada rapat seperti yang terlihat pada tabel di atas disebabkan adanya tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan.

Absence of members Committee of Investment as seen in the table above was due to official duty which could not be represented.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of the Investment and Business Risk Committee in Meetings

Komite Investasi dan Risiko Usaha *Committee of Investment and Business Risk*	Jumlah Wajib Rapat *Number of Mandatory Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	% Kehadiran *Attendance*
Subandriyo	12	10	91,67%
Slamet Wiyono		11	83,33%
Rata-rata *Average*			87,50%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha 2016

Salah satu tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dan investasi atas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan investasi Perusahaan. Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2016 disampaikan pada Desember 2015 kepada Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan terhadap Program Kerja tersebut disampaikan melalui Laporan Triwulan.

Brief Report on the Implementation of Investment and Business Risk Committee Work Plan in 2016

One of the duties of the Investment and Business Risk Committee to give recommendations to increase the implementation quality of risk management and investment on the monitoring towards policies and implementation of the Company's risk management and investment. Work Program of Investment and Business Risk Committee in 2016 was submitted in December 2015 to the Board of Supervisors and the Implementation Report to the Work Program is delivered through Quarterly Report.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Remunerasi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:
1. Honorarium per bulannya Rp20.600.000
2. Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direksi.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang Pengangkatan Pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Abdul Bari.

Remuneration Policy for Investment and Business Risk Committee

Remuneration of members of Investment of Business Risk Committee is determined by the Board of Supervisors by taking into account the Company's capability, with maximum amount of 20% of the President Director's salary. Member of Board of Supervisors who becomes the Head/member of Investment and Business Risk Committee is not give any additional income from the position aside from the income as member of Board of Supervisors.

Member of Investment and Business Risk Committee who is not Board of Supervisors is given a remuneration policy by the Company as follows:
1. Honorarium per month IDR20,6000,000
2. Holiday Allowances per year of 1x Honorarium.

SUPPORTING ORGANS TO DIRECTORS

Corporate Secretary

The Company has a Corporate Secretary function in charge of conducting corporate communications activities, including preparation of corporate strategies, protocols, and secretariats. The function of Corporate Secretary is directly under the Directors.

Officer of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Directors. Based on Director's Decree No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 about appointment of officials the Officer of Corporate Secretary is entrusted to Abdul Bari.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun
Kelahiran Subang, 29 September 1975
Berdomisili di Jakarta
Indonesia citizen
41 Years old
Born in Subang, 29 September 1975
Domiciled in Jakarta

Mulai Menjabat
1 Agustus 2016

Pendidikan
S3 Doktoral Manajemen SDM Universitas Negeri, Jakarta (2014)

Bergabung di Perum Jamkrindo
10 Desember 2015

Riwayat Jabatan
- Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016)
- Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016)
- Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015)

Sertifikasi
- Certified Profesional In Human Resources Management (CPHRM) Tahun 2015
- Completed DISC Trainer Certification Tahun 2014
- Sertifikasi Traning Of Trainer Tahun 2014
- Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Asuransi Kesehatan/AAK) Tahun 2008
- Sertifikasi Asuransi Jiwa (AAIJ) Tahun 2007
- Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Ajun Asuransi Kesehatan/AAAK) Tahun 2006
- Sertifikasi K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) Tahun 2002

Beginning of Services
1 August 2016

Education
Doctoral degree in HR Management, Universitas Negeri Jakarta (2014)

Joined Perum Jamkrindo
10 December 2015

History of Positions
- *First Class Official of Directorate of Operations and Network (2016)*
- *First Class Official of Primary Directorate (2015-2016)*
- *Associate Officer of Corporate Secretary (2015)*

Certification
- *Certified Professional in Human Resources Management (CPHRM) in 2015*
- *Completed DISC Trainer Certification in 2014*
- *Training of Trainer Certification in 2014*
- *Certification of Insurance Experts (Health Insurance Experts/AAK) in 2008*
- *Certification of Life Insurance (AAIJ) in 2007*
- *Certification of Insurance Experts (Associate Level of Health Insurance Experts/AAAK) in 2006*
- *K3 Certification (Occupational Health and Safety) in 2002*

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
2. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi auditor tersebut sesuai bidang tugasnya
3. Merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan pengelolaan komunikasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan hubungan baik dan kerjasama dengan internal, *stakeholders* eksternal termasuk media.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Implementation of Corporate Secretary activities covering the following aspects:

1. Develop and propose policies and Standard Operating Procedures (SOP) of Corporate Secretary Work Unit.
2. Provide data and information for internal/external examination purpose as well as follow up on the Auditor's recommendations according to their field of duty.
3. Formulate and implement corporate communication management strategies and policies with the aim of improving the quality of good relationship and cooperation with internal, external stakeholders including the media.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

4. Mengoordinasi dan memonitor pelaksanaan prosedur tata upacara/seremonial, tata tempat, tata penghormatan pejabat internal dan eksternal dalam setiap kegiatan di lingkungan Perusahaan.
5. Mengumpulkan, menganalisa keluhan/saran masyarakat/klien dari kotak saran dan meneruskannya kepada pimpinan unit kerja terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut, sebagai bahan kebijakan.
6. Melaksanakan, memelihara dan mengelola *data base* sesuai bidang tugasnya.

4. Coordinate and monitor the implementation of ceremonial procedures, arrangement of places, procedures to honor internal and external officials in every activity within the Company.
5. Collect, analyze community/client complaints/suggestions from the advice box and forward them to the head of the relevant work unit and prepare and respond to the complaints, as policy materials.
6. Implement, maintain, and process data base according to the field of duty.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Sekretaris Perusahaan selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, Perusahaan memfasilitasi SDM yang tergabung dalam Divisi Sekretaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Competence Development Program

In order that the Corporate Secretary can always follow the development of matters related to the business world, guarantee industry, and the relevant laws and regulations, the Company facilitates the HR of Corporate Secretary Division to attend competence development program in the forms of seminar, workshop, or other activities that can increase knowledge and competence.

The competence development program participated in 2016 is as follows.

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Kegiatan** *Activity*	**Tempat/Tanggal** *Place/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Abdul Bari (Sekretaris Perusahaan, 2016-sekarang / *Corporate Secretary, 2016-present*)	*Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Vietnam*	Vietnam	LM FE UI
	Strategic Leaders Briefing and Business Networking to Myanmar	Myanmar	LM FE UI
	The 2nd Working Level Council	Bali	KODIT
	Neo Strategic Planning	Jakarta	ARRBEY
	Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup Dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura *Supporting Startup Company's Growth With Guarantee Credit and Venture Capital*	Jakarta	Infobank Institute
	Dampak Penurunan Suku Bunga *Net Interest Margin* (NIM) Terhadap Pertumbuhan Perbankan Sektor Kredit UMKM *Impact of Net Interest Margin (NIM) Interest Rate Decrease on Banking Growth in MSME Credit Sector*	Jakarta	Infobank Institute
Dwi Putra Raneldo (Kepala Seksi Kesekretariatan / *Head of secretarial*)	*Workshop* Manajemen Sekretaris serta Asisten Pribadi Pimpinan Perusahaan *Workshop of Secretary Management and Personal Assistant to Company Executives*	Yogyakarta, 20-23 Juni 2016 *Yogyakarta, 20-23 June 2016*	Gama Exist
Cakra Warta Dawali (Kepala Seksi Humas / *Head of General Affair*)			
Andini S (Staf / *Staff*)			
Anggrenei (Staf / *Staff*)			

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Kegiatan *Activity*	Tempat/Tanggal *Place/Date*	Penyelenggara *Organizer*
M. Natsir Rahmadi (Sekretaris Perusahaan, 2014-2016 / *Corporate Secretary, 2014-2016*)	Seminar Association Of Guarantee Institution (AECM)	Portugal, 21-25 Juni 2016 *Portugal, 21-25 June 2016*	AECM

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Di sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Menyusun & mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretaris Perusahaan
2. Mengelola pelaksanaan dan penggunaan RKA Sekretaris Perusahaan
3. Melakukan *Review* dan menetapkan laporan pelaksanaan RKA dan penggunaan anggaran Unit kerja.
4. Penyampaian Laporan Manajemen kepada Dewan Pengawas, yaitu:

Brief Report of Duty Implementation of Corporate Secretary in 2016

Throughout 2016, the Corporate Secretary held several activities as follows:
1. Formulate & propose Work Plan and Budget (RKA) of Corporate Secretary
2. Manage the implementation and use of RKA of Corporate Secretary
3. Review and establish reports on the implementation of RKA and the use of the work unit budget.
4. Submit Management Report to the Board of Supervisors, which are:

Jenis Laporan *Types of Report*	Standar Waktu *Standard of Time*	Penyampaian *Submission*
Laporan Triwulan *Quarter Report*		
TW I/2016	Januari-Maret/ *January-March*	Maret/ *March*
TW II/2016	Januari-Juni/ *January-March*	Juni/ *June*
TW III/2016	Januari -September/ *January-March*	September/ *September*
TW IV/2016	Januari-Desember/ *January-March*	Desember/ *December*

Audit Internal

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Perum Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Internal Audit

Internal Audit is a process of oversight that is done internally of the Company's operations and business management Internal Audit function at Perum Jamkrindo is conducted by Internal Audit Unit (SPI) led by an SPI Head who is appointed and dismissed by the President Director upon approval by the Board of Supervisors. SPI is responsible for conducting independent and objective assurance and consulting, with the aim of enhancing added value and improving the Company's operations through a systematic approach by evaluating and improving the adequacy and effectiveness of the internal control systems, risk management, and corporate governance.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Piagam SPI (*Internal Audit Charter*)

SPI Perum Jamkrindo memiliki *Internal Audit Charter* yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal serta agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Di samping itu, *Internal Audit Charter* merupakan pemenuhan *compliance* perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Audit Internal Perusahaan disahkan pada tahun 2011.

Internal Audit (SPI) Charter

SPI Perum Jamkrindo has an Internal Audit Charter compiled as a standard guideline containing the minimum size of Internal Audit function that should be held by the Company as well as the aspects related to the implementation of Internal Audit as well as to create common understanding and base on the level of maintenance of interests and commitment of all parties associated with the Company.

Furthermore, the Internal Audit Charter is a compliance fulfillment of the company in implementing Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOE and Law of RI No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE).

The Company's Internal Audit Charter was approved in 2011.

Visi dan Misi SPI

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perusahaan, Visi dan Misi SPI adalah sebagai berikut,

Vision and Mission of SPI

Based on the Company's Internal Audit Charter, SPI's Vision and Mission are as follows,

Visi
Menjadi *strategic business partner* yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Vission
To be a strategic business partner that is independent, objective, professional, trusted, responsive through assurance and consulting activities and can provide added value to the Company.

Misi
1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, *business best practice*, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
4. Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

Mission
1. *Active monitoring of all activities of the Company include management control, operational and risk management processes in improving the Company's performance through improving the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.*
2. *Increasing the role of internal audit and quality of supervision result through improving Internal Auditor's competence and utilization of information system.*
3. *Seeking advisory services to enhance the Company's values and its supporting systems, ensuring that all of the Company's activities have been carried out in accordance with the regulations, business best practices, and established policies and procedures.*
4. *Giving added value focusing on business process and customer, proactive, enthusiastic, and trustworthy, able to communicate effectively, able to find the root of a problem, and can utilize the information technology system optimally.*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Perum Jamkrindo bertugas:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan anggarannya.
3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan.
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak terkait.
8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan.
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan.
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan.

Duties of the Internal Audit Unit (SPI) related to the Company's Internal Examination

In carrying out Internal Examination in the Company, Perum Jamkrindo SPI has duties:

1. To assist the President Director duties and Board of Supervisor in monitoring by performing, either operational or planning, implementation, and monitoring the audit result.
2. Coordinating and integrating the draft of Annual Examination Work Program (PKPT) and its budget.
3. Conducting routine examination in accordance with the Annual Examination Work Program (PKPT) and other examination under directives and approval from the President Director.
4. Reviewing and evaluating GCG implementation in presenting assessment according to the organization's regulations, policies/provisions as well as contributing to the improvement of risk management process by assisting the Company in identifying the amount of significant risk.
5. Coordinating SPI activities with other work unit's activities in the Company's environment and evaluating the adequacy of performance measurement indicators used.
6. Drafting and refining the internal audit work standard and internal audit guidelines and coordinating SPI activity report preparation.
7. Submitting Examination Result Report (LHP) to the relevant parties.
8. Monitoring and executing follow-up of the result of either internal or external audit as well as providing objective consultancy services to the management and other work unit related to the monitoring function.
9. Coordinating with external party based on assignment from the President Director related to monitoring duties.
10. Improving the competence of internal examination through education and training.

To carry out these main duties, SPI is responsible for:

1. Organizing monitoring work program over the implementation of all Directors' policies and decree and the Company's work program.
2. Coordinating and controlling the activity implementation on Company's Internal Monitoring related to examination on activities of operations and administration & finance.

3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai sistem pengendalian intern Perusahaan.
7. Menilai kewajaran laporan keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

SPI Perum Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Struktur Organisasi SPI Perum Jamkrindo berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo.

3. Researching and testing the accuracy of the report or information regarding all matters that can cause losses for the Company.
4. Preparing and submitting report to the President Director regarding the examination result, including the improvement suggestions.
5. Assessing the compliance with the existing provisions, by assessing and monitoring on all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to drive effectiveness and compliance in the implementation as well as giving recommendations to the Directors on business risk control/management.
6. Assessing the Company's internal control system.
7. Assessing the fairness of financial statements and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities.
8. Giving opinion, suggestions, and advices on improvement of the operational/non-operational activities.
9. Motivating the GCG principles implementation by each work unit and it is mandatory to assess and monitor the principles implementation by all of the Company's organs.
10. Monitoring the implementation on the follow-up of examination result over SPI or external auditor's examination result and reporting the monitoring result to the President Director.
11. Becoming the external auditor work partner in conducting examination on the Company's financial statements or other examination.

Organizational Structure and Position of the Internal Control Unit

Perum Jamkrindo SPI is chaired by the Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Board of Supervisors. The President Director can dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Supervisors if the head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the existing regulations and or fail or incapable in carrying out the duties. Perum Jamkrindo SPI Organizational Structure is based on Directors' Decree Number: 36/Kep-Dir/IV/2016 dated 20 April 2016 on Organizational Structure of Perum Jamkrindo.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

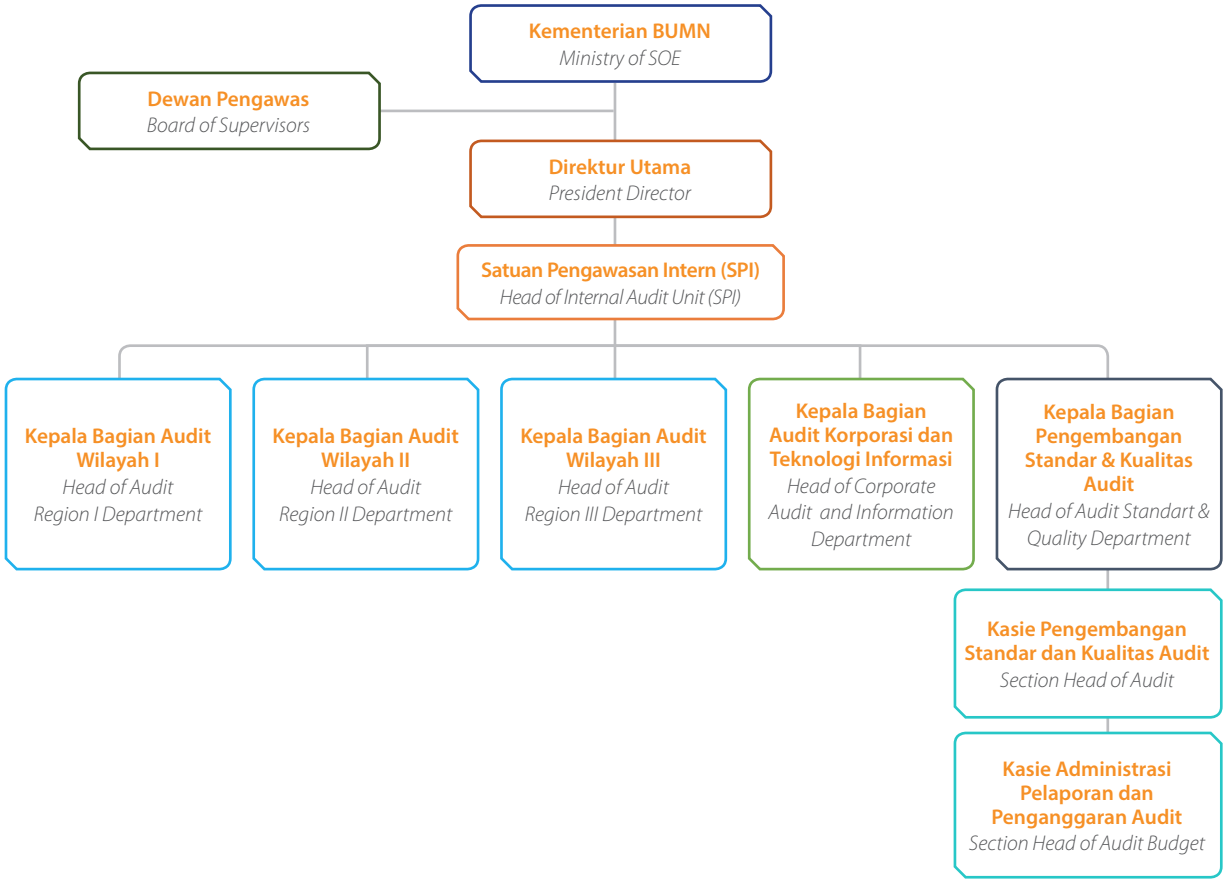

Jabatan *Position*	Nama *Name*
Kepala Satuan Pengawasan Intern *Head of Internal Audit Unit*	Achmad Sonhadji
Kepala Bagian Audit Wilayah I *Head of Audit Region I Department*	-
Kepala Bagian Audit Wilayah II *Head of Audit Region II Department*	-
Kepala Bagian Audit Wilayah III *Head of Audit Region III Department*	Arry Andru Palapi
Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi *Head of Corporate Audit and Information Technology Department*	-
Kepala Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit *Head of Audit Standard & Quality Development Department*	Kartono
Pranata Madya Direktorat Utama *Main Directorate Associate*	Aditya Putra D

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Party Appointing/Dismissing the Head of Internal Audit Unit

The Head of SPI is appointed and dimissed by the President Director upon approval from the Board of Supervisors. The President Director can dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Supervisors if the head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the existing regulations and or fail or incapable in carrying out the duties.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 221/Kep-Dir/XI/2014 tanggal 6 November 2014, Achmad Sonhadji dipercaya untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Profile of Head of Internal Audit Unit

Based on Director's Decree No. 221/Kep-Dir/XI/2014 dated 6 November 2014, Achmad Sonhadji is entrusted to be assigned as the Head of SPI and have obtained approval from the Board of Supervisors.

Achmad Sonhadji

Kepala Satuan Pengawasan Intern Warga negara Indonesia | Usia 52 tahun Kelahiran Surabaya, 19 April 1965 | Berdomisili di Jakarta	*Head of Internal Audit Unit* *Indonesian citizen | 52 years old* *Born in Surabaya, 19 April 1965 | Domiciled in Jakarta*
Mulai Menjabat: 6 November 2014	*Beginning of Services: 6 November 2014*
Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang (1990); Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999).	*Education: Bachelor of Economics, majoring in Accounting from Universitas Brawijaya, Malang (1990); Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999).*
Bergabung di Perum Jamkrindo: 30 November 1990	*Joined Perum Jamkrindo: 30 November 1990*
Riwayat Jabatan Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum (2014); Plt. Kepala Divisi Divisi Pemasaran dan Penjaminan Bank (2014); Kepala Divisi Divisi Klaim dan Subrograsi (2014); Kepala Kantor Cabang Surabaya (2013-2014); Kepala Divisi Keuangan (2012-2013); Kepala Divisi MRTI (2010-2012); Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi (2008-2010); Kepala Kantor Cabang Samarinda (2007-2008); Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Surabaya (2005-2007); Kepala Bagian Pengendalian Divisi Pengendalian & Pemasaran (2004-2005); Kepala Bagian Sistem & Teknologi Divisi Pengkajian & Pengembangan Usaha (2003-2004); Kepala Bagian Operasional Satuan Pengawas Intern (2000-2003); Kepala Bagian Pemeriksaan Keu & Adm Satuan Pengawas Intern (1999-2000); Analisa Muda I/Staf Muda I Divisi Penjaminan Bank (1998-1999); Analisa Muda I/Staf Muda I Divisi Bisnis Kredit Umum (1996-1998); Staf I Bagian Wilayah Usaha 1 (1993-1996); Penata Muda Bagian Wilayah Usaha 1 (1992-1993); Calon Karyawan Biro Analisa Kredit (1990-1992).	*History of Positions* *Main Associate Officer of HR and General Affairs Directorate (2014); Act. Head of Marketing and Bank Guarantee Division (2014); Head of Claim and Subrogation Division (2014); Head of Surabaya Branch Office (2013-2014); Head of Finance Division (2012-2013); Head of MRTI Division (2010-2012); Head of Business Development and Information Technology Division (2008-2010); Head of Samarinda Branch Office (2007-2008); Head of Operational Division of Surabaya Branch Office (2005-2007); Head of Control, Control & Marketing Division (2004-2005); Head of System & Technology, Business Analysis & Development Division (2003-2004); Head of Operational, Internal Audit Unit Division (2000-2003); Head of Finance & Adm Examination, Internal Audit Division (1999-2000); Junior Analyst I/ Junior Staff I, Bank Guarantee Division (1998-1999); Junior Analyst I/Junior Staff I, Commercial Credit Business Division (1996-1998); Junior Associate of Business Region I Division (1992-1993); Employee Candidate of Credit Analyst Bureau (1990-1992).*
Sertifikasi: *Qualified Internal Audit* (QIA) (2006).	*Certification: Qualified Internal Audit (QIA) (year).*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Jumlah Karyawan Satuan Pengawasan Intern

Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada periode 2016, jumlah karyawan SPI adalah 21 (dua puluh satu) orang, dengan rincian, sebagai berikut:

1.	Kepala SPI	: 1 orang
2.	Kepala Bagian	: 2 orang
3.	Kepala Seksi	: 2 orang
4.	Pranata Madya Direktorat Utama	: 2 orang
5.	Staf	: 15 orang
6.	Agendaris	: 1 orang
	Jumlah	: 23 orang

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Perum Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, auditor SPI Perum Jamkrindo terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi auditor internal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang kompeten, baik untuk pelatihan audit, manajemen risiko maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

Berikut seminar, pelatihan dan pendidikan yang diikuti personil SPI selama tahun 2016:

Number of Employees of Internal Audit Unit

Considering that the monitoring duties assigned to SPI holds a crucial role, the number of qualified SPI personnel should be adequate in order to support the duty implementation. In 2016 period, the number of SPI employees was 21 (twenty-one), with details as follows:

1.	Head of SPI	: 1 people
2.	Head of Division	: 2 people
3.	Head of Section	: 2 people
4.	Main Directorate Senior Associate	: 2 people
5.	Staff	: 15 people
6.	Clerk	: 1 people
Total		: 23 people

Participation in Internal Audit Profession Association

Perum Jamkrindo SPI is active as a member of Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI), State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus). SPI's participation in these forum is useful for sharing knowledge and information regarding internal examination activities among SOEs.

Human Resources Development for Auditors

In order to ensure the sustainability of HR development, both on competence side and soft-skill, Perum Jamkrindo SPI auditors keep improving knowledge and capability by attending seminar, workshohp, comparative study, training and education of certified internal auditor held by competent educational institution, either for training of audit, risk management, or Good Corporate Governance (GCG).

Below are the seminar, training, and education attended by SPI personnel throughout 2016:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Peserta *Participant*	**Pelatihan** *Training*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Tanggal** *Date*
Achmad Sonhadji (Kepala SPI) *(Head of IAU)*	Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis GCG. *Building Professionalism of GCG-Based Corporate Management.*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*	23-25 Maret 2016 *23-25 March 2016*
	Seminar Nasional Internal Audit 2016 *"Internal Audit: The Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value".* *National Seminar of 2016 Internal Audit "Internal Audit: The Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value".*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	27-28 April 2016 *27-28 April 2016*
	Seminar & Munas FKSPI 2016 "*Strategi Partnership*: Mengoptimalkan *Partnership* Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Seminar & National Conference of FKSPI 2016 "Partnership Strategy: Optimizing Partnership of Internal Audit Function in Supporting Directors and Commissioners to Increase Corporate Advantage in ASEAN Economic Community (MEA) Era".*	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) *Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)*	10-13 Mei 2016 *10-13 May 2016*
	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik: Implementasi dan Permasalahannya" yang diikuti oleh Kepala SPI dan Kasie Pengembangan dan Standar Kualitas Audit. *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Monitoring Synergy in SOE/ROE Environment and Public Sector: The Implementation and Problem" attended by Head of SPI and Section Head of Development and Audit Quality Standard.*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*	1-3 Juni 2016 *1-3 June 2016*
Arry Andru Palapi(Kabag Audit Wilayah III) *(Head of Audit Division Region III)*	Diklat Audit Intern Tingkat Lanjutan II *Internal Audit Education & Training, Advanced II Level*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	23 Mei s.d 3 Juni 2016 *23 May until 3 June 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Manajerial *Internal Audit Education & Training*		28 November-9 Desember 2016 *28 November-9 December 2016*
	Talk Show & Silaturahmi Nasional FKSPI *Talk Show & National Greetings of FKSPI*	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) *Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)*	29 Juli 2016 *29 July 2016*
Aditya Putra Darmawan Dimas S Ardhi	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Peserta *Participant*	**Pelatihan** *Training*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Tanggal** *Date*
Dimas Setio Ardhi (Plt. Kasie Pengembangan Standar & Kualitas Audit) *(Acting Section Head of Standard Development & Audit Quality)*	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik: Implementasi dan Permasalahannya" yang diikuti oleh Kepala SPI dan Kasie Pengembangan dan Standar Kualitas Audit. *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Monitoring Synergy in SOE/ROE Environment and Public Sector: The Implementation and Problem" attended by Head of SPI and Section Head of Development and Audit Quality Standard.*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*	1-3 Juni 2016 *1-3 June 2016*
Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Plt. Kasie Pelaporan & Penganggaran Audit) *(Acting Section Head of Reporting & Audit Budgeting)*	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*		5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Bernie Soebekti	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Faoziah Ulfah Fatmawati	Seminar & Munas FKSPI 2016 "*Strategi Partnership*: Mengoptimalkan *Partnership* Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Seminar & National Conference of FKSPI 2016 "Partnership Strategy: Optimizing Partnership of Internal Audit Function in Supporting Directors and Commissioners to Increase Corporate Advantage in ASEAN Economic Community (MEA) Era".*	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) *Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)*	10-13 Mei 2016 *10-13 May 2016*
	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*" *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Auditor's Responsibility in Detecting Fraud"*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*	3 November 2016 *3 November 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Rinjani Yusni Maharjanti	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) "Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*" *National Seminar of Internal Auditor Association (AAI) "Auditor's Responsibility in Detecting Fraud"*	Asosiasi Auditor Internal (AAI) *Internal Auditor Association (AAI)*	3 November 2016 *3 November 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Aldhy Haryono Fachrial	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Peserta *Participant*	**Pelatihan** *Training*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Tanggal** *Date*
Muhammad Ilham	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Andik Sugiarto	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*		5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Arif Syachroni	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif *Training of Effective Internal Audit Report Writing*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	28-29 Juli 2016 *28-29 July 2016*
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*		5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Andreas Theodorus Mokodaser	Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	28-29 Juli 2016
	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*		5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Andi Aldino Chandra	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Emmerisa br Sembiring	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Faisal Arief Sentosa	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Laila Wijayanti	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Laurdes Sinurat	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 December 2016*
Michael Ranap Simanjuntak	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Muhammad Leonard Gustav Q	Diklat Audit Intern Tingkat Dasar I dan II *Internal Audit Education & Training, Basic I and II Levels*	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *Internal Audit Education Foundation (YPIA)*	5-19 Desember 2016 *5-19 Desember 2016*
Seluruh Personil SPI	*In house training* "Proses Bisnis dan *Internal Control*" *In-house training "Business Process and Internal Control"*	Divisi MSDM bekerjasama dengan Infobank *HRM Division in cooperation with Infobank*	14-16 Juni 2016 *14-16 June 2016*

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2016

Selama tahun 2016, SPI Perum Jamkrindo telah melaksanakan aktivitas pemeriksaan atas seluruh cakupan-cakupan pemeriksaan yang diperkirakan signifikan dan berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan. Peran SPI Perum Jamkrindo sebagai katalisator tumbuhnya kesadaran manajemen Perusahaan akan pentingnya Manajemen Risiko telah mampu diimplementasikan secara baik terkait dengan peran SPI sebagasi *Strategic Business Partner* bagi manajemen Perum Jamkrindo.

SPI juga telah melaksanakan tugas analisa dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur (*system operating procedure*) serta operasi Perusahaan pada semua bagian dan bidang kegiatan Perusahaan serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses Manajemen Risiko serta praktik GCG atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan dan melaporkan seluruh temuan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara periodik, SPI telah melaksanakan proses *monitoring* dan pelaporan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaannya, SPI terus berupaya melakukan proses peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan profesional audit internal, *training*, seminar dan pelatihan lainnya, yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaannya.

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2016 yang tertuang dalam Memorandum SPI Nomor 38/M/1.2/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun PKPT Tahun 2016 yaitu :

1. Pelaksanaan PKPT Satuan Pengawasan Intern menjadi salah satu acuan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor.
2. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh *Audite* dalam rangka mengupayakan pengamanan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta mendorong penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan,baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor.
3. Guna mendukung terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan secara efektif, maka unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan diprioritaskan pada :

Brief Report of SPI Duty Implementation in 2016

Throughout 2016, Perum Jamkrindo SPI conducted examination on all examination scopes that were expected to be significant and had potential to disrupt the Company's objective achievement. The role of Perum Jamkrindo SPI as the catalyst of the emerging awareness of the management on the importance of Risk Management has been well implemented related to SPI role as the Strategic Business Partner to Perum Jamkrindo management.

SPI has also performed the analysis and evaluation duties on the ongoing system and new system to be implemented regarding control, management, monitor of the effectiveness and efficiency of system and procedure (system operating procedure) as well as the Company's operations on all parts and divisions of the Company, as well as assessment on the work unit performance quality, evaluation on the adequacy and effectiveness of Risk Management process and GCG practices on all aspects and elements of the Company's activities and to report all examination findings according to the applicable provisions.

Periodically, SPI has conducted monitoring process and reporting follow-up progress of improvement that has been done by the auditee. In order to increase the examination quality, SPI keeps striving to improve the auditors' competence through internal audit professional education, training, seminar, and other trainings that are expected to give proportional capability to the auditors in performing their examination duties.

The Annual Examination Work Program (PKPT) of year 2016 is stipulated in SPI Memorandum Number 38/M/1.2/II/2016 dated 2 February 2016 and has obtained approval from the President Director. There are several matters that became considerations in preparing PKPT 2016 as follows:

1. Implementation of Internal Audit Unit PKPT became one reference of examination done by the external auditor.
2. The Examination objective is to evaluate the activity implementation by the Auditee in order to ensure security and efficiency use of sources owned by the Company and to support the closing of follow-up actions based on recommendations from the examination result, either done by internal or external auditor.
3. To support the effective implementation of examination, the work units that are prioritized for examination objects are:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

a. Kantor Cabang yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
b. Kantor Cabang yang tidak termasuk *sampling* audit tahun 2015.
c. Jumlah obyek pemeriksaan 34 (tiga puluh empat) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus dan 17 (tujuh belas) Divisi.

a. Branch office that has not been examined by either internal or external auditor.
b. Branch office that was not included in audit sampling in 2015.
c. Number of examination objects is 34 (thirty-four) Branch office, 1 (one) Special Branch office, and 17 (seventeen) Divisions.

A. Hasil Temuan Auditor Eksternal

A. External Auditors Findings

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal

Number of Findings by External Auditor

Posisi *Position*	Auditor Eksternal *External Auditor*					
	BPK		OJK *FSA*		KAP	
	PDDT	Kerugian Negara *State Loss*	2016	2015	2016	2015
Total Temuan *Total Findings*	7	35	-	-	6	8
Total Rekomendasi *Recommendations that are Settled*	28	-	9	6	7	10
Rekomendasi yang Telah Diselesaikan *Recommendations that are Settled*	28	48,11%	9	6	0	10
Dalam Proses Penyelesaian *In Settlement Process*	-	51,89%	-	-	7	-

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan SPI

SPI Findings Result

Unit Kerja *Work Unit*	Jumlah Rekomendasi 2016 *Number of Recommendations in 2016*	Penyelesaian Tindak Lanjut 2016 *Settlement of Follow-Up 2016*		Jumlah Rekomendasi 2015 *Number of Recommendations in 2015*	Penyelesaian Tindak Lanjut 2015 *Settlement of Follow-Up 2015*	
Divisi *Division*	150	60	47,33%	33	17	51,52%
Kantor Cabang *Branch Offices*	473	312	65,96%	168	148	88,10%
Jumlah *Total*	623	372	59,71%	201	165	82,09%

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi

PUBLIC ACCOUNTANT

Public Accountant, or the audit process done by external party, conducts financial audit to give independent and objective opinion on the fairness, compliance to principles, and suitability of the Company's financial statements with the Financial Accounting

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Pengawas yang disahkan dalam RPB. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Berdasarkan keputusan RPB tahun 2016 disetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2016. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2016 adalah Drs. Hertanto, M.S.Ak., CPA., CPMA., CA., CTA. Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2016 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan telah memasuki periode ke-2 berturut-turut, demikian pula dengan akuntan Drs. Hertanto.

Kepada KAP Hertanto, Grace, Karunawan, Perusahaan memberikan biaya jasa untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 sebesar Rp387.612.500 (sudah temasuk PPN 10%, belum termasuk *out of pocket expense*). Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Perusahaan "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016. Serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Kegiatan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2016 dilakukan pada periode 1 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017.

Di samping audit terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2016, KAP Hertanto, Grace, Karunawan juga memberikan jasa sebagai berikut:

Standards (SAK) of Indonesia and the applicable laws and regulations. The Public Accountant must be free from influence of the Board of Supervisors, Directors, and parties with interests to the Company. The Company must provide all accounting records and supporting data necessary in the external audit process to enable the Public Account to give the opinion on fairness, compliance with principles, and suitability of the Company's financial statements with the Indonesia Financial Accounting Standards.

The appointment of the Public Accountant refers to Government Regulation No. 20 of 2015 on Public Accountant Practices; and recommendation from the Board of Supervisors, which is validated in RPB. Based on PP 20/2015, Public Accountant is limited to the most 5 (five) consecutive fiscal years, where the Public Auditor can provide again the audit services after a consecutive 2 (two) fiscal years not giving the audit services to the same company.

Based on RPB resolution in 2016, the appointment of Public Accountant (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan was approved to conduct independent audit on the Company's Financial Statements for 2016 fiscal year. The accountant who will conduct the independent audit of the Company's Financial Statements for 2016 fiscal year is Drs. Hertanto, M.S.Ak., CPA., CPMA., CA., CTA. The Company's financial statements audit for 2016 fiscal year by KAP Hertanto, Grace, Karunawan has entered the 2nd period, consecutively, and so is with the accountant Drs. Hertanto.

To KAP Hertanto, Grace, Karunawan, the Company provided services fee to perform the audit of Financial Statements for 2016 fiscal year for IDR387,612,500 (including Income Tax PPn 10%, excluding out of pocket expense). The audit result stated that the Financial Statements for 2016 fiscal year is "Presented fairly, with all material matters, financial position of consolidation of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries dated 31 December 2016. As well as the financial performance and consolidated cash flow for the year ended on the said date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards". The activity of audit of the Company's financial statements for 2016 fiscal year was conducted in a period from 1 September 2016 to 31 January 2017.

In addition to audit on the Company's financial statements for 2016 fiscal year, KAP Hertanto, Grace, Karunawan also provides services as follows:

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ Structure of Corporate Governance

1. Audit umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2. Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern tahun 2016
3. Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
4. Audit atas Laporan Keuangan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pihak Pertama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
5. *Review*/telahaan atas Pengendalian Internal Pihak Pertama, sekaligus menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan yang signifikan, yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut Direksi

1. General audit on Consolidated Financial Statements.
2. Audit of the Company's Compliance to the applicable Laws and Regulations and Internal Control year 2016
3. Performance Evaluation for the year ended on 31 December 2016
4. Audit on Financial Statements of First Party Partnership and Community Development Management Program for the year ended 31 December 2013
5. Review on the First Party Internal Control, including proposing suggestions/recommendations of the improvement, in regard of findings of significant weakness that needs Directors' attention and follow-up.

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2011 hingga 2016 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

For transparency purpose, below is the list of Public Auditor of the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years, from 2011 to 2016 fiscal years as can be seen in the table below:

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Akuntan** *Accountant*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accountant's Office*	**Opini** *Opinion*	**Biaya Jasa Audit (Rp-ribu)** *Audit Services Fee (IDR- thousan*
2016	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair, in all material respects*	387.612
2015	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair, in all material respects*	389.565
2014	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Fair, in all material respects*	300.740
2013	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Wajar untuk hal yang material Fair, in all material respects*	300.740
2012	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Fair, in all material respects*	285.000
2011	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Fair, in all material respects*	423.500

Manajemen Risiko
Risk Management

Manajemen Risiko Penjaminan

Risiko Manajemen Kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah perbankan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam mengelola risiko Penjaminan tersebut, maka diperlukan Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem ini meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan Penjaminan Kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin. Pada tahapan implementasi, dilakukan proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Persetujuan Penjaminan yang dituangkan dalam hasil evaluasi Kelayakan Penjaminan sesuai dengan sistem dan prosedur penjaminan terkait. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment*, dan *Personality*. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya Risiko Penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score*, ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu Pengajuan Penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah Rapat Komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari Pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan Penjaminan (*risk taker unit*) dan Pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Risk Management of Guarantee

Credit Risk Management is a risk due to a failure from bank customers to fulfill their obligations. In managing such guarantee risk, a Credit Guarantee Risk Management System is required. The system includes a set of procedures used to identify, measure, monitor, and control the risks that come from Credit Guarantee activities.

In practice, the Risk Management System is implemented effectively at all stages of Credit Guarantee activities, in accordance with Company's resources capability and the guaranteed characteristics and credit risks. During the implementation phase, the Bank conducts a risk identification process aimed to predict the risk of the credits submitted under the guarantees by the Recipient of the Guarantee. Such predicted risk is used as one considerations in decision making.

As outlined in the evaluation result of Guarantee Feasibility, Guarantee Approval is conducted in accordance with the system and procedures of the underwriting. In identifying the risk, the approach taken uses 4P model, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality. Items to be considered for each of the above aspects are adjusted to the characteristics of credit to be guaranteed, and elaborated in the corresponding guarantee systems and procedures.

The result of risk identification process is then followed-up with a risk prediction of the guarantee, to identify the amount of guarantee risk. In practice, a risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for every aspect of 4P. Quantitative prediction is conducted with the use of scoring system. Based on the score result, the bank will determine a risk guarantee prediction of each Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Next, the decision to either approve or disapprove a Guarantee Submission is taken in a Committee Meeting. In accordance with a precautionary principle, members of the committee shall consist of Officials directly related to the risk taker unit and Officials directly related to the consequences of potential risk costs (i.e. risk financing unit). With this decision-making mechanism that involves two or more parties of different perspectives, it is expected that the decision taken will be more objective and the potential risks due to wrong decision-making can be minimized.

Manajemen Risiko
Risk Management

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan Penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

In addition to being used to assist the process of decision making on Guarantee, the result of risk analysis may also serve as one basic consideration in monitoring the ongoing credit. For high risk credit, credit monitoring shall be done more carefully.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko adalah pelaporan dan evaluasi. Setiap unit kerja yang terekspos oleh risiko harus menyampaikan laporan terkait dengan risiko tersebut. Atas laporan tersebut, bagian yang menangani Manajemen Risiko melakukan pengolahan data dan informasi sebagai dasar penetapan kebijakan dalam meminimalisasi Risiko Penjaminan Kredit.

An integral part of the Risk Management System application is the reporting and evaluation. Each work unit exposed by any risk must submit a report related to those risks. Towards this report, the section handling Risk Management shall conduct data and information processing as the basis to determine a policy in minimizing Credit Guarantee Risk.

Operational Risk Management

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Perum Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Perum Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

To mitigate the impact of loss due to operational activities, the Company also incorporates potentials of operational risks into Perum Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the regulations of Perum Jamkrindo Board of Directors, operational risk is a risk caused by inadequate and/or non-functioning internal processes, human error, system failure or external problems affecting Company's operations.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak external, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

An operational risk can be caused by several factors, for examples: system failure/downtime & technology, human error, mechanical and engineering, external party, fraud, internal process failure, organization & HR, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), and Information Technology.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Perum Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, dimana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

To implement the Operational Risk Management, Perum Jamkrindo use a guideline to execute a Risk and Control Self Assessment (RC SA). The RC SA uses a bottom up approach, where the risk identification and assessment is conducted by the Division Head or Section Head at a Work Unit of the Head Office, Branch Office and Sub-Branch Office. Determination of the level of identification implementer and the risk assessment is based on consideration that the concerned level is the lowest official in the work unit, so they understand the technical problem and the relationship between technical issues and Company's objective achievement.

Manajemen Risiko
Risk Management

Blue-Print Manajemen Risiko Perum Jamkrindo

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perum Jamkrindo, telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Blue-Print* yang telah diselesaikan pada tahun 2010 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blue-Print* ERM Perum Jamkrindo terdiri dari 6 komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian. Keenam komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blue-Print* ERM perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

Blue-Print of Perum Jamkrindo Risk Management

To execute the implementation of integrated risk management, Perum Jamkrindo has developed a Blue-Print Integrated Risk Management of Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantee. The Blue-Print which was completed in 2010 is a blueprint for Enterprise Risk Management (ERM) development architecture.

In general, Perum Jamkrindo Blue-Print ERM consists of 6 main components namely: commitment, structure and function, mechanism, risk management process, support system, and achievement. The six components have various elements as the main part, and a more complete model of the Jamkrindo ERM Blue-Print is described in the model below.

Model *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo Blue-Print Model of Integrated Risk

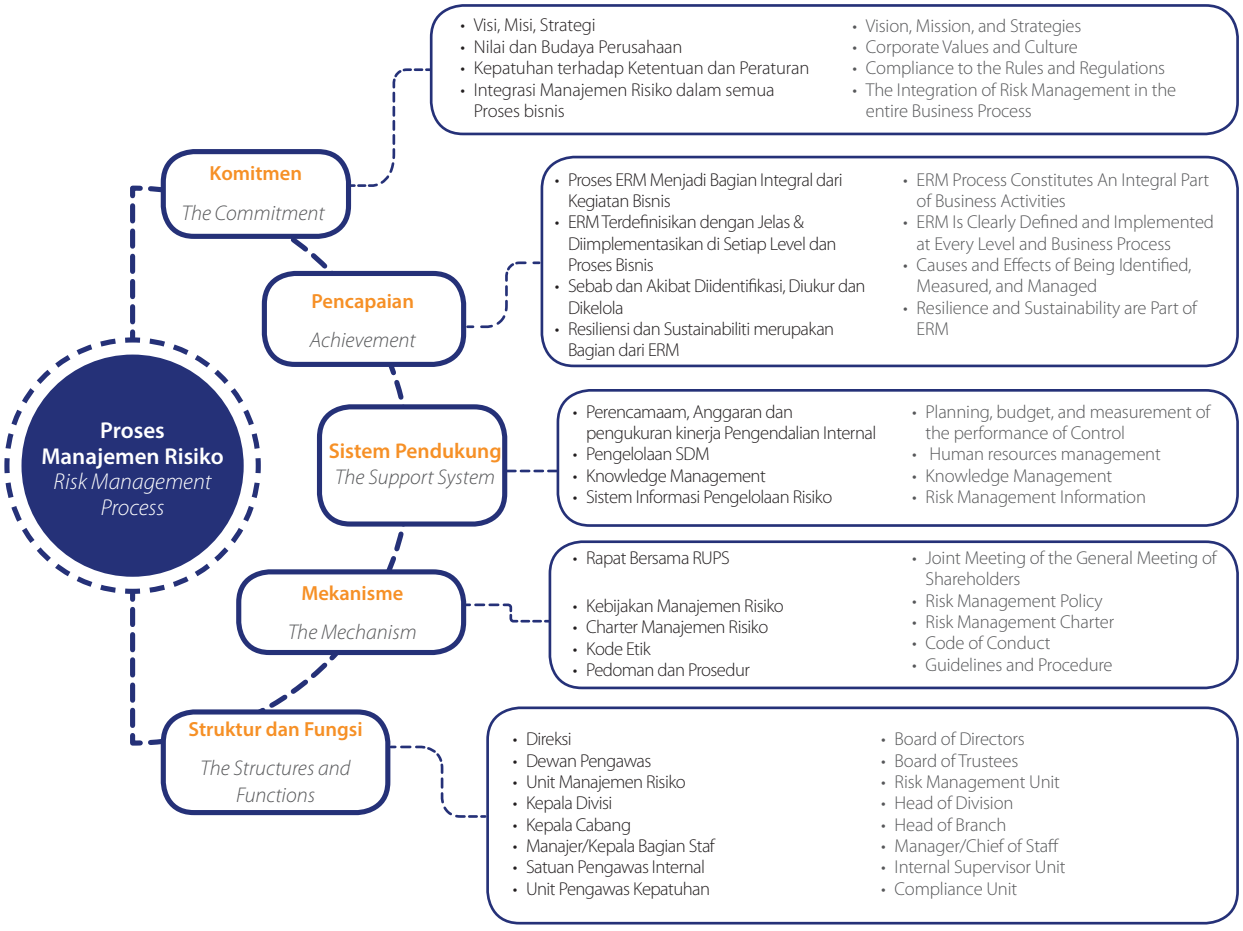

Manajemen Risiko
Risk Management

Road Map Manajemen Risiko

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam *blue-print* Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun *road map* implementasi pengembangan manajemen risiko, dengan *milestone* pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

Management Road Map of Risk Management

To achieve the conditions of risk management implementation as set forth in the blue print of Risk Management, Perum Jamkrindo has developed a road map for implementing the risk management development, with a set of milestone that marks the achievement of Blue-Print integrated risk management, and they are as follows:

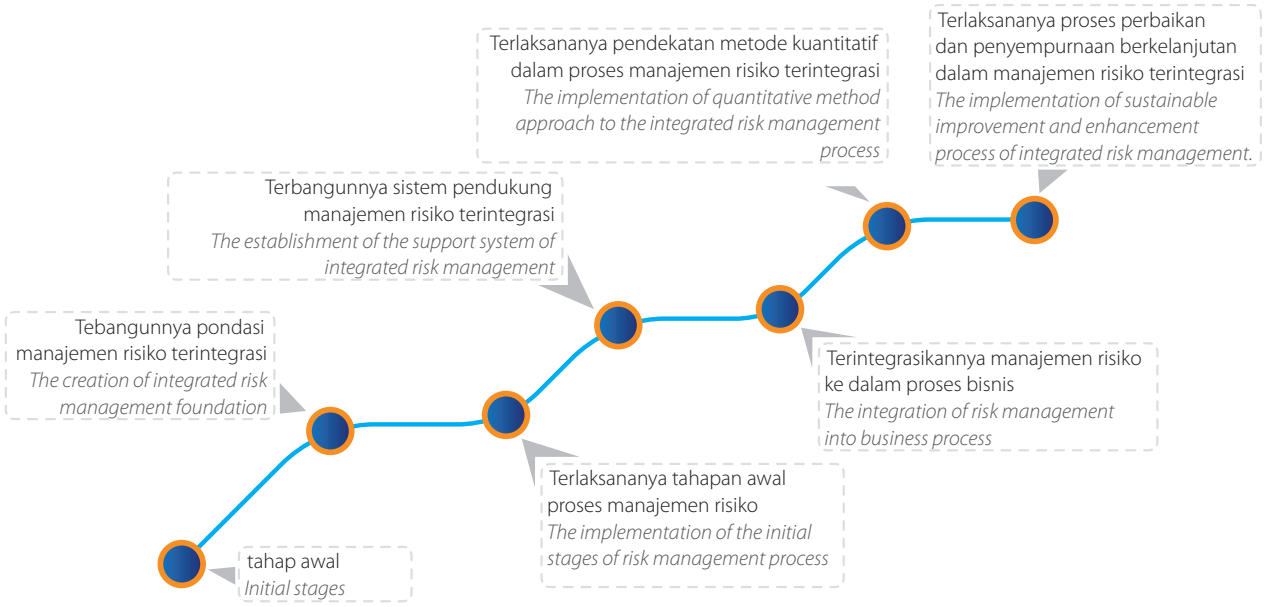

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko. Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang

Implementation of Risk Management

Risk Management activities are conducted regularly and incidentally. Risk Management Activities which are conducted regularly are the risk management process that consists of 4 process-stages, namely: risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation.

In the early stages, the undertaken process is identification and assessment of inherent risk. Results of risk identification and risk assessment are evaluated to improve the risk management process.

Incidental risk management activities are implementation of risk management undertaken at certain stages, based on the stipulation in the SOP regarding risk-based business process and opinions relating to matters that should be submitted to the Risk Management Division.

Manajemen Risiko
Risk Management

bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan Perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang Perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Sesuai Per-Dir No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pelaksanaan pemberian opini tersebut mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 1 Juli 2013, namun demikian mulai bulan Oktober 2011 telah dilakukan pemberian opini dalam rangka pembelajaran. Per-Dir No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut telah diperbaharui dengan Per-Dir No. 25/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pendapat (opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 121 opini, baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko
   Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko Perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

2. Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
   Secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.
   Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum)

Incidental activities are in the form of feedback for issues that are considered strategic and having a significant impact to the sustainability to the Company, the creation of new products and/or activities, transactions with a certain value, a write-off policy of corporate accounts receivable, creating SOP, CPR, RKAP, implementation of new applications/software, determination of new bank for deposit placement and investment, and other strategic policies.

According to Directors Regulation No. 03 dated 10 October 2011 on Opinion of Perum Jamkrindo Risk Management, implementation on giving the opinion started to be implemented officially on 1 July 2013, however on October 2011 opinion was given in order to learn. Directors Regulation No. 03 dated 10 October 2011 has been updated with Directors Regulation No. 25/Per-Dir/VIII/2016 dated 12 August 2016 on Opinion of Perum Jamkrindo Risk Management.

In the period of January 1 – 31 December 2016, 121 (one hundred and twenty one) feedback were submitted, which include opinions related to underwriting, financial or other supporting activities.

Risk Management Tools

To implement an integrated risk management, the Company needs several important tools to support the risk management implementation. Perum Jamkrindo has therefore compiled several tools as follows:

1. The Board of Directors Regulation regarding Implementation of Risk Management
   The Board of Directors regulation regarding Implementation of Risk Management is a regulation stating the risk management implementation and the necessary supporting tools. The regulation includes a statement on risk management i.e. statement from the Board of Directors and all Perum Jamkrindo Officials regarding Company's risk management policy. The statement is a written form of the Board of Directors commitment and Perum Jamkrindo Officials in applying risk management at every stage of their activity.
2. Organization of Perum Jamkrindo Risk Management
   Structurally, the Board of Directors has established an organizational structure which include a Risk Management Division. In addition to structural organizations, the Company has an ad hoc structure, i.e. the Risk Management Committee of Perum Jamkrindo.

Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang bertugas membantu Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko perusahaan, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.

3. Panduan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
   Panduan Manajemen Risiko merupakan buku yang menjadi payung bagi pelaksanaan proses manajemen risiko yang memuat kebijakan manajemen risiko Perum Jamkrindo dan pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko Perum Jamkrindo. Panduan manajemen risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP Manajemen Risiko, dan SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko.

4. SOP Proses Manajemen Risiko
   SOP Proses Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo. Peraturan Direksi yang mengatur terkait dengan SOP Manajemen Risiko No. 24/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

5. Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko
   Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Nomor 15/SE/4/VII/2012. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap Unit Kerja terkait penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo.

   Hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan manajemen risiko tersebut secara garis besar adalah :
   a. Identifikasi Risiko
   b. Penilaian Risiko
   c. Penanganan Risiko
   d. *Monitoring* dan Evaluasi Risiko
   e. Komite Manajemen Risiko
   f. Pelaporan *Loss Event* (Risiko yang telah terjadi)
   g. Pelaksanaan proses bisnis denan mempertimbangkan risiko

The Risk Management Committee (KMR) of Public Company (Perum) Indonesian Credit Guarantee is a committee in charge of assisting the Board of Directors of a Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantee in conducting regular assessment and provide recommendations regarding corporate risk.

In addition, for the sake of an efficient risk management process implementation, a Person in Charge (PIC) is designated at every work unit which carries a task to coordinate the implementation of risk management processes in his/her work unit. In performing its duties, the PIC of Risk Management coordinates and consults with the Risk Management Division.

3. Guideline of Perum Jamkrindo Risk Management
   The Risk Management Guideline is a book that serves as an umbrella for implementation of risk management process that incorporates Perum Jamkrindo's risk management policies and guideline for implementation of Perum Jamkrindo's risk management process. The risk management guideline is then translated into a SOP for Risk Management, and SOP of Risk-Based Business Process.

4. Standard Operation Process of Risk Management
   SOP Risk Management is a SOP aimed to provide a technical guidance in implementing the risk management process at Perum Jamkrindo.

5. Technical Guidelines of the Risk Management Implementation
   Technical Guidance of the Risk Management Implementation was issued with the Circular Letter No.15/SE/4/VII/2012. The Guideline includes an explanation of what each Work Unit should do regarding the Risk Management implementation in Perum Jamkrindo.

   Issues that must be completed in relation to implementation of risk management in general are:
   a. Risk Identification
   b. Risk Assessment
   c. Risk Management/Handling
   d. Risk Monitoring and Evaluation
   e. Risk Management Committee
   f. Reporting on Loss Event (Risks that have occurred)

Manajemen Risiko
Risk Management

h. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko atas risiko yang berdampak secara signifikan bagi Perusahaan.

6. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko
   SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari bagian ERM sebagai *second* opinion dalam pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap.

7. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi

8. Terkait dengan sistem pendukung manajemen risiko terintegrasi sejak tahun 2011, Perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko secara periodik dan terekam digital. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

Jenis Dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2016

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Risiko Penjaminan Kredit
Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Pada periode 1 Januari-31 Desember 2016, indikator risiko penjaminan kredit mengalami penurunan, lebih baik dibandingkan dengan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. *Default Rate* mengalami penurunan sebesar 0,71% dari

g. Implementation of business processes by taking into account any risks
h. Giving Opinion/Risk Management Opinion on risks that have significant impact to the Company.

6. Risk Based Business Process SOP
   An SOP of Risk Based Business Process is the SOP of a business process that is constructed by taking into account all associated risks in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk registers and the necessary risk controls have been considered during the execution of a business process, and that business units are ensured to have been given an opinion regarding new types of risks from the ERM section as a second opinion in decision-making. Given the type of activities in Perum Jamkrindo is quite diverse, preparation of risk-based business process SOP is conducted in several stages.

7. Integrated Risk Management Support System

8. In relation to integrated risk management support systems since 2011, the Company has begun to build Risk Management Information System Applications. The application serves to facilitate the process of identification, risk assessment, and risk management follow-up. With the application, risk data can be stored in the form of a structured data base.

Types and Management of Risk in 2016

Some of the relatively significant risks in 2016 are as follows:

1. Risk of Credit Guarantee
Risk of Credit Guarantee is a risk that arises due to a failure of a guarantor to meet his obligations. These risks are shown in the amount of default rate and guaranteed NPL credit level, as well as the return of subrogated receivables.

In the period of January 1 to December 31, 2016, the indicator risk of credit guarantee has decreased, the increase from the period January 1 to December 31, 2015 is as follows:

tahun 2015.

b. Tingkat NPL menurun sebesar 0,1% dari tahun 2015.

c. Jumlah pendapatan subrogasi tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, namun apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 tingkat pencapaian pengembalian subrogasi menurun sebesar 1,82% dari tahun 2015, dan *Recovery Rate* Piutang Subrogasi mengalami penurunan sebesar 0,59% dari tahun 2015.

a. Default Rate decreased by 0.71% from 2015.

b. The NPL rate decreased by 0.1% from 2015.

c. The amount of subrogated revenue in 2016 has increased compared to that of 2015, but when compared to the target in 2016, the level of achievement of subrogation return decreased by 1.82% from 2015, and Recovery Rate Subrogation Receivables decreased by 0.59% from 2015.

Uraian *Description*		**2015 (Rp)**	**2016 (Rp)**	**Pertumbuhan (%)**
Default rate	=	Biaya Klaim / *Claim Cost* / Volume Penjaminan / *Guarantee Volume*		
Biaya klaim *Claim Cost*		922.662.416.034	871.583.444.218	
Volume penjaminan *Gurantee Volume*		65.590.575.587.643	125.968.092.619.258	
DR		1,41%	0,69%	-0,71%
NPL	=	Outstanding Kredit Kol 3+4+5 / Total Outstanding Kredit		
Outstanding kredit kol 3+4+5 *Outstanding Credit, Column 3+4+5*		147.109.353.254	64.608.161.155	
Total Outstanding Kredit *Total Outstanding Credit*		94.120.639.362.125	125.571.037.250.413	
NPL		0,16%	0,05%	-0,10%
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi *Level of subrogation performance*	=	Realisasi Angsuran Subrogasi / Target Anggaran Subrogasi		
Realisasi angsuran subrogasi *Realization of subrogation installment*		247.309.668.335	259.384.339.757	
Target angsuran subrogasi *Target of subrogation installment*		300.000.000.000	321.768.030.188	
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi *Level of subrogation performance*		82,44%	80,61%	-1,82%
Recovery Rate Piutang Subrogasi *Recovery Rate Subrogation Receivables*	=	Anggaran Piutang Subrogasi / *Subrogation Receivable Installment* / Saldo Piutang Subrogasi / *Subrogated Accounts Receivable Balance*		
Angsuran subrogasi *Subrogation installment*		247.309.784.926	259.384.339.757	
Saldo piutang subrogasi *The balance of subrogated receivables*		3.775.258.532.625	4.351.971.907.300	
Recovery Rate Piutang Subrogasi *Recovery Rate Subrogated Receivables*		6,55%	5,96%	-0,59%

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada pada

Manajemen Risiko
Risk Management

proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment, dan Personality*. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Pada periode 1 Januari-31 Desember 2016, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu :

a. Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
b. Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjasamakan dengan mitra kerja.
c. Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.
d. Selektif terhadap mitra dengan profil risiko tinggi.

To mitigate the guarantee risk, the credit guarantee process employs a risk identification using 4P model, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality. The items to be considered for each of these aspects are adjusted to characteristics of the credit to be guaranteed, and elaborated in the corresponding guarantee systems and procedures.

Results from the risk identification process are then followed up with a determination of risk guarantee to determine the risk of a guarantee. In practice, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for every aspect of the 4P. A quantitative prediction is conducted by scoring system. Based on the score set, it will be decided a risk guarantee prediction of each Guaranteed or Guaranteed group, or a new product.

Subsequently, a decision-making process of whether a guarantee submission is approved or rejected is conducted in a committee meeting. In accordance with principle of prudential, members of the committee which consists of officials directly related to the risk taker unit and officials directly related to costs consequences of the potential risk (risk-financing units). With such decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that the said decision will be more objective and the potential risks due to mis-decision making can be mitigated.

In addition to assist the underwriting decision-making process, the outcome of risk analysis is also used as one basic consideration in monitoring the ongoing credit. For a high risk credit, credit monitoring will be done more comprehensively

In the period of January 1 to 31 December 2016, in addition to the above mitigation efforts, the Company also undertook some other risk mitigation, namely:

a. Renewing a cooperation agreement by adding a clause that can be used to mitigate a risk.

b. Performing a risk spread by adding new partners and adding products produced/constructed with partners.

c. Adding products marketed by the Company.

e. Melakukan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan reasuransi.
f. Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
g. Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
h. Melakukan pembatasan *volume* penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
i. Melakukan *updating* data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
j. Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

2. Risiko *Co-Guarantee*

Co-guarantee adalah kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Terkait dengan kerjasama tersebut, maka Perum Jamkrindo terekspos oleh risiko *co-guarantee*. Risiko *Co-Guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee*. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 26/Per-Dir/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Panduan Manajemen Risiko yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 23/Per-Dir/VIII/2016 12 Agustus 2016 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko *co-guarantee* digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko *counterpart*.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-guarantee* adalah besarnya piutang *co-guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 23/Per-Dir/VIII/2016, piutang *co-guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada periode 1 Januari-31 Desember 2016, *co-guarantee* dilakukan dengan bekerjasama dengan 6 (enam) perusahaan asuransi, yaitu PT Heksa Eka Life Insurance (PT HELI), PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT AL Amin), PT Asuransi Syariah Mubarokah (PT ASM), PT Jiwasraya, PT Jamkrindo Syariah dan PT Asuransi Beringin Sejahtera. Performance mitra *co-guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut :

d. Selective to partners with high risk pro I
e. Performing risk spread by working with several reinsurance companies.
f. Utilizing the services from agents that can assist in selecting guaranteed candidates for non KUR Credit Guarantee.
g. Coordinating with the Policy Committee related to implementation of KUR Program to anticipate any arising problems.
h. Limiting the volume of warranty for high-risk products.
i. Updating data of subrogation receivables including the collateral as one consideration in making efforts to collect subrogation receivables so that these efforts will be effective.
j. Optimizing a collection of subrogated receivables.

2. Risk of Co-Guarantee

A co-guarantee is a cooperation between Perum Jamkrindo and other insurance companies or insurance in the form of covering a certain risks. With such cooperation, Perum Jamkrindo is exposed with the co-guarantee risk. Co-Guarantee Risk represents a non-collectible receivable from the co-guarantee. In accordance with the Decree of the Board of Directors No.: 26/Per-Dir/VIII/2014 dated August 21, 2014 regarding Risk Management Guidance, co-guarantee risk is classified into an operational risk category with counterpart risk sub-category.

An indication of the magnitude of co-guarantee risk is the amount of co-guarantee receivable compared to the average filing of a co-guarantee claim with the associated co-guarantee partner. In accordance with Board of Directors Regulation No.14/Per-Dir/XII/2011 dated December 22, 2011, the co-guaranteed receivable shall be deemed fair if the outstanding balance of co-guarantee receivable by the co-guarantee partner is a maximum of 3 (three) months of the average last period claim.

In the period of January 1 to December 31, 2016, the co-guarantee was conducted in cooperation with 6 (six) insurance companies, namely PT Heksa Eka Life Insurance (PT HELI), PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT AL Amin), PT Asuransi Syariah Mubarokah (PT ASM), PT Jiwasraya, PT Jamkrindo Syariah and PT Asuransi Beringin Sejahtera. The performance co-guarantee partners of Perum Jamkrindo is as follows:

Manajemen Risiko
Risk Management

Mitra Co-Guarantee *Co-Guarantee Partner*	**Saldo Piutang Co-Guarantee** *Accounts Receivable Balance of Co-Guarantee*	**Rata-2 Pengajuan Klaim Co-Guarantee per Bula** *Average Claim Submission of Co-Guarantee per Month*	**Perbandingan Saldo Piutang thdp 3 Bulan Rata-2 Pengajuan** *Comparison of Accounts Receivable Balance thdp 3 Months Average Submission*
Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	43.705.693.362	2.317.184.848	629%
Heksa Eka Life Insurance	47.875.227.784	9.078.027.288	176%
Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	-	-
Jiwasraya	17.734.702.370	946.823.115	624%
PT Jamkrindo Syariah	1.156.155.406	-	-
PT Asuransi Beringin Sejahtera	13.070.398.215	4.582.869.962	95%

Untuk meminimalkan risiko *co-guarantee*, Perusahaan melakukan mitigasi dengan:

a. Melakukan evaluasi kinerja mitra *co-guarante* untuk meminimalisir risiko.
b. Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausula untuk meminimalkan risiko.
c. Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang *co-guarantee* secara berkala.

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 15/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 23/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK.010/2011 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

To mitigate the co-guarantee risks, the Company mitigates it by:

a. Performing a performance evaluation of the co-guarante partners to mitigate the risks.
b. Conducting a refinement on the agreement by adding a clause to mitigate the risks.
c. Performing a regular reconciliation and collection of co-guarantee receivables.

3. Financial Risk

Financial Risk can be reflected from the liquidity risk of a company. According to Directors Regulation No. 15/Per-Dir/XII/2010 dated 29 December 2010 on Guidelines of Risk Management which has been updated with Directors Regulation No. 23/Per-Dir/VIII/2016 dated 12 August 2016 on Guidelines of Risk Management, Liquidity Risk is a risk which among others is due to a company is unable to meet its matured obligation.

In accordance with the PMK No. 99/PMK.010/2011, a guaranteed liquidity ratio shall be at least 150% (one hundred and fifty per cent). Liquidity Ratio is calculated by using a current ratio i.e. the ratio of current assets to current debt. Based on the above indicators, it is concluded that Perum Jamkrindo's liquidity risk is deeme relatively small.

Uraian *Description*		2015 (Rp)	2016 (Rp)	Pertumbuhan (%)
Risiko Likuiditas *Liquidity Risk*	=	Aset Lancar / *Current Assets* / Utang Lancar / *Current Debt*		
Aset lancar *Current Assets*		9.348.190.875.047	9.348.190.875.047	
Utang lancar *Current Debt*		1.237.804.130.675	1.237.804.130.675	
Risiko Likuiditas *Liquidity Risk*		755,22%	712,07%	-43,16%

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Based on the above indicators, it is concluded that Perum Jamkrindo's liquidity risk is deeme relatively small.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar *(adverse movement)* penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya *return* dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, *trend* kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

4. Market Risk

Market Risk is a risk cause by an adverse movement/trend of Perum Jamkrindo guarantee, which can harm the market guarantee of the Company and financial market movement that could potentially decrease the return and value of its investment. In such case, the market variables related to underwriting are competition level, trend of bank credit, and market regulation. Market risks associated with the investment are interest rates, inflation, and investment portfolios.

Uraian *Description*		2015 (Rp)	2016 (Rp)	Pertumbuhan *Growth* (%)
Pertumbuhan Penjaminan *Guarantee Growth*	=	(Vol Penjamin t – Vol Penjamin T-1) / *Vol Warranty t-Vol Guarantee t-1* / Vol Penjamin T-1 / *Vol.Guarantee t-1*		
Vol Penjaminan t - Vol Penjaminan t-1 *Vol Warranty t-Vol Guarantee t-1*		24.852.957.689.034	60.377.517.031.615	
Vol Penjaminan t-1 *Vol. Guarantee t-1*		65.590.575.587.643	65.590.575.587.643	
Pertumbuhan Penjaminan *Guarantee Growth*		61,01%	92,05%	129,94%
Pencapaian Target Penjaminan *Target Achievement Guarantee*	=	Realisasi Vol Penjaminan / *Realization of Vol Warranty* / Target Vol PenjaminanVol Penjamin T-1 / *Target Vol Guarantee*		
Realisasi volume penjaminan *Realization of Vol Warranty*		65.590.575.587.643	125.968.092.619.258	
Target volume penjaminan *Target Vol Guarantee*		77.781.216.589.623	122.500.000.000.000	
Pencapaian Target Penjaminan *Target Achievement Guarantee*		84,33%	102,83%	18,50%

Manajemen Risiko
Risk Management

Uraian *Description*	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Pertumbuhan *Growth* (%)
Pencapaian Pendapatan Investasi *Achievement of Investment Income* =	Realisasi Pendapatan Investasi / *Realization of Investment Income*		
	Target Pendapatan InvestasiVol Penjamin T-1 / *Target Investment Income*		
Realisasi pendapatan investasi *Realization of Investment Income*	599.525.302.216	587.678.040.947	
Target pendapatan investasi *Target Investment Income*	550.901.952.847	724.831.000.000	
Pencapaian Pendapatan Investasi *Achievement of Investment Income*	108,83%	81,08%	-27,75%
Risiko dari *Return* Investasi = standard deviasi *return* investasi deposito *Risk of Return Investment = standard deviation of return on investment of deposit*			
Rata-rata yield deposito Per Bulan *Average yield of deposits Per month*		0,57% atau setara 6,82% per tahun *0,57% Or equivalent to 6.82% per annum*	

Dari indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan di tahun 2016 lebih baik dari tahun sebelumnya periode 1 Januari-31 Desember 2015.

Pencapaian *volume* penjaminan Perusahaan meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di RKAP 2016 dengan pencapaian 102,83%.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami penurunan, dan pencapaiannya tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RKAP 2016. Pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami penurunan sebesar Rp11,8 miliar atau turun sebesar 1,98% dari tahun 2015, terjadi penurunan persentase pencapaian pendapatan investasi dari 108,83% (2015) menjadi 81,08% (2016). Dalam jangka panjang Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:
a. Selektif dalam pemilihan mitra bank tujuan penempatan deposito.

Based on the above indicators, it is shown that the growth of guarantee and achievement of the target guarantee in 2016 is better than that of the previous year i.e. January 1–December 31, 2015 period.

In nominal terms, the achievement of Company's guarantee volume has increased compared to that of the same period last year, and when compared to the RKAP 2016 target, the achievement has exceeded the target by 102.83%.

In nominal terms, Company's investment revenue has decreased, and its achievement did not meet the targets set in RKAP 2016. The growth in investment revenue achievement decreased by Rp11.8 billion or decreased by 1.98% from the 2015 revenu, a decrease in the percentage of achievement of investment revenue from 108.83% (2015) to 81.08% (2016). In the long term, the Company must optimize the target achievement of investment revenue while mitigating the potential risks that could hinder the achievement of investment target.

To mitigate the investment risk of deposits, the Company has taken the following measures:
a. Selecting Banks for deposit placement, in which the deposits are placed in the banks that perform well.

b. Porsi nilai penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
c. Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan *review* apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo mulai dilakukan pada tahun 2010 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 21/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar kondisi beberapa parameter penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Manajemen Risiko
   Sebagian proses manajemen risiko sudah tercantum dalam SOP-SOP proses bisnis berbasis risiko, sehingga apabila audit internal ataupun eksternal tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Manajemen Risiko sudah cukup baik.

2. Pelaksanaan Rancangan Proses Manajemen Risiko
   Pelaksanaan rancangan proses manajemen risiko perlu didukung dengan adanya sistem manajemen risiko. Terkait sistem manajemen risiko, Perum Jamkrindo telah memiliki *Blue-print* Manajamen Risiko dan Panduan Manajemen Risiko yang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Proses identifikasi dan penilaian risiko serta penyusunan rencana pengendalian risiko tersebut sudah dilakukan secara triwulanan oleh *Risk Owner* di Perum Jamkrindo. Dengan demikian, dapat dikatakan rancangan proses manajemen risiko telah sesuai untuk diterapkan.

b. Nominal placement is adjusted to the equity of the bank concerned.
c. - Placements are made in a certain period of time that allows a review in case of change in interest rates.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management System

The Implementation of Risk Management aims to ensure that the Company's goals are achieved. The Implementation of Risk Management of Perum Jamkrindo has been effected since 2010 marked with the issuance of the Regulation of the Board of Directors No. 13/Per-Dir/XII/2010 dated 29 December 2010, which later updated by the Regulation of the Board of Directors No. 21/Per-Dir/VIII/2016 dated 12 August 2016 on the Implementation of Risk Management.
Based on the above description, the outline condition of several Risk Management implementation parameter are as follows:

1. Understanding the Risk Management
   Some risk management processes are listed in the risk-based business process SOP, therefore, if the internal or external audit could not find any non-compliances against the SOP, it could then be concluded that the level of understanding of Risk Management is fairly good.

2. Implementation of Risk Management Process Design
   Implementation of risk management process design requires a support of a risk management system. In relation to risk management system, Perum Jamkrindo has in place a Blueprint Risk Management and Risk Management Guidance supported by a Risk Management Information System Application which function to simplify the process of identification, risk assessment, and follow up of risk handling. The process of identification, risk assessment and preparation of risk control plan has been conducted quarterly by the Risk Owner in Perum Jamkrindo. Thus, it it can be concluded that design of risk management process is appropriate for application.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Satuan Pengawasan Intern memastikan agar Perusahaan tetap patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, memastikan kesesuaian unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi dan/atau ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi, ketaatan atau kesesuaian perusahaan terhadap aturan dan ketentuan bidang pengelolaan perusahaan dan komitmen perusahaan kepada segenap *Stakeholder.*

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh insan Perum Jamkrindo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo mengacu pada *Internal Audit Charter* dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Lingkup Manajemen Risiko
   a. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola oleh manajemen risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dimonitor dan dikomunikasikan.
   b. Melaksanakan konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penerapan pengelolaan risiko Perusahaan.
   c. Menyusun dan menerapkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yaitu audit berbasis risiko.

2. Lingkup pengendalian intern
   a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
      i. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan
      ii. Filosofi dan gaya manajemen
      iii. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya,
      iv. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan
      v. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh Direksi.
   b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.
   c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap

Finance and Operations control, and Compliance to Other Laws and Regulations

The Internal Control Unit ensures the Company to keep complying to the laws and regulations applicable to the Company, ensures conformity of work unit in carrying out the duties to achieve the objective, target, plan, policy, instruction, and/or other provisions applicable in the organization, compliance or conformity of the Company to rules and regulations in regard of company management and company's commitment to all Stakeholder.

The Internal Control System is a process integrated to actions and activities that are conducted continuously by the leaders and all employees of Perum Jamkrindo to give sufficient trust to the achievement of the organization's objectives through: effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security of Company's asset, and compliance to laws and regulations.

The implementation of internal control system conducted by Perum Jamkrindo refers to Internal Audit Charter and Guidelines of Good Corporate Governance Implementation that describes as follows:

1. Risk Management Scope
   a. Ensuring that the risks managed by the risk management are already identified, analyzed, evaluated, monitored, and communicated.
   b. Conducting consultation, monitoring and evaluation on the Company's risk management implementation.
   c. Preparing and implementing risk-based audit examination.

2. Internal control scope
   a. Internal control scope in the Company that is disciplined and structured consists of:
      i. Integrity, ethical values and competence of the employees.
      ii. Philosophy and management style.
      iii. The way in which the management takes in performing its authority and responsibilities.
      iv. Organizing and developing Human Resources.
      v. Attention and directions made by the Directors.
   b. Business risk assessment and management is a process to identify, analyze, assess, and manage relevant business risks.
   c. Control activities are activities done in a control process of the Company's activities on every level and unit in

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
e. *Monitoring* yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendaian internal pada setiap tingkat dan unit struktur Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Lingkup Tata Kelola Perusahaan yang Baik
   a. Memastikan bahwa manajemen telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan.
   b. Memastikan bahwa semua proses bisnis dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.
   c. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG pada kegiatan operasional Perusahaan.

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Penerapan pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh Direksi, Manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi, kenadalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah dengan melakukan pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi karyawan.

the Company's structure, among others, regarding authorities, authorization, verification, reconciliation, assessment on work achievement, division of duties, and securities of Company's assets.

d. Information and communication system is a process of preparing a report regarding the operational activities, financial, and compliance to the rules and regulations applicable to the Company.
e. Monitoring is an assessment process to the quality of internal control system on every level and structural unit of the Company so that it can run optimally.

3. Good corporate governance scope
   a. Ensuring that the management has established Company value and target, and has communicated it to the stakeholders.
   b. Ensuring that all business process in the Company meets the accountability aspect.
   c. Monitoring and evaluating GCG implementation in the Company's operational activities.

Review of the Effectiveness of Internal Control System

Implementation of internal control is a process influenced by the Directors, Management, and other party designed to give sufficient confidence to guarantee the effectiveness and efficiency of the operational activities, reliability of the financial statements, and compliance to the applicable laws and regulations. The internal control conducted by the Board of Supervisors is by monitoring and advising the adequacy and fairness of the process in preparing financial statements, risk management by taking into account the prudential principles, assisted by Audit Committee and Investment and Business Risk Committee. Whereas the Directors apply internal control system through the implementation of corporate policies and procedures consistently and the compliance to applicable regulations, among others, related to the company's business activities, risk management, strategic planning, division of duties, delegation of authorities, and adequate accounting policies. Directors establish an effective internal control system to secure Company's investments and assets. Internal control environment in the Company is conducted with discipline and structured, high integrity, ethical value, and competence of the employees.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Pada tahun 2016 telah dilakukan reviu Pengendalian Internal oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*partner* dari PwC). *Review* Pengendalian Internal atas *Entity Level Control* pada Jamkrindo berdasarkan COSO *Framework* 2013 dan difokuskan kepada efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan serta memastikan kualitas laporan baik internal maupun eksternal yang reliabel, tepat waktu, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalan reviu, yaitu:

1. Melakukan diskusi dengan *Control Group* dan berbagai fungsi terkait seperti: Satuan Pengawsan Internal, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan Dewan Direksi.
2. Melakukan observasi ke dokumen pendukung yang ada

In 2016, a review was conducted on the Internal Control by Public Accountant Office Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (partner of PwC). The Internal Control review on Entity Level Control at Jamkrindo was based on COSO Framework 2013 and focused on the effectiveness and efficiency of the Company's operations as well as to ensure report quality, either internal or external, is reliable, on time, transparent, and in accordance with the applicable provisions and regulations. The methods used in the review were:

1. Held discussions with Control Group and many relevant functions, such as: Internal Control Unit, Risk Management, Human Resources, and Directors.
2. Made observation to the existing supporting documents

COSO *Framework*

COSO Framework

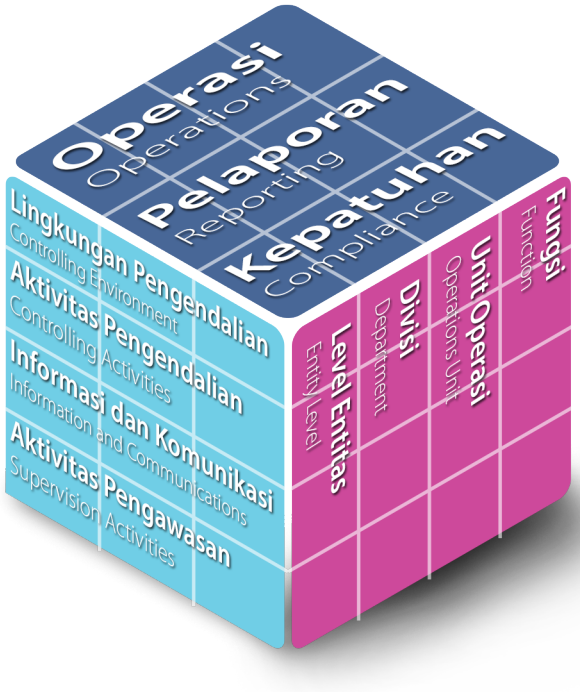

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Rincian hasil *review* Pengendalian Internal pada *Entity Level* Perum Jamkrindo disajikan pada tabel di bawah ini:

Details of review result of Internal Control on Entity Level of Perum Jamkrindo are presented in the table below:

Lingkungan Pengendalian *Controlled Environment:*	Peningkatan komunikasi terkait pedoman perilaku *Improvement on communication related to code of conduct*
	Dokumen Pendelegasian Kewenangan perlu diperbaharui *Documents of Authority Delegation needs to be updated*
	Adaptasi terhadap struktur organisasi yang baru *Adaptation to the new organizational structure*
	Pembaharuan Piagam Komite Audit dan Piagam Internal Audit *Update on the Audit Committee Charter and Audit Internal Committee*
	Gap analysis atas kompetensi staff *Gap analysis on employee's competence*
Penilaian Risiko *Risk Assessment*	Perlunya peningkatan kontribusi dari *risk owner* *Need to increase contribution from the risk owner*
	Tinjauan atas kebijakan akuntansi untuk pelaporan keuangan *Overview of the accounting policies for financial reporting*
	Peningkatan fungsi MR dalam pengumpulan profil risiko *Increase MR function in gathering risk profile*
Aktifitas Pengendalian *Control Activities*	
Informasi dan Komunikasi *Information and Communication*	Peningkatan sistem informasi yang terintegrasi *Increase an integrated information system*
Aktivitas Penawaran *Monitoring Activities*	Peningkatan monitoring tools untuk Dewan Direksi *Increase monitoring tools for Directors*
	Peningkatan *Business Process Review* *Increase Business Process Review*

Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perum Jamkrindo dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perum Jamkrindo membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility becomes a channel for Perum Jamkrindo in building relationship with the Stakeholders, either internal such as employees or external such as customers. Related to CSR implementation, Perum Jamkrindo divides it into 4 (four) aspect.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan **lingkungan hidup**
Corporate Social Responsibility related to ***environment***

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan **ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja**
Corporate Social Responsibility related to ***employment, occupational health and safety***

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan **pengembangan sosial dan kemasyarakatan**
Corporate Social Responsibility related to ***social and community development***

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan **tanggung jawab kepada konsumen**
Corporate Social Responsibility related to ***responsibility to customers***

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perum Jamkrindo dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More information about CSR implementation by Perum Jamkrindo can be seen in the chapter of Company's Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Perkara Penting
Significant Cases

PERMASALAHAN HUKUM

Perum Jamkrindo tidak memiliki permasalahan hukum di sepanjang tahun 2016, baik yang menyangkut Perusahaan, entitas anak, Dewan Pengawas maupun Direksi.

SANKSI ADMINISTRATIF

Di sepanjang tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh regulator kepada Perum Jamkrindo.

LEGAL PROBLEMS

Perum Jamkrindo does not have any legal problems throughout 2016, either related to Company, subsidiary, Board of Supervisors, or Directors.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2016, there was no record of administrative sanctions imposed by the regulator to Perum Jamkrindo.

Praktik Bad Governance
Bad Governance Practice

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Berikut disampaikan praktik *Bad Governance* sesuai dengan kebutuhan

The Company realizes that the business activities conducted cannot be separated from the direct or indirect interaction with the community around the project area and the environment. Therefore, bad corporate governance practices are always threatening the Company's operational activities. Presented below is the Bad Governance practice according to the needs Disclosure of Internal Irregularities

Pengungkapan Penyimpangan Internal

Perum Jamkrindo tidak menemukan adanya penyimpangan internal, atau *fraud*, yang terjadi di tahun 2016.

Perum Jamkrindo did not find any internal deviation, or fraud, which occurred in 2016.

Perum Jamkrindo did not find any internal deviation, or fraud, which occurred in 2016.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Perum Jamkrindo tidak menemukan adanya laporan dari pihak manapun atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Reports on Company Activities that Pollute the Environment

Perum Jamkrindo did not found any reports from any parties on Company's activities which pollute the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (self-assesment system). Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk Tahun Pajak 2014 atas PPh Badan sebesar Rp29.979.115.754.

Disclosure on Fulfillment of Tax Obligations

According to Tax regulation in Indonesia, the Company calculates, determines, and pays its own Tax payable (self-assessment system). Payment and reporting of Income Tax and Value Added Tax has been done regularly according to the applicable tax regulation. In 2016, the Company received Tax Decision Letter of Excess Payment (SKPLB) for 2015 Tax Year of the Corporate Tax of IDR29,979,115,754.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun 2016 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan yang berlaku. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan hasil opini bahwa laporan keuangan Perusahaan "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material."

Inconsistency of Presentation of Annual Report and Financial Statements with the Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The Company's Financial Statements for 2016 has been prepared and presented according to the Financial Accounting Standard in Indonesia covering Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards – Indonesian Accounting Association (DSAK – IAI) as well as the prevailing regulations. The financial statements are prepared according to PSAK 1 (2009) on "Presentation of Financial Statements" and has been audited by the Public Accounting Firm of Hertanto, Grace, Karunawan with the result of opinion that the financial statements of the Company "Present fairly, in all material respects."

Praktik Bad Governance
Bad Governance Practice

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Perusahaan tidak menemukan adanya kasus hubungan industrial terkait hubungan kerja antara buruh dan karyawan dengan Perusahaan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusashaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun dengan memisahkan laporan untuk penjaminan Program KUR dan Non Program.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Perusahaan menyajikan Laporan Tahunan Digital yang disajikan pada situs web Perusahaan sesuai atau sama dengan Laporan Tahunan dalam bentuk buku.

Cases Related to Labor and Employee

The Company does not find any industrial relations cases related to work relationship between labor and employees and the Company.

Disclosure of Operations Segments in Financial Statements

The Company's Consolidated Financial Statements for the years ended on 31 December 2015 and 2016 were prepared by separating the reports for the guarantee of KUR Program and Non-Program.

The Conformance of Annual Report Book to Digital Annual Report

The Company presents the Digital Annual Report displayed on the Company's website conformed to or same as the Annual Report in the form of book.

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Corporate Data

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau *event*.

In delivering and distributing information and communicating with the interested parties, Perum Jamkrindo use many existing media, which are internet, print, and activity or event.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information is divided into 2 (two), which are:

No.	Akses Informasi *Information Access*	Jenis *Types*	
1	Komunikasi Internal *Internal Communication*	a.	Surat Edaran *Circular Letter*
			Perum Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi *Perum Jamkrindo uses Circular Letter to Communicate the Latest Policies and Regulations in the Company's Internal. The Information Distributed Generally Contains About Dissemination of Directors' Policies* *Perum Jamkrindo uses Circular Letter to Communicate the Latest Policies and Regulations in the Company's Internal. The Information Distributed Generally Contains About Dissemination of Directors' Policies*
		b.	ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting) *ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting)*
			Perum Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis Web Yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo Also Uses Web-Based Information Technology Facilities, which is ICPR, that Has been Applied within Perum Jamkrindo.*
		c.	E-mail
			Perum Jamkrindo juga telah memiliki e-mail system sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja *Perum Jamkrindo has also had its own email system to manage internal communication of the Company among work units.*
		d.	Evaluasi dan Action Plan Triwulan *Quarterly Evaluation and Action Plan*

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Corporate Data

No.	Akses Informasi *Information Access*	Jenis *Types*	
			Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan action plan. Dalam rapat evaluasi dan action plan ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan *For communication facilities between Directors and Head of Division and Head of Branch Office or Sub-Branch Office in conveying the Company's business targets and plans, Perum Jamkrindo regularly conducts quarterly meetings of evaluation and action plan.* *In this evaluation and action plan meeting, Directors of Perum Jamkrindo evaluate the current quarterly performance and discusses and communicates the business plan of Perum Jamkrindo for the coming quarterly to the Head of Division, Head of Branch Office and Head of Sub-Branch Office to continue the annual business plan and targets which has been stipulated in the current year's RKAP.*
2	Komunikasi Eksternal *External Communication*	a.	Alamat Perusahaan *Company Address*
			Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon:+62216540335 Faksimili : +62 21 6540344/48 *Gedung Jamkrindo* *Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat* *Telephone: +62216540335* *Facsimile: +62 21 6540344/48*
		b.	*Website*
			Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau stakeholders dalam mendapatkan informasi Perum Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www. jamkrindo.com *To facilitate the business partners, other interested communities, or stakeholders in obtaining information, Perum Jamkrindo provides access by utilizing reliable information technology support through the website www.jamkrindo.com*
		c.	*Press Release*
			Perum Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui press release *Perum Jamkrindo is also required to publish any company activities through press release*
		d.	*Public Expose*

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Corporate Data

No.	Akses Informasi *Information Access*	Jenis *Types*
		Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan public expose atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan *Once a year the company is required to hold a public expose or public exposure on the performance of the company*
		e. Iklan *Advertisement*
		Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif *Advertisement is used as a tool for managing images and increasing awareness of Perum Jamkrindo and its products, using media to disseminate advertisement in the community, among others newspapers, magazines, and other media, by first analyzing the media and target audiences so that advertisements can function effectively*
		f. Pameran *Exhibition*
		Perum Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif *Perum Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage the image and increase awareness to Perum Jamkrindo and its products, by first analyzing media and target audiences so that advertisement can function effectively*

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Triwulan.
2. Laporan Tahunan.
3. Keterbukaan informasi melalui *public expose*.
4. Laporan administrasi kepada Pemilik Modal.

Situs *Web*

Keberadaan situs *web* memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs *web* Perusahaan akan memberikan manfaat

Correspondence and Periodic Report

The Company's financial and non-financial information has been prepared and reported in a transparent manner to the shareholders, stakeholders, and other institutions required. Information is reported on time target, presented completely and accurately, up-to-date, fully, and adequately in accordance with the procedure, type, and scope as stipulated in the provisions on Transparency of the Company's Financial Condition. Information presented through the report is in the form of:

1. Quarterly Report.
2. Annual report.
3. Disclosure of information through public expose.
4. Administrative reports to Equity Owner.

Website

The existence of website has a significant role on information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Corporate Data

kepada publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

stakeholders, which will enable unlimited delivery of unlimited, quick, precise, and inexpensive information.

Perusahaan telah memiliki situs *web* elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs *web* ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

The Company has already had an official electronic website with the address www.jamkrindo.co.id. This website provides content around Company's information that is comprehensive and useful for information access to the public and stakeholders.

Hubungan Media

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Hal ini dilakukan melalui kegiatan Media *Gathering* di bulan September 2016 sebagai aktivitas silaturahmi untuk mempererat hubungan Perusahaan dengan media.

Media Relations

To be able to convey information comprehensively, the Company conducts media relations through Media Release to a number of national and local media. This is done through Media Gathering activity in September 2016 to strengthen the Company's relationship with the media.

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Media Variety To Shareholders and Stakeholders

Below is a table describing the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements that have been obtained by the Company.

Kepada *To*	**Bentuk-bentuk Media** *Forms of Media*
Regulator *Regulators*	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan *Quarter Report and Annual Report*
Pemilik Modal *Equity Owner*	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan *Quarter Report and Annual Report*
Lembaga Publik *Public Institution*	*Press Release* *Press Release*
Konsumen *Customer*	*Leaflet, Booklet*, Baliho, *Banner*, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan *Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video, Services Car*
Karyawan *Employees*	Majalah Internal *Internal Magazine*
Perusahaan Sejenis Lainnya *Other Similar Companies*	*Leaflet, Booklet*, Baliho, *Banner*, Spanduk, Media Sosial, Video PSA *Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video*
Mitra Kerja dan Rekanan *Business Partners*	Laporan Tahunan, *Leaflet, Booklet* *Annual Report, Leaflet, Booklet*
Organisasi Profesi *Profession Organization*	Laporan Tahunan, *Leaflet, Booklet* *Annual Report, Leaflet, Booklet*
Masyarakat/Umum *Community/Public*	*Leaflet, Booklet*, Baliho, *Banner*, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan *Leaflet, Booklet, Billboard, Banner, Social Media, PSA Video, Services Car*

* Situs *Web* Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

** The Company Website is not included in the above media, because it is open, unlimited, and accessible to anyone.*

Kode Etik
Code of Ethics

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:
1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Perum Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perum Jamkrindo.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perum Jamkrindo.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Perum Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

Code of Conduct is a collection of commitment consisting of Corporate culture and Ethical Standard of the Company that form and direct behavior to be in accordance with the Company's culture and values. Code of Conduct applies to all individual acting on behalf of the Company and subsidiary, as well as becoming a reference to all stakeholders conducting business transactions with the Company.

The purposes of applying the Code of Ethics are:
1. As a guide that contains guidance in implementing business ethics standards and behavior guidelines for all employees of Perum Jamkrindo that must be obeyed in everyday interaction with all parties.
2. As an ethical foundation in thinking and making decisions related to Perum Jamkrindo.
3. As a means to create and support a healthy, positive work environment and display ethical behaviors of all employees of Perum Jamkrindo.
4. As a means to increase the sensitivity of the Company and employees of Perum Jamkrindo towards the values of business ethics by developing discussions or developing discourse on ethics.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai Landasan Utama

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Perum Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk prilaku setiap Insan Perum Jamkrindo.

Vision, Mission, and Corporate Culture as the Main Foundation

The Company's code of ethics is an effort to synergize all of the Company's organs to be able to live the Company's vision, mission and culture together. As the goal of the Company's journey in the future, vision plays an important role in placing all employees of Perum Jamkrindo to be able to realize the vision through the mission that has been established, and the internalization of corporate culture in order to form the behavior of every employee of Perum Jamkrindo.

Visi *Vision*
Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.
To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.

Kode Etik
Code of Ethics

Misi *Mission*
Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:
1. Dharma Pertama
   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.
2. Dharma Kedua
   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.
3. Dharma Ketiga
   Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

The Company's vision is described into missions that are "Tridharma Jamkrindo" as follows:
1. *First Dharma*
   Conducting guarantee activities for business development of MSME and Cooperatives.
2. *Second Dharma*
   Providing wider and more qualified services.
3. *Third Dharma*
   Providing interests to the stakeholders in accordance with sound business principles.

Kredo Perusahaan	*Corporate Credo*
1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.	*1. Trustworthy in conducting business guarantee.*
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.	*2. Responsive to business environment changes.*
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.	*3. Excellent and Professional service.*
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.	*4. Healthy corporate governance*
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.	*5. Reputable in providing customer satisfaction*
Budaya Perusahaan, "TRUST"	*Corporate Culture, "TRUST"*
Terpercaya	***Trustworthy***
Bekerja jujur dengan integritas tinggi	*Work honestly with high integrity*
Responsif	***Responsive***
Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap stakeholder	*Responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders*
Unggul	***Excellent***
Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan	*Always improve professionalism to achieve extra value for the company*
Sehat	***Healthy***
Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat	*Always work diligently to support healthy corporate governance*
Terkemuka	***Reputable***
Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan	*Always in the forefront in providing services and performances to become the leader in guarantee industry*

Pedoman Perilaku Perum Jamkrindo

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan

Perum Jamkrindo Code of Conduct

The Company is committed to implement Good Corporate Governance based on principles of transparency, fairness, accountability, and independence, so as to support the Government policy in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives). This is stated in the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated 13 December 2012 on Code of Conduct.

The Company's standards of conduct are transparency and disclosure of information of independence, accountability, and fairness. Implementation of the business ethics standards is the Company's way to conduct business in order to realize its

Kode Etik
Code of Ethics

komitmen untuk:
1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

commitment to:
1. Place customer satisfaction as the main priority.
2. Implement Ethical Standards in all business activities based on Good Corporate Governance principles.
3. Always be in proportion in providing high quality services to the business of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives).
4. Treat all stakeholders as partners.
5. Company must serve and strive to anticipate stakeholders' needs well.

Contents of the Company's Code of Conduct among others are:

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan
1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak stakeholder.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada stakeholder.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Company's Ethics with Stakeholders
1. *Companies should treat stakeholders in a fair and equitable manner by fulfilling the rights of stakeholders.*
2. *Companies are required to improve the performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.*
3. *Companies are required to maintain the confidentiality of information and data.*
4. *Companies must turn off non-misleading information to stakeholders.*
5. *Companies must serve and anticipate stakeholders' needs well.*

Etika Perusahaan dengan Karyawan
1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Kayawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengijinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Company's Ethics with Employees
1. *The Company should prioritize occupational health, safety, quality improvement and welfare of employees by fulfilling the employees' rights proportionally so that Employees are expected to perform optimally.*
2. *The Company provides equal employment opportunities to all Employees regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability of a person, or other special circumstances protected by legislation.*
3. *The company provides equal opportunities in Employee self-development.*
4. *The Company rewards employees based on employees' competence and performance.*
5. *The Company creates a working environment, communication and working relationship with superior, subordinates, and peers that are conducive and productive.*
6. *The Company respect human dignity regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability of a person, or other special circumstances protected by legislation.*
7. *Companies must uphold the general principles of humanity, rights and obligations under the applicable laws and regulations.*
8. *The Company allows Employees to engage in duplicate activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.*

Kode Etik
Code of Ethics

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (supplier) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Company's Ethics with Supplier of Goods and Services

1. *The Company treats the supplier of goods or services including the procurement process in accordance with business principles of sound, open, impartial based on applicable provisions.*
2. *The Company must make the procurement process transparent and accountable based on the prevailing regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency, and economics.*
3. *The Company uses suppliers of goods and services based on written documentation.*
4. *The Company must maintain the confidentiality of information and procurement documents of goods and services in accordance with the applicable laws and regulations.*
5. *The company does not engage in corruption, collusion, and nepotism in the procurement of goods and services.*

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Company's Ethics with Competitors

1. *The Company must implement fair business competition by promoting product excellence and service quality.*
2. *The Company should avoid misleading behavior and/or dishonest acts.*
3. *The Company opposes any agreements or agreements that are anti-competitive.*
4. *The Company does not cooperate without acceptable and reasonable reason.*

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangu-ndang yang berlaku.

Company's Ethics with the Government

1. *The Company must comply with the applicable Laws and Regulations.*
2. *The Company must maintain good relationship and communication with the Government.*
3. *The Company must support Government programs in accordance with the applicable laws and regulations.*

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran programprogram tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Company's Ethics with the Community

1. *The Company maintains a clean and healthy environment.*
2. *The Company supports social, culture, traditions, religion, and human rights activities.*
3. *The Company participates in the economic empowerment of the surrounding communities.*
4. *The Company optimizes the distribution of Company's CSR programs to the community (Partnership and Community Development Program).*
5. *The Company does not engage in acts that lead to discrimination of people based on ethnicity, religion, race, and interclass.*

Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Company's Ethics with Mass Media

1. *The Company must provide relevant information.*
2. *The Company makes mass media as partners in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefit.*
3. *The Company accepts and follows-up proportionally against constructive criticisms delivered through the mass media.*

Kode Etik
Code of Ethics

Standar Perilaku Insan Perusahaan
Standards of behavior insan company

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibility

1. *All Company's Persons are required to comply with all Company's requirements regarding employment.*
2. *All Company's Persons must understand and comply with all provisions issued by either the Company or the regulators in accordance with the respective areas of duties and responsibilities.*
3. *All Company's Persons must be dedicated, loyal, diligent, and meticulous in working and always try to improve knowledge and ability to smooth the execution of duty.*
4. *All Company's Persons must apply the Company's interests above personal or group interests.*

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
   a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang.
   b. Mengkonsumsi minuman beralkohol.
   c. Melakukan semua bentuk perjudian,
   d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creating Conducive Working Environment

1. *All Company's Persons must be polite in communicating.*
2. *All Company's Persons must uphold ethical values in working relationship with superiors, subordinates, and colleagues.*
3. *All Company's Persons must avoid acts and speeches that contain elements of harassment, humiliation, mockery, slander, and degrading behavior.*
4. *All Company's Persons are prohibited from engaging in affairs, sexual harassment either verbally, visually, or physically including harassment of privacy and status.*
5. *All Company's Persons is prohibited (both in offices and out of offices):*
   a. *Use, possess, distribute, or sell narcotics or illegal drugs.*
   b. *Consume alcoholic beverages.*
   c. *Do all forms of gambling,*
   d. *Do all forms of criminal acts.*
6. *All Company's Persons must maintain a healthy environment.*
7. *All Company's Persons must make efficient and effective use of the phone, avoid excessive use of the phone for personal benefit, and respond to telephone or call alert at the first opportunity.*

Kode Etik
Code of Ethics

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan *mark up* harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak iain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoiding All Conflicts of Interest and the Potential that Triggers Unhealthy and Dishonest Behavior

1. *All Company's Persons use their energy, thoughts, and work abilities for the Company's benefit. Work or activities outside office hours may be made as long as not utilizing the Company's name and interests.*
2. *All Company's Persons who are inactive or resigned are prohibited from using any copyright, intellectual property, data, and information of the Company and perform activities on behalf of the Company.*
3. *All Company's Persons must not invest Company funds in the name of individuals or classes.*
4. *All Company's Persons must not invest Company funds by pledging personal gain with other parties.*
5. *All Company's Persons must not accept any bribe or payment of any kinds from any party having direct or indirect relationship with his position or duties.*
6. *All Company's Persons must not accept and give any prizes in any forms which may reasonably be expected to influence sound business decisions.*
7. *All Company's Persons are prohibited from becoming providers of goods and services that directly or indirectly sell goods, rights, or services to the Company.*
8. *All Company's Persons are prohibited to mark up the sale or purchase price either for personal or other party's interest.*
9. *All Company's Persons are prohibited from using their positions to provide preferential treatment to other parties.*

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maintaining Assets, Properties, and Information for the Company's Interests

1. *All Company's Persons utilize Company assets only for the benefit of the Company and are not allowed for personal or group interests.*
2. *All Company's Persons must be responsible for protecting Company properties against theft, embezzlement, and misuse of assets in their discretion.*
3. *All Company's Persons must safeguard data and information along with the devices in accordance with their authorities so as not to be misused, defaced, stolen, or not accessed by other irresponsible parties.*
4. *All Company's Persons must not be permitted to use Company's name, logos, copyrights, and accessories for personal gain.*
5. *All Company's Persons must safeguard the Company's confidential internal information and not use it for any personal, family, friends, class, or group interests.*
6. *All Company's Persons must make and deliver reports and data correctly and honestly to the interested parties according to the prevailing laws and regulations.*

Kode Etik
Code of Ethics

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan *insider trading* guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
   a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
   b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya,
   c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,
   d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Complying with Laws and Regulations

1. *All Company's Persons are prohibited from engaging in insider trading activities in order to gain personal gain and must not act as brokers, seekers, or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.*
2. *All Company's Persons are prohibited from being involved or engaging in money laundering investments and or practices.*
3. *All Company's Persons are prohibited from entering into any agreements, bindings, statements either directly or indirectly indicating that the Company has any attachment to any political parties, but the Company grants all Company's persons freedom to channel their political aspirations on conditions:*
   a. *Not on behalf of the Company,*
   b. *Not using Company assets in its political activities,*
   c. *Not making any contribution on behalf of the Company,*
   d. *If holding a position in a Political Party and becoming a candidate/legislative member, that person is considered resigning from the Company.*
4. *All Company's Persons are prohibited from doing Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) activities.*

Internalisasi dan Penegakan *Code of Conduct*

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman prilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan Perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1. Saluran pengaduan
   a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
   b. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.

Internalization and Enforcement of Code of Conduct

The internalization of the Code of Conduct aims to create mutual understanding and commitment from all internal levels within the Company to adhere to and implement well the code of conduct contained therein. Internalization is carried out through socialization activities that are carried out thoroughly by providing access to the widest possible for all Company's persons in obtaining such information.

The Code of Conduct enforcement mechanism is carried out by means of all Company's persons are mandatory to sign the Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company's persons are required to understand, comprehend, and apply the Code of Conduct.

1. Complaint Channel
   a. If any violation of the Code of Conduct is found within the Company, each employee is obligated to immediately report it in writing by mentioning the identity of the reporting party to the Division dealing with Human Resources (HR).
   b. Behavior problem of the Board of Supervisors and Directors is handled by the Minister.

Kode Etik
Code of Ethics

c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.

2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Prilaku
   a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
   b. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Penyebarluasan Etika Perusahaan
   Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:
   a. Pemberian sosialisasi, *training* dan seminar bagi karyawan
   b. Pemasangan banner maupun spanduk
   c. Rapat evaluasi kinerja
   d. Sosialisasi saat proses perekrutan

c. Behavior problem of employees is handled by the direct supervisor in stages according to the applicable mechanism.
d. Violation of Code of Conduct in relation to the community is handled by still referring to the employment provisions applicable in the Company.
e. A division handling Human Resources (HR) affairs is obliged to respond promptly to any inquiries, notices, and reports received proportionately.

2. Handling Mechanism of Violation Report of the Code of Conduct
   a. The direct supervisor or designated work unit to manage the handling of infringement reports based on the report received identifies the problem, analyze, collects additional relevant information, and keeps the identity of the reporting party.
   b. The analysis result, if necessary, may be reported to the Directors for further process in accordance with the applicable mechanism.

3. Dissemination of Company Ethics
Dissemination efforts and spreading Company Ethics equally to all Company's elements are done through various trainings, such as:
   a. Providing socialization, training, and seminars for employees
   b. Installation of banners
   c. Performance evaluation meeting
   d. Socialization during the recruitment process

Kode Etik
Code of Ethics

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
NPP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Status Kepegawaian	:

Menyatakan bahwa, saya :
1. Telah menerima Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
4. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini;
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jakarta, September 2016

(Nama)

Sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan sosialisasi Kode Etik dan prinsip GCG di tahun 2016 dilakukan di beberapa kantor cabang, yaitu:

The socialization of the Code of Conduct is conducted with the aim that all Company's Persons understand and apply the GCG principles in the daily work environment in order to avoid deviant behavior. The socialization activities of the Code of Ethics and GCG principles in 2016 were conducted in several branch offices, which are:

No.	Kantor Cabang *Branch Offices*	Tanggal Pelaksanaan *Implementation Date*
1.	Semarang	19 Februari 2016 *19 February 2016*
2.	Padang	12 Agustus 2016 *12 August 2016*
3.	Serang	
4.	Mamuju	
5.	Gorontalo	
6.	Jambi	13 Agustus 2016 *13 August 2016*

Kode Etik
Code of Ethics

No.	Kantor Cabang *Branch Offices*	Tanggal Pelaksanaan *Implementation Date*
7.	Lampung	24 Agustus 2016 *24 August 2016*
8.	Kendari	
9.	Pontianak	25 Agustus 2016 *25 August 2016*
10.	Kupang	
11.	Medan	
12.	Ternate	8 September 2016 *8 September 2016*
13.	Banjarmasin	
14.	Palangkaraya	
15.	Yogyakarta	
16.	Manado	
17.	Denpasar	21 September 2016 *21 September 2016*
18.	Makassar	27 September 2016 *27 September 2016*
19.	Palembang	
20.	Bandung	28 September 2016 *28 September 2016*
21.	Jayapura	

a. Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Bandung
a. Dssemination of GCG at Bandung Branch Office

b. Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Denpasar
b.Dssemination of GCG at Denpasar Branch Office

c. Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Medan
c. Dssemination of GCG at Medan Branch Office

Kode Etik
Code of Ethics

d. Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Gorontalo
d. Dssemination of GCG at Gorontalo Branch Office

e. Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Semarang
e.Dssemination of GCG at Semarang Branch Office

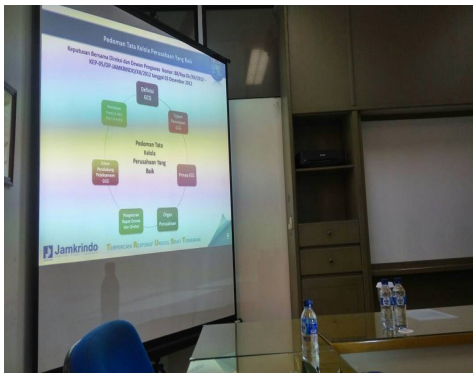

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan
   Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

5. Sanksi Administrasi
   Setiap karyawan wajib:
   a. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
   b. mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan

4. Enforcement and Sanctions of Company Ethical Violations
   The existence of sanctions against violations of Company ethics serves to ensure the establishment of rules created for the creation of discipline and professionalism for all Company's persons. Enforcement and sanction for acts of violation committed is in full force without exception. The sanctions given are in the form of warning letters.

5. Administrative Sanctions
   Each employee must:
   a. comply with all provisions and regulations stipulated by the Government for SOE employees;
   b. comply with all company regulations, in the forms of orders or prohibitions in writing or verbally within the limits of a reasonable understanding and not contrary to the norms of decency; and

c. menunaikan tugas dan kewaiiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi Nomor : 19/ Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

c. fulfill duties and obligations as best as possible in accordance with the assignment by the Directors and the respective employee's supervisor with an emphasis on the Company's interests.

Imposing administrative sanctions for employees of Perum Jamkrindo refers to the Director Regulation Number: 19/ Per-Dir/III/2006 on Employee Discipline. Administrative sanctions are given to employees who commit disciplinary offenses.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

As a realization of the enforcement of the Company's Code of Conduct, below are the details of sanctions imposed related to the enforcement of the Code of Ethics for the past 3 (three) years:

Jenis Sanksi *Types of Sanctions*	**2016**	**2015**	**2014**
Teguran *Reprimand*	-	-	-
Peringatan 1 *1st Warning*	-	2	2
Peringatan 2 *2nd Warning*	-	-	-
Peringatan 3 *3rd Warning*	-	-	-
Pengunduran Diri *Resignation*	-	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *Termination (PHK)*	2	-	-

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pedoman Kebijakan Gratifikasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang gratifikasi yang tergolong suap, dan pemberian diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Perum Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Perum Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

One of the Company's commitment to minimize the conflicts of interest and the abuse of power and position is the implementation of gratuity control from the other parties. The Guidelines for Gratuity Policy of the Company has been validated under the Circular Letter of the Board of Directors No SE/4/IX/2014 dated 24 September 2014 on the Gratuity Control Policy at Perum Jamkrindo.

The importance of gratuity control in the implementation of Code Conduct as explained above is related to the definitive limitation between gratuities or gifts or the provision of anything in value given by the other parties, and bribes which are closely related to the abuse of power and position. The Company's Gratuity Control Policy has clearly stated that the gratuities constitute bribery and the provision of things is allowed to the extent that it is not contrary to the applicable laws and regulations and rules.

Through such policy, the Company does only seek the implementation of GCG principles that is based on corporate health management, but also, this policy serves as foundation for each personnel of Perum Jamkrindo in order not to misuse their power and positions and keep the personnel conduct of Perum Jamkrindo away from corrupt practices tend.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policies

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

The laws of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payment or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense which may allow the Company or individual employees to be subject to fines and/or imprisonment.

Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan Undang-undang Anti Korupsi terkait.

The anti-corruption laws, including the Corruption Practices Act, make payments, offers, or grants anything of value to Company's officials for the purpose of influencing actions or decisions of the officials as a criminal offense. The purpose of this Policy is to ensure that all employees, officials, and directors, as well as all of its subsidiaries and affiliates are in compliance with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:
1. Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
2. Pembayaran Fasilitasi
3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

This policy includes the following matters:
1. Bribe, Kickback, or Other Corrupt Payment
2. Facilitation Payments
3. Relationship with Third Parties

Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOE roadmap as an anti-corruption action within the ministry of SOE and state enterprises, which also applies in Perum Jamkrindo as one of the state-owned companies.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance)* secara konsisten dan berkesinambungan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, kadang terjadi pengaduan pelanggaran insan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, Perusahaan menyusun dan menerapkan suatu sistem yang mengatur penanganan dan penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi Insan Perum Jamkrindo dalam suatu Sitem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 121/Kep-Dir/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun *non*-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melidungi aset/kepentingan Perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Mengurangi potensi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
6. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

Perum Jamkrindo has a commitment to implement Good Corporate Governance principles consistently and continuously as one of the references in managing the Company. In carrying out business activities, the Company is always required to implement it full of mandate, transparent, and accountable as well as comply with the applicable laws and regulations. In conducting activities, sometimes there is a violation reporting of the Company's employee towards GCG principles, ethical values, and the applicable laws and regulations. To create clean and accountable work situation, the Company prepares and applies a system that arranges handling and settlement of violation reporting of the Company's employee in a Violation Reporting System (Whistleblowing System) that was established based on Directors' Decree Number: 121/Kep-Dir/VI/2014 dated 5 June 2014 on Guidelines of Violation Reporting System (Whistleblowing System).

The Violation Reporting System (Whistleblowing System) is a system that can be the media for the witness of the whistleblower to submit information regarding violation action that is indicated to occur in a company based on evidences that are accountable and good deed for the Company's interests. The purposes of a whistle blowing system are:

1. To guarantee the implementation of an effective violation reporting settlement mechanism.
2. To create conducive climate by strengthening monitoring environment and encouraging reporting on matters that can adverse financially and non-financially, including matters that can damage the Company's image in order to maintain and protect the Company's assets/interests.
3. To facilitate the management in handling fast and effectively the settlement of violation reports internally or externally through legal channel (if deemed necessary), protecting the confidentiality of the whistleblower's identity, and keeping the confidentiality and safety of the information.
4. To build policies and infrastructures to protect the whistleblower from retaliation of internal or external parties.
5. To reduce potential loss that may happen due to violation through early detection.
6. To increase the Company's reputation.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

7. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Yang termasuk di dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:
1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar kode etik Perusahaan.
3. Melanggar prinsip akuntasi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Komitmen Perum Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Perum Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan WBS dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Perum Jamkrindo juga memiliki komitmen membuat kebijakan untuk melindungi pelapor. Dalam kebijakan WBS menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada dibawah Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Pengawas ikut melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas atas pelaksanaan sistem tersebut.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

1. Semua pelanggaran yang dilaporkan dan diversifikasi ditangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.
3. Tim pengelola WBS harus mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas selaku penanggung jawab pemantauan sistem pelaporan pelanggaran.

7. As one of the efforts in disclosing various problems in the Company that are not in accordance with ethical standards applicable in the Company.

Included in the violation activity are as follows:

1. Violation of laws and regulations.
2. Violation of the company's code of ethics
3. Violation of generally accepted accounting principles
4. Violation of the Company's operational policies and procedures, or other policies, procedures, regulations deemed necessary by the Company.
5. Other fraudulent acts deemed necessary by the Company.
6. Other fraudulent acts that may result in financial or non-financial loss.
7. Acts that endanger work safety.

Commitment of Perum Jamkrindo and the Employees

All employees of Perum Jamkrindo are committed to practice WBS in order to implement the violation reporting system. Employees are also required to actively participate in reporting if there is any violation. Perum Jamkrindo also has commitment to prepare policies to protect the whistleblower. WBS policies state clearly that the whistleblower will receive protection from the company against harmful treatment. Whistleblowing system is under the Directors, particularly the President Director. Board of Supervisors also monitor the adequacy and effectiveness of the system implementation.

Mechanism of Violation Reporting Submission

1. All violations reported and diversification are handled well.
2. Repeating and systemic violation is reported to the relevant executive who has authority to make improvement.
3. WBS management team must obtain reporting access directly to the President Director with copies to the Head of Board of Supervisors as the responsible person in the monitoring of the violation reporting system.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

4. Mekanisme pelaporan pelanggaran:
   a. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Karyawan maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama. Penangan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim pengelola WBS.
   b. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Personil Tim Pengelola WBS maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh direksi, dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   e. Dalam hal pelanggaran dilakukan Anggota Dewan Pengawas, Organ Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Karyawan tidak dapat diselesaikan secara internal, apabila dipandang perlu, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang seperti polisi, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), atau penyidik.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah pemenuhan hak dan rasa aman kepada pelapor dan atau keluarga pelapor terkait dengan kemungkinan ancaman/tindakan yang dihadapinya akibat penyampaian/pengungkapan laporan pelanggaran. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan azas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di perusahaan.

Perlindungan yang Diberikan oleh Perusahaan

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya
2. Menjamin perlindungan segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun

4. Violation reporting mechanism:
   a. If the violation is conducted by Employee, then the violation report should be submitted directly to the President Director. Further handling on this violation report is done by WBS management team.
   b. If the violation is conducted by personnel of WBS Management Team, then the violation report should be submitted to the President Director. Further handling of such violation report is done by the Directors and if an investigation is necessary, independent investigator/external auditor may be used.
   c. If the violation is conducted by Member of Directors, then the violation report should be submitted to the Board of Supervisors. Further handling of such violation report is done by the Directors and if an investigation is necessary, independent investigator/external auditor may be used.
   d. If the violation is conducted by Member of Board of Supervisors, then the violation report should be submitted to the President Director. Further handling of such violation report is done by the Directors and if an investigation is necessary, independent investigator/external auditor may be used.
   e. If the violation done by Member of Board of Supervisors, Organs of Board of Supervisors, Member of Directors, and Employee cannot be settled internally, if deemed necessary, then the violation report can be given to law enforcement such as the police, attorney, corruption eradication commission (KPK), or investigators.

Protection For Whistleblower

Protection to whistleblower of violation action principally is fulfillment of rights and the feeling secure to the whistleblower and or the whistleblower family related to the possibility of threats/actions to deal with because of the submission/disclosure of the violation report. Protection is given by paying attention to the confidentiality principle and applicable relevant provisions in the Company.

Protection Given by the Company

1. Whistle blower's identity is guaranteed its confidentiality.
2. Guarantee protection of all types of threats, intimidation or unpleasant actions from any parties as long as the

Whistleblowing System
Whistleblowing System

selama pelapor menjaga kerahasiaannya pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yaitu:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan;
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
   d. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung;
   e. Tindakan fisik seperti pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   f. Intimidasi, pemaksaan atau menjadi korban;
   g. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record)*.

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:
1. Beriktikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas;
2. Informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan adalah yang telah terjadi dan dapat dipercaya;
3. Hal-hal yang terjadi sesuai dengan inforamsi dan atau pelanggaran yang disampaikan/dilaporkan dan dapat dipercaya.

Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terbukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor ternyata palsu/ fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang.

Mekanisme Penanganan Pengaduan

1. Tim pengelola WBS menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima.
2. Mengindentifikasi indikasi awal atas laporan pengaduan pelanggaran yang diterima agar dapat mengetahui perlu tidaknya proses tindak lanjut.
3. Melakukan telaah (verifikasi) terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.
4. Dari hasil verifikasi tersebut maka Direktur Utama menetapkan rekomendasi perlu tidaknya investigasi oleh Tim Pengelola WBS.
5. Apabila diperlukan proses tidak lanjut maka Direktur Utama memberikan perintah kepada Tim Pengelola WBS agar melaksanakan investigasi terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya.

whistleblower maintain the confidentiality of the violation reported to any parties.
3. Give protection to adverse actions, which are:
   a. Unfair termination;
   b. Pending promotion or demotion of position;
   c. Pending periodical salary and or allowance raise;
   d. Imposing of sanctions either directly or indirectly;
   e. Physical actions such as harassment or discrimination in any forms;
   f. Intimidation, coercion, or victimization;
   g. Adverse record in personal file record;

Protection to whistleblower is given if the whistleblower submits disclosure by meeting the following criteria:

1. Having good faith based on moral and ethical drive as well as not expecting any material return and or popularity;
2. Information and or violation submitted is about what already happened and can be trusted;
3. What happened is in accordance with the information and or violation submitted/reported and can be trusted;

Protection provision to the whistleblower can be rejected or stopped if proven that the whistleblower does not fulfill the obligation in keeping the confidentiality of his/her identity and report, and if in the future, it is proven that the violation submitted by the whistleblower is fake/slander or has deviation purpose.

Complaint Handling Mechanism

1. WBS management team receives and screens the violation complaint report received.
2. Identifying early indication on the violation complaint report received in order to know whether or not follow-up process is needed.
3. Verifying the complaint and reporting the result to the President Director.
4. From the verification result, the President Director sets recommendation of whether investigation is necessary or not by WBS Management Team.
5. If follow-up process is necessary, the President Director gives instruction to WBS Management Team to conduct investigation to the complaint and report the result.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

6. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, apabila tidak terbukti maka proses investigasi dihentikan dan laporan pengaduan ditutup, sebaiknya, bila pengaduan terbukti kebenarannya maka Direktur Utama mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Tim pengelola WBS mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya dan memberikan sanksi apabila laporan pelanggaran terbukti tidak benar/palsu.
8. Tim Pengelola WBS membuat laporan tindaklanjut atas laporan pengaduan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
9. Tim Pengelola WBS mendokumentasi seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman, dan rahasia.

6. Based on the investigation conducted, if it is nor proven, then the investigation process will stop, vice versa, if the complaint is proven true, the President Director will impose sanctions in accordance with the applicable provisions or forward it to the investigator for further process in accordance with the applicable provisions and regulations.
7. WBS Management Team proposes to the President Director to give reward to the whistleblower due to the violation report is proven true and impose sanction if the violation report is proven untrue/fake.
8. WBS Management Team prepares follow-up report of the complaint report to the President Director and Board of Supervisors.
9. WBS Management Team documented the whole violation management process in a neat, safe, and confidential manner.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Party Managing Complaint

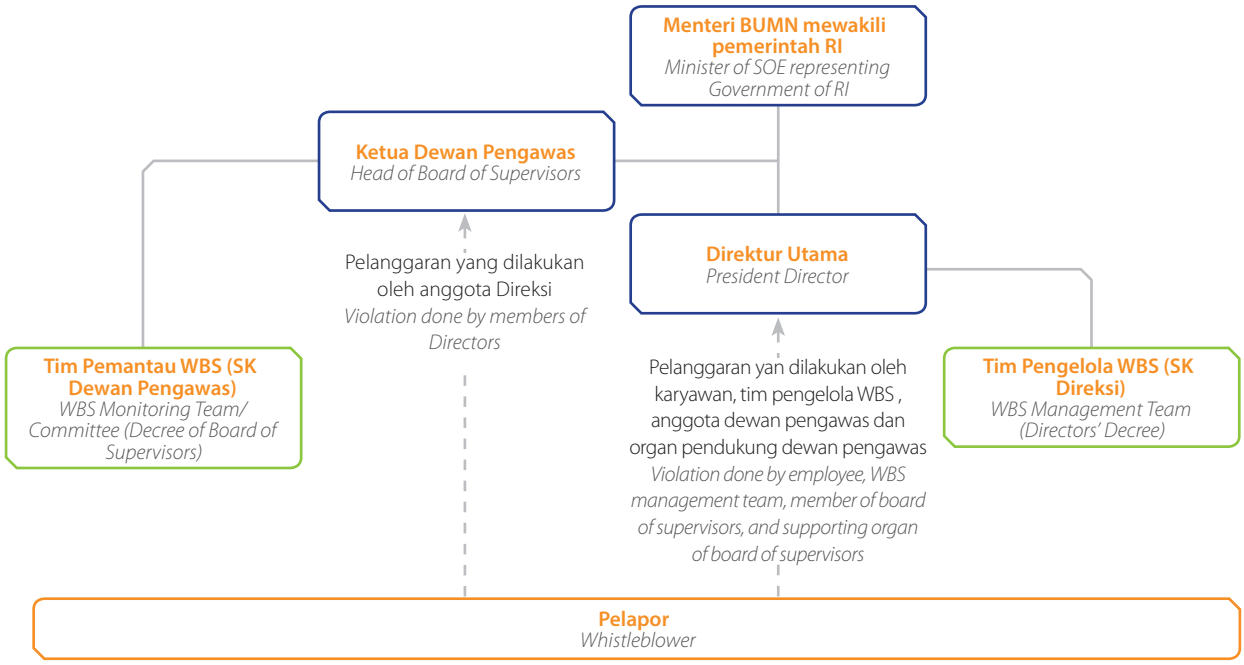

Alamat:
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo Lt.1
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Telp. +6221 6540335
Fax. +6221 6540344, 6540348
Email: timpengelolaWBS.bod@jamkrindo.com dan timpengelolaWBS.boc@jamkrindo.com

Address:
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo Lt.1
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Tel. +6221 6540335
Fax. +6221 6540344, 6540348
Email: timpengelolaWBS.bod@jamkrindo.com dan timpengelolaWBS.boc@jamkrindo.com

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Proses Penanganan dan Data Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Tahun 2016

Dalam rangka mengelola pelaksanaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan, Perum Jamkrindo membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) sebagai berikut:

1. Tugas:
   a. Mengelola Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
   b. Mengkoordinasikan penanganan tindaklanjut atas penerimaan pelaporan pelanggaran, menyeleksi dan memproses laporan pelanggaran tanpa membuka identitas pelapor.
   c. Melakukan investigasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
   d. Menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Direktur Utama guna mendapat keputusan.
   e. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait.
   f. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
   g. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap keefektifan pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

2. Tanggungjawab:
   a. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
   b. Memberikan usulan pengelolaan laporan pelanggaran kepada Direktur Utama.
   c. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangannya.
   d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistel Blowing System*).

Selama tahun 2016, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang dilaporkan kepada Tim Pengelola WBS baik melalui *email*, kotak surat WBS maupun surat resmi yang diantar langsung atau melalui pos.

Handling Process and Management Data of Whistleblowing 2016

In order to manage the implementation of whistle blowing in the Company, Perum Jamkrindo forms Violation Reporting Management Team (Whistle Blowing System) based on Directors' Decree Number: 33/Kep-Dir/III/2015 dated 11 March 2015. Duties and responsibilities of the Violation Reporting Management Team (Whistle Blowing System) are as follows:

1. Duties:
   a. Managing the Implementation of Violation Reporting (Whistle Blowing System);
   b. Coordinating follow-up handling over the violation report received, selecting and processing the violation report without disclosing the whistleblower's identity;
   c. Investigating the substance of the violation report, to seek and gather necessary evidences to ensure that violation does take place;
   d. Submitting sanction recommendation on violation done to the President Director in order to obtain decision;
   e. Coordinating protection provision to the whistleblower with the relevant unit.
   f. Monitoring the settlement handling on report received.
   g. Evaluating and making corrective actions on the effectiveness of the implementation of Violation Reporting (Whistle Blowing System).

2. Responsibilities:
   a. Monitoring the whistleblower protection program in accordance with the Company's policies, especially aspect of confidentiality and security guarantee of the whistleblower.
   b. Giving suggestions of whistle blowing system to the President Director.
   c. Determining follow-up on the report, especially report in which the follow-up decision is in its authority.
   d. Conducting other action necessary in order to implement Whistle Blowing System.

Throughout 2016, there was no violation report submitted to WBS Management Team either through email, WBS mailbox, or official letter delivered directly or by post.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi
Diversity of The Composition of the Board of Supervisors and Directors

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menegah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta *gender* dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola Perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

The business world, particularly guarantee sector, always experiences dynamic development. Furthermore, this business is one of the important sectors in encouraging the national economic growth with the target market of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives. On that basis, various competencies, expertise, and experience in the Company's management level, especially on the Board of Supervisors and Directors of the Company, are always required to meet the business challenges with its strategic policies.

The Company considers that diversity in the composition is highly necessary, even though the relevant laws and regulations have not been regulated. Diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors comprising academic qualifications, expertise, experience, and gender can provide a variety of perspectives related to the Company's management strategy to be better and more qualified.

Therefore, the implementation of corporate governance is designed to create a climate that encourages concrete participation of all stakeholders as well as the diversity in the composition of the Board of Supervisors and Directors. This diversity is manifested through establishing composition of Board of Supervisors and Directors that meet the various aspects required either in terms of academic qualifications, skills, age, and on the basis of anti-discrimination principles. Below is the diversity of composition of each member of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Kualifikasi Akademik** *Academic Qualifications*	**Keahlian** *Expertise*	**Usia** *Age*	**Jenis Kelamin** *Gender*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*					
Braman Setyo	Ketua *Head*	Magister Ilmu Administrasi *Master of Administration Science*	Manajemen dan Administrasi *Management and Administration*	59	Laki-laki *Male*
Nasarudin Umar	Anggota *Member*	Doktor *Doctorate*	Al Qur'an dan Syariat Islam *Al Qur'an and Islam Shari'a*	58	Laki-laki *Male*
Subandriyo	Anggota *Member*	Sarjana Pertanian *Bachelor of Agriculture*	Manajemen dan Pertanian *Management and Agriculture*	61	Laki-laki *Male*

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi
Diversity of The Composition of the Board of Supervisors and Directors

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Kualifikasi Akademik** *Academic Qualifications*	**Keahlian** *Expertise*	**Usia** *Age*	**Jenis Kelamin** *Gender*
Dahlan Siamat	Anggota *Member*	Magister Manajemen Keuangan *Master of Finance Management*	Manajemen Keuangan *Finance Management*	63	Laki-laki *Male*
Noor Ida Khomsiyati	Anggota *Member*	Magister Manajemen *Master of Management*	Manajemen SDM *HR Management*	46	Perempuan *Female*
Ony Suprihartono	Anggota *Member*	Magister Manajemen *Master of Management*	Manajemen *Management*	47	Laki-laki *Male*
Direksi *Directors*					
Diding S. Anwar	Direktur Utama *President Director*	Doktor Manajemen Pendidikan *Doctorate in Education Management*	Manajemen dan Pendidikan *Management and Education*	63	Laki-laki *Male*
Bakti Prasetyo	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Guarantee Business*	Magister Manajemen *Master of Management*	Manajemen *Management*	59	Laki-laki *Male*
R. Sophia Alizsa	Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operational and Network*	Magister Manajemen *Master of Management*	Manajemen *Management*	59	Perempuan *Female*
Nanang Waskito	Direktur MSDM, Umum Dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	Magister Manajemen Agribisnis *Master of Agribusiness Management*	Manajemen *dan Agribisnis Management and Agribusiness*	58	Laki-laki *Male*
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment, and Risk Management*	Master of Science *Master of Science*	Ekonomi dan Manajemen *Economic and Management*	58	Laki-laki *Male*

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrators' Wealth Report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

Basic Principles of State Administrators' Wealth Report

As an SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is required to comply with binding laws and legislations. One form of laws and regulations that is based on the spirit of eradicating corruption and internal irregularities is the obligation of State Administrator's Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Administrator's Wealth that is stated in LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Administrator's Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to conduct measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. Furthermore, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every organizer must report and announce his/her Assets before and after taking office and be willing to be inspected of his/her assets before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 Article 2 (7) and its elucidation, it is described that other officials with strategic functions in relation to state administration including Board of Commissioners, Directors, and other structural officials at State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The examination of LHKPN submitted to KPK aims to realize State Administrators who adhere the general principles of state officials who are free from corruption, collusion, and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Administrator is required to report his/her wealth through LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that KPK can analyze, evaluate, and assess all Wealth reported in a correct, prompt, precise, accurate, and responsible.

Legal Basis and Regulations in Applying LHKPN in the Company

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory basis as the foundation of how to view LHKPN implementation within the Company. The legal basis are:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrators' Wealth Report

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

1. Law No. 28 of 1999 on Administering Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises and its amendments.
4. Decree of Secretary of Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2016

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2016.

LHKPN Transparency of Company Officials in 2016

Below is the transparency of LHKPN submission of Company officials in 2016.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perum Jamkrindo Tahun 2016

Disclosure of LHKPN Submission of Perum Jamkrindo Officials in 2016

Pejabat *Officials*	**Jumlah Wajib Lapor** *Number of Mandatory Report*	**Jumlah yang Telah Melaporkan** *Number of Submitted Report*	
		Jumlah *Total*	**%**
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	5	5	100,00%
Direksi *Directors*	5	5	100,00%
Organ Pendukung Dewan Pengawas *Supporting Organs of the Board of Supervisors*	-	-	-
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi *Manager or Officials of One Level Below Directors*	89	89	100,00%
Jumlah *Total*	99	99	100,00%

Perpajakan
Taxation

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan pajak yang berlaku sebagai bentuk kontribusi nyata serta menjadi kewajiban terhadap negara. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Total kewajiban pajak Perum Jamkrindo di tahun 2016 sebesar Rp186.487.875.971, yang terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar Rp174.614.140.685 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp11.472.032.466. Perusahaan telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp401.702.820.

The Company continues to comply with the applicable tax rules as a form of actual contribution as well as an obligation to the state. This is in line with the Government spirit to improve development through the optimization of tax income.

Total tax payable of Perum Jamkrindo in 2016 was IDR186,487,875,971 consisting of Income Tax in 2016 of IDR174,614,140,685 and Value Added Tax of IDR11,472,032,466. The Company has fulfilled the obligation to pay Land and Building Tax (PBB) according to the Tax Payable Notification Letter (SPPT) received in 2016 of IDR401,702,820.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Penjaminan Syariah yang diberikan Perusahaan, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan mengenai syariah, Perusahaan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Direksi No. 98/Kep-Dir/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

In order to optimize the monitoring function of the Sharia Guarantee granted by the Company, and to comply with the provisions of the sharia regulations, the Company has established and appointed the Sharia Supervisory Board based on Directors' Decree No. 98/Kep-Dir/VII/2013 dated 24 July 2013 on Appointment of Sharia Supervisory Board of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia.

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Selain melegalisir pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, keputusan Direksi tersebut mencakup uraian tentang tugas dan tanggung jawab.

Guidelines for Duty Implementation

The implementation of Sharia Supervisory Board's duties is based on Directors' Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016 and Directors' Decree No. 124/Kep-Dir/VII/2016 dated 14 October 2016 on Appointment of Sharia Supervisory Board of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia. In addition to legalizing the appointment of Sharia Supervisory Board, the Directors' decree includes a description of the duties and responsibilities.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Composition of Membership of the Sharia Supervisory Board

Membership structure of the Sharia Supervisory Board of the Company throughout 2016 is as follows:

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo Tahun 2016

Structure of the Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo Year 2016

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Start of Services*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Services*
Ketua *Head*	Hasanudin	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016. *Director's Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.*	1 Juli 2016 *1 July 2016*	30 Juni 2019 *30 June 2019*
Anggota *Member*	Muhammad Syakir Sula	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016. *Director's Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.*	1 Juli 2016 *1 July 2016*	30 Juni 2019 *30 June 2019*
Anggota *Member*	Gunawan Yasni	Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016. *Director's Decree No. 124/Kep-Dir/X/2016 dated 14 October 2016.*	1 Juli 2016 *1 July 2016*	30 November 2016 *30 November 2016*

**Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan.*

** Brief profiles of each member of the Sharia Supervisory Board can be seen in the Sharia Supervisory Board Profile, in the Company Profile chapter.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atas semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board are as follows:

1. Conduct monitoring and ensure compliance with Sharia principles over all products, operations, and policies of the Company.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

2. Memberikan nasehat, saran atau pendapat kepada Direksi mengenai kesesuaian semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memastikan semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
4. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan yang berkaitan dengan produk syariah pada Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan tembusan kepada Direksi.
5. Menghadiri pertemuan yang disepakati antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan di luar jadwal yang sudah ditentukan apabila diminta oleh Direksi.
6. Memberikan dukungan secara maksimal demi tercapainya kemajuan Perusahaan khususnya Unit Kerja Penjaminan Syariah.

2. Provide advice, suggestion, or opinion to the Directors on the conformity of all products, operations, and policies of the Company with sharia principles.
3. Ensure that all products, operations and policies of the Company are in compliance with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN MUI).
4. Report business activities and developments related to sharia products to the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI), at least once in 1 (one) year, and provide a copy to the Directors.
5. Attend an agreed meeting between the Sharia Supervisory Board and Directors at least once in 1 (one) month according to the agreed timetable, and at any time if required outside the specified schedule when requested by the Directors.
6. Provide maximum support for the achievement of the Company's progress, especially the Sharia Guarantee Work Unit.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Di sepanjang tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah melakukan 1 (satu) kali rapat bersama-sama dengan Direksi dan manajemen Penjaminan Syariah Perusahaan. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada rapat.

Meetings of Sharia Supervisory Board

Throughout 2016, the Sharia Supervisory Board convened 1 (one) joint meeting with the Company's Directors and management of Sharia Guarantee. Below are the minutes of meetings and attendance level of the Sharia Supervisory Board in the meetings.

Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Minutes of Meetings of Sharia Supervisory Board

Tanggal *Date*	**Tempat** *Place*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*
10 Maret 2016 *10 March 2016*	Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Head Office of Perum Jamkrindo*	• Review Perjanjian Kerjasama Baru dengan *Multifinance* dan Koperasi. • Laporan Rencana Pengalihan *(Spin Off)* Penjaminan Syariah. • Laporan Rencana Pembentukan *Sharia Office Channeling.* • *Review New Cooperation Agreement with Multifinance and Cooperatives.* • *Report of Spin Off Plan of Sharia Guarantee.* • *Report of the Plan to Establish Sharia Office Channeling.*	Hasanudin (Ketua DPS/ *Head of DPS*) M. Syakir Sula (Anggota DPS/ *Member of DPS*) Gunawan Yasni (Anggota DPS/ *Member of DPS*) Bakti Prasetyo (Direktur Bisnis Penjaminan/ *Director of Guarantee Business*) Nanang Waskito (Direktur MSDM/ *Director of HRM*) R. Sophia Alizsa (Direktur Operasional dan Jaringan/*Director of Operations and Network*) Ceriandri Widuri (Kadiv. Penjaminan Syariah/ *Division Head of Sharia Guarantee*) Diana Mayawati (Kadiv. Akuntansi dan PKBL/ *Division Head of Accounting and PKBL*) Erna Zubaida (Kadiv. Manajemen Risiko/ *Division Head of Risk Management)* *Zulfikar (Pranata Utama/ Main Officer*) Agus Mirazul Fajar (Kabag. Bisnis Penjaminan Syariah/ *Section Head of Sharia Guarantee Business*) Alia Nur Fitri (Kabag. Investasi/ *Section Head of Investment*) Ahmad Sopyan (Plt. Ksie. Div. Penjaminan Syariah/ *Act. Section Head of Division of Sharia Guarantee)*

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada Rapat

Attendance of Sharia Supervisory Board in Meetings

Tanggal *Date*	**Dewan Pengawas Syariah** *Sharia Board of Supervisors*			**Alasan Ketidakhadiran** *Reason for Absence*
	Hasanudin	**Muhammad Syakir Sula**	**Gunawan Yasni**	
10 Maret 2016 *March 2016*	v	v	v	-

v = hadir / x = berhalangan hadir

v = present / x = not present

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of Sharia Supervisory Board in Meetings

Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*	**Jumlah Wajib Rapat** *Number of Mandatory Meetings*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**% Kehadiran** *% Attendance*
Hasanudin	1	1	100,00%
Muhammad Syakir Sula		1	100,00%
Gunawan Yasni		1	100,00%
Rata-rata *Average*			100,00%

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Kepada Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

To Sharia Supervisory Board, the Company gives remuneration as follows:

Uraian *Description*	**Ketua DPS** *Head of DPS*	**Anggota DPS** *Members of DPS*
Honorarium *Honorarium*	12.650.000	11.385.000
Tunjangan Hari Raya per tahun (1x Honorarium) *Holiday Allowances per year (1x Honorarium*	12.650.000	11.385.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia
LAYANAN
PENJAMINAN KREDIT
Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bases of The Implementation of Corporate Social Responsibility

Pembangunan berkelanjutan yang telah diinisiasi oleh berbagai negara transpirasi oleh keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara entitas usaha, pemegang saham/ pemilik modal dan pemangku kepentingan. Masing-masing dari elemen tersebut memiliki kepentingannya yang saling berbeda, yang tidak jarang justru mengalami benturan yang kemudian memunculkan keresahan dan ketidakstabilan sosial; yang dapat berdampak buruk terhadap semua pihak.

Sustainable development, which has been initiated in numerous country, is inspired by the desire of several parties concerning the balance among the business entity, shareholders, and stakeholders. Each element has their proper interest that often causes clash and further causes social concerns and instability; this can impact every parties negatively.

Entitas usaha, bersama-sama dengan regulator sebagai lokomotif yang memiliki peran besar dalam keseimbangan ini, didorong untuk mengambil porsi terdepan dalam melakukan perubahan. Pembangunan berkelanjutan kemudian menjadi sebuah bingkai berpikir dan bertindak bagi entitas usaha untuk dapat menciptakan keseimbangan antara pengelolaan usaha berbasis laba, kepentingan pemilik modal, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.

Business entity, along with the regulator as the driver with a big role in creating this balance, is pushed to be the first parties to create changes. Sustainable development then becomes a framework of thinking and decision making for the business entity to create balance among profit-based business management, shareholders' interest, and relationship with the stakeholders.

Sebagai Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki visi "Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional", Perum Jamkrindo

As a Public Company (Perum) with the vision of "To Be the Leading Credit Guarantee Cooperation that Supports National Economic Development", Perum Jamkrindo has the moral obligation to be

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bases of The Implementation of Corporate Social Responsibility

memiliki kewajiban moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan tersebut. Pengelolaan usaha yang sehat dan memiliki masa depan yang cerah, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Perum Jamkrindo bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Perum Jamkrindo untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

able to realize the balance. Healthy and sustainable business development, good corporate governance implementation based on discipline and accountability, human resource competency development and fulfillment of their rights, and Perum Jamkrindo development along with that of Indonesian people, certainly will strengthen the position of Perum Jamkrindo to realize its vision.

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Balance in Sustainable Development

Keseimbangan seperti yang tergambar pada bagan di atas dapat diwujudkan melalui komitmen Perum Jamkrindo dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap karyawan melalui Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

The balance as portrayed in the prevous graph can be realized through the commitment of Perum Jamkrindo in executing the Corporate Social Responsibility (CSR) in 4 (four) aspects:

1. Corporate Social Responsibility Relating to the Environment;
2. Corporate Social Responsibility to the Employee through Employment, Work Health and Safety.
3. Corporate Social Responsibility to the Community through social and community development and the implementation of Community Partnership and Development.
4. Corporate Social Responsibility to the Customers.

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bases of The Implementation of Corporate Social Responsibility

Landasan Hukum

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:
   a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016

Legal Foundation

The foundation of the Corporate Social Responsibility is based on several legal aspects:

1. Law No. Year of 2003 concerning SOE:
   a. Article number 2 states that one of the goals and objectives of founding SOE is to actively develop and support the economically weak businessmen, co-op, and community.
   b. Article number 88 states that SOE can spare parts of its net profit for the sake of developing small enterprises/ co-op and community development around the location of the SOE.
2. Law No. 32 Year of 1998 concerning Development and Support of Small Enterprises.
3. Law No. 20 Year of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprise.
4. Law No. 25 Year of 2007 concerning Capital Investment (article number 15(b)) that states, "Every capital investor is obligated to conduct corporate social responsibility. What is meant by corporate social responsibility is the responsibility of a capital-investing corporation to create harmonious and balanced relationship that adheres to the local environment, values, norms, and culture.
5. Law No. 1 Year of 1970 concerning Work Safety
6. Law No. 8 Year of 1999 concerning Customer Protection
7. Law No. 13 Year 0f 2003 concerning Employment
8. Law No. 28 Year of 1999 concerning transparent State Administration and free from corruption, collusion, and nepotism.
9. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year of 2001 concerning the changes of the law of the Republic of Indonesia No. 31 Year of 1999 concerning the eradication of corruption
10. Government Law No. 50 Year of 2012 concerning the Implementation of Work Health And Safety Management System
11. 11. Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.
12. Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises NO. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program of State Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, as lastly amended

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bases of The Implementation of Corporate Social Responsibility

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

14. ISO 26000
    Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:
    a. Tata kelola organisasi yang baik
    b. Penegakan hak asasi manusia
    c. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
    d. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
    e. Prosedur operasi yang wajar
    f. Tanggung jawab terhadap konsumen
    g. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat
15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP PERUM JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang salah satunya poinnya memuat tentang dukungan Perum Jamkrindo akan kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi), serta menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
16. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Sistem dan Prosedur, Manual Akuntansi dan *Software* Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.

by PER-03/MBU/12/2016 concerning the Amendment of the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises N0. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises.

13. Circular Letter of the Ministry of State Owned Enterprises No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23 2012 concerning the Stipulation of Accounting Guidelines for Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises.
14. ISO 26000
    Has been ratified by the Government in 2010 and has been made into Indonesian National Standard (SNI) in 2012) with 7 (seven) subjects:
    a. Good Organizational Management
    b. Implementation of Human Rights
    c. Humane and Just Employment Practice
    d. Impact of the Corporation Activity to the Environment
    e. Appropriate Operational Procedure
    f. Responsibility to the Customers
    g. Community Involvement and Development.
15. Joint Decision among the Board of Directors and Inspector of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP PEURM JAMKRINDO/XII/2012, dated December 13 2012 concerning the Code of Conduct, one of which states that Perum Jamkrindo supports the Government Decision in Developing the Micro, Small, and Medium Enterprises and Co-Op (SME and Co-op), and putting customer's satisfaction as the primary priority.
16. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2008 dated August 25 2008 concerning the Accounting System and Procedure, Accounting Manual, and Accounting Software for Partnership Program and Community Development Program of Perum Jamkrindo.

Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Practitioner of Corporate Social Responsibility Programs

Sesuai arahan dari Pemilik Modal, Kementerian BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perum Jamkrindo melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut, Perum Jamkrindo berkewajiban untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan menyelenggarakan PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen Perum Jamkrindo terhadap pembangunan keberlanjutan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perum Jamkrindo. Pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perum Jamkrindo. Dalam evaluasi program, Perum Jamkrindo melakukan pengukuran atas efektifitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi Perum Jamkrindo sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perum Jamkrindo dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumen.

Based on the direction of the shareholders, the Ministry of State Owned Enterprise, that is stated in the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprise No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State Owned Enterprise with Small Enterprises and Community Development Program as it was amended by PER-03/MBU/12/2016 concerning the Amendment of the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprise No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises, Perum Jamkrindo is conducting its Corporate Social Responsibility through Partnership Program and Community Development (PCDP). Based on the regulation, Perum Jamkrindo is obligated to supply the budget from the Government and conduct the PCDP which is a part of the whole commitment of Perum Jamkrindo for Sustainable Development.

The Corporate Social Responsibility Programs are also done from the planning stage to evaluation. Program planning should be made based on the real need plans of the stakeholders considering the ability of Perum Jamkrindo. The programs are conducted with the community while coordinating with the local Government (Pemda), Non-Governmental Organization (NGO), mass organization and higher education institution, as well as the other related institution, while considering the local social, cultural, and geographic condition and the operational interest of Perum Jamkrindo. In the evaluation of the program, Perum Jamkrindo assesses the effectivity of the program conducted so it can give real advantages and add value, both for Perum Jamkrindo and for the targeted stakeholders.

Besides, relating to the rights of stakeholders, the Corporate Social Responsibility dimension development is conducted in several aspects that covers environment; employment, work health and safety; social community; and the aspect of products, services, and customers.

Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Practitioner of Corporate Social Responsibility Programs

Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Perum Jamkrindo, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini.

Manager of Corporate Social Responsibility Programs

In order to fulfill the Corporate Social Responsibility programs thoroughly in the scope of Perum Jamkrindo, the implementation of the overall program is divided into several Unit/Division with their own responsibility based on the program category, as pictured below:

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja *Employment, Work Health and Safety*	**Divisi Manajemen SDM, dan Divisi Umum** *Human Resource Management Division and General Affair Division*
Komitmen Terhadap Lingkungan Hidup *Commitment to the Living Environment*	**Divisi Umum** *General Affair Division*
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan *Social and Community Development*	**Divisi Akuntansi &PKBL (Unit PKBL)** *Accounting & PCDP Division (PCDP Unit)*
Tanggung Jawab Terhadap Produk, Layanan dan Pelanggan *Responsibility to Products, Services, and Customers*	**Divisi Perencanaan dan Pengembangan** *Planning and Development Division*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Concerning The Environment

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara entitas usaha, masyarakat dan pemerintah, termasuk korporasi seperti Perum Jamkrindo. Walaupun bidang usaha Perusahaan adalah penjaminan kredit, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Bina Lingkungan, seperti pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, saluran air, pengadaan gerobak dan tong sampah, maupun pelestarian alam dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan Perum Jamkrindo melalui kebijakan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, antara lain penggunaan kertas, energi, air, pengurangan emisi kendaraan operasional, dan penanganan limbah.

Sebagai catatan, data untuk penggunaan sumber daya alam merupakan data dari Kantor Pusat, dan belum mencakup data dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun Unit Pelayanan di daerah. Perum Jamkrindo berkomitmen untuk dapat menyajikan data yang lebih lengkap di tahun mendatang, meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun Unit Pelayanan di daerah.

Penggunaan Kertas

Dalam penggunaan kertas, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau *email* dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.

Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas.

Pada tahun 2016, jumlah penggunaan kertas Perum Jamkrindo mencapai 834 rim, meningkat jika dibandingkan penggunaan tahun 2015 yang sebanyak 630 rim. Kenaikan ini terutama karena adanya penambahan jumlah unit kerja di Perusahaan. Walau jumlah penggunaan kertas naik, namun rasio penggunaan kertas per pegawai mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rasio penggunaan kertas adalah 0,93 rim per pegawai, turun 9,71%

Concern relating to the environment is a joint responsibility among the business entity, community, and the government, including corporation like Perum Jamkrindo. Even though the business scope of the Corporate is credit guarantee, Perum Jamkrindo is committed to have concern on the environment.

Concern relating to the environment can be realized by Community Development Programs, such as building toilet facilities, providing clean water, waterways, procuring garbage bins and carts, and nature conservation program by planting trees. Besides, Perum Jamkrindo also applies its concern on the environment through the policy relating to the daily operational activities, such as the usage of papers, energy, water, reduction of emission of operational vehicle, and waste management.

It should be noted that the data for natural resource usage is the data from the Head Office, and it is not included the data of Regional Office, Branch Office, and Service Unit in remote areas. Perum Jamkrindo is committed to be able to present more detailed and completed data in the upcoming years, covering the Head Office, Regional Office, Branch Office, as well as Service Unit in remote areas.

Paper Usage

In terms of paper usage, Perum Jamkrindo has the policy of reducing the usage of paper by communicating mainly through email to convey an information. Paper usage reduction is also done by using used paper to make a draft of a letter, or if possible by printing a document on both sides of the paper.

Thorough document checking before printing is also done to avoid mistakes. Therefore, reprinting jobs that is wasting paper can be avoided. Reducing the usage of paper is important to be done as Perum Jamkrindo realizes that the usage of papers relates to logging and exploiting trees as a raw material for paper.

In 2016, the paper usage in Perum Jamkrindo reached the number of 835 reams of papers, this number is increased compared to the paper usage of Perum Jamkrindo in 2015 which was 630 reams of paper. This increase is caused by additional working units in the Corporate. However, even though the amount of paper used was increasing, the ratio of paper usage per employee was decreasing. In 2016, the ration of paper usage is 0.93 reams

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Concerning The Environment

apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 1,03 rim per pegawai. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut.

Penggunaan Energi Listrik

Untuk penggunaan energi listrik, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan.

Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas. Hal ini terkait dengan keterbasan bahan baku untuk menggerakkan pembangkit listrik, yakni bahan bakar minyak. Total penggunaan energi listrik pada tahun 2016 adalah 2.278 kWh, meningkat 7,96% apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2.110 kWh. Seperti ulasan penggunaan kertas di atas, kenaikan listrik terjadi karena terdapat lantai perkantoran yang telah selesai direnovasi dan telah digunakan kembali untuk ruang kerja sehingga ada penambahan peralatan elektronik, penggunaan lampu dan AC.

Meski dari sisi jumlah penggunaan mengalami kenaikan, akan tetapi dari rasio penggunaan listrik per karyawan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2016, rasio penggunaan energi listrik per karyawan adalah 2,53 kwh per karyawan, turun 26,67% dibanding tahun 2015 dengan rasio penggunaan energi listrik sebesar 3,45 kwh per karyawan.

Penggunaan Air

Untuk penggunaan air, Perum Jamkrindo memanfaatkan air dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Pada tahun 2016, penggunaan air mencapai 13.690 meter kubik, naik 3,37% dibanding tahun 2015 sebanyak 13.242 meter kubik. Kenaikan terjadi karena terdapat lantai perkantoran yang telah selesai direnovasi dan telah digunakan kembali untuk ruang kerja sehingga ada penambahan penggunaan air.

Upaya Perum Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi

per employee, and it was decreased by 9.71% compared to the paper usage of 1.03 reams per employee in 2015. Paper wastage is handed over to a third party for the sake of recycle. In the daily operational activities, the Corporate does not use the recycled paper.

Electircal Energy Usage

For electrical energy usage, Perum Jamkrindo applies the policy to reduce the usage of electrical energy, such as replacing the lamps in the office area with energy saving lamps, and making the working hour to be efficient by reducing overtime works. The corporate also ensures that all electronic devices are turned off when the employees are finished with their works and they are leaving the office.

Reducing the usage of electricity is crucial to be done as Perum Jamkrindo is aware that the availability of electricity in Indonesia is still limited. It is caused due to the limited number of raw material to operate the power plant, i.e. the fuel. The total of energy usage in 2016 was 2,278 kWh, it is increased by 7.96% compared to the total energy usage in 2015 which was only 2,110 kWh. In line with the cause of the increased paper usage, the increased usage of electricity is also caused by the additional working units, which is an additional office level that has been renovated and used for daily operational activities again so there are some additional electronic devices, lamp usage, as well as air conditioner.

Even though the total amount of electricity used was increasing, the ration of electricity usage per employees were decreasing significantly. In 2016, the ratio of electricity usage per employees was 2.53 kWh per employee, this number was decreased by 26.67% compared to the electricity usage per employees in 2015 which was 3.45 kWh per employee.

Water Usage

For water usage, Perum Jamkrindo utilizes water from PDAM (Regional Water Utility Company) and does not used groundwater. In 2016, the water usage reaches the number of 13,690 m3, it was decreased by 3.37% compared to the water usage in 2015 which was 13,242 m3. The increased usage was caused by the additional level of office that was renovated and now used as an office so there was some additional usage of water.

The effort of Perum Jamkrindo to save water is by making the working hour to be efficient by reducing overtime works,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Concerning The Environment

lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Upaya penghematan itu membuahkan hasil dengan turunnya rasio penggunaan air per karyawan. Pada tahun 2016, rasio penggunaan air per karyawan adalah 15,19 meter kubik, turun 29,9% apabila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 21,67 meter kubik per karyawan.

Penanganan Emisi

Kepedulian Perum Jamkrindo terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan upaya mengurangi emisi udara melalui peremajaan mobil operasional. Pada tahun 2015, Kantor Pusat memiliki 55 unit mobil operasional karena ada penambahan sebanyak 8 unit dari jumlah sebelumnya 47 unit pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Perum Jamkrindo menambah satu unit mobil operasional baru (mobil kas) dan menjual/melelang sebanyak 17 unit mobil operasional lama sehingga total mobil operasional per 31 Desember 2016 adalah 39 unit. Pengurangan emisi udara juga dilakukan Perum Jamkrindo dengan melakukan penyewaaan mobil keluaran terbaru dari pihak ketiga untuk Direksi dan Kepala Divisi, serta melakukan penyewaan mobil sesuai dengan keperluan (insidental).

Upaya pengurangan emisi lain yang dilakukan Perum Jamkrindo berkaitan dengan emisi bahan perusak ozon (BPO). Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengganti *refrigeran* (zat pendingin) AC yang ramah lingkungan. Pada tahun 2016, Perum Jamkrindo mengganti 3 dari 21 buah AC yang semula menggunakan *refrigeran* yang tidak ramah lingkungan menjadi *refrigeran* ramah lingkungan (dari *refrigeran* R-22 menjadi R-32).

Pengurangan emisi bahan perusak ozon patut didukung karena menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi. Kondisi tersebut memiliki berrbagai dampak pada kesehatan tubuh manusia. Pada tahun 2017, WHO menyatakan bahwa 90% kanker kulit terjadi karena faktor sinar matahari.

as routinely checking the water installation and applying maintenance if necessary. The effort to reduce water resulted in the reduced usage of water per employee. In 2016, the ratio of water usage per employee was 15.19 m3, it was decreased by 29.9% compared to the ratio of water usage per employee in 2015 that was 21.67 m3 per employee.

Emission Management

Perum Jamkrindo's concern toward the environment is also shown by reducing the air emission by renewing operational cars. In 2015, the Head Office possessed 55 units of operational cars as there were additional 8 units of cars from previous years, i.e. 47 units in 2014. In 2016, Perum Jamkrindo added one new unit of operational car (cash car) and sold 17 old operational cars, so the total number of operational cars per December 31, 2016 was 39 units. The reduction of emission is also done by Perum Jamkrindo by renting new cars from a third party for the Board of Directors and Division Head, and renting cars for ad-hoc (incidental) purposes.

Another effort to reduce emission that is done by Perum Jamkrindo is relating to the emission of Ozone Depleting Substances (ODS). As for the ODS, the Corporate is committed to replace the refrigerant (cooler substance) of the air conditioner to be environmentally friendly. In 2016, Perum Jamkrindo changed 3 out of 21 air conditioner that was using the environmentally unfriendly refrigerant to be using environmentally friendly refrigerant (from refrigerant R-22 to be R-32).

The reduction of emission of ozone depleting substances has to be supported as the ozone layer that is getting thinner causes solar ultraviolet radiation, especially the UV-B that might reach the surface of the Earth. This condition might causes numerous impacts to human health. In 2017, WHO states that 90% of skin cancer cases are caused by solar radiation.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Concerning The Environment

Penanganan Limbah

Dalam operasional sehari-hari, Perum Jamkrindo menghasilkan limbah berupa sampah dan limbah dari WC. Untuk penanganan sampah, Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah, selanjutnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir bekerjasama dengan dinas kebersihan. Adapun limbah dari WC, akan dilakukan penyedotan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau dinas kebersihan.

Kepatuhan

Upaya dan kesungguhan Perum Jamkrindo untuk kepedulian lingkungan, termasuk melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional keseharian, membuahkan hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain sepanjang tahun 2016. Hal itu tak lepas dari kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan lainnya selama menjalankan usaha.

Waste Management

In its daily operational activities, Perum Jamkrindo produces waste in the form of rubbish waste and toilet waste. For rubbish waste management, the Corporate has provided sufficient rubbish bins, and then the rubbish will be collected and dumped to the landfills, cooperating with the Waste Management Agency. As for the toilet waste, it will be dumped through cooperation with a third party of Waste Management Agency.

Compliance

The effort and commitment of Perum Jamkrindo for environmental concerns, including the policies relating to the daily operational activities, results in zero monetary fine or other sanction for the whole 2016 period. It is caused by the compliance of the Corporate to the Environmental Law and Other Regulation in performing its daily operational activities.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

Kehadiran Perum Jamkrindo di bidang penjaminan kredit tidak sekadar mencari profit. Lebih dari itu, Perusahaan memiliki tekad yang kuat agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi karyawan, manajemen, dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo meyakini bahwa semakin besar manfaat sosial dan kemasyarakatan yang diberikan oleh perusahaan, maka hal itu akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha di masa-masa mendatang.

Kepegawaian

Dalam menjalankan usaha, Perum Jamkrindo tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan. Selain itu, Perum Jamkrindo dan perusahaan pemasok, tidak mempekerjakan anak, serta tidak memberlakukan kerja paksa karena jam kerja pegawai mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Hingga 31 Desember 2016, Perum Jamkrindo memiliki karyawan sebanyak 901 orang, naik 47,46% apabila dibandingkan tahun 2015 dengan 611 orang karyawan. Sepanjang tahun 2016, Perum Jamkrindo merekrut 318 orang karyawan baru, sedangkan jumlah karyawan yang berhenti bekerja (*turnover*) sebanyak 22 orang.

Dari tahun ke tahun, tingkat *turnover* karyawan menunjukkan penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa Perum Jamkrindo memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja. Pada tahun 2016, tingkat *turnover* karyawan sebesar 2,4%, jauh menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,4% dan tahun 2014 sebesar 4,4%. Pada tahun 2016, penyebab *turnover* adalah mengundurkan diri sebanyak 7 orang, dan pensiun alami sebanyak 5 orang.

Walaupun tingkat *turnover* terus menurun, Perum Jamkrindo tetap berupaya untuk melakukan perbaikan agar persentase *turnover* bisa semakin kecil. Hal itu dilakukan dengan tiga cara, yakni memperbaiki sistem remunerasi karyawan, mempertimbangkan kondisi karyawan pada saat melakukan promosi dan mutasi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan *hard skill* maupun *soft skill*.

The existence of Perum Jamkrindo in credit guarantee service is not only to make profit. More than that, the Corporate has stronger desire that its existence should bring the biggest advantages for all stakeholders, including the employees, management, and community around the operational area of the Corporate. Thus, Perum Jamkrindo believes that the bigger social and community benefit it can give, the more positive impact it can give for the continuous sustainability of the business in the future.

Employment

In doing its business, Perum Jamkrindo complies with all law and regulation relating to employment. Thus, Perum Jamkrindo gives its highest concerns and commitment in terms of gender equality and working opportunity, training to develop employees' professionalism and worthy incentive system. Besides, Perum Jamkrindo and Supplier Company does not implement child labor and forced labor, as employees' working hour is based on the regulations.

Until December 31 2016, Perum Jamkrindo has 901 employees, increased by 47.46% compared to 2015 with 611 employees. Along 2016, Perum Jamkrindo recruits 318 new employees, and there were 22 turnover employees.

From year to year, the employee turnover rate has been decreasing. It shows that Perum Jamkrindo gives comfort to the employees in performing their job. In 2016, the employee turnover rate was 2.4%. This number has been significantly decreased from the turnover rate in 2015 which was 5.4% and 4.4% in 2014. In 2016, 7 employees resigned and 5 employees retired, these were the causes of the turnover.

Even though the turnover rate has been decreasing, Perum Jamkrindo is still struggling to conduct improvement so that the turnover rate can be smaller from time to time. The effort is done in three ways, i.e. improving the employee remuneration system, considering the employee's condition in terms of promotion and mutation, and giving the same opportunities for all employees to develop their hard skill and soft skill.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

Selain pegawai tetap, Perum Jamkrindo juga memiliki pegawai kontrak dan *outsource*. Hingga 31 Desember 2016, jumlah pegawai dengan status kontrak dan *outsource* tercatat sebanyak 615 orang, naik 94,62% apabila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 316 orang. Perbedaan status kepegawaian tersebut ikut menentukan tunjangan yang mereka peroleh selama bekerja di Perum Jamkrindo. Sementara itu, terkait dengan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap pegawai tetap dan kontrak, di 2016 mengalami kenaikan. Hal tersebut terkait dengan bertambahnya jumlah karyawan yang naik 47,46% apabila dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Jamkrindo membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, dengan semakin bertambahnya kebutuhan Perum Jamkrindo akan pegawai, seiring dengan persaingan yang semakin ketat.

Adapun peningkatan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap pegawai tetap dan kontrak, di 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Remunerasi dan Tunjangan serta Bonus Pegawai Tetap dan Kontrak

Besides full time employees, Perum Jamkrindo also recruits contractor employees and oursource employees. Up to December 21 2016, the amount of contractors and outsource employees reached the number of 615 employees, it is increased by 94.62% compared to the year of 2015 with 316 employees. The difference in the employment status also determines the incentive everyone receives while they work for Perum Jamkrindo. As for the remuneration, incentive, and bonus for fulltime and contractor employees, there was an increased amount in 2016. It is caused by the additional employees that was increased by 47.46% compared to the amount in 2015. It shows that Perum Jamkrindo is opening job vacancies as the needs of employees of Perum Jamkrindo is increasing, while the competition is increasing as well.

As for the increased remuneration, incentive, and bonus for fulltime and contractor employees in 2016 compared to 2015, the data is presented as follows:

Remuneration, Incentive, and Bonus for Fulltime and Contractor Employee:

Uraian *Description*	**2016** *(Rp) (IDR)*	**2015** *(Rp) (IDR)*
Gaji *Salary*	30.790.046.754	24.106.783.288
Kesejahteraan *Welfare*	52.481.221.802	38.064.167.873
Tunjangan Jabatan *Positional Allowance*	17.289.762.779	10.595.373.806
Tunjangan Kesehatan *Healthcare Allowance*	2.361.837.037	41.188.526
Tunjangan Transportasi *Transportation Allowance*	808.869.000	869.709.000
Tunjangan Perumahan *Housing Allowance*	2.322.000.000	1.982.900.000
Tunjangan Komunikasi *Communication Allowance*	827.258.318	592.713.950
Tunjangan Perusahaan *Company Allowance*	53.206.400	260.360.000
Tunjangan Wilayah *Regional Allowance*	6.360.512.403	4.156.926.813
Jumlah Remunerasi dan Tunjangan *Total of Remuneration and Allowances*	113.294.714.493	80.670.123.256
Bonus *Bonus*	13.871.396.270	10.205.960.021

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

Remunerasi dan Tunjangan Pegawai Tetap dan Kontrak 2013-2016
(dalam jutaan Rupiah)

Remuneration and Incentive of Fulltime and Contractor Employee 2013-2016
(in million Rupiah)

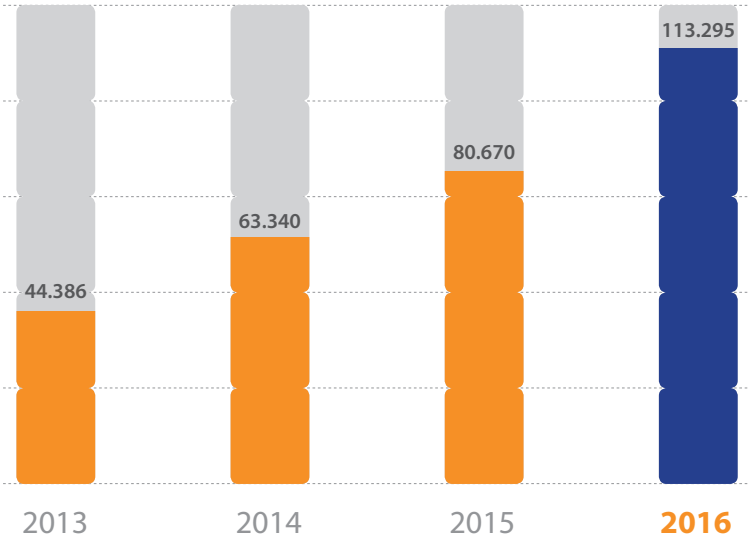

Bonus untuk Pegawai Tetap dan Kontrak 2013-2016
(dalam jutaan Rupiah)

Bonus for Fulltime and Contractor Employee 2013-2016
(in million Rupiah)

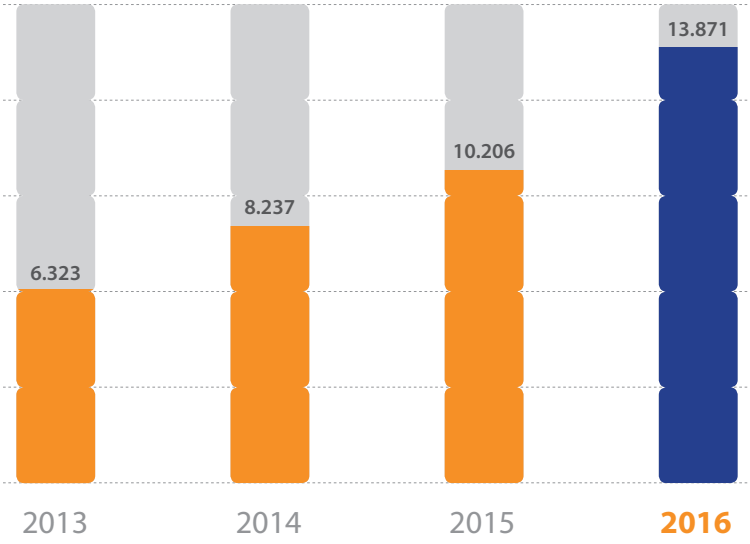

Imbalan Pasca Kerja

Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, Perum Jamkrindo senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan

Post-Working Incentives

As a responsible corporation, Perum Jamkrindo is always adhere to and comply with the regulation concerning employment. One of which is the fulfillment of employees' right concerning post-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

berkaitan dengan imbalan pascakerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Pada tahun 2016, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp6,22 miliar, naik 26,11% dibanding tahun 2015 sebesar Rp4,93 miliar. Adapun pembayaran untuk Premi Asuransi Pensiun pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp3,49 miliar, naik 58,87% apabila dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2,20 miliar.

Rasio Upah Standar

Ketaatan Perum Jamkrindo terhadap ketentuan ketenagakerjaan juga ditunjukkan dengan pembayaran upah karyawan baru yang jumlahnya jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimal yang diberikan Perum Jamkrindo untuk karyawan baru adalah sebesar Rp5.761.486 dan berlaku untuk semua wilayah operasi. Dalam memberikan upah, temasuk remunerasi, Perum Jamkrindo tidak membedakan berdasarkan *gender*, melainkan berpatokan pada kompetensi karyawan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selain terus berupaya menciptakan kenyamanan dalam bekerja, Perum Jamkrindo juga berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo bertekad untuk menekan angka kecelakaan mencapai nol (*zero accident*). Upaya yang dilakukan, antara lain, melakukan sertifikasi kelayakan sarana dan prasarana kantor. 4 (empat) *lift* yang dioperasikan Perum Jamkrindo misalnya, telah diperiksa dan diuji kelayakan fungsinya oleh PJK3 PT Ogawa Triguna Prima, Perusahaan Pemeriksaan dan Pengujian Layak Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 2 Juli 2016. Menurut hasil pemeriksaan tertanggal 20 Juli 2016, yang

working incentives/pension program. For this pension program, the Corporate has included its employees in pension program, namely the Employee Welfare Insurance Program and Employee Welfare Program through Pension Fund of Financial Institution (DPLK). Beside the pension program, the Corporate also books definite benefit post-working incentives for the employees, based on the Law of Employment.

Definite benefit post-working incentive is a pension program that determines the amount of pension benefit that will be given, usually depends on one or more factors such as age, working period, or compensation. Beside this program, the Corporate also has definite installment in which the Corporate pays the installment calculated based on a certain percentage of an employee's salary to the pension insurance program provided by pension fund of financial institution. The installment payment is charged to the profit and loss report when it is owed.

In 2016, Post-Working Incentive Estimation Charge is recorded for the amount of IDR 6.22 billion, it is increased by 26.11% compared to 2015 with IDR 4.93 billion. As for the payment of Pension Insurance Premium in 2016, the amount is IDR 3.49 billion, it is increased by 58.87% compared to 2015 with IDR 2.20 billion.

Standard Salary Ratio

The compliance of Perum Jamkrindo to the Law of Employment is shown by the payment of new employee salary whose amount is far beyond the Regional Minimum Wage (UMR). The minimum salary paid by Perum Jamkrindo to the new employees is IDR 5,761,486 and it is applicable in all areas of operation. In giving the salary, including remuneration, Perum Jamkrindo does not discriminate gender, but it makes employee competency as a reference.

Work Health and Safety

Besides keep on struggling to create comfort in working, Perum Jamkrindo also commits to realize work health and safety for all employees. For this, Perum Jamkrindo desires to minimize the incident number to be zero accident. The effort done by Perum Jamkrindo is doing appropriateness certification of its office facilities. For example, the functional appropriateness of the four lifts operated by Perum Jamkrindo has been checked and tested by PJK3 PT Ogawa Triguna Prima, a Corporation of Work Health and Safety Functional Appropriateness Test on July 2 2016. According to the checking done on June 20 2016, whose result is forwarded to the Department/Sub-Department

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relating to Employment, and Work Health and Safety

tembusannya disampaikan ke Dinas/Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, ke-4 lift tersebut dinyatakan layak dioperasikan. Upaya itu berhasil diwujudkan pada tahun 2016. Sebagai pembanding, pada tahun 2015, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kasus yang menyebabkan 1 (satu) karyawan mengalami patah tulang karena jatuh dari tangga. Agar kasus serupa tak terulang, Perum Jamkrindo melakukan upaya perbaikan dengan memperbaiki sistem penerangan di tangga, dan memasang rambu-rambu waspada. Selain itu, Perum Jamkrindo juga senantiasa menyediakan kotak perlengkapan P3K serta alat antisipasi pemadam kebakaran.

of Employment of DKI Jakarta, all four lifts are certified to be appropriate to operate. The effort was successful to be realized in 2016. As a comparison, in 2015 there was 1 (one) work accident that causes 1 (one) employee to suffer from bone fractures due to falling. In order to prevent the similar thing to happen, Perum Jamkrindo is applying improvement effort by repairing lighting system, and putting some attention seeking signs. Besides, Perum Jamkrindo always provides first aid boxes as well as apparatus to anticipate fire

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan Perum Jamkrindo melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program mulia ini sejatinya menempatkan BUMN sebagai Agen Pembangunan yang memiliki aspek pengelolaan usaha berbasis laba, sekaligus mendorong perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagai BUMN, Perum Jamkrindo mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

The Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development is conducted and realized by Perum Jamkrindo through Partnership and Community Development Program (PCDP). This noble program makes SOE as a developing agent with profit-based business management as well as a driver to support positive social and community development.

As an SOE, Perum Jamkrindo is obligated to perform PCDP in its area of operation. Partnership Program is a program to improve the capability of small enterprises in form of capital loan, so that they can be independent and durable. As for the Community Development Program, it is a development program to improve the social condition of the community around the area of operation of Perum Jamkrindo. The Community Development Program involves giving grant for developing fund to the partners (small enterprises and co-op) to improve and develop their business to be durable and independent so they can improve the living quality of the community.

Pengelola PKBL Perum Jamkrindo

Struktur Organisasi PKBL Perum Jamkrindo

Manager of PCDP of Perum Jamkrindo

The Organizational Structure of PCDP of Perum Jamkrindo

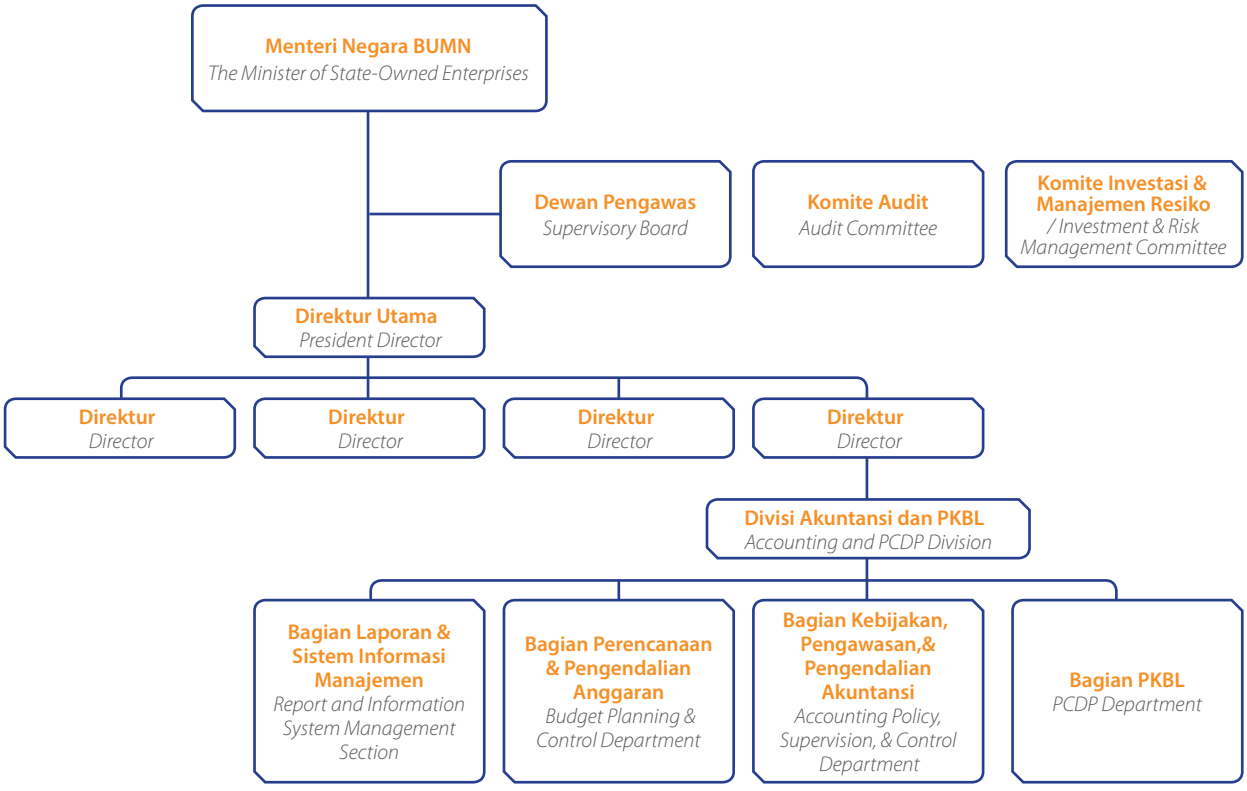

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Berikut adalah Sumber Daya Manusia yang menangani program PKBl Perum Jamkrindo.

The Person in Charge of the PKBl Program of Perum Jamkrindo is elaborated as follows:

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment, and Risk Management*	:	I. Rusdonobanu
Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL *Head of Accounting and PCDP Division*	:	Diana Mayawati
Kepala Bagian PKBL *Head of PCDP Subdivision*	:	Lila Farikah
Kepala Seksi PK *Head of PK Section*	:	Eka Marta Fitria
Staf PKBL *PCDP Staff*	:	Irma Hartati
		Retno Indriani

Target dan Rencana Kegiatan PKBL Tahun 2016

Di setiap awal tahun, Perum Jamkrindo telah melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran terkait pelaksanaan PKBL. Berikut disampaikan target dan rencana kegiatan PKBL yang telah dicanangkan di awal tahun 2016.

Target and Planning of PCDP Activities in 2016

In the beginning of every year, Perum Jamkrindo is planning its working plan and budget related to PCDP. The target and planning of PCDP activities that was formulated in the beginning of 2016 is elaborated as follows:

Program Kemitraan
Partnership Program

Sasaran

1. Tersalurnya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sebesar Rp15.960.000.000,-.
2. Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kantor Cabang Perum Jamkrindo.

Strategi

1. Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
   - Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM Perusahaan.
   - Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran Perusahaan berskala nasional.
   - Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinyu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
2. Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
3. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PNM di sektor pertanian.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Goal

1. *Distribution of Partnership Program funds in all work units of Perum Jamkrindo amounting to Rp15,960,000,000, -.*
2. *Distribution of Partnership Program funds to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.*

Strategy

1. *Intensification of the Partnership Program by optimizing the implementation of the Partnership Program so that the partners will be more resilient and independent, including:*
   - *Improving the management capabilities and the production of partners by engaging in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the company's HR capabilities.*
   - *Increasing the marketing access of partners' products by engaging in the activities of promotion/exhibition and doing the marketing efforts of partners' products through the role of national companies.*
   - *Improving sustainable development by conducting ongoing visits to partners' businesses to evaluate and monitor business developments and problems faced and providing improvement advice/solutions, as well as intensifying the billing to the target partners while taking into account the conditions of the targeted partners.*
2. *Extensification of Partnership Program by searching potential and qualified partners who have profitable business prospect through government or private trade or industry organization or directly by Perum Jamkrindo.*
3. *Conducting synergy with other coach State Owned Enterprises or other parties in the implementation of Partnership Program's funds distribution, among others, with the PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) and PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in the agricultural sector.*

Program Bina Lingkungan
Community Development Program

Sasaran

Tersalurnya dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp15.650.000.000 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

Kebijakan

Proyeksi Dana Program Bina Lingkungan tahun 2016 yang dibiayakan pada tahun buku 2015 adalah sebesar Rp16.000.000.000.

Strategi

Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerjasama dengan Yayasan, LSM maupun warga masyarakat.

Goal

Distribution of Community Development Program funds amounting to Rp15,650,000,000 in all work units of Perum Jamkrindo in the form of providing assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo.

Policy

The projection of the Community Development Program Fund of 2016 financed in fiscal year of 2015 is Rp16,000,000,000.

Strategy

Conducting the distribution of Community Development fund through cooperation with foundation, NGO, and community.

Realisasi Dana Kegiatan PKBL di Tahun 2016

Realisasi kegiatan PKBL di sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan dengan pencapaian terhadap anggaran mencapai 51,04% untuk Program Kemitraan, dan 92,76% untuk Program Bina Lingkungan. Berikut disampaikan laporan realisasi kegiatan PKBL Perum Jamkrindo tahun 2016.

1. Realisasi Program Kemitraan
   a. Penyaluran dana Program Kemitraan dan jumlah mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

Realization of PCDP Activity Budget in 2016

The PCDP activities has been realized in 2016 with the achievement of budget reaching the number of 51.04% for Partnership Program and 92.76% for Community Development Program. The report of PCDP activity realization of Perum Jamkrindo is elaborated as follows:

1. Realization of Partnership Program
   a. Budget distribution of Partnership Program and the amount of partners based on sector is elaborated as follows:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2016 Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan

Realization of budget distribution of Partnership Program in 2016 Based on the Business Sectors of Partners

No	Sektor Utama *Business Sector*	Target 2016 *2016 Target*		Realisasi 2016 *2016 Realization*		Pencapaian *Achievement*	
		Jumlah Mitra Binaan *Partners Total*	Jumlah *Total*	Jumlah Mitra Binaan *Partners Total*	Jumlah *Total*	Jumlah Mitra Binaan *Partners Total*	Jumlah *Total*
		(MB)	Rp	(MB)	Rp	(MB)	Rp
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(1)	(6)=(4)/(2)
1	Sektor Industri *Industrial Sector*	78	3.235.000.000	19	920.000.000	24,36%	28,44%
2	Sektor Perdagangan *Trade Sector*	186	6.280.000.000	127	4.758.000.000	68,28%	75,76%
3	Sektor Pertanian *Agricultural Sector*	34	1.520.000.000	6	715.000.000	17,65%	47,04%
4	Sektor Peternakan *Livestock Sector*	20	580.000.000	8	330.000.000	40,00%	56,90%
5	Sektor Perkebunan *Plantation Sector*	17	525.000.000	-	-	0,00%	0,00%
6	Sektor Perikanan *Fisheries Sector*	17	525.000.000	2	65.000.000	11,76%	12,38%
7	Sektor Jasa *Service Sector*	83	3.295.000.000	35	1.357.279.000	42,17%	41,19%
8	Sektor Lainnya *Other Sector*	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah *Total*	435	15.960.000.000	197	8.145.279.000	45,29%	51,04%

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan, bagian PKBL Perum Jamkrindo melakukan kerjasama dengan PT PNM untuk menyalurkan dana Program Kemitraan kepada kelompok pengrajin batik tulis Bayat yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah.

In distributing the budget for Partnership Program, PCDP Division of Perum Jamkrindo was cooperating with PT PNM to distribute the budget of Partnership Program to a group of Bayat batik crafter in Klaten, Central Java.

b. Kolektibilitas Piutang Pinjaman

b. Collectability of Loan Receivables

Kolektibilitas Piutang *Collectibility of Credits*	Jumlah Piutang *Total Credits*	Bobot (%) *Weights (%)*	Rata-rata Tertimbang *Weighted Average*
Lancar *Good*	10.044.362.215	100	10.044.362.215
Kurang Lancar *Not So Good*	2.934.489.428	75	2.200.867.071
Diragukan *Doubtful*	-	25	-
Macet *Bad*	3.726.132.687	0	-
Jumlah *Total*	16.704.984.327		12.245.229.285

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Kolektibilitas Piutang *Collectibility of Credits*	Jumlah Piutang *Total Credits*	Bobot (%) *Weights (%)*	Rata-rata Tertimbang *Weighted Average*
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman adalah : *The total of credits collectibility is:*			
Rata-rata tertimbang piutang / Jumlah Pinjaman yang disalurkan *Weighted Average / Total Credits*	x 100%		
12.245.229.285 / 16.704.984.327	x 100% =73,30% ; Skor/ *Score* = 3		

Dengan demikian skor Tingkat Kolektibilitas Pengembalian adalah 3 (tiga), sehingga tingkat Kinerja Program Pembinaan Tahun 2016 diperkirakan dengan Total Skor (TS) = 3.

Therefore, the score of Return Collectability Rate is 3 (three), and the score of Development Program Performance in 2016 is estimated by the Total Score (TS) = 3

c. Efektivitas Penyaluran Dana

d. Effectivity of Budget Distribution

	2016	2015
Jumlah dana yang disalurkan / Jumlah dana yang tersedia *Total Fund Disbursed / Total Fund*	x 100%	
8.145.279.000 / 15.955.760.579	x 100% = 51,05%	
6.593.625.000 / 16.608.947.483	x 100% =	39,70%

	2016	2015
Jumlah dana yang disalurkan : *Total Fund Disbursed*		
Penyaluran Pinjaman *Fund Loaned*	8.145.279.000	6.348.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan *Partnership Coaching Fund*	-	245.625.000
Jumlah dana yang disalurkan : *Total Fund Disbursed:*	8.145.279.000	6.593.625.000

	2016	2015
Jumlah dana yang tersedia : *Total Fund Available*		
Saldo awal dana *Initial Balance of Funds*	9.944.017.463	4.835.266.266

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Alokasi penyisihan laba yang diterima *Allocation of Allowance for Profit Received*	-	6.641.389.555
Pengembalian pinjaman mitra binaan *Partner Loan Repayment*	5.520.905.847	4.713.190.639
Pendapatan jasa administrasi pinjaman *Revenue from Loan Administration Services*	490.837.269	419.101.023
Jumlah dana yang tersedia : *Total Fund Available:*	15.955.760.579	16.608.947.483

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, tingkat kinerja pelaksanaan Program Kemitraan memperoleh skor 0.

Based on the decision of the Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998 dated March 24, 1998 which has been amended by Regulation of the Minister of SOEs no. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 on Assessment Indicators of State-Owned Enterprise Health Level, the level of performance of Partnership Program has obtained the score of 0.

Penyerapan % *Absorption %*	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80
Skor *Score*	3	2	1	0

2. Realisasi Program Bina Lingkungan
Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan berdasarkan jenis bantuan

2. Realization of Community Development Program
Realization of Budget Distribution of Community Development Program based on the type of aids

No	Jenis Bantuan *Type of Aid*	Rencana Penyaluran (Rp) *Distribution Plan (IDR)*	Realisasi (Rp) *Realization (IDR)*
1	Bantuan Korban Bencana Alam *Natural Disaster Victim Aid*	100.000.000	137.959.658
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan *Educational and/or Training Aid*	2.100.000.000	2.327.863.609
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan *Health Improvement Aid*	200.000.000	139.415.000
4	Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum *Public Infrastructure & Facilities Development Aid*	3.500.000.000	2.963.676.075
5	Bantuan Sarana Ibadah *Worship Facilities Aid*	1.500.000.000	824.449.013
6	Bantuan Pelestarian Alam *Nature Conservation Aid*	100.000.000	68.500.000
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dlm Rangka Pengentasan Kemiskinan *Social Societies Aid in Order to Alleviate Poverty*	7.700.000.000	7.973.815.098
8	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Mitra Binaan *Educational and/or Training Aid for Established Partners*	450.000.000	81.306.714
Jumlah *Total*		15.650.000.000	14.516.985.167

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Program Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan BUMN dengan usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN 5/2007 tersebut.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Program Kemitraan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Calon Mitra Binaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,-;
2. Milik warga negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Penetapan dana unit PKBL adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, yang bersumber dari:
   a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
   b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari

Partnership Program

Based on the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises number PER-08/mBu/2013 dated September 10 2013, SOE Partnership Program with small enterprises, hereinafter referred to as Partnership Program, is a program to improve the capability of small enterprises to be durable and independent by leveraging the budget from parts of SOE profit. Small enterprises is a small scale people economic activity and it fulfills the criteria of net wealth or annual sales as well as ownership as regulated in the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises 5/2007.

Responsibility to the partners is shown by coaching the partners. The budget resource to coach the partners is the budget of Partnership Program Coaching, which is at most 20% of the Partnership Program budget allocated for the running year.

The Partnership Program that has been done involves giving loans to fund the business capital or fixed asset procurement to increase production and sales, giving supports in form of grants to fund education, training, internship, marketing, promotion, and others related to improving the productivity of the Partners.

A Potential Partner for SOE Partnership Program with Small Enterprises and Community Development Program should fulfill these criteria:

1. Having net worth at most IDR 500,000,000.00 excluding land and business buildings, or having annual sales at most IDR 2,500,000,000.00;
2. Belongs to an Indonesian Nationality;
3. Independent, not a subsidiary or branch of a corporation that is owned, ruled by, or affiliated both directly and indirectly with medium or big enterprises;
4. The status is individual corporation; non-legal entity business entity, or legal entity business entity, including co-op;
5. Having business potential and prospects to be developed;
6. Has been doing the business for at least 1 (one) year; (Non bankable.)

The deremintation of fund for PCDP unit is as follows:

1. Partnership Program Budget, with the resource from:
   a. Spare of the net profit after tax as determined in RUPS/ Ministry Endorsement of Coach SOE Annual Report, at most 4% of the profit after tax of the previous financial year;

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Program Kemitraan;
c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
d. Sumber lain yang sah.

2. Dana Program Kemitraan yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
   a. Pinjaman; diberikan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
   b. Pinjaman Khusus; diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan

Mekanisme atau tata cara penyaluran atau pemberian dana pinjaman Program Kemitraan adalah sebagai berikut:
1. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana kegunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina.
2. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh Calon Mitra Binaan.
3. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan.
4. Pemberian pinjaman kepada Calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
5. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada Calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Dalam pelaksanannya, Program Kemitraan yang dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2016 adalah:
1. Program Kemitraan di sektor industri
2. Program Kemitraan di sektor perdagangan
3. Program Kemitraan di sektor pertanian
4. Program Kemitraan di sektor peternakan
5. Program Kemitraan di sektor perkebunan
6. Program Kemitraan di sektor perikanan
7. Program Kemitraan di sektor jasa
8. Program Kemitraan di sektor lainnya

Adapun realisasi penyaluran dana terkait Program Kemitraan yang telah di salurkan Perum Jamkrindo sepanjang 2016 adalah sebesar Rp8.145.279.000, atau naik 28,31% dibandingkan realisasi tahun 2015 yang berjumlah Rp6.348.000.000, yang

b. Administrative service of loan/margin /share from Partnership Program
c. Deposit interest and/or gyro service from Partnership Program budget and Community Development Program budget placed; and
d. Other legitimate resource.

2. Partnership Program Budget that is given in forms of loan are:

   a. Loan; given to fund working capital or fixed asset procurement in order to increase production and sales;

   b. Special loan; given to fund budget needs of business activity budget needs of the Partners within short-term period of time to fulfill the order of business partner of the Partners.

The mechanism to distribute or give loan for Partnership Program is as follows:
1. Potential Partner submits the plan of usage of loan to improve their business to be proposed to Coach SOE.
2. Coach SOE evaluates and selects directly the proposal that is proposed by Potential Partner
3. Appropriate Potential Partner fulfills the administrative process of loan with the related Coach SOE
4. Giving loan to the Potential Partner, realized in an agreement letter/contract.
5. Coach SOE is not permitted to give loans to a Potenatial Partner that is the Partner of another Coach SOE.

In the realization, the Partnership Program performed by Perum Jamkrindo in 2016 includes:
1. Partnership Program in Industrial Sector
2. Partnership Program in Trading Sector
3. Partnership Program in Agricultural Sector
4. Partnership Program in Farming Sector
5. Partnership Program in Plantation Sector
6. Partnership Program in Fishery Sector
7. Partnership Program in Service Sector
8. Partnership Program in Other Sectors

As for the realization of budget distribution related to the Partnershio Program distributed by Perum Jamkrindo in 2016 is IDR 8,145,279,000.00, it was increased by 28.31% compared to the realization in 2015 that was IDR 6,348,000,000.00, that are allocated to the Partners in numerous business sectors. This

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

dialokasikan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha.. Kenaikan ini lebih disebabkan dengan pemenuhan Program Kemitraan yang dilakukan Perum Jamkrindo untuk beberapa wilayah, seperti Bandung, Mataram, Kupang dan Papua. Dimana untuk wilayah Papua, pada tahun 2016, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp280.000.000.

increased amount is caused by the fulfillment of Partnership Program that is done by Perum Jamkrindo in various regions, such as Bandung, Mataram, Kupang, and Papua. For Papua, in 2016, Perum Jamkrindo distributes the budgt of Partnership Program for IDR 280,000,000.00.

Realisasi penyaluran dana pembinaan program kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Realization of coaching budget distribution of the Partnership Program based on the Branch Office of Perum Jamkrindo for the last 5 years is elaborated as follows:

No.	Kanca *Branch Office*	2016	2015	2014	2013	2012
1	Jakarta	1.435.000.000	1.470.000.000	1.095.000.000	.030.000.000	907.000.000
2	Bandung	480.000.000	-	50.000.000	170.000.000	982.978.000
3	Semarang	630.000.000	490.000.000	510.000.000	275.000.000	999.107.500
4	Surabaya	790.000.000	780.000.000	590.000.000	180.000.000	1.405.000.000
5	Makassar	655.000.000	80.000.000	230.000.000	235.000.000	1.245.000.000
6	Pekanbaru	315.000.000	540.000.000	91.000.000	315.000.000	920.000.000
7	Palembang	1.055.000.000	525.000.000	630.000.000	520.000.000	670.000.000
8	Pontianak	735.000.000	630.000.000	525.000.000	170.000.000	683.000.000
9	Samarinda	490.000.000	305.000.000	285.000.000	290.000.000	716.000.000
10	Denpasar	185.000.000	415.000.000	320.000.000	50.000.000	1.185.000.000
11	Medan	460.000.000	495.000.000	360.000.000	280.000.000	1.326.500.000
12	Banjarmasin	70.000.000	250.000.000	95.000.000	-	-
13	Palangkaraya	263.000.000	45.000.000	85.000.000	-	-
14	Mataram	15.000.000	-	-	-	-
15	Kupang	97.279.000	-	96.000.000	-	-
16	Papua	280.000.000	-	80.000.000	-	-
17	Jambi	60.000.000	50.000.000	102.000.000	-	-
18	Manado	130.000.000	273.000.000	100.000.000	-	-
	Total	8.145.279.000	6.348.000.000	5.244.000.000	3.515.000.000	11.039.585.500

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perum Jamkrindo akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar lokasi usaha, serta PERMEN BUMN No. PER-08/MBU/2013.

Community Development Program

The Community Development Program is the community empowerment program around the area of operation of Perum Jamkrindo, which is conducted through the utilization of funds from the profit share. This is done based on the awareness of Perum Jamkrindo on the importance of the existence of the community around the business location, as well as the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. Per-08/mBu/2013.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
2. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan, hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
3. Sumber lain yang sah.

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:
1. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat.
2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Adapun kegiatan Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Pada tahun 2016, Perum Jamkrindo telah menyalurkan bantuan dana bina lingkungan untuk kegiatan lingkungan, diantaranya:
   a. penamanan 1000 pohon pada acara "SAVE Indonesia, Gerakan Selamatkan Indonesia Dalam Rangka Hari Bumi 2016" yang diselenggarakan oleh Jaringan Intelektual Muda Kalimantan (JIMKA) pada tanggal 22-23 April 2016 di Tahura Sulltan Adam, Mandiangin, Kalimantan Setatan.

   b. Bantuan kepada masyarakat di Desa Oloboju dan Desa Loru di Sulawesi Tengah dalam bentuk pemberian bibit dan pelatihan penanaman bawang dan cabai.

The fund for the Community Development Program is sourced from:
1. Provision for net profit after tax stipulated in the General Meeting of Shareholders/Minister and the approval of the Annual Report of coach SOE with the maximum amount of 4% of the net profit after the tax of the previous financial year;
2. The loan service administration/ margin/profit sharing of the Partnership Program, the interest of deposit and/ or gyro service from the fund of Partnership Program and Community Development Program placed; and
3. Another legitimate source.

The fund for Community Development Program is used for the purpose of providing benefits to the community in the area of operation of State Owned Enterprises in the form of aid for natural disaster victims, education and/or training, health, development of public infrastructure and facilities, worship facilities, nature conservation, social community in the context of poverty alleviation, as well as education, training, internship, marketing, promotion, and other forms of aid related to the efforts to improve the capacity of Partnership Program's Partners.

Procedures for granting funds for Community Development Program are as follows:
1. Coach SOE first conduct surveys and identification in accordance with the conditions and needs in the business area of local coach SOE.
2. The implementation of the Community Development Program is carried out directly by the related coach SOE.

The activities of Community Development Program that has been done by Perum Jamkrindo throughout 2016 are as follows:
1. 1. In 2016, Perum Jamkrindo has distributed environmental funding assistance for environmental activities, including:
   a. The planting of 1.000 trees at the "SAVE Indonesia, Save Indonesia Movement on the 2016 Earth Day", an event organized by the Young Intellectuals Network of Kalimantan (Jaringan Intelektual Muda Kalimantan -- JIMKA) on 22-23 April 2016 at Sulltan Adam Forest Park, Mandiangin, South Kalimantan.
   b. Assistance to communities in Oloboju and Loru Villages in Central Sulawesi in the form of provision of seeds and chili and onion planting training.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

2. Bantuan pengembangan Sosial Kemasyarakatan, yang di antaranya:
   a. Pengadaan Sembako Gratis yang dilaksanakan oleh 56 Kantor Cabang di Seluruh Indonesia
   b. Pengadaan Pasar Murah di Bulan Ramadhan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan 24 Kantor Cabang Perum Jamkrindo
   c. Pengadaan Pasar Murah dalam rangka HUT RI di Provinsi Sulawesi Tengah
   d. Bantuan bedah rumah veteran RI di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
   e. Bakti sosial dalam bentuk donor darah
   f. Bantuan modal kerja untuk mantan atlit yang berprestasi
   g. Bantuan modal kerja untuk mantan narapidana
   h. Bantuan pemberian daging qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha untuk masyarakat di sekitar Kantor Pusat Perum Jamkrindo
   i. Santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa di sekitar Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perum Jamkrindo

3. Bantuan sarana dan prasarana sosial, antara lain:
   a. Pengadaan MCK di Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah
   b. Penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah
   c. Pengadaan sarana elektrifikasi untuk masyarakat di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah
   d. Pembangunan Tempat Penitipan Anak di Pasar Petobo Kota Palu
   e. Pembangunan Posyandu di Kelurahan Paseban – Jakarta
   f. Pembuatan irigasi di Desa Tegalsari Banyuwangi
   g. Pembuatan saluran air untuk masyarakat di Kabupaten Sampang Jawa Timur
   h. Pembuatan pengadaan gerobak dan tong sampah untuk masyarakat di Kabupaten Gresik
   i. Bantuan pengadaan perahu dan dermaga apung di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
   j. Bantuan pembuatan jalan setapak untuk masyarakat di Kelurahan Sungai Putri Kabupaten Jambi

2. Social Community Development Assistance, among which are:
   a. Procurement of free groceries held by 56 Branch Offices throughout Indonesia
   b. Procurement of Cheap Market in Ramadhan held by Head Office and 24 Branch Offices of Perum Jamkrindo
   c. Procurement of the Cheap Market in the event of Indonesian Independence Day Celebration in Central Sulawesi Province
   d. Veterans' houses renovation aid in Central Sulawesi and South Sulawesi Provinces
   e. Social work in the form of blood donation
   f. Working capital assistance for former outstanding athletes
   g. Working capital assistance for former inmates
   h. Assistance in the form of giving qurban meat in the event of Eid al-Adha for the community around Jamkrindo Perum Head Office
   i. Donation to orphans and the poor around the Head Office and Branch Office of Perum Jamkrindo

3. Assistance of social facilities and infrastructure, among others:
   a. Provision of sanitary facilities in Donggala Regency, Banggai Regency and Banggai Kepulauan Regency in Central Sulawesi Province
   b. Provision of clean water facilities for communities in Sigi Regency, Banggai Regency and Banggai Kepulauan Regency in Central Sulawesi Province
   c. Procurement of electrification facilities for communities in Banggai and Banggai Kepulauan Regency in Central Sulawesi Province
   d. Construction of Daycare at Petobo Market in Palu City
   e. Development of Integrated Service Post in Paseban - Jakarta
   f. Construction of irrigation in Tegalsari Village Banyuwangi
   g. Construction of water channels for communities in Sampang Regency, East Java
   h. Procurement of carts and trash cans for people in Gresik Regency
   i. Procurement of boats and floating dock in Wonosobo regency, Central Java
   j. Construction of the footpath for the community in Sungai Putri Kelurahan Jambi District

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

4. Bantuan dalam bentuk donasi lainnya, antara lain:
   a. Bantuan untuk pembangunan dan renovasi rumah ibadah
   b. Bantuan pembangunan Taman Bacaan Masyarakat dan Taman Bacaan Siswa di Kota Jakarta,Sukabumi, Labuan Bajo dan Mandalika
   c. Bantuan beasiswa bagi pelajar SMA dan mahasiswa yang berprestasi
   d. Bantuan program Siswa Mengenal Nusantara kepada 20 siswa berprestasi
   e. Bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Matraman Jakarta
   f. Bantuan untuk korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Bima dan Garut
   g. Bantuan pembangunan dan renovasi sekolah/pondok pesantren
   h. Bantuan pelestarian alam dengan melakukan penanaman pohon di Provinsi Kalimantan Selatan

Kendala Pelaksanaan PKBL dan Audit atas Laporan Keuangan PKBL

Penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2016 adalah sebesar 51,04% dari total dana yang tersedia, sedangkan dana Program Bina Lingkungan yang tersalurkan mencapai 92,76% dari total dana yang tersedia. Adanya deviasi tersebut disebabkan terbatasnya SDM pelaksana kegiatan PKBL Perum Jamkrindo, sehingga kegiatan penyaluran dan *monitoring* pinjaman Program Kemitraan belum dapat berjalan secara maksimal.

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan, dengan pendapat opini "Wajar dalam semua hal yang material". Dengan demikian, tidak terdapat temuan yang membutuhkan tindak lanjut.

Sementara itu, untuk menghindari segala macam bentuk penyelewengan, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun dalam melakukan setiap kegiatan yang terkait penyaluran dana bantuan atau lain sebagainya. Perusahaan sangat memperhatikan adanya risiko kecurangan atau korupsi yang cukup riskan terjadi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* ataupun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

4. Assistance in other forms of donation, among others:
   a. Donation for the construction and renovation of worship facilities
   b. Donation for the construction of Community Reading Center and Student Reading Center in Jakarta, Sukabumi, Labuan Bajo and Mandalika
   c. Scholarship assistance for high school students and outstanding college students
   d. Assistance for "Siswa Mengenal Nusantara" program for 20 outstanding students
   e. Free medical assistance for people in Matraman District, Jakarta
   f. Donation for victims of natural disasters in Aceh, Bima and Garut
   g. Donation for development and renovation of schools/ Islamic boarding schools
   h. Assistance for nature conservation by planting trees in South Kalimantan Province

Obstacles in the Implementation of PCDP and Audit on PCDP Financial Statements

The channeling of the 2016 Partnership Program funds amounted to 51.04% of the total funds available, while the allocated Community Development Program funds reached 92.76% of the total available funds. The deviation is due to the limited human resources implementing the activities of Perum Jamkrindo's PCDP so that the channeling and monitoring activities of the Partnership Program loan have not been able to run optimally.

The Financial Report of Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo 2016 has been audited by the Public Accounting Firm of Hertanto, Grace, and Karunawan, with the opinion of "Reasonable in all material matters". Thus, there are no findings that require follow-up.

Meanwhile, to avoid all forms of abuse, both within the company and in conducting any activities related to the distribution of aid funds or so forth, the company is very concerned about the risk of fraud or corruption which is quite likely to happen.

In the Law of the Republic of Indonesia it has been determined that paying or offering payment or even accepting kickbacks or other forms of corrupt payments is a criminal offense that may make the company or individual employee subject to fines and/or imprisonment.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Relating to Social and Community Development

Undang-undang Antikorupsi, termasuk Peraturan Praktik Korupsi, menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan Undang-undang Anti korupsi terkait. Berkaitan dengan komitemen antikorupsi, Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi antikorupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku bagi Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara. Atas komitmen itu, pada tahun pelaporan, tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Anticorruption laws, including the Corruption Practices Act, make any payment, offer, or gift of any value to company's officials for the purpose of influencing the actions or decisions of the officials as a crime.

This policy is made to ensure that all employees, officials, and directors, and all of our subsidiaries and affiliates are in compliance with the Company's Anti-Corruption Policy and related anticorruption laws. In relation to anti-corruption commitments, the Ministry of State Owned Enterprises has launched a Clean SOE roadmap as an anti-corruption action within the Ministry of State-Owned Enterprises and state-owned companies, and that also applies to Perum Jamkrindo as one of the state enterprises. On that commitment, in the reporting year, there is no proven corruption incidents and also no taken actions.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen

Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang Penjaminan, Perum Jamkrindo menekankan pada aspek pelayanan kepada para nasabah yang membutuhkan fasilitas Penjaminan Kredit. Penguatan mutu pada aspek pelayanan yang prima dan responsif juga terus dilakukan oleh Perum Jamkrindo agar masyarakat dapat terbantu dalam memanfaatkan layanan-layanan yang disediakan. Perum Jamkrindo meyakini hal tersebut tidak hanya berperan sebagai sebuah fasilitas namun juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen yang telah mempercayai Perum Jamkrindo sebagai institusi penjamin.

As a financial institution that copes with Credit Guarantee, Perum Jamkrindo prioritizes the aspects of service to the customers that need the facility of Credit Guarantee. Brand strengthening on prime and responsive service is also done by Perum Jamkrindo so the Corporate can help the community in providing the services offered. Perum Jamkrindo believes that it does not only take role as a facility, but also as a Corporate Social Responsibility to the customers who trust Perum Jamkrindo as a Guarantee Company.

Salah satu bentuk aktif dari tanggung jawab kepada konsumen diwujudkan melalui penyediaan sarana komunikasi di beberapa media seperti nomor *hotline* untuk wilayah jakarta, informasi nomor telepon dan faksimili di setiap Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, serta kontak *online* yang disediakan pada situs *web* Perum Jamkrindo.

One of the active forms of the responsibility to the customers is realized by providing communication service in several media, such as hotline number for Jakarta Area, information of phone and fax number in each Branch Office or Service Unit in Indonesia, as well as online contact that is provided in the website of Perum Jamkrindo.

Pengaduan Langsung *Direct Complaint*	:	Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia *Branch Office or Service Unit Offices throughout Indonesia*
Kontak Situs Web *Website*	:	http://www.Jamkrindo.co.id/kontak
Kontak Surel *E-mail*	:	info@Jamkrindo.co.id
Hotline	:	(62-21) 6540335

Melalui penyediaan alamat komunikasi tersebut, Perum Jamkrindo telah melakukan penanganan pertanyaan dan keluhan konsumen terkait layanan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo.

By providing the communication channels, Perum Jamkrindo has handled questions and complaints of the customers related to the service provided by Perum Jamkrindo

Tanggung Jawab Produk

Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan *engagement* pelanggan. Pada tahun 2016, responden untuk survei kepuasan pelanggan adalah seluruh mitra eksisting, mantan mitra dan calon mitra Perum Jamkrindo yang tersebar dalam wilayah kerja kantor cabang di seluruh Indonesia, baik yang telah ataupun yang belum menggunakan jasa penjaminan Perum Jamkrindo. Survei dilakukan di 56 Kantor Cabang dengan melibatkan 545 responden, dan kepada mereka diberikan kuesioner untuk diisi. Dalam survei ini, indeks kepuasan seseorang terhadap suatu layanan merujuk pada 5 dimensi, yaitu *tangibles, emphaty, reliability, responsiveness, dan assurance*.

Hasil survei menunjukkan, Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo secara nasional untuk kategori mitra eksisting pada tahun 2016 masuk kategori kinerja Sangat Baik, dengan skor

Product Responsibility

Perum Jamkrindo is conducting survey from time to time in order to find out the level of satisfaction and engagement of the customers. In 2016, respondent for the survey of customer satisfaction was all the existing partners, ex partners, and potential partners of Perum Jamkrindo that is distributed in the area of operations of the branch office all over Indonesia, both those who had used and had not used the loan service provided by Perum Jamkrindo. The survey was conducted in 56 Branch Office with 545 respondents, in which they are given a series of questionnaires to be responded. In this survey, the index refers to 5 (five) dimensions, namely tangibles, empathy, reliability, responsiveness, and assurance.

The result of the survey suggests that the Index of Customer Satisfaction of Perum Jamkrindo nationally for the category of existing partner in 2016 is Very Good, with the score of index

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

indeks kepuasan pelanggan sebesar 81,9%. Hal itu berarti, sebesar 81,9% mitra eksisting merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo, sedangkan 18,1% lainnya merasa belum puas. Dengan hasil ini, Perum Jamkrindo berhasil melampaui target berdasarkan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang ditetapkan sebesar 75%. Kepuasan pelanggan pada tahun 2016 itu dibuktikan dengan adanya peningkatan *volume* penjaminan sebesar 104% dibanding tahun 2015.

Mobil Layanan Penjaminan (MLP)

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perum Jamkrindo mengupayakan untuk meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi mitra bisnis dalam menjangkau dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Strategi "jemput bola" ditempuh melalui Mobil Layanan Penjaminan (MLP), sebuah layanan gerak dengan moda transportasi mobil yang dapat memenuhi kebutuhan mitra bisnis dengan cepat. MLP, atau Mobil Layanan, merupakan kendaraan keliling yang didukung teknologi handal untuk menghadirkan kemudahan bagi mitra bisnis melalui jaringan daring yang sama baiknya dengan unit kerja Perum Jamkrindo.

Mobil Layanan difungsikan untuk layanan *temporary*, pameran, sosialisasi dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan mitra bisnis. Menggunakan kodifikasi yang sama dengan kantor cabang pengelola tertentu dimana laporan keuangan Mobil Layanan merupakan gabungan dengan Kantor Cabang pengelola, Mobil Layanan dapat memberikan pelayanan penjualan semua produk dan layanan Perum Jamkrindo, serta memberikan informasi, konsultasi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk melengkapi fasilitasnya, Mobil Layanan dengan spesifikasi kendaraan roda empat jenis MPV (*Multi Purpose Vehicle*) ini juga memberikan pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang langsung berada di bawah supervisi bank pemilik ATM. Mobil Layanan Perum Jamkrindo ini juga memberikan pelayanan *Self Service Surety Bond* (SSSB) yang dapat diakses sendiri oleh mitra atau nasabah dengan mudah dan cepat. Penempatan lokasi dari Mobil Layanan memiliki waktu yang terjadwal pada masing-masing potensi bisnis, dengan tujuan memberikan kepastian pelayanan kepada mitra atau nasabah. Di samping itu, Mobil Layanan dapat memberikan layanan pada kegiatan tertentu yang memiliki potensi bisnis yang terbuka bagi pengembangan pasar Perum Jamkrindo.

of customer satisfaction of 81.9%. It means that 81.9% of the existing partners are satisfied by the service provided by Perum Jamkrindo, as for the remaining 18.1%, they are not fully satisfied yet. Thus, with this result, Perum Jamkrindo achieved its target based on the Revision of Corporate Budget Work Plan (RKAP) Year of 2016, in which the target for customer satisfaction was decided to be 75%. Customer satisfaction in 2016 can be proven by the increasing volume of loan of 104% compared to that of the year of 2015.

Guarantee Services Car (MLP)

In order to improve performance and to face increased competition, Perum Jamkrindo aspire to improve service by making it easier for business partners to reach out and get the services they need. The "jemput bola" (proactive) strategy taken through Guarantee Services Car (Mobil Layanan Penjaminan/ MLP), a Services Car using car transportation modes that can swiftly fulfill the needs of business partners. MLP is a reliable technology-driven vehicle to provide convenience for business partners through an online network as well as Perum Jamkrindo's work units.

Services Car is enabled for temporary services, exhibitions, socialization and other activities customized to the needs of business partners. Using the same codification as certain branch offices where the Services Car financial statements are combined with the Managing Branch Office, the Services Car can provide sales services for all Perum Jamkrindo products and services, as well as provide information, consultation, socialization and education.

To complete its features, Services Car with the specification of four-wheeled MPV (Multi Purpose Vehicle) also provides Automatic Teller Service (ATM) which directly under the supervision of the bank owner of the ATM. Services Car Perum Jamkrindo also provides Self Service Surety Bond (SSSB) services that can be accessed by partners or customers easily and quickly. Placement of Services Car has a scheduled time for each potential business, aims to providing certainty of services to partners or customers. In addition, Services Cars provide services on certain activities that have potential business open to the development of Perum Jamkrindo market.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

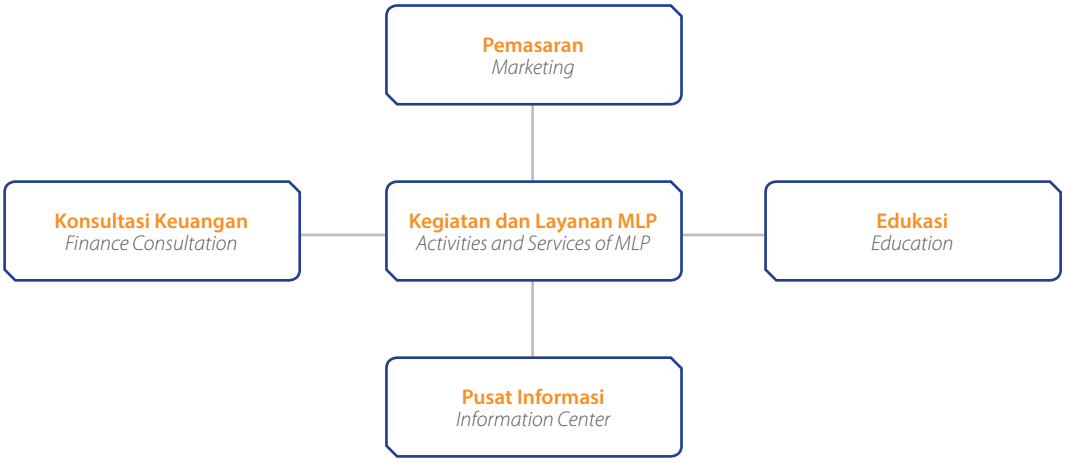

Produk dan layanan penjaminan dapat dipasarkan dan dilayani Mobil Layanan adalah penjaminan langsung dan tidak langsung. Disamping produk-produk tersebut, Mobil Layanan juga dapat melayani produk yang sesuai/dibutuhkan untuk dipasarkan pada kegiatan tertentu.

Agar produktivitas Mobil Layanan tetap terjaga, khususnya dalam memberikan layanan yang optimal kepada mitra dan nasabah, Perum Jamkrindo melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Mobil Layanan secara berkala dan berjenjang. Divisi Jaringan dan Layanan dari Kantor Pusat, Kepala Wilayah di Kantor Wilayah, dan Kepala Cabang di Kantor Cabang ditugaskan untuk memantau langsung produktivitas Mobil Layanan Perum Jamkrindo. Pemantauan dan evaluasi mencakup pemeliharaan, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur, hingga rencana marketing bulanan yang sedianya akan mampu mengukur dan meningkatkan produktivitas Mobil Layanan sebagai layanan gerak Perum Jamkrindo yang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada mitra atau nasabah.

Products and services can be marketed and serviced by the Services Car is direct and indirect guarantee. In addition to these products, Services Cars can also serve customized products to be marketed on certain activities.

In order to maintain the productivity of the Services Car, especially in providing optimal services to partners and customers, Perum Jamkrindo monitors and evaluates the activities of the Services Car on a periodic and tiered basis. Division of Network and Service of Head Office, Head of Region at Regional Office, and Head of Branch at Branch Office assigned to monitor productivity of the Services Car of Perum Jamkrindo directly. Monitoring and evaluation includes maintenance, facilities and infrastructure, systems and procedures, up to the monthly marketing plan that can be used to measure and increase the productivity of the Perum Jamkrindo Services Car to provide maximum service to partners or customers.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Survei Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka membangun perusahaan agar memiliki budaya kinerja yang *excellent*, baik dalam hal kinerja keuangan dan non keuangan, Kementerian BUMN telah mewajibkan seluruh BUMN untuk melaksanakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dalam pengukuran kinerjanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas Perusahaan dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu Item PKPU adalah Indeks Kepuasan Pelanggan, Ketidakpuasan Pelanggan dan *Engagement* Pelanggan.

Perum Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara juga dituntut untuk menciptakan mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan Perum Jamkrindo adalah Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan baik Perbankan maupun *Non* Bank) dan Terjamin (debitur yang kreditnya dijamin oleh Perum Jamkrindo).

Sebagai perusahaan jasa keuangan, pelayanan kepada pelanggan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, peningkatan pelayanan

Customer Satisfaction Survey

In order to build the Corporate to have excellent work culture, both for financial and non-financial performance, the Ministry of State Owned Enterprises is obligated all State Owned Enterprises to perform Leading Performance Assessment Criteria (KPKU) to assess the performance. The main objective is to improve the competitiveness of SOE as well as to improve corporate profitability and to create healthier corporate financial condition. One of the items of KPKU is Customer Satisfaction Index, Customer Dissatisfaction, and Customer Engagement.

Perum Jamkrindo as a State Owned Enterprise is also obligated to create the realization of service optimization for the customers. The customers of Perum Jamkrindo is the Receivers of Guarantee (Financial Institution, both Bank and Non-Bank) and Guaranteed (debtors whose credit is guaranteed by Perum Jamkrindo).

As a financial service institution, service to customer is the main factor to be concerned for the sake of the smooth operation of

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

di semua unit kerja harus ditingkatkan karena merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi kompetisi yang semakin tinggi.

the Corporate. Therefore, service improvement in all working unit should be increased as it is a part of strategy to face higher competition.

Program kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (*performance improvement*) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan *engagement* pelanggan. Sebelumnya Perum Jamkrindo telah melakukan survei kepuasan pelanggan yang dinilai pada tahun 2015. Selanjutnya, hasil *survey* tahun 2016 ini akan dijadikan acuan dalam pembuatan program peningkatan kepuasan dan *engagement* pelanggan.

Customer satisfaction program can be portrayed as a program of effective performance improvement, which is the program that based on the market and customer demand. Perum Jamkrindo always conduct the survey in order to discover the customer satisfaction and engagement rate. Before this, Perum Jamkrindo has done customer satisfaction survey in 2015. Then, the result of the survey of 2016 will be the reference to make the program to increase customer satisfaction and engagement.

Secara garis besar kegiatan survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pengumpulan Data;
3. Tahap Pengelolaan Data dan Analisis;
4. Tahap Laporan.

Generally, the customer satisfaction survey of Perum Jamkrindo consists of 4 (four) steps:
1. Preparation
2. Data Collection
3. Data Processing and Analysis
4. Reporting

Metodologi yang digunakan pada survei kepuasan pelanggan tersaji sebagaimana alur kerja sebagai berikut:

The methodology that is used in the customer satisfaction survey is elaborated as follows:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

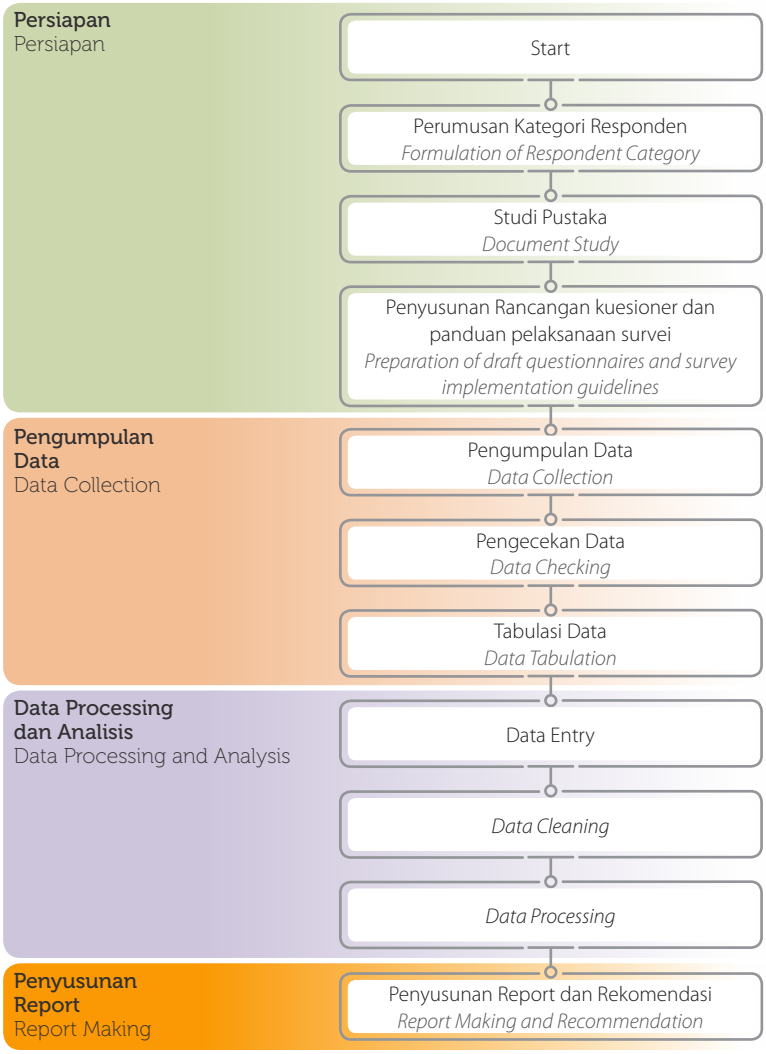

Secara nasional, Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo untuk kategori mitra eksisting tahun 2016 dalam kategori kinerja "SANGAT BAIK", dengan skor indeks kepuasan pelanggan sebesar 81,9%. Hal ini berarti bahwa sebesar 81,9% mitra eksisting merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo, sedangkan 18,1% lainnya merasa belum puas.

Perum Jamkrindo tercatat telah berhasil melampaui target berdasarkan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini terbukti pada tahun 2016 terdapat peningkatan *volume* penjaminan sebesar 104% dari Tahun 2015.

Nation-widely, the Index of Customer Satisfaction of Perum Jamkrindo for the category of existing partner for the year of 2016 is in the performance category of "VERY GOOD", with the score of index of customer satisfaction reaching the number of 81.9%. It means that 81.9% of the partners are satisfied with the service provided by Perum Jamkrindo, as the remaining 18.1% remains not satisfied yet.

Perum Jamkrindo is recorded to be able to surpass its target based on the Revision of Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the year of 2016, in which the target of customer satisfaction should reach the number of 75%. It is proven that in 2016 there was an increasing amount of the value of guarantee by 104% compared to that of 2015.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Sementara secara wilayah, Indeks Kepuasan Pelanggan tertinggi berada di wilayah I dengan skor 86,3%. Skor tersebut didorong oleh dimensi *empathy* (93,6%). Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perum Jamkrindo di Kantor Wilayah I mampu mempertahankan mitra eksisting. Sedangkan skor kantor wilayah II sebesar 78,1% yang merupakan skor terendah diantara kantor wilayah lainnya, dengan dimensi *empathy* sebesar 81,8%.

Selain itu, Indeks loyalitas Pelanggan Perum Jamkrindo secara nasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Tahun 2014 Indeks Loyalitas karyawan sebesar 71,6%, Tahun 2015 sebesar 75,4% dan Tahun 2016 naik menjadi sebesar 76,6% yang termasuk dalam kategori BAIK. Maka Perum Jamkrindo telah berhasil melampaui target berdasarkan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini berarti tingkat loyalitas mitra eksisting sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016 terus mengalami peningkatan *volume* penjaminan dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Sedangkan secara wilayah Indeks loyalitas Pelanggan tertinggi berada di Kanwil I dengan skor 79,9%. Indeks loyalitas pelanggan tertinggi berada pada aspek *costumer attitude* dan aspek emotional, hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perum Jamkrindo pada dua aspek tersebut mampu mempertahankan loyalitas pelanggan dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016.

Indeks Kepuasan Pelanggan

Penghitungan Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yakni sebagai berikut:

Regionally, the highest Customer Satisfaction Index belongs to Region I with the score of 86.3%. The score was lifted by the dimension of empathy (93.6%). It mean that the service given by the employees of Perum Jamkrindo in Region I can maintain the existing partner. As for the region II with the score of 78.1%, it holds the lowest score among the other regional office, with the empathy dimension of 81.8%.

Besides, the Index of Customer Loyalty of Perum Jamkrindo has been increasing nationally compared to the previous years. The Index reached the number of 71.6% in 2014, 75.4% in 2015, and 76.6% in 2016 which lies in the category "GOOD". Thus, Perum Jamkrindo has surpassed the target based on the Revision of Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the year of 2016 with the target of 75%. It means that the loyalty rate of the existing partners since 2014 to 2016 has been increasing, as well as the volume of guarantee and Guarantee Service Fee (IJP).

Regionally, the highest Index of Customer Loyalty belongs to the Region I with the score of 79.9%. The highest index of customer loyalty lies within the aspect of customer attitude and the aspect of emotional, it means that the service provided by the employees of Perum Jamkrindo on the two aspects can maintain customers' loyalty from 2014 to 2-16.

Index of Customer Satisfaction

The calculation of the index of customer satisfaction of Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform No. 25 Year of 2004 concerning the Guidelines to Compile the Index of Community Satisfaction of the Service Unit of Governmental Institution as follows:

Kriteria *Criteria*	**Indeks (%)** *Index (%)*
Sangat Baik *Really Good*	80,1 - 100
Baik *Good*	70,1 - 80,0
Cukup *Enough*	60,1 - 70,0
Buruk *Bad*	50,1 - 60,0
Sangat Buruk *Really Bad*	0,00 - 50,0

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Secara nasional, indeks kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kategori mitra eksisting (*user*) mengalami penurunan sebesar 1,8 dibandingkan tahun sebelumnya yakni bila tahun 2015 user sebesar 80,3 maka di tahun 2016 turun menjadi 78,5 yang termasuk dalam kategori "BAIK". Sedangkan untuk mantan mitra mengalami kenaikan sebesar 1,9 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni bila tahun 2012 sebesar 76,7 maka pada tahun 2016 naik sebesar 78,6 yang termasuk dalam kategori "BAIK".

Nationally, the index of customer satisfaction of Perum Jamkrindo is decreased compared to the previous year. For the category of existing partners (user), it is decreased by 1.8 compared to the previous year that in 2015 the user was 80.3, and it was 78.5 in 2016, which lies in the category "GOOD". As for the ex-partners, there was an increased number of 1.9 compared to the previous year, that in 2015 the score was 76.7 and it was 78.6 in 2015 which lies in the category "GOOD".

Secara umum skor indeks kepuasan pelanggan sebesar 81,9, dengan demikian Perum Jamkrindo telah berhasil melampaui target berdasarkan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang ditetapkan sebesar 75.

Generally, the score of index of customer satisfaction is 81.9, therefore Perum Jamkrindo has surpass the target as stated in the Revision of Corporate Budget Work Plan of the year of 2016, in which the target was 75.

Penilaian atau perhitungan Indeks kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan atas 5 (lima) aspek, diantaranya *Tangible* (pelayanan yang bersifat nyata), *Reliability* (dapat dipercaya), *Responsiveness* (bersikap tanggap), *Assurance* (jaminan pelayanan) dan *Empathy* (kesungguhan).

The calculation or assessment of customer satisfaction index is done for 5 (five) aspects: tangible (real service), reliability (can be trusted), responsiveness (being responsive), assurance (the assurance of service), and empathy (sincerity).

Berikut tabel Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo,

The table of Customer Satisfaction Index of Perum Jamkrindo is presented as follows:

No	Dimensi *Dimension*	Kepuasan Pelanggan *Customer Satisfaction*					
		Mitra Eksisting *Existing Partners*		Mitra Pesaing *Competitor Partners*		Peningkatan *Growth*	
		2015	2016	2015	2016	mitra eksisting	mitra pesaing
1	*Tangible*	80.3	78.5	76.7	78.6	(1.8)	1.9
2	*Reliability*	83.9	81.1	69.3	81.4	(2.9)	12.0
3	*Responsiveness*	85.8	82.5	70.1	82.2	(3.3)	12.1
4	*Assurance*	84.0	81.2	70.6	81.0	(2.8)	10.5
5	*Empathy*	90.1	86.5	77.8	85.8	(3.7)	8.0
Keseluruhan *Growth*		84.8	81.9	72.9	81.8	(2.9)	8.9

Apabila dilihat berdasarkan 5 aspek penilaian tersebut, maka pada tahun 2016 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mitra eksisting
   a. Indeks kepuasan terendah terdapat pada dimensi *tangible* dengan skor 78,5.
   b. Indeks kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi *empathy* dengan skor 86,5.

Based on the 5 aspects of assessment, in 2016 the result was:

1. Existing partners
   a. The lowest satisfaction index is in the dimension of tangible with the score of 78.5
   b. The highest satisfaction index is in the dimension of empathy with the score of 86.5

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

2. Mantan Mitra
   a. Indeks kepuasan terendah terdapat pada dimensi *tangible* dengan skor 78,6.
   b. Indeks kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi *empathy* dengan skor 85.8

Grafik Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo Tahun 2016

2. Ex-partners
The lowest satisfaction index is in the dimension of tangible with the score of 78.6
The highest satisfaction index is in the dimension of empathy with the score of 85.7

The Graph of Customer Satisfaction Index of Perum Jamkrindo 2016

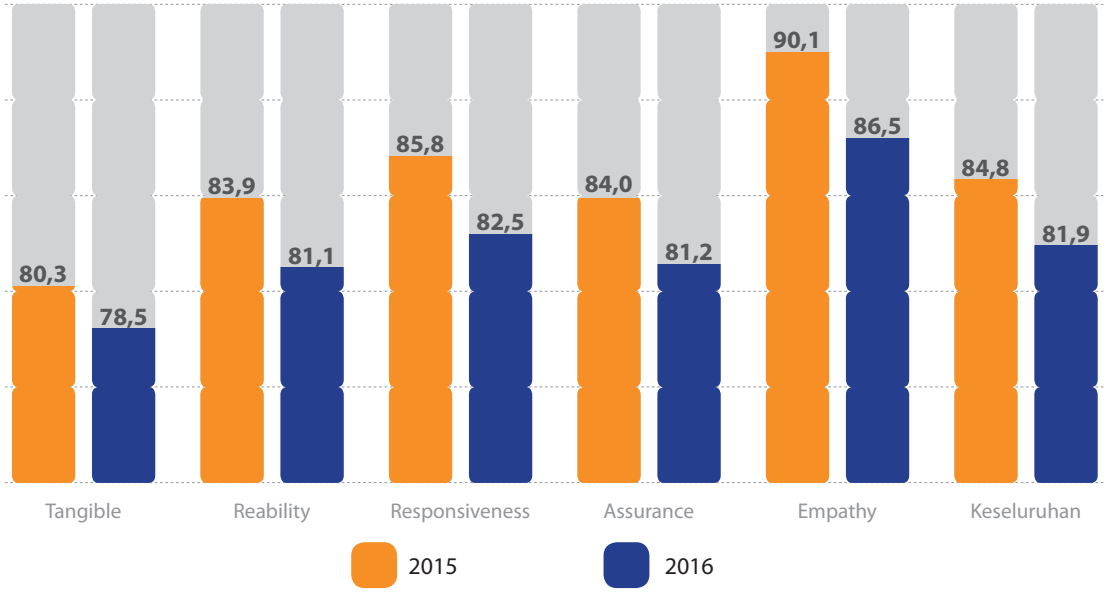

Berdasarkan grafik, kepuasan pelanggan (mitra eksisting) mengalami penurunan indeks kepuasan dari sebelumnya 84,8 di tahun 2015 menjadi 81,9 pada tahun 2016. Berdasarkan hasil analisa, menurunnya indeks kepuasan pelanggan di tahun 2016 disebabkan oleh aspek empathy dengan skor 86,5 dan aspek *responsiveness* dengan skor 82,5.

Indeks Kepuasan Per Wilayah

Indeks Kepuasan Pelanggan tertinggi pada tahun 2016 berada di Kanwil I dengan skor 86,3. Skor tersebut terutama didorong oleh dimensi *empathy* (93,6). Sementara wilayah dengan Indeks kepuasan pelanggan yang terendah dipegang oleh Kanwil II dengan skor 78,1 dengan dimensi yang memiliki skor tertinggi adalah *empathy* (81,8). Berikut tabel perbandingan skor penilaian antar wilayah:

Based on the graph, the customer satisfaction (existing partners) was decreased that the satisfaction index in 2015 was 84.8, and it was 81.9 in 2016. Based on the result of analysis, the decreased score of customer satisfaction index is caused by the aspect of empathy with the score of 86.5 and responsiveness with the socre of 82.5.

Satisfaction Index based on the regions

The highest Customer Satisfaction Index in 2016 belongs to Region I with the score of 86.3. The score is supported by the dimension of empathy (96.3). As for the region with lowest customer satisfaction, it is the Region II with the score of 78.1 with the highest dimension score for the dimension of empathy with the score of 81.8. The comparison table of the assessment score per region is presented as follows:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Indeks Loyalitas Pelanggan Perum Jamkrindo Per Wilayah — Customer Loyalty Index of Perum Jamkrindo Per Region

No	Dimensi *Dimension*	Kepuasan Pelanggan Per Wilayah *Customer Satisfaction at a Regional Level*									
		Wil I	Will II	Wil III	Wil IV	Wil V	Wil VI	Wil VII	Wil VIII	Wil IX	Nasional
1	*Tangible*	87.9	74.3	78.0	76.1	81.3	74.5	82.7	75.1	83.1	78.5
2	*Reliability*	80.8	77.7	81.7	78.5	83.1	80.6	85.2	78.5	83.4	81.1
3	*Responsiveness*	84.8	78.8	84.4	81.3	82.3	86.7	81.7	78.2	84.4	82.5
4	*Assurance*	84.1	77.7	81.4	81.5	83.1	79.8	82.7	78.1	82.5	81.2
5	*Empathy*	93.6	81.8	87.8	91.2	88.0	91.2	86.1	81.0	89.1	86.5
	Keseluruhan	86.3	78.1	82.6	81.7	83.6	82.5	83.7	78.2	84.5	81.9

Pendorong utama tingginya indeks kepuasan pelanggan di semua unit kerja, baik di wilayah I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII dan IX adalah dimensi *Empathy* yang diukur berdasarkan parameter sebagai berikut:

The main driver of the high customer satisfaction index in all working unit, from region I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, and IX is the dimension of empathy that was measured based on these parameters:

1	**Keramahan** karyawan dalam melayani pelanggan *The **friendliness** of employees in serving customers*
2	**Sikap** dan **perilaku** karyawan terhadap konsumen *The **attitudes** and **behavior** of employees to customers*
3	**Kesopanan** karyawan *The **politeness** of employees*
4	**Etika** berkomunikasi melalui **telepon** *The **ethics** of communicating by **telephone***
5	Kemauan karyawan **mendengarkan** keluhan konsumen *The willingness of employees in **listening** to customers'*

Indeks Loyalitas Pelanggan

Indeks loyalitas Pelanggan Perum Jamkrindo secara nasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,8. Tahun 2015 Indeks Loyalitas karyawan sebesar 75,4 maka di tahun 2016 naik menjadi sebesar 76,57 yang termasuk dalam kategori "BAIK".

Dengan skor indeks loyalitas sebesar 76,57 tersebut, menunjukkan Perum Jamkrindo telah berhasil melampaui target berdasarkan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang ditetapkan sebesar 75.

Customer Loyalty Index

Customer Loyalty Index of Perum Jamkrindo has been nationally increased compared to the previous year by 3.8 points. In 2015, the score was 75.4, and in 2016 it was 76.57 which lies in the category "GOOD".

With the loyalty index score of 76.57, it shows that Perum Jamkrindo has been surpassing the target based on the Revision of Corporate Budget Work Plan (RKAP), in which the target was 75 points.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Grafik Indeks Loyalitas Pelanggan Secara Nasional

Graph of Customer Loyalty Index Nationally

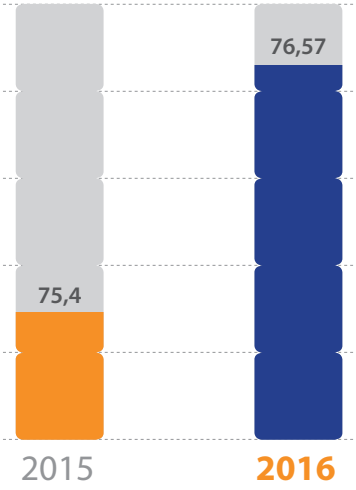

Hal ini menunjukkan bahwa indeks loyalitas pelanggan secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016.

It shows that the customer loyalty index has been increased nationally since 2015 to 2016.

Indeks Loyalitas per Wilayah

Loyalty Index Per Region

Seperti terlihat pada garfik dibawah ini, secara wilayah Indeks loyalitas Pelanggan tertinggi berada di Kanwil I dengan skor 79,93. Sementara wilayah dengan Indeks kepuasan pelanggan yang terendah dipegang oleh wilayah II dengan skor 68,75. Berikut grafik perbandingan skor penilaian antar wilayah.

As can be seen from the graph below, regionally the highest customer loyalty index belongs to Region I with the score of 79.93. As for the region with the lowest customer loyalty index, it is the Region II with the score of 68.75. The comparison graph of the assessment score among the regions is presented as follows:

Grafik Indeks Loyalitas Pelanggan per Wilayah

Customer Loyalty Index Graph per Region

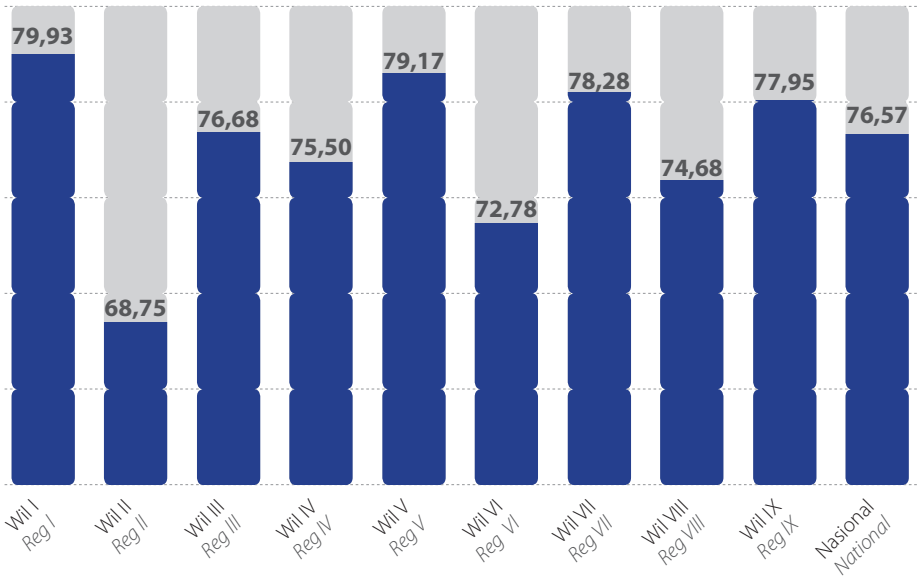

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait tanggung jawab kepada konsumen
Corporate Social Responsibility Relating to the Responsibility to Customers

Indeks Loyalitas per Aspek

Seperti terlihat pada tabel dibawah ini, Indeks loyalitas pelanggan tertinggi berada pada aspek *costumer attitude* dan aspek emotional sedangkan indeks loyalitas terendah berada pada aspek *switching barrier* dan aspek *behaviour*. Sementara indeks loyalitas per aspek yang paling tinggi adalah pada aspek emotional dengan rata-rata 81,69 dan aspek *customer attitude* dengan angka rata-rata 81,20. Berikut tabel perbandingan skor indeks loyalitas pelanggan per aspek.

Loyatly Index per Aspect

As can be seen on the table below, the highest customer loyalty index is in the aspect of customer attitude and aspect of emotional, as for the lowest loyalty index, it is in the aspect of barrier switching and the aspect of behavior. The highest loyalty index per aspect is the aspect of emotional with the average score of 81.69 and customer attitude with the average score of 81.20. The comparison table of customer loyalty index per aspects is presented as follows:

	Atribut *Attribute*	**Kepuasan(Mean)** *Satisfaction (Mean)*
Aspek *Switching Barrier* *Switching Barrier Aspect*		**65.94**
1	**Sulit** bagi saya untuk **pindah** ke Penjamin Kredit lain *It's hard for me to **move** to another Credit Guarantor*	72.75
2	Saya **tertarik** untuk mencoba pindah ke Penjamin Kredit lain *I am interested in trying to **move** to another Credit Guarantor*	57.50
3	**Sulit** bagi saya mendapatkan **layanan yang sepadan** yang bisa menggantikan Perum Jamkrindo *It's **hard** for me to get the **equivalent service** that can replace Perum Jamkrindo*	73.35
4	Perlu **biaya** yang cukup besar untuk **pindah** ke Penjamin Kredit lain *It **costs** a lot to **move** to another Credit Guarantor*	66.21
5	Saya tertarik dengan program **promosi** dari Penjamin Kredit lain *I am interested in the **promotion** program from other Credit Guarantor*	59.90
Aspek *Customer Attitude* *Customer Attitude Aspects*		**81.20**
1	Saya akan **tetap menggunakan** Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit debitur kami untuk 2 tahun mendatang *I will **keep using** Perum Jamkrindo as our credit guarantor for the next two years*	79.70
2	Saya **senang** menjadi pelanggan Perum Jamkrindo *I am **happy** to be a customer of Perum Jamkrindo*	82.96
3	Saya akan **merekomendasikan** Perum Jamkrindo kepada orang lain *I would **recommend** Perum Jamkrindo to others*	80.93
Aspek *Behaviour* *Behaviour Aspect*		**77.46**
1	Saya **paling sering** menggunakan fasilitas Perum Jamkrindo dibanding dengan Penjamin Kredit lain. *I use Perum Jamkrindo **the most often** compared to other Credit Guarantor.*	79.21
2	Dalam setahun, Perusahaan saya **paling banyak** mengeluarkan biaya sewa di Perum Jamkrindo dibandingkan Penjamin Kredit lain *Within a year, my Company **spent the most** rent on Perum Jamkrindo compared to other Credit Guarantor*	75.71
Aspek *Emotional* *Emotional Aspect*		**81.69**
1	Saya **merasa bangga** memakai Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit debitur kami. *I **feel proud** to use Perum Jamkrindo as the guarantor of our debtor's credit.*	80.65
2	Saya **merasa aman** memakai memakai Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit debitur kami *I **feel safe** using Perum Jamkrindo as the guarantor of our debtor's credit*	80.92
3	Saya **merasa** Perum Jamkrindo memiliki **citra yang baik.** *I **feel** that Perum Jamkrindo **has a good image.***	83.49

Laporan Keuangan

Financial Report

2015 Annual Report of Perum Jamkrindo
23

9 (SEMBILAN) AGENDA PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)

Seiring dengan terbentuknya Pemerintahan Baru periode 2014-2019 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka perkuatan ekonomi nasional dan pembangunan prioritas yang disebut Nawa Cita. Nawa Cita digagas untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun 9 (Sembilan) agenda prioritas nasional (Nawa Cita) adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (Sembilan) butir Nawa Cita tersebut, Pemerintahan baru memiliki keberpihakan yang kuat kepada pemberdayaan masyarakat kecil dan para pelaku UMKMK. Hal ini dapat terlihat dari komitmen Pemerintah untuk (1) membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa, (2) meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan (4) melakukan revolusi karakter bangsa.

Agar mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi sebagaimana telah menjadi program prioritas Pemerintah, Perum Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penjaminan kredit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perum Jamkrindo, dapat mengambil peran lebih banyak dalam pelaksanaan agenda pemerintah. Peran penting yang dapat diambil alih Perum Jamkrindo adalah membantu UMKMK untuk mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan, baik Bank maupun Non Bank, sehingga UMKMK dapat secara maksimal memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha UMKMK.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2016
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Diding S. Anwar
   Alamat kantor : Gedung Jamkrindo
   Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6
   Kota Baru Kemayoran, Jakarta
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I. Rusdonobanu
   Alamat kantor : Gedung Jamkrindo
   Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6
   Kota Baru Kemayoran, Jakarta
   Jabatan : Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

3. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Board of Director's Statement
Regarding The Responsibility
For The Consolidated Financial Statement
For The Year Ended
As of December 31, 2016
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

We the undersigned:

1. *Name* : *Diding S. Anwar*
   Office Address : *Gedung Jamkrindo*
   Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6
   Kota Baru Kemayoran, Jakarta
   Title : *President Director*

2. *Name* : *I. Rusdonobanu*
   Office Address : *Gedung Jamkrindo*
   Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6
   Kota Baru Kemayoran, Jakarta
   Title : *Risk Management, Investment and Finance Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.*

2. *The consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia have been prepared and presented in accordance with indonesian financial accounting standards, and:*
   a. *All information has been fully and correctly disclosed in Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements.*
   b. *Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they permit material information or fact.*

3. *We are responsible for Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's internal control system.*

This is our declaration, which is made truthfully.

Jakarta, 10 Februari 2017 /
Jakarta, February 10, 2017

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko/ *Risk Management, Investment and Finance Director*
Diding S. Anwar	**I. Rusdonobanu**

METERAI TEMPEL
8779FAEF485131683
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 Desember 2016 dan 2015

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
December 31, 2016 and 2015

Daftar Isi	*Halaman / Page*	*Table of Contents*
Laporan Auditor Independen	1 - 4	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	5 - 6	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 8	*Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Modal	9 - 10	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	11	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	12 - 83	*Notes to the Financial Statements*
Informasi Tambahan	84 - 87	*Supplementary Information*

*****

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

No : 12.01.01/LAI-JMK/HGK.HO/2017

Laporan Auditor Independen / *Independent Auditor's Report*

Kepada Dewan Pengawas dan Direksi/
To The Boards of Supervisory and Directors

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

MEMBER TIAG®
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards (SPKN) established by The Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2016 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial Statements take as a whole. The accompanying additional information of Perum Jaminan kredit Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2016 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entitiy Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare accompanying consolidated financial statements.

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Hal Lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other Matters (Continued)

The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedure applied in the audit of the accompanying consolidated financial statement in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, The Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor 12.01.01/LK-JMK/HGK.HO/2017 dan 12.01.01/LPI-JMK/HGK.H0/2017 tanggal 10 Pebruari 2017.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also examined the company's compliance to laws and regulations, and internal control. Compliance with laws and regulations, and internal control are the responsibility of the Company's management.

We submit our report regarding compliance with laws and regulations, and internal control separately with our report number 12.01.01/LK-JMK/HGK.HO/2017 and 12.01.01/LPI-JMK/HGK.H0/2017 dated February 10, 2017.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

Drs. Hertanto, M.S. Ak., CPA., CPMA., CA., CTA.
Nomor Register Akuntan Publik / *Registered of Public Accountant No. AP.0136*

Jakarta, 10 Pebruari / *February* 2017

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise

	Catatan / *Notes*	**31 Desember/ *December* 31, 2016**	**31 Desember/ *December* 31, 2015**	
ASET				***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	2f ,2u, 3	5.723.815.518.953	5.594.821.737.072	*Cash and Cash Equivalents*
Surat Berharga	2.f, 2.x,2.u,2.w, 4	3.209.124.484.337	2.925.021.596.568	*Marketable Securities*
Piutang Imbal Jasa Penjaminan-Bersih	2.f 2.q, 2.u 2.l, 2.v, 5	2.347.025.423.821	1.442.621.583.924	*Guarantee Receivables - Nett*
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	2.f, 2.h, 2.l, 6	112.345.807.139	97.537.616.592	*Reguarantee Receivables - Nett*
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	2.f, 2.g 2.l, 7	955.166.363	955.166.363	*Loans - Nett*
Piutang Lain-Lain	2.f, 8	81.727.777.247	58.861.405.782	*Other Receivable*
Pajak Dibayar Dimuka	2.o, 17.a	81.540	33.878.187.274	*Prepaid Tax*
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	2.i, 9	991.153.022.073	807.740.604.031	*Prepaid Premium and Fees*
Beban Dibayar Dimuka	2.i, 10	25.019.756.237	13.903.451.737	*Prepaid Expenses*
Aset tetap - Bersih	2.j, 11	441.995.392.921	396.122.883.172	*Fixed assets - Nett*
Aset Pajak Tangguhan	2.o, 17.e	174.614.384.915	168.754.417.106	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	2.k, 12	300.641.059.506	102.774.327.316	*Other Assets*
JUMLAH ASET		**13.408.417.875.052**	**11.642.992.976.937**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December* 31, 2016	31 Desember/ *December* 31, 2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang Klaim	2.r, 13	11.649.581.603	13.067.185.620	*Claim Payable*
Utang Pajak	2.o, 17.b	72.812.076.712	29.218.476.156	*Tax Payable*
Utang Penjaminan Ulang	15	66.603.673.011	63.443.022.892	*Co-Guarantee Payable*
Pendapatan Ditangguhkan	16	2.346.246.536.826	1.615.781.082.658	*Deferred Income*
Cadangan Klaim	2.s, 14	404.959.428.572	321.870.551.783	*Claims Reserve*
Utang Lain-Lain	19	178.409.250.860	105.287.775.811	*Other Payable*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.t,18	28.168.339.472	18.123.908.316	*Employee Benefits Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**3.108.848.887.056**	**2.166.792.003.236**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Penyertaan Modal Negara	20.a	7.638.733.365.160	7.138.733.365.160	*Government's Share Capital*
Cadangan - Cadangan	20.b	1.828.847.314.243	1.515.215.380.178	*Reserves*
Saldo Laba		692.044.895.364	625.354.338.228	*Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	20.c	139.930.290.522	196.885.040.558	*Other Equity Component*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**10.299.555.865.289**	**9.476.188.124.124**	***Total Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Kepentingan Non-pengendali	2.v, 21	**13.122.707**	**12.849.577**	***Non-controlling Interest***
JUMLAH EKUITAS		**10.299.568.987.996**	**9.476.200.973.701**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.408.417.875.052**	**11.642.992.976.937**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2016	2015	
PENDAPATAN PENJAMINAN				***GUARANTEE INCOME***
Imbalan Jasa Penjaminan	2.p, 22	1.854.242.602.032	1.562.732.247.475	*Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi	2.p, 22	35.017.148.083	18.148.405.223	*Comission Fee*
Premi Co Guarantee	2.p, 22	(166.237.457.658)	(227.936.052.266)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	2.p, 22	(118.610.157.602)	(66.811.226.080)	*Reinsurance Premium*
Restitusi IJP	2.p, 22	(15.971.543.801)	(8.645.787.813)	*Guarantee Restitution*
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	2.p, 22	1.588.440.591.054	1.277.487.586.539	*Net Guarantee Revenues*
BEBAN KLAIM				***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	2.r, 23	(764.476.221.782)	(994.434.169.603)	*Claim Expenses*
Penurunan Cadangan Klaim	2.s, 23	(83.842.316.720)	72.740.056.879	*Decrease in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.l, 23	(23.264.905.716)	(968.303.310)	*Impairment Losses of Receivable*
Jumlah Beban Klaim		(871.583.444.218)	(922.662.416.034)	*Total Claim Expenses*
PENJAMINAN BERSIH		**716.857.146.836**	**354.825.170.505**	***OPERATING INCOME - NET***
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	24	**587.678.040.947**	**599.525.302.215**	***INVESTMENT INCOME - NET***
PENDAPATAN LAIN-LAIN	26	**294.070.091.480**	**307.230.276.057**	***OTHERS INCOME***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	25	230.343.418.883	153.165.846.545	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	25	269.332.189.035	206.283.759.250	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	25	128.798.297.931	95.344.119.356	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	25	28.677.318.267	15.733.866.325	*System, Technology, and Operating Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha		**657.151.224.116**	**470.527.591.476**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK		**941.454.055.147**	**791.053.157.301**	***INCOME BEFORE TAX***
Pajak kini		235.897.638.707	180.693.139.344	*Current income tax*
Beban (Manfaat) pajak tangguhan		13.511.180.553	(14.994.320.273)	*Tax Benefit (Deferred) income tax*
Beban pajak penghasilan - bersih		249.408.819.260	165.698.819.071	*Income tax expenses - net*
LABA TAHUN BERJALAN		**692.045.235.888**	**625.354.338.230**	***CURRENT YEAR INCOME***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan /Notes	Penyertaan Modal Pemerintah /Government's Share Placement	Cadangan Modal /Capital Reserve	Cadangan Umum /General Reserve	Cadangan Tujuan /Special Reserve	Cadangan Dana Teknis /Technical Fund Reserve	Saldo Laba /Retained Earnings	Pendapatan Komprehensif Lainnya /Other Comprehensive Income	Jumlah /Total	Kepentingan Non Pengendali /Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas /Total Equity	
Saldo 1 Januari 2015		6.638.733.365.160	904.000.000	865.064.788.957	186.707.510.860	78.274.593.035	663.202.848.435	(28.284.142.694)	8.404.602.963.753	12.512.606	8.404.615.476.359	***Balance as of January 1, 2015***
Penyertaan Modal Negara	20	500.000.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	*Government's Share Placement*
Penyertaan Saham di Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	336.971	336.971	*Subsidiary's Share Placement*
Eliminasi Saldo Laba akibat Pengaruh Perubahan												*The Elimination of Retained Earnings in Effect of*
Kebijakan Akuntansi		-	-	-	-	-	(13.534.896.127)	-	(13.534.896.127)	-	(13.534.896.127)	*Accounting Changes*
Pembagian Laba Tahun 2015:							-	-	-	-	-	*Distribution of 2015 profits :*
Cadangan Umum	20	-	-	273.264.487.326	-	-	(273.012.370.308)	-	252.117.018	-	252.117.018	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	20	-	-		111.000.000.000	-	(111.000.000.000)	-	-	-	-	*Special Reserve*
Cadangan Dana Teknis	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Technical Fund Reserve*
Dividen	20	-	-		-	-	(265.655.582.000)	-	(265.655.582.000)	-	(265.655.582.000)	*Dividend*
Dana Program Kemitraan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Partnership Fund Program*
Dana Bina Lingkungan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Community Development Fund*
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	-	625.354.338.229	-	625.354.338.229	-	625.354.338.229	*Current Year Income*
Dampak Penerapan PSAK No 24 (Revisi 2013), Setelah Pajak Penghasilan:												*Effect of Adoption of SFAS No.24 (Revised 2013), Net of Income Tax*
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual		-	-	-	-	-	-	(67.988.562.506)	(67.988.562.506)	-	(67.988.562.506)	*Financial Instruments Available for Sale*
Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-	-	-	289.434.424.383	289.434.424.383	-	289.434.424.383	*Fixed Assets Revaluation*
Imbalan Pasca Kerja		-	-	-	-	-	-	3.723.321.374	3.723.321.374	-	3.723.321.374	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2015		**7.138.733.365.160**	**904.000.000**	**1.138.329.276.283**	**297.707.510.860**	**78.274.593.035**	**625.354.338.229**	**196.885.040.557**	**9.476.188.124.124**	**12.849.577**	**9.476.200.973.701**	***Balance as of December 31, 2015***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEARS PERIODS ENDED

DECEMBER 31, 2016 AND 2015

(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan /Notes	Penyertaan Modal Pemerintah /Government's Share Placement	Cadangan Modal /Capital Reserve	Cadangan Umum /General Reserve	Cadangan Tujuan /Special Reserve	Cadangan Dana Teknis /Technical Fund Reserve	Saldo Laba /Retained Earnings	Pendapatan Komprehensif Lainnya /Other Comprehensive Income	Jumlah /Total	Kepentingan Non Pengendali /Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas /Total Equity	
Saldo 1 Januari 2016		**7.138.733.365.160**	**904.000.000**	**1.138.329.276.283**	**297.707.510.860**	**78.274.593.035**	**625.354.338.229**	**196.885.040.557**	**9.476.188.124.124**	**12.849.577**	**9.476.200.973.701**	***Balance as of January 1, 2016***
Penyertaan Modal Negara	20	500.000.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000	*Government's Share Placement*
Penyertaan Saham di Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Subsidiary's Share Placement*
Eliminasi Saldo Laba akibat Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*The Elimination of Retained Earnings in Effect of Accounting Changes*
Reklasifikasi Laba Atas Aset Revaluasi							954.764.948		954.764.948		954.764.948	*Reclassification of Gain on Revaluation Asset*
Pembagian Laba Tahun 2015 :												*Distribution of 2015 profits :*
Cadangan Umum	20	-	-	313.631.934.065	-	-	(313.631.934.065)	-	-	-	-	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	20	-	-		-	-	-	-	-	-	-	*Special Reserve*
Cadangan Dana Teknis	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Technical Fund Reserve*
Dividen	20	-	-		-	-	(312.677.169.113)	-	(312.677.169.113)	(67.394)	(312.677.236.507)	*Dividend*
Dana Program Kemitraan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Partnership Fund Program*
Hak Non Pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Minority Interest*
Dana Bina Lingkungan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Community Development Fund*
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	-	692.044.895.364	-	692.044.895.364	340.524	692.045.235.888	*Current Year Income*
Dampak Penerapan PSAK No 24 Penghasilan:												*Effect of Adoption of SFAS No.24 Income Tax*
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual		-	-	-	-	-	-	(50.243.002.679)	(50.243.002.679)	-	(50.243.002.679)	*Financial Instruments Available for Sale*
Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-	-	-	(954.764.948)	(954.764.948)	-	(954.764.948)	*Fixed Assets Revaluation*
Imbalan Pasca Kerja		-	-	-	-	-	-	(5.756.982.407)	(5.756.982.407)	-	(5.756.982.407)	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2016		**7.638.733.365.160**	**904.000.000**	**1.451.961.210.348**	**297.707.510.860**	**78.274.593.035**	**692.044.895.363**	**139.930.290.522**	**10.299.555.865.289**	**13.122.707**	**10.299.568.987.996**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

PERUM JAMKRINDO | Kerja Nyata Bersama UMKMK, Memajukan Ekonomi Kerakyatan 463

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
LAPORAN KONSOLIDASIAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS CONSOLIDATED
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in Full Rupiah)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan	1.547.449.794.216	1.731.354.126.426	*Receipt from Guarantee Fee*
Pembayaraan Klaim dari Mitra Co Guarante	(50.461.628.972)	(51.119.849.733)	*Payment to Co Guarantee Partners*
Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya	334.115.546.662	434.450.134.913	*Receipt from Other Operating Activities*
Pembayaran Imbalan Jasa Co Guarantee	(374.632.983.695)	(426.694.035.307)	*Payment of Fee Co Guarantee*
Pembayaran Klaim	(766.647.265.732)	(993.332.757.051)	*Payment of Claims*
Pembayaran Biaya	(252.820.967.336)	(277.917.817.651)	*Payment of Expenses*
Pembayaran Aktivitas Lainnya	(236.430.333.415)	(140.371.851.318)	*Payment of Other Activities*
Pembayaran kepada Karyawan	(259.027.305.479)	(194.954.601.698)	*Payment to Employee*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(153.985.341.304)	(173.043.575.726)	*Payment of Income Tax*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(212.440.485.055)**	**(91.630.227.145)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Penerimaan Hasil Investasi	568.070.291.224	578.423.335.446	*Receipt from Return of Investment*
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	9.240.053.200	9.752.987.280	*Receipt from Other Investment*
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(346.512.081.306)	(289.814.540.407)	*Placement of Allowed Investment*
Pembelian Aset Tetap	(59.248.545.965)	(39.745.649.135)	*Acquisition of Fixed Assets*
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(17.438.213.710)	(3.101.124.731)	*Payment of Other Investment Activities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**154.111.503.443**	**255.515.008.453**	***Net cash used in investment activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Tambahan Modal Pemerintah	500.000.000.000	500.000.000.000	*Paid in Government Capital*
Dividen	(312.677.236.507)	(265.655.581.999)	*Dividend*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**187.322.763.493**	**234.344.418.001**	***Net cash provided from financing activities***
(Penurunan) kenaikan kas dan Setara kas	128.993.781.881	398.229.199.309	***(Decreased) increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.594.821.737.072	5.196.592.537.763	***Cash and equivalents at the beginning of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**5.723.815.518.953**	**5.594.821.737.072**	***Cash and equivalents at the end of year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 13 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

b. Lingkup Usaha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan Bank atau badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

c. Struktur dan Manajemen

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 Pada tanggal 26 April 2016 tentang Struktur Organisasi Perum Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Perubahan Nama dan Fungsi Susunan Organisasi.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Company

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") was established under the name Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, was established based on Government Regulation No. 51 year 1981 which is merged from Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which is formed by 1970. Based on the Government Regulation No. 51 year 1981, which is renewed by Government Regulation No. 27 year 1985, here in after by Government Regulation No. 95 year 2000 dated November 7, 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed by Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, and based on PP No. 41 Year 2008 the name was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

The company located in Jakarta, which Head Office located in Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta and have 9 regional offices, 56 branch offices, and 13 unit service offices which spread over in all Indonesia.

b. Scope of Business

Based on Government Regulation No. 41 Year 2008, the main business activity of Company is guarantee of loan either in form of cash or non cash which is provided by Bank or Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

c. Organizational and Management Stucture

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2016

The Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 on April 26, 2016 about Organisation Structure of Perum Jaminan Kredit Indonesia decided The Changing of Name and Fuction on Organisation Structure.

Dewan Pengawas		***The Board of Supervisor Council***
Ketua	Braman Setyo	*Chairman*
Anggota	Noor Ida Khomsiyati	*Member*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	Diding S. Anwar	*President Director*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Nanang Waskito	*HRD, General Affair and Compliance Director*
Direktur Bisnis Penjaminan	Bakti Prasetyo	*Business Guarantee Director*
Direktur Operasional dan Jaringan	R. Sophia Alizsa	*Operational and Network Director*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	*Finance, Investment and Risk Management Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Dahlan Siamat	*Chairman*
Anggota	Fajar Karyanto	*Member*

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan No.SK-76/MBU/4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia pada tanggal 12 April 2016 yang menetapkan pemberhentian Ony Suprihartono sebagai anggota dewan pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia dan mengangkat Noor Ida Khomsiyati sebagai anggota dewan pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Organizational and Management Stucture (Continued)

According to a decree No.SK-76/MBU/4/2016 on the dismissal and appointment of the Chairman of the supervisory board of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia on April 12, 2016 which decided the dismissal Ony Suprihartono as member of the supervisory board of Perum Jaminan Kredit Indonesia and decide Noor Ida Khomsiyati as member of the supervisory board of Perum Jaminan Kredit Indonesia.

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2015 as follows:

Dewan Pengawas		***The Board of Supervisor Council***
Ketua	Braman Setyo	*Chairman*
Anggota	Ony Suprihartono	*Member*
Anggota	Nasaruddin Umar	*Member*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	Diding S. Anwar	*President Director*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Nanang Waskito	*HRD, General Affair and Compliance Director*
Direktur Bisnis Penjaminan	Bakti Prasetyo	*Business Guarantee Director*
Direktur Operasional dan Jaringan	R. Sophia Alizsa	*Operational and Network Director*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	*Finance, Investment and Risk Management Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Dahlan Siamat	*Chairman*
Anggota	Fajar Karyanto	*Member*

Jumlah pegawai Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of employees of Perum Jamkrindo are as follows (unaudited):

	Tetap / *Permanent*	Tidak tetap / *Non-permanent*	Jumlah / *Total*	
2016	891	199	1.090	**2016**
2015	611	316	927	**2015**

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiary

Company has direct ownership in the following Subsidiary:

Entitas Anak/ The Subsidiary	***Kegiatan usaha/ Business activity***	**Tanggal mulai beroperasi komersial / *Date started commercial operations***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownerships***	***Jumlah Aset / Total Assets***
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Penjaminan Syariah	19 September 2014	99,995%	Rp354.758.611.638

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 19 September 2014.

Entitas anak bergerak dalam bidang usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was established based on Notarial Deed No. 68 dated September 19, 2014.

Main business of the subsidiary is guarantee business based on syariah principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian Perum Jamkrindo dan Entitas Anak ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Pada tanggal 10 Februari 2017.

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No.104, "Akuntansi Istihna", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No.106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK No.110, "Akuntansi Sukuk".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

1) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

2) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas; dan

3) Pendapatan imbalan (ujrah) jasa tertentu dan pendapatan adminstrasi pembiayaan yang diakui menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensial.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of Perum Jamkrindo and Subsidiaries were completed and authorised for issuance by The Board of Directors on February 10, 2017.

The significant accounting policies, applied consistently in the preparation of the financial statements of the company for the years ended December 31, 2016 and 2015 were as follows:

a. Basis of preparation of the consolidated financial

The Consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia, used the historical cost basis, except for financial assets classified as available for sale, financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss, and on an accrual basis, including the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 101 (Revised 2011), "Presentation of Financial Statements Sharia", SFAS 102, "Accounting Murabaha", SFAS No.104, "Accounting Istihna "SFAS No. 105, "Accounting Mudaraba", SFAS 106, "Accounting Musharaka", SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS 110, "Accounting for Sukuk".

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by the revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, with some exceptions as follows:

1) Foreclosed assets in connection with the completion of the financing are recorded at net realizable value;

2) Calculation of income available to the results using the cash basis; and

3) Income benefits (ujrah) certain services and financing revenue administration recognized using the cash basis.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows reporting, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits can be withdrawn at any time and short-term liquid investments with original maturities of three months or less, to the extent not used as collateral and unrestricted.

Conventional entity conducting sharia transaction do not need to set up sharia financial statements in full but only report the sharia transaction in accordance with the accounting standards of sharia in conventional financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan beserta Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun tertentu, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan kedalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut dimulai diperoleh hingga saat pengendalian atas Entitas Anak itu berakhir.

Pengendalian dianggap ada bilamana Perusahaan menguasai lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara di Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota direksi di Entitas Anak.

Seluruh saldo utang piutang serta transaksi antar perusahaan konsolidasian dieliminasi. Hak pemegang saham minoritas dalam ekuitas dan hasil usaha dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan

c. Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak memperoleh bukti objektif tentang ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

d. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary are under the control of the Company.

In terms of control to the subsidiary commencing or ending in a particular year, then the results of operations of subsidiaries accounted into the consolidated financial statements only from the date that the control starts up to the date control of the subsidiary ended.

Control is presumed to exist where more than fifty percent (50%) of the voting rights in the Subsidiary, or control the removal or appointment of a majority of the directors in the Subsidiary.

The entire balance of accounts payable as well as transactions between consolidated companies are eliminated. Rights of minority shareholders in the equity and results of operations of consolidated subsidiary are presented separately in the consolidated financial statements.

Subsidiary is fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another subsidiary, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control.

c. Going Concern

Management has conducted an assessment of the Company's ability to continue its business continuity and convinced that the company has sufficient resources to continue its efforts in the future. In addition, the management company does not obtain objective evidence about uncertainties of material that can cause significant losses to the company's ability to continue its business. Therefore, the company's financial statements for the year ended December 31, 2016 have been prepared on the basis of a sustainable business.

d. Use of Judgements, Estimates and Assumptions

In preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard requires management to make judgments, estimates and assumptions that effect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui Pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Pertimbangan dan estimasi signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Perusahaan melakukan penilaian tentang kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih dari agunan.

Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan meriviu piutang secara individual pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2016, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Use of Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

Estimate and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and future periods affected by the revised estimate.

Figures in these financial statements are rounded to and stated in Rupiah, unless otherwise stated.

The most significant uses of the judgement and estimates are as follows:

Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Company makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

Impairment Losses on Receivables

The Company reviews its receivable individually at each the end of reporting dates to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting

On January 1, 2016, Perum Jamkrindo and Subsidiaries adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

1) Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang klasifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 dan PSAK 19 Aset Tak Berwujud bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

2) Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Pasca Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.

PSAK 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

3) Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi.

Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria terlalu terpenuhi.

4) PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

5) PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

The adoption of the new or revised standards and interpretations, which are relevant to Perum Jamkrindo and Subsidiaries operations and resulted in an affect on the consolidated financial statements, are as follows:

1) Amandments to SFAS 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the accepted method for depreciation and amortization.

The amendments clarify the principle in SFAS 16 and SFAS 19 Intangible Asset that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.

2) Amendment to SFAS 24: Employee Benefits on Defined benefit plans: Employee Contributions.

SFAS requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.

3) Amendments to SFAS No. 65: Consolidated Financial Statements on Investment Entities: Application Consolidation Exceptions.

The amendments clarify the consolidation exceptions for investment entities when certain criteria are met.

4) SFAS 7 (2015 Improvement): Related Party Disclosures.

The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.

5) SFAS 68 (2015 Improvement): Fair Value Measurement.

The improvement clarifies that the portfolio exception in SFAS 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of SFAS 55.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

6) PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

7) PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak berwujud.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Berlaku efektif 1 Januari 2017:

Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan.

Amandemen ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas, urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi
Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, piutang *co-guarantee*, pinjaman yang diberikan dan piutang lain-lain.

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), pada saat pengakuan awal aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
2) pinjaman yang diberikan dan piutang;
3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; dan
4) aset keuangan tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

6) SFAS 16 (2015 Improvement): Fixed Assets

The improvement clarifies that in SFAS 16 and SFAS 19 that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalued amounts.

7) SFAS 19 (Penyesuaian 2015): Intangible Asset

The improvement clarifies that in SFAS 16 and SFAS 19 the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalued amounts.

Effective January 1, 2017:

Amendments to SFAS No. 1: Presentation of Financial Statements on Disclosure Initiative.

The amendments provide clarification on the application of the requirements of materiality, the flexibility of systematic order of the notes to the financial statements and the identification of significant accounting policies.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

f. Financial Asset and Financial Liabilities

Classification
The Company classifies its financial instruments into classes that reflects the nature of the information and considering the characteristics of the financial instruments.

Financial Asset
The company financial assets consist of cash and cash equivalent, marketable securities, co-guarantee receivable, loans and other receivable.

Under SFAS No. 55 (Revised 2014), at initial recognition, financial assets are classified into the following categories:

1) financial assets at fair value through profit or loss;
2) loans and receivables;
3) held-to-maturity financial assets; and
4) available-for-sale financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya berdasarkan tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

1) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang Pada saat pengakuan awal ditetapkan Pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan Piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired.

1) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and The Company does not intend to sell immediately or in the short term.

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the income statement as 'Allowance for impairment losses'.

2) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments are non derivative financial assets with fixed or determinable payments and have fixed maturities which is the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, and are not specified at fair value through profit loss or available for sale.

- *those that the Company upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company designates as available for sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

3) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non-derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

- Pengakuan pendapatan dan beban

a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai "keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual".

Ketika aset keuangan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Asset (Continued)

2) Held-to-maturity financial assets (Continued)

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of an impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the income statement as "Allowance for impairment losses".

3) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non derivative financial assets that designated as available for sale or are not classified in any of the other categories of financial assets.

- *Income and expense recognition*

a. For available-for-sale securities and financial assets and liabilities held at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of income.

The change at fair value of financial assets classified as available for sale are recognized in other comprehensive income as "gains or losses from changes at fair value of financial assets available for sale".

When financial assets classified as available for sale have been sold, the accumulated fair value aejustments recognized in equity are included in the income statement. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang *co-guarantee* dan liabilitas lain-lain.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi dan Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

g. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Liabilities

The company classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities are measured by amortized cost. Financial liabilities of the Company consits of claim payable, co-guarantee payable and other liabilities.

At the time of initial recognition, financial liabilities are amortized cost category recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Derecognition

The Company terminates recognition of financial assets when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transferred all rights to receive the contractual cash flows of the financial asset in a transaction in which the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the asset transferred financial. Any rights or liabilities for financial assets that are transferred incurred or that are still owned by the Company is recognized as a separate asset or liability.

The Company terminates recognition of financial liability when the liability specified in the contract are released or canceled or expired.

Classes of Financial Instrument

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Offseting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, the Company has a legally enforceable right to offset the recognised amounts and intend to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

g. Loans

Loans are financial assets nonderivatif with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and an aeditional cost to acquire the asset, and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah Pinjaman Bagi Hasil (PBH) dan pinjaman koperasi pegawai. Pinjaman yang diberikan disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

h. Piutang *Co-Guarantee* dan Piutang *Re-Guarantee*

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee.*

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *reguarantee* pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Acoount*), namun pembayaran belum dilakukan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee* , beban *re-guarantee* , beban *fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

j. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perum Jamkrindo menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Loans (Continued)

Included in loans is the loan-sharing (PBH) and loan cooperative employees. Loans are recorded net of allowance for impairment losses.

Loans are written off when there is no realistic prospect of the return of the loan. The loans can not be repaid is written off by debiting the allowance for impairment losses. Subsequently repayment on loans previously written off are credited to the allowance for impairment losses in the statement of financial position.

h. Co-Guarantee and Re-Guarantee Receivable

Payment of claims to the sole recipent of a guarantee that partners co-guarantee and partners re-guarantee are recorded as a receivable in the settlement.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occur a dependent partner co-guarantee and partner re-guarantee.

Receivables in the settlement are recognized as Co-guarantee Receivables in the completion of when partners co-guarantee accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Perum Jamkrindo with partners of Co-guarantee), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognized as a receivables re-guarantee at the time of the SOA (Statement of Acoount), but the payment has not been made.

i. Prepaid Expense

Expenses are allocated according to the useful life of each charge with a straight-line method (straight-line method).

Prepaid co-guarantee expense, re-guarantee expense, fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortized proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/Kafalah Service Fee.

j. Fixed Assets

On December 31, 2016, Perum Jamkrindo applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memilki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)*

j. Fixed Assets (Continued)

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and bulidings recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreasing in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expenses in the current year. If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or lossupon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Jenis Aset *(Asset Type)*	Masa Manfaat (tahun) *Useful Life (year) Annual*	Penyusutan Per Tahun (%) *Depreciation (%)*
Bangunan Gedung (*Buildings*)	20-30	3,33-5
Kendaraan Bermotor (*Vehicle*)	5	20
Inventaris (*Equipment*)	2-10	50-10

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya Pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Costs after the initial recognition are recognized as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only if the company is likely to benefit economically in the future with respect to the assets and the cost of the item can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak dengan menggunakan metode garis lurus.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

k. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan review periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pernbelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets (Continued)

All cost and expenses incurred in relation with the acquisition of the landright, such as license fee, survey and measurement cost, notarial fees and taxes, are deferred and presented separately from the cost of the landright was presented as part of "Other Assets" in the statements of financial position, and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

k. Intangible Assets

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The carrying amount of assets immediately reduced by the amount that can be recovered if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

At each reporting date the Company perform periodic reviews of fixed assets to ensure the remaining useful lives, residual values and depreciation method are comparable with previous estimates.

At each reporting date the Company perform conducts a review to determine whether there is any indication of impairment.

Intangible assets are initially recognized at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada Pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan diikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (15-20 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Intangible Assets (Continued)

The Company assesses whether the useful life of intangible assets is limited or unlimited and, if limited, period of time or number of production or similar units quantity produced during useful life. Intangible assets are considered by the Company to have an indefinite useful life when, based on an analysis of all relevant factors, there is no limit in sight at the moment over the period the asset is expected to generate net cash flows of the entity.

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortisation begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortization stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale. The method of amortization is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

1. Licences

Licences are disclosed at historical cost licences have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation.

Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licences over their estimated useful lives (15-20 years).

2. Computer Software

Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives (3-5 years).

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. Costs that are directly associated with the production of identifiable, and unique software products controlled by company, and that will probably generate economic benefits exceeding costs more than one year, are recognised as intangible assets. Direct costs include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

2. Piranti Lunak Komputer (Lanjutan)

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari tiga tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan review periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

l. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan Perusahaan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan dan faktor-faktor relevan lainnya). Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Intangible Assets (Continued)

2. Computer Software (Continued)

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives (not exceeding three years).

At each reporting date the assets perform periodic reviews to ensure intangibles amortization period and amortization method is in accordance with previous estimates.

l. Allowances for Impairment of Financial Assets

The company, assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or the company of financial assets is impaired.

A financial asset or the company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of' one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the company of financial assets that can be reliably estimated.

1. Financial Assets carried at amortised cost

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value, of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the, loss is recognised in the consolidated income statement. If a loan or held-to--maturity investment has a variable interest rate) the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the company may measure impairment on the basis of an instruments fair value using an observable market price.

For the purposes of a collective evaluation of impairment; financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the company graeing process that considers asset types industry, geographical location, collateral type past due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows from groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

I. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Arus kas masa datang dan kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pemah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pemah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini: yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Allowances for Impairment of Financial Assets (Continued)

Future cash flows in a Company of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the Company and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is aejusted on the basis of current observable data to reflect the effect of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the company and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the company to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreeses and the decrease can be related objectively to an event occurring, after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtors credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by aejusting the allowance account The amount of the reversal is recognised in the income statement.

Interest income on financial assets is impaired continues to be recognized on the basis of interest rates used to discount the future cash flows in measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss decreases impairment, the impairment loss previously recognized to be restored and the recovery is recognized in the income statement.

Decrease in fair value of available-for-sale financial assets has been recognized in other comprehensive income and there is an objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification aejustment even though the financial asset has not been derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

   Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

2. Aset yang tersedia untuk dijual

   Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi instrument ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi.

   Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Allowances for Impairment of Financial Assets (Continued)

1. Financial Assets carried at amortised cost (Continued)

The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss is the difference between the acquisition cost (net of principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss before financial asset has been recognized in profit or loss.

2. Assets classified as available for sale

Impairment losses are recognized in profit or loss on investment in equity instruments classified as available for sale are not reversed through profit or loss.

If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

m. Impairment of Non-Financial Assets

The carrying amount of financial assets that are not assets of the Company, except for deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If such an indication exists, the recoverable value of the asset will be estimated.

The recoverable value of an asset or cash-generating unit is the higher of the amount between its value in use and fair value of an asset or cash-generating unit less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the present cash value and the risks specific to the asset.

For the purpose of impairment testing, assets that can not be tested individually be combined in smaller groups that provide cash inflows of Sustainable use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups over assets ("Cash Generating Unit" or "UPK").

Provision for impairment is recognized if the carrying amount of an asset or UPK exceeds its recoverable value. Provision for impairment loss is recognized in profit or loss for the year.

Recovery of impairment loss, for non-financial assets, are recognized if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount since the last impairment testing. Reversal of impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui Pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwil atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Interest/ Profit Sharing Income

Interest income are recognised in the statement of income using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future losses. This calculation covers all commision, provision, and other forms accepted by the parties in the contract which are an integral part of effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of loss on impairment, then the interest income subsequently acquired is recognized based on interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or ubstantially enacted asat reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan aeanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, Pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah

p. Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah, Pendapatan Komisi *Re-Guarantee*, Pendapatan Jasa administrasi Penjaminan, Beban Komisi Agen, *Fee based Income* Bank Pelaksana, Beban *Co-Guarantee* dan Beban *Re-Guarantee*

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah, pendapatan komisi *re-guarantee* dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari IJP, beban *fee based income-bank* pelaksana, beban *co- guarantee* dan beban *re-guarantee* diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah dan pendapatan komisi/ ujrah *re-guarantee* yang besarnya dinyatakan sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan kecuali sertifikat penjaminan existing yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2013 diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan dengan batas waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Beban *fee based income-bank* pelaksana, beban komisi/ ujrah agen yang besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJP, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan *fee base income-bank* pelaksana, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* .

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan dan pendapatan komisi *re-guarantee* , serta beban dibayar dimuka atas *fee based income-bank* pelaksana, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Taxation (Continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

p. Guarantee/ Kafalah Service Fee, Re-Guarantee Commission Fee, Guarantee administration Service Fee, Agent Commission Expenses, Fee Based Income-Executive Bank and Co-Guarantee Expenses, and Re-Guarantee Expenses

Underwriting compensation income, commission income and expenses re-guarantee agency commission in the amount expressed as a certain percentage of the IJP, the burden of fee-based income-bank executive, co-guarantee load and re-load the guarantee recognized since Guarantee Certificate (SP) was published.

Income guarantee/ kafalah compensation and commission/ ujrah income guarantee in the amount of re-guarantee are recognized as deferred revenue and amortized over the period of validity of the certificate unless the certificate of guarantee existing guarantees issued prior to January 1, 2013 is amortized in accordance with the Guarantee Certificate validity period with a maximum time limit of 48 (forty-eight) months.

administrative services revenue assurance is recognized when all of Guarantee Certificates (SP) was published.

Fee-based income expenses for banks, commission/ ujrah expenses for agent calculated based on Guarantee Fee on certain percentage, co-guarantee and re-guarantee expenses that more than one year are recognized as prepayments and amortized in accordance with the Guarantee Certificates validity periods.

Underwriting fee income is presented on a gross basis before the deductible fee income base-bank executive, agent commission expense, Co-Guarantee expense and re-guarantee expense.

If there is an accelerated repayment of the loan collateral, the amount of the guarantee fee income and commission income re-guarantee, as well as prepaid expenses over the bank's fee-based income-executor, agent commission expense, burden of co-guarantee and re-guarantee loads are still suspended entirely recognized to profit or loss for the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan Utang Perusahaan kepada pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah permohonan/ pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan.

r. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

s. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,25% dari total nilai penjaminan yang ditanggung perusahaan.

Kenaikan (penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

t. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program imbalan pasca kerja dilaksanakan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dengan metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini adalah *Projected Unit* Credit, sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK 24 (Revisi 2014).

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Claim Payable

Claim payable is debts of the Company to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claim payable are debts that have been processed and approved but not yet paid. Payables are stated at the amount of claim has been authorization dan paid.

r. Claim Expenses

Claim expenses are recorded at the time of the loss. Claim expense that have been approved by the committee but has not made a payment claim is recorded as a debt claim.

Changes in the amount of debt claims, as a result of the review process further and the difference between the amount of debt claims with claims paid, are recognized in the income statement in the year of change.

s. Claim Reserve

Claims reserves established by the Regulation of the Financial Services Authority No. 6/POJK.05/2014 about the Credit Guarantee Company and Reguarantee Credit Company. Under this regulation, minimum reserves is 0.25% from the total value of outstanding guarantee.

Increase (decrease) in reserve claim reserve represents the excess up the claim period and prior periods.

t. Post Employment Benefit

Perum Jaminan Kredit Indonesia have registered their employees into pension plan, that is Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan and Program Kesejahteraan Karyawan through Financial Institution Pension Fund (DPLK). Besides pension plan, company also recognizes defined benefit post employment benefit according to Labor Law.

Post employment benefit is executed according to Labor Law No.13 year 2003 use actuarial calculation method which applied to determine present of value defined benefit obligation and current service cost that is Projected Unit Credit method, as stated in SFAS 24 (Revised 2014).

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which The company will pay fixed contributions into a separate entity (a fund) and has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits arising of services provided by employees on the present and the past.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

t. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit.*

Ketika imbalan pasca kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan. Imbalan pasca kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit* . Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak aea pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komperhensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Post Employment Benefit (Continued)

Defined benefit plan obligations are recognized in the statement of financial position is calculated at the present value of the estimated post-retirement benefit obligations in the future arising from services rendered by employees who have been on the present and the past, less the fair value of net assets of the pension fund. The calculation is performed by an independent actuary with the projected-unit-credit.

When the post-employment benefits change, the portion of the increase or decrease in compensation in connection with the services that have been provided by the employee in the past charged or credited to the income statement using the straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees until the benefits become vested employment . Post-employment benefits become vested is recognized immediately as an expense in the income statement.

In aedition to the defined benefit pension plan, The company also has defined contribution plans in which the Company pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience aejustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they occured.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;

ii memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

v entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);

vii orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhaeap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Transactions with Related Parties

In accordance with SFAS No. 7 (Revised 2014) regarding "related party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow :

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

i has control or joint control over the reporting entity;

ii has significant influence over the reporting entity; or is

iii member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

i the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

ii one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member).

iii both entities are joint ventures of the same third party;

iv one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;

vi the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (or of a parent of the entity).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah tidak mengungkapkan persyaratan pada PSAK 7 (Revisi 2014) paragraf 17 yaitu, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan sekurang-kurangnya meliputi:

i Jumlah transaksi;

ii Jumlah saldo, termasuk komitmen:

a. Persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian;

b. Rincian garansi yang diberikan atau diterima;

c. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan

d. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait

i Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);

ii Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak- pihak berelasi terhadap laporan keuangan;

a. Sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan

b. Untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2014), transaksi antara Perusahaan dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

v. Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung Pada entitas anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Transactions with Related Parties (Continued)

Reporting entities are related to the government did not disclose terms of the (Revised 2014) SFAS 7 paragraph 17 that is, if the entity hae transactions with related parties during the period covered by the financial statements, the entity shall disclose the nature of the relationship with related parties as well as information about the transactions and balances, including commitments, necessary to understand the potential impact of such relationships in the financial statements. Disclosure shall at least include:

i Total Transaction;

ii Total balances, including commitments :

a Terms and conditions, including whether there is a guarantee, and the nature of the reward that will be given, for completion;

b Details of the warranty is given or received;

c Allowance for doubtful accounts related to the amount of the balance; and

d Expense recognized during the period in terms of doubtful accounts receivable or elemination of related parties;

Reporting entities are related to the government revealed on transactions and balances related to:

i Name of the department or government agency and the nature of its relationship with the reporting entity (eg, control, joint control or significant influence);

ii The following information with enough detail that enables users of financial statements to understand the impact of transactions with related parties on the financial statements;

a The nature and amount of each individually significant transactions; and

b For other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication on the extent of such transactions.

Based on SFAS No. 7 (Revised 2014), transaction between the Company and the government, other state owned entities and companies which are owned or controlled by the government, including the deposit insurance corporation is not categorized as transaction with related parties.

v. Non-Controlling Interests

Non-controlling interest is the equity of the subsidiary not attributable, directly and indirectly in subsidiaries.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

w. Investasi Pada Sukuk

Investasi Pada sukuk dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

a. investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual;

b. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari pada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Investment to Sukuk

Investments in sukuk may be classified as measured at cost or fair value.

Investments in sukuk are classified as measured at cost if:

a. The investments held within a business model whose main aim to obtain contractual cash flows; and

b. contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or results.

At initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized straight-line basis over the term of the sukuk.

Investments in sukuk which are not classified as measured at historical cost, are classified as at fair value. At initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost excluding transaction costs. To subsequently measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

For investments in sukuk are measured at cost, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Company recognizes an impairment loss. Recoverable amount is the amount that would be obtained from the principal returns without taking into account the present value.

3. KAS DAN SETARA KAS

3. *CASH AND CASH EQUIVALENT*

	2016	2015	
Kas	**14.061.501.891**	**17.668.766.085**	***Cash on hand***
Giro Bank			***Bank Account***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	82.537.193.408	58.443.246.568	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	49.186.212.266	28.729.392.771	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	45.826.908.276	50.669.685.299	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	30.993.246.498	20.210.738.700	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	19.664.352.632	47.544.223.921	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT BPD Jawa Tengah	14.470.354.894	16.162.848.361	*PT BPD Jawa Tengah*
PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)	8.961.935.271	5.165.061.686	*PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)*
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	5.411.504.777	1.123.268.023	*PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk*
PT BPD Sumatera Selatan	3.837.171.547	6.210.470.615	*PT BPD Sumatera Selatan*
PT BPD Papua	3.833.460.447	2.164.757.647	*PT BPD Papua*
BPD Syariah Jawa Barat Banten	3.817.452.490	742.770.047	*BPD Syariah Jawa Barat Banten*
PT BPD Jawa Timur, Tbk	3.530.302.903	2.419.774.581	*PT BPD Jawa Timur, Tbk*
BPD Syariah Jawa Tengah	3.491.096.339	1.724.536.441	*BPD Syariah Jawa Tengah*
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	2.251.753.386	745.203.480	*PT BPD Sumatera Barat (Nagari)*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	2.123.136.710	1.176.748.334	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT BPD Sulawesi Selatan	2.055.625.575	1.742.248.665	*PT BPD Sulawesi Selatan*
Total Dipindahkan	**281.991.707.419**	**244.974.975.139**	***Brought Forward***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / **3. *CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)***

	2016	2015	
Giro Bank			***Bank Account***
Pihak Berelasi (Lanjutan)			***Related Parties (Continued)***
Saldo dipindahkan	**281.991.707.419**	**244.974.975.139**	***Carried Forward***
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	1.998.508.674	1.183.570.563	*PT BPD Riau dan Kepulauan Riau*
PT BPD Sulawesi Utara	1.968.012.929	1.657.105.668	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT BPD Kalimantan Selatan	1.208.535.420	1.560.228.215	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Nusa Tenggara Barat	1.526.037.927	967.625.256	*PT BPD Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Syariah Sumatera Selatan	1.154.208.336	843.751.768	*PT BPD Syariah Sumatera Selatan*
PT BPD Kalimantan Barat	1.295.128.618	716.233.551	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT BPD Bali	1.002.510.471	381.834.037	*PT BPD Bali*
PT BPD Maluku	880.520.511	482.162.390	*PT BPD Maluku*
PT BPD Bengkulu	790.014.081	123.901.305	*PT BPD Bengkulu*
BPD Syariah Jawa Timur	789.050.990	64.545.204	*BPD Syariah Jawa Timur*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	700.572.996	1.195.138.676	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*
PT BPD Aceh	682.892.802	1.715.745.568	*PT BPD Aceh*
PT BPD Kalimantan Timur	535.560.767	1.693.998.349	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT BPD Kalimantan Tengah	524.986.079	1.118.293.402	*PT BPD Kalimantan Tengah*
PT Bank Lampung	508.124.819	233.665.043	*PT Bank Lampung*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	474.826.118	21.357.312	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT BPD DKI	457.087.696	284.011.519	*PT BPD DKI*
BPD Syariah Aceh	368.463.449	207.061.388	*BPD Syariah Aceh*
BPD Syariah DIY	277.200.739	207.399.544	*BPD Syariah DIY*
PT BPD Sulawesi Utara	246.927.763	113.989.137	*PT BPD Sulawesi Utara*
BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	199.350.721	50.655.665	*BPD Syariah Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Yogyakarta	181.040.459	213.929.605	*PT BPD Yogyakarta*
BPD Syariah Kalimantan Barat	160.485.665	458.844.815	*BPD Syariah Kalimantan Barat*
BPD Syariah Riau	108.210.090	69.830.311	*BPD Syariah Riau*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	104.704.811	157.380.754	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
BPD Sumatera Utara Syariah	80.098.770	39.177.577	*BPD Sumatera Utara Syariah*
BPD DKI Syariah	53.789.294	-	*BPD DKI Syariah*
BPD Syariah Kalimantan Timur	49.301.438	238.754.690	*BPD Syariah Kalimantan Timur*
PT BPD Jambi	47.874.311	272.464.057	*PT BPD Jambi*
PT BPD Banten	44.430.645	-	*PT BPD Banten*
PT BPD Sumatera Utara	21.629.544	91.842.074	*PT BPD Sumatera Utara*
PT BPD Sulawesi Tengah	21.599.730	24.374.711	*PT BPD Sulawesi Tengah*
BPD Syariah Sulawesi Selatan	17.378.228	10.010.911	*BPD Syariah Sulawesi Selatan*
BPD Syariah Kalimantan Selatan	6.109.865	1.376.274	*BPD Syariah Kalimantan Selatan*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	1.669.630.456	397.005.909	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT Bank Bukopin, Tbk	1.250.078.109	723.915.563	*PT Bank Bukopin, Tbk*
PT Bank Muamalat Syariah	622.231.349	738.628.305	*PT Bank Muamalat Syariah*
PT Bank Bukopin Syariah	510.417.501	1.801.684.588	*PT Bank Bukopin Syariah*
PT Bank CIMB Niaga Syariah	60.682.953	119.552.489	*Bank CIMB Niaga Syariah*
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	33.583.348	30.619.000	*PT Bank Danamon Indonesia, Tbk*
PT Bank Sinar Mas, Tbk	14.141.059	-	*PT Bank Sinar Mas, Tbk*
PT Bank Permata Syariah	13.429.144	13.497.490	*PT Bank Permata Syariah*
PT Bank Muamalat Indonesia	11.625.261	367.328.585	*PT Bank Muamalat Indonesia*
PT Bank Permata, Tbk	9.323.916	8.404.711	*PT Bank Permata, Tbk*
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	5.738.000	-	*PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk*
PT Bank OCBC NISP, Tbk	5.000.000	-	*PT Bank OCBC NISP, Tbk*
PT Bank Sinar Harapan Bali	4.957.790	5.252.999	*PT Bank Sinar Harapan Bali*
PT Bank Maybank	2.296.000	-	*PT Bank Maybank*
PT Bank Mega Tbk	-	1.422.690	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Panin Syariah	-	464.301	*PT Bank Panin Syariah*
Jumlah Giro Perusahaan	**304.690.017.061**	**265.583.011.108**	***Total Bank Account***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / **3. *CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)***

	2016	2015	
Deposito			***Time Deposits***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.250.263.000.000	3.004.194.959.879	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	215.160.000.000	198.805.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	195.200.000.000	109.375.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT BPD Jawa Tengah	161.075.000.000	132.700.000.000	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD Sumatera Selatan	106.850.000.001	60.950.000.000	*PT BPD Sumatera Selatan*
PT BPD Kalimantan Barat	95.620.000.000	89.430.000.000	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT BPD DKI	87.150.000.000	79.600.000.000	*PT BPD DKI*
PT BPD Jawa Barat Banten	78.628.000.000	86.689.000.000	*PT BPD Jawa Barat Banten*
PT BPD Sulawesi Utara	63.995.000.000	53.900.000.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT BPD Kalimantan Timur	59.725.000.000	71.600.000.000	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	58.950.000.000	210.190.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	57.070.000.000	58.675.000.000	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
BPD Syariah Kalimantan Barat	46.280.000.000	24.880.000.000	*BPD Syariah Kalimantan Barat*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	43.625.000.000	62.925.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT BPD Sulawesi Selatan	40.715.000.000	30.025.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan*
PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)	40.481.000.000	41.512.000.000	*PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	46.850.000.000	41.650.000.000	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT BPD Nusa Tenggara Barat	44.520.000.000	50.635.000.000	*PT BPD Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	38.862.000.000	65.599.000.000	*PT BPD Riau dan Kepulauan Riau*
PT BPD Kalimantan Selatan	34.575.000.000	33.250.000.000	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Bali	31.385.000.000	36.435.000.000	*PT BPD Bali*
BPD Syariah Jawa Barat Banten	25.850.000.000	25.400.000.000	*BPD Syariah Jawa Barat Banten*
PT BPD Jawa Timur	18.110.000.000	55.900.000.000	*PT BPD Jawa Timur*
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	17.400.000.000	11.225.000.000	*PT BPD Sumatera Barat (Nagari)*
PT BPD Kalimantan Tengah	16.550.000.000	16.000.000.000	*PT BPD Kalimantan Tengah*
PT BPD Maluku	14.540.000.000	20.900.000.000	*PT BPD Maluku*
PT BPD Bengkulu	13.300.000.000	3.000.000.000	*PT BPD Bengkulu*
PT BPD Aceh	12.400.000.000	19.050.000.000	*PT BPD Aceh*
PT BPD Sumatera Utara Syariah	11.250.000.000	5.250.000.000	*PT BPD Sumatera Utara Syariah*
PT Bank Lampung	11.350.000.000	2.150.000.000	*PT Bank Lampung*
BPD Syariah Aceh	9.550.000.000	2.700.000.000	*BPD Syariah Aceh*
BPD Syariah Sumatera Selatan	8.800.000.000	6.550.000.000	*BPD Syariah Sumatera Selatan*
BPD Syariah Kalimantan Timur	7.700.000.000	18.700.000.000	*BPD Syariah Kalimantan Timur*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	5.750.000.000	5.800.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*
BPD Syariah Jawa Timur	5.435.000.000	2.935.000.000	*BPD Syariah Jawa Timur*
BPD Syariah DIY	5.000.000.000	150.000.000	*BPD Syariah DIY*
BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau	3.100.000.000	4.050.000.000	*BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau*
PT BPD Sumatera Utara	1.550.000.000	1.550.000.000	*PT BPD Sumatera Utara*
PT BPD Papua	1.500.000.000	3.000.000.000	*PT BPD Papua*
BPD Syariah Jawa Tengah	1.200.000.000	900.000.000	*BPD Syariah Jawa Tengah*
BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	800.000.000	800.000.000	*BPD Syariah Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Sulawesi Tengah	100.000.000	250.000.000	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Sulawesi Utara	-	2.100.000.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	-	10.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
PT BPD Jambi	-	10.000.000.000	*PT BPD Jambi*
BPD Syariah Sulawesi Selatan	-	135.000.000	*BPD Syariah Sulawesi Selatan*
Total Dipindahkan	**4.988.214.000.001**	**4.771.514.959.879**	***Brought Forward***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / **3. *CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)***

	2016	2015	
Deposito (Lanjutan)			***Time Deposits (Continued)***
Saldo dipindahkan	**4.988.214.000.001**	**4.771.514.959.879**	***Carried Forward***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Bukopin, Tbk	276.750.000.000	340.250.000.000	*PT Bank Bukopin, Tbk*
PT Bank Bukopin Syariah	47.280.000.000	33.780.000.000	*PT Bank Bukopin Syariah*
PT Bank Panin Syariah	42.000.000.000	59.000.000.000	*PT Bank Panin Syariah*
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	30.470.000.000	47.645.000.000	*PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah*
PT Bank Muamalat Syariah	10.000.000.000	44.000.000.000	*PT Bank Muamalat Syariah*
PT Bank Mega, Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	*PT Bank Mega, Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	3.600.000.000	3.880.000.000	*PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*
PT Bank Kesejahteraan	1.250.000.000	1.250.000.000	*PT Bank Kesejahteraan*
PT Bank ICB Bumiputera, Tbk	500.000.000	500.000.000	*PT Bank ICB Bumiputera, Tbk*
PT Bank Victoria Syariah	-	3.500.000.000	*PT Bank Victoria Syariah*
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	-	1.000.000.000	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Syariah	-	250.000.000	*PT Bank CIMB Niaga Syariah*
Sub Jumlah Deposito	**5.405.064.000.001**	**5.311.569.959.879**	***Sub Total Deposits***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**5.723.815.518.953**	**5.594.821.737.072**	***Total Cash and Cash Equivalent***

4. SURAT BERHARGA / ***4. MARKETABLE SECURITIES***

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			***Held-To-Maturity***
	2016	**2015**	
Deposito			***Time Deposits***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	74.150.000.000	112.650.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	12.500.000.000	12.500.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT BPD Sulawesi Utara	10.000.000.000	20.065.000.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT BPD Jawa Barat Banten	2.000.000.000	2.000.000.000	*PT BPD Jawa Barat Banten*
PT BPD DKI	1.050.000.000	1.350.000.000	*PT BPD DKI*
PT BPD Sumatera Selatan	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT BPD Sumatera Selatan*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	500.000.000	2.500.000.000	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
PT BPD Papua	200.000.000	200.000.000	*PT BPD Papua*
BPD Jawa Timur Syariah	-	1.000.000.000	*BPD Jawa Timur Syariah*
BPD Kalimantan Timur Syariah	-	2.500.000.000	*BPD Kalimantan Timur Syariah*
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	-	10.000.000.000	*PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah*
Sub Jumlah Deposito	**152.400.000.000**	**216.765.000.000**	***Sub Total Time Deposits***
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	300.000.000.000	300.000.000.000	*Mandatiry Convertible Bonds Reindo Year 2014*
Bukopin Tahap I Tahun 2012	83.000.000.000	83.000.000.000	*Bukopin Tahap I year 2012*
Negara RI seri FR0068	40.356.296.147	40.378.210.207	*Negara RI Series FR0068*
Negara RI seri FR0070	30.355.044.530	30.405.564.764	*Negara RI Series FR0070*
PNM II Tahun 2013	25.000.000.000	25.000.000.000	*PNM II Year 2013*
Pegadaian II Tahap I Tahun 2013 seri D	25.000.000.000	25.000.000.000	*Pegadaian II Tahap I Year 2013 Series D*
Negara RI seri FR0071	21.179.680.887	21.285.213.730	*Negara RI Series FR0071*
Negara RI Seri FR0073	20.140.250.422	20.150.057.792	*Negara RI Series FR0073*
PNM I Tahun 2012	20.000.000.000	20.000.000.000	*PNM I Year 2012*
Antam seri B Tahun 2011	20.000.000.000	20.000.000.000	*Antam Series B Year 2011*
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Year 2013*
Total Dipindahkan	**605.031.271.986**	**605.219.046.493**	***Brought Forward***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan) / ***Held-To-Maturity (Continued)***

	2016	2015	
Pihak Berelasi (Lanjutan)			***Related Parties (continued)***
Saldo Pindahan	**605.031.271.986**	**605.219.046.493**	***Carried Forward***
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Obligsi I PTPN X Year 2013*
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	20.000.000.000	-	*Thamer PAM Jaya I year 2008 Seri C*
Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013	-	20.000.000.000	*Berkelanjutan I PLN tahap I Year 2013*
Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013	17.000.000.000	17.000.000.000	*Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Year 2013*
Bank Lampung III Tahun 2012	15.000.000.000	15.000.000.000	*Bank Lampung III Year 2012*
Obligasi Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	*Obligasi Telkom Tahap I Year 2015 Series A*
Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	12.000.000.000	12.000.000.000	*Berkelanjutan I Hutama Karya Year 2013 Series C*
Negara RI seri FR0044	11.190.977.024	11.347.280.218	*Negara RI Series FR0044*
Obligasi I PLN tahap I Tahun 2013 seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	*Obligasi I PLN tahap I Year 2013 Series A*
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	10.000.000.000	10.000.000.000	*Obligasi I Pupuk Indonesia Year 2014*
Negara RI seri FR0058	9.848.565.319	9.839.795.364	*Negara RI Series FR0058*
Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	*Berkelanjutan II BTPN Tahap I year 2013 seri B*
Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	1.979.160.920	-	*Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Berkelanjutan I Smart tahap I Tahun 2012 seri A	25.000.000.000	25.000.000.000	*Berkelanjutan I Smart tahap I Year 2012 seri A*
Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012	22.000.000.000	22.000.000.000	*Bumi Serpong Damai Tahap I year 2012*
Agung Podomoro Land II Tahun 2012	10.000.000.000	10.000.000.000	*Agung Podomoro Land II year 2012*
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I year 2013*
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II year 2013*
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II year 2013*
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	*Obligasi I Ciputra Residence year 2014 Seri A*
Obligasi I Agung Podomoro Land II Tahun 2014	10.000.000.000	10.000.000.000	*Obligasi I Agung Podomoro Land II year 2014*
Japfa Tahun 2012	8.000.000.000	8.000.000.000	*Japfa year 2012*
Jumlah Obligasi	**868.049.975.249**	**866.406.122.075**	***Total Bonds***
Reksadana			***Mutual Funds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
RDPT BNI - Am Mahitala	105.000.000.000	55.000.000.000	*RDPT BNI - Am Mahitala*
RDPT Asanusa Jamkrindo Fund	94.000.000.000	-	RDPT Asanusa Jamkrindo Fund
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1	55.000.000.000	55.000.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1*
RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1	40.000.000.000	40.000.000.000	*RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4	30.000.000.000	30.000.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4*
RDPT Bahana Construction Fund 1	25.000.000.000	25.000.000.000	*RDPT Bahana Construction Fund 1*
RDPT Perumnas 2016	15.000.000.000	-	*RDPT Perumnas 2016*
RD Terproteksi Mandiri Seri 26	12.000.000.000	12.000.000.000	*RD Terproteksi Mandiri Seri 26*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2	10.100.000.000	10.100.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2*
RDPT PNM Wika Realty	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Wika Realty*
Total Dipindahkan	**396.100.000.000**	**237.100.000.000**	***Brought Forward***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2016	2015	
Pihak Berelasi (Lanjutan)			***Related Parties (continued)***
Reksadana			***Mutual Funds***
Saldo Pindahan	**396.100.000.000**	**237.100.000.000**	***Carried Forward***
RDPT PNM Perumnas	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Perumnas*
RDPT PNM Proteksi Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Proteksi Syariah*
RDPT PNM Wika Realty 2016	10.000.000.000	-	*RDPT PNM Wika Realty 2016*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3	9.323.108.527	9.323.108.527	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3*
RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund	-	49.000.000.000	*RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**445.423.108.527**	**325.423.108.527**	***Sub Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
RDPT PNM Terproteksi Dana Investa 2	50.187.354.167	50.187.354.167	*RDPT PNM Terproteksi Dana Investa 2*
RDPT Bahana Primera			*RDPT Bahana Primera*
RD Insight Terproteksi 5	48.000.000.000	48.000.000.000	*RD Insight Terproteksi 5*
Protected Fund 87	25.000.000.000	25.000.000.000	*Protected Fund 87*
RDT Simas Gemilang	20.000.000.000	-	*RDT Simas Gemilang*
RDT Bahana Core Protected Fund 113	10.000.000.000	-	*RDT Bahana Core Protected Fund 113*
RD Insight Terproteksi Syariah II	3.709.677.420	6.612.903.226	*RD Insight Terproteksi Syariah II*
RDPT CIMB - Principal CPF CB XIX	-	50.400.000.000	*RDPT CIMB - Principal CPF CB XIX*
RDT Bahana Primera Plus Protected Fund 99	-	15.000.000.000	*RDT Bahana Primera Plus Protected Fund 99*
Sub Pihak Ketiga	**156.897.031.587**	**195.200.257.393**	***Sub Third Parties***
Sub Jumlah Reksadana	**602.320.140.114**	**520.623.365.920**	***Sub Total Mutual Funds***
Efek Beragun Aset (EBA)			***Security (Asset Underlying)***
Efek Beragun Aset KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	21.747.084.323	23.355.986.301	*Security (Asset Underlying) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	**21.747.084.323**	**23.355.986.301**	***Total Security (Asset Underlying)***
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Hingga Jatuh tempo	**1.644.517.199.686**	**1.627.150.474.296**	***Total Held-To-Maturity Marketable Securities***

Tersedia untuk Dijual / ***Available For Sale***

	2016	2015	
Reksadana			***Mutual Funds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
RD BNI-AM Dana Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund	107.414.799.949	-	*RD BNI-AM Dana Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund*
RD BNI-AM Dana Terencana	26.738.803.119	25.357.854.197	*RD BNI-AM Dana Terencana*
RD BNI-AM DANA Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund	4.963.100.000	99.879.949.614	*RD BNI-AM DANA Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund*
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	6.538.026.553	6.625.722.460	*RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis*
Danareksa Mawar Konsumer	4.987.607.416	4.514.617.007	*Danareksa Mawar Konsumer*
Jumlah Pihak Berelasi	**150.642.337.037**	**136.378.143.278**	***Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
RD Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	183.324.256.807	-	*RD UGM CIMB-Principal Balanced*
RD Maybank Dana Obligasi Plus	144.071.492.220	-	*RD AAA Balanced Fund*
RD Sucorinvest Saham Dinamis	87.189.542.425	75.334.302.988	*RD Sucorinvest Saham Dinamis*
RD Insight Green (I- Green)	50.702.896.455	-	*RD CIMB Princ. Balanced*
RD Insight Support (I-Support)	43.764.188.112	41.519.043.565	*RD Insight Support (I-Support)*
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	36.768.909.152	33.392.386.474	*RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah*
RD RHB Opportunity Equity	29.336.341.462	-	*Strategic Plus*
RD Batavia Dana Saham Optimal	19.447.738.515	17.637.179.971	*RD Batavia Dana Saham Optimal*
Total Dipindahkan	**594.605.365.147**	**167.882.912.998**	***Brought Forward***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2016	2015	
Reksadana (Lanjutan)			***Mutual Funds (Continued)***
Pihak Ketiga (lanjutan)	**594.605.365.147**	**167.882.912.998**	***Third Parties (Continued)***
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty	17.390.351.510	15.918.951.911	*RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty*
RD SAM Sukuk Syariah Sejahtera	11.286.547.734	10.070.967.981	*RD SAM Sukuk Syariah Sejahtera*
RD SAM Indonesian Equity Fund	10.765.159.988	7.691.153.605	*RD SAM Indonesian Equity Fund*
RD Perdana Saham I-Wealth	10.184.280.000	9.209.660.000	*RD Perdana Saham I-Wealth*
RD SAM Syariah Berimbang	9.550.226.207	8.647.545.142	*RD SAM Syariah Berimbang*
RD CIMB - Principal Balanced Growth Syariah	9.934.268.997	8.799.251.963	*RD CIMB - Principal Balanced Growth Syariah*
RD Simas Danamas Saham	9.928.003.397	8.624.886.655	*RD Simas Danamas Saham*
RD Simas Saham Unggulan	9.482.196.802	8.240.794.629	*RD Simas Saham Unggulan*
RD CIMB-Principal Equity Aggressive	9.285.804.341	8.131.142.656	*RD CIMB-Principal Equity Aggressive*
RD Simas Syariah Unggulan	8.175.339.936	7.259.876.421	*RD Simas Syariah Unggulan*
RD Makara Prima	5.046.822.870	-	*RD Makara Prima*
RD Insight Syariah Berimbang (I- Shar	5.017.632.847	4.518.702.675	*RD Insight Syariah Berimbang (I- Share)*
RD Panin Dana Maksima	4.697.006.263	4.180.041.085	*RD Panin Dana Maksima*
RD SAM Sharia Equity Fund	4.398.078.578	3.948.852.922	*RD SAM Sharia Equity Fund*
RD Syailendra Equity Opportunity Func	4.340.967.600	3.822.193.173	*RD Syailendra Equity Opportunity Fund*
RD Manulife Saham SMC Plus	3.974.037.941	3.638.995.172	*RD Manulife Saham SMC Plus*
RD Millenium Equity	2.202.945.855	4.873.267.309	*RD Millenium Equity*
Reksadana Bahana Mes Syariah Fund	496.310.000	-	*Bahana Mes Syariah Mutual Fund*
RD AAA Enchaced Strategy Fund	-	18.344.323.245	*RD AAA Enchaced Strategy Fund*
RD SAM Educational Equity Fund	-	9.564.927.791	*RD SAM Educational Equity Fund*
RD Simas Satu	-	9.384.465.090	*RD Simas Satu*
RD CIMB-Principal Equty Focus	-	140.263.819.655	*RD CIMB-Principal Equty Focus*
RD Batavia Dana Saham	-	22.840.824.236	*RD Batavia Dana Saham*
RD OSK Nusaeana Alpha Sec. Rotation	-	22.376.908.566	*RD OSK Nusaeana Alpha Sec. Rotation*
RD Panin Dana Ultima	-	19.331.979.314	*RD Panin Dana Ultima*
Jumlah Pihak Ketiga	**730.761.346.014**	**527.566.444.194**	***Total Third Parties***
Jumlah Reksadana	**881.403.683.051**	**663.944.587.472**	***Total Mutual Funds***
Obligasi			***Bonds***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	26.865.000.000	42.000.000.000	*Sarana Multi Griya Finance Year 2012 Series B*
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	14.853.000.000	-	*Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 series B*
Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	14.703.000.000	14.122.500.000	*Bumi Serpong Damai Tahap II Year 2013*
Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.000.000.000	4.880.000.000	*Bank BTPN Tahap III Year 2013 Series B*
Indomobil Finance Tahun 2012 Seri C	-	49.525.000.000	*Indomobil Finance Year 2012 Series C*
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	-	34.772.400.000	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Year 2012*
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C	-	24.500.000.000	*Astra Sedaya Finance Year 2012 Series C*
Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012	-	24.287.500.000	*Bank CIMB Niaga Tahap I Year 2012*
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C	-	24.217.500.000	*Sarana Multi Griya Finance Year 2012 Series C*
AKR Corporindo Tahun 2012 Seri A	-	19.194.000.000	*AKR Corporindo Year 2012 Series A*
Jumlah Pihak Ketiga	**61.421.000.000**	**237.498.900.000**	***Total Third Parties***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Available For Sale (Continued)***

Obligasi (Lanjutan)			***Bonds (Continued)***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Negara RI Seri FR0072	133.000.000.000	-	*Negara RI series FR0072*
Negara RI Seri FR0068	71.400.000.000	-	*Negara RI series FR0068*
Negara RI Seri PBS012	46.462.500.000	-	*Negara RI series PBS012*
Negara RI Seri FR0073	42.208.000.000	-	*Negara RI series FR0073*
SBSN SERI PBS012	30.715.230.000	-	*SBSN SERI PBS012*
Negara RI Seri FR0065	25.800.000.000	-	*Negara RI series FR0065*
Negara RI Seri FR0074	14.467.550.000	-	*Negara RI series FR0074*
Negara RI Seri FR0042	11.509.500.000	-	*Negara RI series FR0042*
Negara RI Seri FR0047	11.350.000.000	-	*Negara RI series FR0047*
Negara RI Seri FR0052	12.165.000.000	-	*Negara RI series FR0052*
Tahun 2014 SERI C	10.046.990.000	-	*Tahun 2014 series C*
Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013	9.801.000.000	-	*Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan II Pengadaian Tahap II Negara RI Seri FR0064	8.530.800.000	-	*Berkelanjutan II Pengadaian Tahap II Negara RI series FR0064*
Berkelanjutan I adhI Tahap II Tahun 2013 SERI B	6.003.000.000	-	*Berkelanjutan I adhI Tahap II Tahun 2013 series B*
Antam Seri A Tahun 2011	6.003.000.000	13.657.500.000	*Antam Series A Year 2011*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.894.000.000	3.788.000.000	*Perum Pegadaian Year 2012 Series D*
Negara RI Seri FR0059	2.491.875.000	-	*Negara RI series FR0059*
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	1.944.600.000	-	*Obligasi I PP Properti Tahun 2016 series B*
Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	-	17.290.000.000	*Adhi Tahap II Year 2013 Series B*
Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	-	10.046.990.000	*Pegadaian Tahap II Year 2014 Series C*
Negara RI Seri FR0070	-	9.745.000.000	*Negara RI Series FR0070*
BTN Tahap II Tahun 2013	-	9.110.000.000	*BTN Tahap II Year 2013*
Jumlah Pihak Berelasi	**447.793.045.000**	**63.637.490.000**	***Total Related Parties***
Jumlah Obligasi	**509.214.045.000**	**301.136.390.000**	***Total Bonds***
Saham			***Shares***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Dua Putra Utama Makmur	80.509.059.600	151.363.577.500	*PT Dua Putra Utama Makmur*
PT Unilever Indonesia Tbk	5.369.920.000	17.409.420.000	*PT Unilever Indonesia Tbk*
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.539.250.000	2.902.025.000	*PT Indofood Sukses Makmur Tbk*
PT Kalbe Farma Tbk	9.090.000.000	5.594.404.500	*PT Kalbe Farma Tbk*
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.101.724.000	1.224.000.000	*PT Bumi Serpong Damai Tbk*
PT Pakuwon Jati Tbk	5.650.000.000	-	*PT Pakuwon Jati Tbk*
PT AKR Corporindo Tbk	1.011.500.000	-	*PT AKR Corporindo Tbk*
PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	-	11.696.436.100	*PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk*
PT Eurika Prima Jakarta Tbk	-	9.012.432.000	*PT Eurika Prima Jakarta Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	-	8.711.500.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Summarecon Agung Tbk	-	8.084.380.000	*PT Summarecon Agung Tbk*
PT Sugih Energy Tbk	-	46.036.620.200	*PT Sugih Energy Tbk*
PT Elnusa Tbk	-	5.381.265.500	*PT Elnusa Tbk*
PT Vale Indonesia Tbk	-	5.177.369.000	*PT Vale Indonesia Tbk*
PT Astra International Indonesia Tbk	-	4.044.600.000	*PT Astra International Indonesia Tbk*
PT Tiga Pilar Sejahtera	-	2.349.750.000	*PT Tiga Pilar Sejahtera*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**114.271.453.600**	**278.987.779.800**	***Sub Total Third Parties***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Available For Sale (Continued)***

Saham (Lanjutan)			***Shares (Continued)***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	10.302.900.000	15.083.250.000	*PT Semen Gresik (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya Tbk	10.160.000.000	3.850.645.500	*PT Waskita Karya Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.525.000.000	7.228.250.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia	7.543.000.000	-	*PT Telekomunikasi Indonesia*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.249.931.000	4.650.250.000	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT PP (Persero) Tbk	5.930.592.000	-	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
(Persero) Tbk	3.726.000.000	3.562.000.000	*(Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.310.000.000	5.073.750.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast Tbk	2.087.250.000	-	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.066.180.000	4.483.248.000	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	817.250.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	9.015.294.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	-	855.677.500	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**59.718.103.000**	**53.802.365.000**	***Sub Total Related Parties***
Jumlah Saham	**173.989.556.600**	**332.790.144.800**	***Total Shares***
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Untuk Dijual	**1.564.607.284.651**	**1.297.871.122.272**	***Total Marketable Securities Available for Sale***
Jumlah Surat Berharga	**3.209.124.484.337**	**2.925.021.596.568**	***Total Marketable Securities***

Jatuh Tempo / ***Held-To-Maturity***

	Kupon / Coupon	***Rating / Rate***	***Jatuh Tempo / Maturity Date***	
Obligasi				*Bonds*
Japfa Tahap I Tahun 2012	9,90%	A+	Kamis, 12 Januari 2017	*Japfa Tahap I Tahun 2012*
Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	9,05%	A	##########	*Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B*
Bukopin Tahap I Tahun 2012	9,25%	A+	Rabu, 06 Maret 2019	*Bukopin Tahap I Tahun 2012*
SMART Tahap I Tahun 2012 Seri A	9,00%	AA-	Senin, 03 Juli 2017	*SMART Tahap I Tahun 2012 Seri A*
BSD Tahap I Tahun 2012 Seri B	9,25%	AA-	Selasa, 04 Juli 2017	*BSD Tahap I Tahun 2012 Seri B*
II Agung Podomoro Land Tahun 2012	9,38%	A	Selasa, 15 Agustus 2017	*II Agung Podomoro Land Tahun 2012*
III Bank Lampung Tahun 2012	9,45%	A-	Senin, 09 Oktober 2017	*III Bank Lampung Tahun 2012*
I PNM Tahun 2012	9,10%	A	Kamis, 12 Oktober 2017	*I PNM Tahun 2012*
Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A	7,38%	A	##########	*Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A*
I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2012 Seri A	8,40%	AA-	##########	*I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2012 Seri A*
II SMF Tahap I Tahun 2012 Seri B	7,50%	AA+	Rabu, 27 Desember 2017	*II SMF Tahap I Tahun 2012 Seri B*
I BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	8,25%	AA+	Senin, 05 Maret 2018	*I BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B*
I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	8,50%	A	Minggu, 15 Maret 2020	*I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B*
I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	7,90%	AA	Senin, 27 Maret 2023	*I Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
I BSD Tahap II Tahun 2013	8,38%	AA-	Selasa, 05 Juni 2018	*I BSD Tahap II Tahun 2013*
I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	9,25%	A	Selasa, 26 Juni 2018	*I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013*
I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	9,50%	A-	Minggu, 28 Juni 2020	*I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C*
Berkelanjutan I PT PTPN X Tahun 2013	8,90%	BBB+	Kamis, 05 Juli 2018	*Berkelanjutan I PT PTPN X Tahun 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	8,00%	AAA SY	Minggu, 05 Juli 2020	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013*
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	9,25%	BBB+	Kamis, 05 Juli 2018	*Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013*
Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	8,00%	AAA	Minggu, 05 Juli 2020	*Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A*
Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25%	AA+	Kamis, 05 Juli 2018	*Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B*

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	Kupon / Coupon	*Rating / Rate*	*Jatuh Tempo / Maturity Date*	
Jatuh Tempo (Lanjutan)				***Held-To-Maturity (Continued)***
Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00%	AA+	Kamis, 09 Juli 2020	*Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D*
II PNM Tahun 2013	9,20%	A	Senin, 09 Juli 2018	*II PNM Tahun 2013*
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	9,75%	AAA	##########	*Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013*
I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60%	AAA	##########	*I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B*
I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	10,85%	A+	##########	*I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013*
Ciputra Residence I 2014 Seri A	11,40%	A	Minggu, 02 April 2017	*Ciputra Residence I 2014 Seri A*
I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	12,25%	A	Kamis, 06 Juni 2019	*I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014*
I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri A	9,63%	AAA	Sabtu, 08 Juli 2017	*I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri A*
Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	9,75%	AA+	Kamis, 11 Juli 2019	*Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C*
EBA DBTN05 - KPR Kelas A tahun 2014 Seri A2	10,25%	AAA	##########	*EBA DBTN05 - KPR Kelas A tahun 2014 Seri A2*
Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	12,00%	A+	##########	*Wajib Konversi Reindo Tahun 2014*
Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,93%	AAA	Kamis, 23 Juni 2022	*Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A*
Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	9,25%	AA+	Senin, 07 Mei 2018	*Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B*
Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75%	AA+	Kamis, 14 Februari 2019	*Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D*
I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	8,50%	A	Minggu, 15 Maret 2020	*I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B*
Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	8,38%	AA-	Selasa, 05 Juni 2018	*Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan 1 ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A	8,38%	A-	##########	*Berkelanjutan 1 ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A*
1 PP Properti Tahun 2016 Seri B	9,90%	A-	Kamis, 01 Juli 2021	*1 PP Properti Tahun 2016 Seri B*
Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	8,38%	AA-	Selasa, 05 Juni 2018	*Berkelanjutan 1 Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013*
I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	7,90%	AA	Senin, 27 Maret 2023	*I Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,20%	AAA	##########	*Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B*

5. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN / ***5. GUARANTEE RECEIVABLES***

	2016	**2015**	
Piutang IJP/IJK KUR			***KUR Guarantee Receivables***
Piutang IJP/ IJK KUR	1.163.792.419.705	619.544.252.117	*Guarantee Receivables - KUR*
Piutang IJP/ IJK KUR Kepada Bank	1.183.380.342.322	821.360.739.631	*KUR Guarantee Receivables - Bank*
Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	**2.347.172.762.027**	**1.440.904.991.748**	***Total KUR Guarantee Receivables***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.495.783.538)	-	*Allowance for Inpairment Losess*
Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	**2.338.676.978.489**	**1.440.904.991.748**	***Total KUR Guarantee Receivables***
Piutang IJP/IJK Eksisting			***Existing Guarantee Receivables***
Piutang IJP/IJK Existing Non Program	3.333.160.893	1.716.592.176	*Existing Guarantee Receivables Non-Program*
Piutang IJP Existing Program	5.015.284.439	-	*Existing Guarantee Receivables Program*
Jumlah Piutang IJP/IJK Eksisting	**8.348.445.332**	**1.716.592.176**	***Total Existing Guarantee Receivables***
Jumlah Piutang Imbal Jasa Penjaminan	**2.347.025.423.821**	**1.442.621.583.924**	***Total Guarantee Receivables***

5. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN (Lanjutan)

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan *coverage* sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan *coverage* sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

Berdasarkan berita acara verifikasi tagihan imbalan jasa penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 19 Desember 2016, untuk periode penagihan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 jumlah tagihan IJP KUR sebesar Rp36.046.953.884.

Hal-hal yang menyebabkan belum diverifikasinya IJP tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perpindahan KPA KUR dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Terbitnya PMK No. 190/PMK.05/2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan IJP KUR tanggal 01 Oktober 2014.

Pada PMK 190 pasal 18 menyatakan bahwa dengan berlakunya PMK 190 maka PMK mengenai KUR sebelumnya yaitu PMK 135/PMK.05/2008 dan perubahan yang mengikutinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai besaran IJP KUR.

Telah dilaksanakan rapat Ekspose dan Pembahasan Kriteria Verifikasi IJP KUR Tahap II/2014 Pada tanggal 12 November 2014 antara KPA Kemenkop, SMI Kemenkeu, Perusahaan Penjamin dan BPKP (Verifikator), terdapat beberapa pembahasan terkait pasal-pasal didalam PMK 190 yang masih perlu dibahas lebih lanjut antara lain :

a. Pasal 4 dan 16, Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) perlu segera direvisi terkait dengan perpindahan KPA.

b. Draft PKP Perum Jamkrindo telah disampaikan kepada KPA dan masih dibahas di KPA.

c. Pasal 10, Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan BPKP mengacu Pada kriteria yang disepakati antara KPA dan BPKP dan SOP yang ditetapkan oleh KPA. Terkait dengan butir ini maka BPKP baru akan melakukan verifikasi setelah ada SOP dari KPA dan disepakatinya kriteria verifikasi.

d. SOP masih dalam proses pembahasan di KPA (Kementerian Koperasi dan UKM).

5. GUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

KUR IJP receivables represent receivables to the Government in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated 24 September 2008. Return Guarantee Services paid by the Government to guarantee compensation rates at 1.5% and the coverage is 70% for credit agreement before February 14, 2010. For credit agreement after February 14, 2010 underwriting compensation rates by 3.25% per year with coverage of 70% -80% according PMK No.189/PMK.05/2010 On November 2, 2010.

Based on the verification memorandum of KUR guarantee fee dated December 19, 2016, the billing of KUR guarantee fee period Oktober 2015 until March 2016 is amounted to Rp36,046,953,884.

The things that cause Guarantee Fee has not been verified yet are as follows:

a. KUR KPA displacement of the Ministry of Finance to the Ministry of Cooperatives and SMEs;

b. Publication of PMK No. 190/PMK.05/2014 concerning the Implementation of the IJP KUR dated October 1, 2014.

PMK 190 Article 18 states that with the validity of the PMK 190, then the PMK about previous KUR, that is PMK No.135/PMK.05/2008 and the changes that followed repealed and declared not applicable unless the provisions regarding the amount of KUR IJP.

Exposure meeting and discussions of Criteria Verification KUR STM Phase II / 2014 hae been held in November 12, 2014 between KPA Kemenkop, SMI Kemenkeu, Guarantee company and BPKP (Verificator). There are some issues in PMK 90 that need to discuss:

a. Article 4 and 16, Guarantee Cooperation Agreement (PKP) needs to be revised associated with the transfer of the KPA.

b. Draft Perum Jamkrindo PKP has been submitted to the KPA and is still being discussed in the NAC.

c. Article 10, The verification that has been done by BPKP referring to agreed criteria between the KPA and BPKP, and SOPs that assigned by KPA. Related to this point, the new BPKP will verify after the SOP of the KPA and the agreement on verification criteria.

d. SOP is still in the process of discussion at the KPA (Ministry of Cooperatives and SMEs).

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG / *6. RE-GUARANTEE RECEIVABLES*

	2016	2015	
Piutang *Co-Guarantee* :			***Co-Guarantee Receivable:***
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	60.884.628.596	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	47.875.227.784	67.783.830.247	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	43.705.693.362	20.243.792.674	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT Asuransi Jiwasraya	17.734.702.370	2.674.978.536	*PT Asuransi Jiwasraya* -
- PT Asuransi Beringin Sejahtera Artamakmur	13.070.398.215	1.107.026.840	*PT Asuransi Beringin Sejahtera Artamakmur* -
- PT Jamkrindo Syariah	1.156.155.406	-	*PT Jamkrindo Syariah* -
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			***Allowance for Impairment Losses***
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	(60.884.628.596)	(60.884.628.596)	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	(757.661.003)	(757.661.003)	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	(14.329.343.424)	(252.370.628)	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
Total Piutang *Co-Guarantee*	**108.455.172.710**	**90.799.596.666**	***Total Co-Guarantee Receivable***
Piutang Re-Asuransi :			***Re-Insurance Receivable***
- PT Re-asuransi Internasional Indonesia	310.264.490	-	*PT Re-asuransi Internasional Indonesia* -
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	3.580.369.939	6.738.019.926	*PT Re-asuransi Nasional Indonesia* -
Jumlah Piutang Re-Asuransi	**3.890.634.429**	**6.738.019.926**	***Total Re-Insurance Receivable***
Total Piutang Penjaminan Ulang	**112.345.807.139**	**97.537.616.592**	***Total Re-Guarantee Receivable***

Piutang *Co-Guarantee* kepada PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra *Co-Guarantee* atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Co-guarantee receivables to PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya are reimbursement of claims billed to Co-Guarantee partners for the payment of claims have been paid by the Company.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured.

Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra *Co-Guarantee* , sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 50% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 60% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee* .

To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been aeded a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co. Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the IJP / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co. Guarantee.

Perjanjian kerjasama terbaru dengan mitra *Co-Guarantee* sebagai berikut:

New cooperation agreements with partner Co-Guarantee as follows:

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No:37/Jamkrindo/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- *A cooperation agreement with PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No: 37 / Jamkrindo / VI / 2012 dated June 27, 2012 regarding the Closure of Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Perjanjian kerjasama dengan PT Heksa Eka Life Insurance No. 06/Jamkrindo/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna yang diaddendum dengan perjanjian kerjasama No. 33/Jamkrindo/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.01/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, yang kemudian diaddendum lagi dengan perjanjian kerjasama No.38/Jamkrindo/V/2013 – PKS.008/HELI/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, dan terakhir diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.06/Jamkrindo/II/2014 – PKS.003/HELI/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 14/Jamkrindo/OP-02/VI/2015 - PKS.014-DIR/MKT/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Santunan Asuransi Kebakaran atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT Pegadaian (Persero).

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin No. 4/Jamkrindo/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.02/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaeendum dengan perjanjian kerjasama No.39/Jamkrindo/V/2013 – 0011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.05/Jamkrindo/II/2014 – 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna. kemudian diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 – 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

6. REGUARANTEE RECEIVABLE (Continued)

- *Cooperation agreement with PT Heksa Eka Life Insurance No.: 06/Jamkrindo/II/2012 date February 28,2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose that has been addendum with cooperation agreement No.: 33/Jamkrindo/V/2012 date May 24, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 01/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 38/Jamkrindo/V/2013 - PKS.008/HELI/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, and last that has been addendum with cooperation agreement No.: 06/Jamkrindo/II/2014 - PKS.003/HELI/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 14/Jamkrindo/OP-02/VI/2015 - PKS.014-DIR/MKT/06/2015 date June 4, 2015 about Fire Insurance Compensation on Credit Guarantee Product Creation PT Pegadaian (Persero).*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Sharia Al-Amin No.: 4/Jamkrindo/I/2012 date January 31, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 02/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 39/Jamkrindo/V/2013 - 011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 05/Jamkrindo/II/2014 - 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.that has been addendum with cooperation agreement No.: 07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 - 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 date February 28, 2015 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Jiwasraya No.07/Jamkrindo/II/2014 –035.SJ.U.0214 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna dan tahun 2015 diadendum dengan perjanjian kerjasama No.08/Jamkrindo/OP-01/II/2015 –025a.SJU.0215 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.54/Jamkrindo/VI/2014 – 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penempatan Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Bagi Nasabah Bank Yang Dibiayai Dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.14/Jamkrindo/OP02VI/2014 –PKS.014-DIR/MKT/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 tentang Santunan Asuransi Kebakaran atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT Pegadaian (Persero).

Perum Jamkrindo dengan PT. Askrindo (Persero) telah melakukan kerja sama Penjaminan Bersama KUR, sejak tahun 2010 Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit Bersama KUR Nomor: 95/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, addendum I Nomor: 51/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan addendum II Nomor: 38/Jamkrindo/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Pada akhir tahun 2013 dengan tidak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok pembaharuan PKS Penjaminan Bersama KUR, sehingga para pihak menyetujui pengakhiran kerja sama penjaminan bersama KUR. Dengan diakhirinya kerja sama penjaminan bersama KUR, hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tetap harus diselesaikan oleh kedua belah pihak untuk akseptasi atas IJP, Klaim dan Subrogasi KUR bank konvensional tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty* Metode *treaty* merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty* .

Kerjasama dengan perusahaan Re-asuransi dilakukan melalui perusahaan pialang dengan PKS sebagai berikut :

- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27/Jamkrindo/OP-01/IV/2016 – 311/DIR/NR/IV/2016–00141/HK.01.01/00/ReINDO/4/2016 tanggal 29 April 2016.

6. REGUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

- *Cooperation agreement invitation PT BNI Life Insurance No.07 / Jamkrindo / II / 2014 dated 07 February 2014 -035.SJ.U.0214 about Closing Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multipurpose and 2015 updated with agreement cooperation No.08 / Jamkrindo / OP-01 / II / 2015 dated February 23, 2015 -025a.SJU.0215 about Credit Life Insurance Closure For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Bina Griya Upakara No. : 54/Jamkrindo/VI/2014 - 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 date June 26, 2014 about Fire Insurance Placement House Live For Customer Bank Financed With Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) .*

- *Cooperation agreement invitation PT Asuransi Bina Griya Upakara 14 / Jamkrindo / OP02VI / 2014 -PKS.014-DIR / MKT / 06/2015 dated June 4, 2015 on Compensation Insurance Products Credit Guarantee Fire on Creative PT Pegadaian (Persero).*

Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) have been cooperated since 2010 concerning KUR Credit Joint Guarantee with agreement No: 95/Jamkrindo/ XI/ 2010 dated December 1, 2010, the first addendum Number: 51/Jamkrindo/XII/2011 dated December 28, 2011 and addendum II Cooperation Agreement Joint Credit Guarantee KUR Number: 38/Jamkrindo/VII/2012 dated July 2, 2012.

At the end of 2013 because of disagreement about renewal points of that agreement, so the parties agreed to the end agreement. By the end of the agreement, unfinished rights and obligations must be done by both parties to accept the IJP, claims, and subrogations in 2010, 2011, 2012, and 2013.

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.

In cooperation with the insurance partner treaty methods is being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement and re-insurance partner with the condition agreed concering treaty negotiation.

Cooperation with companies is done through a re-insurance brokerage firm with PKS as follows:

- *Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo with PT Re-asuransi Nasional Indonesia and PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27 / Jamkrindo / OP-01 / IV / 2016-311 / DIR / NR / IV / 2016-00141 / HK.01.01 / 00 / ReINDO / 4/2016 dated 29 April 2016.*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

Treaty antara Perum Jamkrindo dan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia, terdiri dari :

1) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Multiguna Tahun 2016;
2) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Umum Tahun 2016;
3) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Mikro Tahun 2016;
4) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016;
5) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Bank Garansi Tahun 2016;
6) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Distribusi Barang Tahun 2016;
7) *Quota Share Re-insurance Treaty Surety Bond* Tahun 2016.

Perubahan penyisihan atas Piutang *Co-Guarantee* adalah sebagai berikut:

6. REGUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

Treaty between Perum Jamkrindo and PT Indonesian National Re-insurance and PT Re-asuransi Internasional Indonesia, consisting of:

1) Quota Share Re-insurance Treaty of Multiguna Credit Guarantee Year 2016;
2) Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;
3) Quota Share Re-insurance Treaty of Micro Credit Guarantee Year 2016;
4) Quota Share Re-insurance Treaty of procurement and contruction;
5) Quota Share Re-insurance Treaty of goods distibution Guarantee Year 2016;
6) Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;
7) Quota Share Re-insurance Treaty of surety bond Year 2016.

The changes in allowance for Co-Guarantee Receivable is as follows:

	2016	2015	
Saldo Awal Tahun	61.894.660.227	60.884.628.596	*Beginning Balance of The Year*
Penambahan Cadangan	14.076.972.796	1.010.031.631	*additional Reserves*
Pengurangan Cadangan	-	-	*Reduction in Reserves*
Saldo Akhir	**75.971.633.023**	**61.894.660.227**	***Ending Balance***

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

7. LOANS

	2016	2015	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	17.268.238.020	17.415.499.020	*Profit Sharing Loan*
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	-	-	*Profit Sharing Loan*
Piutang kepada Koperasi Pegawai	994.557.996	994.557.996	*Employee Cooperative Receivable*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**18.262.796.016**	**18.410.057.016**	***Total Loans***
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(16.981.738.070)	(17.128.999.070)	*Profit Sharing Loan for Impairment Losses*
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	-	-	*Profit Sharing Loan for Impairment Losses*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai	(325.891.583)	(325.891.583)	*Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses*
Jumlah penyisihan penurunan nilai	**(17.307.629.653)**	**(17.454.890.653)**	***Total Allowance for Impairment Losses***
Jumlah Pinjaman Yang diberikan Bersih	**955.166.363**	**955.166.363**	***Total Net Loans***

Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang/dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang Pinjaman bagi Hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

Profit Sharing Loan Receivable is the provision of money / funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 and Presidential Regulation Number 2 of 2008, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia are not distributed new Profit Sharing Loan.

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

7. LOANS (Continued)

Profit Sharing Loan with current category defined as loans that are not impaired and no impairment loss reserves established.

For profit sharing loan receivables are impaired but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	2016	2015	
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	20.231.338.133	9.061.648.790	*Time Deposit Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Obligasi	13.552.620.379	9.422.218.715	*Bonds Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Komisi	8.537.973.178	10.216.071.615	*Comission Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Reksadana	6.934.190.333	3.925.605.630	*Mutual Fund Interest Income Receivable*
Piutang kepada Pegawai	3.641.441.223	5.652.722.730	*Receivable to Employee*
Piutang kepada Penyewa Gedung	704.196.986	1.033.888.505	*Receivable to Tenant Building*
Piutang Lainnya	28.126.017.015	19.549.249.797	*Others Receivable*
Jumlah Piutang Lain-lain	**81.727.777.247**	**58.861.405.782**	***Total Other Receivable***

Piutang pendapatan bunga deposito terdiri dari deposito existing dan deposito dana KUR.

Deposit interest income receivable consists of existing deposits and deposits KUR fund.

Piutang pendapatan reksadana merupakan pendapatan reksadana KUR.

Mutual fund interest income receivable is interest income KUR mutual fund.

Piutang pendapatan bunga obligasi merupakan pendapatan bunga obligasi KUR.

Bond interest income receivable is interest income KUR bonds.

Piutang sewa gedung merupakan tagihan sewa gedung kepada penyewa dan Piutang kepada penyewa gedung merupakan tagihan atas pemakaian telepon oleh penyewa.

Building Rent Receivable is claim of builing rent to tenant and Receivable to Tenant Building is claim of telephone charges.

Piutang kepada pegawai merupakan tagihan atas ekses klaim asuransi kesehatan kepada karyawan dan tagihan atas bantuan uang muka.

Receivables to employee is billed for the excess to the employee health insurance claims and bills for payment assistance.

Piutang lainnya merupakan rincian Piutang cabang-cabang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang tersebut diatas.

Other receivables are detailed receivables of the branches that can not be classified as receivables mentioned above.

9. PREMI DAN FEE DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID PREMIUM AND FEES

	2016	2015	
Premi *Co-Guarantee*	475.078.991.985	446.189.720.011	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	244.433.587.546	180.376.840.966	*Re-Insurance Premium*
Fee Agent	170.525.965.368	111.634.178.771	*Fee Agent*
Fee Based Income	101.114.477.174	69.539.864.283	*Fee Based Income*
Jumlah Premi dan Fee Dibayar Dimuka	**991.153.022.073**	**807.740.604.031**	***Total Prepaid Premium and Fees***

Beban Premi *Co-Guarantee* dan *Fee Based Income* dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Premiums Co-Guarantee Expenses and Prepaid Fee Based Income are recognized over the term of the guarantee and allocated by month issuance of Certificate of Guarantee (SP).

Beban dibayar dimuka *co-guarantee* merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra *co-guarantee* yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Prepaid expenses co-guarantee is premium payments of the current year and years ago to co-guarantee partners that will be due in the coming years.

9. PREMI DAN FEE DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan)

Beban dibayar dimuka re-asuransi merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra re-asuransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Beban dibayar dimuka *fee bank* (*fee based income*) merupakan pembayaran fee bank tahun berjalan dan tahun-tahun lalu penerima jaminan yang akan menjadi beban di tahun-tahun

Beban dibayar dimuka *fee agen* merupakan pembayaran *fee agen* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra agen yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

9. PREPAID PREMIUM AND FEES (Continued)

Prepaid expenses re-insurance is premium payments of the current year and years ago to re-insurance partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses fee bank (fee based income) is fee bank payments of the current year and years ago to the insured partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses agent fee is agent fee payments of the current year and years ago to the agent partners that will be due in the coming years.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

10. PREPAID EXPENSES

	2016	2015	
Beban Umum	16.305.991.981	9.868.896.573	*General Expense*
Beban Operasi	1.364.093.200	1.554.784.880	*Operating Expense*
Uang Muka Supplier	5.469.142.539	1.543.391.674	*Supplier Prepaid Taxes*
Beban SDM	1.880.528.517	936.378.610	*Human Resource Expense*
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	**25.019.756.237**	**13.903.451.737**	***Total Prepaid Expense***

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat sewa bangunan, asuransi dan premi pensiun sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Expenses are allocated according to the useful life of each cost with a straight-line method. The useful life of building rent, insurance and pension premiums in accordance with the term of the contract or policy.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	2016				
	Saldo Awal 1 Januari 2016 / *Beginning Balance January 1, 2016*	Penambahan dan Reklasifikasi/ *Additions and Reclassification*	Pengurangan dan Reklasifikasi /*Disposals and Reclassification*	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap/ *Increase arising on revaluation of properties*	Saldo Akhir 31 Desember 2016/*Ending Balance December 31, 2016*
Biaya Perolehan *(Cost)*					
Tanah *(Land)*	279.166.000.000	12.522.000.001	-	-	291.688.000.001
Bangunan Kantor *(Buildings)*	74.484.000.000	9.977.201.446	-	-	84.461.201.446
Perumahan Dinas *(Houses)*	5.695.000.000	285.636.284	-	-	5.980.636.284
Kendaraan Bermotor *(Vehicles)*	38.090.590.033	5.437.282.382	10.670.701.179		32.857.171.236
Inventaris Kantor *(Office Equipment)*	43.807.700.995	25.132.575.728	-	-	68.940.276.723
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	1.629.834.689	298.421.384	-	-	1.928.256.073
Bangunan Dalam Penyelesaian/ *Contruction on Progress*	-	5.595.428.740	-	-	5.595.428.740
Jumlahl Biaya Perolehan *(Total cost)*	**442.873.125.717**	**59.248.545.965**	**10.670.701.179**	**-**	**491.450.970.503**

11. ASET TETAP (Lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (Continued)*

	2016				
	Saldo Awal 1 Januari 2016 / *Beginning Balance January 1, 2016*	Penambahan dan Reklasifikasi/ *Additions and Reclassification*	Pengurangan dan Reklasifikasi /*Disposals and Reclassification*	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap/ *Increase arising on revaluation of properties*	Saldo Akhir 31 Desember 2016/*Ending Balance December 31, 2016*
Akumulasi Penyusutan *(Accumulated Depreciation)*					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	-	(3.141.535.531)	-	-	(3.141.535.531)
Perumahan Dinas (*Houses*)	-	(117.228.200)	-	-	(117.228.200)
Kendaraan Bermotor *(Vehicles)*	(21.499.392.474)	(2.853.096.475)	10.020.701.179	-	(14.331.787.769)
Inventaris Kantor *(Office Equipment)*	(23.916.786.917)	(6.388.041.636)	-	-	(30.304.828.553)
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	(1.334.063.154)	(226.134.375)	-	-	(1.560.197.529)
Total Akumulasi Penyusutan *(Total Accumulated Depreciation)*	(46.750.242.545)	(12.726.036.216)	10.020.701.179	-	(49.455.577.582)
Nilai Buku (*Book Value*)	396.122.883.172				441.995.392.921

	2015				
	Saldo Awal 1 Januari 2015 / *Beginning Balance January 1, 2015*	Penambahan dan Reklasifikasi/ *Additions and Reclassification*	Pengurangan dan Reklasifikasi /*Disposals and Reclassification*	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap/ *Increase arising on revaluation of properties*	Saldo Akhir 31 Desember 2015 /*Ending Balance December 31, 2015*
Biaya Perolehan *(Cost)*					
Tanah *(Land)*	13.514.808.279	16.231.841.681	-	249.419.350.040	279.166.000.000
Bangunan Kantor (*Buildings*)	15.575.310.511	8.096.204.674	-	50.812.484.815	74.484.000.000
Perumahan Dinas (*Houses*)	1.038.502.236	4.213.401.377	-	443.096.387	5.695.000.000
Kendaraan Bermotor *(Vehicles)*	33.282.000.023	4.808.590.010	-	-	38.090.590.033
Inventaris Kantor *(Office Equipment)*	33.475.649.463	10.332.051.532	-	-	43.807.700.995
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	1.546.477.998	83.356.691	-	-	1.629.834.689
Total Biaya Perolehan *(Total Cost)*	**98.432.748.510**	**43.765.445.965**	**-**	**300.674.931.242**	**442.873.125.717**
Akumulasi penyusutan *(Accumulated depreciation)*					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	(3.586.538.346)	(843.629.945)	-	4.430.168.291	-
Perumahan Dinas (*Houses*)	(1.174.398.103)	(60.466.933)	-	1.234.865.036	-
Kendaraan Bermotor *(Vehicles)*	(19.087.916.093)	(2.426.733.687)	15.257.306	-	(21.499.392.474)
Inventaris Kantor *(Office Equipment)*	(19.335.021.853)	(4.582.210.143)	445.079	-	(23.916.786.917)
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	(823.674.911)	(87.459.955)	(422.928.288)	-	(1.334.063.154)
Total Akumulasi Penyusutan *(Total Accumulated Depreciation)*	(44.007.549.306)	(8.000.500.663)	(407.225.903)	5.665.033.327	(46.750.242.545)
Nilai Buku (*Book Value*)	54.425.199.204				396.122.883.172

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp12.726.036.216 dan Rp8.000.500.663 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perum Jamkrindo dan Entitas Anak selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yaitu KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun, dan Rekan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti;
b) Kondisi pasar;
c) Lokasi;
d) Karakteristik Fisik;
e) Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan;
f) Karakteristik tanah.

11. FIXED ASSETS (Continued)

The balances of depreciation amounting to Rp12,726,036,216 and Rp8,000,500,663 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Perum Jamkrindo and Subsidiary during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

There were no fixed assets pledged as collateral.

On December 31, 2015, Perum Jamkrindo and Subsidiary changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

The valuations of land and building are perfomed by the external independent valuer that is KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun, dan Rekan.

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards based on reference to recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used are market data approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) *Type and right on property;*
b) *Market condition;*
c) *Location;*
d) *Physical characteristic;*
e) *Income producing characteristic;*
f) *Land characteristic.*

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS

	2016	2015	
Klaim Dalam Proses	117.472.197.942	22.544.861.522	*Claim in Process*
Piutang Dalam Proses	91.946.345.702	79.705.073.993	*Receivable in Process*
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	76.140.000.000	-	*Restricted Deposit*
Aset Lainnya	14.929.666.281	378.532.901	*Other Assets*
Aset Tak Berwujud -*Software*	152.849.581	145.858.900	*Intangible Asset - Software*
Jumlah Aset Lain-Lain	**300.641.059.506**	**102.774.327.316**	***Total Other Assets***

Piutang Dalam Proses merupakan Piutang *Co-Guarantee* yang belum ada persetujuan klaim dari mitra *Co-Guarantee* .

Aset lainnya merupakan saldo jaminan listrik PLN, dan jaminan telepon.

Deposito yang dimiliki entitas tetapi dibatasi penggunaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra bank.

Receivable in process are co-guarantee's receivables that yet any claim approval from co-guarantee partners.

Other assets is electricity, telephone deposit fund, and deferred expenses.

Time deposit owned entity but are restricted in accordance with an agreement with bank partners.

13. UTANG KLAIM

13. CLAIM PAYABLE

	2016	2015	
Utang Klaim - Kredit Eksisting	7.022.456.261	2.175.453.420	*Claim Liability – Existing Credit*
Utang Klaim - Kredit Usaha Rakyat	4.627.125.342	10.891.732.200	*Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat*
Jumlah	**11.649.581.603**	**13.067.185.620**	***Total***

13. UTANG KLAIM (Lanjutan)

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

13. CLAIM PAYABLE (Continued)

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

14. CADANGAN KLAIM

14. CLAIM RESERVE

	2016	2015	
Cadangan Klaim KUR	211.727.839.287	133.122.265.666	*Claim Reserve KUR*
Cadangan Klaim - Kredit Eksisting	183.936.606.484	178.699.863.383	*Claim Reserve – Existing Credit*
Provisi Kerugian Atas Klaim			*Provision for Claim Losses*
Co-Guarantee	9.294.982.801	10.048.422.734	*Co-Guarantee*
Jumlah Cadangan Klaim	**404.959.428.572**	**321.870.551.783**	***Total Claim Reserve***

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not mature yet.

Cadangan klaim per 30 Juni 2016 ditetapkan sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim eksisting dan 0,50% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Claim reserves as of June 30, 2016 was determined at 0.25% from guarantee outstanding for existing claim reserves and at 0,50% from guarantee outstanding for KUR claim reserves.

Cadangan klaim per 31 Desember 2015 ditetapkan sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim eksisting dan 0,50% dari outstanding penjaminan untuk cadangan klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Claim reserves as of December 31, 2015 was determined at 0.25% from guarantee outstanding for existing claim reserves and at 0,50% from guarantee outstanding for KUR claim reserves.

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yaitu minimal sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan.

Claim reserves that can be formed is designated on Ministry of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 about Amendments to the Ministry of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 about Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, that is 0,25% from guarantee outstanding.

Perusahaan membentuk provisi untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan akan tertagihnya/terpulihnya Piutang *co-guarantee* serta potensi klaim di masa yang akan datang yang menjadi tanggungan PT Asuransi Syariah Mubarakah sangat kecil. Provisi dibentuk berdasarkan Default Rate (DR) rata-rata ditambah dengan standar deviasi dikalikan dengan outstanding kredit.

The company establish provisions to anticipate the uncollectible co-guarantee receivables and also potential future claims dependent on PT Asuransi Syariah Mubarakah is very low. Provisions establish based on average Default Rate plus deviation standard and multiplied with credit outstanding.

15. UTANG PENJAMINAN ULANG

15. RE-GUARANTEE PAYABLE

	2016	2015	
Utang *Co-Guarantee* :			*Co-Guarantee Payable:*
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	11.978.494.561	13.399.330.274	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamal	7.434.476.338	3.451.198.153	*PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur* -
- PT Asuransi Binagriya Upakara	2.743.602.065	-	*PT Asuransi Binagriya Upakara* -
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	654.608.102	-	*PT Penjaminan Jamkrindo Syariah* -
- PT Asuransi Jiwasraya	270.058.337	4.070.478.409	*PT Asuransi Jiwasraya* -
- PT UAF Jaminan Kredit	113.956.442	-	*PT UAF Jaminan Kredit* -
- PT Asuransi Binagriya Upakarti	-	560.163.818	*PT Asuransi Binagriya Upakarti* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	-	319.312.345	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
Jumlah Utang *Co-Guarantee*	**23.195.195.845**	**21.800.482.999**	***Total Co-Guarantee Payable***
Utang Re-Asuransi:			*Re-Insurance Payable*
- PT Re-asuransi Internasional Indonesia	2.995.734.449	-	*PT Re-asuransi Internasional Indonesia* -
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	40.412.742.717	41.642.539.893	*PT Re-asuransi Nasional Indonesia* -
Jumlah Utang *Re-Guarantee*	**43.408.477.166**	**41.642.539.893**	***Total Re-Guarantee Payable***
Jumlah Utang *Co-Guarantee*	**66.603.673.011**	**63.443.022.892**	***Total Co-Guarantee Payable***

Utang *co-guarantee* dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

16. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *16. DEFERRED INCOME*

	2016	2015	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Imbal Jasa Penjaminan	2.072.338.540.890	1.453.277.820.704	*Guarantee Fee*
Imbal Jasa Penjaminan Belum Terbit	117.399.053.405	87.231.397.737	*Guarantee Fee Unpublished*
Komisi Penjaminan	52.423.813.379	38.553.783.766	*Comission Fee*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Imbal Jasa Penjaminan	100.392.515.430	32.615.195.445	*Guarantee Fee*
Komisi Penjaminan	2.944.600.909	3.354.872.193	*Comission Fee*
Sewa dan Servis Gedung	748.012.813	748.012.813	*Rent and Service Building*
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	**2.346.246.536.826**	**1.615.781.082.658**	***Total Deferred Income***

Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan merupakan pembayaran premi penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred guarantee fee is a guarantee premium payments for current year and previous years from the guaranteed to Perum Jamkrindo which will become income in the coming years.

Komisi Penjaminan Ditangguhkan merupakan penerimaan komisi dari re-asuransi tahun berjalan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred guarantee commission is an acceptance of commission from re-insurance in the current year that will become income in the coming years.

Pendapatan Ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Deferred income will be recognized as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate (SP). By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned guarantee fee allocation, that is due to time limit.

Imbal Jasa Penjaminan Diterima Dimuka berasal dari penerimaan IJP pada tahun-tahun sebagai berikut:

Prepaid guarantee fee is formed from guarantee fee acceptance in the years as follows:

	2016	2015	
2012	22.751.542.503	51.295.627.728	2012
2013	160.200.034.716	288.360.062.489	2013
2014	152.472.887.771	262.815.109.184	2014
2015	642.488.884.908	883.422.216.748	2015
2016	1.194.817.706.422	-	2016
Jumlah	**2.172.731.056.320**	**1.485.893.016.149**	***Total***

Sewa dan Service Gedung ditangguhkan merupakan pembayaran sewa dan service dari penyewa gedung yang belum menjadi pendapatan.

Deferred Rent and Service Building is rent and service payment from the lessee that unrecognized as revenue.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXES*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Tax*

Saldo pajak dibayar dimuka adalah per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari :

Prepaid Tax as of December 31, 2016 and 2015 consists of:

	2016	2015	
Entitas Induk			***Parent Company***
PPh Pasal 28A	-	33.878.187.274	*Income tax–article 28A*
PPN Masukan	81.540	-	*Value Added Tax*
Jumlah	**81.540**	**33.878.187.274**	***Total***

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

b. Utang Pajak / ***b. Tax Payable***

Saldo utang pajak adalah per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari :

Tax payable as of December 31, 2016 and 2015 consists of:

	2016	2015	
Entitas Induk			***Parent Company***
PPh Badan Pasal. 29	57.349.155.592	10.772.587.750	*Company Income Tax –Article 29*
PPh Pasal 25	6.637.598.034	5.377.077.000	*Income Tax –Article 25*
PPh Pasal 21	5.059.011.702	3.809.586.080	*Income Tax –Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	2.770.794.179	1.546.089.155	*Value Added Tax*
PPh Pasal 23	364.227.792	368.570.221	*Income Tax –Article 23*
PPh Pasal 4 Ayat 2	246.724.705	212.315.957	*Income Tax –Article 4 point 2*
PPh Pasal 22	62.941.404	70.537.660	*Income Tax –Article 22*
PPh Final Revaluasi Aset Tetap	-	6.695.915.106	*Income tax - Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah Entitas Induk	**72.490.453.408**	**28.852.678.929**	***Total Parent Entity***
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPh Pasal 21	131.399.854	350.206.507	*Income Tax –Article 21*
PPh Pasal 23	66.037.672	15.590.720	*Income Tax –Article 23*
PPh Pasal 4 Ayat 2	124.185.778	-	*Income Tax –Article 4 point 2*
Jumlah Entitas Anak	**321.623.304**	**365.797.227**	***Total Subsidiary***
Jumlah Utang Pajak	**72.812.076.712**	**29.218.476.156**	***Total Tax Payable***

c. Beban Pajak Penghasilan terdiri dari : / ***c. Income Tax Expense consist of :***

Entitas Induk			***Parent Company***
Beban Pajak Kini	137.000.332.000	75.296.767.750	*Current Tax Expense*
Beban Pajak Kini Final	94.626.148.136	100.817.434.601	*Current Tax Expense - Final*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	13.730.448.472	(13.945.254.691)	*Deferred Tax (Benefit) Expense*
Jumlah Entitas Induk	**245.356.928.608**	**162.168.947.660**	***Total Parent Company***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Beban Pajak Kini	4.271.158.571	4.578.936.993	*Current Tax Expense*
Manfaat Pajak Tangguhan	(219.267.919)	(1.049.065.582)	*Deffered Tax Benefit*
Jumlah Entitas Anak	**4.051.890.652**	**3.529.871.411**	***Total Subsidiary***
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**249.408.819.260**	**165.698.819.071**	***Total Income Tax Expense***

d. Beban Pajak / ***d. Tax Expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax, as presented in statement of income, and taxable income for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Entitas Induk	2016	2015	***Parent Company***
Laba Sebelum Pajak	941.454.055.147	780.783.601.969	***Earnings Before Tax***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Differences:***
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	1.297.006.503	1.743.684.111	*Depreciation Differences between Fiscal and Commercial*
Penyisihan Piutang Bagi Hasil dan Piutang Lain	14.076.972.796	968.303.310	*Allowance of profit sharing receivables and Other Receivables*
Jasa Produksi Tahun 2015	(36.414.583.674)	(9.438.457.212)	*Incentif Year 2014*
Jasa Produksi Tahun Berjalan	36.892.343.817	36.414.583.674	*Incentif at Current Year*
Estimasi Imbalan Pasca Kerja	6.155.619.099	4.933.427.165	*Post Employee Benefit*
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	8.495.783.538	-	*Allowance for Inpairment Losess*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	83.522.615.060	(77.034.938.644)	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Jumlah	**114.025.757.139**	**(42.413.397.595)**	***Total***

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

d. Beban Pajak (Lanjutan) / ***d. Tax Expense (Continued)***

	2016	2015	
Perbedaan Permanen:			***Permanent Differences:***
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain	20.204.266.872	16.369.247.740	*Other General and Administrative Expenses*
Beban Promosi	12.838.230.072	14.270.954.152	*Promotion Expenses*
Beban Representasi	10.663.908.282	7.920.143.283	*Repersentation Expenses*
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6.704.153.890	4.322.129.893	*Service Vehicle Maintenance Expenses*
Beban Pajak Lainnya	5.918.724.051	37.269.126	*Other tax Expenses*
Beban Asuransi dan Penggantian Biaya Kesehatan	5.515.858.216	4.149.833.631	*Insurance and Health Reimbursement Expense*
Beban Investasi	2.939.613.868	5.172.316.389	*Investment Expenses*
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas	1.416.792.571	1.618.301.754	*Service Vehicle Depreciation Expense*
Beban Pemeliharaan dan Inventaris Rumah Dinas	821.003.984	144.831.309	*Maintenance Expense and Inventory Home Office*
Beban Pemeliharaan Gedung	436.283.747	903.496.420	*Building Maintenance Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi Rumah Dinas	270.965.984	99.453.078	*Communication and Officer Housing Energy Expenses*
Beban Penyusutan Rumah Dinas	194.473.165	46.612.830	*Depreciation Home Office Expenses*
Beban Penyusutan Gedung Kantor Pusat	184.390.314	39.109.931	*Depreciation Expenses of Head Office*
Beban Komunikasi dan Energi Gedung	166.250.453	431.639.772	*Communication and Building Energy Expenses*
Jumlah	**68.274.915.467**	**55.525.339.308**	***Total***

Entitas Induk / ***Parent Company***

	2016	2015	
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:			***Income which charged by final tax:***
Penghasilan Investasi	(566.317.910.402)	(483.852.398.220)	*Penghasilan Investasi*
Pendapatan Jasa Giro	(9.092.769.077)	(7.754.597.201)	*Interest Income on Current Account*
Pendapatan Sewa Gedung	(342.720.000)	(1.101.476.813)	*Buildings Rental income*
Jumlah	**(575.753.399.479)**	**(492.708.472.234)**	***Total***
Laba kena Pajak	**548.001.328.275**	**301.187.071.448**	***Taxable Income***
Laba Kena Pajak (dibulatkan)	**548.001.328.000**	**301.187.071.000**	***Taxable Income (Rounded)***
Dasar Pengenaan Pajak	**548.001.328.000**	**301.187.071.000**	***Tax Base***
Pajak Penghasilan			*Income Tax*
25% x Dasar Pengenaan Pajak	137.000.332.000	75.296.767.750	*25% x Tax Base*
Total Beban Pajak Kini	137.000.332.000	75.296.767.750	***Total Current Tax Expenses***
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka	(79.651.176.408)	(64.524.180.000)	*Less prepaid Tax*
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	**57.349.155.592**	**10.772.587.750**	***Income Tax Payable***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Laba Sebelum Pajak	10.862.363.590	10.269.266.043	***Income Before Tax***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Difference:***
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(134.779.368)	(98.619.438)	*Depreciation Difference Fiscal and Commercial*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	1.011.851.042	4.294.881.766	*Increase (Decrease) in Claim Reserves*
Jumlah	**877.071.674**	**4.196.262.328**	***Total***

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Beban Pajak (Lanjutan)

17. TAXES (Continued)

d. Tax Expense (Continued)

	2016	2015	
Perbedaan Permanen:			***Permanent Difference:***
Beban Promosi	599.335.173	408.040.618	*Promotion Expenses*
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain	550.422.815	379.906.553	*Other General and Administrative Expenses*
Beban Rapat Kerja	498.045.303	298.461.830	*Meeting Expenses*
Beban Representasi	280.205.285	217.151.691	*Representative Expenses*
Pendapatan Imbal Hasil Deposito	(21.360.130.545)	(22.817.829.107)	*Deposits Return Income*
Pendapatan Bonus Giro	(147.284.122)	(81.096.260)	*Interest Income*
Jumlah	**(19.579.406.091)**	**(21.595.364.675)**	***Total***
Rugi yang Dikompensasi Tahun Berjalan	**(7.839.970.827)**	**(7.129.836.304)**	***Loss Carry Forward Current Year***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Tax Income***
Non Final	-	-	*Non Final*
Final	4.271.158.571	4.578.936.993	*Final*
Beban Kini	**4.271.158.571**	**4.578.936.993**	***Current Tax Expenses***

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang (*self-assesment system*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas 10 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

In accordance with the taxation laws of Indonesia , Perum Jamkrindo calculate, and pay the amount of tax payable (self - assessment system). The tax authorities may calculate and amend taxes within 10 years from the date the tax becomes due.

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

e. Pajak Tangguhan / ***e. Deferred Tax***

	2016			
	1 Januari 2016 / January 1, 2016	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Desember 2016 / December 31, 2016
Entitas Induk/ *Parent Company*				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ *Allowance of Profit Share Receivable*	4.282.249.767	(36.815.250)	-	4.245.434.517
Jasa Produksi/*Incentive*	9.103.645.919	119.440.036	-	9.223.085.955
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	40.027.820.731	(43.088.571.934)	-	(3.060.751.203)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	76.872.078.748	20.889.864.128	-	97.761.942.876
Provisi atas Kerugian Klaim *Co-Guarantee / Provision for Claim Losses*	2.512.105.683	(361.397.328)	-	2.150.708.355
CKPN – Piutang Koperasi/ *Allowance of Cooperative Receivable*	81.472.896	-	-	81.472.896
CKPN – Piutang *Co-Guarantee* / *Allowance of Co-Guarantee Receivable*	273.268.408	3.309.067.449	-	3.582.335.857
CKPN Piutang Ijp Kur/ Allowance *for Inpairment Losess*	-	2.123.945.885	-	2.123.945.885
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ *Remeasurement Of Post Employment Benefit*	34.561.397.025	5.233.012.680	16.923.789.226	56.718.198.931
Jumlah/ *Total Entitas Induk/ Parent Company*	**167.714.039.177**	**(11.811.454.336)**	**16.923.789.226**	**172.826.374.067**
Entitas Anak/*Subsidiary Entity*				
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(33.865.222)	(33.694.842)	-	(67.560.064)
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	1.074.243.151	252.962.761	-	1.327.205.912
Cadangan Kerugian Dikompensasi/*Compensation Reserve*	2.573.367.115	1.782.459.076	-	4.355.826.191
Kenaikan (Penurunan) Kerugian Dikompensasi/ *Increase (Decrease) in Compensation Losses*	(2.573.367.115)	(1.782.459.076)	-	(4.355.826.191)
Cadangan Kerugian Dikompensasi/*Compensation Reserve*	-	-	528.365.000	528.365.000
Sub Jumlah/ *Total Entitas Anak* /Subsidiary Entity	**1.040.377.929**	**219.267.919**	**528.365.000**	**1.788.010.848**
Jumlah Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*	**168.754.417.106**			**174.614.384.915**

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / ***e. Deferred Tax (Continued)***

	2015			
	1 Januari 2015 / January 1, 2015	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	31 Desember 2015 / December 31, 2015
Entitas Induk/ *Parent Company*				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ *Allowance of Profit Share Receivable*	4.300.249.767	(18.000.000)	-	4.282.249.767
Jasa Produksi/*Incentive*	2.359.614.303	6.744.031.616	-	9.103.645.919
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(4.613.235.023)	44.641.055.754	-	40.027.820.731
Kenaikan (penurunan) Cadangan kKaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	96.140.023.772	(19.267.945.024)	-	76.872.078.748
Provisi atas Kerugian Klaim *Co-Guarantee* / *Provision for Claim Losses*	2.954.184.281	(442.078.598)	-	2.512.105.683
CKPN – Piutang Koperasi/ *Allowance of Cooperative Receivable*	91.904.976	(10.432.080)	-	81.472.896
CKPN – Piutang *Co-Guarantee* / *Allowance of Co-Guarantee Receivable*	15.221.157.149	(14.947.888.741)	-	273.268.408
CKPN Piutang Ijp Kur/ Allowance *for Inpairment Losess*				
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ *Remeasuremen*	2.955.154.751	(2.955.154.751)	-	-
	9.206.943.293	192.978.862	25.161.474.870	34.561.397.025
Jumlah/ *Total*	**128.615.997.269**	**13.936.567.038**	**25.161.474.870**	**167.714.039.177**
Entitas Anak/*Subsidiary Entity*				
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(9.210.363)	(24.654.859)	-	(33.865.222)
Kenaikan (Penurunan) cadangan klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	522.710	1.073.720.441	-	1.074.243.151
Kenaikan (Penurunan) Kerugian Dikompensasi/ *Increase (Decrease) in Compensation Losses*	790.908.039	1.782.459.076	-	2.573.367.115
Cadangan Kerugian Dikompensasi/*Compensation Reserve*	(790.908.039)	(1.782.459.076)	-	(2.573.367.115)
Jumlah/ *Total*	**(8.687.653)**	**1.049.065.582**	**-**	**1.040.377.929**
Jumlah Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*	**128.607.309.616**			**168.754.417.106**

Pada tahun 2016, Perum Jamkrindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk Tahun Pajak 2014 atas PPh Badan sebesar Rp29.979.115.754 dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2016.

In 2016, the Entity received Tax Over Payment assessment Letter (SKPLB) for Year 2014 regarding Corporate Income Tax, amounted Rp29.979.115.754 to Payment on March 5, 2016.

18. IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya.

Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Program Pensiun Manfaat Pasti
Penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 tanggal 23 Nopember 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 tanggal 7 Januari 2002. Program ini terdiri dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT). Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya dimulai sebelum tahun 1995. Jumlah karyawan yang diikutsertakan program tersebut sebanyak 891 orang.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 5% oleh karyawan dan sisanya ditanggung

Manfaat yang diperoleh dari program pensiun manfaat pasti ialah sebagai berikut:

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 (tiga puluh) x Gaji Karyawan;

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 2,5% x Masa Kerja x Gaji karyawan.

Program Pensiun Iuran Pasti
Penyelenggaraan program pensiun iuran pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.31/DIR/IV/1997 Tanggal 28 April 1997 jo No.14/DIR/V/2002 tanggal 21 Mei 2002. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya mulai setelah tahun 1995.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan.

Besarnya asumsi hasil investasi untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ialah 10% per tahun.

Pada tahun 2016 Manajemen menunjuk aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa untuk melakukan perhitungan beban/manfaat pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) untuk tahun 2016 dengan laporan bernomor 652/LV/PSGJ/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2016 dan 2015 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut :

18. POST EMPLOYED BENEFIT

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees.

This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Defined Benefit Pension Plan
Implementation of defined benefit pension plan is declare in Director decision No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 date of November 23, 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 dated January 7, 2002. This Program consist of Program Jaminan Hari Tua (JHT) and Program Tunjangan Hari Tua (THT). This programdestine for employees which time line working is started before 1995. Amount of involveed employeeses is the program counted at 891 people.

Funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 5% by employees and the rest accounted by company.

Benefit which obtained from defined benefit pension program is the following:

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) equal to 30 (thirty times) x employees salary;

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) equal to 2,5% x Years of Service x employees salary.

Defined Contribution Pension Plan
Implementation of defined contribution pension plan is declared by Director decision No. 31/DIR/IV/1997 dated April 28, 1997 jo No. 14/DIR/V/2002 dated May 21, 2002. This Program destine for employees which time line working is strarting after year 1995.

The funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 4,4% from employees base salary and the rest of 6,6% accounted on company.

The return of investment level assumption for Financial Institution Pension Fund (DPLK) is 10% per year.

In 2016 management hire independent actuary of PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa for calculating post empoyment expense/benefit post according to SFAS 24 (Revision 2013) for 2016 calculation reports numbered 652/LV/PSGJ/I/2017 on January 25, 2017.

In estimating pension benefit as of December 31, 2016 and 2015 for both programs, Actuary in the calculation use Projected Unit Credit. Actuarial Cost Method the calculation refers to the actual level of financing needed in the period. The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan) / ***18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)***

	2016	2015	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	8,00%	9,00%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	8,00%	8,00%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% per tahun / per year	5% per tahun / per year	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Resignation rate*
- Usia 20 - 39 tahun	0.5% per tahun / *per year*	0.5% per tahun / *per year*	*20 - 39 years old* -
- Usia 40 - 44 tahun	0.3% per tahun / *per year*	0.3% per tahun / *per year*	*40 - 44 years old* -
- Usia 45 - 49 tahun	0.2% per tahun / *per year*	0.2% per tahun / *per year*	*45 - 49 years old* -
- Usia 50 - 54 tahun	0.1% per tahun / *per year*	0.1% per tahun / *per year*	*50 - 54 years old* -
- Usia diatas 54 tahun	0.0% per tahun / *per year*	0.0% per tahun / *per year*	*over 54 years old* -
Program Pensiun			*Pension Program*

Kewajiban (aset) program pensiun manfaat pasti sebagai berikut: / *Defined benefit pension program liability (asset) manfaat pasti is as follows*

	2016	2015	
Entitas Induk			***Parent Company***
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	47.325.900.034	34.108.996.985	*Present value of Obligation ending balance*
Nilai Wajar Aset Program	(19.223.416.196)	(15.985.088.669)	*Fair value of Program Assets*
Status Pendanaan	28.102.483.838	18.123.908.316	*Funding Status*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**28.102.483.838**	**18.123.908.316**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position***
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income***
Biaya Jasa Kini	4.524.467.351	3.223.507.714	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	3.069.809.728	2.871.726.425	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	(1.438.657.980)	(1.161.806.974)	*Required rate of return of Program Assets*
Total biaya manfaat karyawan	**6.155.619.099**	**4.933.427.165**	***Total employee benefit expenses***
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position***
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	18.123.908.316	21.843.395.955	*(Asset)/Liabilities at beginning period*
Biaya manfaat karyawan	6.155.619.099	4.933.427.165	*Employee benefit expenses*
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	7.675.976.544	(4.964.428.499)	*Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss*
Iuran yang dibayarkan	(3.853.020.119)	(3.688.486.305)	*Contribution Paid*
(Aset)/kewajiban pada tanggal di Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	**28.102.483.840**	**18.123.908.316**	***(Assets)/ Liabilities at Statement of Financial Position Period-Parent Company***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	65.855.632	-	*Present value of Obligation ending balance*
Nilai Wajar Aset Program	-	-	*Fair value of Program Assets*
Status Pendanaan	65.855.632	-	*Funding Status*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan- Entitas Anak	**65.855.632**	**-**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position-Subsidiary***

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan) / *18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)*

	2016	2015	
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income***
Biaya Jasa Kini	-	-	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	-	-	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	-		*Required rate of return of Program Assets*
Total biaya manfaat karyawan	**-**	**-**	***Total employee benefit expenses***
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position***
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	-	-	*(Asset)/Liabilities at beginning period*
Biaya manfaat karyawan		-	*Employee benefit expenses*
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	65.855.632	-	*Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss*
Iuran yang dibayarkan	-	-	*Contribution Paid*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan-Entitas Anak	**65.855.632**	**-**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position-Subsidiary***
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**28.168.339.472**	**18.123.908.316**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position***

19. UTANG LAIN-LAIN / *19. OTHER LIABILITY*

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari: / *Other Payable as of December 31, 2016 and 2015 consists of:*

	2016	2015	
Beban Pegawai YMH Dibayar	43.552.084.169	39.092.755.562	*Accrued Employee Expenses*
Akun dalam Penyelesaian	36.670.260.426	31.103.209.659	*Other Liabilities in Progress*
Beban Administrasi dan Umum yang Masih Harus Dibayar	26.643.214.769	10.569.888.508	*Administrative and General Expenses Accrued*
Utang Fee Agen	10.721.020.767	5.090.130.870	*Agent Fee Payable*
Beban Sistek dan Pengembangan yang Masih Harus Dibayar	7.747.589.912	3.046.651.060	*Technology System and Development Expenses Accrued*
Utang Fee Bank	2.679.307.831	1.034.403.120	*Bank Fee Payable*
Beban Operasi YMH Dibayar	2.103.751.173	3.062.591.258	*Operational Expense Accrued*
Setoran Jaminan	1.152.155.789	-	*Deposit Guarantee*
Utang Premi Pensiun	854.017.173	1.296.171.941	*Retirement of debt premium*
Titipan IJP	416.455.017	-	*Deposit IJP*
Security Deposit Penyewa	351.393.840	486.376.129	*Tenant Security Deposit*
Jaminan Telepon Penyewa	49.452.204	106.635.438	*Tenant Warranty Deposit*
Utang Premi Jamsostek	81.087.693	60.775.618	*Jamsostek Premiums Payable*
Diskonto	-	226.585.348	*Discount*
Lainnya	45.387.460.097	10.111.601.300	*Others*
Jumlah Hutang Lain-Lain	**178.409.250.860**	**105.287.775.811**	***Total Other Payable***

20. EKUITAS / *20. EQUITY*

	2016	2015	
Penyertaan Modal Negara	7.638.733.365.160	7.138.733.365.160	***Government Paid-in Capital***
Cadangan-cadangan :			***Reserves:***
Cadangan Modal	904.000.000	904.000.000	*Capital Reserve*
Cadangan Umum	1.451.961.210.348	1.138.329.276.283	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	297.707.510.860	297.707.510.860	*Purposed Reserve*
Cadangan Dana Teknis	78.274.593.035	78.274.593.035	*Technical Fund Reserve*
Jumlah Cadangan	**9.467.580.679.403**	**8.653.948.745.338**	***Total Reserves***
Komponen Ekuitas Lainnya	**139.930.290.522**	**196.885.040.558**	***Other Components Of Equity***
Laba Tahun Berjalan	**692.044.895.364**	**625.354.338.228**	***Current Year Net income***
Jumlah Ekuitas Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**10.299.555.865.289**	**9.476.188.124.124**	***Net Equity Attributable to Owners of the Parent***
Kepentingan Non Pengendalian	**13.122.707**	**12.849.577**	***Non - Controlling Interest***
Total Ekuitas	**10.299.568.987.996**	**9.476.200.973.701**	***Total Equity***

20. EKUITAS (Lanjutan)

a. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Pada tahun 2015 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Pada tahun 2014 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.300.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Pada tahun 2013 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.120.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Penambahan modal ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Penambahan modal terkait Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ini juga dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2012 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.169.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tahun 2011 sebesar Rp1.200.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, tahun 2010 sebesar Rp900.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, tahun 2009 sebesar Rp250.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun 2007 sebesar Rp600.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

Modal awal Perusahaan adalah sebesar Rp21.000.000.000. Pada tahun 1992 dan 1993 terdapat penambahan modal sebesar Rp22.330.000.000 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994.

Pada tahun 1998, terdapat penambahan modal sebesar Rp56.403.365.160 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-33/MK.016/1998 tanggal 22 Januari 1998 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999.

20. EQUITY (Continued)

a. Government Paid-in Capital

In 2016 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 92 of 2016 dated December 30, 2016. In 2015 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 134 of 2015 dated December 28, 2015. In 2014 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp1.300.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 98 of 2014 dated October 17, 2014 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. In the year 2013 there were additional State Capital (PMN) was Rp1.120.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 81 of 2013 dated December 10, 2013 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Credit Guarantee Indonesia.

This capital increase is intended to increase the capacity of the business and to strengthen the Company's capital structure related to KUR Guarantee.

Capital increase related to the Kredit Usaha Rakyat Guarantee is also done by the Government in 2012 there were additional State Capital (PMN) was Rp. 1.169.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 108 of 2012 dated December 24, 2012 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Loan Guarantees Indonesia, in 2011 at Rp1.200.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 61 of 2011 dated December 29, 2011, in 2010 amounted Rp900.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 82 of 2010 dated December 20, 2010, in 2009 amounted Rp250.000.000.000 stipulated by Government Regulation 65 of 2009 dated October 31, 2009 and 2007 amounted Rp600.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 67 of 2007 dated December 10, 2007.

Beginning capital of company amounted to Rp21.000.000.000. In 1992 and 1993 there in capital addition amounted to Rp22.330.000.000 and stated with Government regulation No. 5 year 1994 dated March 3, 1994.

In 1998, there in capital additon amounted to Rp56.403.365.160 and have been stated with Finance Minister decision No. S-33/MK.016/1998 dated Januari 22, 1998 and Government Regulation of Republic of Indonesia No. 11 year 1999 dated January 27, 1999.

20. EKUITAS (Lanjutan)

b. Cadangan - cadangan

Saldo cadangan modal merupakan saldo cadangan modal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 383/KMK/011/1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang penetapan modal awal Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Jumlah ini telah dimasukkan sebagai cadangan modal per 31 Desember 1981 sesuai dengan tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Saldo cadangan umum merupakan saldo pencadangan untuk pemupukan modal kegiatan operasional. Pada tahun buku 2002 telah dilakukan koreksi cadangan umum sebagai akibat diterapkannya PSAK 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan yang diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2001.

Saldo cadangan tujuan merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi dan saldo cadangan teknis merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan jika terjadi klaim.

c. Komponen Ekuitas Lainnya

Merupakan laba rugi belum direalisir atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

20. EQUITY (Continued)

b. Reserves

Capital reserve balance represent capital reserve balance which specified based on Finance Minister decree No. 383/KMK/011/1982 dated June 15, 1982 concerning pegging of start-up capital Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

This amounts have been classified as capital reserves as of December 31, 1981 according to the implementation date of PP Nomor 51 year 1981 concerning establishment of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

General reserve balance represent reservation balance for capital accummulating of operational activity. In the 2002 general reserve have been adjusted due to effect of SFAS 46 implementaion concerning Income Tax Accounting, which effective since January 1, 2001.

Purposed reserve is reservation balance to be used as source of fund of investment financing and technical reserve is reservation balance to be used as source of funding in case of claim happened.

c. Other Components of Equity

Is unealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / ***Financial Instruments - Available for Sale***

Per 31 Desember 2016/*As of December 31, 2016*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Reksadana/*Mutual Fund*			
RD Dana Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	225.000.000.000	183.324.256.807	(41.675.743.193)
RD Maybank Dana Obligasi Plus	155.259.497.600	144.071.492.220	(11.188.005.380)
RD BNI – AM Dana Saham Sektoral/*Inspiring Equity Fund*	110.000.000.000	107.414.799.949	(2.585.200.051)
RD Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	87.189.542.425	(12.810.457.575)
RD Dana Insight Green (I-Green)	80.000.000.000	50.702.896.455	(29.297.103.545)
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	43.764.188.112	(6.235.811.888)
RD CIMB – Pricipal Islamic Equity Growth Syariah	45.000.000.000	36.768.909.152	(8.231.090.848)
RD Dana RHB Equity Opportunity Fun	30.000.000.000	29.336.341.462	(663.658.538)
RD BNI-AM Dana Terencana	25.000.000.000	26.738.803.119	1.738.803.119
RD CIMB – P Indo Domestic Equity Fund	20.000.000.000	17.390.351.510	(2.609.648.490)
RD Batavia Dana Saham Optional	20.000.000.000	19.447.738.515	(552.261.485)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive	10.000.000.000	9.285.804.341	(714.195.659)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.538.026.553	(3.461.973.447)
RD Sam Syariah Berimbang	10.000.000.000	9.550.226.207	(449.773.793)
RD CIMB-P Balanced Growth Syariah	10.000.000.000	9.934.268.997	(65.731.003)
RD Sam Indonesian Equity Fund	10.000.000.000	10.765.159.988	765.159.988
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	8.175.339.936	(1.824.660.064)
RD Simas Saham Unggulan	10.000.000.000	9.482.196.802	(517.803.198)
RD Insight Wealth (I-Wealth)	10.000.000.000	10.184.280.000	184.280.000
RD Dana Simas Danamas Saham	10.000.000.000	9.928.003.397	(71.996.603)
RD Saham Sukuk Syariah Sejahtera	10.000.000.000	11.286.547.734	1.286.547.734
RD Insight Syariah Berimbang (IShare)	5.000.000.000	5.017.632.847	17.632.847
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.974.037.941	(1.025.962.059)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	4.340.967.600	(659.032.400)
RD Sam Sharia Equiy Fund	5.000.000.000	4.398.078.578	(601.921.422)
RD Danareksa Mawar Konsumer 10	5.000.000.000	4.987.607.416	(12.392.584)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.697.006.263	(302.993.737)
Saldo Dipindahkan / *Brought Forward*	**990.259.497.600**	**868.694.504.326**	**(121.564.993.274)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / ***c. Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2016/*As of December 31, 2016*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Reksadana/*Mutual Fund (Lanjutan)*			
Saldo Pindahkan / *Carried Forward*	**990.259.497.600**	**868.694.504.326**	**(121.564.993.274)**
RD Millenium Equity	5.000.000.000	2.202.945.855	(2.797.054.145)
RD Dana Makara Prima	5.000.000.000	5.046.822.870	46.822.870
RD Bahana Mes Syariah Fund	5.000.000.000	4.963.100.000	(36.900.000)
Reksadana Bahana MES Syariah Fund	500.000.000	496.310.000	(3.690.000)
Jumlah Reksadana/*Total Mutual Fund*	**1.005.759.497.600**	**881.403.683.051**	**(124.355.814.549)**
Obligasi / *Bonds*			
Negara RI Seri FR0072	142.754.670.000	133.000.000.000	(9.754.670.000)
Negara RI Seri FR0068	74.035.000.000	71.400.000.000	(2.635.000.000)
Negara RI Seri PBS012	49.914.895.000	46.462.500.000	(3.452.395.000)
Negara RI Seri FR0073	43.145.000.000	42.208.000.000	(937.000.000)
SBSN Seri PBS012	32.825.000.000	30.715.230.000	(2.109.770.000)
Negara RI Seri FR0065	28.820.000.000	25.800.000.000	(3.020.000.000)
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	27.000.000.000	26.865.000.000	(135.000.000)
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.000.000.000	14.853.000.000	(147.000.000)
I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	14.970.000.000	14.703.000.000	(267.000.000)
Negara RI Seri FR0074	14.551.610.940	14.467.550.000	(84.060.940)
Negara RI Seri FR0052	11.750.000.000	12.165.000.000	415.000.000
Negara RI Seri FR0042	11.125.000.000	11.509.500.000	384.500.000
Negara RI Seri FR0047 Seri C	10.945.000.000 10.000.000.000	11.350.000.000 10.046.990.000	405.000.000 46.990.000
Onligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	9.730.000.000	9.801.000.000	71.000.000
Negara RI Seri FR0064	9.500.000.000	8.530.800.000	(969.200.000)
Antam Seri A Tahun 2011	5.880.000.000	6.003.000.000	123.000.000
I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	5.700.000.000	6.003.000.000	303.000.000
Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014			
BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.924.000.000	3.894.000.000	(30.000.000)
Negara RI Seri FR0059	2.491.484.274	2.491.875.000	390.726
I PP Properti Tahun 2016 Seri B	2.040.000.000	1.944.600.000	(95.400.000)
Jumlah Obligasi / *Total Bonds*	**531.101.660.214**	**509.214.045.000**	**(21.887.615.214)**
Saham / Share			
Dua Putra Utama Makmur, Tbk (DPUM)	89.999.965.000	80.509.059.600	(9.490.905.400)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.122.379.337	10.302.900.000	(8.819.479.337)
Waskita Karya	10.973.000.000	10.160.000.000	(813.000.000)
Bank Negara Indonesia	9.641.150.040	8.525.000.000	(1.116.150.040)
PT Kalbe Farma Tbk	8.995.818.000	9.090.000.000	94.182.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.338.762.492	6.249.931.000	(2.088.831.492)
PT Telekomunikasi Indonesia	7.878.900.050	7.543.000.000	(335.900.050)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.123.292.831	6.774.250.000	(349.042.831)
Pakuwon Jati Tbk	6.705.572.000	5.650.000.000	(1.055.572.000)
PP (Persero) Tbk	6.230.489.050	5.930.592.000	(299.897.050)
PT Unilever Indonesia Tbk	6.053.920.000	5.369.920.000	(684.000.000)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.215.842.342	3.726.000.000	(1.489.842.342)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.370.901.948	3.101.724.000	(269.177.948)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.609.262.425	2.765.000.000	155.737.575
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.271.222.940	2.310.000.000	38.777.060
Saldo Dipindahkan / *Brought Forward*	**194.530.478.455**	**168.007.376.600**	**(26.523.101.855)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / ***c. Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2016/*As of December 31, 2016*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Saham / Share (Lanjutan)			
Saldo Pindahkan / *Carried Forward*	**194.530.478.455**	**168.007.376.600**	**(26.523.101.855)**
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	2.673.208.113	2.066.180.000	(607.028.113)
Waskita Beton Precast (IPO)	1.959.550.148	2.087.250.000	127.699.852
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)	1.094.750.003	1.011.500.000	(83.250.003)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	793.625.000	817.250.000	23.625.000
Jumlah Saham/ Total Shares	**201.051.611.719**	**173.989.556.600**	**(27.062.055.119)**
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / *Total Financial Instrument - Available for Sale*			**(173.305.484.881)**
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / *Tax Effect on Financial Instuments - Available for Sale*			**43.854.736.220**
Cadangan Revaluasi Aset / *Asset Revaluation Reserve*			**288.479.659.435**
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / *Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit*			**(19.098.620.252)**
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / *Total Other Equity Component*			**139.930.290.522**

Per 31 Desember 2015/*As of December 31, 2015*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Reksadana / *Mutual Fund*			
RD CIMB-Principal Equity Focus	175.000.000.000	140.263.819.655	(34.736.180.345)
RD BNI-AM Dana Saham Sektoral	110.000.000.000	99.879.949.614	(10.120.050.386)
Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	75.334.302.988	(24.665.697.012)
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	41.519.043.565	(8.480.956.435)
RD CIMB Princ. Islamic Equity Growth	45.000.000.000	33.392.386.474	(11.607.613.526)
RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation	25.000.000.000	22.376.908.566	(2.623.091.434)
RD Batavia Dana Saham	25.000.000.000	22.840.824.236	(2.159.175.764)
RD BNI - AM Dana Terencana	25.000.000.000	25.357.854.197	357.854.197
RD Batavia Dana Saham Optimal	20.000.000.000	17.637.179.971	(2.362.820.029)
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equity	20.000.000.000	15.918.951.912	(4.081.048.088)
RD Panin Dana Ultima	20.000.000.000	19.331.979.314	(668.020.686)
RD AAA Enhanced Strategy Fund	20.000.000.000	18.344.323.245	(1.655.676.755)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.625.722.460	(3.374.277.540)
RD Simas Satu	10.000.000.000	9.384.465.090	(615.534.910)
RD SAM Syariah Berimbang	10.000.000.000	8.647.545.142	(1.352.454.858)
RD CIMB Princ. Equity Aggressive	10.000.000.000	8.131.142.656	(1.868.857.344)
RD CIMB-P Balanced Growth Syariah	10.000.000.000	8.799.251.963	(1.200.748.037)
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	7.259.876.421	(2.740.123.579)
RD Simas Saham Unggul	10.000.000.000	8.240.794.629	(1.759.205.371)
RD Insight Wealth (I-Wealth)	10.000.000.000	9.209.660.000	(790.340.000)
RD Sam Educational Equity Fund	10.000.000.000	7.691.153.605	(2.308.846.395)
RD Sam Educational Equity Fund	10.000.000.000	9.564.927.791	(435.072.209)
RD Dana Simas Danamas Saham	10.000.000.000	8.624.886.655	(1.375.113.345)
RD SAM Sukuk Syariah Sejahtera	10.000.000.000	10.070.967.981	70.967.981
Danareksa Mawar Konsumer 10	5.000.000.000	4.514.617.007	(485.382.993)
RD SAM Sharia Equity Fund	5.000.000.000	3.948.852.922	(1.051.147.078)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	3.822.193.173	(1.177.806.827)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.180.041.085	(819.958.915)
RD Milenium Equity	5.000.000.000	4.873.267.309	(126.732.691)
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.638.995.172	(1.361.004.828)
RD Insight Syariah Berimbang (I-Share)	5.000.000.000	4.518.702.675	(481.297.325)
Jumlah Reksadana / *Total Mutual Fund*	**790.000.000.000**	**663.944.587.473**	**(126.055.412.527)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / **c. *Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2015/*As of December 31, 2015*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Obligasi / *Bonds*			
Indomobil Finance 2012 Seri C	50.000.000.000	49.525.000.000	(475.000.000)
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	42.000.000.000	42.000.000.000	-
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	36.000.000.000	34.772.400.000	(1.227.600.000)
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	24.217.500.000	(782.500.000)
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	24.500.000.000	(500.000.000)
Bank Cimb Niaga Tahap I 2012	25.000.000.000	24.287.500.000	(712.500.000)
AKR Corporindo Thn 2012 Seri A	20.000.000.000	19.194.000.000	(806.000.000)
I Adhi Tahap II 2013 Seri B	19.000.000.000	17.290.000.000	(1.710.000.000)
I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	15.000.000.000	14.122.500.000	(877.500.000)
Antam Seri A Tahun 2011	15.000.000.000	13.657.500.000	(1.342.500.000)
I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	9.110.000.000	(890.000.000)
Prm Pegadaian Thp II 2014 Seri C	10.000.000.000	10.046.990.000	46.990.000
Negara RI FR0070	9.890.000.000	9.745.000.000	(145.000.000)
BTPN Tahap III 2013 Seri B	5.000.000.000	4.880.000.000	(120.000.000)
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.926.400.000	3.788.000.000	(138.400.000)
Jumlah Obligasi / *Total Bonds*	**310.816.400.000**	**301.136.390.000**	**(9.680.010.000)**
Saham / *Share*			
Dua Putra Utama Makmur	89.999.965.000	151.363.577.500	61.363.612.500
Sugih Energi	42.566.523.200	46.036.620.200	3.470.097.000
Astra International Indonesia	22.997.817.937	15.083.250.000	(7.914.567.937)
Bukit Asam	19.905.969.987	17.409.420.000	(2.496.549.987)
Sigmagold Inti Perkasa	11.359.024.699	11.696.436.100	337.411.401
Elnusa	10.000.003.500	5.381.265.500	(4.618.738.000)
Bank Tabungan Negara	9.321.175.238	9.015.294.000	(305.881.238)
Eurika Prima Jakarta	9.320.369.847	9.012.432.000	(307.937.847)
Bank Central Asia	9.093.499.995	8.711.500.000	(381.999.995)
Bank Negara Indonesia	9.086.149.935	7.228.250.000	(1.857.899.935)
Vale Indonesia	8.698.864.520	5.177.369.000	(3.521.495.520)
Summarecon Agung	8.355.937.775	8.084.380.000	(271.557.775)
Perusahaan Gas Negara	7.127.749.980	3.562.000.000	(3.565.749.980)
Indofood Sukses Makmur	6.689.249.985	5.073.750.000	(1.615.497.975)
Kalbe Farma	6.634.185.200	5.594.404.500	(1.039.780.700)
Wijaya Karya	6.128.234.563	4.483.248.000	(1.644.986.563)
Bank Mandiri	5.515.254.984	4.044.600.000	(1.470.654.984)
Jasa Marga	5.500.522.536	4.650.250.000	(850.272.536)
Semen Gresik	4.200.912.504	2.902.025.000	(1.298.887.504)
Tiga Pilar Sejahtera	4.135.861.470	2.349.750.000	(1.786.111.470)
Waskita Karya	3.822.642.866	3.850.645.500	28.002.634
Bumi Serpong Damai	1.335.100.032	1.224.000.000	(111.100.032)
Unilever	870.036.506	855.677.500	(14.359.006)
Jumlah Saham/ Total Shares	**302.665.052.259**	**332.790.144.800**	**30.125.094.551**
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / *Total Financial Instrument - Available for Sale*			**(105.610.327.976)**
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / *Tax Effect on Financial Instuments - Available for Sale*			**26.402.581.994**
Cadangan Revaluasi Aset / *Asset Revaluation Reserve*			**289.434.424.383**
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / *Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit*			**(17.788.850.458) 4.447.212.614**
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / *Total Other Equity Component*			**196.885.040.558**

d. Analisis *Gearing Ratio*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai outstanding Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sepuluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

Pada posisi 31 Desember 2016 , *Gearing Ratio* Produktif Perum Jamkrindo adalah 6,85 kali, sedangkan total *gearing ratio* adalah sebesar 12,19 kali.

Karena *Gearing Ratio* masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka Perum Jamkrindo masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan kredit produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp32,444 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut :

= (10,00 – 6,85) x Rp10,299 triliun = Rp32,444 triliun

Untuk penjaminan kredit secara total, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp286,431 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut :

= (40,00 – 12,19) x Rp10,299 triliun = Rp286,431 triliun

d. Gearing Ratio Analysis

In accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.010/2011 on Amendments to the Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 about the Company Corporate Credit Guarantee and Credit Re-Guarantee Company, Gearing Ratio is the limit set to measure the ability of the Guarantor in the Guarantee activities.

Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of a self-assurance with a net worth of Guarantor at any given time. Net worth is total assets minus totalliabilities consist of the placement of government capital, reserves, retained earnings and other equity components of net losses.

Gearing Ratio Guarantee for Productive Enterprises is set at a high of ten times the Company's equity and total gearing ratio is set at a high fourty times the equity of the Company.

On December 31, 2016, the gearing ratio of Perum Jamkrindo was productive to 6.85 times, while the total gearing ratio is to 12.19 times.

Because Gearing Ratio is still below the allowed maximum terms, the Perum Jamkrindo still have given the capacity to do the guarantee. To guarantee the productive credit, guarantee concessions amounted to Rp32.444 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

For a total credit guarantee, the guarantee allowance amounted to Rp286.431 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *21. NON-CONTROLLING INTEREST*

Bagian yang menjadi hak (beban) pengaruh *non*-pengendali atas laba Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The rights part (expense) non-controlling influence on subsidiaries profit are as follows:

31 Desember 2016 (December 31, 2016)
Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Aset Bersih/ *Net Assets*	Kepentingan *Non*-Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	262.454.118.269	13.122.707

31 Desember 2016 (December 31, 2016)
Laba yang Dapat Diatribusikan /*Net - Income Attributable*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Laba Bersih/ *Net Income*	Kepentingan *Non*-Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	6.810.472.938	340.524

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan) / *21. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)*

31 Desember 2015 (December 31, 2015)
Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Aset Bersih/ *Net Assets*	Kepentingan *Non* -Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	256.991.524.257	12.849.577

31 Desember 2015 (December 31, 2015)
Laba yang Dapat Diatribusikan /*Net - Income Attributable*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Laba Bersih/ *Net Income*	Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	6.739.394.632	336.971

22. IMBAL JASA PENJAMINAN / *22. GUARANTEE FEE*

	2016	2015	
IJP Bruto:			***Gross Guarante Fee***
IJP Kredit Usaha Rakyat	1.120.315.055.991	879.696.482.751	*Guarantee Fee – KUR*
IJP Kredit Eksisting	733.927.546.041	683.035.764.724	*Guarantee Fee – Existing Credit*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	35.017.148.083	18.148.405.223	*Re-insurance Commission*
Jumlah IJP Bruto	**1.889.259.750.115**	**1.580.880.652.698**	***Total Gross Guarantee Fee***
Premi *Co-Guarantee*	(166.237.457.658)	(227.936.052.266)	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(118.610.157.602)	(66.811.226.080)	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(15.971.543.801)	(8.645.787.813)	*Guarantee Restitution*
Jumlah IJP Bersih	**1.588.440.591.054**	**1.277.487.586.539**	***Total Net Guarantee Fee***

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company in order to secure credit activities. The amount of IJP is measure from IJP rate, credit limit, and credit period.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di muka.

For existing credits, the amount of IJP rate is determined by considering such as: product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period. IJP of general credit is paid in advance.

Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan Mei dan November.

Rates of KUR Guarantee Fee is regualated in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.189/PMK.05/2010 dated November 2, 2010. IJP KUR paid once a year by the government with billing period in May and November.

IJP Kredit Usaha Rakyat sudah memperhitungkan sharing IJP ke dan dari Askrindo dengan proporsi 56% untuk Jamkrindo dan 44 % untuk Askrindo sesuai Perjanjian kerjasama No. 95/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 1 Desember 2010 tentang penjaminan kredit/ pembiayaan bersama kredit usaha rakyat (KUR) yang di-addendum dengan perjanjian No. 51/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan perjanjian No. 38/Jamkrindo/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012. Sharing IJP KUR dengan Askrindo tidak termasuk IJP KUR dengan pola penjaminan syariah.

IJP of KUR has consider about IJP sharing to and from Askrindo with the proportion of 56% for Jamkrindo and 44% for Askrindo in accordance with agreement No. 95/Jamkrindo/XII/2011 dated December 1, 2010 concerning of credit guarantee/ KUR guarantee, which the addendum is No. 51/Jamkrindo/XII/2011 dated December 29, 2011 and agreement No. 38/Jamkrindo/VII/2012 dated July 2, 2012. IJP of KUR with the method of sharia guarantee is not include in sharing with Askrindo.

Pendapatan komisi re-asuransi merupakan komisi yang diterima dari mitra re-asuransi dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra re-asuransi.

Re-insurance commission income is earned commission from re-insurance partner with a certain percentage of the amount of the premium paid to re-insurance partners.

22. IMBAL JASA PENJAMINAN (Lanjutan)

Premi *Co-Guarantee* merupakan premi yang dibebankan kepada terjamin atas kepesertaan asuransi jiwa kredit/ pembiayaan untuk dibayarkan kepada mitra *Co-Guarantee* melalui Penerima Jaminan (bank/ *non bank*).

Besaran premi *Co-Guarantee* yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* s/d 31 Januari 2013 adalah 60% dan mulai 01 Pebruari 2013 adalah sebesar 54% dari Imbal Jasa Penjaminan yang ditetapkan dalam Sertifikat Penjaminan (SP) yang di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan Perjanjian Khusus atau yang disetarakan dengan itu. Dengan adanya addendum PKS mitra co bulan Mei 2013, hak mitra co menjadi 38% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Mei 2013. Kemudian dilakukan addendum lagi, hak mitra co menjadi 54% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Januari

Premi re-asuransi merupakan premi yang dibayarkan guna mengalihkan risiko klaim ke mitra re-asuransi. Besaran premi re-asuransi yang menjadi hak mitra re-asuransi ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

22. GUARANTEE FEE (Continued)

Co-guarantee premium is premium charged to guaranteed about their participation in credit life insurance/ financing to be paid to co-guarantee partners through The Insured (bank/ non-bank).

The amount of Co-Guarantee premium which are the right of co-guarantee partners until January 31, 2013 is at 60% and started February 1, 2013 the amount is at 54% from IJP specified in Guarantee Certificate (SP) include administrative costs and other expenses which related to special agreement or that equal. With the addendum of co-guarantee agreement on May, 2013, the rights of co partners become at 38% without reduced of administration costs for issuance of SP which the realization was began on May 1, 2013. Then on the next addendum, rights of co partners become at 54% without reduced of administration costs for the issuance of SP which the realization was began on January 1, 2014.

Re-insurance premium is the premium that paid to reduce the claim risk to re-insurance partner. The amount of the premium is determined based on the type of guarantee products.

23. BEBAN KLAIM

23. CLAIM EXPENSE

	2016	2015	
Beban Klaim Kredit Usaha Rakyat	481.493.287.372	822.150.118.809	*KUR's Claim Expenses*
Beban Klaim Kredit Eksisting	282.982.934.410	172.284.050.794	*Claim Expense - Exsisting Credit*
Jumlah Beban Klaim	**764.476.221.782**	**994.434.169.603**	***Total Claim Expenses***
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Kredit Eksisting	3.979.312.847	15.157.196.820	*Increase (Decrease) in Claims Reserve-Existing Credit*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Kredit Usaha Rakyat	79.863.003.873	(87.897.253.699)	*Increase (Decrease) in Claims Reserve-Kredit Usaha Rakyat*
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	**83.842.316.720**	**(72.740.056.879)**	***Total Increase (Decrease) Claim Reserves***
Kerugian Penurunan Nilai Piutang *Co-Guarantee*	23.264.905.716	968.303.310	*Impairment Losses- Co-Guarantee Receivable*
Jumlah Beban Klaim	**871.583.444.218**	**922.662.416.034**	***Total Claim Expenses***

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih Cadangan Klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee include of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements.

Increase (Decrease) of Claim Reserves represent the difference of the current year with previous year.

24. PENDAPATAN INVESTASI / *24. INVESTMENT INCOME*

	2016	2015	
Bunga Deposito	378.742.730.852	412.793.887.840	*Time Deposit Interest*
Bunga Obligasi	121.515.888.629	113.017.342.452	*Bond Interest*
Pendapatan Reksadana	62.234.693.539	57.923.480.389	*Mutual Fund Income*
Laba Pelepasan Saham	24.500.114.275	15.874.610.362	*Capital Gain on Stock*
Dividen	1.531.491.723	2.845.969.563	*Dividend*
Efek Beragunan Aset	2.092.735.797	2.242.327.998	*Security (Assets Underlying)*
Jumlah Pendapatan Investasi	**590.617.654.815**	**604.697.618.604**	***Total Investment Income***
Beban Pajak	(2.939.613.868)	(4.130.479.945)	*Tax Expense*
Beban Investasi	-	(1.041.836.444)	*Investment Expense*
Jumlah Beban Investasi	**(2.939.613.868)**	**(5.172.316.389)**	***Total Investment Expense***
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih	**587.678.040.947**	**599.525.302.215**	***Total Investment Income - Net***

25. BEBAN USAHA / *25. OPERATING EXPENSES*

	2016	2015	
Beban Sumber Daya Manusia			***Human Resources Expenses***
Kesejahteraan	52.481.221.802	38.064.167.873	*Wealthfare*
Jasa Produksi	47.200.249.383	30.010.784.812	*Production Services*
Gaji	30.790.046.754	24.106.783.288	*Sallaries*
PPh. Pasal 21	22.441.437.365	16.816.052.703	*Income Tax Subsidy (art. 21)*
Pendidikan dan Pelatihan	17.067.138.166	11.483.786.203	*Education and Training*
Tunjangan Jabatan	17.289.762.779	10.595.373.806	*Officer Subsidy*
Tantiem	15.765.510.000	27.235.342.181	*Tantiem*
Tunjangan Hari Raya	13.871.396.270	10.205.960.021	*Special Day Subsidy*
Konsumsi	9.423.873.079	5.154.182.173	*Meal*
Tunjangan Wilayah	6.360.512.403	4.156.926.813	*Area Benefits*
Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja	6.221.474.731	4.933.427.165	*Employee Benefit Estimation Expense*
Beban Cuti	6.221.937.541	4.269.286.914	*Leave Expense*
Asuransi Kesehatan	5.714.200.663	4.149.833.631	*Healthcare Insurance*
Premi Asuransi Pensiun	3.490.190.990	2.196.915.940	*Pension Insurance Premiums*
Insentif	3.382.102.393	6.332.775.707	*Incentive*
Pakaian Kerja	3.101.521.595	684.285.190	*Uniform*
Tunjangan Kesehatan	2.361.837.037	41.188.526	*Healthcare*
Tunjangan Perumahan	2.322.000.000	1.982.900.000	*Housing Subsidy*
Lembur	1.325.011.487	1.293.361.552	*Overtime*
Tunjangan Komunikasi	827.258.318	592.713.950	*Communication*
Tunjangan Transport	808.869.000	869.709.000	*Transportation Subsidy*
Iuran Jamsostek	811.430.878	847.641.802	*Social Security Premium*
Tunjangan Perusahaan	53.206.400	260.360.000	*Company Benefits*
Sub Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	**269.332.189.035**	**206.283.759.250**	***Sub Total Human Resources Expenses***
Beban Operasional			***Operating Expenses***
Fee Agen	50.417.517.387	29.572.721.934	*Fee Agent*
Beban Sewa	28.046.411.228	19.287.114.815	*Rent Expenses*
Beban Promosi	25.737.587.961	22.325.083.440	*Promotional Expenses*
Fee Based Income	24.012.559.777	9.203.497.826	*Fee Based Income*
Beban Hubungan Kelembagaan & Pemasaran	23.293.683.622	16.042.672.385	*Institutional Relation & Marketing Expenses*
Beban Perjalanan Dinas	21.595.606.223	19.979.283.080	*Business Travel Expenses*
Beban Penagihan Subrogasi	21.500.065.015	9.832.638.338	*Subrogation Collection Expenses*
Beban Pemeliharaan Kendaraan	13.794.740.491	9.172.481.012	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Eksploitasi	12.453.486.781	9.993.313.764	*Exploitation Expenses*
Beban Sosialisasi dan Rekonsiliasi	9.491.760.399	7.757.039.951	*Socialization and Reconciliation Expenses*
Sub Jumlah Beban Operasional	**230.343.418.883**	**153.165.846.545**	***Sub Total Operating Expenses***

25. BEBAN USAHA (Lanjutan) / *25. OPERATING EXPENSES (Continued)*

	2016	2015	
Beban Administrasi Kantor dan Umum			***General and Administrative Expenses***
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	25.648.792.650	23.413.338.331	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Lain-lain	21.603.602.045	16.950.524.784	*Other Expenses*
Beban PKBL	13.069.463.867	988.576.000	*PKBL Expense*
Beban Komunikasi dan Energi	13.219.753.759	12.261.836.238	*Communication and Energy Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap	12.721.224.167	7.602.051.589	*Fixed Asset Depreciation Expenses*
Beban Representasi	11.214.331.097	7.976.843.836	*Representation Expenses*
Beban Konsultasi	6.442.431.806	8.269.012.987	*Consultant Expenses*
Beban Pajak-Pajak	5.940.318.212	535.321.680	*Tax Expenses*
Beban ATK	5.636.211.814	3.691.539.232	*Suplies Expenses*
Beban Pencetakan	5.305.655.081	5.046.627.988	*Printing Expenses*
Beban Rapat Kerja	4.950.517.999	6.205.412.375	*Business Meeting Expenses*
Beban Asosiasi	1.272.635.132	612.982.662	*Association Expenses*
Beban Bank	780.151.632	578.413.971	*Bank Expenses*
Beban Pemeriksaan	765.435.802	695.346.887	*Audit Expenses*
Beban Perijinan	192.021.549	84.944.021	*Registration Expenses*
Beban Amortisasi	35.751.320	431.346.775	*Amortization Expenses*
Sub Jumlah Beban Adm. Kantor & Umum	**128.798.297.931**	**95.344.119.356**	***Total General And Administrative Expenses***
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha			***Technology, System and Development Expense***
Beban Pengembangan Usaha	15.178.708.040	12.700.348.798	*Development Expenses*
Beban Sistem & Teknologi	13.498.610.227	3.033.517.527	*Technology and System Expenses*
Sub Jumlah Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha	**28.677.318.267**	**15.733.866.325**	***Sub Total Technology, System and Development Expense***
Jumlah Beban Usaha	**657.151.224.116**	**470.527.591.476**	***Total Operating Expenses***

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *26. OTHER INCOME*

Pendapatan lain-lain bersih merupakan pendapatan diluar usaha setelah dikurangi beban diluar usaha, dengan rincian sebagai

Other income is income beside operating revenue and operating expense, are as follows:

	2016	2015	
Pendapatan Lain-Lain			***Other Income***
Pendapatan Subrogasi	259.384.339.757	247.459.929.244	*Subrogation Income*
Pendapatan Lainnya	17.377.019.881	47.351.605.724	*Others*
Pendapatan Jasa Giro	9.240.053.200	9.752.987.280	*Interest Income*
Pendapatan Subrogasi Lainnya	4.620.915.434	416.165.507	*Other Subrogation Income*
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan	3.217.695.717	1.816.921.834	*Administration Guarantee Income*
Pendapatan Administrasi BUM	230.067.491	242.057.216	*BUM Administration Income*
Pendapatan Sewa	-	190.609.251	*Rental Income*
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**294.070.091.480**	**307.230.276.057**	**Total Other Income**

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

In its bussiness activities, the company perform certain transactions with related parties, management believes that transaction with related parties performed with the same condition with third parties, which include:

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*
BPD DKI	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Jabar Banten	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Jateng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

27. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*
BPD Jatim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Bali	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD NTB	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD NTT	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sumsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Lampung	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Aceh	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Riau	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sumbar (Nagari)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Jambi	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Kalbar	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Kalteng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Kalsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Kaltim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sulsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sulut	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sulteng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Sultra	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Maluku	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Papua	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Rakyat Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Negara Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Tabungan Negara	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Bukopin	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Jabar Banten	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Jateng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah DIY	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Jatim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Sumsel- Babel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Aceh	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

27. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*
BPD Syariah Riau	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Kalbar	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Kalsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Kaltim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
BPD Syariah Sulsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Bank Bukopin Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
Menteri Keuangan / *Finance Minister*	Pemegang Saham / *Share Holder*	Piutang IJP KUR, pendapatan IJP KUR
Dewan Pengawas dan Direksi / *Supervisory Council Members*	Manajemen Kunci Perusahaan / *Key Management of Company*	Gaji dan Tunjangan Dewas / *Sallaries and Allowances*

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Tahun 2008, berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K, Perusahaan melaksanakan penjaminan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk merealisasikan program KUR tersebut, Pemerintah telah menambah modal Perusahaan sebesar Rp600 milyar tahun 2007, Rp250 milyar tahun 2009, Rp900 milyar tahun 2010, Rp1,2 trilyun tahun 2011 dan Rp1,169 milyar tahun 2012. Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Imbal Jasa Kafalah (IJK) atas KUR tersebut ditanggung oleh pemerintah dan dibayar per tahun. Untuk Sertifikat Penjaminan (SP) yang terbit sebelum 14 Februari 2010 dicatat sebesar Rp 1,5% x 70% dari plafon kredit sedangkan untuk Sertifikat Penjaminan (SP) setelah 14 Februari 2010 dicatat dengan menggunakan tarif 3,25% dengan coverage 70%-80%. Segmentasi operasional penjaminan KUR sebagai berikut:

28. *GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)*

In 2008, based on President Instruction No. 6 year 2007 dated Juni 8, 2007 concerning Real Sector Acceleration and Strenghtening of UMKM-K Policy, Company provide guarantee to citizen business loan (KUR). To realize the program, in the end of 2009 and 2007 Govermnet have make addition of company capital amounted to Rp600 billion, Rp250 billion in 2009, Rp900 billion in 2010, Rp1,2 trillion in 2011 and Rp1,169 billion in 2012. Guarantee Fee/Kafalah Fee of KUR is borne by the government and paid per year, for the Certificate of Guarantee (SP), which appeared prior to February 14, 2010 recorded at Rp 1.5% x 70% of the credit limit while for Certificate of Assurance (SP) after February 14, 2010 recorded a marginal 3.25% to 70% -80% coverage. Segmentation KUR underwriting operations as follows:

a. Laporan Posisi Dana

a. *Fund Position Report*

	2016	2015	
Giro	129.360.773.566	159.958.410.163	*Current Accounts*
Deposito	4.605.040.476.218	4.407.144.959.879	*Time Deposit*
Obligasi	1.377.264.020.249	1.167.542.512.075	*Bonds*
Saham	173.989.556.600	332.790.144.800	Shares
Reksa dana	1.483.723.823.165	1.184.567.953.392	*Mutual Fund*
Efek Beragun Aset (EBA)	21.747.084.323	23.355.986.301	*Security (Asset Underlying)*
Sub Jumlah	**7.791.125.734.121**	**7.275.359.966.610**	***Sub Total***
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisi Atas Efek Tersedia Untuk Dijual	(173.305.484.881)	105.610.327.976	*Unralized Gain (Loss) of Marketable Securities - Avalaible for Sale*
Jumlah	**7.617.820.249.240**	**7.380.970.294.586**	***Total***

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan) / ***28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)***

b. Laporan Laba Rugi / **b. *Income Statement***

2016 / ***2016***

	KORPORAT	KUR	
PENDAPATAN OPERASIONAL			***OPERATING REVENUE***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.854.242.602.032	1.120.315.055.991	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	35.017.148.083	-	*Re Insurance Comission Fee*
Premi *Co-Guarantee*	(166.237.457.658)	-	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(118.610.157.602)	-	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(15.971.543.801)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.588.440.591.054**	**1.120.315.055.991**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(764.476.221.782)	(481.493.287.372)	*Claim Expenses*
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klain	(83.842.316.720)	(79.863.003.873)	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Penyisihan Piutang IJP/KUR	(8.495.783.538)	(8.495.783.538)	*Allowance for Inpairment Losess*
Kerugian Penurunan			*Impairment Losses on*
Nilai Piutang	(14.076.972.796)	-	*Co-Guarantee Receivable*
Provisi Kerugian Klaim	(692.149.382)	-	*Provision for Claim Losses Co-Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**(871.583.444.218)**	**(569.852.074.783)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**716.857.146.836**	**550.462.981.207**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	587.678.040.947	515.630.993.725	*Investment Income- Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	294.070.091.480	182.912.509.457	*Other Income (Expenses)*
Jumlah	1.598.605.279.263	1.249.006.484.389	*Total*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	230.343.418.883	113.618.523.434	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	269.332.189.035	191.528.295.816	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	128.798.297.931	83.581.703.831	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi,			*Technology, System, and*
dan Pengembangan Usaha	28.677.318.267	22.557.131.328	*Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**657.151.224.116**	**411.285.654.409**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**941.454.055.147**	**837.720.829.981**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	235.897.638.707	190.426.041.964	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	13.511.180.553	10.553.907.024	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**249.408.819.260**	**200.979.948.988**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**692.045.235.888**	**636.740.880.993**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
			Comprehensive Income
Pendapatan Komprehensif	(118.710.257.788)	(111.368.180.380)	
LABA KOMPREHENSIF	**573.334.978.099**	**525.372.700.614**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

2015 / ***2015***

	KORPORAT	KUR	
PENDAPATAN OPERASIONAL			***OPERATING REVENUE***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.562.732.247.475	863.884.576.177	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	18.148.405.223	-	*Re-Insurance Comission Fee*
Premi Co-Guarantee	(227.936.052.266)	-	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(66.811.226.080)	-	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(8.645.787.813)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.277.487.586.539**	**863.884.576.177**	***Net Guarante Revenues***

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan)

b. Laporan Laba Rugi (Lanjutan)

2015

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)

b. Income Statement (Continued)

2015

	KORPORAT	KUR	
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	994.434.169.603	820.494.942.120	*Claim Expenses*
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	(72.740.056.879)	(87.897.253.699)	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	968.303.310	-	*Impairment Losses on Co-Guarantee Receivable*
Provisi Kerugian Klaim	-	-	*Provision for Claim Losses Co-Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**922.662.416.034**	**732.597.688.421**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**354.825.170.505**	**131.286.887.756**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	599.525.302.215	520.514.062.501	*Investment Income- Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	307.230.276.057	193.355.661.985	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	153.165.846.545	57.392.575.564	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	206.283.759.250	112.740.646.180	*Human Resourse Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	95.344.119.357	56.367.265.611	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	15.733.866.325	11.007.786.969	*Technology, System, and Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**470.527.591.477**	**237.508.274.324**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**791.053.157.300**	**607.648.337.917**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	180.693.139.344	146.098.837.052	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	(14.994.320.273)	11.493.778.901	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**165.698.819.071**	**157.592.615.953**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**625.354.338.230**	**450.055.721.964**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
Pendapatan Komprehensif	219.808.280.224	(73.349.465.534)	*Comprehensive Income*
LABA KOMPREHENSIF	**845.162.618.453**	**376.706.256.429**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

29. MANAJEMEN RESIKO

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian

Pada posisi 31 Desember 2016, beberapa indikator risiko penjaminan kredit mengalami penurunan, lebih baik dari tahun sebelumnya. *Default Rate* menurun 0,71% dari tahun 2015, demikian pula tingkat NPL yang mengalami penurunan 0,1% dari tahun 2015. Namun Pencapaian Pengembalian Subrogasi menurun 1,05% dari tahun 2015, demikian pula *Recovery Rate* Piutang Subrogasi mengalami penurunan 0,53% dari tahun 2015.

29. RISK MANAGEMENT

Some significant relative risks in 2015 are as follows:

1. Risk Credit Guarantee

Credit Guarantee Risk is the risk arising from the failure to fulfill obligations guaranteed. Risk can be seen in the amount of default risk and a guaranteed level of NPL, and returns subrogation receivables.

As of December 31, 2016, several credit guarantee risk indicators are tend to decrease. Default Rate has decreased 0,71% from 2015, the Achievement Level Returns of Subrogation decreased 1,05% from 2015, and the Recovery Rate of Subrogation receivables decreased 0,53% from 2015. However, the NPL rate is decreased 0,1% from 2015.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

Uraian	2015 (Rp)		2016 (Rp)		Pertumbuhan/ *Growth*	*Description*
Default risk = (Biaya Klaim)/(Volume Penjaminan)	922.662.416.034 / 65.590.575.587.643	= 1,41%	871.583.444.218 / 125.968.092.619.258	= 0,69%	-0,71%	*Default risk = (Cost of Claim) / (Guarantee Volume)*
NPL = (*Outstanding* Kredit Kol 3+4+5)/(Total *Outstanding* Kredit)	147.109.353.254 / 94.120.639.362.125	= 0,16%	64.608.181.155 / 125.571.037.250.413	= 0,05%	-0,10%	*NPL = (Outstanding Credit Col. 3+4+5) / (Total Outstanding Credit)*
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = (Realisasi Angsuran Subrogasi)/(Target Angsuran Subrogasi)	247.309.668.335 / 300.000.000.000	= 82,44%	259.384.339.757 / 321.768.030.188	= 80,61%	-1,82%	*Return on Subrogation Achievement = (Realization of Subrogation Installment) / (Target of Subrogation Installment)*
Recovery Rate Piutang Subrogasi = (Angsuran Piutang Subrogasi)/(Saldo Piutang Subrogasi)	247.309.784.926 / 3.775.258.532.625	= 6,55%	259.384.339.757 / 4.351.971.907.308	= 5,96%	-0,59%	*Recovery Rate of Subrogation Receivables = (Subrogation Receivables Installment)/(Total Subrogation Receivables)*

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

To minimize the risk of guarantee, then on the process of guarantee, there is a risk identify using the 4Ps, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality. Items that must be considered for each of these aspects are adapted to the characteristics of credit to be secured, and elaborated on in the system and the related guarantee procedures.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

The results of the risk identification process and then followed with the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In the implementation, risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 4P. Quantitative predictions made by the scoring system. Based on score, determined risk prediction of each Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Furthermore, to make a decision whether the submission of guarantee can be approved or not, it is decided in a committee meeting. According to precautionaryt principle, the members of the committee consists of officials that directly related to guarantee activities (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risk (risk financing unit). With decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, then the decision is expected to be more objective and potential risks because decision-making errors can be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Beside use to help the decision-making process, the result of risk analysis that has been done is also used as one of the basic consideration in monitoring the ongoing credit. For high credit risk, then the monitoring of the credit can be done intensively.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2016, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausul yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjasamakan dengan mitra kerja.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.
- Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan re-asuransi.
- Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
- Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
- Melakukan update data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
- Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

2. Risiko *Co-Guarantee*

Co-guarantee adalah kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Risiko *co-guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee* Sesuai dengan Per-Dir nomor 26/Per-Dir/VII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko *co-guarantee* digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko counterpart.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-guarantee* adalah besarnya piutang *co-guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan Per-Dir no. 14/Per-Dir/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, piutang *co-guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada posisi 31 Desember 2016, *co-guarantee* dilakukan dengan 6 (enam) perusahaan asuransi, yaitu PT. Heksa Eka Life Insurance (PT HELI), PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Jiwasraya, PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya, PT Takaful dan PT CAR. *Performance* mitra *co-guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut :

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

As of December 31, 2016, in addition to mitigation efforts, the company is also doing some other risk mitigation measures are:

- *Reform agreement by adding a clause that can be used to minimize the risk.*
- *Doing spread risk by adding new partners and adding products in cooperation with partners.*
- *Adding products marketed by the Company.*
- *Conducting an assessment the spread risk by working with reinsurences.*
- *Utilizing the services of an agent who can help select candidates for the Guarantee Credit Secured non-KUR*
- *Coordinate with the National Committee relating to the implementation of the KUR program to anticipate problems that may arise.*
- *Restricting the volume of guarantees for high-risk products.*
- *Updating of data, including subrogation receivables collateral as one consideration in making subrogation receivables collection efforts so that these efforts can be carried out effectively.*
- *Optimizing subrogation receivables collection.*

2. Co-Guarantee Risk

Co-guarantee is a collaboration between Perum Jamkrindo with other guarantee or insurance company in the form of closing certain risks. Co-Guarantee Risk is the risk of uncollectible co-guarantee receivables. In accordance with the Director Regulation No.26/Per-Dir/VII/2014 dated August 21, 2014 concerning Risk Management Guide, co-guarantee risk is classified into operational risk with sub categories of counterparty risk.

One indication of the co-guarantee risk is the amount of co-guarantee receivables compared with the average claim co-guarantee with partners related to co-guarantee. In accordance with the Director Regulations No.14/Per-Dir/XII/2011 dated December 22, 2011, co-guarantee receivable declared fair if unsolved co-guarantee receivables a maximum of 3 (three) months of the average filing reimbursement claims of the last period.

As of December 31, 2016, there are co-guarantee cooperation with six (6) insurance companies, PT. Heksa Eka Life Insurance (PT HELI), PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Jiwasraya, PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya, PT Takaful dan PT CAR. Performance of co-guarantee partners are as follow:

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

2. Risiko *Co-Guarantee (Lanjutan)*

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

2. Co-Guarantee Risk (Continued)

Mitra *Co-Guarantee* / *Co-Guarantee Partner*	Saldo Piutang *Co-Guarantee* / *Co-Guarantee Receivables* (dalam jutaan/ *in million*)	Rata-rata Pengajuan Klaim *Co-Guarantee* per Bulan/ *Average Co-Guarantee Claims per Month* (dalam jutaan/ *in million*)	Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 bulan Rata-rata Pengajuan/ *Comparative Balance receivable on average 3 months Submissions* (%)
PT Heksa Eka Life Insurance	43.705.693.362	2.317.184.848	629%
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	47.875.227.784	9.078.027.288	176%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	-	-
PT Jiwasraya	17.734.702.370	946.823.115	624%
PT Jamkrindo Syariah	1.156.155.406	-	-
PT Asuransi Beringin Sejahtera	13.070.398.215	4.582.869.962	95%

Untuk meminimalkan risiko *co-guarantee*, perusahaan melakukan mitigasi dengan:
- Melakukan evaluasi kinerja mitra *co-guarantee* untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausul untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang *co-guarantee* secara berkala.

To minimize the risk of co-guarantee, the company do the mitigation with:
- *Evaluate the performance of co-partners to minimize risk.*
- *Improving the agreement by adding clauses to minimize the risk.*
- *Do the reconciliation and collection of co-guarantee receivables periodically.*

3. Risiko Keuangan

3. *Financial Risk*

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Financial risk can be reflected from company's liquidity risk. In accordance with the Director Regulation No.15/Per-Dir/XII/2010 dated December 29, 2010 concerning Risk Management Guide, Liquidity Risk is the risk caused the company is not able to fulfill the obligations that have matured.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK. 010/2011 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

In accordance with the PMK. No. 99/PMK. 010/2011 guarantor liquidity ratio determined at least 150% (one hundred and fifty percent). Liquidity ratio is calculated using the current ratio which is the ratio between current assets with debt.

Uraian	2015 (Rp)		2016 (Rp)		Pertumbuhan/ Growth	Description
Risiko Likuiditas = (aset lancar) / (utang lancar)	9.348.190.875.047 / 1.237.804.130.675	755,22%	10.999.049.838.024 / 1.544.664.923.325	= 712,07%	-43,16%	*Default risk = (Cost of Claim) / (Guarantee Volume)*

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Based on these indicators, Perum Jamkrindo's liquidity risk is relatively small.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk

Market risk is the risk arising from the movement of market variables (adverse movement) Perum Jamkrindo guarantee, which can be reduce guarantee market (adverse) of the company and the movement of financial market that may potentially decrease the return and investment value. Market variables in this case related to guarantee is the level of competition, bank credit trends, market regulation. Market risk related to investment are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Pertumbuhan/Growth	Description
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	24.852.957.689.034 / 65.590.575.587.643 = 37,89%	60.377.517.031.615 / 65.590.575.587.643 = 92,05%	129,94%	*Growth Guarantee = ((Vol Guarantee t-Vol Guarantee t-1)) / (Vol Guarantee t-1)*
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan)/ (Target Vol Penjaminan)	65.590.575.587.643 / 77.781.216.589.623 = 84,33%	125.968.092.619.258 / 122.500.000.000.000 = 102,83%	18,50%	*Achievement of Guarantee Target = (Realization of Vol Guarantee)/ (Target of Vol Guarantee)*
Return Investasi = standard deviasi return investasi	0,68% atau setara 8,2% per tahun	0,57% atau setara 6,82% per tahun	1,45%	*Return on Investment = deviation of return investment standard*
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi)/ (Target Pendapatan Investasi)	599.525.302.216 / 550.901.952.847 = 108,83%	587.678.040.947 / 724.831.000.000 = 81,08%	-27,75%	*Achieving of Investment Income = (Realization of Investment Income)/ (Target of Investment Income)*

Dari indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan di tahun 2016 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Secara nominal, pencapaian volume penjaminan Perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, dan apabila dibandingkan dengan target RKAP 2016, pencapaian tersebut telah melewati target sebesar 102,83 %.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami penurunan, dan pencapaiannya tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RKAP 2016. Pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami penurunan sebesar Rp.11,8 Milyar atau turun sebesar 1,98% dari tahun 2015, terjadi penurunan persentase pencapaian pendapatan investasi dari108,83% (2015) menjadi 81,08% (2016). Dalam jangka panjang Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

Of several indicators mentioned above, can be seen the growth of guarantee, guarantee target achievement, and achievement of subrogation are increase.

Nominally, the achievement of the company guarantee volume increased compared with the same period last year, and compared with the target of RKAP 2016 these achievements have already passed the target at 102,83%.

Nominally, the Company's investment income decreased, and their achievement does not meet the target set in 2016. Growth achievement of investment income decreased by Rp.11,8 billion or a decrease of 1.98% from 2015, a decrease of achievement in the percentage of investment income form 108,83% (2015) to 81.08% (2016). In the long term the Company should further optimize the achievement of investment income and minimalized the target pontensial risk which can detain the investment target.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar (Lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:
- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik.
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan riviu apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Perusahaan. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk (Continued)

To minimize the risk of investment in the form of deposits, company do the things as follow:
- *Conduct elections for placement of bank deposits, where deposits are placed in banks that performed well.*
- *Nominal placement determined with the equity of relevant bank.*
- *Placement is done by a certain time period which possible to do a review if there is a change in interest rates.*

5. Interest Rate Risk

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Company's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

2016

Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh Terhadap Laporan Laba Rugi/ *Impact to profit or loss* (Dalam Jutaan Rupiah)**
± 25	± 946
±50	± 1.894

2015

Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh Terhadap Laporan Laba Rugi/ *Impact to profit or loss* (Dalam Jutaan Rupiah)**
± 25	± 1.032
±50	± 2.064

30. REKENING ADMINISTRATIF

Piutang Subrogasi

Piutang subrogasi merupakan tagihan kepada instansi/nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan sudah dibayarkan klaimnya kepada bank oleh Perum Jamkrindo.

30. ADMINISTRATIVE ACCOUNT

Subrogation Receivables

Subrogation receivables represent receivables from agencies / customers who can not pay the loan and the bank claims have been paid by the Corporation Jamkrindo.

	2016	**2015**	
Saldo Awal Tahun	3.846.880.025.284	3.099.905.784.925	*Beginning Balance of The Year*
Pembayaran Klaim Tahun Berjalan	764.476.221.782	994.434.169.603	*Claims Payments Current Year*
Pendapatan Subrogasi Tahun Berjalan	(259.384.339.757)	(247.459.929.244)	*Subrogation Revenue Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**4.351.971.907.308**	**3.846.880.025.284**	***Ending Balance***

31. PERIKATAN PENTING

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6/2015 berikut perubahannya, Perum Jamkrindo memiliki perikatan dengan beberapa Bank BUMN mengenai kegiatan penjaminan kredit.

Pada tahun 2016 terdapat perikatan antara Perum Jamkrindo dengan Bank BUMN sebagai berikut:

1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Retail No.54/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 3 tahun yang berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 3 tahun yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.

3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.B.1557-DIR/ADK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang merupakan Addendum atas perjanjian kerjasama No.B.764-DIR/ADK/10/2015 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 1 tahun yang berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.

31. SIGNIFICANT AGREEMENT

In accordance with Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 6/2015 and its amendments, Perum Jamkrindo had engagements with some of the state-owned bank credit for underwriting activities.

In 2016, there were engagements between Perum Jamkrindo with state-owned banks as follows:

1. *PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk about the Kredit Usaha Rakyat Mikro and Retail Guarantee No. 54/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015 dated August 13, 2015 certifying that Perum Jamkrindo conduct giving credit guarantees to micro, small and medium and cooperatives that have obtained loans from PT BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk. The term of engagement valid for 3 years from August 13, 2015 until August 12, 2018.*

2. *PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk about the Kredit Usaha Rakyat Guarantee No. 40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 dated June 6, 2016 certifying that Perum Jamkrindo activities guarantee the provision of credit to micro, small, medium and cooperatives have obtaining credit from PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. The term of engagement valid for 3 year from October 26, 2015 until October 26, 2018.*

3. *PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK of the PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK of the People's Business Credit Guarantee No.B.1557-DIR / ADK /12/2016 dated December 14, 2016 which is Addendum to the collaboration agreement No.B.764-DIR / ADK / 10/2015 explaining that Perum Jamkrindo conduct giving credit guarantees to micro, small and medium enterprises and cooperatives that have obtained loans from PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. The period of validity of 1 year starting from 14 August 2016 until 13 August 2017.*

32. PERSETUJUAN DIREKSI

Laporan keuangan ini telah mendapat persetujuan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit pada tanggal 10 Pebruari 2017. Manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laporan keuangan ini.

32. MANAGEMENTS APPROVAL

The financial statement had been approved by the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's Board of Directors dated February 2, 2016. Management of the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia is fully responsible for the financial statement.

33. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Perum Jaminan Kredit Indonesia menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) (halaman 84– 87) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) dan Entitas Anak.

33. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Perum Jaminan Kredit Indonesia published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) which account for investments in Subsidiaries using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analyzed. The following supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) (pages 84 – 87) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiaries.

*****

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 31, 2016	**31 Desember/ *December* 31, 2015**	
ASET			***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	5.471.702.637.163	5.338.855.894.558	*Cash and Cash Equivalents*
Surat Berharga	3.177.412.944.337	2.909.021.596.568	*Marketable Securities*
Piutang Imbal Jasa Penjaminan	2.347.025.423.821	1.442.621.583.924	*Guarantee Receivables*
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	112.621.073.474	97.537.616.592	*Reguarantee Receivables - Nett*
Pinjaman yang Diberikan - Bersih	955.166.363	955.166.363	*Loans - Nett*
Piutang Lain-Lain	80.394.567.702	58.146.567.054	*Other Receivable*
Pajak Dibayar Dimuka	81.540	33.878.187.274	*Prepaid Tax*
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	978.841.199.191	804.958.358.002	*Prepaid Premium and Fees*
Beban Dibayar Dimuka	22.628.945.359	13.098.194.636	*Prepaid Expenses*
Investasi Pada Anak	249.987.500.000	249.987.500.000	*Investment on Subsidiary*
Aset tetap - Bersih	439.863.537.078	394.302.054.714	*Fixed assets - Nett*
Aset Pajak Tangguhan	172.826.374.067	167.714.039.177	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	320.951.314.709	102.628.468.416	*Other Assets*
JUMLAH ASET	**13.375.210.764.804**	**11.613.705.227.278**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 31, 2016	**31 Desember/ *December* 31, 2015**	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang Klaim	11.649.581.603	13.067.185.620	*Claim Payable*
Utang Pajak	72.558.997.409	28.852.678.929	*Tax Payable*
Utang Penjaminan Ulang	68.889.524.643	66.892.237.041	*Co-Guarantee Payable*
Pendapatan Ditangguhkan	2.295.692.636.049	1.599.171.208.580	*Deferred Income*
Cadangan Klaim	399.650.604.923	317.573.579.177	*Claims Reserve*
Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	*Deferred Tax Liabilities*
Utang Lain-Lain	210.048.015.613	100.828.106.429	*Other Payable*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	28.102.483.840	18.123.908.316	*Employee Benefits Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**3.086.591.844.080**	**2.144.508.904.092**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			***Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Penyertaan Modal Negara	7.638.733.365.160	7.138.733.365.160	*Government's Share Capital*
Cadangan - Cadangan	1.823.203.951.093	1.514.963.263.160	*Reserves*
Saldo Laba	685.166.218.949	618.614.654.308	*Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	141.515.385.522	196.885.040.558	*Other Equity Component*
JUMLAH EKUITAS	**10.288.618.920.724**	**9.469.196.323.186**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**13.375.210.764.804**	**11.613.705.227.278**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
PENDAPATAN PENJAMINAN			***GUARANTEE INCOME***
Imbalan Jasa Penjaminan	1.817.511.082.168	1.544.365.762.229	*Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi	31.816.769.906	16.917.660.628	*Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(171.445.826.261)	(228.463.084.941)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(99.891.191.027)	(61.431.269.538)	*Reinsurance Premium*
Restitusi IJP	(15.971.543.801)	(8.645.787.813)	*Guarantee Restitution*
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	1.562.019.290.985	1.262.743.280.565	*Net Guarantee Revenues*
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(754.091.295.676)	(993.850.193.853)	*Claim Expenses*
Penurunan Cadangan Klaim	(83.522.615.060)	77.034.938.644	*Decrease in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(22.572.756.334)	(968.303.310)	*Impairment Losses of Receivable*
Jumlah Beban Klaim	(860.186.667.070)	(917.783.558.519)	*Total Claim Expenses*
PENJAMINAN BERSIH	**701.832.623.915**	**344.959.722.046**	***OPERATING INCOME - NET***
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	**566.317.910.402**	**576.707.473.108**	***INVESTMENT INCOME - NET***
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	**291.602.187.913**	**306.884.738.707**	***OTHERS INCOME - NET***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	220.423.307.765	145.892.585.703	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	255.213.084.574	194.454.627.153	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	125.118.647.010	92.211.996.477	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	28.440.263.324	15.209.122.559	*System, Technology, and Operating Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	629.195.302.673	447.768.331.892	*Total Operating Expenses*
LABA SEBELUM PAJAK	**930.557.419.557**	**780.783.601.969**	***INCOME BEFORE TAX***
Pajak kini	231.660.752.136	176.114.202.351	*Current income tax*
Beban (Manfaat) pajak tangguhan	13.730.448.472	(13.945.254.691)	*Tax Benefit (Deffered) income tax*
Beban pajak penghasilan - bersih	245.391.200.608	162.168.947.660	*Income tax expenses - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**685.166.218.949**	**618.614.654.309**	***CURRENT YEAR INCOME***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)***
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi:			*Items That Will Not Be Reclassified To Profit And Loss*
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(7.675.976.544)	4.964.428.499	*Remeasurement of Post Employment Benefit*
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiiban Imbalan Pasti	1.918.994.136	(1.241.107.125)	*Related Deffered Tax Restatement on Defined Benefits Obligation*
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi:			*Items That Will Be Reclassified To Profit and Loss Due to Certain Conditions:*
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	289.434.424.384	*Gain on Fix Assets Revaluation*
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual	(128.291.969.606)	(99.752.047.528)	*Gain (Loss) Financial Assets Available For Sale*
Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	16.923.789.226	26.402.581.994	*Related Deferred Tax Financial Instrument of Available For Sale*
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	(117.125.162.788)	219.808.280.224	*Total Other Comprehensive Income (Expense)*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**568.041.056.161**	**838.422.934.533**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

Refrensi Penyusunan Laporan
Annual Report References

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
		I. Umum / General	
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris Annual report is presented in proper Bahasa Indonesia. English version of the report is recommended.		√
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca Annual report is printed on good qualitypapergrade,usingreadable typography		√
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Annual report clearly states corporate identity	Nama Perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. Company name and year of annual report are displayed on the: 1. Cover; 2. Side; 3. Back cover; and 4. Each page	√
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Annual report is uploaded to company's website	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir. Covers the last report and at least reports of last 4 (four) years	√
		II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Financial Highlights	
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informationoncompany'soperating results in the form of three (3) yearscomparisonorsincebusiness commences-if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. Sales / revenue 1. Income (loss): 2. Gross profit a. Income attributable to owner of parent company; and b. Income attributable to non-controlling interests; 3. Total comprehensive income (loss) a. Income attributable to owner of parent company; b. Income attributable to non-controlling interests; and 4. Earnings (loss) per share Note: Companies without subsidiaries need to present income (loss) and income (loss) and other comprehensive income as total.	11-12

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun InformationonCompany'sfinancial position in the form of three (3) yearscomparisonorsincebusiness commences-if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. Information includes, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity	8-10
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Financial ratio in the form of three (3)yearsfinancialyearcomparison or since business commences-if the company's business activities havebeenconductedforlessthan3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan Information includes 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the industry where the company is engaged	13
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik Stock price information in tables and charts	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan 1. Total outstanding shares; 2. Information in tables include: a. Market Capitalization based on price of stock where the share is engaged; b. Highest, lowest, and closing price of stock where the share is engaged; and c. Share trade volume n price of stock where the share is engaged. 3. Information in charts include at least: a. Closing price of stock where the share is engaged; and b. Share trade volume n price of stock where the share is engaged. for every quarterly for the last 2 (two) financial years. Note: Disclose if company does not own market capitalization, stock price information, and share trade volume	36

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Informationonoutstandingbonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. Information includes: 1. Total outstanding bonds/sukukconvertible bonds 2. Interest rate/Return 3. Maturity date 4. Bonds/sukuk rating in 2015 ang 2016 Note: Disclose if company does not own bonds/sukuk/convertible bonds	36
	III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Report of the Board of Commissioners and Board of Directors		
1.	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Containing matters as follows: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors for managing the company and the basis of assessment; 2. The view over the company's business prospects prepared by the Board of Directors and the considerations; 3. The view on the implementation/management of the whistleblowing system (WBS) at the company and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons	44-49
2.	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Containing matters as follows: 1. Analysis on the performance of the company, which include among others: a. strategic policy; b. comparison between the results achieved by the targeted; and c. constraints faced by the company and actions to solve them; 2. Analysis on business prospects; 3. Development of the implementation of corporate governance in the financial year; and 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reasons	50-60

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan Include the following: 1. Signatures are placed on a separate page 2. Statement that the BoD and BoC are fully responsible for the accuracy of the annual report's content. 3. Signed by all members of the BoC and the BoD, with name and title; and 4. Written explanation in a separate letter by any member of the BoC or BoD who does not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available.	62-63
		IV. Profil Perusahaan / Company Profile	
1.	Nama dan alamat lengkap Perusahaan Company's name and full address	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.. Information includes, among others: name and address, zip code, telephone & fax number, email, and website	67
2.	Riwayat singkat Perusahaan A brief history of the Company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Information includes, among others: date/year of incorporation, name, and change(s) to the Company's name (where applicable). Note: disclose if change has never been made to company's name	68-69
3.	Bidang usaha Business Fields	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description on, among others: 1. Company's business activities according to the latest Articles of Association; and 2. Description of business activities; and 3. Products and/or services generated	70-75
4.	Struktur Organisasi Organizational structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. Presented in chart, including names and positions of at least up to one level below the BoD	76-77

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Company's Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Company's vision; 1. Company's mission; 2. A statement declaring that the vision and mission have been endorsed by the BoD/ BoC in current financial book year; and 3. Statement of corporate culture	78-79
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Brief background information on members of BoC	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Information includes, among others: 1. Name; 2. Position (including position(s) in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (field of study and education institution attended); 6. Working experience (position, institution, and tenure period) 7. Brief appointment chronology as member of company's BoC	81-86
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Brief background information on members of BoD	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Information includes, among others: 1. Name; 2. Position (including position(s) in other companies or institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (field of study and education institution attended); 6. Working experience (position, institution, and tenure period) 7. Brief appointment chronology as member of company's BoD	90-95

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Number of employees (2 year-comparison) and a description of competence development which shows there is any chance for every each organization level	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. Information includes, among others: 1. Number of employees for each level of the organization 2. Number of employees for each level of education 3. Number of employees by employment status; 4. Description and data of employee development programs, that had been realization in current book year includes position level who follows the training, type of training, and the training purpose; and 5. Costs incurred for development programs	122-139
9.	Komposisi Pemegang saham Composition of Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Detailed names of 20 largest shareholders and percent of ownership 2. Details of shareholder names and percent of ownership cover: a. Shareholders with 5% of more ownership; b. Names of public who own shares less than 5% 3. Names of Directors and Commissioners who own direct or indirect shares. Note: Disclose if Directors or Commissioners hasn't own direct and indirect shares	105-106
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of Subsidiaries and/or Associates	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). Information includes, among others: 1. Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Percent of share ownership 3. Description of the Subsidiaries and/or Associates' business fields 4. Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (in operation or otherwise)	107-108
11.	Struktur grup Perusahaan Company's group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Company's group structure in chart that describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV)	109

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Share listing chronology (includes private placement) and/or share listing from the first publishing until the end of financial book year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Information includes: 1. Year of shares publishing, total share, share value, and price of share for every each corporate action; 2. Total listing share after every each corporate action; 3. Names of exchange where the Company share is listing. Note: Disclose if the Company has no share listing chronology	110
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Listing chronology of other securities	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Information includes: 1. Listing chronology of other securities, other interest rate, and other securities due date; 2. Other securities value; 3. Name(s) of stock markets where the the securities are listed; and 5. Securities rating Note: Disclose if the company hasn't publishing and listing securities chronology	110
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of capital market institutions and/or capital market supporting professions	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Information includes: 1. Name and address of the Securities Administration Agency 2. Name and address of the Public Accounting Firm 3. Name and address of rating agency	111
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards and/or certification received during last financial year and/or certification effective during last financial year, both national and international	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Information includes: 1. Name of awards and/or certificates 2. Year received 3. Award and/or certification issuer 4. Validity period (for certification)	40-41

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office Note: Disclose if company does not own subsidiary/branch office/representative office	112-117
17.	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information available on company website	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Information includes, at least: 1. Shareholder information up to ultimate individual owner; 2. Code of Conduct; 3. AGMS Information at least include the agenda of AGMS, summary of AGMS, and information of important date including announcement date, invitation date, and summary AGMS date is announced; 4. Annual financial statements (last 5 years); 5. BoC and BoD profiles; and 6. BOC, BOD, Committees and Audit Internal Unit Charter.	118
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corpoare Secretary, and Internal Audit Unit	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covering least information (type and other relevant parties to attend): 1. Education and/or training for the Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for the Audit Committee; 4. Education and/or training for the Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for Other Committee; 6. Education and/or training fornthe Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for the Internal Audit Unit. which attended in the financial year. Note: if there is no education and/or training in the financial year, to be revealed	119-123

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
	V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis on Company Performance		
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review per business segment	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains a description of: 1. Each business segment; 2. Performance per segment, including: a. Production/operations; b. Increase/decrease in production capacity; c. Sales / revenue; d. Profitability	155-173
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of Company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/ penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan ko mprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the year and with previous years (both in narrative and tables), which covers among others: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss); and 5. Cash flows	174-187
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis on Company's solvency and collectability, presenting the calculation of ratios relevant to company's type of industry	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Decription on: 1. Short and long term solvency 2. Receivables collectability Level	188-189
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and capital structure policy	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/ sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal Decription on: 1. Capital structure consisting of interest bearing liabilities/sukuk and equity; 2. Capital structure policies and basis of policy formulation 3. Basis of management policies of capital structure.	189

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir Discussion on material commitment for capital goods investment during last financial year	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan . Description on: 1. Names the party who commited; 1. Purpose of commitment; 2. Expected fund source to fulfil the respective commitments; 3. Currency of denomination; and 4. Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position. Note: Disclose if company has no material commitment for investments in capital goods	190
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on capital goods investment realized during last financial year	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Description on: 1. Type of capital goods investment 2. Purpose of investment; and 3. Value of capital goods investment realized during last financial year Note: Disclose if there is no realization of capital goods investments	190
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan Comparative information between target at the beginning of financial year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, and other aspects considered significant for the Company	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Information includes, among others: 1. Comparison between target at the beginning of fiancnial year with achievement (realization) 2. Target or projection for next 1 (one) year in terms of revenues.	191
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material Information and facts subsequent to the accountant's reporting date	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description on significant events subsequent to the accountant's reporting date including their impacts on future business performance and risks. Note: Disclose if there is no significant event subsequent to accountant's reporting date.	192

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description on company's business prospect	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description on company's business prospect based that takes into account general industry and economic view supported by quantitative data from valid data sources.	192
10.	Uraian tentang aspek pemasaran Marketing aspect description	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description on marketing aspects of the company's products and services, namely marketing and market share strategy	155-156 159-160
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description regarding dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Description includes: 1. Dividend payout policy; 2. Amount of dividend; 3. Amount of dividend per share; 4. Pay-out ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividend for each year. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Note: Disclose reasons where dividend payout is not exercised	193
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Exercise of employee and/ or management stock option program (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Description includes: 1. Amount of stock in ESOP/MSOP and realization; 2. Period 3. Requirements of employee and/or management eligibility; and 4. Exercise price Note: disclose if ESOP/MSOP is not available	194-195
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Use of proceeds from Initial Public Offering (where the company is still required to report proceeds realization)*	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Information includes: 1. Total proceeds generated; 2. Plan of proceeds use; 3. Details of utilization; 4. Proceeds balance; and 5. Date of GMS/EGMS approval to proceeds use amendment (if any). Note: Disclose if the Company hasn't any realization information of funds	195

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Information on material transactions with conflict of interests and/or transactions with affiliated parties	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Information includes: 1. Name of parties and nature of affiliation; 2. Statement on the fairness of transaction; 3. Reasons of transactions; 4. Realization of transactions during last financial year; 5. Company policy concerning review mechanism on transactions; and 6. Fulfillment of relevant rules and regulations. Note: disclose if no such transaction occurs	195
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Description on regulatory changes that hold significant impact to the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Information includes: 1. Names of regulations that changes; and 2. the impact (quantitative and/or qualitative) to the company (if significant) or declaration that the impact is not significant. Note: Disclose if there is no regulations changes in the last financial year.	195-196
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Description on changes in accounting policies applied by the Company in last financial year	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Information includes: 1. Accounting policies changes 2. Accounting policies changes reason; and 3. The quantitative impact of financial report. Note: disclose if there is no change to accounting policies in the last financial year.	196-198

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
17.	Informasi kelangsungan usaha Information on business continuity	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Information contains: 1. Aspects that hold potentially significant impacts to business continuity in last financial year; 2. Management assessment on aspects intended in point 1 3. Assessment assumptions used by the management Note: disclose if there is no aspect that holds potentially significant impacts to business continuity during last financial year; disclose assumptions used by the management that inform the confidence that there is no significant aspects that hold potentially significant impacts to the company's business during financial year	198-199
	VI. Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance		
1.	Uraian Dewan Komisaris Board of Commissioners description	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).. Description includes, among others: 1. Description of BoC duties; 2. Training program to enhance BoC's competency or induction program for new BoC member; and 3. Disclosure on the Board Charter (Board of Commissioners Manual)	278-291
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Information on Independent Commissioner (minimum 30% of total BOC)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Information includes, among others: 1. Criteria to appoint independent commissioner; and 2. Statement of independency of each Independent Commissioner.	N/A
3.	Uraian Direksi Board of Directors description	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).. Description includes, among others: 1. Scope and responsibility of each BoD member; 2. Training program to enhance BoD's competency or induction program for new BoC member; and 3. Disclosure on the Board Charter (Board of Directors Manual)	291-312

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Assessment for GCG Implementation in 2015 on Board of Commissioners and Board of Directors	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1.. Criteria used to assess; 2. Assessor 3. Assessment score in every each criteria; 4. Assessment result recomendation; and 5. Not yet realization of recomendation.	214-225
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policy	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. BoC Remuneration policy disclosure 2. BoD remuneration policy disclosure 3. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoC 4. Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoD 5. Disclosure of indicators to determine BoD remuneration 6. Disclosure of performance bonus, non performance, and/or BOC and BOD received share option	314-319

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Frequency and attendance in Board of Commissioners meetings (minimum once in two months), Board of Directors meetings (minimum once in a month) , and joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors (minimum once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. Information includes, among others: 1. Date of meeting 2. Meeting participants; and 3. Meting agenda for each BoC, BoD, and joint meeting	285-290 303-310 310-312
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Information on majority and controlling shareholder(s), direct and indirect, up to ultimate individual owner(s)	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Presented in schematics or diagram that separate main shareholders and controling shareholders. Notes: main shareholders is the one who directly or indirectly has at least 20% voting rights of all shares that released by a company, but not a controlling shareholders.	105-106
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Affiliated relationship between members of BoD; 2. Affiliated relationship between members of BoD and members of BoC; 3. Affiliated relationship between members of BoD with Majority and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliated relationship between members of BoC; 5. Affiliated relationship between members of BoC with Majority and/or Controlling Shareholders	319-321

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
9.	Komite Audit Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Information includes, among others: 1. Name and position of Audit Committee members. 2. Educational qualification and professional experience of Audit Committee members 3. Audit committee members independency 4. Duties and responsibilities description 5. Brief report of Audit Committee activities, and 6. Audit committee meeting frequency and attendance level	324-329
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Remuneration and/or Nomination Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Information includes, among others: 1. Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Nomination and/or remuneration committee members' independency 3. Description of duties and responsibilities 4. Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level 6. Statement of nomination and/or remuneration committee guideline availability; and 7. BoD succesion policy	329-332
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other committees company's BoC	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Information includes, among others: 1. Name, title, and brief profile of the members of the committees 2. Independency of the committee; 3. Duties and responsibilities description 4. Other committees' duties implementation report 5. Other committees' meeting frequency and attendance level	332-337
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary duties and function description	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Information includes, among others: 1. Name and brief profile of Corporate Secretary officer; 2. Domicile; 3. Brief of duties and responsinilities; and 3. Brief of implementation duties of Corporate Secretary on the financial year.	337-340

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
13.	Uraian mengenai unit audit internal Description of Audit Internal Unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Information includes: 1. Name of Audit Internal Unit Head 2. Total employee (Internal auditor) in Audit Internal Unit 3. Sertification as Audit Internal Profession 4. Position of Audit Internal Unit in Company's Structure 5. Description of Audit Internal Unit activity in financial year, and 6. Party who appointed and dissmissed Head of Audit Internal Unit.	340-351
14.	Akuntan Publik Public accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Name and year of the last 5 years where the public accountant conducts financial statements audit; 2. Name and year of the last 5 years where the Public Accounting Firm conducts financial statements audit; 3. The amount offees for each type of service provided by public accountant during last financial year; and 4. Services other than financial statements audit provided by accountant during last financial year Notes: Disclose if other services is not provided	351-353
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description on company's risk management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Information includes, among others: 1. Explanation on risk management system implemented by the company; 2. Explanation on risk management system evaluation; 3. Explanation on risks faced by the company; and 4. Efforts to manage those risks	354-367

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Description regarding Internal Control System	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku Information includes: 1. Brief explanation on internal audit system, including operational and financial control; 2. Explanation of internal audit system conformity with internationally recognized framework (COSO - internal control framework), and 3. Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness.	368-371
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description regarding corporate social responsibility related to natural environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Containing information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and quantitative impact on these activities; and environmental programs related to the company's operational activity, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, the company's waste management system, complaint mechanisms of environmental issues, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others. 3. Certification in the environment field owned	392-395
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Description regarding corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. including information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and quantitative impact on the activities related to employment practices, occupational health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover rate, work-related accident rate, remuneration, complaint mechanism of employment issues, and others	396-400

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Description regarding corporate social responsibility related to social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Including information about: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and the impact of these activities; and 3. Costs incurred related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of surrounding community, repairment of social facilities and infrastructures, other form of donations, communication regarding anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others	401-413
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Description regarding corporate social responsibility related to responsibility to customer	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Including: 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and the impact of those activities related to product responsibility, such as health and safety of customers, product information, facilities, number and countermeasures on consumer complaints, and others	414-425
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Information includes, among others: 1. Description of case/litigation; 2. Case/litigation settlement status; 3. Impacts on company's financial condition; and 4. Administrative sanctions imposed on the company, BoC members, and BoD members by relevant authorities (in capital market, banking, or others) in the last financial year (or statement where sanctions are not imposed) Note: Disclose if company, subsidiaries, BOC, and BOD has no ligitation or legal cases.	373
22.	Akses informasi dan data perusahaan Information Access and corporate data	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description on publicly available access to corporate information and data, for example through website (in Bahasa Indonesia and in English) mass media, mailing list, bul;letin, analyst meeting, and so forth.	376-379

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
23.	Bahasan mengenai kode etik Discussion on Company's Code of Conduct	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Information includes, among others: 1. Code of Conduct content 2. Disclosure that the Code of Conduct's is applicable for all organizational level 3. Code of conduct dissemination 4. Type of sanction for each breach of Code of Conduct 5. Number of code of conduct breach and imposed sanction in last financial year Note: Dislocse if no code of conduct breach occurs in last financial year	371-391
24.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosure on Whistle blowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Description of whistleblowing system mechanism that includes, among others: 1. Grievance procedure 2. Protection for whistleblower 3. Report holding 4. Report management unit, 5. Number of report failed and proccessed in last financial year, and 6. Sanction/follow-up of completed report in financial year. Note: Disclose if there is no completed report in the last financial year.	394-399
25.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Heterogeneity policy in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya Description on company's heterogeneity policy in the composition of BoC and BoD in terms of education background (field of study), professional experience, age, and gender. Note: where such policy is not present, disclose the reasons and considerations	400-401
	VII. Informasi Keuangan / Financial Information		
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Board of Directors and/or Board of Commissioners' statement on Financial Statements Accountability	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with relevant regulations concerning Financial Statements Accountability	426

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on the financial statements		431
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Description on the opinion of Independent auditor's opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. The description should contain: 1. Name and signature 2. Audit Report Date 3. Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number.	432
4.	Laporan keuangan yang lengkap Comprehensive financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Comprehensively discloses all elements in financial statements: 1. Financial position statement 2. Other Comprehensive income and loss statement 3. Equity change statement 4. Cash flows statement 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information about the earlier period 7. Financial position statement at the beginning of period when an entity applies certain accounting policies restropectively or restates certain financial statement accounts, or when an entity reclassifies certain financial statement accounts (where relevant).	433-438
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability ratio comparison	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of current year's profit/loss with previous year.	435
6.	Laporan Arus Kas Cash flow report	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Report has to meet the following rules: 1. Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities. 2. Using direct method to present cash flow from operating activities 3. Separating the presentation between cash received and or cash expenses for operating, investing and financing activities during the year 4. Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes	438

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting policy highlights	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Information includes, at least: 1. Compliance with FAS. 2. Basis of financial statement measurement and preparation 3. Income tax 4. Employment benefits; and 5. Financial Instrument	441-462
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Related party transaction disclosure	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Information includes, among others: 1. Name of the related parties, as well as the nature and relationship therewith 2. Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses. 3. Total outstanding and the percentage to total asset or liabilities	500-502
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosure on any aspects related with Taxes	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Information includes, among others: 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 2. Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income. 3. Statement that Taxable Profit as calculated through reconciliation is used as the basis to fill Tax Return statement. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report. 5. Tax dispute disclosure	482-487

	Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Hal / Pages
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosure on fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Information includes, among others: 1. Method of depreciation 2. Description on adopted accounting policy – revaluation or cost model 3. Method and significant assumptions used to estimate fair value of fixed asset (for revaluation model) or disclosures on fair value of fixed assets (for cost model); and 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and at the end of the period by indicating: addition, reduction, and reclassification	478-480
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosure related to operating segments	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi. closures must include: 1. General information which includes the factors used to identify the reported segments; 2. Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments; 3. Reconciliation of the segments' total revenues, reported segments' profit and loss, assets, liabilities, and other material elements of the segment to the relevant amount within the entity; and 4. Disclosure at entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers.	N/A
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosure regarding Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Disclosure must include: 1. Details of financial instruments and their classification; 2. Fair value and hierarcy for each financial instrument category; 3. Risk Management policy; 4. Explanation on financial instrument inherent risks: market risk, credit risk, and liquidity risk; and 5. Quantitative analysis on each financial instrument inherent risk	465-471
13.	Penerbitan laporan keuangan Issuance of Financial Statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Information includes, among others: 1. Date of financial statements issuance authorization; and 2. Parties responsible to authorize financial statements.	510